PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024





PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3 TAHUN 2025





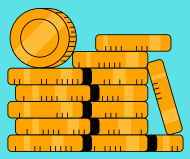

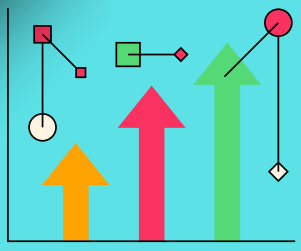

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Telp. 33369 – 21880 – 22183,Fax. 32767

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 3 Tahun 2025

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Diundangkan dalam lembaran daerah Kota Bukittinggi

Nomor 3 Tahun 2025

Tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI

WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Arus Kas;
   f. Laporan perubahan ekuitas; dan
   g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. pendapatan sebesar Rp741.382.079.328,40 (tujuh ratus empat puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh sen);
b. belanja sebesar Rp739.076.479.103,31 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh satu sen);
c. surplus/defisit sebesar surplus Rp2.305.600.225,09 (dua miliar tiga ratus lima juta enam ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah sembilan sen); dan
d. pembiayaan terdiri atas :
   1. penerimaan sebesar Rp33.057.673.164,80 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah delapan puluh sen); dan

2. pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp33.991.397.689,60 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp775.373.477.018,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan belas rupiah);
   2. realisasi sebesar Rp741.382.079.328,40 (tujuh ratus empat puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh sen); dan
   3. selisih sebesar Rp33.991.397.689,60 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh sen),
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp69.354.671.079,69 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp808.431.150.183,00 (delapan ratus delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
   2. realisasi belanja sebesar Rp739.076.479.103,31 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah tiga puluh satu sen); dan
   3. selisih sebesar Rp69.354.671.079,69 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh sembilan sen).
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar surplus Rp35.363.273.389,89 (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :
   1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan sebesar defisit (Rp33.057.673.165,00) (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
   2. realisasi surplus/defisit sebesar surplus Rp2.305.600.225,09 (dua miliar tiga ratus lima juta enam ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah sembilan sen); dan
   3. selisih sebesar surplus Rp35.363.273.389,89 (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen),

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp0,20 (dua puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp33.057.673.165,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
   2. realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp33.057.673.164,80 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah delapan puluh sen); dan
   3. selisih lebih sebesar Rp0,20 (dua puluh sen).

e. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp0,20 (dua puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :
   1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp33.057.673.165,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);
   2. realisasi pembiayaan netto sebesar Rp33.057.673.164,80 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh empat delapan puluh sen); dan
   3. selisih lebih sebesar Rp0,20 (dua puluh sen).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal sebesar Rp33.057.673.164,80 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh empat delapan puluh sen); dan
b. Saldo Anggaran Lebih akhir sebesar Rp35.363.273.389,89 (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan tiga puluh sembilan sen).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. jumlah aset sebesar Rp2.061.791.213.670,66 (dua triliun enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah enam puluh enam sen);
b. jumlah kewajiban sebesar Rp 7.538.674.127,57 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen); dan
c. jumlah ekuitas sebesar Rp 2.054.252.539.543,09 (dua triliun lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah sembilan sen).

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. pendapatan operasional sebesar Rp841.546.027.198,07 (delapan ratus empat puluh satu miliar lima ratus empat puluh

enam juta dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah tujuh sen);

b. beban operasional sebesar Rp778.949.516.230,76 (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah tujuh puluh enam sen);
c. surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar surplus Rp62.596.510.967,31 (enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen);
d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar defisit Rp5.337.791.842,60 (lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah enam puluh sen);
e. surplus/defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
f. surplus/defisit Laporan Operasional sebesar surplus Rp57.258.719.124,71 (lima puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen).

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp33.224.700.728,80 (tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sen);
b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp65.789.422.444,86 (enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh enam sen);
c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar (Rp63.483.822.219,77) (enam puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh tujuh sen);
d. arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar defisit Rp0,00 (nol rupiah); dan
e. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp35.411.517.227,89 (tiga puluh lima miliar empat ratus sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah delapan puluh sembilan sen)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal sebesar Rp2.023.426.461.579,57 (dua triliun dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen);
b. surplus/defisit laporan operasional sebesar surplus Rp57.258.719.124,71 (lima puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus dua

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
   1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
   2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 3

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT (3 /57/2025)

puluh empat rupiah tujuh puluh satu sen);

c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi ekuitas sebesar (Rp26.432.641.161,19)(dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah sembilan belas sen); dan
d. jumlah ekuitas akhir sebesar Rp2.054.252.539.543,09 (dua triliun lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah sembilan sen).

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
1. Lampiran 1.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
2. Lampiran 1.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran 1.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
4. Lampiran 1.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan,
b. Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III	:	Laporan Operasional;
d. Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V	:	Neraca;
f. Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi PiutangDaerah;
i. Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
j. Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k. Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l. Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m. Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah, dimana berdasarkan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan paling sedikit meliputi :
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akutansi pemerintah.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 11

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Rekening	URAIAN	Ref	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	2		3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.1.1**	**775.373.477.018,00**	**741.382.079.328,40**	**95,62**	**706.975.448.172,65**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.1.1.1**	**153.460.514.484,00**	**130.112.097.312,94**	**84,79**	**123.112.709.360,20**
4.1.01	Pajak Daerah	**5.1.1.1.1**	54.110.644.633,00	50.098.130.579,00	92,58	51.690.816.406,00
4.1.02	Retribusi Daerah	**5.1.1.1.2**	74.688.582.055,00	51.629.686.961,72	69,13	39.222.055.481,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**5.1.1.1.3**	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	118,70	8.363.843.874,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	**5.1.1.1.4**	16.353.862.488,00	18.523.395.556,22	113,27	23.835.993.599,20
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		**153.460.514.484,00**	**130.112.097.312,94**	**84,79**	**123.112.709.360,20**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.2**	**621.912.962.534,00**	**611.269.982.015,46**	**98,29**	**583.728.726.369,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**5.1.1.2.1**	569.055.919.679,00	566.436.096.135,00	99,54	554.987.256.154,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**5.1.1.2.2**	52.857.042.855,00	44.833.885.880,46	84,82	28.741.470.215,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG**	**5.1.1.3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.012.443,45**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**5.1.1.3**	0,00	0,00	0,00	134.012.443,45
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.012.443,45**
	JUMLAH PENDAPATAN		**775.373.477.018,00**	**741.382.079.328,40**	**95,62**	**706.975.448.172,65**
5	**BELANJA DAERAH**	**5.1.2**	**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**91,42**	**751.239.962.696,31**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**	**727.886.843.406,00**	**665.946.895.972,54**	**91,49**	**667.764.935.144,91**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	348.366.503.439,32	336.607.731.061,67	96,62	308.535.703.099,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	316.715.324.592,68	272.602.571.149,75	86,07	308.199.944.742,03
5.1.04	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	100,00	2.499.916.363,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	57.105.915.374,00	51.339.007.283,12	89,90	43.676.370.940,88
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	3.199.100.000,00	2.897.600.000,00	90,58	4.853.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI		**727.886.843.406,00**	**665.946.895.972,54**	**91,49**	**667.764.935.144,91**
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**	**69.943.686.777,00**	**63.532.002.219,77**	**90,83**	**74.023.558.551,40**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2	14.576.288.033,00	12.261.224.480,70	84,12	26.111.089.608,47
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2	33.771.313.480,00	31.435.241.904,22	93,08	27.005.206.763,60
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2	19.966.602.364,00	18.357.697.907,85	91,94	19.501.037.779,33
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2	1.429.482.900,00	1.278.037.927,00	89,41	1.406.224.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL		**69.943.686.777,00**	**63.532.002.219,77**	**90,83**	**74.023.558.551,40**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.1.2.3**	**1.000.000.000,00**	**380.911,00**	**0,04**	**849.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	1.000.000.000,00	380.911,00	0,04	849.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		**1.000.000.000,00**	**380.911,00**	**0,04**	**849.000,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**5.1.2.4**	**9.600.620.000,00**	**9.597.200.000,00**	**99,96**	**9.450.620.000,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	99,96	9.450.620.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER		**9.600.620.000,00**	**9.597.200.000,00**	**99,96**	**9.450.620.000,00**
	JUMLAH BELANJA		**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**91,42**	**751.239.962.696,31**
	SURPLUS/DEFISIT	**5.1.2.5**	**(33.057.673.165,00)**	**2.305.600.225,09**	**(6,97)**	**(44.264.514.523,66)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**5.1.3**	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**100,00**	**77.322.187.688,46**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.3.1**	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**100,00**	**77.322.187.688,46**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	100,00	77.322.187.688,46
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**100,00**	**77.322.187.688,46**
	PEMBIAYAAN NETTO		**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**100,00**	**77.322.187.688,46**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		**0,00**	**35.363.273.389,89**	**0,00**	**33.057.673.164,80**

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN I.1
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KOTA BUKITTINGGI

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	**PENDAPATAN**	**775.373.477.018,00**	**741.382.079.328,40**	**(33.991.397.689,60)**	**95,62**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**17.825.787.055,00**	**19.983.215.999,68**	**2.157.428.944,68**	**112,10**
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**16.865.787.055,00**	**19.084.179.247,68**	**2.218.392.192,68**	**113,15**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	16.865.787.055,00	19.084.179.247,68	2.218.392.192,68	113,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	16.865.787.055,00	19.084.179.247,68	2.218.392.192,68	113,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.865.787.055,00	19.084.179.247,68	2.218.392.192,68	113,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	16.865.787.055,00	19.044.995.914,72	2.179.208.859,72	112,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	39.183.332,96	39.183.332,96	0,00
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**820.000.000,00**	**771.536.752,00**	**(48.463.248,00)**	**94,09**
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	820.000.000,00	771.536.752,00	(48.463.248,00)	94,09
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	820.000.000,00	771.536.752,00	(48.463.248,00)	94,09
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	820.000.000,00	771.536.752,00	(48.463.248,00)	94,09
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	820.000.000,00	771.536.752,00	(48.463.248,00)	94,09
1.04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**140.000.000,00**	**127.500.000,00**	**(12.500.000,00)**	**91,07**
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	140.000.000,00	127.500.000,00	(12.500.000,00)	91,07
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	140.000.000,00	127.500.000,00	(12.500.000,00)	91,07
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.000.000,00	127.500.000,00	(12.500.000,00)	91,07
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	140.000.000,00	127.500.000,00	(12.500.000,00)	91,07
2			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**6.540.860.000,00**	**3.970.517.955,00**	**(2.570.342.045,00)**	**60,70**
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**590.860.000,00**	**590.985.955,00**	**125.955,00**	**100,02**
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000		Dinas Pertanian dan Pangan	590.860.000,00	590.985.955,00	125.955,00	100,02

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	590.860.000,00	590.985.955,00	125.955,00	100,02
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	590.860.000,00	590.985.955,00	125.955,00	100,02
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	590.860.000,00	590.985.955,00	125.955,00	100,02
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**2.050.000.000,00**	**1.647.799.500,00**	**(402.200.500,00)**	**80,38**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	2.050.000.000,00	1.647.799.500,00	(402.200.500,00)	80,38
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.050.000.000,00	1.647.799.500,00	(402.200.500,00)	80,38
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.050.000.000,00	1.647.799.500,00	(402.200.500,00)	80,38
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.050.000.000,00	1.647.799.500,00	(402.200.500,00)	80,38
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**3.750.000.000,00**	**1.617.770.000,00**	**(2.132.230.000,00)**	**43,14**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	3.750.000.000,00	1.617.770.000,00	(2.132.230.000,00)	43,14
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	3.750.000.000,00	1.617.770.000,00	(2.132.230.000,00)	43,14
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.750.000.000,00	1.617.770.000,00	(2.132.230.000,00)	43,14
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	3.750.000.000,00	1.617.770.000,00	(2.132.230.000,00)	43,14
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**150.000.000,00**	**113.962.500,00**	**(36.037.500,00)**	**75,98**
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemuda dan Olahraga	150.000.000,00	113.962.500,00	(36.037.500,00)	75,98
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	150.000.000,00	113.962.500,00	(36.037.500,00)	75,98
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00	113.962.500,00	(36.037.500,00)	75,98
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	113.962.500,00	(36.037.500,00)	75,98
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**50.196.935.000,00**	**27.741.760.299,00**	**(22.455.174.701,00)**	**55,27**
3.26			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**30.000.000.000,00**	**17.728.894.310,00**	**(12.271.105.690,00)**	**59,10**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	30.000.000.000,00	17.728.894.310,00	(12.271.105.690,00)	59,10
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	30.000.000.000,00	17.728.894.310,00	(12.271.105.690,00)	59,10
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.000.000.000,00	17.728.894.310,00	(12.271.105.690,00)	59,10
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	30.000.000.000,00	17.728.894.310,00	(12.271.105.690,00)	59,10
3.30			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**20.196.935.000,00**	**10.012.865.989,00**	**(10.184.069.011,00)**	**49,58**
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20.196.935.000,00	10.012.865.989,00	(10.184.069.011,00)	49,58
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	20.196.935.000,00	10.012.865.989,00	(10.184.069.011,00)	49,58
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.196.935.000,00	10.012.865.989,00	(10.184.069.011,00)	49,58
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	20.196.935.000,00	9.909.663.900,00	(10.287.271.100,00)	49,07
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	103.202.089,00	103.202.089,00	0,00
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**700.809.894.963,00**	**689.686.585.074,72**	**(11.123.309.888,28)**	**98,41**
5.02			**KEUANGAN**	**700.809.894.963,00**	**689.686.585.074,72**	**(11.123.309.888,28)**	**98,41**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan	700.809.894.963,00	689.686.585.074,72	(11.123.309.888,28)	98,41
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	700.809.894.963,00	689.686.585.074,72	(11.123.309.888,28)	98,41
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78.896.932.429,00	78.416.603.059,26	(480.329.369,74)	99,39
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.01	Pajak Daerah	54.110.644.633,00	50.098.130.579,00	(4.012.514.054,00)	92,58
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	125.000.000,00	76.578.130,00	(48.421.870,00)	61,26
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	1.553.458.908,00	118,70

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.353.862.488,00	18.381.010.134,26	2.027.147.646,26	112,40
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	621.912.962.534,00	611.269.982.015,46	(10.642.980.518,54)	98,29
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569.055.919.679,00	566.436.096.135,00	(2.619.823.544,00)	99,54
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.857.042.855,00	44.833.885.880,46	(8.023.156.974,54)	84,82
		5	**Belanja**	**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**(69.354.671.079,69)**	**91,42**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**396.557.736.573,00**	**373.938.134.924,54**	**(22.619.601.648,46)**	**94,30**
1.01			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**176.077.459.140,00**	**170.828.725.962,34**	**(5.248.733.177,66)**	**97,02**
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	158.430.302.644,00	153.401.032.529,34	(5.029.270.114,66)	96,83
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	158.430.302.644,00	153.401.032.529,34	(5.029.270.114,66)	96,83
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	146.446.470.044,00	142.738.075.212,03	(3.708.394.831,97)	97,47
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	113.242.907.144,00	112.608.530.434,00	(634.376.710,00)	99,44
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.485.222.900,00	19.315.215.537,03	(1.170.007.362,97)	94,29
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	12.327.340.000,00	10.724.829.241,00	(1.602.510.759,00)	87,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	391.000.000,00	89.500.000,00	(301.500.000,00)	22,89
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	11.983.832.600,00	10.662.957.317,31	(1.320.875.282,69)	88,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.482.156.600,00	973.909.156,70	(508.247.443,30)	65,71
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.501.676.000,00	9.689.048.160,61	(812.627.839,39)	92,26
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0001		SDN 01 Campago Ipuh	161.794.177,00	156.802.600,00	(4.991.577,00)	96,91
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	161.794.177,00	156.802.600,00	(4.991.577,00)	96,91
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	147.794.177,00	142.802.600,00	(4.991.577,00)	96,62
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.794.177,00	142.802.600,00	(4.991.577,00)	96,62
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.02		SDN 02 Campago Guguk Bulek	158.036.605,00	157.990.861,00	(45.744,00)	99,97
1.01	1.01.2.22.0.00.01.02	5	BELANJA DAERAH	158.036.605,00	157.990.861,00	(45.744,00)	99,97
1.01	1.01.2.22.0.00.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	122.584.779,00	122.539.035,00	(45.744,00)	99,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.584.779,00	122.539.035,00	(45.744,00)	99,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.02	5.2	BELANJA MODAL	35.451.826,00	35.451.826,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.02	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.801.826,00	34.801.826,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.02	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.03		SDN 03 Pulai Anak Air	139.185.907,00	139.019.961,00	(165.946,00)	99,88
1.01	1.01.2.22.0.00.01.03	5	BELANJA DAERAH	139.185.907,00	139.019.961,00	(165.946,00)	99,88
1.01	1.01.2.22.0.00.01.03	5.1	BELANJA OPERASI	121.199.657,00	121.058.211,00	(141.446,00)	99,88
1.01	1.01.2.22.0.00.01.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.199.657,00	121.058.211,00	(141.446,00)	99,88
1.01	1.01.2.22.0.00.01.03	5.2	BELANJA MODAL	17.986.250,00	17.961.750,00	(24.500,00)	99,86
1.01	1.01.2.22.0.00.01.03	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.986.250,00	17.961.750,00	(24.500,00)	99,86
1.01	1.01.2.22.0.00.01.04		SDN 04 Garegeh	336.676.421,00	314.360.687,00	(22.315.734,00)	93,37
1.01	1.01.2.22.0.00.01.04	5	BELANJA DAERAH	336.676.421,00	314.360.687,00	(22.315.734,00)	93,37

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.2.22.0.00.01.04	5.1	BELANJA OPERASI	287.626.421,00	265.625.687,00	(22.000.734,00)	92,35
1.01	1.01.2.22.0.00.01.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.626.421,00	265.625.687,00	(22.000.734,00)	92,35
1.01	1.01.2.22.0.00.01.04	5.2	BELANJA MODAL	49.050.000,00	48.735.000,00	(315.000,00)	99,36
1.01	1.01.2.22.0.00.01.04	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.050.000,00	48.735.000,00	(315.000,00)	99,36
1.01	1.01.2.22.0.00.01.05		SDN 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun	232.596.215,00	229.445.980,00	(3.150.235,00)	98,65
1.01	1.01.2.22.0.00.01.05	5	BELANJA DAERAH	232.596.215,00	229.445.980,00	(3.150.235,00)	98,65
1.01	1.01.2.22.0.00.01.05	5.1	BELANJA OPERASI	219.426.215,00	219.396.015,00	(30.200,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.426.215,00	219.396.015,00	(30.200,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.05	5.2	BELANJA MODAL	13.170.000,00	10.049.965,00	(3.120.035,00)	76,31
1.01	1.01.2.22.0.00.01.05	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.170.000,00	10.049.965,00	(3.120.035,00)	76,31
1.01	1.01.2.22.0.00.01.06		SDN 06 Pulai Anak Air	150.050.000,00	149.025.668,00	(1.024.332,00)	99,32
1.01	1.01.2.22.0.00.01.06	5	BELANJA DAERAH	150.050.000,00	149.025.668,00	(1.024.332,00)	99,32
1.01	1.01.2.22.0.00.01.06	5.1	BELANJA OPERASI	120.010.000,00	119.333.168,00	(676.832,00)	99,44
1.01	1.01.2.22.0.00.01.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.010.000,00	119.333.168,00	(676.832,00)	99,44
1.01	1.01.2.22.0.00.01.06	5.2	BELANJA MODAL	30.040.000,00	29.692.500,00	(347.500,00)	98,84
1.01	1.01.2.22.0.00.01.06	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.040.000,00	29.692.500,00	(347.500,00)	98,84
1.01	1.01.2.22.0.00.01.07		SDN 07 Kubu Gulai Bancah	264.346.296,00	263.204.784,00	(1.141.512,00)	99,57
1.01	1.01.2.22.0.00.01.07	5	BELANJA DAERAH	264.346.296,00	263.204.784,00	(1.141.512,00)	99,57
1.01	1.01.2.22.0.00.01.07	5.1	BELANJA OPERASI	198.546.296,00	198.537.117,00	(9.179,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.07	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.546.296,00	198.537.117,00	(9.179,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.07	5.2	BELANJA MODAL	65.800.000,00	64.667.667,00	(1.132.333,00)	98,28
1.01	1.01.2.22.0.00.01.07	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.800.000,00	61.864.340,00	(935.660,00)	98,51
1.01	1.01.2.22.0.00.01.07	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	2.803.327,00	(196.673,00)	93,44
1.01	1.01.2.22.0.00.01.08		SDN 08 Campago Ipuh	120.069.589,00	99.583.454,00	(20.486.135,00)	82,94
1.01	1.01.2.22.0.00.01.08	5	BELANJA DAERAH	120.069.589,00	99.583.454,00	(20.486.135,00)	82,94
1.01	1.01.2.22.0.00.01.08	5.1	BELANJA OPERASI	100.069.589,00	99.583.454,00	(486.135,00)	99,51
1.01	1.01.2.22.0.00.01.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.069.589,00	99.583.454,00	(486.135,00)	99,51
1.01	1.01.2.22.0.00.01.08	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.08	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.09		SDN 09 Manggis Ganting	189.077.432,00	187.524.853,00	(1.552.579,00)	99,18
1.01	1.01.2.22.0.00.01.09	5	BELANJA DAERAH	189.077.432,00	187.524.853,00	(1.552.579,00)	99,18
1.01	1.01.2.22.0.00.01.09	5.1	BELANJA OPERASI	172.077.432,00	170.524.853,00	(1.552.579,00)	99,10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.09	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.077.432,00	170.524.853,00	(1.552.579,00)	99,10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.09	5.2	BELANJA MODAL	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.09	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.10		SDN 10 Puhun Pintu Kabun	136.770.770,00	136.770.770,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.10	5	BELANJA DAERAH	136.770.770,00	136.770.770,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.10	5.1	BELANJA OPERASI	121.770.770,00	121.770.770,00	0,00	100,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.2.22.0.00.01.10	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.770.770,00	121.770.770,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.10	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.10	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.11		SDN 11 Campago Guguk Bulek	181.734.310,00	181.708.702,00	(25.608,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.11	5	BELANJA DAERAH	181.734.310,00	181.708.702,00	(25.608,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.11	5.1	BELANJA OPERASI	144.324.310,00	144.299.602,00	(24.708,00)	99,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.11	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.324.310,00	144.299.602,00	(24.708,00)	99,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.11	5.2	BELANJA MODAL	37.410.000,00	37.409.100,00	(900,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.11	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.410.000,00	37.409.100,00	(900,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.12		SDN 12 Puhun Pintu Kabun	109.726.831,00	109.713.514,00	(13.317,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.12	5	BELANJA DAERAH	109.726.831,00	109.713.514,00	(13.317,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.12	5.1	BELANJA OPERASI	96.726.831,00	96.713.514,00	(13.317,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.12	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.726.831,00	96.713.514,00	(13.317,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.12	5.2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.12	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.13		SDN 13 Kubu Gulai Bancah	99.189.087,00	99.174.450,00	(14.637,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.13	5	BELANJA DAERAH	99.189.087,00	99.174.450,00	(14.637,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.13	5.1	BELANJA OPERASI	78.189.087,00	78.188.450,00	(637,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.13	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.189.087,00	78.188.450,00	(637,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.13	5.2	BELANJA MODAL	21.000.000,00	20.986.000,00	(14.000,00)	99,93
1.01	1.01.2.22.0.00.01.13	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	20.986.000,00	(14.000,00)	99,93
1.01	1.01.2.22.0.00.01.14		SDN 14 Tanjung Alam	37.180.000,00	0,00	(37.180.000,00)	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.14	5	BELANJA DAERAH	37.180.000,00	0,00	(37.180.000,00)	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.14	5.1	BELANJA OPERASI	37.180.000,00	0,00	(37.180.000,00)	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.14	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.180.000,00	0,00	(37.180.000,00)	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.15		SDN 15 Pulai Anak Air	169.903.212,00	169.878.275,00	(24.937,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.15	5	BELANJA DAERAH	169.903.212,00	169.878.275,00	(24.937,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.15	5.1	BELANJA OPERASI	162.953.212,00	162.928.275,00	(24.937,00)	99,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.15	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.953.212,00	162.928.275,00	(24.937,00)	99,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.15	5.2	BELANJA MODAL	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.15	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.16		SDN 16 Campago Ipuh	142.793.252,00	142.767.971,00	(25.281,00)	99,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.16	5	BELANJA DAERAH	142.793.252,00	142.767.971,00	(25.281,00)	99,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.16	5.1	BELANJA OPERASI	127.593.252,00	127.567.971,00	(25.281,00)	99,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.16	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.593.252,00	127.567.971,00	(25.281,00)	99,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.16	5.2	BELANJA MODAL	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.16	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.17		SDN 17 Manggis Ganting	124.654.797,00	124.564.550,00	(90.247,00)	99,93

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.2.22.0.00.01.17	5	BELANJA DAERAH	124.654.797,00	124.564.550,00	(90.247,00)	99,93
1.01	1.01.2.22.0.00.01.17	5.1	BELANJA OPERASI	100.154.797,00	100.151.550,00	(3.247,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.17	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.154.797,00	100.151.550,00	(3.247,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.17	5.2	BELANJA MODAL	24.500.000,00	24.413.000,00	(87.000,00)	99,64
1.01	1.01.2.22.0.00.01.17	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.500.000,00	24.413.000,00	(87.000,00)	99,64
1.01	1.01.2.22.0.00.01.18		SDN 18 Campago Guguk Bulek	141.085.265,00	141.045.718,00	(39.547,00)	99,97
1.01	1.01.2.22.0.00.01.18	5	BELANJA DAERAH	141.085.265,00	141.045.718,00	(39.547,00)	99,97
1.01	1.01.2.22.0.00.01.18	5.1	BELANJA OPERASI	132.299.572,00	132.260.025,00	(39.547,00)	99,97
1.01	1.01.2.22.0.00.01.18	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.299.572,00	132.260.025,00	(39.547,00)	99,97
1.01	1.01.2.22.0.00.01.18	5.2	BELANJA MODAL	8.785.693,00	8.785.693,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.18	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.785.693,00	8.785.693,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.19		SDN 01 Benteng Pasar Atas	517.132.810,00	508.891.346,00	(8.241.464,00)	98,41
1.01	1.01.2.22.0.00.01.19	5	BELANJA DAERAH	517.132.810,00	508.891.346,00	(8.241.464,00)	98,41
1.01	1.01.2.22.0.00.01.19	5.1	BELANJA OPERASI	387.630.310,00	379.698.846,00	(7.931.464,00)	97,95
1.01	1.01.2.22.0.00.01.19	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.630.310,00	379.698.846,00	(7.931.464,00)	97,95
1.01	1.01.2.22.0.00.01.19	5.2	BELANJA MODAL	129.502.500,00	129.192.500,00	(310.000,00)	99,76
1.01	1.01.2.22.0.00.01.19	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.674.500,00	45.366.500,00	(308.000,00)	99,33
1.01	1.01.2.22.0.00.01.19	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	83.828.000,00	83.826.000,00	(2.000,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.20		SDN 02 Percontohan Kayu Kubu	537.853.829,00	534.808.552,00	(3.045.277,00)	99,43
1.01	1.01.2.22.0.00.01.20	5	BELANJA DAERAH	537.853.829,00	534.808.552,00	(3.045.277,00)	99,43
1.01	1.01.2.22.0.00.01.20	5.1	BELANJA OPERASI	507.353.829,00	504.308.552,00	(3.045.277,00)	99,40
1.01	1.01.2.22.0.00.01.20	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.353.829,00	504.308.552,00	(3.045.277,00)	99,40
1.01	1.01.2.22.0.00.01.20	5.2	BELANJA MODAL	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.20	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.21		SDN 03 Pakan Kurai	454.580.561,00	449.499.866,00	(5.080.695,00)	98,88
1.01	1.01.2.22.0.00.01.21	5	BELANJA DAERAH	454.580.561,00	449.499.866,00	(5.080.695,00)	98,88
1.01	1.01.2.22.0.00.01.21	5.1	BELANJA OPERASI	419.845.561,00	419.614.866,00	(230.695,00)	99,95
1.01	1.01.2.22.0.00.01.21	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.845.561,00	419.614.866,00	(230.695,00)	99,95
1.01	1.01.2.22.0.00.01.21	5.2	BELANJA MODAL	34.735.000,00	29.885.000,00	(4.850.000,00)	86,04
1.01	1.01.2.22.0.00.01.21	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.735.000,00	29.885.000,00	(4.850.000,00)	86,04
1.01	1.01.2.22.0.00.01.22		SDN 04 Bukit Apit Puhun	107.566.314,00	107.566.314,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.22	5	BELANJA DAERAH	107.566.314,00	107.566.314,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.22	5.1	BELANJA OPERASI	94.266.314,00	94.266.314,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.22	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.266.314,00	94.266.314,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.22	5.2	BELANJA MODAL	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.22	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.23		SDN 05 Tarok Dipo	166.744.594,00	160.691.920,00	(6.052.674,00)	96,37
1.01	1.01.2.22.0.00.01.23	5	BELANJA DAERAH	166.744.594,00	160.691.920,00	(6.052.674,00)	96,37

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.2.22.0.00.01.23	5.1	BELANJA OPERASI	137.780.594,00	137.727.920,00	(52.674,00)	99,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.23	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.780.594,00	137.727.920,00	(52.674,00)	99,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.23	5.2	BELANJA MODAL	28.964.000,00	22.964.000,00	(6.000.000,00)	79,28
1.01	1.01.2.22.0.00.01.23	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.861.000,00	20.861.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.23	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.103.000,00	2.103.000,00	(6.000.000,00)	25,95
1.01	1.01.2.22.0.00.01.24		SDN 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah	153.382.608,00	153.380.654,00	(1.954,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.24	5	BELANJA DAERAH	153.382.608,00	153.380.654,00	(1.954,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.24	5.1	BELANJA OPERASI	124.272.608,00	124.270.654,00	(1.954,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.24	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.272.608,00	124.270.654,00	(1.954,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.24	5.2	BELANJA MODAL	29.110.000,00	29.110.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.24	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.485.000,00	21.485.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.24	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.25		SDN 07 Teladan Bukit Cangang	315.782.300,00	314.689.618,00	(1.092.682,00)	99,65
1.01	1.01.2.22.0.00.01.25	5	BELANJA DAERAH	315.782.300,00	314.689.618,00	(1.092.682,00)	99,65
1.01	1.01.2.22.0.00.01.25	5.1	BELANJA OPERASI	278.182.300,00	277.093.189,00	(1.089.111,00)	99,61
1.01	1.01.2.22.0.00.01.25	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.182.300,00	277.093.189,00	(1.089.111,00)	99,61
1.01	1.01.2.22.0.00.01.25	5.2	BELANJA MODAL	37.600.000,00	37.596.429,00	(3.571,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.25	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.600.000,00	37.596.429,00	(3.571,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.26		SDN 08 Tarok Dipo	335.569.875,00	334.914.283,00	(655.592,00)	99,80
1.01	1.01.2.22.0.00.01.26	5	BELANJA DAERAH	335.569.875,00	334.914.283,00	(655.592,00)	99,80
1.01	1.01.2.22.0.00.01.26	5.1	BELANJA OPERASI	262.769.875,00	262.114.284,00	(655.591,00)	99,75
1.01	1.01.2.22.0.00.01.26	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.769.875,00	262.114.284,00	(655.591,00)	99,75
1.01	1.01.2.22.0.00.01.26	5.2	BELANJA MODAL	72.800.000,00	72.799.999,00	(1,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.26	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.600.000,00	56.599.999,00	(1,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.26	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.27		SDN 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah	170.024.262,00	170.023.875,00	(387,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.27	5	BELANJA DAERAH	170.024.262,00	170.023.875,00	(387,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.27	5.1	BELANJA OPERASI	139.799.262,00	139.798.875,00	(387,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.27	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.799.262,00	139.798.875,00	(387,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.27	5.2	BELANJA MODAL	30.225.000,00	30.225.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.27	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.225.000,00	30.225.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.28		SDN 11 Bukit Apit Puhun	145.896.938,00	142.994.669,00	(2.902.269,00)	98,01
1.01	1.01.2.22.0.00.01.28	5	BELANJA DAERAH	145.896.938,00	142.994.669,00	(2.902.269,00)	98,01
1.01	1.01.2.22.0.00.01.28	5.1	BELANJA OPERASI	126.896.938,00	124.180.599,00	(2.716.339,00)	97,86
1.01	1.01.2.22.0.00.01.28	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.896.938,00	124.180.599,00	(2.716.339,00)	97,86
1.01	1.01.2.22.0.00.01.28	5.2	BELANJA MODAL	19.000.000,00	18.814.070,00	(185.930,00)	99,02
1.01	1.01.2.22.0.00.01.28	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	18.814.070,00	(185.930,00)	99,02
1.01	1.01.2.22.0.00.01.29		SDN 12 Bukit Cangang	115.219.758,00	115.215.710,00	(4.048,00)	100,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.2.22.0.00.01.29	5	BELANJA DAERAH	115.219.758,00	115.215.710,00	(4.048,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.29	5.1	BELANJA OPERASI	113.319.758,00	113.315.710,00	(4.048,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.29	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.319.758,00	113.315.710,00	(4.048,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.29	5.2	BELANJA MODAL	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.29	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.30		SDN 13 Bukit Apit Puhun	153.331.568,00	153.306.568,00	(25.000,00)	99,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.30	5	BELANJA DAERAH	153.331.568,00	153.306.568,00	(25.000,00)	99,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.30	5.1	BELANJA OPERASI	138.996.568,00	138.971.568,00	(25.000,00)	99,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.30	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.996.568,00	138.971.568,00	(25.000,00)	99,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.30	5.2	BELANJA MODAL	14.335.000,00	14.335.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.30	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.335.000,00	14.335.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.31		SDN 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah	354.420.577,00	353.244.460,00	(1.176.117,00)	99,67
1.01	1.01.2.22.0.00.01.31	5	BELANJA DAERAH	354.420.577,00	353.244.460,00	(1.176.117,00)	99,67
1.01	1.01.2.22.0.00.01.31	5.1	BELANJA OPERASI	294.636.577,00	293.460.460,00	(1.176.117,00)	99,60
1.01	1.01.2.22.0.00.01.31	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.636.577,00	293.460.460,00	(1.176.117,00)	99,60
1.01	1.01.2.22.0.00.01.31	5.2	BELANJA MODAL	59.784.000,00	59.784.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.31	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.784.000,00	59.784.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.32		SDN 16 Tarok Dipo	309.676.940,00	309.566.020,00	(110.920,00)	99,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.32	5	BELANJA DAERAH	309.676.940,00	309.566.020,00	(110.920,00)	99,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.32	5.1	BELANJA OPERASI	252.561.940,00	252.451.770,00	(110.170,00)	99,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.32	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.561.940,00	252.451.770,00	(110.170,00)	99,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.32	5.2	BELANJA MODAL	57.115.000,00	57.114.250,00	(750,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.32	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.115.000,00	57.114.250,00	(750,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.33		SDN 17 Pakan Kurai	275.220.000,00	275.219.969,00	(31,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.33	5	BELANJA DAERAH	275.220.000,00	275.219.969,00	(31,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.33	5.1	BELANJA OPERASI	248.836.000,00	248.836.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.33	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.836.000,00	248.836.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.33	5.2	BELANJA MODAL	26.384.000,00	26.383.969,00	(31,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.33	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.384.000,00	26.383.969,00	(31,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.34		SDN 18 Tarok Dipo	125.168.204,00	125.133.370,00	(34.834,00)	99,97
1.01	1.01.2.22.0.00.01.34	5	BELANJA DAERAH	125.168.204,00	125.133.370,00	(34.834,00)	99,97
1.01	1.01.2.22.0.00.01.34	5.1	BELANJA OPERASI	119.947.204,00	119.912.370,00	(34.834,00)	99,97
1.01	1.01.2.22.0.00.01.34	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.947.204,00	119.912.370,00	(34.834,00)	99,97
1.01	1.01.2.22.0.00.01.34	5.2	BELANJA MODAL	5.221.000,00	5.221.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.34	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.221.000,00	5.221.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.35		SDN 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah	140.351.252,00	140.351.156,00	(96,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.35	5	BELANJA DAERAH	140.351.252,00	140.351.156,00	(96,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.35	5.1	BELANJA OPERASI	114.551.252,00	114.551.156,00	(96,00)	100,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.2.22.0.00.01.35	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.551.252,00	114.551.156,00	(96,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.35	5.2	BELANJA MODAL	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.35	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.36		SDN 01 Ladang Cakiah	191.338.110,00	191.337.738,00	(372,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.36	5	BELANJA DAERAH	191.338.110,00	191.337.738,00	(372,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.36	5.1	BELANJA OPERASI	168.048.111,00	168.047.739,00	(372,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.36	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.048.111,00	168.047.739,00	(372,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.36	5.2	BELANJA MODAL	23.289.999,00	23.289.999,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.36	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.289.999,00	23.289.999,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.37		SDN 02 Aur Kuning	356.265.811,00	352.737.738,00	(3.528.073,00)	99,01
1.01	1.01.2.22.0.00.01.37	5	BELANJA DAERAH	356.265.811,00	352.737.738,00	(3.528.073,00)	99,01
1.01	1.01.2.22.0.00.01.37	5.1	BELANJA OPERASI	260.865.811,00	260.618.738,00	(247.073,00)	99,91
1.01	1.01.2.22.0.00.01.37	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.865.811,00	260.618.738,00	(247.073,00)	99,91
1.01	1.01.2.22.0.00.01.37	5.2	BELANJA MODAL	95.400.000,00	92.119.000,00	(3.281.000,00)	96,56
1.01	1.01.2.22.0.00.01.37	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.000.000,00	78.750.000,00	(3.250.000,00)	96,04
1.01	1.01.2.22.0.00.01.37	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.400.000,00	13.369.000,00	(31.000,00)	99,77
1.01	1.01.2.22.0.00.01.38		SDN 03 Pakan Labuah	354.834.627,00	354.834.315,00	(312,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.38	5	BELANJA DAERAH	354.834.627,00	354.834.315,00	(312,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.38	5.1	BELANJA OPERASI	319.334.627,00	319.334.315,00	(312,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.38	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.334.627,00	319.334.315,00	(312,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.38	5.2	BELANJA MODAL	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.38	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.39		SDN 04 Birugo	544.670.411,00	540.389.411,00	(4.281.000,00)	99,21
1.01	1.01.2.22.0.00.01.39	5	BELANJA DAERAH	544.670.411,00	540.389.411,00	(4.281.000,00)	99,21
1.01	1.01.2.22.0.00.01.39	5.1	BELANJA OPERASI	447.458.411,00	447.458.411,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.39	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.458.411,00	447.458.411,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.39	5.2	BELANJA MODAL	97.212.000,00	92.931.000,00	(4.281.000,00)	95,60
1.01	1.01.2.22.0.00.01.39	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.39	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	58.312.000,00	54.031.000,00	(4.281.000,00)	92,66
1.01	1.01.2.22.0.00.01.40		SDN 05 Birugo	126.970.679,00	126.663.005,00	(307.674,00)	99,76
1.01	1.01.2.22.0.00.01.40	5	BELANJA DAERAH	126.970.679,00	126.663.005,00	(307.674,00)	99,76
1.01	1.01.2.22.0.00.01.40	5.1	BELANJA OPERASI	120.970.679,00	120.947.690,00	(22.989,00)	99,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.40	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.970.679,00	120.947.690,00	(22.989,00)	99,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.40	5.2	BELANJA MODAL	6.000.000,00	5.715.315,00	(284.685,00)	95,26
1.01	1.01.2.22.0.00.01.40	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	5.715.315,00	(284.685,00)	95,26
1.01	1.01.2.22.0.00.01.41		SDN 06 Parit Antang	128.189.502,00	128.189.492,00	(10,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.41	5	BELANJA DAERAH	128.189.502,00	128.189.492,00	(10,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.41	5.1	BELANJA OPERASI	112.689.502,00	112.689.492,00	(10,00)	100,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.2.22.0.00.01.41	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.689.502,00	112.689.492,00	(10,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.41	5.2	BELANJA MODAL	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.41	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.42		SDN 07 Belakang Balok	224.189.174,00	224.100.974,00	(88.200,00)	99,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.42	5	BELANJA DAERAH	224.189.174,00	224.100.974,00	(88.200,00)	99,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.42	5.1	BELANJA OPERASI	191.889.174,00	191.800.974,00	(88.200,00)	99,95
1.01	1.01.2.22.0.00.01.42	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.889.174,00	191.800.974,00	(88.200,00)	99,95
1.01	1.01.2.22.0.00.01.42	5.2	BELANJA MODAL	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.42	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.43		SDN 08 Kubu Tanjung	180.527.874,00	176.677.014,00	(3.850.860,00)	97,87
1.01	1.01.2.22.0.00.01.43	5	BELANJA DAERAH	180.527.874,00	176.677.014,00	(3.850.860,00)	97,87
1.01	1.01.2.22.0.00.01.43	5.1	BELANJA OPERASI	128.067.874,00	124.217.014,00	(3.850.860,00)	96,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.43	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.067.874,00	124.217.014,00	(3.850.860,00)	96,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.43	5.2	BELANJA MODAL	52.460.000,00	52.460.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.43	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.460.000,00	52.460.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.44		SDN 09 Belakang Balok	233.570.000,00	233.569.968,00	(32,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.44	5	BELANJA DAERAH	233.570.000,00	233.569.968,00	(32,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.44	5.1	BELANJA OPERASI	202.580.002,00	202.579.970,00	(32,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.44	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.580.002,00	202.579.970,00	(32,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.44	5.2	BELANJA MODAL	30.989.998,00	30.989.998,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.44	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.989.998,00	28.989.998,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.44	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.45		SDN 10 Sapiran	312.917.852,00	312.462.423,00	(455.429,00)	99,85
1.01	1.01.2.22.0.00.01.45	5	BELANJA DAERAH	312.917.852,00	312.462.423,00	(455.429,00)	99,85
1.01	1.01.2.22.0.00.01.45	5.1	BELANJA OPERASI	226.073.852,00	225.744.423,00	(329.429,00)	99,85
1.01	1.01.2.22.0.00.01.45	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.073.852,00	225.744.423,00	(329.429,00)	99,85
1.01	1.01.2.22.0.00.01.45	5.2	BELANJA MODAL	86.844.000,00	86.718.000,00	(126.000,00)	99,85
1.01	1.01.2.22.0.00.01.45	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.500.000,00	72.374.000,00	(126.000,00)	99,83
1.01	1.01.2.22.0.00.01.45	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.344.000,00	14.344.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.46		SDN 11 Aur Kuning	168.367.953,00	159.921.283,00	(8.446.670,00)	94,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.46	5	BELANJA DAERAH	168.367.953,00	159.921.283,00	(8.446.670,00)	94,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.46	5.1	BELANJA OPERASI	143.567.953,00	135.161.283,00	(8.406.670,00)	94,14
1.01	1.01.2.22.0.00.01.46	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.567.953,00	135.161.283,00	(8.406.670,00)	94,14
1.01	1.01.2.22.0.00.01.46	5.2	BELANJA MODAL	24.800.000,00	24.760.000,00	(40.000,00)	99,84
1.01	1.01.2.22.0.00.01.46	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.800.000,00	24.760.000,00	(40.000,00)	99,84
1.01	1.01.2.22.0.00.01.48		SMPN 1	916.223.409,00	890.373.636,00	(25.849.773,00)	97,18
1.01	1.01.2.22.0.00.01.48	5	BELANJA DAERAH	916.223.409,00	890.373.636,00	(25.849.773,00)	97,18
1.01	1.01.2.22.0.00.01.48	5.1	BELANJA OPERASI	705.882.709,00	701.991.536,00	(3.891.173,00)	99,45

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.2.22.0.00.01.48	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	705.882.709,00	701.991.536,00	(3.891.173,00)	99,45
1.01	1.01.2.22.0.00.01.48	5.2	BELANJA MODAL	210.340.700,00	188.382.100,00	(21.958.600,00)	89,56
1.01	1.01.2.22.0.00.01.48	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.400.000,00	38.441.400,00	(21.958.600,00)	63,64
1.01	1.01.2.22.0.00.01.48	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	149.940.700,00	149.940.700,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.49		SMPN 2	1.281.804.921,00	1.268.985.202,00	(12.819.719,00)	99,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.49	5	BELANJA DAERAH	1.281.804.921,00	1.268.985.202,00	(12.819.719,00)	99,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.49	5.1	BELANJA OPERASI	859.552.221,00	859.235.602,00	(316.619,00)	99,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.49	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	859.552.221,00	859.235.602,00	(316.619,00)	99,96
1.01	1.01.2.22.0.00.01.49	5.2	BELANJA MODAL	422.252.700,00	409.749.600,00	(12.503.100,00)	97,04
1.01	1.01.2.22.0.00.01.49	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.144.900,00	208.641.800,00	(12.503.100,00)	94,35
1.01	1.01.2.22.0.00.01.49	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	201.107.800,00	201.107.800,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.50		SMPN 3	610.568.697,00	610.516.393,00	(52.304,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.50	5	BELANJA DAERAH	610.568.697,00	610.516.393,00	(52.304,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.50	5.1	BELANJA OPERASI	411.955.747,00	411.903.443,00	(52.304,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.50	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.955.747,00	411.903.443,00	(52.304,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.50	5.2	BELANJA MODAL	198.612.950,00	198.612.950,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.50	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.612.950,00	106.612.950,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.50	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.51		SMPN 4	1.159.615.994,00	1.158.111.494,00	(1.504.500,00)	99,87
1.01	1.01.2.22.0.00.01.51	5	BELANJA DAERAH	1.159.615.994,00	1.158.111.494,00	(1.504.500,00)	99,87
1.01	1.01.2.22.0.00.01.51	5.1	BELANJA OPERASI	859.527.600,00	859.527.600,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.51	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	859.527.600,00	859.527.600,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.51	5.2	BELANJA MODAL	300.088.394,00	298.583.894,00	(1.504.500,00)	99,50
1.01	1.01.2.22.0.00.01.51	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.641.994,00	154.137.494,00	(1.504.500,00)	99,03
1.01	1.01.2.22.0.00.01.51	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	144.446.400,00	144.446.400,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.52		SMPN 5	700.879.717,00	698.613.540,00	(2.266.177,00)	99,68
1.01	1.01.2.22.0.00.01.52	5	BELANJA DAERAH	700.879.717,00	698.613.540,00	(2.266.177,00)	99,68
1.01	1.01.2.22.0.00.01.52	5.1	BELANJA OPERASI	526.065.917,00	523.799.740,00	(2.266.177,00)	99,57
1.01	1.01.2.22.0.00.01.52	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.065.917,00	523.799.740,00	(2.266.177,00)	99,57
1.01	1.01.2.22.0.00.01.52	5.2	BELANJA MODAL	174.813.800,00	174.813.800,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.52	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.988.400,00	51.988.400,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.52	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	122.825.400,00	122.825.400,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.53		SMPN 6	860.425.306,00	845.725.517,00	(14.699.789,00)	98,29
1.01	1.01.2.22.0.00.01.53	5	BELANJA DAERAH	860.425.306,00	845.725.517,00	(14.699.789,00)	98,29
1.01	1.01.2.22.0.00.01.53	5.1	BELANJA OPERASI	552.225.306,00	538.405.917,00	(13.819.389,00)	97,50
1.01	1.01.2.22.0.00.01.53	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.225.306,00	538.405.917,00	(13.819.389,00)	97,50
1.01	1.01.2.22.0.00.01.53	5.2	BELANJA MODAL	308.200.000,00	307.319.600,00	(880.400,00)	99,71
1.01	1.01.2.22.0.00.01.53	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.200.000,00	182.804.000,00	(396.000,00)	99,78

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.2.22.0.00.01.53	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	125.000.000,00	124.515.600,00	(484.400,00)	99,61
1.01	1.01.2.22.0.00.01.54		SMPN 7	808.209.886,00	803.601.987,00	(4.607.899,00)	99,43
1.01	1.01.2.22.0.00.01.54	5	BELANJA DAERAH	808.209.886,00	803.601.987,00	(4.607.899,00)	99,43
1.01	1.01.2.22.0.00.01.54	5.1	BELANJA OPERASI	557.163.486,00	553.005.487,00	(4.157.999,00)	99,25
1.01	1.01.2.22.0.00.01.54	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	557.163.486,00	553.005.487,00	(4.157.999,00)	99,25
1.01	1.01.2.22.0.00.01.54	5.2	BELANJA MODAL	251.046.400,00	250.596.500,00	(449.900,00)	99,82
1.01	1.01.2.22.0.00.01.54	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.550.000,00	125.550.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.54	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	125.496.400,00	125.046.500,00	(449.900,00)	99,64
1.01	1.01.2.22.0.00.01.55		SMPN 8	625.744.017,00	617.533.531,00	(8.210.486,00)	98,69
1.01	1.01.2.22.0.00.01.55	5	BELANJA DAERAH	625.744.017,00	617.533.531,00	(8.210.486,00)	98,69
1.01	1.01.2.22.0.00.01.55	5.1	BELANJA OPERASI	365.271.320,00	357.070.834,00	(8.200.486,00)	97,75
1.01	1.01.2.22.0.00.01.55	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.271.320,00	357.070.834,00	(8.200.486,00)	97,75
1.01	1.01.2.22.0.00.01.55	5.2	BELANJA MODAL	260.472.697,00	260.462.697,00	(10.000,00)	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.55	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.652.497,00	142.642.497,00	(10.000,00)	99,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.55	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	117.820.200,00	117.820.200,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.56		UPTD TK NEGERI PEMBINA	183.950.000,00	178.390.274,00	(5.559.726,00)	96,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.56	5	BELANJA DAERAH	183.950.000,00	178.390.274,00	(5.559.726,00)	96,98
1.01	1.01.2.22.0.00.01.56	5.1	BELANJA OPERASI	167.878.000,00	162.318.274,00	(5.559.726,00)	96,69
1.01	1.01.2.22.0.00.01.56	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.878.000,00	162.318.274,00	(5.559.726,00)	96,69
1.01	1.01.2.22.0.00.01.56	5.2	BELANJA MODAL	16.072.000,00	16.072.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.56	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.072.000,00	16.072.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.57		UPTD TK NEGERI 1	82.940.000,00	80.913.500,00	(2.026.500,00)	97,56
1.01	1.01.2.22.0.00.01.57	5	BELANJA DAERAH	82.940.000,00	80.913.500,00	(2.026.500,00)	97,56
1.01	1.01.2.22.0.00.01.57	5.1	BELANJA OPERASI	60.581.500,00	58.555.000,00	(2.026.500,00)	96,65
1.01	1.01.2.22.0.00.01.57	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.581.500,00	58.555.000,00	(2.026.500,00)	96,65
1.01	1.01.2.22.0.00.01.57	5.2	BELANJA MODAL	22.358.500,00	22.358.500,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.57	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.358.500,00	22.358.500,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.58		SPNF SKB Kota Bukittinggi	322.160.000,00	321.963.850,00	(196.150,00)	99,94
1.01	1.01.2.22.0.00.01.58	5	BELANJA DAERAH	322.160.000,00	321.963.850,00	(196.150,00)	99,94
1.01	1.01.2.22.0.00.01.58	5.1	BELANJA OPERASI	295.246.600,00	295.050.450,00	(196.150,00)	99,93
1.01	1.01.2.22.0.00.01.58	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.246.600,00	295.050.450,00	(196.150,00)	99,93
1.01	1.01.2.22.0.00.01.58	5.2	BELANJA MODAL	26.913.400,00	26.913.400,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.58	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.913.400,00	26.913.400,00	0,00	100,00
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**132.184.363.735,00**	**122.972.821.175,48**	**(9.211.542.559,52)**	**93,03**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	91.564.128.379,00	86.687.524.177,58	(4.876.604.201,42)	94,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	91.564.128.379,00	86.687.524.177,58	(4.876.604.201,42)	94,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	69.619.066.636,00	66.126.459.499,00	(3.492.607.137,00)	94,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	53.293.310.745,00	52.050.003.218,00	(1.243.307.527,00)	97,67

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.785.755.891,00	13.537.806.281,00	(2.247.949.610,00)	85,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	540.000.000,00	538.650.000,00	(1.350.000,00)	99,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	21.945.061.743,00	20.561.064.678,58	(1.383.997.064,42)	93,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.475.392.863,00	3.362.293.750,00	(113.099.113,00)	96,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.669.668.880,00	16.398.770.928,58	(1.270.897.951,42)	92,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01		UPTD Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad	2.036.923.322,00	1.848.875.251,00	(188.048.071,00)	90,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	5	BELANJA DAERAH	2.036.923.322,00	1.848.875.251,00	(188.048.071,00)	90,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	5.1	BELANJA OPERASI	1.936.623.322,00	1.748.575.251,00	(188.048.071,00)	90,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	5.1.01	Belanja Pegawai	698.660.300,00	679.446.783,00	(19.213.517,00)	97,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.237.963.022,00	1.069.128.468,00	(168.834.554,00)	86,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	5.2	BELANJA MODAL	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.300.000,00	100.300.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02		UPTD Puskesmas Guguk Panjang	2.439.025.343,00	2.139.807.362,00	(299.217.981,00)	87,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	5	BELANJA DAERAH	2.439.025.343,00	2.139.807.362,00	(299.217.981,00)	87,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	2.307.915.343,00	2.021.645.774,00	(286.269.569,00)	87,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	5.1.01	Belanja Pegawai	854.000.000,00	850.616.040,00	(3.383.960,00)	99,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.453.915.343,00	1.171.029.734,00	(282.885.609,00)	80,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	5.2	BELANJA MODAL	131.110.000,00	118.161.588,00	(12.948.412,00)	90,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.110.000,00	118.161.588,00	(12.948.412,00)	90,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03		UPTD Puskesmas Nilam Sari	1.288.868.291,00	1.134.508.623,00	(154.359.668,00)	88,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	5	BELANJA DAERAH	1.288.868.291,00	1.134.508.623,00	(154.359.668,00)	88,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	5.1	BELANJA OPERASI	1.226.368.291,00	1.072.008.903,00	(154.359.388,00)	87,41
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	5.1.01	Belanja Pegawai	334.314.000,00	330.542.348,00	(3.771.652,00)	98,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	892.054.291,00	741.466.555,00	(150.587.736,00)	83,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	5.2	BELANJA MODAL	62.500.000,00	62.499.720,00	(280,00)	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.500.000,00	62.499.720,00	(280,00)	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04		UPTD Puskesmas Mandiangin	1.907.198.396,00	1.712.250.578,00	(194.947.818,00)	89,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	5	BELANJA DAERAH	1.907.198.396,00	1.712.250.578,00	(194.947.818,00)	89,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	5.1	BELANJA OPERASI	1.807.198.396,00	1.620.267.074,00	(186.931.322,00)	89,66
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	5.1.01	Belanja Pegawai	597.000.000,00	608.317.886,00	11.317.886,00	101,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.210.198.396,00	1.011.949.188,00	(198.249.208,00)	83,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	91.983.504,00	(8.016.496,00)	91,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	91.983.504,00	(8.016.496,00)	91,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05		UPTD Puskesmas Gulai Bancah	1.119.401.101,00	901.129.952,00	(218.271.149,00)	80,50
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	5	BELANJA DAERAH	1.119.401.101,00	901.129.952,00	(218.271.149,00)	80,50
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	5.1	BELANJA OPERASI	1.072.901.101,00	854.781.582,00	(218.119.519,00)	79,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	5.1.01	Belanja Pegawai	251.396.272,00	250.802.367,00	(593.905,32)	99,76

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	821.504.828,00	603.979.215,00	(217.525.613,68)	73,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	5.2	BELANJA MODAL	46.500.000,00	46.348.370,00	(151.630,00)	99,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.500.000,00	46.348.370,00	(151.630,00)	99,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06		UPTD Puskesmas Tigo Baleh	2.038.536.869,00	1.504.185.493,00	(534.351.376,00)	73,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	5	BELANJA DAERAH	2.038.536.869,00	1.504.185.493,00	(534.351.376,00)	73,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	5.1	BELANJA OPERASI	1.949.125.869,00	1.420.825.918,00	(528.299.951,00)	72,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	5.1.01	Belanja Pegawai	591.200.000,00	506.367.525,00	(84.832.475,00)	85,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.357.925.869,00	914.458.393,00	(443.467.476,00)	67,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	5.2	BELANJA MODAL	89.411.000,00	83.359.575,00	(6.051.425,00)	93,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.411.000,00	83.359.575,00	(6.051.425,00)	93,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07		UPTD Puskesmas Plus Mandiangin	1.188.254.015,00	961.927.806,00	(226.326.209,00)	80,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	5	BELANJA DAERAH	1.188.254.015,00	961.927.806,00	(226.326.209,00)	80,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	5.1	BELANJA OPERASI	1.135.803.565,00	909.549.356,00	(226.254.209,00)	80,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	5.1.01	Belanja Pegawai	278.500.000,00	266.862.425,00	(11.637.575,00)	95,82
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	857.303.565,00	642.686.931,00	(214.616.634,00)	74,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	5.2	BELANJA MODAL	52.450.450,00	52.378.450,00	(72.000,00)	99,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.450.450,00	52.378.450,00	(72.000,00)	99,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08		UPTD Instalasi Farmasi	648.637.553,00	469.975.117,00	(178.662.436,00)	72,46
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	5	BELANJA DAERAH	648.637.553,00	469.975.117,00	(178.662.436,00)	72,46
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	5.1	BELANJA OPERASI	631.390.253,00	452.775.117,00	(178.615.136,00)	71,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	631.390.253,00	452.775.117,00	(178.615.136,00)	71,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	5.2	BELANJA MODAL	17.247.300,00	17.200.000,00	(47.300,00)	99,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.247.300,00	17.200.000,00	(47.300,00)	99,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09		UPTD Laboratorium Kesehatan	585.494.100,00	555.986.031,00	(29.508.069,00)	94,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	5	BELANJA DAERAH	585.494.100,00	555.986.031,00	(29.508.069,00)	94,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	5.1	BELANJA OPERASI	585.494.100,00	555.986.031,00	(29.508.069,00)	94,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.494.100,00	555.986.031,00	(29.508.069,00)	94,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10		Rumah Sakit Umum Daerah	27.367.896.366,00	25.056.650.784,90	(2.311.245.581,10)	91,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	5	BELANJA DAERAH	27.367.896.366,00	25.056.650.784,90	(2.311.245.581,10)	91,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	5.1	BELANJA OPERASI	20.671.613.013,00	19.072.713.295,90	(1.598.899.717,10)	92,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	5.1.01	Belanja Pegawai	2.719.083.893,00	2.667.256.727,00	(51.827.166,00)	98,09
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.952.529.120,00	16.405.456.568,90	(1.547.072.551,10)	91,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	5.2	BELANJA MODAL	6.696.283.353,00	5.983.937.489,00	(712.345.864,00)	89,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.275.154.753,00	1.562.808.889,00	(712.345.864,00)	68,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.421.128.600,00	4.421.128.600,00	(0,00)	100,00
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**32.497.620.164,00**	**28.955.955.604,36**	**(3.541.664.559,64)**	**89,10**
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.664.778.044,00	28.506.255.575,36	(3.158.522.468,64)	90,03
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	31.664.778.044,00	28.506.255.575,36	(3.158.522.468,64)	90,03

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.452.374.144,00	13.281.015.416,79	(2.171.358.727,21)	85,95
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.809.577.744,00	7.406.474.360,67	(403.103.383,33)	94,84
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.977.796.400,00	5.282.724.153,00	(1.695.072.247,00)	75,71
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	665.000.000,00	591.816.903,12	(73.183.096,88)	89,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	16.212.403.900,00	15.225.240.158,57	(987.163.741,43)	93,91
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.168.300,00	84.940.710,00	(47.227.590,00)	64,27
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.080.235.600,00	15.140.299.448,57	(939.936.151,43)	94,15
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0001		UPTD Penerangan Fasilitas Umum	2.398.400,00	1.854.000,00	(544.400,00)	77,30
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	2.398.400,00	1.854.000,00	(544.400,00)	77,30
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.398.400,00	1.854.000,00	(544.400,00)	77,30
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.398.400,00	1.854.000,00	(544.400,00)	77,30
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0002		UPTD Perlengkapan dan Peralatan	830.443.720,00	447.846.029,00	(382.597.691,00)	53,93
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	830.443.720,00	447.846.029,00	(382.597.691,00)	53,93
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	830.443.720,00	447.846.029,00	(382.597.691,00)	53,93
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	830.443.720,00	447.846.029,00	(382.597.691,00)	53,93
1.04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**12.528.605.456,00**	**11.206.236.996,36**	**(1.322.368.459,64)**	**89,45**
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.528.605.456,00	11.206.236.996,36	(1.322.368.459,64)	89,45
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	12.528.605.456,00	11.206.236.996,36	(1.322.368.459,64)	89,45
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.710.096.944,00	8.876.731.245,00	(833.365.699,00)	91,42
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.977.549.244,00	3.814.470.747,00	(163.078.497,00)	95,90
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.924.447.700,00	2.254.160.498,00	(670.287.202,00)	77,08
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.808.100.000,00	2.808.100.000,00	0,00	100,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.818.508.512,00	2.329.505.751,36	(489.002.760,64)	82,65
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.834.100,00	71.299.560,00	(19.534.540,00)	78,49
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	293.000.000,00	291.631.769,08	(1.368.230,92)	99,53
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.434.674.412,00	1.966.574.422,28	(468.099.989,72)	80,77
1.05			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**33.173.311.059,00**	**32.241.197.068,00**	**(932.113.991,00)**	**97,19**
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.964.094.392,00	7.477.543.479,00	(486.550.913,00)	93,89
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.964.094.392,00	7.477.543.479,00	(486.550.913,00)	93,89
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.923.085.892,00	7.443.244.925,00	(479.840.967,00)	93,94
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.952.378.462,00	4.765.433.823,00	(186.944.639,00)	96,23
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.970.707.430,00	2.677.811.102,00	(292.896.328,00)	90,14
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	41.008.500,00	34.298.554,00	(6.709.946,00)	83,64
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.008.500,00	34.298.554,00	(6.709.946,00)	83,64
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	20.376.195.845,00	20.054.318.331,00	(321.877.514,00)	98,42
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	20.376.195.845,00	20.054.318.331,00	(321.877.514,00)	98,42
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.376.195.845,00	20.054.318.331,00	(321.877.514,00)	98,42

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.466.367.745,00	5.374.997.361,00	(91.370.384,00)	98,33
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.646.928.100,00	12.416.420.970,00	(230.507.130,00)	98,18
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.262.900.000,00	2.262.900.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.833.020.822,00	4.709.335.258,00	(123.685.564,00)	97,44
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	4.833.020.822,00	4.709.335.258,00	(123.685.564,00)	97,44
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.823.020.822,00	4.699.345.258,00	(123.675.564,00)	97,44
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.546.100.822,00	2.460.193.419,00	(85.907.403,00)	96,63
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.276.920.000,00	2.239.151.839,00	(37.768.161,00)	98,34
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90
1.06			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**10.096.377.019,00**	**7.733.198.118,00**	**(2.363.178.901,00)**	**76,59**
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		Dinas Sosial	10.096.377.019,00	7.733.198.118,00	(2.363.178.901,00)	76,59
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.096.377.019,00	7.733.198.118,00	(2.363.178.901,00)	76,59
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.038.344.619,00	7.675.256.118,00	(2.363.088.501,00)	76,46
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.849.321.219,00	2.811.327.044,00	(37.994.175,00)	98,67
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.189.023.400,00	4.863.929.074,00	(2.325.094.326,00)	67,66
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	58.032.400,00	57.942.000,00	(90.400,00)	99,84
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.032.400,00	57.942.000,00	(90.400,00)	99,84
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**127.814.125.302,00**	**114.889.081.751,25**	**(12.925.043.550,75)**	**89,89**
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**862.191.200,00**	**756.820.896,00**	**(105.370.304,00)**	**87,78**
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000		Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	862.191.200,00	756.820.896,00	(105.370.304,00)	87,78
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	862.191.200,00	756.820.896,00	(105.370.304,00)	87,78
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	862.191.200,00	756.820.896,00	(105.370.304,00)	87,78
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	862.191.200,00	756.820.896,00	(105.370.304,00)	87,78
2.08			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**8.017.488.350,00**	**7.489.522.045,00**	**(527.966.305,00)**	**93,41**
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	7.469.686.650,00	7.057.161.126,00	(412.525.524,00)	94,48
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.469.686.650,00	7.057.161.126,00	(412.525.524,00)	94,48
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.448.991.800,00	7.047.361.126,00	(401.630.674,00)	94,61
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.357.223.800,00	4.282.886.254,00	(74.337.546,00)	98,29
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.091.768.000,00	2.764.474.872,00	(327.293.128,00)	89,41
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.694.850,00	9.800.000,00	(10.894.850,00)	47,35
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.694.850,00	9.800.000,00	(10.894.850,00)	47,35
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001		UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	547.801.700,00	432.360.919,00	(115.440.781,00)	78,93
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	547.801.700,00	432.360.919,00	(115.440.781,00)	78,93
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	472.791.400,00	365.832.419,00	(106.958.981,00)	77,38

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.791.400,00	365.832.419,00	(106.958.981,00)	77,38
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	75.010.300,00	66.528.500,00	(8.481.800,00)	88,69
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.010.300,00	66.528.500,00	(8.481.800,00)	88,69
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**8.887.512.111,00**	**8.322.306.245,00**	**(565.205.866,00)**	**93,64**
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000		Dinas Pertanian dan Pangan	8.829.364.431,00	8.270.695.999,00	(558.668.432,00)	93,67
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.829.364.431,00	8.270.695.999,00	(558.668.432,00)	93,67
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.829.364.431,00	8.270.695.999,00	(558.668.432,00)	93,67
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.391.289.439,00	7.176.574.526,00	(214.714.913,00)	97,10
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.268.074.992,00	1.094.121.473,00	(173.953.519,00)	86,28
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.01		UPTD Rumah Potong Hewan	39.290.000,00	35.839.626,00	(3.450.374,00)	91,22
2.09	3.27.2.09.3.25.01.01	5	BELANJA DAERAH	39.290.000,00	35.839.626,00	(3.450.374,00)	91,22
2.09	3.27.2.09.3.25.01.01	5.1	BELANJA OPERASI	39.290.000,00	35.839.626,00	(3.450.374,00)	91,22
2.09	3.27.2.09.3.25.01.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.290.000,00	35.839.626,00	(3.450.374,00)	91,22
2.09	3.27.2.09.3.25.01.02		UPTD Pusat Kesehatan Hewan	18.857.680,00	15.770.620,00	(3.087.060,00)	83,63
2.09	3.27.2.09.3.25.01.02	5	BELANJA DAERAH	18.857.680,00	15.770.620,00	(3.087.060,00)	83,63
2.09	3.27.2.09.3.25.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	18.857.680,00	15.770.620,00	(3.087.060,00)	83,63
2.09	3.27.2.09.3.25.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.857.680,00	15.770.620,00	(3.087.060,00)	83,63
2.10			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**467.317.200,00**	**329.579.214,00**	**(137.737.986,00)**	**70,53**
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	467.317.200,00	329.579.214,00	(137.737.986,00)	70,53
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	467.317.200,00	329.579.214,00	(137.737.986,00)	70,53
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	467.317.200,00	329.579.214,00	(137.737.986,00)	70,53
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.317.200,00	329.579.214,00	(137.737.986,00)	70,53
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**41.851.048.702,00**	**37.250.182.497,00**	**(4.600.866.205,00)**	**89,01**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	41.851.048.702,00	37.250.182.497,00	(4.600.866.205,00)	89,01
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	41.851.048.702,00	37.250.182.497,00	(4.600.866.205,00)	89,01
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	41.519.175.510,00	36.977.640.337,00	(4.541.535.173,00)	89,06
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	12.182.755.834,00	11.910.109.234,00	(272.646.600,00)	97,76
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.336.419.676,00	25.067.531.103,00	(4.268.888.573,00)	85,45
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	331.873.192,00	272.542.160,00	(59.331.032,00)	82,12
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	316.873.192,00	272.542.160,00	(44.331.032,00)	86,01
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
2.12			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**5.255.950.060,00**	**4.758.003.148,00**	**(497.946.912,00)**	**90,53**
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.255.950.060,00	4.758.003.148,00	(497.946.912,00)	90,53
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.255.950.060,00	4.758.003.148,00	(497.946.912,00)	90,53
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.190.156.060,00	4.758.003.148,00	(432.152.912,00)	91,67
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.486.053.960,00	3.365.243.160,00	(120.810.800,00)	96,53

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.704.102.100,00	1.392.759.988,00	(311.342.112,00)	81,73
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	65.794.000,00	0,00	(65.794.000,00)	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.794.000,00	0,00	(65.794.000,00)	0,00
2.14			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**3.584.285.770,00**	**3.134.219.547,00**	**(450.066.223,00)**	**87,44**
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	3.584.285.770,00	3.134.219.547,00	(450.066.223,00)	87,44
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.584.285.770,00	3.134.219.547,00	(450.066.223,00)	87,44
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.578.485.970,00	3.128.419.747,00	(450.066.223,00)	87,42
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.578.485.970,00	3.128.419.747,00	(450.066.223,00)	87,42
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.799.800,00	5.799.800,00	0,00	100,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.799.800,00	5.799.800,00	0,00	100,00
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**19.894.392.863,00**	**17.875.536.286,00**	**(2.018.856.577,00)**	**89,85**
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.351.740.552,00	3.628.493.731,00	(723.246.821,00)	83,38
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.351.740.552,00	3.628.493.731,00	(723.246.821,00)	83,38
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.700.048.200,00	3.177.669.694,00	(522.378.506,00)	85,88
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.180.000,00	0,00	(9.180.000,00)	0,00
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.690.868.200,00	3.177.669.694,00	(513.198.506,00)	86,10
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	651.692.352,00	450.824.037,00	(200.868.315,00)	69,18
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	651.692.352,00	450.824.037,00	(200.868.315,00)	69,18
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	12.107.194.427,00	11.443.496.242,00	(663.698.185,00)	94,52
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	12.107.194.427,00	11.443.496.242,00	(663.698.185,00)	94,52
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.003.250.027,00	11.443.496.242,00	(559.753.785,00)	95,34
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.101.856.603,00	6.653.982.783,00	(447.873.820,00)	93,69
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.901.393.424,00	4.789.513.459,00	(111.879.965,00)	97,72
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	103.944.400,00	0,00	(103.944.400,00)	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.944.400,00	0,00	(3.944.400,00)	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01		UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	159.025.700,00	102.841.371,00	(56.184.329,00)	64,67
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	5	BELANJA DAERAH	159.025.700,00	102.841.371,00	(56.184.329,00)	64,67
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	5.1	BELANJA OPERASI	159.025.700,00	102.841.371,00	(56.184.329,00)	64,67
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.025.700,00	102.841.371,00	(56.184.329,00)	64,67
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02		UPTD Terminal dan Parkir	3.276.432.184,00	2.700.704.942,00	(575.727.242,00)	82,43
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	5	BELANJA DAERAH	3.276.432.184,00	2.700.704.942,00	(575.727.242,00)	82,43
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	3.272.487.784,00	2.700.704.942,00	(571.782.842,00)	82,53
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.272.487.784,00	2.700.704.942,00	(571.782.842,00)	82,53
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	5.2	BELANJA MODAL	3.944.400,00	0,00	(3.944.400,00)	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.944.400,00	0,00	(3.944.400,00)	0,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.16			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**8.530.036.324,00**	**7.799.917.244,00**	**(730.119.080,00)**	**91,44**
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	8.530.036.324,00	7.799.917.244,00	(730.119.080,00)	91,44
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.530.036.324,00	7.799.917.244,00	(730.119.080,00)	91,44
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.474.099.524,00	7.769.082.244,00	(705.017.280,00)	91,68
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.128.320.274,00	3.033.956.538,00	(94.363.736,00)	96,98
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.245.779.250,00	4.635.125.706,00	(610.653.544,00)	88,36
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	55.936.800,00	30.835.000,00	(25.101.800,00)	55,12
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.936.800,00	30.835.000,00	(25.101.800,00)	55,12
2.17			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**7.259.871.758,00**	**6.813.434.187,00**	**(446.437.571,00)**	**93,85**
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000		Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	7.259.871.758,00	6.813.434.187,00	(446.437.571,00)	93,85
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.259.871.758,00	6.813.434.187,00	(446.437.571,00)	93,85
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.078.731.058,00	6.744.262.237,00	(334.468.821,00)	95,28
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.031.834.808,00	2.957.610.064,00	(74.224.744,00)	97,55
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.546.896.250,00	1.286.665.695,00	(260.230.555,00)	83,18
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.1.04	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	(13.522,00)	100,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	181.140.700,00	69.171.950,00	(111.968.750,00)	38,19
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.140.700,00	69.171.950,00	(111.968.750,00)	38,19
2.18			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**6.339.435.366,00**	**6.092.616.788,00**	**(246.818.578,00)**	**96,11**
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.339.435.366,00	6.092.616.788,00	(246.818.578,00)	96,11
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.339.435.366,00	6.092.616.788,00	(246.818.578,00)	96,11
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.339.435.366,00	6.092.616.788,00	(246.818.578,00)	96,11
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.425.885.166,00	3.363.161.807,00	(62.723.359,00)	98,17
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.913.550.200,00	2.729.454.981,00	(184.095.219,00)	93,68
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**8.602.099.282,00**	**6.792.731.946,13**	**(1.809.367.335,87)**	**78,97**
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemuda dan Olahraga	8.602.099.282,00	6.792.731.946,13	(1.809.367.335,87)	78,97
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.602.099.282,00	6.792.731.946,13	(1.809.367.335,87)	78,97
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.129.397.682,00	6.457.376.771,13	(1.672.020.910,87)	79,43
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.199.252.926,00	2.156.110.473,00	(43.142.453,00)	98,04
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.430.144.756,00	1.886.483.861,13	(1.543.660.894,87)	55,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.500.000.000,00	2.414.782.437,00	(85.217.563,00)	96,59
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	472.701.600,00	335.355.175,00	(137.346.425,00)	70,94
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	472.701.600,00	335.355.175,00	(137.346.425,00)	70,94
2.20			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**46.994.700,00**	**37.109.900,00**	**(9.884.800,00)**	**78,97**
2.20	2.16.2.21.2.20.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	46.994.700,00	37.109.900,00	(9.884.800,00)	78,97
2.20	2.16.2.21.2.20.01.0000	5	BELANJA DAERAH	46.994.700,00	37.109.900,00	(9.884.800,00)	78,97
2.20	2.16.2.21.2.20.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	46.994.700,00	37.109.900,00	(9.884.800,00)	78,97
2.20	2.16.2.21.2.20.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.994.700,00	37.109.900,00	(9.884.800,00)	78,97

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.21			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**48.130.700,00**	**38.525.548,00**	**(9.605.152,00)**	**80,04**
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	48.130.700,00	38.525.548,00	(9.605.152,00)	80,04
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000	5	BELANJA DAERAH	48.130.700,00	38.525.548,00	(9.605.152,00)	80,04
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	48.130.700,00	38.525.548,00	(9.605.152,00)	80,04
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.130.700,00	38.525.548,00	(9.605.152,00)	80,04
2.22			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**3.105.823.430,00**	**2.754.864.083,12**	**(350.959.346,88)**	**88,70**
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.105.823.430,00	2.754.864.083,12	(350.959.346,88)	88,70
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.105.823.430,00	2.754.864.083,12	(350.959.346,88)	88,70
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.042.819.384,00	2.692.402.133,12	(350.417.250,88)	88,48
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.662.819.384,00	2.463.497.033,12	(199.322.350,88)	92,51
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	380.000.000,00	228.905.100,00	(151.094.900,00)	60,24
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	63.004.046,00	62.461.950,00	(542.096,00)	99,14
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.004.046,00	62.461.950,00	(542.096,00)	99,14
2.23			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**5.016.355.586,00**	**4.609.538.877,00**	**(406.816.709,00)**	**91,89**
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.016.355.586,00	4.609.538.877,00	(406.816.709,00)	91,89
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.016.355.586,00	4.609.538.877,00	(406.816.709,00)	91,89
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.008.883.586,00	4.609.538.877,00	(399.344.709,00)	92,03
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.828.342.786,00	3.746.273.470,00	(82.069.316,00)	97,86
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.180.540.800,00	863.265.407,00	(317.275.393,00)	73,12
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	7.472.000,00	0,00	(7.472.000,00)	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.472.000,00	0,00	(7.472.000,00)	0,00
2.24			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**45.191.900,00**	**34.173.300,00**	**(11.018.600,00)**	**75,62**
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45.191.900,00	34.173.300,00	(11.018.600,00)	75,62
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	45.191.900,00	34.173.300,00	(11.018.600,00)	75,62
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	45.191.900,00	34.173.300,00	(11.018.600,00)	75,62
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.191.900,00	34.173.300,00	(11.018.600,00)	75,62
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**47.578.779.082,00**	**39.633.984.918,52**	**(7.944.794.163,48)**	**83,30**
3.25			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**775.105.500,00**	**503.189.420,00**	**(271.916.080,00)**	**64,92**
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000		Dinas Pertanian dan Pangan	450.589.300,00	189.060.000,00	(261.529.300,00)	41,96
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	5	BELANJA DAERAH	450.589.300,00	189.060.000,00	(261.529.300,00)	41,96
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	450.589.300,00	189.060.000,00	(261.529.300,00)	41,96
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.589.300,00	189.060.000,00	(156.529.300,00)	54,71
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.03		UPTD Balai Benih Ikan Hias	324.516.200,00	314.129.420,00	(10.386.780,00)	96,80
3.25	3.27.2.09.3.25.01.03	5	BELANJA DAERAH	324.516.200,00	314.129.420,00	(10.386.780,00)	96,80
3.25	3.27.2.09.3.25.01.03	5.1	BELANJA OPERASI	310.294.200,00	301.095.420,00	(9.198.780,00)	97,04
3.25	3.27.2.09.3.25.01.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.294.200,00	301.095.420,00	(9.198.780,00)	97,04
3.25	3.27.2.09.3.25.01.03	5.2	BELANJA MODAL	14.222.000,00	13.034.000,00	(1.188.000,00)	91,65

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.25	3.27.2.09.3.25.01.03	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.838.000,00	9.650.000,00	(1.188.000,00)	89,04
3.25	3.27.2.09.3.25.01.03	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.384.000,00	3.384.000,00	0,00	100,00
3.26			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**24.183.314.097,00**	**20.005.739.595,13**	**(4.177.574.501,87)**	**82,73**
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	24.183.314.097,00	20.005.739.595,13	(4.177.574.501,87)	82,73
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	24.183.314.097,00	20.005.739.595,13	(4.177.574.501,87)	82,73
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	23.260.090.478,00	19.323.385.168,01	(3.936.705.309,99)	83,08
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.273.953.130,00	6.062.786.909,00	(211.166.221,00)	96,63
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.986.137.348,00	13.260.598.259,01	(3.725.539.088,99)	78,07
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	923.223.619,00	682.354.427,12	(240.869.191,88)	73,91
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	353.223.619,00	267.374.075,00	(85.849.544,00)	75,70
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	450.000.000,00	414.980.352,12	(35.019.647,88)	92,22
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	0,00
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**1.823.988.725,00**	**1.166.737.199,84**	**(657.251.525,16)**	**63,97**
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000		Dinas Pertanian dan Pangan	1.345.335.190,00	730.969.710,84	(614.365.479,16)	54,33
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.345.335.190,00	730.969.710,84	(614.365.479,16)	54,33
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.335.252.890,00	724.739.710,84	(610.513.179,16)	54,28
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.145.252.890,00	724.739.710,84	(420.513.179,16)	63,28
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	190.000.000,00	0,00	(190.000.000,00)	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.082.300,00	6.230.000,00	(3.852.300,00)	61,79
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.082.300,00	6.230.000,00	(3.852.300,00)	61,79
3.27	3.27.2.09.3.25.01.01		UPTD Rumah Potong Hewan	253.028.195,00	231.678.999,00	(21.349.196,00)	91,56
3.27	3.27.2.09.3.25.01.01	5	BELANJA DAERAH	253.028.195,00	231.678.999,00	(21.349.196,00)	91,56
3.27	3.27.2.09.3.25.01.01	5.1	BELANJA OPERASI	253.028.195,00	231.678.999,00	(21.349.196,00)	91,56
3.27	3.27.2.09.3.25.01.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.028.195,00	231.678.999,00	(21.349.196,00)	91,56
3.27	3.27.2.09.3.25.01.02		UPTD Pusat Kesehatan Hewan	225.625.340,00	204.088.490,00	(21.536.850,00)	90,45
3.27	3.27.2.09.3.25.01.02	5	BELANJA DAERAH	225.625.340,00	204.088.490,00	(21.536.850,00)	90,45
3.27	3.27.2.09.3.25.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	221.301.540,00	200.690.890,00	(20.610.650,00)	90,69
3.27	3.27.2.09.3.25.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.301.540,00	200.690.890,00	(20.610.650,00)	90,69
3.27	3.27.2.09.3.25.01.02	5.2	BELANJA MODAL	4.323.800,00	3.397.600,00	(926.200,00)	78,58
3.27	3.27.2.09.3.25.01.02	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.323.800,00	3.397.600,00	(926.200,00)	78,58
3.30			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**20.024.345.810,00**	**17.364.707.057,55**	**(2.659.638.752,45)**	**86,72**
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	19.698.451.510,00	17.114.067.859,42	(2.584.383.650,58)	86,88
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	19.698.451.510,00	17.114.067.859,42	(2.584.383.650,58)	86,88
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	18.957.933.110,00	16.544.617.248,72	(2.413.315.861,28)	87,27
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.537.981.510,00	5.037.266.891,00	(500.714.619,00)	90,96
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.419.951.600,00	11.507.350.357,72	(1.912.601.242,28)	85,75
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	740.518.400,00	569.450.610,70	(171.067.789,30)	76,90
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.678.400,00	219.785.000,00	(69.893.400,00)	75,87

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.840.000,00	149.865.610,70	(100.974.389,30)	59,75
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	199.800.000,00	(200.000,00)	99,90
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001		UPTD Kemetrologian	325.894.300,00	250.639.198,13	(75.255.101,87)	76,91
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	325.894.300,00	250.639.198,13	(75.255.101,87)	76,91
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	177.980.600,00	136.217.715,00	(41.762.885,00)	76,54
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.980.600,00	136.217.715,00	(41.762.885,00)	76,54
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	147.913.700,00	114.421.483,13	(33.492.216,87)	77,36
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.913.700,00	64.605.000,00	(33.308.700,00)	65,98
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.816.483,13	(183.516,87)	99,63
3.31			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**772.024.950,00**	**593.611.646,00**	**(178.413.304,00)**	**76,89**
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0002		UPTD Kerajinan Industri	304.696.450,00	275.425.047,00	(29.271.403,00)	90,39
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	304.696.450,00	275.425.047,00	(29.271.403,00)	90,39
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	304.696.450,00	275.425.047,00	(29.271.403,00)	90,39
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.696.450,00	275.425.047,00	(29.271.403,00)	90,39
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	467.328.500,00	318.186.599,00	(149.141.901,00)	68,09
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	467.328.500,00	318.186.599,00	(149.141.901,00)	68,09
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	467.328.500,00	318.186.599,00	(149.141.901,00)	68,09
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.328.500,00	318.186.599,00	(149.141.901,00)	68,09
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**111.590.675.190,00**	**102.572.174.759,00**	**(9.018.500.431,00)**	**91,92**
4.01			**SEKRETARIAT DAERAH**	**69.554.130.876,00**	**65.819.268.776,00**	**(3.734.862.100,00)**	**94,63**
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000		Sekretariat Daerah	69.554.130.876,00	65.819.268.776,00	(3.734.862.100,00)	94,63
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	69.554.130.876,00	65.819.268.776,00	(3.734.862.100,00)	94,63
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	68.925.730.946,00	65.211.210.776,00	(3.714.520.170,00)	94,61
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	16.314.652.078,00	15.754.482.527,00	(560.169.551,00)	96,57
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.286.778.868,00	30.673.515.249,00	(2.613.263.619,00)	92,15
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	19.324.300.000,00	18.783.213.000,00	(541.087.000,00)	97,20
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	628.399.930,00	608.058.000,00	(20.341.930,00)	96,76
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	628.399.930,00	608.058.000,00	(20.341.930,00)	96,76
4.02			**SEKRETARIAT DPRD**	**42.036.544.314,00**	**36.752.905.983,00**	**(5.283.638.331,00)**	**87,43**
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000		Sekretariat DPRD	42.036.544.314,00	36.752.905.983,00	(5.283.638.331,00)	87,43
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	42.036.544.314,00	36.752.905.983,00	(5.283.638.331,00)	87,43
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	41.302.953.314,00	36.032.125.983,00	(5.270.827.331,00)	87,24
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	13.787.478.464,00	13.045.663.813,00	(741.814.651,00)	94,62
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.515.474.850,00	22.986.462.170,00	(4.529.012.680,00)	83,54
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	733.591.000,00	720.780.000,00	(12.811.000,00)	98,25
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	733.591.000,00	720.780.000,00	(12.811.000,00)	98,25
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**44.509.588.849,00**	**36.600.503.015,00**	**(7.909.085.834,00)**	**82,23**

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.01			**PERENCANAAN**	**6.194.907.904,00**	**5.919.433.647,00**	**(275.474.257,00)**	**95,55**
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.194.907.904,00	5.919.433.647,00	(275.474.257,00)	95,55
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.194.907.904,00	5.919.433.647,00	(275.474.257,00)	95,55
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.134.307.904,00	5.862.413.347,00	(271.894.557,00)	95,57
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.703.574.104,00	4.640.190.036,00	(63.384.068,00)	98,65
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.430.733.800,00	1.222.223.311,00	(208.510.489,00)	85,43
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	60.600.000,00	57.020.300,00	(3.579.700,00)	94,09
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.600.000,00	57.020.300,00	(3.579.700,00)	94,09
5.02			**KEUANGAN**	**31.563.998.795,00**	**24.337.689.464,00**	**(7.226.309.331,00)**	**77,11**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan	31.563.998.795,00	24.337.689.464,00	(7.226.309.331,00)	77,11
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	31.563.998.795,00	24.337.689.464,00	(7.226.309.331,00)	77,11
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.899.139.995,00	14.717.403.503,00	(6.181.736.492,00)	70,42
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	14.170.582.573,00	9.678.512.526,00	(4.492.070.047,00)	68,30
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.728.557.422,00	5.038.890.977,00	(1.689.666.445,00)	74,89
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	64.238.800,00	22.705.050,00	(41.533.750,00)	35,34
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.238.800,00	22.705.050,00	(41.533.750,00)	35,34
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	380.911,00	(999.619.089,00)	0,04
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	380.911,00	(999.619.089,00)	0,04
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	(3.420.000,00)	99,96
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	(3.420.000,00)	99,96
5.03			**KEPEGAWAIAN**	**6.500.900.050,00**	**6.138.704.151,00**	**(362.195.899,00)**	**94,43**
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.500.900.050,00	6.138.704.151,00	(362.195.899,00)	94,43
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.500.900.050,00	6.138.704.151,00	(362.195.899,00)	94,43
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.452.031.050,00	6.092.185.151,00	(359.845.899,00)	94,42
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.716.411.450,00	3.659.387.838,00	(57.023.612,00)	98,47
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.555.619.600,00	2.281.880.672,00	(273.738.928,00)	89,29
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	180.000.000,00	150.916.641,00	(29.083.359,00)	83,84
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	48.869.000,00	46.519.000,00	(2.350.000,00)	95,19
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.869.000,00	46.519.000,00	(2.350.000,00)	95,19
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	215.816.100,00	187.946.353,00	(27.869.747,00)	87,09
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	215.816.100,00	187.946.353,00	(27.869.747,00)	87,09
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	215.816.100,00	187.946.353,00	(27.869.747,00)	87,09
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	215.816.100,00	187.946.353,00	(27.869.747,00)	87,09
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.816.100,00	187.946.353,00	(27.869.747,00)	87,09
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	33.966.000,00	16.729.400,00	(17.236.600,00)	49,25

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	33.966.000,00	16.729.400,00	(17.236.600,00)	49,25
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	33.966.000,00	16.729.400,00	(17.236.600,00)	49,25
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	33.966.000,00	16.729.400,00	(17.236.600,00)	49,25
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.966.000,00	16.729.400,00	(17.236.600,00)	49,25
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**8.693.250.490,00**	**8.469.363.348,00**	**(223.887.142,00)**	**97,42**
6.01			**INSPEKTORAT DAERAH**	**8.693.250.490,00**	**8.469.363.348,00**	**(223.887.142,00)**	**97,42**
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat Daerah	8.693.250.490,00	8.469.363.348,00	(223.887.142,00)	97,42
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.693.250.490,00	8.469.363.348,00	(223.887.142,00)	97,42
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.693.250.490,00	8.469.363.348,00	(223.887.142,00)	97,42
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.069.521.090,00	7.059.963.953,00	(9.557.137,00)	99,86
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.623.729.400,00	1.409.399.395,00	(214.330.005,00)	86,80
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**	**50.505.070.737,00**	**43.223.482.376,00**	**(7.281.588.361,00)**	**85,58**
7.01			**KECAMATAN**	**50.505.070.737,00**	**43.223.482.376,00**	**(7.281.588.361,00)**	**85,58**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	10.554.841.962,00	9.754.277.703,00	(800.564.259,00)	92,42
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.554.841.962,00	9.754.277.703,00	(800.564.259,00)	92,42
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.551.463.962,00	9.751.217.703,00	(800.246.259,00)	92,42
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.874.970.462,00	8.726.492.236,00	(148.478.226,00)	98,33
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.636.493.500,00	986.669.467,00	(649.824.033,00)	60,29
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	40.000.000,00	38.056.000,00	(1.944.000,00)	95,14
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.378.000,00	3.060.000,00	(318.000,00)	90,59
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.378.000,00	3.060.000,00	(318.000,00)	90,59
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Guguk Panjang	9.451.572.016,00	8.760.809.588,00	(690.762.428,00)	92,69
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	9.451.572.016,00	8.760.809.588,00	(690.762.428,00)	92,69
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.397.329.216,00	8.708.774.588,00	(688.554.628,00)	92,67
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.133.311.592,00	6.988.380.787,00	(144.930.805,00)	97,97
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.264.017.624,00	1.720.393.801,00	(543.623.823,00)	75,99
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	54.242.800,00	52.035.000,00	(2.207.800,00)	95,93
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.242.800,00	52.035.000,00	(2.207.800,00)	95,93
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	10.400.831.114,00	9.593.410.455,00	(807.420.659,00)	92,24
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	10.400.831.114,00	9.593.410.455,00	(807.420.659,00)	92,24
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.386.303.114,00	9.578.910.455,00	(807.392.659,00)	92,23
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.745.830.114,00	7.653.678.500,00	(92.151.614,00)	98,81
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.473.000,00	1.925.231.955,00	(715.241.045,00)	72,91
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	14.528.000,00	14.500.000,00	(28.000,00)	99,81
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.528.000,00	14.500.000,00	(28.000,00)	99,81
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01		Kelurahan Belakang Balok	620.037.900,00	413.382.480,00	(206.655.420,00)	66,67
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	5	BELANJA DAERAH	620.037.900,00	413.382.480,00	(206.655.420,00)	66,67
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	5.1	BELANJA OPERASI	620.037.900,00	413.382.480,00	(206.655.420,00)	66,67

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.037.900,00	413.382.480,00	(110.655.420,00)	78,88
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	5.1.05	Belanja Hibah	96.000.000,00	0,00	(96.000.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02		Kelurahan Pakan Kurai	1.009.852.900,00	634.206.682,00	(375.646.218,00)	62,80
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	5	BELANJA DAERAH	1.009.852.900,00	634.206.682,00	(375.646.218,00)	62,80
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	5.1	BELANJA OPERASI	986.306.900,00	633.486.682,00	(352.820.218,00)	64,23
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694.306.900,00	608.486.682,00	(85.820.218,00)	87,64
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	5.1.05	Belanja Hibah	292.000.000,00	25.000.000,00	(267.000.000,00)	8,56
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	5.2	BELANJA MODAL	23.546.000,00	720.000,00	(22.826.000,00)	3,06
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.546.000,00	720.000,00	(22.826.000,00)	3,06
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001		Kelurahan Koto Salayan	478.592.200,00	421.768.665,00	(56.823.535,00)	88,13
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	478.592.200,00	421.768.665,00	(56.823.535,00)	88,13
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	478.592.200,00	421.768.665,00	(56.823.535,00)	88,13
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.592.200,00	371.768.665,00	(56.823.535,00)	86,74
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02		Kelurahan Campago Ipuh	1.546.635.700,00	1.465.568.291,00	(81.067.409,00)	94,76
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	5	BELANJA DAERAH	1.546.635.700,00	1.465.568.291,00	(81.067.409,00)	94,76
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	1.532.235.700,00	1.451.360.291,00	(80.875.409,00)	94,72
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	717.235.700,00	636.360.291,00	(80.875.409,00)	88,72
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	5.1.05	Belanja Hibah	815.000.000,00	815.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	5.2	BELANJA MODAL	14.400.000,00	14.208.000,00	(192.000,00)	98,67
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.400.000,00	14.208.000,00	(192.000,00)	98,67
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03		Kelurahan Manggis Ganting	1.026.383.500,00	534.041.088,00	(492.342.412,00)	52,03
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	5	BELANJA DAERAH	1.026.383.500,00	534.041.088,00	(492.342.412,00)	52,03
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	5.1	BELANJA OPERASI	1.017.383.500,00	525.191.088,00	(492.192.412,00)	51,62
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.383.500,00	525.191.088,00	(117.192.412,00)	81,76
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	5.1.05	Belanja Hibah	375.000.000,00	0,00	(375.000.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	5.2	BELANJA MODAL	9.000.000,00	8.850.000,00	(150.000,00)	98,33
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	8.850.000,00	(150.000,00)	98,33
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04		Kelurahan Pulai Anak Air	687.199.400,00	646.908.815,00	(40.290.585,00)	94,14
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	5	BELANJA DAERAH	687.199.400,00	646.908.815,00	(40.290.585,00)	94,14
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	5.1	BELANJA OPERASI	672.550.500,00	634.908.815,00	(37.641.685,00)	94,40
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.550.500,00	611.628.815,00	(35.921.685,00)	94,45
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000,00	23.280.000,00	(1.720.000,00)	93,12
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	5.2	BELANJA MODAL	14.648.900,00	12.000.000,00	(2.648.900,00)	81,92
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.648.900,00	12.000.000,00	(2.648.900,00)	81,92
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05		Kelurahan Puhun Pintu Kabun	1.121.188.500,00	554.021.366,00	(567.167.134,00)	49,41
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	5	BELANJA DAERAH	1.121.188.500,00	554.021.366,00	(567.167.134,00)	49,41
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	5.1	BELANJA OPERASI	1.121.188.500,00	554.021.366,00	(567.167.134,00)	49,41

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	706.188.500,00	554.021.366,00	(152.167.134,00)	78,45
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	5.1.05	Belanja Hibah	415.000.000,00	0,00	(415.000.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06		Kelurahan Puhun Tembok	744.906.710,00	646.865.379,00	(98.041.331,00)	86,84
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	5	BELANJA DAERAH	744.906.710,00	646.865.379,00	(98.041.331,00)	86,84
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	5.1	BELANJA OPERASI	736.898.710,00	646.865.379,00	(90.033.331,00)	87,78
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	736.898.710,00	646.865.379,00	(90.033.331,00)	87,78
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	5.2	BELANJA MODAL	8.008.000,00	0,00	(8.008.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.008.000,00	0,00	(8.008.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07		Kelurahan Kubu Gulai Bancah	891.392.100,00	673.193.853,00	(218.198.247,00)	75,52
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	5	BELANJA DAERAH	891.392.100,00	673.193.853,00	(218.198.247,00)	75,52
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	5.1	BELANJA OPERASI	891.392.100,00	673.193.853,00	(218.198.247,00)	75,52
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	661.392.100,00	543.194.204,00	(118.197.896,00)	82,13
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	5.1.05	Belanja Hibah	230.000.000,00	129.999.649,00	(100.000.351,00)	56,52
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08		Kelurahan Campago Guguk Bulek	934.041.950,00	861.263.550,00	(72.778.400,00)	92,21
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	5	BELANJA DAERAH	934.041.950,00	861.263.550,00	(72.778.400,00)	92,21
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	5.1	BELANJA OPERASI	931.441.950,00	858.663.550,00	(72.778.400,00)	92,19
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	671.441.950,00	598.663.550,00	(72.778.400,00)	89,16
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	5.1.05	Belanja Hibah	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	5.2	BELANJA MODAL	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09		Kelurahan Garegeh	659.824.850,00	434.309.314,00	(225.515.536,00)	65,82
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	5	BELANJA DAERAH	659.824.850,00	434.309.314,00	(225.515.536,00)	65,82
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	5.1	BELANJA OPERASI	612.324.450,00	434.309.314,00	(178.015.136,00)	70,93
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.324.450,00	384.309.314,00	(123.015.136,00)	75,75
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	5.1.05	Belanja Hibah	105.000.000,00	50.000.000,00	(55.000.000,00)	47,62
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	5.2	BELANJA MODAL	47.500.400,00	0,00	(47.500.400,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.500.400,00	0,00	(47.500.400,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01		Kelurahan Kayu Kubu	626.231.700,00	513.554.529,00	(112.677.171,00)	82,01
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	5	BELANJA DAERAH	626.231.700,00	513.554.529,00	(112.677.171,00)	82,01
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	5.1	BELANJA OPERASI	626.231.700,00	513.554.529,00	(112.677.171,00)	82,01
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536.231.700,00	513.554.529,00	(22.677.171,00)	95,77
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	5.1.05	Belanja Hibah	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03		Kelurahan Benteng Pasar Atas	508.159.600,00	454.320.000,00	(53.839.600,00)	89,40
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	5	BELANJA DAERAH	508.159.600,00	454.320.000,00	(53.839.600,00)	89,40
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	5.1	BELANJA OPERASI	488.188.600,00	434.350.000,00	(53.838.600,00)	88,97
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.188.600,00	434.350.000,00	(53.838.600,00)	88,97
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	5.2	BELANJA MODAL	19.971.000,00	19.970.000,00	(1.000,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.971.000,00	19.970.000,00	(1.000,00)	99,99

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04		Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	603.412.800,00	462.703.500,00	(140.709.300,00)	76,68
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	5	BELANJA DAERAH	603.412.800,00	462.703.500,00	(140.709.300,00)	76,68
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	5.1	BELANJA OPERASI	603.412.800,00	462.703.500,00	(140.709.300,00)	76,68
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.412.800,00	462.703.500,00	(35.709.300,00)	92,84
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	5.1.05	Belanja Hibah	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05		Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	1.173.005.161,00	861.896.530,00	(311.108.631,00)	73,48
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	5	BELANJA DAERAH	1.173.005.161,00	861.896.530,00	(311.108.631,00)	73,48
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	5.1	BELANJA OPERASI	1.097.665.861,00	797.196.530,00	(300.469.331,00)	72,63
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.031.165.861,00	797.196.530,00	(233.969.331,00)	77,31
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	5.1.05	Belanja Hibah	66.500.000,00	0,00	(66.500.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	5.2	BELANJA MODAL	75.339.300,00	64.700.000,00	(10.639.300,00)	85,88
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.339.300,00	64.700.000,00	(10.639.300,00)	85,88
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06		Kelurahan Tarok Dipo	1.908.999.575,00	1.306.363.868,00	(602.635.707,00)	68,43
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	5	BELANJA DAERAH	1.908.999.575,00	1.306.363.868,00	(602.635.707,00)	68,43
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	5.1	BELANJA OPERASI	1.832.201.102,00	1.231.807.368,00	(600.393.734,00)	67,23
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.242.201.102,00	1.186.807.368,00	(55.393.734,00)	95,54
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	5.1.05	Belanja Hibah	590.000.000,00	45.000.000,00	(545.000.000,00)	7,63
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	5.2	BELANJA MODAL	76.798.473,00	74.556.500,00	(2.241.973,00)	97,08
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.798.473,00	54.556.500,00	(2.241.973,00)	96,05
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07		Kelurahan Bukit Apit Puhun	1.103.768.699,00	812.706.350,00	(291.062.349,00)	73,63
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	5	BELANJA DAERAH	1.103.768.699,00	812.706.350,00	(291.062.349,00)	73,63

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	5.1	BELANJA OPERASI	1.088.760.699,00	797.747.900,00	(291.012.799,00)	73,27
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	786.760.699,00	730.747.900,00	(56.012.799,00)	92,88
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	5.1.05	Belanja Hibah	302.000.000,00	67.000.000,00	(235.000.000,00)	22,19
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	5.2	BELANJA MODAL	15.008.000,00	14.958.450,00	(49.550,00)	99,67
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.008.000,00	14.958.450,00	(49.550,00)	99,67
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02		Kelurahan Birugo	788.041.200,00	645.705.494,00	(142.335.706,00)	81,94
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	5	BELANJA DAERAH	788.041.200,00	645.705.494,00	(142.335.706,00)	81,94
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	5.1	BELANJA OPERASI	788.041.200,00	645.705.494,00	(142.335.706,00)	81,94
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.041.200,00	585.705.494,00	(87.335.706,00)	87,02
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	5.1.05	Belanja Hibah	115.000.000,00	60.000.000,00	(55.000.000,00)	52,17
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03		Kelurahan Aur Kuning	787.254.400,00	616.181.368,00	(171.073.032,00)	78,27
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	5	BELANJA DAERAH	787.254.400,00	616.181.368,00	(171.073.032,00)	78,27
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	5.1	BELANJA OPERASI	787.254.400,00	616.181.368,00	(171.073.032,00)	78,27
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	632.254.400,00	536.181.368,00	(96.073.032,00)	84,80
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	5.1.05	Belanja Hibah	155.000.000,00	80.000.000,00	(75.000.000,00)	51,61
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04		Kelurahan Sapiran	657.575.800,00	427.658.327,00	(229.917.473,00)	65,04
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	5	BELANJA DAERAH	657.575.800,00	427.658.327,00	(229.917.473,00)	65,04
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	5.1	BELANJA OPERASI	657.575.800,00	427.658.327,00	(229.917.473,00)	65,04
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.575.800,00	427.658.327,00	(97.917.473,00)	81,37
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	5.1.05	Belanja Hibah	132.000.000,00	0,00	(132.000.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05		Kelurahan Kubu Tanjung	588.410.050,00	452.942.600,00	(135.467.450,00)	76,98
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	5	BELANJA DAERAH	588.410.050,00	452.942.600,00	(135.467.450,00)	76,98
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	5.1	BELANJA OPERASI	588.410.050,00	452.942.600,00	(135.467.450,00)	76,98
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.410.050,00	358.001.450,00	(60.408.600,00)	85,56
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	5.1.05	Belanja Hibah	170.000.000,00	94.941.150,00	(75.058.850,00)	55,85
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06		Kelurahan Pakan Labuah	642.942.200,00	530.915.650,00	(112.026.550,00)	82,58
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	5	BELANJA DAERAH	642.942.200,00	530.915.650,00	(112.026.550,00)	82,58
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	5.1	BELANJA OPERASI	625.512.900,00	515.315.650,00	(110.197.250,00)	82,38
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.512.900,00	515.315.650,00	(110.197.250,00)	82,38
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	5.2	BELANJA MODAL	17.429.300,00	15.600.000,00	(1.829.300,00)	89,50
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.429.300,00	15.600.000,00	(1.829.300,00)	89,50
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07		Kelurahan Ladang Cakiah	438.506.400,00	313.525.930,00	(124.980.470,00)	71,50
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	5	BELANJA DAERAH	438.506.400,00	313.525.930,00	(124.980.470,00)	71,50
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	5.1	BELANJA OPERASI	426.287.400,00	313.525.930,00	(112.761.470,00)	73,55
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.287.400,00	313.525.930,00	(112.761.470,00)	73,55
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	5.2	BELANJA MODAL	12.219.000,00	0,00	(12.219.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.219.000,00	0,00	(12.219.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08		Kelurahan Parit Antang	551.462.350,00	430.981.001,00	(120.481.349,00)	78,15

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	5	BELANJA DAERAH	551.462.350,00	430.981.001,00	(120.481.349,00)	78,15
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	5.1	BELANJA OPERASI	544.201.500,00	426.131.001,00	(118.070.499,00)	78,30
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.201.500,00	426.131.001,00	(68.070.499,00)	86,23
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	5.2	BELANJA MODAL	7.260.850,00	4.850.000,00	(2.410.850,00)	66,80
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.260.850,00	4.850.000,00	(2.410.850,00)	66,80
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**21.181.923.960,00**	**19.749.754.011,00**	**(1.432.169.949,00)**	**93,24**
8.01			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**21.181.923.960,00**	**19.749.754.011,00**	**(1.432.169.949,00)**	**93,24**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.181.923.960,00	19.749.754.011,00	(1.432.169.949,00)	93,24
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	21.181.923.960,00	19.749.754.011,00	(1.432.169.949,00)	93,24
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	21.145.842.760,00	19.733.992.011,00	(1.411.850.749,00)	93,32
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.434.573.686,00	2.214.574.229,00	(219.999.457,00)	90,96
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.828.393.700,00	3.714.700.620,00	(1.113.693.080,00)	76,93
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	13.882.875.374,00	13.804.717.162,00	(78.158.212,00)	99,44
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	36.081.200,00	15.762.000,00	(20.319.200,00)	43,68
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.081.200,00	15.762.000,00	(20.319.200,00)	43,68
			Jumlah	**(33.057.673.165,00)**	**2.305.600.225,09**	**35.363.273.390,09**	**(6,97)**

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN I.2
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**775.373.477.018,00**	**741.382.079.328,40**	**95,62**	**706.975.448.172,65**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**153.460.514.484,00**	**130.112.097.312,94**	**84,79**	**123.112.709.360,20**
4.1.01	Pajak Daerah	54.110.644.633,00	50.098.130.579,00	92,58	51.690.816.406,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	1.597.500,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00	1.597.500,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00	1.597.500,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	1.642.500,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	0,00	1.642.500,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	0,00	1.642.500,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	750.000.000,00	846.030.170,00	112,80	1.022.393.497,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	687.097.479,00	792.523.170,00	115,34	918.838.997,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	687.097.479,00	792.523.170,00	115,34	918.838.997,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	31.375.311,00	49.307.000,00	157,15	99.354.500,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	31.375.311,00	49.307.000,00	157,15	99.354.500,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	31.527.210,00	4.200.000,00	13,32	4.200.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	31.527.210,00	4.200.000,00	13,32	4.200.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	56.763.932,00	16,22	73.707.883,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	56.763.932,00	16,22	73.707.883,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	56.763.932,00	16,22	73.707.883,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.124.355.367,00	3.326.935.079,00	64,92	4.317.071.019,00
4.1.01.15.01	PBBP2	5.124.355.367,00	3.326.935.079,00	64,92	4.317.071.019,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.124.355.367,00	3.326.935.079,00	64,92	4.317.071.019,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.551.289.266,00	14.651.555.005,00	94,21	14.287.713.036,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	15.551.289.266,00	13.683.928.405,00	87,99	12.769.544.686,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15.551.289.266,00	13.683.928.405,00	87,99	12.769.544.686,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	967.626.600,00	0,00	1.518.168.350,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	967.626.600,00	0,00	1.518.168.350,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	32.335.000.000,00	31.216.846.393,00	96,54	31.986.690.971,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	9.249.300.000,00	6.598.150.740,00	71,34	7.092.915.280,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	8.740.200.000,00	6.173.940.555,00	70,64	6.536.283.275,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	509.100.000,00	424.210.185,00	83,33	556.632.005,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	5.905.000.000,00	10.125.850.073,00	171,48	6.623.737.093,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	5.905.000.000,00	10.125.850.073,00	171,48	6.623.737.093,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	16.480.700.000,00	14.014.244.804,00	85,03	17.055.116.978,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	16.146.700.000,00	13.958.005.973,00	86,44	16.942.014.836,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	334.000.000,00	56.238.831,00	16,84	113.102.142,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	200.000.000,00	111.341.830,00	55,67	237.645.300,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	200.000.000,00	111.341.830,00	55,67	237.645.300,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	500.000.000,00	367.258.946,00	73,45	977.276.320,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	14.500.000,00	0,00	0,00	2.878.000,00
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	440.490.000,00	359.478.946,00	81,61	966.913.484,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	35.010.000,00	5.708.500,00	16,31	6.518.836,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	10.000.000,00	1.071.500,00	10,72	966.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	74.688.582.055,00	51.629.686.961,72	69,13	39.222.055.481,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	25.601.557.055,00	24.973.345.724,72	97,55	6.732.139.162,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.715.787.055,00	18.971.152.914,72	113,49	544.977.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	5.515.787.055,00	6.866.797.530,00	124,49	178.385.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	10.850.000.000,00	11.843.419.384,72	109,16	0,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	350.000.000,00	260.936.000,00	74,55	366.592.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00	1.496.860.390,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00	1.496.860.390,00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.845.835.000,00	1.266.234.000,00	68,60	1.166.633.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.845.835.000,00	1.266.234.000,00	68,60	1.166.633.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.141.935.000,00	952.468.310,00	44,47	1.091.756.172,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	300.000.000,00	419.470.000,00	139,82	571.810.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.633.935.000,00	460.289.685,00	28,17	458.670.797,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	208.000.000,00	72.708.625,00	34,96	61.275.375,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	2.141.563.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	2.141.563.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	10.039.600,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	10.039.600,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	277.160.000,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	277.160.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	4.898.000.000,00	3.783.490.500,00	77,25	0,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	2.725.000.000,00	2.054.201.500,00	75,38	0,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.123.000.000,00	1.729.289.000,00	81,45	0,00
4.1.02.01.14.0003	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	48.387.025.000,00	25.946.496.785,00	53,62	31.840.332.165,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	146.076.750,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	62.328.300,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	0,00	0,00	0,00	71.148.450,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	7.325.038.816,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00	5.780.483.740,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00	1.544.555.076,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	170.046.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0,00	0,00	0,00	170.046.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	1.097.241.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	1.097.241.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	29.760.000,00	11.155.000,00	37,48	0,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	29.760.000,00	11.155.000,00	37,48	0,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	219.760.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	219.760.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	22.821.164.679,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	22.821.164.679,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	61.004.920,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	0,00	0,00	0,00	28.004.920,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	14.723.000.000,00	5.919.155.740,00	40,20	0,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	14.723.000.000,00	5.919.155.740,00	40,20	0,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.588.165.000,00	645.069.000,00	24,92	0,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.588.165.000,00	645.069.000,00	24,92	0,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	335.000.000,00	367.600.000,00	109,73	0,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	335.000.000,00	367.600.000,00	109,73	0,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	29.780.000.000,00	17.681.948.210,00	59,38	0,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	29.780.000.000,00	17.681.948.210,00	59,38	0,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	224.500.000,00	211.430.955,00	94,18	0,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	224.500.000,00	211.430.955,00	94,18	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	706.600.000,00	1.110.137.880,00	157,11	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	706.600.000,00	1.110.137.880,00	157,11	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000,00	709.844.452,00	101,41	649.584.154,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	623.835.154,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	623.835.154,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	25.749.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	25.749.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	700.000.000,00	709.844.452,00	101,41	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	700.000.000,00	709.844.452,00	101,41	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	118,70	8.363.843.874,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	118,70	8.363.843.874,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	118,70	8.363.843.874,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	118,70	8.363.843.874,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.353.862.488,00	18.523.395.556,22	113,27	23.835.993.599,20
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	214.186.000,00	48.180.000,00	22,49	232.326.899,00
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	232.326.899,00
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	232.326.899,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	214.186.000,00	48.180.000,00	22,49	0,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	214.186.000,00	48.180.000,00	22,49	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	303.879.747,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	295.834.300,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	295.834.300,00
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	0,00	0,00	0,00	8.045.447,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	0,00	0,00	0,00	8.045.447,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.199.752.534,00	119,98	1.232.417.521,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.041.793.555,00	104,18	1.018.815.685,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.041.793.555,00	104,18	1.018.815.685,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	65.840.288,00	0,00	142.853.907,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	65.840.288,00	0,00	142.853.907,00
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	1.762.911,00	0,00	49.058.315,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	1.762.911,00	0,00	49.058.315,00
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	11.176.643,00	0,00	21.689.614,00
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	11.176.643,00	0,00	21.689.614,00
4.1.04.05.06	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	66.042.068,00	0,00	0,00
4.1.04.05.06.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	66.042.068,00	0,00	0,00
4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	13.137.069,00	0,00	0,00
4.1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	13.137.069,00	0,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	250.000.000,00	801.931.520,44	320,77	1.920.071.031,01
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	250.000.000,00	801.931.520,44	320,77	1.920.071.031,01
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	250.000.000,00	801.931.520,44	320,77	1.920.071.031,01
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	4.800.100,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	4.800.100,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	4.800.100,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	578.333.157,00	0,00	58.544.492,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	578.333.157,00	0,00	58.544.492,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	578.333.157,00	0,00	58.544.492,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	107.664.076,23	0,00	82.474.489,55
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	107.664.076,23	0,00	82.474.489,55
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	107.664.076,23	0,00	82.474.489,55
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	150.000.000,00	290.107.069,00	193,40	331.346.774,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	25.000.000,00	11.100.768,00	44,40	15.071.001,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	20.000.000,00	11.025.270,00	55,13	14.860.299,00
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000,00	75.498,00	1,51	210.702,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	65.000.000,00	34.112.917,00	52,48	7.369.641,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	55.000.000,00	24.409.509,00	44,38	5.403.281,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	849.192,00
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	10.000.000,00	9.703.408,00	97,03	1.117.168,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	62.650,00	0,00	631.110,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.680,00
4.1.04.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	39.800,00	0,00	616.980,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	22.850,00	0,00	9.750,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	42.055.900,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	0,00	0,00	42.055.900,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	638.615,00	0,00	643.718,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	638.615,00	0,00	643.718,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	60.000.000,00	244.192.119,00	406,99	265.575.404,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	60.000.000,00	244.192.119,00	406,99	265.575.404,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	103.202.089,00	0,00	133.893.988,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	14.861.670,00	0,00	13.423.214,00
4.1.04.13.01.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	5.299.818,00
4.1.04.13.01.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	8.123.396,00
4.1.04.13.01.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	6.079.090,00	0,00	0,00
4.1.04.13.01.0025	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los	0,00	7.539.502,00	0,00	0,00
4.1.04.13.01.0026	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	0,00	1.243.078,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	88.340.419,00	0,00	118.355.874,00
4.1.04.13.02.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	118.355.874,00
4.1.04.13.02.0019	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0,00	63.969.884,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	24.370.535,00	0,00	0,00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	2.114.900,00
4.1.04.13.03.0003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	2.114.900,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	12.074.676.488,00	12.177.280.890,47	100,85	2.500.000,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	12.074.676.488,00	12.177.280.890,47	100,85	2.500.000,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	12.074.676.488,00	12.177.280.890,47	100,85	2.500.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.665.000.000,00	3.022.630.749,12	113,42	1.260.317.371,64
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	649.312.583,00	0,00	372.643.850,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	649.312.583,00	0,00	372.643.850,00
4.1.04.15.05	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	0,00	0,00	866.661.885,64
4.1.04.15.05.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	0,00	0,00	0,00	866.661.885,64
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.665.000.000,00	30.670.433,00	1,15	18.783.636,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	2.665.000.000,00	30.670.433,00	1,15	18.783.636,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	113.572.132,92	0,00	0,00
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	113.572.132,92	0,00	0,00
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	27.293.112,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
4.1.04.15.10.0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	2.682.862,00	0,00	0,00
4.1.04.15.10.0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	19.408.250,00	0,00	0,00
4.1.04.15.10.0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	5.202.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	422.879.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	421.394.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	48.861.431,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur	0,00	22.820.838,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0086	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	0,00	23.040.593,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0986	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	377.851.294,56	0,00	0,00
4.1.04.15.18.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	377.851.294,56	0,00	0,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	142.788.375,00	0,00	0,00
4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	142.788.375,00	0,00	0,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	1.121.153.444,45	0,00	0,00
4.1.04.15.61.0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	1.121.153.444,45	0,00	0,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	59.703.426,57	0,00	0,00
4.1.04.15.65.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya	0,00	59.703.426,57	0,00	0,00
4.1.04.15.66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	14.907.450,62	0,00	0,00
4.1.04.15.66.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	14.907.450,62	0,00	0,00
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	13.638.066,00	0,00	2.228.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	13.638.066,00	0,00	2.228.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	29.813.470,96	0,00	16.313.006.718,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	16.313.006.718,00
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	16.313.006.718,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	29.813.470,96	0,00	0,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,00	29.796.507,00	0,00	0,00
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	0,00	16.963,96	0,00	0,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	164.500.000,00	0,00	65.375.000,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	164.500.000,00	0,00	65.375.000,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	164.500.000,00	0,00	65.375.000,00
4.1.04.23	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	0,00	0,00	1.895.039.468,00
4.1.04.23.01	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	0,00	0,00	1.895.039.468,00
4.1.04.23.01.0001	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	0,00	0,00	1.895.039.468,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**153.460.514.484,00**	**130.112.097.312,94**	**84,79**	**123.112.709.360,20**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**621.912.962.534,00**	**611.269.982.015,46**	**98,29**	**583.728.726.369,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569.055.919.679,00	566.436.096.135,00	99,54	554.987.256.154,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	28.852.373.000,00
4.2.01.02.01	DID	0,00	0,00	0,00	28.852.373.000,00
4.2.01.02.01.0001	DID	0,00	0,00	0,00	28.852.373.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	561.901.804.679,00	559.281.981.135,00	99,53	526.134.883.154,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.386.359.000,00	14.136.910.810,00	124,16	13.615.863.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	663.958.000,00	783.054.000,00	117,94	668.932.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.927.738.000,00	8.116.806.000,00	117,16	8.023.011.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	461.050.000,00	0,00	412.749.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35.943.000,00	39.361.710,00	109,51	42.632.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	133.689.000,00	243.346.000,00	182,02	198.141.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	628.378.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	1.465.677.000,00	0,00	835.653.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	49.347.000,00	0,00	80.692.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	49.347.000,00	30.963.100,00	62,75	2.120.919.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.073.811.000,00	1.073.811.000,00	100,00	1.233.134.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	1.873.495.000,00	1.873.495.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	451.726.253.000,00	449.518.151.028,00	99,51	436.109.667.075,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	412.801.306.000,00	412.801.306.000,00	100,00	412.374.525.075,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	100,00	4.800.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.467.301.000,00	4.259.199.028,00	65,86	18.935.142.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	16.976.382.000,00	16.976.382.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	8.047.733.000,00	8.047.733.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	2.633.531.000,00	2.633.531.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	33.257.582.204,00	31.503.797.544,00	94,73	12.315.114.685,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.748.189.000,00	1.728.926.361,00	98,90	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.033.323.000,00	3.914.467.267,00	97,05	4.144.129.899,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.103.939.000,00	4.030.057.258,00	98,20	915.298.362,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	854.701.000,00	844.419.491,00	98,80	0,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	99.950.000,00	99.950.000,00	100,00	563.612.500,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	1.333.510.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	543.000.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	22.417.480.204,00	20.885.977.167,00	93,17	3.715.563.924,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	65.531.610.475,00	64.123.121.753,00	97,85	64.094.238.394,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	(39.548.323,00)	0,00	20.891.409.376,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	975.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	29.769.334.000,00	30.004.001.000,00	100,79	27.939.263.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	413.525.000,00	596.500.000,00	144,25	330.000.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	2.271.300.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	881.499.798,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.400.000.000,00	1.392.995.830,00	99,50	635.950.490,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	3.170.803.114,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	4.407.621.800,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.848.271.000,00	1.636.327.096,00	88,53	1.370.919.135,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	401.245.000,00	281.574.012,00	70,18	262.236.840,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	284.263.350,00	70,02	530.143.971,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00	0,00	428.090.870,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	21.326.118.480,00	21.275.641.349,00	99,76	0,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.212.500.000,00	1.212.500.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.287.500.000,00	2.267.353.750,00	99,12	0,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	63.355.000,00	105,59	0,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	887.140.000,00	886.063.997,00	99,88	0,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.828.038.000,00	1.997.486.697,00	70,63	0,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	427.331.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.174.607.995,00	2.174.607.995,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**561.901.804.679,00**	**559.281.981.135,00**	**99,53**	**526.134.883.154,00**
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.154.115.000,00	7.154.115.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	7.154.115.000,00	7.154.115.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.154.115.000,00	7.154.115.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**7.154.115.000,00**	**7.154.115.000,00**	**100,00**	**0,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.857.042.855,00	44.833.885.880,46	84,82	28.741.470.215,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	41.857.042.855,00	34.409.535.374,00	82,21	28.741.470.215,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.857.042.855,00	34.409.535.374,00	82,21	28.741.470.215,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.479.228.643,00	8.863.365.298,00	71,02	7.074.290.251,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.697.283.836,00	4.023.933.224,00	85,67	3.463.319.489,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.581.263.387,00	9.924.313.415,00	63,69	6.995.281.174,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	99.266.989,00	77.839.154,00	78,41	93.965.277,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.000.000.000,00	11.520.084.283,00	128,00	11.114.614.024,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.000.000.000,00	10.424.350.506,46	94,77	0,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	11.000.000.000,00	10.424.350.506,46	94,77	0,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	11.000.000.000,00	10.424.350.506,46	94,77	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**52.857.042.855,00**	**44.833.885.880,46**	**84,82**	**28.741.470.215,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**621.912.962.534,00**	**611.269.982.015,46**	**98,29**	**583.728.726.369,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.012.443,45**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	134.012.443,45
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	134.012.443,45
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	134.012.443,45
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	134.012.443,45
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.012.443,45**
	JUMLAH PENDAPATAN	**775.373.477.018,00**	**741.382.079.328,40**	**95,62**	**706.975.448.172,65**
5	**BELANJA DAERAH**	**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**91,42**	**751.239.962.696,31**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**727.886.843.406,00**	**665.946.895.972,54**	**91,49**	**667.764.935.144,91**
5.1.01	Belanja Pegawai	348.366.503.439,32	336.607.731.061,67	96,62	308.535.703.099,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	196.571.498.410,00	191.534.898.876,00	97,44	167.923.564.479,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	147.327.296.708,00	143.494.767.350,00	97,40	124.864.098.884,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	129.572.259.149,00	125.830.871.372,00	97,11	119.476.314.418,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	17.755.037.559,00	17.663.895.978,00	99,49	5.387.784.466,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	13.811.644.152,00	13.603.202.673,00	98,49	11.961.017.161,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12.364.759.438,00	12.166.656.103,00	98,40	11.533.592.361,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.446.884.714,00	1.436.546.570,00	99,29	427.424.800,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.460.633.606,00	4.373.365.650,00	98,04	5.464.198.850,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.460.633.606,00	4.373.365.650,00	98,04	5.464.198.850,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.957.939.345,00	9.770.157.500,00	98,11	6.317.793.450,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.019.174.450,00	7.868.675.500,00	98,12	5.728.465.450,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.938.764.895,00	1.901.482.000,00	98,08	589.328.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.928.534.700,00	1.856.155.000,00	96,25	2.224.550.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.928.534.700,00	1.856.155.000,00	96,25	2.224.010.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	0,00	0,00	540.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.027.918.457,00	7.899.863.280,00	98,40	7.390.316.160,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.969.306.419,00	6.856.363.500,00	98,38	7.052.766.540,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.058.612.038,00	1.043.499.780,00	98,57	337.549.620,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	506.656.355,00	464.663.928,00	91,71	266.819.567,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	506.556.355,00	464.663.928,00	91,73	266.819.567,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.152.217,00	1.957.308,00	62,09	1.746.870,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.776.765,00	1.716.795,00	61,83	1.695.708,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	375.452,00	240.513,00	64,06	51.162,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.263.189.580,00	8.887.756.049,00	95,95	8.401.519.148,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.214.678.568,00	7.872.206.267,00	95,83	8.034.855.790,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.048.511.012,00	1.015.549.782,00	96,86	366.663.358,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	320.529.445,00	295.812.504,00	92,29	257.876.265,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	279.181.045,00	258.296.125,00	92,52	245.366.554,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	41.348.400,00	37.516.379,00	90,73	12.509.711,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	964.003.845,00	887.197.634,00	92,03	773.628.124,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	838.461.891,00	774.831.690,00	92,41	736.099.907,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	125.541.954,00	112.365.944,00	89,50	37.528.217,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	91.160.597.246,00	88.152.306.110,00	96,70	81.165.986.891,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	42.813.318.240,00	40.945.291.866,00	95,64	37.286.844.934,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	37.282.518.594,00	35.640.465.990,00	95,60	35.148.324.601,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.530.799.646,00	5.304.825.876,00	95,91	2.138.520.333,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	48.347.279.006,00	47.207.014.244,00	97,64	43.879.141.957,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	45.839.458.955,00	44.804.987.204,00	97,74	43.025.772.858,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.507.820.051,00	2.402.027.040,00	95,78	853.369.099,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.736.872.521,00	40.357.719.961,00	94,43	40.291.141.615,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.044.759.818,00	1.136.475.814,00	55,58	1.324.362.296,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	404.632.874,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	124.727.143,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	19.450.580,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	38.475.141,00	21.944.105,00	57,03	30.894.417,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	188.989.909,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	4.962.020,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	11.550.000,00	1.500.856,00	12,99	1.370.759,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	157.468.850,00	53.208.534,00	33,79	145.118.375,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	501.351.065,00	344.835.285,00	68,78	404.216.219,00
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],	1.335.914.762,00	714.987.034,00	53,52	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	811.017.710,00	511.857.453,00	63,11	678.533.557,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	15.000.000,00	5.390.000,00	35,93	17.025.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	29.000.000,00	28.228.500,00	97,34	25.386.150,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	37.287.000,00	24.231.000,00	64,99	25.470.000,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	66.288.000,00	45.034.000,00	67,94	46.695.000,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	276.200,00	0,00	0,00	255.000,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	9.991.280,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.003.400,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	177.582.500,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.145.760,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	6.294.750,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	285.000.000,00	284.991.421,00	100,00	343.498.477,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	23.100.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	26.950.000,00	26.950.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.02.0034	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	12.429.000,00	7.635.000,00	61,43	0,00
5.1.01.03.02.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	262.390.000,00	61.554.000,00	23,46	0,00
5.1.01.03.02.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	22.096.000,00	7.737.000,00	35,02	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.01.03.02.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	12.897.500,00	9.878.094,00	76,59	0,00
5.1.01.03.02.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	8.643.250,00	6.482.438,00	75,00	0,00
5.1.01.03.02.0044	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.615.000,00	3.746.000,00	56,63	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	26.772.567.700,00	26.671.971.200,00	99,62	27.691.578.700,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	26.772.567.700,00	26.671.971.200,00	99,62	27.691.578.700,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	167.500.000,00	164.750.000,00	98,36	308.250.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	167.500.000,00	164.750.000,00	98,36	308.250.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	368.372.000,00	357.215.941,00	96,97	389.118.704,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	368.372.000,00	357.215.941,00	96,97	389.118.704,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.615.293.293,00	6.612.142.353,00	86,83	8.895.423.358,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.276.680.793,00	6.423.389.853,00	88,27	8.599.579.858,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	290.612.500,00	140.752.500,00	48,43	247.843.500,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.058.500.000,00	1.054.050.000,00	99,58	1.003.875.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.058.500.000,00	1.054.050.000,00	99,58	1.003.875.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	3.605.337.000,00	3.586.507.200,00	99,48	0,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	3.605.337.000,00	3.586.507.200,00	99,48	0,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	293.525.000,00	262.750.000,00	89,52	0,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	293.525.000,00	262.750.000,00	89,52	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.050.910.000,00	9.432.584.080,00	93,85	9.850.520.992,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	560.000.000,00	535.605.000,00	95,64	545.790.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	560.000.000,00	535.605.000,00	95,64	545.790.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	57.000.000,00	41.498.100,00	72,80	45.712.800,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	57.000.000,00	41.498.100,00	72,80	45.712.800,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	75.000.000,00	51.128.520,00	68,17	60.398.280,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	75.000.000,00	51.128.520,00	68,17	60.398.280,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	62.000.000,00	46.483.500,00	74,97	48.132.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	62.000.000,00	46.483.500,00	74,97	48.132.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	800.000.000,00	776.627.250,00	97,08	780.875.025,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	800.000.000,00	776.627.250,00	97,08	780.875.025,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	105.000.000,00	72.303.525,00	68,86	92.187.375,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	105.000.000,00	72.303.525,00	68,86	92.187.375,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.915.300.000,00	1.827.000.000,00	95,39	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.915.300.000,00	1.827.000.000,00	95,39	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	462.500.000,00	308.700.000,00	66,75	466.200.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	462.500.000,00	308.700.000,00	66,75	466.200.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	650.000,00	346.612,00	53,32	485.776,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	650.000,00	346.612,00	53,32	485.776,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.264.750.000,00	2.200.382.750,00	97,16	2.409.850.464,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	57.000.000,00	42.292.068,00	74,20	48.784.176,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.750.000,00	1.115.604,00	63,75	1.155.168,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.000.000,00	3.346.812,00	55,78	3.465.504,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.200.000.000,00	2.153.628.266,00	97,89	2.356.445.616,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.517.500.000,00	3.341.298.823,00	94,99	3.510.889.272,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.517.500.000,00	3.341.298.823,00	94,99	3.510.889.272,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	231.210.000,00	231.210.000,00	100,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	231.210.000,00	231.210.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.166.042.797,00	768.563.704,67	65,91	939.295.387,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.692.000,00	54.600.000,00	98,04	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.692.000,00	54.600.000,00	98,04	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.168.960,00	6.048.000,00	98,04	6.048.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.168.960,00	6.048.000,00	98,04	6.048.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.245.600,00	98.280.000,00	98,04	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.245.600,00	98.280.000,00	98,04	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.170.788,00	5.069.400,00	98,04	5.069.400,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.170.788,00	5.069.400,00	98,04	5.069.400,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	569.529,00	558.073,00	97,99	558.362,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	569.529,00	558.073,00	97,99	558.362,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.142,00	1.110,00	97,20	1.160,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.142,00	1.110,00	97,20	1.160,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.992.832,00	5.448.960,00	77,92	5.448.960,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.992.832,00	5.448.960,00	77,92	5.448.960,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	133.661,00	112.320,00	84,03	112.320,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	133.661,00	112.320,00	84,03	112.320,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	400.982,00	336.960,00	84,03	336.960,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	400.982,00	336.960,00	84,03	336.960,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	623.272.413,00	370.982.985,00	59,52	484.470.939,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	149.491.086,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	46.250.350,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	7.227.939,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	11.492.575,00	7.125.000,00	62,00	11.492.571,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	70.286.134,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	12.500.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.450.000,00	428.750,00	12,43	517.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	47.036.150,00	6.277.333,00	13,35	47.036.150,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	149.754.214,00	115.986.695,00	77,45	150.329.209,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],	399.039.474,00	241.165.207,00	60,44	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	367.394.890,00	227.125.896,67	61,82	284.369.286,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	15.000.000,00	1.610.000,00	10,73	6.325.000,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.000.000,00	16.400.000,00	91,11	13.800.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	15.525.000,00	9.851.000,00	63,45	10.350.000,00
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	27.600.000,00	18.307.000,00	66,33	18.975.000,00
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	115.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	3.109.600,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	115.000,00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	72.162.500,00
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	342.240,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	1.880.250,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	138.000.000,00	136.988.000,00	99,27	150.383.936,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	368.000,00
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	8.050.000,00	7.166.666,67	89,03	0,00
5.1.01.05.11.0034	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	5.175.000,00	3.103.000,00	59,96	0,00
5.1.01.05.11.0036	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	109.250.000,00	25.017.000,00	22,90	0,00
5.1.01.05.11.0038	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	9.200.000,00	3.145.500,00	34,19	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.01.05.11.0039	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	3.852.500,00	2.347.917,00	60,95	0,00
5.1.01.05.11.0043	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.581.750,00	1.936.313,00	75,00	0,00
5.1.01.05.11.0044	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.203.400,00	1.253.500,00	56,89	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	720.000.000,00	565.062.170,00	78,48	710.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	120.000.000,00	93.120.000,00	77,60	110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	120.000.000,00	93.120.000,00	77,60	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	471.942.170,00	78,66	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	471.942.170,00	78,66	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	5.960.582.465,32	5.796.596.160,00	97,25	7.654.313.735,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	5.960.582.465,32	5.796.596.160,00	97,25	7.654.313.735,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	5.960.582.465,32	5.796.596.160,00	97,25	7.654.313.735,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.715.324.592,68	272.602.571.149,75	86,07	308.199.944.742,03
5.1.02.01	Belanja Barang	47.761.152.115,00	35.510.547.931,87	74,35	53.499.794.606,51
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.591.292.115,00	35.400.622.931,87	74,38	53.367.264.606,51
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	22.930.400,00	3.222.400,00	14,05	28.140.680,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	835.726.360,00	742.676.569,00	88,87	860.864.768,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	908.557.050,00	360.955.500,00	39,73	451.215.975,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	5.214.000,00	5.144.520,00	98,67	3.752.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	334.032.500,00	256.149.000,00	76,68	358.666.704,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	52.500.000,00	36.533.000,00	69,59	29.400.500,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	35.533.000,00	24.852.000,00	69,94	62.204.900,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	18.874.800,00	11.637.600,00	61,66	35.076.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.003.794.371,00	892.959.595,00	88,96	1.184.076.846,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.362.100,00	492.000,00	14,63	486.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.474.000,00	1.590.000,00	29,05	0,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	54.980.800,00	43.179.000,00	78,53	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	104.462.224,00	86.853.280,00	83,14	87.974.230,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	9.363.700,00	5.627.900,00	60,10	10.902.400,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.424.000,00	2.240.000,00	26,59	3.280.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.112.108.909,00	3.803.677.435,00	74,41	5.518.856.564,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	850.272.407,00	736.477.384,00	86,62	838.957.973,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	708.251.050,00	551.851.145,00	77,92	668.860.325,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	114.520.000,00	105.540.000,00	92,16	160.440.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.040.902.300,00	825.421.989,00	79,30	948.143.228,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.726.977.640,00	1.433.538.567,00	83,01	1.582.838.129,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	499.675.100,00	372.581.275,00	74,56	459.307.347,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.189.920.311,00	809.520.425,00	68,03	1.468.576.627,00
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	51.654.400,00	38.063.960,00	73,69	9.210.780,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	50.764.806,00	19.855.900,00	39,11	56.009.800,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.257.048.000,00	1.144.695.000,00	91,06	1.323.195.250,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36.608.800,00	8.516.750,00	23,26	166.442.405,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	356.567.690,00	223.433.831,00	62,66	872.232.796,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.634.800,00	7.046.000,00	92,29	17.554.070,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.316.515.097,00	6.451.548.939,87	62,54	15.007.037.461,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00	0,00	938.475.140,51
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.321.483.400,00	1.211.734.551,00	91,70	1.001.697.128,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	2.611.646.500,00	2.516.409.030,00	96,35	47.213.750,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	68.305.000,00	64.835.000,00	94,92	2.701.615.743,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.599.287.500,00	5.100.279.675,00	59,31	8.109.708.993,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.494.739.600,00	4.278.204.546,00	95,18	5.617.669.520,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.218.500.000,00	1.205.989.565,00	98,97	1.070.157.050,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	813.847.500,00	524.580.450,00	64,46	201.876.510,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	676.000.000,00	667.110.000,00	98,68	595.515.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	405.350.000,00	400.951.000,00	98,91	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	132.000.000,00	130.875.000,00	99,15	130.875.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	281.182.000,00	109.653.750,00	39,00	142.586.190,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	49.963.320,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	27.950.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.300.000,00	15.150.000,00	99,02	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	202.200.000,00	165.969.400,00	82,08	357.973.504,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	160.284.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	150.860.000,00	109.925.000,00	72,87	132.530.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	150.260.000,00	109.325.000,00	72,76	130.130.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	600.000,00	600.000,00	100,00	2.400.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0061	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0096	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	143.507.819.239,00	129.509.277.875,13	90,25	152.018.771.908,12
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	123.910.577.173,00	111.585.463.155,13	90,05	128.148.196.933,48
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.052.872.000,00	4.719.580.000,00	77,97	12.249.108.400,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.358.710.000,00	2.028.390.000,00	86,00	2.350.370.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	552.400.000,00	547.000.000,00	99,02	366.070.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00	0,00	2.452.950.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	8.000.000,00	4.450.000,00	55,63	5.700.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	8.400.000,00	4.200.000,00	50,00	2.450.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.250.000,00	9.750.000,00	95,12	1.300.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	40.800.000,00	39.000.000,00	95,59	90.620.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	741.700.000,00	667.200.000,00	89,96	704.500.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.620.960.000,00	10.522.660.000,00	99,07	16.691.967.992,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.348.035.000,00	4.109.408.092,00	76,84	5.322.177.097,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	368.810.000,00	245.664.500,00	66,61	274.982.845,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.336.200.000,00	4.147.069.233,00	95,64	4.187.796.849,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	8.532.320.000,00	8.509.132.647,00	99,73	8.700.691.695,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	703.000.000,00	699.863.637,00	99,55	1.145.978.148,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.263.000.000,00	1.261.630.000,00	99,89	1.496.142.863,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	183.020.000,00	175.010.000,00	95,62	112.785.313,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.260.803.808,00	3.196.976.308,00	98,04	3.300.110.315,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	482.000.000,00	461.659.050,00	95,78	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	816.000.000,00	638.550.000,00	78,25	613.299.444,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.067.500.000,00	9.565.855.600,00	95,02	6.912.480.230,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	760.000.000,00	697.886.364,00	91,83	821.969.487,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.897.840.000,00	3.782.378.188,00	97,04	3.461.664.832,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.597.800.000,00	1.366.304.000,00	85,51	1.263.320.950,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17.309.713.677,00	16.560.356.641,28	95,67	18.006.908.868,77
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.974.417.085,00	7.671.971.141,85	96,21	5.212.546.627,21
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	212.000.000,00	187.848.332,00	88,61	276.276.346,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	325.000.000,00	302.159.092,00	92,97	332.925.330,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	278.360.000,00	226.087.272,00	81,22	338.893.412,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	255.400.000,00	187.550.000,00	73,43	173.350.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	231.000.000,00	212.555.000,00	92,02	276.042.460,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	155.000.000,00	155.000.000,00	100,00	154.042.460,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	0,00	0,00	99.156.300,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	70.000.000,00	0,00	0,00	559.931.100,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.015.800.000,00	1.315.542.000,00	43,62	4.402.048.033,50
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	171.500.000,00	123.301.000,00	71,90	173.232.787,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	205.900.000,00	171.583.000,00	83,33	122.688.680,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	86.892.000,00	60.502.800,00	69,63	174.867.800,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.252.884.603,00	1.776.025.077,00	78,83	807.827.540,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	82.310.000,00	82.310.000,00	100,00	29.850.120,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	10.000.000,00	1.104.400,00	11,04	530.800,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.270.190.000,00	1.065.460.000,00	83,88	1.064.358.500,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	402.550.000,00	269.320.502,00	66,90	257.819.374,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.581.350.000,00	1.113.717.944,00	70,43	1.087.115.100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.287.670.000,00	5.921.431.679,00	81,25	6.569.915.079,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	705.830.000,00	679.607.850,00	96,28	733.996.800,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.553.235.000,00	3.271.168.538,00	92,06	3.154.753.173,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	39.145.000,00	4.613.827,00	11,79	6.168.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	50.050.000,00	32.036.200,00	64,01	14.965.600,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.300.000,00	10.107.768,00	41,60	38.342.864,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	60.000.000,00	8.127.000,00	13,55	12.794.285,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	14.185.859.000,00	12.740.168.072,00	89,81	11.475.757.507,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	95.000.000,00	27.390.400,00	28,83	52.225.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	800.000,00	800.000,00	100,00	3.430.527,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.201.366.466,00	10.909.072.916,00	97,39	13.130.153.939,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	6.973.940.766,00	6.973.939.300,00	100,00	9.119.761.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.248.177.000,00	1.107.022.000,00	88,69	1.310.447.600,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.023.620.000,00	1.899.296.481,00	93,86	2.173.058.022,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	509.431.200,00	497.529.107,24	97,66	241.611.291,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	446.197.500,00	431.286.027,76	96,66	285.276.026,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	2.175.848.480,00	2.175.848.283,00	100,00	2.272.361.482,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	2.175.848.480,00	2.175.848.283,00	100,00	2.270.461.482,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.430.250.000,00	1.938.223.485,00	79,75	3.160.344.155,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	503.250.000,00	295.166.820,00	58,65	161.887.500,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	386.400.000,00	267.100.000,00	69,13	334.271.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	144.730.000,00	139.000.000,00	96,04	135.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.165.670.000,00	1.080.556.665,00	92,70	2.202.991.805,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	67.300.000,00	47.040.000,00	69,90	47.210.500,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	56.250.000,00	14.650.000,00	26,04	56.500.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	99.977.750,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	94.150.000,00	91.710.000,00	97,41	121.005.600,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	664.600.000,00	473.125.633,00	71,19	806.444.412,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	123.000.000,00	49.500.000,00	40,24	295.675.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	14.000.000,00	2.850.000,00	20,36	8.500.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	23.000.000,00	11.600.000,00	50,43	17.760.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	485.600.000,00	400.175.633,00	82,41	475.509.412,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.06.0131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	363.500.000,00	345.250.000,00	94,98	269.741.000,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.898.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	91.500.000,00	73.300.000,00	80,11	25.493.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	272.000.000,00	271.950.000,00	99,98	230.350.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	342.000.000,00	68.952.500,00	20,16	1.526.467.754,84
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	82.817.409,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	327.660.900,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	566.270.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	0,00	0,00	461.871.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	270.000.000,00	68.952.500,00	25,54	87.848.445,84
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	643.000.000,00	533.943.678,00	83,04	1.199.531.005,80
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00	0,00	84.604.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	173.000.000,00	73.000.000,00	42,20	246.584.029,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.000.000,00	49.938.900,00	99,88	225.212.160,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	144.000.000,00	142.601.783,00	99,03	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	276.000.000,00	268.402.995,00	97,25	463.632.136,05
5.1.02.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00	179.498.680,75
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	211.500.000,00	209.500.000,00	99,05	0,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	72.000.000,00	70.000.000,00	97,22	0,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	117.000.000,00	117.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	767.467.000,00	718.157.850,00	93,58	943.732.440,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	694.252.000,00	644.942.850,00	92,90	478.577.440,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	73.215.000,00	73.215.000,00	100,00	465.155.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	425.200.000,00	294.528.409,00	69,27	290.247.549,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	93.825.804,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	29.354.940,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	4.568.574,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.500.000,00	5.965.554,00	79,54	7.491.442,00
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	44.984.763,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.167.819,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.700.000,00	416.907,00	15,44	348.163,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	17.500.000,00	2.324.070,00	13,28	12.299.948,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	127.500.000,00	92.821.934,00	72,80	96.206.096,00
5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],	270.000.000,00	192.999.944,00	71,48	0,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	352.510.120,00	257.211.966,00	72,97	271.551.237,00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	31.000.000,00	30.959.169,00	99,87	20.813.850,00
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	11.940.098,00	8.738.000,00	73,18	9.180.000,00
5.1.02.02.14.0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	26.112.000,00	16.240.000,00	62,19	16.830.000,00
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.665.600,00	710.000,00	26,64	761.600,00
5.1.02.02.14.0015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	64.005.000,00
5.1.02.02.14.0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	190.000.000,00	172.832.797,00	90,96	159.960.787,00
5.1.02.02.14.0034	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	4.896.000,00	2.753.000,00	56,23	0,00
5.1.02.02.14.0036	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	78.088.382,00	22.189.000,00	28,42	0,00
5.1.02.02.14.0038	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	7.808.040,00	2.790.000,00	35,73	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	27.594.558.895,00	22.044.698.814,85	79,89	22.579.306.504,01
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.541.248.895,00	17.594.768.024,00	81,68	16.735.338.489,00
5.1.02.03.02.0005	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler	0,00	0,00	0,00	3.521.825.057,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	1.015.521.500,00	856.175.994,00	84,31	369.182.192,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	109.890.900,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	305.475.020,00	128.937.221,00	42,21	384.748.175,00
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	7.700.000,00	7.698.750,00	99,98	7.335.000,00
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	7.500.000,00	860.000,00	11,47	0,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	112.610.000,00	49.730.290,00	44,16	48.623.400,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	16.500.000,00	3.560.000,00	21,58	8.464.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	213.780.000,00	107.673.000,00	50,37	165.930.740,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.534.340.000,00	2.845.183.872,00	80,50	3.426.000.705,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.828.880.000,00	2.459.204.443,00	86,93	2.636.237.793,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	37.110.000,00	36.927.100,00	99,51	129.659.750,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.213.530.000,00	1.893.772.663,00	85,55	1.884.410.395,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.563.633.750,00	1.553.412.300,00	60,59	1.832.211.240,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	533.197.975,00	438.724.323,00	82,28	442.209.358,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	6.373.413.250,00	6.098.533.863,00	95,69	539.252.425,00
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	560.000,00	391.000,00	69,82	0,00
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	9.000.000,00	1.599.000,00	17,77	0,00
5.1.02.03.02.0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.995.000,00
5.1.02.03.02.0060	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	20.000.000,00	2.587.800,00	12,94	3.327.600,00
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	10.930.000,00	3.625.000,00	33,17	0,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	112.120.000,00	91.639.620,00	81,73	444.750,00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	5.000.000,00	4.550.000,00	91,00	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	5.296.000,00	52,96	265.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	414.480.000,00	245.606.674,00	59,26	293.012.539,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.320.000,00	11.869.000,00	72,73	7.134.650,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.490.000,00	1.220.000,00	22,22	3.320.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	381.335.000,00	202.925.435,00	53,21	261.682.164,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	10.800.000,00	10.179.750,00	94,26	9.150.250,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	60.000.000,00	33.466.500,00	55,78	77.689.400,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	2.100.000,00	2.076.300,00	98,87	7.992.000,00
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	680.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	9.200.000,00	5.092.000,00	55,35	12.932.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	25.992.400,00	14.152.300,00	54,45	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	251.370.000,00	186.137.450,00	74,05	210.101.740,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	157.180.000,00	100.369.070,00	63,86	186.368.850,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.400.000,00	0,00	0,00	9.898.350,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	55.000.000,00	54.703.335,00	99,46	64.220.666,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	60.000.000,00	59.718.000,00	99,53	51.886.800,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	152.100.000,00	77.169.971,00	50,74	13.345.600,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.047.502.900,00	1.920.361.180,85	63,01	3.036.830.080,01
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.610.324.300,00	1.035.332.931,00	64,29	1.734.820.692,01
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	108.895.400,00	33.144.723,00	30,44	15.106.065,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	27.295.481,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.842.000,00	20.342.000,00	114,01	2.860.000,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	137.640.000,00	136.111.766,13	98,89	146.430.892,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	374.155.600,00	68.842.420,00	18,40	518.217.000,00
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	7.114.212,00
5.1.02.03.03.0014	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	26.989.650,00
5.1.02.03.03.0015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	10.490.000,00	9.304.450,00	88,70	0,00
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	77.240.000,00	75.901.800,00	98,27	167.499.383,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	57.180.000,00	28.271.060,00	49,44	171.030.470,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	30.600.000,00	30.573.924,00	99,91	38.263.250,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	111.810.000,00	73.260.114,00	65,52	8.976.950,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	262.000.000,00	203.964.882,00	77,85	45.074.385,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	249.325.600,00	205.311.110,72	82,35	127.151.650,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.005.807.100,00	2.529.569.610,00	84,16	2.807.137.935,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	990.472.100,00	952.204.379,00	96,14	827.078.106,00
5.1.02.03.04.0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	55.950.000,00	55.950.000,00	100,00	58.944.700,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	576.000.000,00	570.496.902,00	99,04	633.791.423,00
5.1.02.03.04.0063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	7.500.000,00	5.383.500,00	71,78	1.900.000,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	620.885.000,00	510.815.106,00	82,27	627.239.896,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	20.000.000,00	4.095.000,00	20,48	18.824.378,00
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	66.500.000,00	52.215.305,00	78,52	36.869.660,00
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	50.000.000,00	21.250.000,00	42,50	137.095.815,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	30.000.000,00	682.000,00	2,27	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	550.000.000,00	332.259.138,00	60,41	458.917.107,00
5.1.02.03.04.0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	30.000.000,00	19.226.000,00	64,09	0,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	8.500.000,00	4.992.280,00	58,73	6.476.850,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	53.012.447.833,00	42.860.599.777,00	80,85	46.347.966.470,39
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.754.447.833,00	42.798.803.871,00	81,13	45.812.412.722,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.599.221.833,00	38.319.763.071,00	82,23	39.323.832.302,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.329.943.495,00	1.659.497.800,00	71,22	2.369.198.850,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.936.435.505,00	2.371.363.000,00	80,76	3.248.802.570,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	888.847.000,00	448.180.000,00	50,42	870.579.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	258.000.000,00	61.795.906,00	23,95	535.553.748,39
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	258.000.000,00	61.795.906,00	23,95	535.553.748,39
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.125.848.000,00	16.404.660.750,00	95,79	8.483.313.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.409.500.000,00	1.008.014.000,00	71,52	2.943.683.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.270.500.000,00	942.464.000,00	74,18	1.257.775.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	131.800.000,00	65.100.000,00	49,39	580.868.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	7.200.000,00	450.000,00	6,25	1.200.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.716.348.000,00	15.396.646.750,00	97,97	5.539.630.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	37.100.000,00	36.300.000,00	97,84	26.840.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	15.679.248.000,00	15.360.346.750,00	97,97	5.512.790.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.560.963.589,00	12.441.993.638,00	99,05	11.886.674.293,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.560.963.589,00	12.441.993.638,00	99,05	11.886.674.293,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.560.963.589,00	12.441.993.638,00	99,05	11.886.674.293,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.268.551.000,00	2.132.395.407,00	65,24	0,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.268.551.000,00	2.132.395.407,00	65,24	0,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.268.551.000,00	2.132.395.407,00	65,24	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.883.983.921,68	11.698.396.955,90	98,44	13.384.117.960,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.883.983.921,68	11.698.396.955,90	98,44	13.384.117.960,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.883.983.921,68	11.698.396.955,90	98,44	13.384.117.960,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	100,00	2.499.916.363,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	100,00	2.499.916.363,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	100,00	2.499.916.363,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	100,00	2.499.916.363,00
5.1.05	Belanja Hibah	57.105.915.374,00	51.339.007.283,12	89,90	43.676.370.940,88
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	16.136.761.850,00	16.023.578.753,12	99,30	5.599.900.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	15.471.761.850,00	15.431.761.850,00	99,74	5.599.900.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	15.471.761.850,00	15.431.761.850,00	99,74	5.599.900.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	665.000.000,00	591.816.903,12	89,00	0,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	665.000.000,00	591.816.903,12	89,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	32.876.090.000,00	27.294.156.719,00	83,02	30.244.973.984,88
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.135.090.000,00	12.227.282.970,00	80,79	14.011.464.746,88
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.135.090.000,00	12.227.282.970,00	80,79	12.396.512.314,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	1.614.952.432,88
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.083.000.000,00	15.041.873.749,00	88,05	14.848.788.178,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.083.000.000,00	15.041.873.749,00	88,05	14.848.788.178,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	633.000.000,00	0,00	0,00	810.268.970,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	633.000.000,00	0,00	0,00	810.268.970,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	179.935.890,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	179.935.890,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	394.516.200,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	394.516.200,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	7.317.750.000,00	7.284.106.494,00	99,54	7.125.439.966,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	7.317.750.000,00	7.284.106.494,00	99,54	7.125.439.966,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	7.317.750.000,00	7.284.106.494,00	99,54	7.125.439.966,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.313.524,00	737.165.317,00	95,08	706.056.990,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.313.524,00	737.165.317,00	95,08	706.056.990,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.313.524,00	737.165.317,00	95,08	706.056.990,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.199.100.000,00	2.897.600.000,00	90,58	4.853.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	391.000.000,00	89.500.000,00	22,89	1.318.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	391.000.000,00	89.500.000,00	22,89	1.318.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	391.000.000,00	89.500.000,00	22,89	1.318.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.808.100.000,00	2.808.100.000,00	100,00	3.535.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.808.100.000,00	2.808.100.000,00	100,00	3.535.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.808.100.000,00	2.808.100.000,00	100,00	3.535.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**727.886.843.406,00**	**665.946.895.972,54**	**91,49**	**667.764.935.144,91**
5.2	**BELANJA MODAL**	**69.943.686.777,00**	**63.532.002.219,77**	**90,83**	**74.023.558.551,40**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.576.288.033,00	12.261.224.480,70	84,12	26.111.089.608,47
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	539.507.072,00	439.566.000,00	81,48	497.051.798,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	539.507.072,00	439.566.000,00	81,48	497.051.798,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	390.161.442,00	389.490.000,00	99,83	23.847.120,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	148.695.630,00	50.076.000,00	33,68	46.943.948,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	0,00	0,00	0,00	9.260.730,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	417.000.000,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	650.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.578.835.994,00	2.504.595.250,00	97,12	3.793.163.150,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.432.210.994,00	2.363.870.250,00	97,19	3.780.853.750,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	2.039.451.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	282.600.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	879.960.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	432.572.794,00	419.370.250,00	96,95	450.499.750,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	94.538.200,00	44.500.000,00	47,07	126.353.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.905.100.000,00	1.900.000.000,00	99,73	0,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	146.625.000,00	140.725.000,00	95,98	12.309.400,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	146.625.000,00	140.725.000,00	95,98	12.309.400,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	46.909.000,00	37.867.400,00	80,73	66.730.320,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	59.266.680,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	9.316.680,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.028.000,00	3.252.400,00	80,74	6.863.640,00
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	4.028.000,00	3.252.400,00	80,74	3.285.000,00
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	0,00	0,00	0,00	3.578.640,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	42.881.000,00	34.615.000,00	80,72	600.000,00
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	5.541.000,00	5.540.000,00	99,98	0,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	2.500.000,00	1.950.000,00	78,00	600.000,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	22.880.000,00	17.045.000,00	74,50	0,00
5.2.02.03.03.0016	Belanja Modal Specific Set	11.960.000,00	10.080.000,00	84,28	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	7.317.200,00	4.614.160,00	63,06	1.820.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	7.317.200,00	4.614.160,00	63,06	1.820.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	7.317.200,00	4.614.160,00	63,06	1.820.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.841.876.328,00	2.144.446.670,70	75,46	7.729.182.703,47
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	867.347.406,00	490.934.875,00	56,60	542.633.413,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	10.159.900,00	250.000,00	2,46	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	255.478.706,00	123.074.800,00	48,17	15.459.998,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	601.708.800,00	367.610.075,00	61,09	527.173.415,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.776.353.992,00	1.516.074.645,70	85,35	6.932.732.824,47
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	503.548.800,00	464.423.985,00	92,23	3.097.603.937,37
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	21.800.000,00	21.750.000,00	99,77	0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	18.265.000,00	16.938.000,00	92,73	40.451.958,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	111.506.300,00	68.046.986,00	61,03	76.808.495,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	86.912.400,00	85.780.965,70	98,70	8.064.372,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.034.321.492,00	859.134.709,00	83,06	3.708.604.062,10
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	198.174.930,00	137.437.150,00	69,35	253.816.466,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	32.640.000,00	32.602.500,00	99,89	61.980.200,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	17.563.530,00	13.537.100,00	77,08	78.248.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	28.527.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	147.971.400,00	91.297.550,00	61,70	85.061.266,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	695.321.300,00	452.191.710,00	65,03	323.258.380,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	495.544.300,00	273.335.000,00	55,16	77.567.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	425.662.000,00	253.135.000,00	59,47	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	69.882.300,00	20.200.000,00	28,91	40.067.000,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	199.777.000,00	178.856.710,00	89,53	221.191.380,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	161.137.000,00	140.533.960,00	87,21	185.323.380,00
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	31.650.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	38.640.000,00	38.322.750,00	99,18	4.218.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
5.2.02.06.03.0022	Belanja Modal Humidity Control	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	992.457.603,00	742.034.126,00	74,77	7.856.535.940,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	734.297.728,00	530.321.926,00	72,22	5.305.062.176,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	135.579.954,00	110.941.576,00	81,83	2.187.840.870,00
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	17.050.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	53.760.720,00	45.442.000,00	84,53	1.305.400.000,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	325.573.054,00	286.552.350,00	88,01	1.628.591.306,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.202.000,00	1.200.000,00	99,83	0,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	187.512.000,00	55.536.000,00	29,62	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.2.02.07.01.0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	30.670.000,00	30.650.000,00	99,93	100.180.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	258.159.875,00	211.712.200,00	82,01	2.551.473.764,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	258.159.875,00	211.712.200,00	82,01	2.551.473.764,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.307.363.733,00	1.164.128.405,00	89,04	1.303.250.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.047.586.733,00	950.064.405,00	90,69	302.050.000,00
5.2.02.08.01.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00	0,00	0,00	45.600.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	787.818.733,00	701.173.405,00	89,00	0,00
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	250.000.000,00	248.891.000,00	99,56	0,00
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	246.000.000,00
5.2.02.08.01.0015	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	9.768.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	257.113.000,00	214.064.000,00	83,26	1.001.200.000,00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	116.814.000,00	116.300.000,00	99,56	0,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	20.122.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	20.177.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	100.000.000,00	97.764.000,00	97,76	1.200.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.996.823.846,00	1.479.240.700,00	74,08	4.399.560.817,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.673.232.246,00	1.286.232.250,00	76,87	3.834.699.226,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	385.335.500,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.574.216.246,00	1.213.292.250,00	77,07	3.077.386.755,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	99.016.000,00	72.940.000,00	73,66	371.976.971,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	323.591.600,00	193.008.450,00	59,65	564.861.591,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	290.320.600,00	171.049.950,00	58,92	560.585.691,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	24.826.000,00	13.558.500,00	54,61	4.275.900,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.445.000,00	8.400.000,00	99,47	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	9.076.500,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	7.492.500,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	7.492.500,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	198.135.000,00	197.285.000,00	99,57	131.460.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	198.135.000,00	197.285.000,00	99,57	131.460.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00	131.460.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	198.135.000,00	197.285.000,00	99,57	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.340.644.007,00	2.290.378.244,00	97,85	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.340.644.007,00	2.290.378.244,00	97,85	0,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.340.644.007,00	2.290.378.244,00	97,85	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.031.096.950,00	804.876.815,00	78,06	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.031.096.950,00	804.876.815,00	78,06	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.031.096.950,00	804.876.815,00	78,06	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.771.313.480,00	31.435.241.904,22	93,08	27.005.206.763,60
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	33.478.313.480,00	31.143.610.135,14	93,03	26.558.541.204,60
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.478.313.480,00	31.143.610.135,14	93,03	26.558.541.204,60
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	490.840.000,00	388.897.947,83	79,23	3.624.097.289,28
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	15.000.000,00	0,00	0,00	82.582.196,25
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	21.900.797.480,00	20.630.683.674,58	94,20	677.751.096,91
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.501.676.000,00	9.689.048.160,61	92,26	5.906.446.514,07
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	14.312.391.356,89
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	11.593.495,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	78.400.000,00
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	0,00	0,00	0,00	41.290.224,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	197.870.831,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	470.000.000,00	434.980.352,12	92,55	912.795.924,98
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	100.000.000,00	0,00	0,00	79.728.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	261.207.745,96
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	357.468.130,26
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.918.400,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	293.000.000,00	291.631.769,08	99,53	446.665.559,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	293.000.000,00	291.631.769,08	99,53	446.665.559,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	115.594.212,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	123.000.000,00	122.068.405,08	99,24	215.492.000,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	170.000.000,00	169.563.364,00	99,74	115.579.347,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.966.602.364,00	18.357.697.907,85	91,94	19.501.037.779,33
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	6.274.562.012,00	5.824.867.718,52	92,83	9.920.972.281,54
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	6.274.562.012,00	5.824.867.718,52	92,83	9.841.599.679,70
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	4.181.635.600,00	4.085.369.921,24	97,70	4.567.616.457,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.092.926.412,00	1.739.497.797,28	83,11	5.273.983.222,70
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	79.372.601,84

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	0,00	0,00	0,00	19.505.854,84
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	59.866.747,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	611.600.000,00	421.644.164,87	68,94	5.446.571.438,85
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	3.392.472.628,85
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	3.392.472.628,85
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	611.600.000,00	421.644.164,87	68,94	2.054.098.810,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	611.600.000,00	421.644.164,87	68,94	2.054.098.810,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	12.428.748.000,00	11.660.361.987,46	93,82	2.944.928.691,74
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	7.204.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.204.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.428.748.000,00	1.236.011.481,00	86,51	2.933.474.691,74
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.428.748.000,00	1.236.011.481,00	86,51	2.933.474.691,74
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	11.000.000.000,00	10.424.350.506,46	94,77	4.250.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	11.000.000.000,00	10.424.350.506,46	94,77	4.250.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	651.692.352,00	450.824.037,00	69,18	1.188.565.367,20
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	651.692.352,00	450.824.037,00	69,18	1.188.565.367,20
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	651.692.352,00	450.824.037,00	69,18	1.188.565.367,20
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.429.482.900,00	1.278.037.927,00	89,41	1.406.224.400,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	1.215.824.400,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	1.215.824.400,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	1.199.290.200,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0,00	0,00	0,00	16.534.200,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	190.400.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	190.400.000,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	140.650.000,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.750.000,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03.01	Belanja Modal Hewan Piaraan	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03.01.0003	Belanja Modal Hewan Kebun Binatang	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	3.384.000,00	3.384.000,00	100,00	0,00
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	3.384.000,00	3.384.000,00	100,00	0,00
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	3.384.000,00	3.384.000,00	100,00	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.306.098.900,00	1.274.653.927,00	97,59	0,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.306.098.900,00	1.274.653.927,00	97,59	0,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.306.098.900,00	1.274.653.927,00	97,59	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
	JUMLAH BELANJA MODAL	**69.943.686.777,00**	**63.532.002.219,77**	**90,83**	**74.023.558.551,40**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.000.000.000,00**	**380.911,00**	**0,04**	**849.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	380.911,00	0,04	849.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	380.911,00	0,04	849.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	380.911,00	0,04	849.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	380.911,00	0,04	849.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.000.000.000,00**	**380.911,00**	**0,04**	**849.000,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**9.600.620.000,00**	**9.597.200.000,00**	**99,96**	**9.450.620.000,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	99,96	9.450.620.000,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	99,96	9.450.620.000,00
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	99,96	9.450.620.000,00
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	99,96	9.450.620.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**9.600.620.000,00**	**9.597.200.000,00**	**99,96**	**9.450.620.000,00**
	JUMLAH BELANJA	**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**91,42**	**751.239.962.696,31**
	SURPLUS/DEFISIT	**(33.057.673.165,00)**	**2.305.600.225,09**	**(6,97)**	**(44.264.514.523,66)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**100,00**	**77.322.187.688,46**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**100,00**	**77.322.187.688,46**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	100,00	77.322.187.688,46
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	2.657.506.140,00	2.657.506.140,00	100,00	0,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	1.715.016.528,00	1.715.016.528,00	100,00	0,00
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	23.039.176,00	23.039.176,00	100,00	0,00
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	399.398.873,00	399.398.873,00	100,00	0,00
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	226.971.019,00	226.971.019,00	100,00	0,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.065.607.460,00	1.065.607.460,00	100,00	0,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	14.564.154,00	14.564.154,00	100,00	0,00
6.1.01.01.02.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	14.564.154,00	14.564.154,00	100,00	0,00
6.1.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56.418.566,00	56.418.566,00	100,00	0,00
6.1.01.01.03.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	56.418.566,00	56.418.566,00	100,00	0,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	871.506.892,00	871.506.892,00	100,00	0,00
6.1.01.01.04.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	18.140.899,00	18.140.899,00	100,00	0,00
6.1.01.01.04.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	600.100,00	600.100,00	100,00	0,00
6.1.01.01.04.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	30.661.074,00	30.661.074,00	100,00	0,00
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	82.474.140,00	82.474.140,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	181.346.774,00	181.346.774,00	100,00	0,00
6.1.01.01.04.0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	133.893.988,00	133.893.988,00	100,00	0,00
6.1.01.01.04.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	386.139.917,00	386.139.917,00	100,00	0,00
6.1.01.01.04.0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah	37.750.000,00	37.750.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	2.716.170.000,00	2.716.170.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	2.716.170.000,00	2.716.170.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	119.096.000,00	119.096.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	1.572.421.000,00	1.572.421.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	77.697.000,00	77.697.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0007	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	109.657.000,00	109.657.000,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	837.299.000,00	837.299.000,00	100,00	0,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	134.012.443,00	134.012.443,00	100,00	0,00
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	134.012.443,00	134.012.443,00	100,00	0,00
6.1.01.03.03.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	134.012.443,00	134.012.443,00	100,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	22.231.816.028,00	22.231.816.028,00	100,00	77.322.187.688,46
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	17.930.000.000,00	17.930.000.000,00	100,00	53.689.110.313,02
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	6.108.081.956,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	100,00	7.480.925.929,46
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	100,00	9.423.461.470,26
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	2.910.000.000,00	2.910.000.000,00	100,00	15.572.086.746,32
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	100,00	6.048.548.091,14
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	1.630.000.000,00	1.630.000.000,00	100,00	5.994.431.341,00
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	329.553.230,00
6.1.01.05.01.0017	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	470.520.000,00
6.1.01.05.01.0018	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	4.010.734,00
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	2.124.578.958,84

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
6.1.01.05.01.0025	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	78.321.320,00
6.1.01.05.01.0026	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	29.590.536,00
6.1.01.05.01.0028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	3.302.665.028,00	3.302.665.028,00	100,00	18.657.848.058,44
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	863.000.000,00	863.000.000,00	100,00	96.295.510,00
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	2.815.700.875,00
6.1.01.05.02.0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	20.784.701,00
6.1.01.05.02.0005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.239.096,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	239.665.028,00	239.665.028,00	100,00	1.079.947.848,14
6.1.01.05.02.0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	42.583.085,00
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	2.027.160.812,86
6.1.01.05.02.0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	201.830.455,00
6.1.01.05.02.0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	0,00	0,00	0,00	519.081.164,00
6.1.01.05.02.0016	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6.1.01.05.02.0017	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	8.390.400,00
6.1.01.05.02.0019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	107.480,00
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	74.556.040,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	7.229.152.108,29
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	171.647.076,65
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	3.468.743.474,46
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	439.235.918,05
6.1.01.05.02.0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	0,00	0,00	0,00	157.518.535,45
6.1.01.05.02.0028	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	0,00	0,00	0,00	193.779.544,54
6.1.01.05.02.0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	11.012.314,00
6.1.01.05.02.0030	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	21.236.620,00
6.1.01.05.02.0031	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan	0,00	0,00	0,00	6.775.000,00
6.1.01.05.02.0033	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	999.151.000,00	999.151.000,00	100,00	4.728.562.650,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	999.151.000,00	999.151.000,00	100,00	4.728.562.650,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	246.666.667,00
6.1.01.05.04.0005	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	246.666.667,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	5.318.168.554,00	5.318.168.553,80	100,00	0,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	2.501.217.532,00	2.501.217.532,00	100,00	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	2.501.217.532,00	2.501.217.532,00	100,00	0,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	986.838.017,00	986.838.017,00	100,00	0,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	986.838.017,00	986.838.017,00	100,00	0,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	1.830.113.005,00	1.830.113.004,80	100,00	0,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	1.830.113.005,00	1.830.113.004,80	100,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**100,00**	**77.322.187.688,46**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)* 100	6
	PEMBIAYAAN NETTO	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**100,00**	**77.322.187.688,46**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**35.363.273.389,89**	**0,00**	**33.057.673.164,80**

Bukittinggi, Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN I.3
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	176.077.459.140,00	170.828.725.962,34	(5.248.733.177,66)	97,01	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.803.478.996,00	57.302.328.754,34	(4.501.150.241,66)	92,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.365.098.649,00	29.431.329.673,95	(1.933.768.975,05)	93,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	774.172.700,00	488.334.949,40	(285.837.750,60)	63,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.172.700,00	12.947.700,00	(225.000,00)	98,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.172.700,00	12.947.700,00	(225.000,00)	98,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	761.000.000,00	475.387.249,40	(285.612.750,60)	62,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	761.000.000,00	475.387.249,40	(285.612.750,60)	62,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.126.597.000,00	1.076.241.790,03	(50.355.209,97)	95,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	1.126.597.000,00	1.076.241.790,03	(50.355.209,97)	95,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.126.597.000,00	1.076.241.790,03	(50.355.209,97)	95,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	488.584.000,00	486.731.171,45	(1.852.828,55)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	488.584.000,00	486.731.171,45	(1.852.828,55)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	488.584.000,00	486.731.171,45	(1.852.828,55)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	217.848.000,00	217.255.353,74	(592.646,26)	99,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	217.848.000,00	217.255.353,74	(592.646,26)	99,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	217.848.000,00	217.255.353,74	(592.646,26)	99,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		Pengadaan Mebel Sekolah	123.732.000,00	123.005.000,00	(727.000,00)	99,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	123.732.000,00	123.005.000,00	(727.000,00)	99,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.732.000,00	123.005.000,00	(727.000,00)	99,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	145.000.000,00	552.000,00	(144.448.000,00)	0,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	552.000,00	552.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.000,00	552.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	144.448.000,00	0,00	(144.448.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.448.000,00	0,00	(144.448.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	272.000.000,00	45.000.000,00	(227.000.000,00)	16,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	272.000.000,00	45.000.000,00	(227.000.000,00)	16,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	262.000.000,00	45.000.000,00	(217.000.000,00)	17,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	330.299.000,00	173.800.000,00	(156.499.000,00)	52,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	330.299.000,00	173.800.000,00	(156.499.000,00)	52,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	330.299.000,00	173.800.000,00	(156.499.000,00)	52,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	342.385.400,00	321.546.791,00	(20.838.609,00)	93,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	342.385.400,00	321.546.791,00	(20.838.609,00)	93,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.385.400,00	321.546.791,00	(20.838.609,00)	93,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.725.254.000,00	7.647.186.600,00	(78.067.400,00)	98,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	7.725.254.000,00	7.647.186.600,00	(78.067.400,00)	98,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.725.254.000,00	7.647.186.600,00	(78.067.400,00)	98,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	95.717.200,00	85.808.366,00	(9.908.834,00)	89,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	95.717.200,00	85.808.366,00	(9.908.834,00)	89,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.717.200,00	85.808.366,00	(9.908.834,00)	89,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	769.691.700,00	421.169.473,00	(348.522.227,00)	54,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	735.176.700,00	386.829.473,00	(348.347.227,00)	52,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.176.700,00	88.829.473,00	(18.347.227,00)	82,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.05	Belanja Hibah	628.000.000,00	298.000.000,00	(330.000.000,00)	47,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	34.515.000,00	34.340.000,00	(175.000,00)	99,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.515.000,00	34.340.000,00	(175.000,00)	99,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.469.994.549,00	15.312.487.771,00	(157.506.778,00)	98,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	13.949.079.283,00	13.835.976.741,00	(113.102.542,00)	99,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.980.119.283,00	7.885.653.479,00	(94.465.804,00)	98,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	5.968.960.000,00	5.950.323.262,00	(18.636.738,00)	99,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	1.520.915.266,00	1.476.511.030,00	(44.404.236,00)	97,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.293.453.266,00	1.279.559.703,00	(13.893.563,00)	98,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	227.462.000,00	196.951.327,00	(30.510.673,00)	86,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	31.199.300,00	28.397.800,00	(2.801.500,00)	91,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	31.199.300,00	28.397.800,00	(2.801.500,00)	91,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.199.300,00	28.397.800,00	(2.801.500,00)	91,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	175.001.900,00	52.939.889,00	(122.062.011,00)	30,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	175.001.900,00	52.939.889,00	(122.062.011,00)	30,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.001.900,00	52.939.889,00	(122.062.011,00)	30,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	762.755.900,00	499.571.193,36	(263.184.706,64)	65,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.1	BELANJA OPERASI	17.021.900,00	16.902.900,00	(119.000,00)	99,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.021.900,00	16.902.900,00	(119.000,00)	99,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2	BELANJA MODAL	745.734.000,00	482.668.293,36	(263.065.706,64)	64,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	745.734.000,00	482.668.293,36	(263.065.706,64)	64,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	731.238.000,00	703.743.104,00	(27.494.896,00)	96,23	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	731.238.000,00	703.743.104,00	(27.494.896,00)	96,23	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	731.238.000,00	703.743.104,00	(27.494.896,00)	96,23	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.783.628.000,00	1.747.558.421,97	(36.069.578,03)	97,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	1.783.628.000,00	1.747.558.421,97	(36.069.578,03)	97,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.783.628.000,00	1.747.558.421,97	(36.069.578,03)	97,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.858.393.747,00	16.538.153.850,75	(1.320.239.896,25)	92,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.361.000.000,00	2.296.563.843,51	(64.436.156,49)	97,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	2.361.000.000,00	2.296.563.843,51	(64.436.156,49)	97,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.361.000.000,00	2.296.563.843,51	(64.436.156,49)	97,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0016		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	337.429.000,00	335.237.430,22	(2.191.569,78)	99,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0016	5.2	BELANJA MODAL	337.429.000,00	335.237.430,22	(2.191.569,78)	99,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0016	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	337.429.000,00	335.237.430,22	(2.191.569,78)	99,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	256.931.000,00	254.071.597,07	(2.859.402,93)	98,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	256.931.000,00	254.071.597,07	(2.859.402,93)	98,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	256.931.000,00	254.071.597,07	(2.859.402,93)	98,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	155.687.000,00	155.302.859,17	(384.140,83)	99,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.2	BELANJA MODAL	155.687.000,00	155.302.859,17	(384.140,83)	99,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	155.687.000,00	155.302.859,17	(384.140,83)	99,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	305.049.500,00	212.217.452,87	(92.832.047,13)	69,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	305.049.500,00	212.217.452,87	(92.832.047,13)	69,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	305.049.500,00	212.217.452,87	(92.832.047,13)	69,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025		Pengadaan Mebel Sekolah	223.076.000,00	222.229.000,00	(847.000,00)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	223.076.000,00	222.229.000,00	(847.000,00)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.076.000,00	222.229.000,00	(847.000,00)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	50.680.000,00	0,00	(50.680.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2	BELANJA MODAL	50.680.000,00	0,00	(50.680.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.680.000,00	0,00	(50.680.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	129.000.000,00	44.500.000,00	(84.500.000,00)	34,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	129.000.000,00	44.500.000,00	(84.500.000,00)	34,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	129.000.000,00	44.500.000,00	(84.500.000,00)	34,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	264.027.600,00	113.340.000,00	(150.687.600,00)	42,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2	BELANJA MODAL	264.027.600,00	113.340.000,00	(150.687.600,00)	42,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.027.600,00	113.340.000,00	(150.687.600,00)	42,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	407.260.600,00	379.223.877,00	(28.036.723,00)	93,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	407.260.600,00	379.223.877,00	(28.036.723,00)	93,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.260.600,00	379.223.877,00	(28.036.723,00)	93,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.102.472.000,00	3.092.706.250,00	(9.765.750,00)	99,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1	BELANJA OPERASI	3.102.472.000,00	3.092.706.250,00	(9.765.750,00)	99,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.102.472.000,00	3.092.706.250,00	(9.765.750,00)	99,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90.905.000,00	89.359.360,00	(1.545.640,00)	98,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	90.905.000,00	89.359.360,00	(1.545.640,00)	98,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.905.000,00	24.359.360,00	(1.545.640,00)	94,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.05	Belanja Hibah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	238.545.900,00	125.460.870,00	(113.085.030,00)	52,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	238.545.900,00	125.460.870,00	(113.085.030,00)	52,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.545.900,00	125.460.870,00	(7.085.030,00)	94,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.05	Belanja Hibah	106.000.000,00	0,00	(106.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.055.461.947,00	7.978.644.532,00	(76.817.415,00)	99,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	5.929.634.306,00	5.890.123.391,00	(39.510.915,00)	99,33	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.580.844.306,00	4.556.340.159,00	(24.504.147,00)	99,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	1.348.790.000,00	1.333.783.232,00	(15.006.768,00)	98,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	2.125.827.641,00	2.088.521.141,00	(37.306.500,00)	98,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.047.190.741,00	1.010.818.541,00	(36.372.200,00)	96,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.078.636.900,00	1.077.702.600,00	(934.300,00)	99,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	390.297.700,00	355.043.304,00	(35.254.396,00)	90,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1	BELANJA OPERASI	390.297.700,00	355.043.304,00	(35.254.396,00)	90,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.297.700,00	355.043.304,00	(35.254.396,00)	90,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	650.078.000,00	47.085.694,00	(602.992.306,00)	7,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1	BELANJA OPERASI	650.078.000,00	47.085.694,00	(602.992.306,00)	7,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.078.000,00	47.085.694,00	(602.992.306,00)	7,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	840.492.500,00	837.167.780,91	(3.324.719,09)	99,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	5.2	BELANJA MODAL	840.492.500,00	837.167.780,91	(3.324.719,09)	99,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	840.492.500,00	837.167.780,91	(3.324.719,09)	99,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.918.846.400,00	9.070.620.110,95	(848.226.289,05)	91,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	928.116.400,00	927.039.474,95	(1.076.925,05)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	519.279.000,00	518.890.186,03	(388.813,97)	99,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.279.000,00	518.890.186,03	(388.813,97)	99,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	408.837.400,00	408.149.288,92	(688.111,08)	99,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.313.000,00	42.140.000,00	(173.000,00)	99,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	366.524.400,00	366.009.288,92	(515.111,08)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	900.000.000,00	881.712.000,00	(18.288.000,00)	97,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000,00	783.948.000,00	(16.052.000,00)	97,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	783.948.000,00	(16.052.000,00)	97,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	97.764.000,00	(2.236.000,00)	97,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	97.764.000,00	(2.236.000,00)	97,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	115.000.000,00	109.541.424,00	(5.458.576,00)	95,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	95.240.000,00	89.781.424,00	(5.458.576,00)	94,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.240.000,00	89.781.424,00	(5.458.576,00)	94,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.2	BELANJA MODAL	19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4.131.210.000,00	4.119.519.000,00	(11.691.000,00)	99,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1	BELANJA OPERASI	4.131.210.000,00	4.119.519.000,00	(11.691.000,00)	99,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.131.210.000,00	4.119.519.000,00	(11.691.000,00)	99,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	9.000.000,00	8.538.489,00	(461.511,00)	94,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.538.489,00	(461.511,00)	94,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.538.489,00	(461.511,00)	94,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.488.020.000,00	372.924.626,00	(1.115.095.374,00)	25,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.488.020.000,00	372.924.626,00	(1.115.095.374,00)	25,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.020.000,00	177.924.626,00	(95.374,00)	99,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.05	Belanja Hibah	1.310.000.000,00	195.000.000,00	(1.115.000.000,00)	14,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.347.500.000,00	2.651.345.097,00	303.845.097,00	112,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	2.328.829.500,00	2.632.674.597,00	303.845.097,00	113,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.219.500,00	131.091.850,00	(2.127.650,00)	98,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	2.195.610.000,00	2.501.582.747,00	305.972.747,00	113,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	18.670.500,00	18.670.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.670.500,00	18.670.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.661.140.200,00	2.262.225.118,69	(398.915.081,31)	85,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	826.397.600,00	817.435.627,99	(8.961.972,01)	98,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001	5.2	BELANJA MODAL	826.397.600,00	817.435.627,99	(8.961.972,01)	98,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.226.000,00	70.800.000,00	(426.000,00)	99,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	755.171.600,00	746.635.627,99	(8.535.972,01)	98,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	654.288.000,00	592.161.100,00	(62.126.900,00)	90,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	5.1	BELANJA OPERASI	654.288.000,00	592.161.100,00	(62.126.900,00)	90,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.288.000,00	592.161.100,00	(62.126.900,00)	90,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	37.334.600,00	36.489.300,00	(845.300,00)	97,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1	BELANJA OPERASI	37.334.600,00	36.489.300,00	(845.300,00)	97,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.334.600,00	36.489.300,00	(845.300,00)	97,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	977.140.000,00	653.300.000,00	(323.840.000,00)	66,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	950.226.600,00	626.386.600,00	(323.840.000,00)	65,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.246.600,00	245.246.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	704.980.000,00	381.140.000,00	(323.840.000,00)	54,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2	BELANJA MODAL	26.913.400,00	26.913.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.913.400,00	26.913.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0040		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	100.000.000,00	98.605.040,70	(1.394.959,30)	98,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0040	5.1	BELANJA OPERASI	2.160.000,00	2.113.884,00	(46.116,00)	97,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.113.884,00	(46.116,00)	97,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0040	5.2	BELANJA MODAL	97.840.000,00	96.491.156,70	(1.348.843,30)	98,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0040	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.840.000,00	96.491.156,70	(1.348.843,30)	98,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	65.980.000,00	64.234.050,00	(1.745.950,00)	97,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1	BELANJA OPERASI	65.980.000,00	64.234.050,00	(1.745.950,00)	97,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.980.000,00	64.234.050,00	(1.745.950,00)	97,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	114.273.980.144,00	113.526.397.208,00	(747.582.936,00)	99,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.319.600,00	45.246.800,00	(3.072.800,00)	93,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.319.600,00	45.246.800,00	(3.072.800,00)	93,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.319.600,00	45.246.800,00	(3.072.800,00)	93,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.319.600,00	45.246.800,00	(3.072.800,00)	93,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	113.241.887.144,00	112.608.530.434,00	(633.356.710,00)	99,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	113.241.887.144,00	112.608.530.434,00	(633.356.710,00)	99,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	113.241.887.144,00	112.608.530.434,00	(633.356.710,00)	99,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	113.241.887.144,00	112.608.530.434,00	(633.356.710,00)	99,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.757.100,00	267.188.352,00	(20.568.748,00)	92,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.382.500,00	3.244.300,00	(138.200,00)	95,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.382.500,00	3.244.300,00	(138.200,00)	95,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.382.500,00	3.244.300,00	(138.200,00)	95,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.430.900,00	25.443.518,00	(2.987.382,00)	89,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	28.430.900,00	25.443.518,00	(2.987.382,00)	89,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.430.900,00	25.443.518,00	(2.987.382,00)	89,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.399.200,00	9.398.400,00	(4.000.800,00)	70,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.399.200,00	9.398.400,00	(4.000.800,00)	70,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.399.200,00	9.398.400,00	(4.000.800,00)	70,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.272.000,00	671.440,00	(600.560,00)	52,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.272.000,00	671.440,00	(600.560,00)	52,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.272.000,00	671.440,00	(600.560,00)	52,78	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.512.000,00	179.315.044,00	(12.196.956,00)	93,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	191.512.000,00	179.315.044,00	(12.196.956,00)	93,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.512.000,00	179.315.044,00	(12.196.956,00)	93,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	49.760.500,00	49.115.650,00	(644.850,00)	98,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	49.760.500,00	49.115.650,00	(644.850,00)	98,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.760.500,00	49.115.650,00	(644.850,00)	98,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.400.000,00	67.250.466,00	(40.149.534,00)	62,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.400.000,00	67.250.466,00	(40.149.534,00)	62,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	107.400.000,00	67.250.466,00	(40.149.534,00)	62,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.400.000,00	67.250.466,00	(40.149.534,00)	62,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.616.300,00	538.181.156,00	(50.435.144,00)	91,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,00	27.995.700,00	(11.194.300,00)	71,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.190.000,00	27.995.700,00	(11.194.300,00)	71,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.190.000,00	27.995.700,00	(11.194.300,00)	71,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.800.000,00	171.378.311,00	(36.421.689,00)	82,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	207.800.000,00	171.378.311,00	(36.421.689,00)	82,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.800.000,00	171.378.311,00	(36.421.689,00)	82,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.400.000,00	8.060.000,00	(340.000,00)	95,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	8.060.000,00	(340.000,00)	95,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.060.000,00	(340.000,00)	95,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	333.226.300,00	330.747.145,00	(2.479.155,00)	99,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	333.226.300,00	330.747.145,00	(2.479.155,00)	99,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	1.020.000,00	0,00	(1.020.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.206.300,00	330.747.145,00	(1.459.155,00)	99,56	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.105.823.430,00	2.754.864.083,12	(350.959.346,88)	88,69	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	490.304.800,00	406.791.089,00	(83.513.711,00)	82,96	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	68.417.800,00	63.135.349,00	(5.282.451,00)	92,27	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	68.417.800,00	63.135.349,00	(5.282.451,00)	92,27	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	68.417.800,00	63.135.349,00	(5.282.451,00)	92,27	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.417.800,00	63.135.349,00	(5.282.451,00)	92,27	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	421.887.000,00	343.655.740,00	(78.231.260,00)	81,45	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	421.887.000,00	343.655.740,00	(78.231.260,00)	81,45	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	421.887.000,00	343.655.740,00	(78.231.260,00)	81,45	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.887.000,00	199.750.640,00	(32.136.360,00)	86,14	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	190.000.000,00	143.905.100,00	(46.094.900,00)	75,73	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	271.153.900,00	157.214.450,00	(113.939.450,00)	57,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	271.153.900,00	157.214.450,00	(113.939.450,00)	57,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	271.153.900,00	157.214.450,00	(113.939.450,00)	57,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	271.153.900,00	157.214.450,00	(113.939.450,00)	57,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.153.900,00	72.214.450,00	(8.939.450,00)	88,98	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	190.000.000,00	85.000.000,00	(105.000.000,00)	44,73	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	202.553.100,00	113.105.340,00	(89.447.760,00)	55,83	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	35.620.600,00	33.850.860,00	(1.769.740,00)	95,03	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0001		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	6.507.800,00	6.132.880,00	(374.920,00)	94,23	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.507.800,00	6.132.880,00	(374.920,00)	94,23	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.507.800,00	6.132.880,00	(374.920,00)	94,23	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002		Penetapan Cagar Budaya	29.112.800,00	27.717.980,00	(1.394.820,00)	95,20	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.190.954,00	17.797.980,00	(1.392.974,00)	92,74	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.190.954,00	17.797.980,00	(1.392.974,00)	92,74	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	9.921.846,00	9.920.000,00	(1.846,00)	99,98	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.921.846,00	9.920.000,00	(1.846,00)	99,98	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	166.932.500,00	79.254.480,00	(87.678.020,00)	47,47	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0002		Pengembangan Cagar Budaya	138.932.800,00	53.858.780,00	(85.074.020,00)	38,76	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	138.932.800,00	53.858.780,00	(85.074.020,00)	38,76	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.932.800,00	53.858.780,00	(85.074.020,00)	38,76	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0003		Pemanfaatan Cagar Budaya	27.999.700,00	25.395.700,00	(2.604.000,00)	90,69	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.999.700,00	25.395.700,00	(2.604.000,00)	90,69	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.999.700,00	25.395.700,00	(2.604.000,00)	90,69	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.141.811.630,00	2.077.753.204,12	(64.058.425,88)	97,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.141.811.630,00	2.077.753.204,12	(64.058.425,88)	97,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	627.900.620,00	597.873.160,00	(30.027.460,00)	95,21	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	627.900.620,00	597.873.160,00	(30.027.460,00)	95,21	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	627.900.620,00	597.873.160,00	(30.027.460,00)	95,21	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0003		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1.328.755.580,00	1.297.897.744,12	(30.857.835,88)	97,67	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.328.755.580,00	1.297.897.744,12	(30.857.835,88)	97,67	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.328.755.580,00	1.297.897.744,12	(30.857.835,88)	97,67	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	185.155.430,00	181.982.300,00	(3.173.130,00)	98,28	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	132.073.230,00	129.440.350,00	(2.632.880,00)	98,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.073.230,00	129.440.350,00	(2.632.880,00)	98,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	53.082.200,00	52.541.950,00	(540.250,00)	98,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.082.200,00	52.541.950,00	(540.250,00)	98,98	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	16.865.787.055,00	19.084.179.247,68	2.218.392.192,68	113,15	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.865.787.055,00	19.084.179.247,68	2.218.392.192,68	113,15	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	16.865.787.055,00	19.044.995.914,72	2.179.208.859,72	112,92	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	39.183.332,96	39.183.332,96	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	132.184.363.735,00	122.972.821.175,48	(9.211.542.559,52)	93,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	56.356.922.744,00	49.814.737.836,58	(6.542.184.907,42)	88,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21.526.127.832,00	20.004.292.342,58	(1.521.835.489,42)	92,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002		Pembangunan Puskesmas	5.674.260.000,00	5.522.298.753,00	(151.961.247,00)	97,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.260.000,00	480.000,00	(21.780.000,00)	2,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.260.000,00	480.000,00	(21.780.000,00)	2,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.652.000.000,00	5.521.818.753,00	(130.181.247,00)	97,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.652.000.000,00	5.521.818.753,00	(130.181.247,00)	97,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	540.000.000,00	538.650.000,00	(1.350.000,00)	99,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	540.000.000,00	538.650.000,00	(1.350.000,00)	99,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.1.05	Belanja Hibah	540.000.000,00	538.650.000,00	(1.350.000,00)	99,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	9.372.128.880,00	8.353.716.302,58	(1.018.412.577,42)	89,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	44.460.000,00	2.137.500,00	(42.322.500,00)	4,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.460.000,00	2.137.500,00	(42.322.500,00)	4,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	9.327.668.880,00	8.351.578.802,58	(976.090.077,42)	89,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.327.668.880,00	8.351.578.802,58	(976.090.077,42)	89,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.401.513.530,00	3.205.668.519,00	(195.845.011,00)	94,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	126.361,00	120.000,00	(6.361,00)	94,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.361,00	120.000,00	(6.361,00)	94,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	3.401.387.169,00	3.205.548.519,00	(195.838.650,00)	94,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	901.387.169,00	869.391.000,00	(31.996.169,00)	96,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.500.000.000,00	2.336.157.519,00	(163.842.481,00)	93,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.115.977.794,00	2.110.143.000,00	(5.834.794,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	2.115.977.794,00	2.110.143.000,00	(5.834.794,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.115.977.794,00	2.110.143.000,00	(5.834.794,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	66.231.975,00	63.782.500,00	(2.449.475,00)	96,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	66.231.975,00	63.782.500,00	(2.449.475,00)	96,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.231.975,00	63.782.500,00	(2.449.475,00)	96,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	356.015.653,00	210.033.268,00	(145.982.385,00)	58,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	356.015.653,00	210.033.268,00	(145.982.385,00)	58,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.015.653,00	210.033.268,00	(145.982.385,00)	58,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.498.017.692,00	29.583.192.044,00	(4.914.825.648,00)	85,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	205.967.400,00	147.351.601,00	(58.615.799,00)	71,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	205.967.400,00	147.351.601,00	(58.615.799,00)	71,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.967.400,00	147.351.601,00	(58.615.799,00)	71,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	208.819.300,00	170.119.450,00	(38.699.850,00)	81,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	208.819.300,00	170.119.450,00	(38.699.850,00)	81,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.819.300,00	170.119.450,00	(38.699.850,00)	81,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35.005.890,00	26.305.400,00	(8.700.490,00)	75,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.005.890,00	26.305.400,00	(8.700.490,00)	75,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.005.890,00	26.305.400,00	(8.700.490,00)	75,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	56.875.000,00	39.133.000,00	(17.742.000,00)	68,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	56.875.000,00	39.133.000,00	(17.742.000,00)	68,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.875.000,00	39.133.000,00	(17.742.000,00)	68,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	162.352.500,00	104.589.500,00	(57.763.000,00)	64,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	162.352.500,00	104.589.500,00	(57.763.000,00)	64,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.352.500,00	104.589.500,00	(57.763.000,00)	64,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	20.000.000,00	19.573.950,00	(426.050,00)	97,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.573.950,00	(426.050,00)	97,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.573.950,00	(426.050,00)	97,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.000.000,00	14.069.868,00	(15.930.132,00)	46,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	14.069.868,00	(15.930.132,00)	46,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	14.069.868,00	(15.930.132,00)	46,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	59.999.917,00	45.816.050,00	(14.183.867,00)	76,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	41.999.917,00	28.271.800,00	(13.728.117,00)	67,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.999.917,00	28.271.800,00	(13.728.117,00)	67,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	18.000.000,00	17.544.250,00	(455.750,00)	97,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	17.544.250,00	(455.750,00)	97,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	252.669.600,00	249.001.750,00	(3.667.850,00)	98,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	252.669.600,00	249.001.750,00	(3.667.850,00)	98,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.669.600,00	249.001.750,00	(3.667.850,00)	98,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.340.700,00	14.643.255,00	(4.697.445,00)	75,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	19.340.700,00	14.643.255,00	(4.697.445,00)	75,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.340.700,00	14.643.255,00	(4.697.445,00)	75,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	488.146.100,00	463.642.250,00	(24.503.850,00)	94,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	488.146.100,00	463.642.250,00	(24.503.850,00)	94,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.146.100,00	463.642.250,00	(24.503.850,00)	94,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	341.966.900,00	251.868.032,00	(90.098.868,00)	73,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	319.294.900,00	251.868.032,00	(67.426.868,00)	78,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.294.900,00	251.868.032,00	(67.426.868,00)	78,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	22.672.000,00	0,00	(22.672.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.672.000,00	0,00	(22.672.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.437.660.000,00	981.037.515,00	(456.622.485,00)	68,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	1.437.660.000,00	981.037.515,00	(456.622.485,00)	68,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.437.660.000,00	981.037.515,00	(456.622.485,00)	68,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19.399.840,00	7.816.500,00	(11.583.340,00)	40,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	19.399.840,00	7.816.500,00	(11.583.340,00)	40,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.399.840,00	7.816.500,00	(11.583.340,00)	40,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.188.862.600,00	1.168.553.900,00	(20.308.700,00)	98,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	51.340.000,00	51.340.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	51.340.000,00	51.340.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	288.912.600,00	217.263.900,00	(71.648.700,00)	75,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.912.600,00	217.263.900,00	(71.648.700,00)	75,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	899.950.000,00	899.950.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.950.000,00	99.950.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	49.763.200,00	40.341.925,00	(9.421.275,00)	81,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	49.763.200,00	40.341.925,00	(9.421.275,00)	81,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.763.200,00	40.341.925,00	(9.421.275,00)	81,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	14.350.500,00	11.498.250,00	(2.852.250,00)	80,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	14.350.500,00	11.498.250,00	(2.852.250,00)	80,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.350.500,00	11.498.250,00	(2.852.250,00)	80,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	398.328.000,00	229.605.630,00	(168.722.370,00)	57,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	396.328.000,00	229.605.630,00	(166.722.370,00)	57,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.528.000,00	224.805.630,00	(166.722.370,00)	57,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	43.212.600,00	40.433.548,00	(2.779.052,00)	93,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	43.212.600,00	40.433.548,00	(2.779.052,00)	93,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.212.600,00	40.433.548,00	(2.779.052,00)	93,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2.910.000,00	90.000,00	(2.820.000,00)	3,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	2.910.000,00	90.000,00	(2.820.000,00)	3,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	90.000,00	(2.820.000,00)	3,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.263.899.485,00	949.966.006,00	(313.933.479,00)	75,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	1.263.899.485,00	949.966.006,00	(313.933.479,00)	75,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.263.899.485,00	949.966.006,00	(313.933.479,00)	75,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8.259.207.866,00	8.086.963.800,00	(172.244.066,00)	97,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	8.259.207.866,00	8.086.963.800,00	(172.244.066,00)	97,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.259.207.866,00	8.086.963.800,00	(172.244.066,00)	97,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	166.581.400,00	150.502.165,00	(16.079.235,00)	90,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	166.581.400,00	150.502.165,00	(16.079.235,00)	90,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.581.400,00	150.502.165,00	(16.079.235,00)	90,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	14.131.526.953,00	12.113.359.831,00	(2.018.167.122,00)	85,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	7.893.069.100,00	6.379.267.950,00	(1.513.801.150,00)	80,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.893.069.100,00	6.379.267.950,00	(1.513.801.150,00)	80,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2	BELANJA MODAL	6.238.457.853,00	5.734.091.881,00	(504.365.972,00)	91,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.817.329.253,00	1.312.963.281,00	(504.365.972,00)	72,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.421.128.600,00	4.421.128.600,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	3.294.965.141,00	2.857.104.913,00	(437.860.228,00)	86,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	3.117.756.641,00	2.714.210.413,00	(403.546.228,00)	87,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	363.572.000,00	363.615.941,00	43.941,00	100,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.754.184.641,00	2.350.594.472,00	(403.590.169,00)	85,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	177.208.500,00	142.894.500,00	(34.314.000,00)	80,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.208.500,00	142.894.500,00	(34.314.000,00)	80,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	918.838.000,00	839.519.980,00	(79.318.020,00)	91,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	901.590.700,00	822.319.980,00	(79.270.720,00)	91,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	901.590.700,00	822.319.980,00	(79.270.720,00)	91,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.2	BELANJA MODAL	17.247.300,00	17.200.000,00	(47.300,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.247.300,00	17.200.000,00	(47.300,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	18.788.200,00	1.461.700,00	(17.326.500,00)	7,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	18.788.200,00	1.461.700,00	(17.326.500,00)	7,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.788.200,00	1.461.700,00	(17.326.500,00)	7,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	13.014.900,00	1.505.000,00	(11.509.900,00)	11,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	13.014.900,00	1.505.000,00	(11.509.900,00)	11,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.014.900,00	1.505.000,00	(11.509.900,00)	11,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	466.213.700,00	126.659.950,00	(339.553.750,00)	27,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	5.1	BELANJA OPERASI	466.213.700,00	126.659.950,00	(339.553.750,00)	27,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.213.700,00	126.659.950,00	(339.553.750,00)	27,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	239.576.350,00	42.273.750,00	(197.302.600,00)	17,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	239.576.350,00	42.273.750,00	(197.302.600,00)	17,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.576.350,00	42.273.750,00	(197.302.600,00)	17,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	179.262.150,00	65.593.900,00	(113.668.250,00)	36,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	160.285.550,00	65.593.900,00	(94.691.650,00)	40,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.285.550,00	65.593.900,00	(94.691.650,00)	40,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.2	BELANJA MODAL	18.976.600,00	0,00	(18.976.600,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.976.600,00	0,00	(18.976.600,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	52.399.500,00	21.171.175,00	(31.228.325,00)	40,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	52.399.500,00	21.171.175,00	(31.228.325,00)	40,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.399.500,00	21.171.175,00	(31.228.325,00)	40,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	88.382.000,00	70.250.450,00	(18.131.550,00)	79,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	88.382.000,00	70.250.450,00	(18.131.550,00)	79,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.382.000,00	70.250.450,00	(18.131.550,00)	79,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	369.732.000,00	231.368.050,00	(138.363.950,00)	62,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	369.732.000,00	231.368.050,00	(138.363.950,00)	62,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.732.000,00	231.368.050,00	(138.363.950,00)	62,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	71.216.620,00	45.787.300,00	(25.429.320,00)	64,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	71.216.620,00	45.787.300,00	(25.429.320,00)	64,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	71.216.620,00	45.787.300,00	(25.429.320,00)	64,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.216.620,00	45.787.300,00	(25.429.320,00)	64,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	261.560.600,00	181.466.150,00	(80.094.450,00)	69,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0002		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.990.000,00	6.236.800,00	(3.753.200,00)	62,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.990.000,00	6.236.800,00	(3.753.200,00)	62,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	6.236.800,00	(3.753.200,00)	62,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	251.570.600,00	175.229.350,00	(76.341.250,00)	69,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	251.570.600,00	175.229.350,00	(76.341.250,00)	69,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.570.600,00	175.229.350,00	(76.341.250,00)	69,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	657.414.000,00	593.944.478,00	(63.469.522,00)	90,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	14.095.000,00	12.405.900,00	(1.689.100,00)	88,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	14.095.000,00	12.405.900,00	(1.689.100,00)	88,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.299.700,00	5.455.900,00	(843.800,00)	86,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.299.700,00	5.455.900,00	(843.800,00)	86,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.795.300,00	6.950.000,00	(845.300,00)	89,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.795.300,00	6.950.000,00	(845.300,00)	89,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	274.906.800,00	256.838.649,00	(18.068.151,00)	93,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	25.110.500,00	21.414.500,00	(3.696.000,00)	85,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.110.500,00	5.414.500,00	(3.696.000,00)	59,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.110.500,00	5.414.500,00	(3.696.000,00)	59,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	113.055.500,00	109.078.999,00	(3.976.501,00)	96,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.055.500,00	109.078.999,00	(3.976.501,00)	96,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.055.500,00	109.078.999,00	(3.976.501,00)	96,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	136.740.800,00	126.345.150,00	(10.395.650,00)	92,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	121.150.300,00	111.249.150,00	(9.901.150,00)	91,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.150.300,00	111.249.150,00	(9.901.150,00)	91,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	15.590.500,00	15.096.000,00	(494.500,00)	96,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.590.500,00	15.096.000,00	(494.500,00)	96,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	368.412.200,00	324.699.929,00	(43.712.271,00)	88,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	368.412.200,00	324.699.929,00	(43.712.271,00)	88,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	368.412.200,00	324.699.929,00	(43.712.271,00)	88,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.412.200,00	324.699.929,00	(43.712.271,00)	88,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	510.351.100,00	302.114.150,00	(208.236.950,00)	59,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90.847.000,00	69.243.850,00	(21.603.150,00)	76,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90.847.000,00	69.243.850,00	(21.603.150,00)	76,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	79.621.800,00	58.743.850,00	(20.877.950,00)	73,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.621.800,00	58.743.850,00	(20.877.950,00)	73,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	11.225.200,00	10.500.000,00	(725.200,00)	93,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.225.200,00	10.500.000,00	(725.200,00)	93,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	155.840.300,00	113.057.550,00	(42.782.750,00)	72,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	155.840.300,00	113.057.550,00	(42.782.750,00)	72,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	152.982.000,00	110.357.550,00	(42.624.450,00)	72,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.982.000,00	110.357.550,00	(42.624.450,00)	72,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.858.300,00	2.700.000,00	(158.300,00)	94,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.858.300,00	2.700.000,00	(158.300,00)	94,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	29.087.000,00	26.633.800,00	(2.453.200,00)	91,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	29.087.000,00	26.633.800,00	(2.453.200,00)	91,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.087.000,00	26.633.800,00	(2.453.200,00)	91,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.087.000,00	26.633.800,00	(2.453.200,00)	91,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	234.576.800,00	93.178.950,00	(141.397.850,00)	39,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	234.576.800,00	93.178.950,00	(141.397.850,00)	39,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	232.082.200,00	91.978.950,00	(140.103.250,00)	39,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.082.200,00	91.978.950,00	(140.103.250,00)	39,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.2	BELANJA MODAL	2.494.600,00	1.200.000,00	(1.294.600,00)	48,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.494.600,00	1.200.000,00	(1.294.600,00)	48,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	828.996.000,00	584.916.668,00	(244.079.332,00)	70,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.393.500,00	26.490.000,00	(44.903.500,00)	37,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	71.393.500,00	26.490.000,00	(44.903.500,00)	37,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	71.393.500,00	26.490.000,00	(44.903.500,00)	37,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.393.500,00	26.490.000,00	(44.903.500,00)	37,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	276.325.800,00	178.526.000,00	(97.799.800,00)	64,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	276.325.800,00	178.526.000,00	(97.799.800,00)	64,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	276.325.800,00	178.526.000,00	(97.799.800,00)	64,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.325.800,00	178.526.000,00	(97.799.800,00)	64,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	481.276.700,00	379.900.668,00	(101.376.032,00)	78,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	481.276.700,00	379.900.668,00	(101.376.032,00)	78,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	449.690.300,00	349.610.668,00	(100.079.632,00)	77,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.690.300,00	349.610.668,00	(100.079.632,00)	77,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	31.586.400,00	30.290.000,00	(1.296.400,00)	95,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.586.400,00	30.290.000,00	(1.296.400,00)	95,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73.830.679.891,00	71.677.108.042,90	(2.153.571.848,10)	97,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.504.607,00	70.905.300,00	(14.599.307,00)	82,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.504.607,00	70.905.300,00	(14.599.307,00)	82,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	69.914.107,00	55.920.300,00	(13.993.807,00)	79,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.914.107,00	55.920.300,00	(13.993.807,00)	79,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	15.590.500,00	14.985.000,00	(605.500,00)	96,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.590.500,00	14.985.000,00	(605.500,00)	96,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.327.230.247,00	52.077.647.868,00	(1.249.582.379,00)	97,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.288.510.745,00	52.045.203.218,00	(1.243.307.527,00)	97,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.288.510.745,00	52.045.203.218,00	(1.243.307.527,00)	97,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	53.288.510.745,00	52.045.203.218,00	(1.243.307.527,00)	97,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	38.719.502,00	32.444.650,00	(6.274.852,00)	83,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	23.519.502,00	17.544.650,00	(5.974.852,00)	74,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.519.502,00	17.544.650,00	(5.974.852,00)	74,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	5.2	BELANJA MODAL	15.200.000,00	14.900.000,00	(300.000,00)	98,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.200.000,00	14.900.000,00	(300.000,00)	98,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.397.100,00	144.353.976,00	(124.043.124,00)	53,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.560.300,00	3.700.740,00	(2.859.560,00)	56,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.560.300,00	3.700.740,00	(2.859.560,00)	56,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.560.300,00	3.700.740,00	(2.859.560,00)	56,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.894.000,00	9.563.800,00	(1.330.200,00)	87,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.894.000,00	9.563.800,00	(1.330.200,00)	87,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.894.000,00	9.563.800,00	(1.330.200,00)	87,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.249.800,00	9.744.600,00	(505.200,00)	95,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.249.800,00	9.744.600,00	(505.200,00)	95,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.249.800,00	9.744.600,00	(505.200,00)	95,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.693.000,00	1.693.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.693.000,00	1.693.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.000.000,00	119.651.836,00	(119.348.164,00)	50,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	239.000.000,00	119.651.836,00	(119.348.164,00)	50,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.000.000,00	119.651.836,00	(119.348.164,00)	50,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.880.000,00	9.750.000,00	(130.000,00)	98,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.880.000,00	9.750.000,00	(130.000,00)	98,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	9.880.000,00	9.750.000,00	(130.000,00)	98,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.880.000,00	9.750.000,00	(130.000,00)	98,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.900.000,00	383.522.688,00	(66.377.312,00)	85,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	448.400.000,00	382.022.688,00	(66.377.312,00)	85,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	448.400.000,00	382.022.688,00	(66.377.312,00)	85,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.400.000,00	382.022.688,00	(66.377.312,00)	85,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	814.104.600,00	691.058.280,00	(123.046.320,00)	84,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.552.000,00	61.251.700,00	(10.300.300,00)	85,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	71.552.000,00	61.251.700,00	(10.300.300,00)	85,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.552.000,00	61.251.700,00	(10.300.300,00)	85,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	276.662.000,00	182.498.825,00	(94.163.175,00)	65,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	276.662.000,00	182.498.825,00	(94.163.175,00)	65,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.662.000,00	182.498.825,00	(94.163.175,00)	65,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.900.000,00	8.070.000,00	(3.830.000,00)	67,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.900.000,00	8.070.000,00	(3.830.000,00)	67,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	8.070.000,00	(3.830.000,00)	67,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	453.990.600,00	439.237.755,00	(14.752.845,00)	96,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	263.990.600,00	250.021.901,00	(13.968.699,00)	94,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.990.600,00	250.021.901,00	(13.968.699,00)	94,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	190.000.000,00	189.215.854,00	(784.146,00)	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.000.000,00	189.215.854,00	(784.146,00)	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	18.875.663.337,00	18.299.869.930,90	(575.793.406,10)	96,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	18.875.663.337,00	18.299.869.930,90	(575.793.406,10)	96,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.844.566.387,00	17.494.993.115,90	(349.573.271,10)	98,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.960.582.465,32	5.796.596.160,00	(163.986.305,32)	97,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.883.983.921,68	11.698.396.955,90	(185.586.965,78)	98,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.031.096.950,00	804.876.815,00	(226.220.135,00)	78,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.031.096.950,00	804.876.815,00	(226.220.135,00)	78,06	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	820.000.000,00	771.536.752,00	(48.463.248,00)	94,08	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	820.000.000,00	771.536.752,00	(48.463.248,00)	94,08	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	820.000.000,00	771.536.752,00	(48.463.248,00)	94,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	32.497.620.164,00	28.955.955.604,36	(3.541.664.559,64)	89,10	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	878.939.200,00	750.700.811,00	(128.238.389,00)	85,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	69.227.000,00	0,00	(69.227.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0075		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	69.227.000,00	0,00	(69.227.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0075	5.1	BELANJA OPERASI	69.227.000,00	0,00	(69.227.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0075	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.227.000,00	0,00	(69.227.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	809.712.200,00	750.700.811,00	(59.011.389,00)	92,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4.187.600,00	0,00	(4.187.600,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.187.600,00	0,00	(4.187.600,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	1.530.000,00	0,00	(1.530.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.657.600,00	0,00	(2.657.600,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.188.400,00	0,00	(9.188.400,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	9.188.400,00	0,00	(9.188.400,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	6.120.000,00	0,00	(6.120.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.068.400,00	0,00	(3.068.400,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	796.336.200,00	750.700.811,00	(45.635.389,00)	94,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	794.986.200,00	750.700.811,00	(44.285.389,00)	94,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	794.986.200,00	750.700.811,00	(44.285.389,00)	94,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.2	BELANJA MODAL	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	49.845.900,00	35.861.106,00	(13.984.794,00)	71,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	49.845.900,00	35.861.106,00	(13.984.794,00)	71,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	49.845.900,00	35.861.106,00	(13.984.794,00)	71,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	49.845.900,00	35.861.106,00	(13.984.794,00)	71,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.845.900,00	35.861.106,00	(13.984.794,00)	71,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11.100.744.800,00	10.505.851.058,46	(594.893.741,54)	94,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	11.100.744.800,00	10.505.851.058,46	(594.893.741,54)	94,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0010		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	11.100.744.800,00	10.505.851.058,46	(594.893.741,54)	94,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	100.744.800,00	81.500.552,00	(19.244.248,00)	80,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.744.800,00	81.500.552,00	(19.244.248,00)	80,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	11.000.000.000,00	10.424.350.506,46	(575.649.493,54)	94,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.000.000.000,00	10.424.350.506,46	(575.649.493,54)	94,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	396.439.400,00	228.623.039,00	(167.816.361,00)	57,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	396.439.400,00	228.623.039,00	(167.816.361,00)	57,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0041		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	396.439.400,00	228.623.039,00	(167.816.361,00)	57,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0041	5.1	BELANJA OPERASI	81.845.400,00	39.880.639,00	(41.964.761,00)	48,72	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.845.400,00	39.880.639,00	(41.964.761,00)	48,72	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0041	5.2	BELANJA MODAL	314.594.000,00	188.742.400,00	(125.851.600,00)	59,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0041	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.594.000,00	14.650.000,00	(4.944.000,00)	74,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0041	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	295.000.000,00	174.092.400,00	(120.907.600,00)	59,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.616.145.300,00	1.338.686.788,87	(277.458.511,13)	82,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.616.145.300,00	1.338.686.788,87	(277.458.511,13)	82,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0024		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	26.943.800,00	4.290.000,00	(22.653.800,00)	15,92	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	26.943.800,00	4.290.000,00	(22.653.800,00)	15,92	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0024	5.1.01	Belanja Pegawai	6.120.000,00	0,00	(6.120.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.823.800,00	4.290.000,00	(16.533.800,00)	20,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	528.267.800,00	422.661.664,87	(105.606.135,13)	80,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	104.667.800,00	1.017.500,00	(103.650.300,00)	0,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.1.01	Belanja Pegawai	6.120.000,00	0,00	(6.120.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.547.800,00	1.017.500,00	(97.530.300,00)	1,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	423.600.000,00	421.644.164,87	(1.955.835,13)	99,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	423.600.000,00	421.644.164,87	(1.955.835,13)	99,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.060.933.700,00	911.735.124,00	(149.198.576,00)	85,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	1.060.933.700,00	911.735.124,00	(149.198.576,00)	85,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.060.933.700,00	911.735.124,00	(149.198.576,00)	85,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.030.419.300,00	783.415.121,12	(247.004.178,88)	76,02	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.030.419.300,00	783.415.121,12	(247.004.178,88)	76,02	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	684.167.200,00	598.643.955,12	(85.523.244,88)	87,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	684.167.200,00	598.643.955,12	(85.523.244,88)	87,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.167.200,00	6.827.052,00	(12.340.148,00)	35,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.05	Belanja Hibah	665.000.000,00	591.816.903,12	(73.183.096,88)	88,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	67.504.600,00	26.230.266,00	(41.274.334,00)	38,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	47.910.600,00	26.230.266,00	(21.680.334,00)	54,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.910.600,00	26.230.266,00	(21.680.334,00)	54,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	19.594.000,00	0,00	(19.594.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.594.000,00	0,00	(19.594.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	278.747.500,00	158.540.900,00	(120.206.600,00)	56,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	278.747.500,00	158.540.900,00	(120.206.600,00)	56,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.747.500,00	158.540.900,00	(120.206.600,00)	56,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	5.768.751.400,00	5.505.871.676,24	(262.879.723,76)	95,44	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	5.768.751.400,00	5.505.871.676,24	(262.879.723,76)	95,44	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034		Pemeliharaan Berkala Jalan	4.239.733.400,00	4.140.603.779,24	(99.129.620,76)	97,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1	BELANJA OPERASI	58.097.800,00	55.233.858,00	(2.863.942,00)	95,07	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.097.800,00	55.233.858,00	(2.863.942,00)	95,07	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2	BELANJA MODAL	4.181.635.600,00	4.085.369.921,24	(96.265.678,76)	97,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.181.635.600,00	4.085.369.921,24	(96.265.678,76)	97,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038		Pemeliharaan Rutin Jembatan	218.116.100,00	212.272.303,00	(5.843.797,00)	97,32	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	218.116.100,00	212.272.303,00	(5.843.797,00)	97,32	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.116.100,00	212.272.303,00	(5.843.797,00)	97,32	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044		Rehabilitasi Jalan	181.275.600,00	35.963.456,00	(145.312.144,00)	19,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.1	BELANJA OPERASI	1.275.600,00	1.121.000,00	(154.600,00)	87,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.275.600,00	1.121.000,00	(154.600,00)	87,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2	BELANJA MODAL	180.000.000,00	34.842.456,00	(145.157.544,00)	19,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.000.000,00	34.842.456,00	(145.157.544,00)	19,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	1.129.626.300,00	1.117.032.138,00	(12.594.162,00)	98,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	1.129.626.300,00	1.117.032.138,00	(12.594.162,00)	98,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.129.626.300,00	1.117.032.138,00	(12.594.162,00)	98,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	101.708.400,00	16.243.966,00	(85.464.434,00)	15,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20.692.200,00	7.215.466,00	(13.476.734,00)	34,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	20.692.200,00	7.215.466,00	(13.476.734,00)	34,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	20.692.200,00	7.215.466,00	(13.476.734,00)	34,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.692.200,00	7.215.466,00	(13.476.734,00)	34,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	46.016.200,00	9.028.500,00	(36.987.700,00)	19,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0004		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	15.402.200,00	2.392.500,00	(13.009.700,00)	15,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.402.200,00	2.392.500,00	(13.009.700,00)	15,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.402.200,00	2.392.500,00	(13.009.700,00)	15,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0005		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	12.352.000,00	385.000,00	(11.967.000,00)	3,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.352.000,00	385.000,00	(11.967.000,00)	3,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.352.000,00	385.000,00	(11.967.000,00)	3,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0007		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	18.262.000,00	6.251.000,00	(12.011.000,00)	34,22	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.262.000,00	6.251.000,00	(12.011.000,00)	34,22	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.262.000,00	6.251.000,00	(12.011.000,00)	34,22	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.216.946.000,00	602.874.810,00	(614.071.190,00)	49,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	620.210.300,00	270.395.086,00	(349.815.214,00)	43,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	620.210.300,00	270.395.086,00	(349.815.214,00)	43,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	620.210.300,00	270.395.086,00	(349.815.214,00)	43,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.210.300,00	270.395.086,00	(349.815.214,00)	43,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	232.028.600,00	192.340.101,00	(39.688.499,00)	82,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0005		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	232.028.600,00	192.340.101,00	(39.688.499,00)	82,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	230.828.600,00	191.365.101,00	(39.463.499,00)	82,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.828.600,00	191.365.101,00	(39.463.499,00)	82,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0005	5.2	BELANJA MODAL	1.200.000,00	975.000,00	(225.000,00)	81,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	975.000,00	(225.000,00)	81,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	364.707.100,00	140.139.623,00	(224.567.477,00)	38,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	141.857.700,00	16.515.920,00	(125.341.780,00)	11,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	141.857.700,00	16.515.920,00	(125.341.780,00)	11,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.857.700,00	16.515.920,00	(125.341.780,00)	11,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0007		Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	222.849.400,00	123.623.703,00	(99.225.697,00)	55,47	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	222.049.400,00	122.973.703,00	(99.075.697,00)	55,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.049.400,00	122.973.703,00	(99.075.697,00)	55,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0007	5.2	BELANJA MODAL	800.000,00	650.000,00	(150.000,00)	81,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000,00	650.000,00	(150.000,00)	81,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.337.680.464,00	9.187.827.227,67	(1.149.853.236,33)	88,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.535.900,00	12.493.257,00	(9.042.643,00)	58,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.535.900,00	12.493.257,00	(9.042.643,00)	58,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.535.900,00	12.493.257,00	(9.042.643,00)	58,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.535.900,00	12.493.257,00	(9.042.643,00)	58,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.811.113.044,00	7.408.970.360,67	(402.142.683,33)	94,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.789.687.744,00	7.406.474.360,67	(383.213.383,33)	95,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.789.687.744,00	7.406.474.360,67	(383.213.383,33)	95,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.789.687.744,00	7.406.474.360,67	(383.213.383,33)	95,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.425.300,00	2.496.000,00	(18.929.300,00)	11,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	21.425.300,00	2.496.000,00	(18.929.300,00)	11,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.425.300,00	2.496.000,00	(18.929.300,00)	11,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	440.000.000,00	310.586.154,00	(129.413.846,00)	70,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	440.000.000,00	310.586.154,00	(129.413.846,00)	70,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	411.496.000,00	282.518.694,00	(128.977.306,00)	68,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.496.000,00	282.518.694,00	(128.977.306,00)	68,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	28.504.000,00	28.067.460,00	(436.540,00)	98,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.504.000,00	28.067.460,00	(436.540,00)	98,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.625.800,00	278.988.841,00	(46.636.959,00)	85,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.169.500,00	7.960.365,00	(209.135,00)	97,44	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.169.500,00	7.960.365,00	(209.135,00)	97,44	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.169.500,00	7.960.365,00	(209.135,00)	97,44	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.126.300,00	40.598.250,00	(20.528.050,00)	66,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	61.126.300,00	40.598.250,00	(20.528.050,00)	66,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.126.300,00	40.598.250,00	(20.528.050,00)	66,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.412.700,00	17.344.420,00	(2.068.280,00)	89,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.412.700,00	17.344.420,00	(2.068.280,00)	89,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.412.700,00	17.344.420,00	(2.068.280,00)	89,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.668.300,00	18.369.630,00	(2.298.670,00)	88,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.668.300,00	18.369.630,00	(2.298.670,00)	88,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.668.300,00	18.369.630,00	(2.298.670,00)	88,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.999.000,00	3.618.700,00	(1.380.300,00)	72,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.999.000,00	3.618.700,00	(1.380.300,00)	72,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.000,00	3.618.700,00	(1.380.300,00)	72,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.250.000,00	191.097.476,00	(20.152.524,00)	90,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	211.250.000,00	191.097.476,00	(20.152.524,00)	90,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.250.000,00	191.097.476,00	(20.152.524,00)	90,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.310.000,00	140.878.560,00	(30.431.440,00)	82,23	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.600.000,00	138.168.560,00	(30.431.440,00)	81,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	168.600.000,00	138.168.560,00	(30.431.440,00)	81,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.600.000,00	138.168.560,00	(30.431.440,00)	81,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.568.095.720,00	1.035.910.055,00	(532.185.665,00)	66,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,00	39.175.950,00	(14.050,00)	99,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.190.000,00	39.175.950,00	(14.050,00)	99,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.190.000,00	39.175.950,00	(14.050,00)	99,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	338.550.000,00	236.172.205,00	(102.377.795,00)	69,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	338.550.000,00	236.172.205,00	(102.377.795,00)	69,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.550.000,00	236.172.205,00	(102.377.795,00)	69,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	827.540.520,00	445.282.029,00	(382.258.491,00)	53,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	827.540.520,00	445.282.029,00	(382.258.491,00)	53,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	827.540.520,00	445.282.029,00	(382.258.491,00)	53,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.820.000,00	9.897.000,00	(2.923.000,00)	77,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.820.000,00	9.897.000,00	(2.923.000,00)	77,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.820.000,00	9.897.000,00	(2.923.000,00)	77,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.995.200,00	305.382.871,00	(44.612.329,00)	87,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	349.995.200,00	305.382.871,00	(44.612.329,00)	87,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.995.200,00	305.382.871,00	(44.612.329,00)	87,25	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	820.000.000,00	771.536.752,00	(48.463.248,00)	94,08	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	820.000.000,00	771.536.752,00	(48.463.248,00)	94,08	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	820.000.000,00	771.536.752,00	(48.463.248,00)	94,08	
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.351.740.552,00	3.628.493.731,00	(723.246.821,00)	83,38	
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.351.740.552,00	3.628.493.731,00	(723.246.821,00)	83,38	
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.351.740.552,00	3.628.493.731,00	(723.246.821,00)	83,38	
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	688.209.152,00	456.857.537,00	(231.351.615,00)	66,38	
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.516.800,00	6.033.500,00	(30.483.300,00)	16,52	
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	9.180.000,00	0,00	(9.180.000,00)	0,00	
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.336.800,00	6.033.500,00	(21.303.300,00)	22,07	
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	651.692.352,00	450.824.037,00	(200.868.315,00)	69,17	
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	651.692.352,00	450.824.037,00	(200.868.315,00)	69,17	
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.663.531.400,00	3.171.636.194,00	(491.895.206,00)	86,57	
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.663.531.400,00	3.171.636.194,00	(491.895.206,00)	86,57	
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.663.531.400,00	3.171.636.194,00	(491.895.206,00)	86,57	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	140.000.000,00	127.500.000,00	(12.500.000,00)	91,07	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.000.000,00	127.500.000,00	(12.500.000,00)	91,07	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	140.000.000,00	127.500.000,00	(12.500.000,00)	91,07	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	12.528.605.456,00	11.206.236.996,36	(1.322.368.459,64)	89,44	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	905.134.200,00	691.947.107,08	(213.187.092,92)	76,44	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	146.556.500,00	29.839.800,00	(116.716.700,00)	20,36	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0009		Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	146.556.500,00	29.839.800,00	(116.716.700,00)	20,36	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	146.556.500,00	29.839.800,00	(116.716.700,00)	20,36	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.556.500,00	29.839.800,00	(116.716.700,00)	20,36	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	758.577.700,00	662.107.307,08	(96.470.392,92)	87,28	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	259.035.800,00	227.093.448,08	(31.942.351,92)	87,66	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	136.035.800,00	105.025.043,00	(31.010.757,00)	77,20	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.035.800,00	105.025.043,00	(31.010.757,00)	77,20	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.2	BELANJA MODAL	123.000.000,00	122.068.405,08	(931.594,92)	99,24	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.000.000,00	122.068.405,08	(931.594,92)	99,24	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0002		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	499.541.900,00	435.013.859,00	(64.528.041,00)	87,08	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	499.541.900,00	435.013.859,00	(64.528.041,00)	87,08	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.541.900,00	435.013.859,00	(64.528.041,00)	87,08	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	555.011.300,00	432.694.211,00	(122.317.089,00)	77,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	555.011.300,00	432.694.211,00	(122.317.089,00)	77,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0007		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	70.107.700,00	44.000,00	(70.063.700,00)	0,06	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	70.107.700,00	44.000,00	(70.063.700,00)	0,06	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.107.700,00	44.000,00	(70.063.700,00)	0,06	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0013		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	484.903.600,00	432.650.211,00	(52.253.389,00)	89,22	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	482.875.600,00	431.022.811,00	(51.852.789,00)	89,26	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.875.600,00	431.022.811,00	(51.852.789,00)	89,26	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0013	5.2	BELANJA MODAL	2.028.000,00	1.627.400,00	(400.600,00)	80,24	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.028.000,00	1.627.400,00	(400.600,00)	80,24	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.140.649.700,00	3.070.292.470,00	(70.357.230,00)	97,75	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.140.649.700,00	3.070.292.470,00	(70.357.230,00)	97,75	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.140.649.700,00	3.070.292.470,00	(70.357.230,00)	97,75	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.140.649.700,00	3.070.292.470,00	(70.357.230,00)	97,75	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.549.700,00	262.192.470,00	(70.357.230,00)	78,84	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.808.100.000,00	2.808.100.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.372.028.812,00	2.724.945.601,28	(647.083.210,72)	80,81	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3.372.028.812,00	2.724.945.601,28	(647.083.210,72)	80,81	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0001		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	207.049.700,00	144.833.738,00	(62.215.962,00)	69,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.293.700,00	7.885.000,00	(29.408.700,00)	21,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.293.700,00	7.885.000,00	(29.408.700,00)	21,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	169.756.000,00	136.948.738,00	(32.807.262,00)	80,67	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.922.179,00	(77.821,00)	99,22	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.756.000,00	127.026.559,00	(32.729.441,00)	79,51	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.134.960.812,00	2.573.064.863,28	(561.895.948,72)	82,07	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	700.042.400,00	573.875.815,00	(126.166.585,00)	81,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.042.400,00	573.875.815,00	(126.166.585,00)	81,97	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.434.918.412,00	1.999.189.048,28	(435.729.363,72)	82,10	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.000.000,00	159.641.185,00	(358.815,00)	99,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.274.918.412,00	1.839.547.863,28	(435.370.548,72)	80,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	30.018.300,00	7.047.000,00	(22.971.300,00)	23,47	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	28.268.300,00	5.412.000,00	(22.856.300,00)	19,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.268.300,00	5.412.000,00	(22.856.300,00)	19,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.750.000,00	1.635.000,00	(115.000,00)	93,42	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.750.000,00	1.635.000,00	(115.000,00)	93,42	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.555.781.444,00	4.286.357.607,00	(269.423.837,00)	94,08	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.068.400,00	24.370.800,00	(12.697.600,00)	65,74	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.068.400,00	24.370.800,00	(12.697.600,00)	65,74	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.068.400,00	24.370.800,00	(12.697.600,00)	65,74	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.068.400,00	24.370.800,00	(12.697.600,00)	65,74	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.992.207.844,00	3.826.017.556,00	(166.190.288,00)	95,83	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.977.549.244,00	3.814.470.747,00	(163.078.497,00)	95,90	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.977.549.244,00	3.814.470.747,00	(163.078.497,00)	95,90	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.977.549.244,00	3.814.470.747,00	(163.078.497,00)	95,90	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.658.600,00	11.546.809,00	(3.111.791,00)	78,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.658.600,00	11.546.809,00	(3.111.791,00)	78,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.658.600,00	11.546.809,00	(3.111.791,00)	78,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.948.600,00	190.252.738,00	(22.695.862,00)	89,34	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.412.400,00	2.411.400,00	(1.000,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.412.400,00	2.411.400,00	(1.000,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.412.400,00	2.411.400,00	(1.000,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.056.100,00	68.037.160,00	(19.018.940,00)	78,15	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	87.056.100,00	68.037.160,00	(19.018.940,00)	78,15	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.056.100,00	68.037.160,00	(19.018.940,00)	78,15	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.495.000,00	12.440.400,00	(54.600,00)	99,56	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.495.000,00	12.440.400,00	(54.600,00)	99,56	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.495.000,00	12.440.400,00	(54.600,00)	99,56	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.367.100,00	2.781.300,00	(1.585.800,00)	63,68	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.367.100,00	2.781.300,00	(1.585.800,00)	63,68	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.367.100,00	2.781.300,00	(1.585.800,00)	63,68	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.478.000,00	2.468.400,00	(9.600,00)	99,61	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.478.000,00	2.468.400,00	(9.600,00)	99,61	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.478.000,00	2.468.400,00	(9.600,00)	99,61	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.140.000,00	102.114.078,00	(2.025.922,00)	98,05	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	104.140.000,00	102.114.078,00	(2.025.922,00)	98,05	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.140.000,00	102.114.078,00	(2.025.922,00)	98,05	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.060.000,00	12.158.528,00	(3.901.472,00)	75,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.060.000,00	0,00	(1.060.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.060.000,00	0,00	(1.060.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.060.000,00	0,00	(1.060.000,00)	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	12.158.528,00	(2.841.472,00)	81,05	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	12.158.528,00	(2.841.472,00)	81,05	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.158.528,00	(2.841.472,00)	81,05	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.496.600,00	233.557.985,00	(63.938.615,00)	78,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,00	42.606.600,00	(343.400,00)	99,20	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.950.000,00	42.606.600,00	(343.400,00)	99,20	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.950.000,00	42.606.600,00	(343.400,00)	99,20	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.850.000,00	142.308.585,00	(63.541.415,00)	69,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	205.850.000,00	142.308.585,00	(63.541.415,00)	69,13	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.850.000,00	142.308.585,00	(63.541.415,00)	69,13	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.260.000,00	4.235.000,00	(25.000,00)	99,41	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.260.000,00	4.235.000,00	(25.000,00)	99,41	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	4.235.000,00	(25.000,00)	99,41	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.436.600,00	44.407.800,00	(28.800,00)	99,93	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	44.436.600,00	44.407.800,00	(28.800,00)	99,93	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.436.600,00	44.407.800,00	(28.800,00)	99,93	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	140.000.000,00	127.500.000,00	(12.500.000,00)	91,07	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.000.000,00	127.500.000,00	(12.500.000,00)	91,07	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	140.000.000,00	127.500.000,00	(12.500.000,00)	91,07	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	467.317.200,00	329.579.214,00	(137.737.986,00)	70,52	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	19.439.000,00	17.332.080,00	(2.106.920,00)	89,16	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.439.000,00	17.332.080,00	(2.106.920,00)	89,16	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0001		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.439.000,00	17.332.080,00	(2.106.920,00)	89,16	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.439.000,00	17.332.080,00	(2.106.920,00)	89,16	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.439.000,00	17.332.080,00	(2.106.920,00)	89,16	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	16.379.200,00	3.187.500,00	(13.191.700,00)	19,46	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.05.2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.379.200,00	3.187.500,00	(13.191.700,00)	19,46	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.05.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.379.200,00	3.187.500,00	(13.191.700,00)	19,46	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.379.200,00	3.187.500,00	(13.191.700,00)	19,46	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.379.200,00	3.187.500,00	(13.191.700,00)	19,46	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	182.735.300,00	135.372.998,00	(47.362.302,00)	74,08	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	182.735.300,00	135.372.998,00	(47.362.302,00)	74,08	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01.0002		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	182.735.300,00	135.372.998,00	(47.362.302,00)	74,08	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	182.735.300,00	135.372.998,00	(47.362.302,00)	74,08	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.735.300,00	135.372.998,00	(47.362.302,00)	74,08	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	248.763.700,00	173.686.636,00	(75.077.064,00)	69,81	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	248.763.700,00	173.686.636,00	(75.077.064,00)	69,81	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	34.244.600,00	1.298.250,00	(32.946.350,00)	3,79	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.244.600,00	1.298.250,00	(32.946.350,00)	3,79	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.244.600,00	1.298.250,00	(32.946.350,00)	3,79	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	214.519.100,00	172.388.386,00	(42.130.714,00)	80,36	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	214.519.100,00	172.388.386,00	(42.130.714,00)	80,36	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.519.100,00	172.388.386,00	(42.130.714,00)	80,36	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.964.094.392,00	7.477.543.479,00	(486.550.913,00)	93,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.822.359.230,00	1.728.120.151,00	(94.239.079,00)	94,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.742.881.130,00	1.681.636.451,00	(61.244.679,00)	96,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.461.530,00	12.800.000,00	(1.661.530,00)	88,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.461.530,00	12.800.000,00	(1.661.530,00)	88,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.461.530,00	12.800.000,00	(1.661.530,00)	88,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.433.735.500,00	1.425.503.801,00	(8.231.699,00)	99,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.433.735.500,00	1.425.503.801,00	(8.231.699,00)	99,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.433.735.500,00	1.425.503.801,00	(8.231.699,00)	99,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	103.405.700,00	99.747.600,00	(3.658.100,00)	96,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	103.405.700,00	99.747.600,00	(3.658.100,00)	96,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.405.700,00	99.747.600,00	(3.658.100,00)	96,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	67.920.100,00	30.717.750,00	(37.202.350,00)	45,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	67.920.100,00	30.717.750,00	(37.202.350,00)	45,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.920.100,00	30.717.750,00	(37.202.350,00)	45,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,5	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,5	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,5	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0018		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	121.358.300,00	110.917.300,00	(10.441.000,00)	91,39	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	121.358.300,00	110.917.300,00	(10.441.000,00)	91,39	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.358.300,00	110.917.300,00	(10.441.000,00)	91,39	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12.281.100,00	11.572.000,00	(709.100,00)	94,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0002		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12.281.100,00	11.572.000,00	(709.100,00)	94,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.281.100,00	11.572.000,00	(709.100,00)	94,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.281.100,00	11.572.000,00	(709.100,00)	94,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	9.819.400,00	7.367.700,00	(2.451.700,00)	75,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.03.0001		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	9.819.400,00	7.367.700,00	(2.451.700,00)	75,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.819.400,00	7.367.700,00	(2.451.700,00)	75,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.819.400,00	7.367.700,00	(2.451.700,00)	75,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	57.377.600,00	27.544.000,00	(29.833.600,00)	48,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	30.370.600,00	27.544.000,00	(2.826.600,00)	90,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.370.600,00	27.544.000,00	(2.826.600,00)	90,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.370.600,00	27.544.000,00	(2.826.600,00)	90,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	27.007.000,00	0,00	(27.007.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.007.000,00	0,00	(27.007.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.007.000,00	0,00	(27.007.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.141.735.162,00	5.749.423.328,00	(392.311.834,00)	93,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.938.000,00	11.806.600,00	(5.131.400,00)	69,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.938.000,00	11.806.600,00	(5.131.400,00)	69,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.938.000,00	11.806.600,00	(5.131.400,00)	69,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.938.000,00	11.806.600,00	(5.131.400,00)	69,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.952.378.462,00	4.765.433.823,00	(186.944.639,00)	96,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.952.378.462,00	4.765.433.823,00	(186.944.639,00)	96,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.952.378.462,00	4.765.433.823,00	(186.944.639,00)	96,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.952.378.462,00	4.765.433.823,00	(186.944.639,00)	96,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.698.800,00	140.208.574,00	(16.490.226,00)	89,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.611.600,00	3.611.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.611.600,00	3.611.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.008.500,00	34.298.554,00	(6.709.946,00)	83,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	41.008.500,00	34.298.554,00	(6.709.946,00)	83,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.008.500,00	34.298.554,00	(6.709.946,00)	83,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.971.500,00	8.943.000,00	(28.500,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.971.500,00	8.943.000,00	(28.500,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.971.500,00	8.943.000,00	(28.500,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.325.200,00	4.835.700,00	(3.489.500,00)	58,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.325.200,00	4.835.700,00	(3.489.500,00)	58,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.325.200,00	4.835.700,00	(3.489.500,00)	58,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.432.000,00	3.348.800,00	(1.083.200,00)	75,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.432.000,00	3.348.800,00	(1.083.200,00)	75,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.432.000,00	3.348.800,00	(1.083.200,00)	75,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.350.000,00	85.170.920,00	(5.179.080,00)	94,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	90.350.000,00	85.170.920,00	(5.179.080,00)	94,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.350.000,00	85.170.920,00	(5.179.080,00)	94,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.300.000,00	90.569.589,00	(15.730.411,00)	85,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.300.000,00	89.569.589,00	(15.730.411,00)	85,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.300.000,00	89.569.589,00	(15.730.411,00)	85,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.300.000,00	89.569.589,00	(15.730.411,00)	85,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909.419.900,00	741.404.742,00	(168.015.158,00)	81,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,00	38.858.675,00	(4.091.325,00)	90,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.950.000,00	38.858.675,00	(4.091.325,00)	90,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.950.000,00	38.858.675,00	(4.091.325,00)	90,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	713.085.000,00	584.612.791,00	(128.472.209,00)	81,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	713.085.000,00	584.612.791,00	(128.472.209,00)	81,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.085.000,00	584.612.791,00	(128.472.209,00)	81,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.830.000,00	8.675.000,00	(26.155.000,00)	24,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	34.830.000,00	8.675.000,00	(26.155.000,00)	24,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.830.000,00	8.675.000,00	(26.155.000,00)	24,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	118.554.900,00	109.258.276,00	(9.296.624,00)	92,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	118.554.900,00	109.258.276,00	(9.296.624,00)	92,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.554.900,00	109.258.276,00	(9.296.624,00)	92,15	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Dinas Sosial

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	10.096.377.019,00	7.733.198.118,00	(2.363.178.901,00)	76,59	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.246.426.100,00	2.053.874.720,00	(192.551.380,00)	91,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.246.426.100,00	2.053.874.720,00	(192.551.380,00)	91,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0001		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.902.890.700,00	1.758.713.756,00	(144.176.944,00)	92,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.902.890.700,00	1.758.713.756,00	(144.176.944,00)	92,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.902.890.700,00	1.758.713.756,00	(144.176.944,00)	92,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.688.800,00	15.688.800,00	(17.000.000,00)	47,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.688.800,00	15.688.800,00	(17.000.000,00)	47,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.688.800,00	15.688.800,00	(17.000.000,00)	47,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	37.958.600,00	34.108.100,00	(3.850.500,00)	89,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.958.600,00	34.108.100,00	(3.850.500,00)	89,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.958.600,00	34.108.100,00	(3.850.500,00)	89,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	252.019.900,00	225.355.764,00	(26.664.136,00)	89,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	252.019.900,00	225.355.764,00	(26.664.136,00)	89,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.019.900,00	225.355.764,00	(26.664.136,00)	89,41	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0005		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	20.868.100,00	20.008.300,00	(859.800,00)	95,87	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.749.100,00	3.913.300,00	(835.800,00)	82,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.749.100,00	3.913.300,00	(835.800,00)	82,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0005	5.2	BELANJA MODAL	16.119.000,00	16.095.000,00	(24.000,00)	99,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.119.000,00	16.095.000,00	(24.000,00)	99,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	707.123.300,00	485.666.200,00	(221.457.100,00)	68,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	582.235.400,00	384.337.600,00	(197.897.800,00)	66,01	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001		Penyediaan Permakanan	207.625.700,00	174.617.950,00	(33.007.750,00)	84,10	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	207.625.700,00	174.617.950,00	(33.007.750,00)	84,10	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.625.700,00	174.617.950,00	(33.007.750,00)	84,10	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	241.747.300,00	100.432.050,00	(141.315.250,00)	41,54	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	241.747.300,00	100.432.050,00	(141.315.250,00)	41,54	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.747.300,00	100.432.050,00	(141.315.250,00)	41,54	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50.152.400,00	42.142.100,00	(8.010.300,00)	84,02	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.152.400,00	42.142.100,00	(8.010.300,00)	84,02	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.152.400,00	42.142.100,00	(8.010.300,00)	84,02	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010		Pemberian Layanan Kedaruratan	82.710.000,00	67.145.500,00	(15.564.500,00)	81,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	82.710.000,00	67.145.500,00	(15.564.500,00)	81,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.710.000,00	67.145.500,00	(15.564.500,00)	81,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	124.887.900,00	101.328.600,00	(23.559.300,00)	81,13	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0002		Pemberian Layanan Kedaruratan	24.240.800,00	8.269.700,00	(15.971.100,00)	34,11	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.240.800,00	8.269.700,00	(15.971.100,00)	34,11	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.240.800,00	8.269.700,00	(15.971.100,00)	34,11	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0007		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.780.400,00	48.191.900,00	(2.588.500,00)	94,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	50.780.400,00	48.191.900,00	(2.588.500,00)	94,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.780.400,00	48.191.900,00	(2.588.500,00)	94,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0013		Pemberian Layanan Rujukan	49.866.700,00	44.867.000,00	(4.999.700,00)	89,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	49.866.700,00	44.867.000,00	(4.999.700,00)	89,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.866.700,00	44.867.000,00	(4.999.700,00)	89,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.043.808.500,00	1.324.067.570,00	(1.719.740.930,00)	43,50	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	29.102.100,00	23.083.540,00	(6.018.560,00)	79,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0003		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	29.102.100,00	23.083.540,00	(6.018.560,00)	79,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.102.100,00	23.083.540,00	(6.018.560,00)	79,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.102.100,00	23.083.540,00	(6.018.560,00)	79,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.014.706.400,00	1.300.984.030,00	(1.713.722.370,00)	43,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	234.087.400,00	35.182.307,00	(198.905.093,00)	15,02	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	234.087.400,00	35.182.307,00	(198.905.093,00)	15,02	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.087.400,00	35.182.307,00	(198.905.093,00)	15,02	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.483.077.200,00	810.737.223,00	(672.339.977,00)	54,66	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.456.163.800,00	783.875.223,00	(672.288.577,00)	53,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.456.163.800,00	783.875.223,00	(672.288.577,00)	53,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	26.913.400,00	26.862.000,00	(51.400,00)	99,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.913.400,00	26.862.000,00	(51.400,00)	99,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.297.541.800,00	455.064.500,00	(842.477.300,00)	35,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.282.541.800,00	440.079.500,00	(842.462.300,00)	34,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.282.541.800,00	440.079.500,00	(842.462.300,00)	34,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.985.000,00	(15.000,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.985.000,00	(15.000,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	392.394.800,00	283.548.450,00	(108.846.350,00)	72,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	154.375.400,00	88.840.500,00	(65.534.900,00)	57,54	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001		Penyediaan Makanan	115.880.000,00	71.786.000,00	(44.094.000,00)	61,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	115.880.000,00	71.786.000,00	(44.094.000,00)	61,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.880.000,00	71.786.000,00	(44.094.000,00)	61,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002		Penyediaan Sandang	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	0,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005		Pelayanan Dukungan Psikososial	35.295.400,00	17.054.500,00	(18.240.900,00)	48,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.295.400,00	17.054.500,00	(18.240.900,00)	48,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.295.400,00	17.054.500,00	(18.240.900,00)	48,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	238.019.400,00	194.707.950,00	(43.311.450,00)	81,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	238.019.400,00	194.707.950,00	(43.311.450,00)	81,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	238.019.400,00	194.707.950,00	(43.311.450,00)	81,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.019.400,00	194.707.950,00	(43.311.450,00)	81,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	110.221.500,00	102.713.600,00	(7.507.900,00)	93,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	110.221.500,00	102.713.600,00	(7.507.900,00)	93,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	110.221.500,00	102.713.600,00	(7.507.900,00)	93,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	110.221.500,00	102.713.600,00	(7.507.900,00)	93,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.221.500,00	102.713.600,00	(7.507.900,00)	93,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.596.402.819,00	3.483.327.578,00	(113.075.241,00)	96,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.593.700,00	22.603.490,00	(1.990.210,00)	91,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.593.700,00	22.603.490,00	(1.990.210,00)	91,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.593.700,00	22.603.490,00	(1.990.210,00)	91,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.593.700,00	22.603.490,00	(1.990.210,00)	91,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.863.853.219,00	2.823.664.794,00	(40.188.425,00)	98,59	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.849.321.219,00	2.811.327.044,00	(37.994.175,00)	98,66	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.849.321.219,00	2.811.327.044,00	(37.994.175,00)	98,66	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.849.321.219,00	2.811.327.044,00	(37.994.175,00)	98,66	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.532.000,00	12.337.750,00	(2.194.250,00)	84,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.532.000,00	12.337.750,00	(2.194.250,00)	84,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.532.000,00	12.337.750,00	(2.194.250,00)	84,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.000.000,00	93.030.001,00	(1.969.999,00)	97,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	95.000.000,00	93.030.001,00	(1.969.999,00)	97,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	93.030.001,00	(1.969.999,00)	97,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	93.030.001,00	(1.969.999,00)	97,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.292.700,00	175.736.032,00	(13.556.668,00)	92,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.968.600,00	1.961.500,00	(7.100,00)	99,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.968.600,00	1.961.500,00	(7.100,00)	99,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.968.600,00	1.961.500,00	(7.100,00)	99,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.343.500,00	3.343.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.343.500,00	3.343.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.080.600,00	5.080.100,00	(500,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.080.600,00	5.080.100,00	(500,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.080.600,00	5.080.100,00	(500,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.900.000,00	165.350.932,00	(13.549.068,00)	92,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	178.900.000,00	165.350.932,00	(13.549.068,00)	92,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.900.000,00	165.350.932,00	(13.549.068,00)	92,42	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.300.000,00	35.982.197,00	(8.317.803,00)	81,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.300.000,00	33.982.197,00	(8.317.803,00)	80,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.300.000,00	33.982.197,00	(8.317.803,00)	80,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.300.000,00	33.982.197,00	(8.317.803,00)	80,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.363.200,00	332.311.064,00	(47.052.136,00)	87,59	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	193.090.000,00	156.902.075,00	(36.187.925,00)	81,25	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	193.090.000,00	156.902.075,00	(36.187.925,00)	81,25	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.090.000,00	156.902.075,00	(36.187.925,00)	81,25	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.730.000,00	14.175.200,00	(5.554.800,00)	71,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.730.000,00	14.175.200,00	(5.554.800,00)	71,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.730.000,00	14.175.200,00	(5.554.800,00)	71,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.543.200,00	161.233.789,00	(5.309.411,00)	96,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	166.543.200,00	161.233.789,00	(5.309.411,00)	96,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.543.200,00	161.233.789,00	(5.309.411,00)	96,81	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.017.488.350,00	7.489.522.045,00	(527.966.305,00)	93,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	450.715.100,00	364.811.476,00	(85.903.624,00)	80,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40.529.400,00	38.857.550,00	(1.671.850,00)	95,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0003		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	40.529.400,00	38.857.550,00	(1.671.850,00)	95,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.529.400,00	38.857.550,00	(1.671.850,00)	95,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.529.400,00	38.857.550,00	(1.671.850,00)	95,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	410.185.700,00	325.953.926,00	(84.231.774,00)	79,46	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0001		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	346.052.300,00	270.084.326,00	(75.967.974,00)	78,04	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	346.052.300,00	270.084.326,00	(75.967.974,00)	78,04	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.052.300,00	270.084.326,00	(75.967.974,00)	78,04	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0002		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	64.133.400,00	55.869.600,00	(8.263.800,00)	87,11	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.133.400,00	55.869.600,00	(8.263.800,00)	87,11	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.133.400,00	55.869.600,00	(8.263.800,00)	87,11	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	211.081.900,00	169.940.080,00	(41.141.820,00)	80,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	37.500.000,00	37.422.500,00	(77.500,00)	99,79	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	37.500.000,00	37.422.500,00	(77.500,00)	99,79	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.500.000,00	37.422.500,00	(77.500,00)	99,79	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.422.500,00	(77.500,00)	99,79	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	143.343.400,00	103.303.980,00	(40.039.420,00)	72,06	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0001		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.327.400,00	39.094.580,00	(28.232.820,00)	58,06	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.327.400,00	39.094.580,00	(28.232.820,00)	58,06	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.327.400,00	39.094.580,00	(28.232.820,00)	58,06	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	76.016.000,00	64.209.400,00	(11.806.600,00)	84,46	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	76.016.000,00	64.209.400,00	(11.806.600,00)	84,46	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.016.000,00	64.209.400,00	(11.806.600,00)	84,46	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.238.500,00	29.213.600,00	(1.024.900,00)	96,61	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.238.500,00	29.213.600,00	(1.024.900,00)	96,61	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.238.500,00	29.213.600,00	(1.024.900,00)	96,61	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.238.500,00	29.213.600,00	(1.024.900,00)	96,61	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.339.807.550,00	1.297.840.390,00	(41.967.160,00)	96,86	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.339.807.550,00	1.297.840.390,00	(41.967.160,00)	96,86	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0002		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	545.713.700,00	523.840.582,00	(21.873.118,00)	95,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	545.713.700,00	523.840.582,00	(21.873.118,00)	95,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.713.700,00	523.840.582,00	(21.873.118,00)	95,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0003		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	794.093.850,00	773.999.808,00	(20.094.042,00)	97,46	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	783.399.000,00	773.999.808,00	(9.399.192,00)	98,80	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	783.399.000,00	773.999.808,00	(9.399.192,00)	98,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	10.694.850,00	0,00	(10.694.850,00)	0,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.694.850,00	0,00	(10.694.850,00)	0,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8.803.800,00	8.458.900,00	(344.900,00)	96,08	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05.2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.803.800,00	8.458.900,00	(344.900,00)	96,08	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05.2.01.0001		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.803.800,00	8.458.900,00	(344.900,00)	96,08	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.803.800,00	8.458.900,00	(344.900,00)	96,08	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.803.800,00	8.458.900,00	(344.900,00)	96,08	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	219.609.000,00	169.661.064,00	(49.947.936,00)	77,25	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	154.202.800,00	110.299.359,00	(43.903.441,00)	71,52	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	19.099.100,00	7.177.200,00	(11.921.900,00)	37,57	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.099.100,00	7.177.200,00	(11.921.900,00)	37,57	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.099.100,00	7.177.200,00	(11.921.900,00)	37,57	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	135.103.700,00	103.122.159,00	(31.981.541,00)	76,32	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	135.103.700,00	103.122.159,00	(31.981.541,00)	76,32	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.103.700,00	103.122.159,00	(31.981.541,00)	76,32	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	65.406.200,00	59.361.705,00	(6.044.495,00)	90,75	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0001		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	65.406.200,00	59.361.705,00	(6.044.495,00)	90,75	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.406.200,00	59.361.705,00	(6.044.495,00)	90,75	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.406.200,00	59.361.705,00	(6.044.495,00)	90,75	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	453.607.900,00	369.446.635,00	(84.161.265,00)	81,44	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	156.837.700,00	129.512.630,00	(27.325.070,00)	82,57	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0003		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	92.837.700,00	65.711.500,00	(27.126.200,00)	70,78	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	92.837.700,00	65.711.500,00	(27.126.200,00)	70,78	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.837.700,00	65.711.500,00	(27.126.200,00)	70,78	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	64.000.000,00	63.801.130,00	(198.870,00)	99,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	64.000.000,00	63.801.130,00	(198.870,00)	99,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	63.801.130,00	(198.870,00)	99,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.272.000,00	174.886.330,00	(45.385.670,00)	79,39	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0005		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.808.000,00	24.882.230,00	(35.925.770,00)	40,91	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	60.808.000,00	24.882.230,00	(35.925.770,00)	40,91	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.808.000,00	24.882.230,00	(35.925.770,00)	40,91	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0006		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	159.464.000,00	150.004.100,00	(9.459.900,00)	94,06	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	159.464.000,00	150.004.100,00	(9.459.900,00)	94,06	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.464.000,00	150.004.100,00	(9.459.900,00)	94,06	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.498.200,00	65.047.675,00	(11.450.525,00)	85,03	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0004		Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	37.716.700,00	29.373.875,00	(8.342.825,00)	77,88	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	37.716.700,00	29.373.875,00	(8.342.825,00)	77,88	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.716.700,00	29.373.875,00	(8.342.825,00)	77,88	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	38.781.500,00	35.673.800,00	(3.107.700,00)	91,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	38.781.500,00	35.673.800,00	(3.107.700,00)	91,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.781.500,00	35.673.800,00	(3.107.700,00)	91,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.333.863.100,00	5.109.363.500,00	(224.499.600,00)	95,79	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.509.800,00	20.301.600,00	(4.208.200,00)	82,83	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.509.800,00	20.301.600,00	(4.208.200,00)	82,83	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.509.800,00	20.301.600,00	(4.208.200,00)	82,83	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.509.800,00	20.301.600,00	(4.208.200,00)	82,83	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.357.223.800,00	4.282.886.254,00	(74.337.546,00)	98,29	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.357.223.800,00	4.282.886.254,00	(74.337.546,00)	98,29	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.357.223.800,00	4.282.886.254,00	(74.337.546,00)	98,29	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.357.223.800,00	4.282.886.254,00	(74.337.546,00)	98,29	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.863.300,00	167.498.356,00	(39.364.944,00)	80,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.887.000,00	2.821.000,00	(66.000,00)	97,71	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.887.000,00	2.821.000,00	(66.000,00)	97,71	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.887.000,00	2.821.000,00	(66.000,00)	97,71	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.700.000,00	35.314.000,00	(2.386.000,00)	93,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	37.700.000,00	35.314.000,00	(2.386.000,00)	93,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.700.000,00	35.314.000,00	(2.386.000,00)	93,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.374.600,00	17.521.200,00	(853.400,00)	95,35	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.374.600,00	17.521.200,00	(853.400,00)	95,35	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.374.600,00	17.521.200,00	(853.400,00)	95,35	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.511.200,00	11.841.900,00	(3.669.300,00)	76,34	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.511.200,00	11.841.900,00	(3.669.300,00)	76,34	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.511.200,00	11.841.900,00	(3.669.300,00)	76,34	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.500,00	3.538.900,00	(1.461.600,00)	70,77	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.500,00	3.538.900,00	(1.461.600,00)	70,77	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.500,00	3.538.900,00	(1.461.600,00)	70,77	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.390.000,00	96.461.356,00	(30.928.644,00)	75,72	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	127.390.000,00	96.461.356,00	(30.928.644,00)	75,72	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.390.000,00	96.461.356,00	(30.928.644,00)	75,72	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.310.300,00	41.014.500,00	(6.295.800,00)	86,69	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	47.310.300,00	41.014.500,00	(6.295.800,00)	86,69	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	47.310.300,00	41.014.500,00	(6.295.800,00)	86,69	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.310.300,00	41.014.500,00	(6.295.800,00)	86,69	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.236.000,00	145.113.845,00	(24.122.155,00)	85,74	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.460.000,00	38.000.345,00	(15.459.655,00)	71,08	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.460.000,00	38.000.345,00	(15.459.655,00)	71,08	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.460.000,00	38.000.345,00	(15.459.655,00)	71,08	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.640.000,00	10.665.000,00	(5.975.000,00)	64,09	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.640.000,00	10.665.000,00	(5.975.000,00)	64,09	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.640.000,00	10.665.000,00	(5.975.000,00)	64,09	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.086.000,00	94.398.500,00	(2.687.500,00)	97,23	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	97.086.000,00	94.398.500,00	(2.687.500,00)	97,23	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.086.000,00	94.398.500,00	(2.687.500,00)	97,23	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	528.719.900,00	452.548.945,00	(76.170.955,00)	85,59	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.190.000,00	72.496.500,00	(6.693.500,00)	91,54	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	79.190.000,00	72.496.500,00	(6.693.500,00)	91,54	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.190.000,00	72.496.500,00	(6.693.500,00)	91,54	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.900.000,00	197.050.325,00	(63.849.675,00)	75,52	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	260.900.000,00	197.050.325,00	(63.849.675,00)	75,52	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.900.000,00	197.050.325,00	(63.849.675,00)	75,52	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.629.900,00	183.002.120,00	(5.627.780,00)	97,01	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	188.629.900,00	183.002.120,00	(5.627.780,00)	97,01	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.629.900,00	183.002.120,00	(5.627.780,00)	97,01	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.584.285.770,00	3.134.219.547,00	(450.066.223,00)	87,44	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	36.000.000,00	34.200.423,00	(1.799.577,00)	95,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	36.000.000,00	34.200.423,00	(1.799.577,00)	95,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	36.000.000,00	34.200.423,00	(1.799.577,00)	95,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	34.200.423,00	(1.799.577,00)	95,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	34.200.423,00	(1.799.577,00)	95,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.665.666.300,00	2.467.118.164,00	(198.548.136,00)	92,55	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.064.000.000,00	994.026.800,00	(69.973.200,00)	93,42	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008		Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	128.194.000,00	(11.806.000,00)	91,56	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	128.194.000,00	(11.806.000,00)	91,56	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	128.194.000,00	(11.806.000,00)	91,56	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	148.800.000,00	122.837.050,00	(25.962.950,00)	82,55	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	148.800.000,00	122.837.050,00	(25.962.950,00)	82,55	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.800.000,00	122.837.050,00	(25.962.950,00)	82,55	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	460.800.000,00	458.570.600,00	(2.229.400,00)	99,51	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	460.800.000,00	458.570.600,00	(2.229.400,00)	99,51	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.800.000,00	458.570.600,00	(2.229.400,00)	99,51	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	114.400.000,00	103.929.400,00	(10.470.600,00)	90,84	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	114.400.000,00	103.929.400,00	(10.470.600,00)	90,84	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.400.000,00	103.929.400,00	(10.470.600,00)	90,84	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	180.495.750,00	(19.504.250,00)	90,24	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	180.495.750,00	(19.504.250,00)	90,24	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	180.495.750,00	(19.504.250,00)	90,24	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.173.701.700,00	1.120.600.534,00	(53.101.166,00)	95,47	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.173.701.700,00	1.120.600.534,00	(53.101.166,00)	95,47	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.173.701.700,00	1.120.600.534,00	(53.101.166,00)	95,47	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.173.701.700,00	1.120.600.534,00	(53.101.166,00)	95,47	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	298.214.600,00	225.367.080,00	(72.847.520,00)	75,57	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	224.721.000,00	164.853.730,00	(59.867.270,00)	73,35	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	224.721.000,00	164.853.730,00	(59.867.270,00)	73,35	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.721.000,00	164.853.730,00	(59.867.270,00)	73,35	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33.800.000,00	33.361.650,00	(438.350,00)	98,70	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	33.800.000,00	33.361.650,00	(438.350,00)	98,70	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	33.361.650,00	(438.350,00)	98,70	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0011		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	39.693.600,00	27.151.700,00	(12.541.900,00)	68,40	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	36.793.700,00	24.251.800,00	(12.541.900,00)	65,91	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.793.700,00	24.251.800,00	(12.541.900,00)	65,91	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0011	5.2	BELANJA MODAL	2.899.900,00	2.899.900,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.899.900,00	2.899.900,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	129.750.000,00	127.123.750,00	(2.626.250,00)	97,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	129.750.000,00	127.123.750,00	(2.626.250,00)	97,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	129.750.000,00	127.123.750,00	(2.626.250,00)	97,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.750.000,00	127.123.750,00	(2.626.250,00)	97,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	882.619.470,00	632.900.960,00	(249.718.510,00)	71,70	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	818.855.600,00	610.202.960,00	(208.652.640,00)	74,51	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0008		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	439.191.700,00	263.725.960,00	(175.465.740,00)	60,04	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	436.291.800,00	260.826.060,00	(175.465.740,00)	59,78	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.291.800,00	260.826.060,00	(175.465.740,00)	59,78	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	2.899.900,00	2.899.900,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.899.900,00	2.899.900,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0017		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	91.663.900,00	83.389.000,00	(8.274.900,00)	90,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	91.663.900,00	83.389.000,00	(8.274.900,00)	90,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.663.900,00	83.389.000,00	(8.274.900,00)	90,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	288.000.000,00	263.088.000,00	(24.912.000,00)	91,34	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	288.000.000,00	263.088.000,00	(24.912.000,00)	91,34	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.000.000,00	263.088.000,00	(24.912.000,00)	91,34	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	63.763.870,00	22.698.000,00	(41.065.870,00)	35,59	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02.0004		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	63.763.870,00	22.698.000,00	(41.065.870,00)	35,59	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	63.763.870,00	22.698.000,00	(41.065.870,00)	35,59	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.763.870,00	22.698.000,00	(41.065.870,00)	35,59	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.050.000.000,00	1.647.799.500,00	(402.200.500,00)	80,38	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.050.000.000,00	1.647.799.500,00	(402.200.500,00)	80,38	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.050.000.000,00	1.647.799.500,00	(402.200.500,00)	80,38	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	41.851.048.702,00	37.250.182.497,00	(4.600.866.205,00)	89,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	469.870.500,00	419.040.846,00	(50.829.654,00)	89,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	220.505.500,00	192.358.846,00	(28.146.654,00)	87,23	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	71.080.500,00	48.409.500,00	(22.671.000,00)	68,10	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	71.080.500,00	48.409.500,00	(22.671.000,00)	68,10	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.080.500,00	48.409.500,00	(22.671.000,00)	68,10	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0003		Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	149.425.000,00	143.949.346,00	(5.475.654,00)	96,33	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	149.425.000,00	143.949.346,00	(5.475.654,00)	96,33	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.425.000,00	143.949.346,00	(5.475.654,00)	96,33	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	249.365.000,00	226.682.000,00	(22.683.000,00)	90,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	249.365.000,00	226.682.000,00	(22.683.000,00)	90,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	249.365.000,00	226.682.000,00	(22.683.000,00)	90,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.365.000,00	226.682.000,00	(22.683.000,00)	90,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	163.693.400,00	117.470.956,00	(46.222.444,00)	71,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	163.693.400,00	117.470.956,00	(46.222.444,00)	71,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	68.664.800,00	67.667.500,00	(997.300,00)	98,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	68.664.800,00	67.667.500,00	(997.300,00)	98,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.664.800,00	67.667.500,00	(997.300,00)	98,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	20.677.000,00	6.025.000,00	(14.652.000,00)	29,13	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.387.300,00	6.025.000,00	(4.362.300,00)	58,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.387.300,00	6.025.000,00	(4.362.300,00)	58,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	10.289.700,00	0,00	(10.289.700,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.289.700,00	0,00	(10.289.700,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	74.351.600,00	43.778.456,00	(30.573.144,00)	58,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	61.919.600,00	43.778.456,00	(18.141.144,00)	70,70	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.919.600,00	43.778.456,00	(18.141.144,00)	70,70	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	12.432.000,00	0,00	(12.432.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.432.000,00	0,00	(12.432.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.067.048.792,00	2.482.286.003,00	(584.762.789,00)	80,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.067.048.792,00	2.482.286.003,00	(584.762.789,00)	80,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.067.048.792,00	2.482.286.003,00	(584.762.789,00)	80,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.954.756.300,00	2.370.145.843,00	(584.610.457,00)	80,21	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.954.756.300,00	2.370.145.843,00	(584.610.457,00)	80,21	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	112.292.492,00	112.140.160,00	(152.332,00)	99,86	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.292.492,00	112.140.160,00	(152.332,00)	99,86	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	15.451.400,00	5.738.800,00	(9.712.600,00)	37,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.451.400,00	5.738.800,00	(9.712.600,00)	37,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	15.451.400,00	5.738.800,00	(9.712.600,00)	37,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.451.400,00	5.738.800,00	(9.712.600,00)	37,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.451.400,00	5.738.800,00	(9.712.600,00)	37,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	75.452.200,00	60.749.880,00	(14.702.320,00)	80,51	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.452.200,00	60.749.880,00	(14.702.320,00)	80,51	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	75.452.200,00	60.749.880,00	(14.702.320,00)	80,51	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.452.200,00	60.749.880,00	(14.702.320,00)	80,51	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.452.200,00	60.749.880,00	(14.702.320,00)	80,51	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	32.703.500,00	3.108.400,00	(29.595.100,00)	9,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	32.703.500,00	3.108.400,00	(29.595.100,00)	9,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	32.703.500,00	3.108.400,00	(29.595.100,00)	9,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.703.500,00	3.108.400,00	(29.595.100,00)	9,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.703.500,00	3.108.400,00	(29.595.100,00)	9,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	417.829.800,00	327.370.319,00	(90.459.481,00)	78,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	417.829.800,00	327.370.319,00	(90.459.481,00)	78,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	366.165.300,00	292.286.537,00	(73.878.763,00)	79,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	366.165.300,00	292.286.537,00	(73.878.763,00)	79,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.165.300,00	292.286.537,00	(73.878.763,00)	79,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	51.664.500,00	35.083.782,00	(16.580.718,00)	67,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.664.500,00	23.206.782,00	(16.457.718,00)	58,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.664.500,00	23.206.782,00	(16.457.718,00)	58,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	11.877.000,00	(123.000,00)	98,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	11.877.000,00	(123.000,00)	98,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	107.139.600,00	96.074.250,00	(11.065.350,00)	89,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107.139.600,00	96.074.250,00	(11.065.350,00)	89,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	107.139.600,00	96.074.250,00	(11.065.350,00)	89,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	107.139.600,00	96.074.250,00	(11.065.350,00)	89,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.139.600,00	96.074.250,00	(11.065.350,00)	89,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	15.867.600,00	3.135.500,00	(12.732.100,00)	19,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	15.867.600,00	3.135.500,00	(12.732.100,00)	19,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	15.867.600,00	3.135.500,00	(12.732.100,00)	19,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.867.600,00	3.135.500,00	(12.732.100,00)	19,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.867.600,00	3.135.500,00	(12.732.100,00)	19,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.864.316.026,00	13.021.120.961,00	(1.843.195.065,00)	87,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		Pengelolaan Sampah	14.864.316.026,00	13.021.120.961,00	(1.843.195.065,00)	87,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	18.512.000,00	5.337.300,00	(13.174.700,00)	28,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.512.000,00	5.337.300,00	(13.174.700,00)	28,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.512.000,00	5.337.300,00	(13.174.700,00)	28,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	874.614.100,00	708.392.314,00	(166.221.786,00)	80,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	728.614.100,00	564.592.314,00	(164.021.786,00)	77,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	728.614.100,00	564.592.314,00	(164.021.786,00)	77,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	146.000.000,00	143.800.000,00	(2.200.000,00)	98,49	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.000.000,00	143.800.000,00	(2.200.000,00)	98,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0008		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	73.181.900,00	69.213.115,00	(3.968.785,00)	94,57	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	73.181.900,00	69.213.115,00	(3.968.785,00)	94,57	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.181.900,00	69.213.115,00	(3.968.785,00)	94,57	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0013		Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	1.067.025.576,00	795.351.811,00	(271.673.765,00)	74,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.062.300.576,00	790.626.811,00	(271.673.765,00)	74,42	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.062.300.576,00	790.626.811,00	(271.673.765,00)	74,42	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	12.830.982.450,00	11.442.826.421,00	(1.388.156.029,00)	89,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	12.796.848.450,00	11.442.826.421,00	(1.354.022.029,00)	89,41	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.796.848.450,00	11.442.826.421,00	(1.354.022.029,00)	89,41	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	34.134.000,00	0,00	(34.134.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.134.000,00	0,00	(19.134.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.621.675.884,00	20.714.086.582,00	(1.907.589.302,00)	91,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.436.800,00	45.400.860,00	(8.035.940,00)	84,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.436.800,00	45.400.860,00	(8.035.940,00)	84,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.436.800,00	45.400.860,00	(8.035.940,00)	84,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.436.800,00	45.400.860,00	(8.035.940,00)	84,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.210.638.434,00	11.932.300.634,00	(278.337.800,00)	97,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.182.755.834,00	11.910.109.234,00	(272.646.600,00)	97,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.182.755.834,00	11.910.109.234,00	(272.646.600,00)	97,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.182.755.834,00	11.910.109.234,00	(272.646.600,00)	97,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	27.882.600,00	22.191.400,00	(5.691.200,00)	79,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	27.882.600,00	22.191.400,00	(5.691.200,00)	79,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.882.600,00	22.191.400,00	(5.691.200,00)	79,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300.000.000,00	297.180.450,00	(2.819.550,00)	99,06	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	300.000.000,00	297.180.450,00	(2.819.550,00)	99,06	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	297.180.450,00	(2.819.550,00)	99,06	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	297.180.450,00	(2.819.550,00)	99,06	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.185.300,00	120.779.271,00	(24.406.029,00)	83,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.127.200,00	2.910.000,00	(217.200,00)	93,05	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.127.200,00	2.910.000,00	(217.200,00)	93,05	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.127.200,00	2.910.000,00	(217.200,00)	93,05	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.045.000,00	13.234.400,00	(1.810.600,00)	87,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.045.000,00	13.234.400,00	(1.810.600,00)	87,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.045.000,00	13.234.400,00	(1.810.600,00)	87,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.627.100,00	9.261.900,00	(365.200,00)	96,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.627.100,00	9.261.900,00	(365.200,00)	96,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.627.100,00	9.261.900,00	(365.200,00)	96,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.696.000,00	3.620.100,00	(75.900,00)	97,94	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.696.000,00	3.620.100,00	(75.900,00)	97,94	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.696.000,00	3.620.100,00	(75.900,00)	97,94	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.690.000,00	91.752.871,00	(21.937.129,00)	80,70	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	113.690.000,00	91.752.871,00	(21.937.129,00)	80,70	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.690.000,00	91.752.871,00	(21.937.129,00)	80,70	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.125.000,00	103.930.537,00	(12.194.463,00)	89,49	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.525.000,00	1.327.000,00	(198.000,00)	87,01	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.525.000,00	1.327.000,00	(198.000,00)	87,01	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.525.000,00	1.327.000,00	(198.000,00)	87,01	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.600.000,00	102.603.537,00	(11.996.463,00)	89,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	114.600.000,00	102.603.537,00	(11.996.463,00)	89,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.600.000,00	102.603.537,00	(11.996.463,00)	89,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.796.290.350,00	8.214.494.830,00	(1.581.795.520,00)	83,85	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,00	39.115.650,00	(74.350,00)	99,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.190.000,00	39.115.650,00	(74.350,00)	99,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.190.000,00	39.115.650,00	(74.350,00)	99,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.370.227.350,00	7.894.899.245,00	(1.475.328.105,00)	84,25	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.370.227.350,00	7.894.899.245,00	(1.475.328.105,00)	84,25	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.370.227.350,00	7.894.899.245,00	(1.475.328.105,00)	84,25	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.880.000,00	61.193.615,00	(7.686.385,00)	88,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	68.880.000,00	61.193.615,00	(7.686.385,00)	88,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.880.000,00	61.193.615,00	(7.686.385,00)	88,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	317.993.000,00	219.286.320,00	(98.706.680,00)	68,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	317.993.000,00	219.286.320,00	(98.706.680,00)	68,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.993.000,00	219.286.320,00	(98.706.680,00)	68,95	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.255.950.060,00	4.758.003.148,00	(497.946.912,00)	90,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	525.681.200,00	465.168.436,00	(60.512.764,00)	88,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	508.689.200,00	448.607.236,00	(60.081.964,00)	88,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	161.667.800,00	121.100.000,00	(40.567.800,00)	74,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	161.667.800,00	121.100.000,00	(40.567.800,00)	74,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.667.800,00	121.100.000,00	(40.567.800,00)	74,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	347.021.400,00	327.507.236,00	(19.514.164,00)	94,37	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	347.021.400,00	327.507.236,00	(19.514.164,00)	94,37	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.021.400,00	327.507.236,00	(19.514.164,00)	94,37	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	16.992.000,00	16.561.200,00	(430.800,00)	97,46	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	16.992.000,00	16.561.200,00	(430.800,00)	97,46	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.992.000,00	16.561.200,00	(430.800,00)	97,46	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.992.000,00	16.561.200,00	(430.800,00)	97,46	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	261.876.500,00	237.458.936,00	(24.417.564,00)	90,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	261.876.500,00	237.458.936,00	(24.417.564,00)	90,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	55.730.500,00	36.752.500,00	(18.978.000,00)	65,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.730.500,00	36.752.500,00	(18.978.000,00)	65,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.730.500,00	36.752.500,00	(18.978.000,00)	65,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	206.146.000,00	200.706.436,00	(5.439.564,00)	97,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	206.146.000,00	200.706.436,00	(5.439.564,00)	97,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.146.000,00	200.706.436,00	(5.439.564,00)	97,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	235.815.000,00	109.714.946,00	(126.100.054,00)	46,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	101.949.500,00	19.420.704,00	(82.528.796,00)	19,04	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	21.017.600,00	9.938.400,00	(11.079.200,00)	47,28	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.017.600,00	9.938.400,00	(11.079.200,00)	47,28	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.017.600,00	9.938.400,00	(11.079.200,00)	47,28	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	80.931.900,00	9.482.304,00	(71.449.596,00)	11,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.137.900,00	9.482.304,00	(5.655.596,00)	62,63	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.137.900,00	9.482.304,00	(5.655.596,00)	62,63	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	65.794.000,00	0,00	(65.794.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.794.000,00	0,00	(65.794.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	133.865.500,00	90.294.242,00	(43.571.258,00)	67,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	79.000.100,00	41.608.878,00	(37.391.222,00)	52,66	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	79.000.100,00	41.608.878,00	(37.391.222,00)	52,66	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.000.100,00	41.608.878,00	(37.391.222,00)	52,66	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0007		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	54.865.400,00	48.685.364,00	(6.180.036,00)	88,73	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	54.865.400,00	48.685.364,00	(6.180.036,00)	88,73	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.865.400,00	48.685.364,00	(6.180.036,00)	88,73	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	38.715.900,00	24.859.500,00	(13.856.400,00)	64,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	38.715.900,00	24.859.500,00	(13.856.400,00)	64,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	38.715.900,00	24.859.500,00	(13.856.400,00)	64,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.715.900,00	24.859.500,00	(13.856.400,00)	64,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.715.900,00	24.859.500,00	(13.856.400,00)	64,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.193.861.460,00	3.920.801.330,00	(273.060.130,00)	93,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.254.600,00	11.254.700,00	(9.999.900,00)	52,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.254.600,00	11.254.700,00	(9.999.900,00)	52,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.254.600,00	11.254.700,00	(9.999.900,00)	52,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.254.600,00	11.254.700,00	(9.999.900,00)	52,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.499.260.960,00	3.368.553.160,00	(130.707.800,00)	96,26	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.486.053.960,00	3.365.243.160,00	(120.810.800,00)	96,53	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.486.053.960,00	3.365.243.160,00	(120.810.800,00)	96,53	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.486.053.960,00	3.365.243.160,00	(120.810.800,00)	96,53	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.207.000,00	3.310.000,00	(9.897.000,00)	25,06	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.207.000,00	3.310.000,00	(9.897.000,00)	25,06	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.207.000,00	3.310.000,00	(9.897.000,00)	25,06	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	135.000.000,00	134.964.663,00	(35.337,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	135.000.000,00	134.964.663,00	(35.337,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000,00	134.964.663,00	(35.337,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	134.964.663,00	(35.337,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.117.700,00	87.690.296,00	(46.427.404,00)	65,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.263.500,00	1.988.000,00	(275.500,00)	87,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.263.500,00	1.988.000,00	(275.500,00)	87,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.263.500,00	1.988.000,00	(275.500,00)	87,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.055.700,00	11.527.350,00	(1.528.350,00)	88,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.055.700,00	11.527.350,00	(1.528.350,00)	88,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.055.700,00	11.527.350,00	(1.528.350,00)	88,29	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.398.500,00	3.764.000,00	(4.634.500,00)	44,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.398.500,00	3.764.000,00	(4.634.500,00)	44,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.398.500,00	3.764.000,00	(4.634.500,00)	44,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.000,00	965.250,00	(4.434.750,00)	17,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	965.250,00	(4.434.750,00)	17,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	965.250,00	(4.434.750,00)	17,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.000.000,00	69.445.696,00	(35.554.304,00)	66,13	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	69.445.696,00	(35.554.304,00)	66,13	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	69.445.696,00	(35.554.304,00)	66,13	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.390.000,00	85.303.579,00	(46.086.421,00)	64,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.560.000,00	80.076.579,00	(38.483.421,00)	67,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	118.560.000,00	80.076.579,00	(38.483.421,00)	67,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.560.000,00	80.076.579,00	(38.483.421,00)	67,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.830.000,00	5.227.000,00	(7.603.000,00)	40,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.830.000,00	5.227.000,00	(7.603.000,00)	40,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.830.000,00	5.227.000,00	(7.603.000,00)	40,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.838.200,00	233.034.932,00	(39.803.268,00)	85,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,00	23.537.700,00	(15.652.300,00)	60,06	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.190.000,00	23.537.700,00	(15.652.300,00)	60,06	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.190.000,00	23.537.700,00	(15.652.300,00)	60,06	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.800.000,00	57.086.185,00	(23.713.815,00)	70,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	80.800.000,00	57.086.185,00	(23.713.815,00)	70,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.800.000,00	57.086.185,00	(23.713.815,00)	70,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.848.200,00	152.411.047,00	(437.153,00)	99,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	152.848.200,00	152.411.047,00	(437.153,00)	99,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.848.200,00	152.411.047,00	(437.153,00)	99,71	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.750.000.000,00	1.617.770.000,00	(2.132.230.000,00)	43,14	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.750.000.000,00	1.617.770.000,00	(2.132.230.000,00)	43,14	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.750.000.000,00	1.617.770.000,00	(2.132.230.000,00)	43,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	15.542.652.311,00	14.247.042.555,00	(1.295.609.756,00)	91,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.970.111.424,00	3.545.670.193,00	(424.441.231,00)	89,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	439.850.000,00	230.577.971,00	(209.272.029,00)	52,42	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	199.850.000,00	93.690.000,00	(106.160.000,00)	46,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	199.850.000,00	93.690.000,00	(106.160.000,00)	46,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.850.000,00	93.690.000,00	(106.160.000,00)	46,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	140.000.000,00	136.887.971,00	(3.112.029,00)	97,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	136.887.971,00	(3.112.029,00)	97,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	136.887.971,00	(3.112.029,00)	97,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	49.190.000,00	0,00	(49.190.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	23.190.000,00	0,00	(23.190.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	23.190.000,00	0,00	(23.190.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.190.000,00	0,00	(23.190.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.408.910.124,00	3.250.883.744,00	(158.026.380,00)	95,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	3.346.405.724,00	3.192.184.694,00	(154.221.030,00)	95,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.342.461.324,00	3.192.184.694,00	(150.276.630,00)	95,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.342.461.324,00	3.192.184.694,00	(150.276.630,00)	95,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.2	BELANJA MODAL	3.944.400,00	0,00	(3.944.400,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.944.400,00	0,00	(3.944.400,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0014		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	54.751.200,00	53.908.850,00	(842.350,00)	98,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0014	5.1	BELANJA OPERASI	54.751.200,00	53.908.850,00	(842.350,00)	98,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.751.200,00	53.908.850,00	(842.350,00)	98,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	7.753.200,00	4.790.200,00	(2.963.000,00)	61,78	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1	BELANJA OPERASI	7.753.200,00	4.790.200,00	(2.963.000,00)	61,78	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.753.200,00	4.790.200,00	(2.963.000,00)	61,78	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	5.821.100,00	5.807.928,00	(13.172,00)	99,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.07.0006		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	5.821.100,00	5.807.928,00	(13.172,00)	99,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.821.100,00	5.807.928,00	(13.172,00)	99,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.821.100,00	5.807.928,00	(13.172,00)	99,77	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.340.200,00	58.400.550,00	(7.939.650,00)	88,03	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	66.340.200,00	58.400.550,00	(7.939.650,00)	88,03	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	66.340.200,00	58.400.550,00	(7.939.650,00)	88,03	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.340.200,00	58.400.550,00	(7.939.650,00)	88,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.572.540.887,00	10.701.372.362,00	(871.168.525,00)	92,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.770.300,00	12.250.550,00	(1.519.750,00)	88,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.770.300,00	12.250.550,00	(1.519.750,00)	88,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.770.300,00	12.250.550,00	(1.519.750,00)	88,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.770.300,00	12.250.550,00	(1.519.750,00)	88,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.126.587.003,00	6.667.607.483,00	(458.979.520,00)	93,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.101.856.603,00	6.653.982.783,00	(447.873.820,00)	93,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.101.856.603,00	6.653.982.783,00	(447.873.820,00)	93,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.101.856.603,00	6.653.982.783,00	(447.873.820,00)	93,69	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24.730.400,00	13.624.700,00	(11.105.700,00)	55,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	24.730.400,00	13.624.700,00	(11.105.700,00)	55,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.730.400,00	13.624.700,00	(11.105.700,00)	55,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	400.000.000,00	384.673.041,00	(15.326.959,00)	96,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	400.000.000,00	384.673.041,00	(15.326.959,00)	96,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	384.673.041,00	(15.326.959,00)	96,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	384.673.041,00	(15.326.959,00)	96,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	580.423.800,00	558.338.892,00	(22.084.908,00)	96,19	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.325.200,00	5.836.800,00	(2.488.400,00)	70,11	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.325.200,00	5.836.800,00	(2.488.400,00)	70,11	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.325.200,00	5.836.800,00	(2.488.400,00)	70,11	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.774.100,00	33.695.700,00	(1.078.400,00)	96,89	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.774.100,00	33.695.700,00	(1.078.400,00)	96,89	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.774.100,00	33.695.700,00	(1.078.400,00)	96,89	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.728.500,00	9.528.000,00	(8.200.500,00)	53,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.728.500,00	9.528.000,00	(8.200.500,00)	53,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.728.500,00	9.528.000,00	(8.200.500,00)	53,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.696.000,00	346.500,00	(3.349.500,00)	9,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.696.000,00	346.500,00	(3.349.500,00)	9,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.696.000,00	346.500,00	(3.349.500,00)	9,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	515.900.000,00	508.931.892,00	(6.968.108,00)	98,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	515.900.000,00	508.931.892,00	(6.968.108,00)	98,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.900.000,00	508.931.892,00	(6.968.108,00)	98,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.120.000,00	162.190.954,00	(113.929.046,00)	58,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.640.000,00	1.560.000,00	(80.000,00)	95,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.640.000,00	1.560.000,00	(80.000,00)	95,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.640.000,00	1.560.000,00	(80.000,00)	95,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.480.000,00	160.630.954,00	(113.849.046,00)	58,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	274.480.000,00	160.630.954,00	(113.849.046,00)	58,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.480.000,00	160.630.954,00	(113.849.046,00)	58,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.175.639.784,00	2.916.311.442,00	(259.328.342,00)	91,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,00	35.805.700,00	(3.384.300,00)	91,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.190.000,00	35.805.700,00	(3.384.300,00)	91,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.190.000,00	35.805.700,00	(3.384.300,00)	91,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	217.780.000,00	203.631.137,00	(14.148.863,00)	93,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	217.780.000,00	203.631.137,00	(14.148.863,00)	93,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.780.000,00	203.631.137,00	(14.148.863,00)	93,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.420.000,00	18.323.700,00	(96.300,00)	99,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.420.000,00	18.323.700,00	(96.300,00)	99,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.420.000,00	18.323.700,00	(96.300,00)	99,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.900.249.784,00	2.658.550.905,00	(241.698.879,00)	91,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.896.305.384,00	2.658.550.905,00	(237.754.479,00)	91,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.896.305.384,00	2.658.550.905,00	(237.754.479,00)	91,79	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	3.944.400,00	0,00	(3.944.400,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.944.400,00	0,00	(3.944.400,00)	0,00	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.530.036.324,00	7.799.917.244,00	(730.119.080,00)	91,44	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.085.090.450,00	1.856.664.398,00	(228.426.052,00)	89,04	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.085.090.450,00	1.856.664.398,00	(228.426.052,00)	89,04	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0002		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	218.037.500,00	216.283.899,00	(1.753.601,00)	99,19	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	218.037.500,00	216.283.899,00	(1.753.601,00)	99,19	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.037.500,00	216.283.899,00	(1.753.601,00)	99,19	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0004		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	927.207.000,00	836.139.250,00	(91.067.750,00)	90,17	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	927.207.000,00	836.139.250,00	(91.067.750,00)	90,17	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	927.207.000,00	836.139.250,00	(91.067.750,00)	90,17	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0005		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	344.164.650,00	269.889.450,00	(74.275.200,00)	78,41	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	344.164.650,00	269.889.450,00	(74.275.200,00)	78,41	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.164.650,00	269.889.450,00	(74.275.200,00)	78,41	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0006		Pelayanan Informasi Publik	33.119.900,00	31.199.700,00	(1.920.200,00)	94,20	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	33.119.900,00	31.199.700,00	(1.920.200,00)	94,20	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.119.900,00	31.199.700,00	(1.920.200,00)	94,20	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0007		Layanan Hubungan Media	422.883.900,00	364.202.099,00	(58.681.801,00)	86,12	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	422.883.900,00	364.202.099,00	(58.681.801,00)	86,12	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.883.900,00	364.202.099,00	(58.681.801,00)	86,12	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0012		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	139.677.500,00	138.950.000,00	(727.500,00)	99,47	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	139.677.500,00	138.950.000,00	(727.500,00)	99,47	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.677.500,00	38.950.000,00	(727.500,00)	98,16	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.941.446.800,00	2.604.830.095,00	(336.616.705,00)	88,55	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.134.929.300,00	2.101.933.522,00	(32.995.778,00)	98,45	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.01.0003		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.134.929.300,00	2.101.933.522,00	(32.995.778,00)	98,45	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.106.867.500,00	2.098.048.522,00	(8.818.978,00)	99,58	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.106.867.500,00	2.098.048.522,00	(8.818.978,00)	99,58	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	28.061.800,00	3.885.000,00	(24.176.800,00)	13,84	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.061.800,00	3.885.000,00	(24.176.800,00)	13,84	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	806.517.500,00	502.896.573,00	(303.620.927,00)	62,35	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0001		Penataleksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	101.866.800,00	72.534.800,00	(29.332.000,00)	71,20	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	101.866.800,00	72.534.800,00	(29.332.000,00)	71,20	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.866.800,00	72.534.800,00	(29.332.000,00)	71,20	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0003		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	202.958.500,00	73.896.150,00	(129.062.350,00)	36,40	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	175.083.500,00	46.946.150,00	(128.137.350,00)	26,81	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.083.500,00	46.946.150,00	(128.137.350,00)	26,81	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	27.875.000,00	26.950.000,00	(925.000,00)	96,68	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.875.000,00	26.950.000,00	(925.000,00)	96,68	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0007		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	444.079.200,00	308.089.078,00	(135.990.122,00)	69,37	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	444.079.200,00	308.089.078,00	(135.990.122,00)	69,37	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.079.200,00	308.089.078,00	(135.990.122,00)	69,37	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0010		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	57.613.000,00	48.376.545,00	(9.236.455,00)	83,96	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	57.613.000,00	48.376.545,00	(9.236.455,00)	83,96	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.613.000,00	48.376.545,00	(9.236.455,00)	83,96	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.503.499.074,00	3.338.422.751,00	(165.076.323,00)	95,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.527.400,00	15.331.190,00	(12.196.210,00)	55,69	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.527.400,00	15.331.190,00	(12.196.210,00)	55,69	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.527.400,00	15.331.190,00	(12.196.210,00)	55,69	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.527.400,00	15.331.190,00	(12.196.210,00)	55,69	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.128.320.274,00	3.033.956.538,00	(94.363.736,00)	96,98	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.128.320.274,00	3.033.956.538,00	(94.363.736,00)	96,98	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.128.320.274,00	3.033.956.538,00	(94.363.736,00)	96,98	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.128.320.274,00	3.033.956.538,00	(94.363.736,00)	96,98	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.771.400,00	102.619.583,00	(23.151.817,00)	81,59	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	655.500,00	588.000,00	(67.500,00)	89,70	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	655.500,00	588.000,00	(67.500,00)	89,70	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	655.500,00	588.000,00	(67.500,00)	89,70	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.855.000,00	5.556.520,00	(1.298.480,00)	81,05	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.855.000,00	5.556.520,00	(1.298.480,00)	81,05	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.855.000,00	5.556.520,00	(1.298.480,00)	81,05	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.610.900,00	4.610.900,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.610.900,00	4.610.900,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.650.000,00	91.864.163,00	(21.785.837,00)	80,83	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	113.650.000,00	91.864.163,00	(21.785.837,00)	80,83	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.650.000,00	91.864.163,00	(21.785.837,00)	80,83	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.150.000,00	15.002.000,00	(1.148.000,00)	92,89	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	13.852.000,00	(1.148.000,00)	92,34	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.852.000,00	(1.148.000,00)	92,34	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.852.000,00	(1.148.000,00)	92,34	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.730.000,00	171.513.440,00	(34.216.560,00)	83,36	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,00	35.003.800,00	(4.186.200,00)	89,31	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.190.000,00	35.003.800,00	(4.186.200,00)	89,31	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.190.000,00	35.003.800,00	(4.186.200,00)	89,31	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.500.000,00	85.098.075,00	(28.401.925,00)	74,97	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.500.000,00	85.098.075,00	(28.401.925,00)	74,97	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.500.000,00	85.098.075,00	(28.401.925,00)	74,97	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.040.000,00	6.705.000,00	(1.335.000,00)	83,39	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.040.000,00	6.705.000,00	(1.335.000,00)	83,39	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.040.000,00	6.705.000,00	(1.335.000,00)	83,39	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.706.565,00	(293.435,00)	99,34	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.706.565,00	(293.435,00)	99,34	
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.706.565,00	(293.435,00)	99,34	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.20	2.16.2.21.2.20.01.0000		5	BELANJA DAERAH	46.994.700,00	37.109.900,00	(9.884.800,00)	78,96	
2.20	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	46.994.700,00	37.109.900,00	(9.884.800,00)	78,96	
2.20	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.20.02.2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	46.994.700,00	37.109.900,00	(9.884.800,00)	78,96	
2.20	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.20.02.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	46.994.700,00	37.109.900,00	(9.884.800,00)	78,96	
2.20	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.20.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.994.700,00	37.109.900,00	(9.884.800,00)	78,96	
2.20	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.20.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.994.700,00	37.109.900,00	(9.884.800,00)	78,96	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000		5	BELANJA DAERAH	48.130.700,00	38.525.548,00	(9.605.152,00)	80,04	
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	48.130.700,00	38.525.548,00	(9.605.152,00)	80,04	
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.21.02.2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.130.700,00	38.525.548,00	(9.605.152,00)	80,04	
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.21.02.2.01.0002		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.630.000,00	17.125.743,00	(6.504.257,00)	72,47	
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.630.000,00	17.125.743,00	(6.504.257,00)	72,47	
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.630.000,00	17.125.743,00	(6.504.257,00)	72,47	
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.21.02.2.01.0004		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.500.700,00	21.399.805,00	(3.100.895,00)	87,34	
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.500.700,00	21.399.805,00	(3.100.895,00)	87,34	
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.500.700,00	21.399.805,00	(3.100.895,00)	87,34	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	862.191.200,00	756.820.896,00	(105.370.304,00)	87,77	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	117.073.200,00	113.828.414,00	(3.244.786,00)	97,22	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	117.073.200,00	113.828.414,00	(3.244.786,00)	97,22	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	117.073.200,00	113.828.414,00	(3.244.786,00)	97,22	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	117.073.200,00	113.828.414,00	(3.244.786,00)	97,22	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.073.200,00	113.828.414,00	(3.244.786,00)	97,22	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	279.884.100,00	218.643.582,00	(61.240.518,00)	78,11	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	279.884.100,00	218.643.582,00	(61.240.518,00)	78,11	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	279.884.100,00	218.643.582,00	(61.240.518,00)	78,11	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	279.884.100,00	218.643.582,00	(61.240.518,00)	78,11	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.884.100,00	218.643.582,00	(61.240.518,00)	78,11	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	10.436.200,00	8.768.700,00	(1.667.500,00)	84,02	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	10.436.200,00	8.768.700,00	(1.667.500,00)	84,02	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002		Pelayanan antar Kerja	10.436.200,00	8.768.700,00	(1.667.500,00)	84,02	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.436.200,00	8.768.700,00	(1.667.500,00)	84,02	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.436.200,00	8.768.700,00	(1.667.500,00)	84,02	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	454.797.700,00	415.580.200,00	(39.217.500,00)	91,37	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	454.797.700,00	415.580.200,00	(39.217.500,00)	91,37	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.866.000,00	4.433.000,00	(5.433.000,00)	44,93	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.866.000,00	4.433.000,00	(5.433.000,00)	44,93	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.866.000,00	4.433.000,00	(5.433.000,00)	44,93	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0002		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.896.800,00	1.681.000,00	(3.215.800,00)	34,32	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.896.800,00	1.681.000,00	(3.215.800,00)	34,32	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.896.800,00	1.681.000,00	(3.215.800,00)	34,32	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	440.034.900,00	409.466.200,00	(30.568.700,00)	93,05	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	440.034.900,00	409.466.200,00	(30.568.700,00)	93,05	
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.034.900,00	409.466.200,00	(30.568.700,00)	93,05	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.259.871.758,00	6.813.434.187,00	(446.437.571,00)	93,85	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	92.653.000,00	89.320.700,00	(3.332.300,00)	96,40	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.03.2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	92.653.000,00	89.320.700,00	(3.332.300,00)	96,40	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.03.2.01.0004		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	92.653.000,00	89.320.700,00	(3.332.300,00)	96,40	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	92.653.000,00	89.320.700,00	(3.332.300,00)	96,40	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.653.000,00	89.320.700,00	(3.332.300,00)	96,40	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	83.905.000,00	41.521.200,00	(42.383.800,00)	49,48	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.05.2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	83.905.000,00	41.521.200,00	(42.383.800,00)	49,48	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.05.2.01.0001		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	83.905.000,00	41.521.200,00	(42.383.800,00)	49,48	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	83.905.000,00	41.521.200,00	(42.383.800,00)	49,48	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.905.000,00	41.521.200,00	(42.383.800,00)	49,48	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	48.205.900,00	45.944.010,00	(2.261.890,00)	95,30	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.06.2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	48.205.900,00	45.944.010,00	(2.261.890,00)	95,30	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.06.2.01.0005		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	48.205.900,00	45.944.010,00	(2.261.890,00)	95,30	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	48.205.900,00	45.944.010,00	(2.261.890,00)	95,30	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.205.900,00	45.944.010,00	(2.261.890,00)	95,30	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	250.923.400,00	236.282.176,00	(14.641.224,00)	94,16	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.07.2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	250.923.400,00	236.282.176,00	(14.641.224,00)	94,16	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0004		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	250.923.400,00	236.282.176,00	(14.641.224,00)	94,16	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	250.923.400,00	236.282.176,00	(14.641.224,00)	94,16	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.923.400,00	236.282.176,00	(14.641.224,00)	94,16	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.204.935.000,00	2.962.483.282,00	(242.451.718,00)	92,43	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.204.935.000,00	2.962.483.282,00	(242.451.718,00)	92,43	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0006		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.204.935.000,00	2.962.483.282,00	(242.451.718,00)	92,43	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.105.451.600,00	2.962.483.282,00	(142.968.318,00)	95,39	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.451.600,00	462.496.804,00	(142.954.796,00)	76,38	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1.04	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	(13.522,00)	99,99	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	99.483.400,00	0,00	(99.483.400,00)	0,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.483.400,00	0,00	(99.483.400,00)	0,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.579.249.458,00	3.437.882.819,00	(141.366.639,00)	96,05	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.648.600,00	60.638.464,00	(4.010.136,00)	93,79	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.648.600,00	60.638.464,00	(4.010.136,00)	93,79	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.906.900,00	51.938.464,00	(968.436,00)	98,16	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.906.900,00	51.938.464,00	(968.436,00)	98,16	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	11.741.700,00	8.700.000,00	(3.041.700,00)	74,09	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.741.700,00	8.700.000,00	(3.041.700,00)	74,09	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.105.328.558,00	3.029.759.308,00	(75.569.250,00)	97,56	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.031.834.808,00	2.957.610.064,00	(74.224.744,00)	97,55	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.031.834.808,00	2.957.610.064,00	(74.224.744,00)	97,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.031.834.808,00	2.957.610.064,00	(74.224.744,00)	97,55	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	73.493.750,00	72.149.244,00	(1.344.506,00)	98,17	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	73.493.750,00	72.149.244,00	(1.344.506,00)	98,17	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.493.750,00	72.149.244,00	(1.344.506,00)	98,17	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.034.300,00	140.845.422,00	(22.188.878,00)	86,39	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.352.200,00	1.352.200,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.352.200,00	1.352.200,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.477.600,00	4.884.000,00	(593.600,00)	89,16	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.477.600,00	4.884.000,00	(593.600,00)	89,16	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.477.600,00	4.884.000,00	(593.600,00)	89,16	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	766.600,00	534.385,00	(232.215,00)	69,70	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	766.600,00	534.385,00	(232.215,00)	69,70	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.600,00	534.385,00	(232.215,00)	69,70	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.461.300,00	23.634.035,00	(1.827.265,00)	92,82	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.461.300,00	23.634.035,00	(1.827.265,00)	92,82	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.461.300,00	23.634.035,00	(1.827.265,00)	92,82	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.086.600,00	7.676.205,00	(7.410.395,00)	50,88	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.086.600,00	7.676.205,00	(7.410.395,00)	50,88	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.086.600,00	7.676.205,00	(7.410.395,00)	50,88	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.990.000,00	1.903.000,00	(2.087.000,00)	47,69	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.990.000,00	1.903.000,00	(2.087.000,00)	47,69	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	1.903.000,00	(2.087.000,00)	47,69	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.900.000,00	100.861.597,00	(10.038.403,00)	90,94	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	110.900.000,00	100.861.597,00	(10.038.403,00)	90,94	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.900.000,00	100.861.597,00	(10.038.403,00)	90,94	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.438.000,00	55.587.950,00	(8.850.050,00)	86,26	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.438.000,00	55.587.950,00	(8.850.050,00)	86,26	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	64.438.000,00	55.587.950,00	(8.850.050,00)	86,26	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.438.000,00	55.587.950,00	(8.850.050,00)	86,26	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.600.000,00	6.270.000,00	(2.330.000,00)	72,90	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.100.000,00	4.770.000,00	(2.330.000,00)	67,18	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.100.000,00	4.770.000,00	(2.330.000,00)	67,18	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	4.770.000,00	(2.330.000,00)	67,18	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.200.000,00	144.781.675,00	(28.418.325,00)	83,59	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.950.000,00	67.050.300,00	(11.899.700,00)	84,92	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	78.950.000,00	67.050.300,00	(11.899.700,00)	84,92	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.950.000,00	67.050.300,00	(11.899.700,00)	84,92	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.250.000,00	77.731.375,00	(16.518.625,00)	82,47	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	94.250.000,00	77.731.375,00	(16.518.625,00)	82,47	
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.250.000,00	77.731.375,00	(16.518.625,00)	82,47	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.339.435.366,00	6.092.616.788,00	(246.818.578,00)	96,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	16.250.600,00	14.688.806,00	(1.561.794,00)	90,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.250.600,00	14.688.806,00	(1.561.794,00)	90,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	16.250.600,00	14.688.806,00	(1.561.794,00)	90,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.250.600,00	14.688.806,00	(1.561.794,00)	90,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.250.600,00	14.688.806,00	(1.561.794,00)	90,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	22.240.000,00	21.880.019,00	(359.981,00)	98,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.240.000,00	21.880.019,00	(359.981,00)	98,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	22.240.000,00	21.880.019,00	(359.981,00)	98,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.240.000,00	21.880.019,00	(359.981,00)	98,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.240.000,00	21.880.019,00	(359.981,00)	98,38	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	748.822.100,00	735.015.386,00	(13.806.714,00)	98,15	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	748.822.100,00	735.015.386,00	(13.806.714,00)	98,15	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	688.292.200,00	675.268.406,00	(13.023.794,00)	98,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	688.292.200,00	675.268.406,00	(13.023.794,00)	98,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	688.292.200,00	675.268.406,00	(13.023.794,00)	98,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	54.212.700,00	53.872.130,00	(340.570,00)	99,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	54.212.700,00	53.872.130,00	(340.570,00)	99,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.212.700,00	53.872.130,00	(340.570,00)	99,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	6.317.200,00	5.874.850,00	(442.350,00)	92,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.317.200,00	5.874.850,00	(442.350,00)	92,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.317.200,00	5.874.850,00	(442.350,00)	92,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	435.384.000,00	335.884.970,00	(99.499.030,00)	77,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	435.384.000,00	335.884.970,00	(99.499.030,00)	77,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	34.139.000,00	34.074.250,00	(64.750,00)	99,81	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.139.000,00	34.074.250,00	(64.750,00)	99,81	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.139.000,00	34.074.250,00	(64.750,00)	99,81	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006		Pengawasan Penanaman Modal	401.245.000,00	301.810.720,00	(99.434.280,00)	75,21	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	401.245.000,00	301.810.720,00	(99.434.280,00)	75,21	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.245.000,00	301.810.720,00	(99.434.280,00)	75,21	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	4.875.200,00	4.253.000,00	(622.200,00)	87,23	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.875.200,00	4.253.000,00	(622.200,00)	87,23	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4.875.200,00	4.253.000,00	(622.200,00)	87,23	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.875.200,00	4.253.000,00	(622.200,00)	87,23	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.875.200,00	4.253.000,00	(622.200,00)	87,23	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.111.863.466,00	4.980.894.607,00	(130.968.859,00)	97,43	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.028.600,00	20.100.896,00	(927.704,00)	95,58	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.028.600,00	20.100.896,00	(927.704,00)	95,58	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.028.600,00	20.100.896,00	(927.704,00)	95,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.028.600,00	20.100.896,00	(927.704,00)	95,58	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.425.885.166,00	3.363.161.807,00	(62.723.359,00)	98,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.425.885.166,00	3.363.161.807,00	(62.723.359,00)	98,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.425.885.166,00	3.363.161.807,00	(62.723.359,00)	98,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.425.885.166,00	3.363.161.807,00	(62.723.359,00)	98,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	291.348.000,00	289.894.368,00	(1.453.632,00)	99,50	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	291.348.000,00	289.894.368,00	(1.453.632,00)	99,50	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	291.348.000,00	289.894.368,00	(1.453.632,00)	99,50	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.348.000,00	289.894.368,00	(1.453.632,00)	99,50	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.840.100,00	201.676.412,00	(5.163.688,00)	97,50	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.050.700,00	8.011.600,00	(39.100,00)	99,51	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.050.700,00	8.011.600,00	(39.100,00)	99,51	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.050.700,00	8.011.600,00	(39.100,00)	99,51	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.335.600,00	27.659.450,00	(1.676.150,00)	94,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	29.335.600,00	27.659.450,00	(1.676.150,00)	94,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.335.600,00	27.659.450,00	(1.676.150,00)	94,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.258.800,00	7.677.400,00	(581.400,00)	92,96	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.258.800,00	7.677.400,00	(581.400,00)	92,96	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.258.800,00	7.677.400,00	(581.400,00)	92,96	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.640.000,00	13.772.450,00	(867.550,00)	94,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	14.640.000,00	13.772.450,00	(867.550,00)	94,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.640.000,00	13.772.450,00	(867.550,00)	94,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.555.000,00	144.555.512,00	(1.999.488,00)	98,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	146.555.000,00	144.555.512,00	(1.999.488,00)	98,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.555.000,00	144.555.512,00	(1.999.488,00)	98,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.490.000,00	580.260.729,00	(44.229.271,00)	92,91	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	622.500.000,00	578.270.729,00	(44.229.271,00)	92,89	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	622.500.000,00	578.270.729,00	(44.229.271,00)	92,89	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.500.000,00	578.270.729,00	(44.229.271,00)	92,89	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	542.271.600,00	525.800.395,00	(16.471.205,00)	96,96	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.200.000,00	131.277.195,00	(14.922.805,00)	89,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	146.200.000,00	131.277.195,00	(14.922.805,00)	89,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.200.000,00	131.277.195,00	(14.922.805,00)	89,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.470.000,00	7.025.800,00	(444.200,00)	94,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.470.000,00	7.025.800,00	(444.200,00)	94,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.470.000,00	7.025.800,00	(444.200,00)	94,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.411.600,00	348.307.400,00	(1.104.200,00)	99,68	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	349.411.600,00	348.307.400,00	(1.104.200,00)	99,68	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.411.600,00	348.307.400,00	(1.104.200,00)	99,68	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	150.000.000,00	113.962.500,00	(36.037.500,00)	75,97	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00	113.962.500,00	(36.037.500,00)	75,97	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	113.962.500,00	(36.037.500,00)	75,97	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.602.099.282,00	6.792.731.946,13	(1.809.367.335,87)	78,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.227.934.660,00	431.857.400,00	(796.077.260,00)	35,16	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	511.248.100,00	105.409.949,00	(405.838.151,00)	20,61	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	404.823.300,00	92.823.199,00	(312.000.101,00)	22,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	384.082.200,00	72.378.199,00	(311.704.001,00)	18,84	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.082.200,00	72.378.199,00	(311.704.001,00)	18,84	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	20.741.100,00	20.445.000,00	(296.100,00)	98,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.741.100,00	20.445.000,00	(296.100,00)	98,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0007		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	106.424.800,00	12.586.750,00	(93.838.050,00)	11,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	106.424.800,00	12.586.750,00	(93.838.050,00)	11,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.424.800,00	12.586.750,00	(93.838.050,00)	11,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	716.686.560,00	326.447.451,00	(390.239.109,00)	45,54	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	716.686.560,00	326.447.451,00	(390.239.109,00)	45,54	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	716.686.560,00	326.447.451,00	(390.239.109,00)	45,54	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	621.686.560,00	240.487.451,00	(381.199.109,00)	38,68	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	95.000.000,00	85.960.000,00	(9.040.000,00)	90,48	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.648.046.996,00	2.908.150.921,13	(739.896.074,87)	79,71	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	545.121.756,00	145.976.923,00	(399.144.833,00)	26,77	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	418.754.156,00	77.950.123,00	(340.804.033,00)	18,61	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	417.506.856,00	76.703.123,00	(340.803.733,00)	18,37	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.506.856,00	76.703.123,00	(340.803.733,00)	18,37	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.247.300,00	1.247.000,00	(300,00)	99,97	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.247.300,00	1.247.000,00	(300,00)	99,97	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0002		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	126.367.600,00	68.026.800,00	(58.340.800,00)	53,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	126.367.600,00	68.026.800,00	(58.340.800,00)	53,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.367.600,00	68.026.800,00	(58.340.800,00)	53,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.839.434.800,00	1.725.828.447,00	(113.606.353,00)	93,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0003		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.839.434.800,00	1.725.828.447,00	(113.606.353,00)	93,82	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.832.151.800,00	1.718.545.447,00	(113.606.353,00)	93,79	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.151.800,00	180.330.458,00	(41.821.342,00)	81,17	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0003	5.1.05	Belanja Hibah	1.610.000.000,00	1.538.214.989,00	(71.785.011,00)	95,54	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	7.283.000,00	7.283.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.283.000,00	7.283.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.263.490.440,00	1.036.345.551,13	(227.144.888,87)	82,02	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	584.152.280,00	425.070.336,00	(159.081.944,00)	72,76	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	584.152.280,00	425.070.336,00	(159.081.944,00)	72,76	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.152.280,00	132.196.502,00	(156.955.778,00)	45,71	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	5.1.05	Belanja Hibah	295.000.000,00	292.873.834,00	(2.126.166,00)	99,27	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	679.338.160,00	611.275.215,13	(68.062.944,87)	89,98	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	671.514.760,00	609.576.215,13	(61.938.544,87)	90,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	671.514.760,00	609.576.215,13	(61.938.544,87)	90,77	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.2	BELANJA MODAL	7.823.400,00	1.699.000,00	(6.124.400,00)	21,71	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.823.400,00	1.699.000,00	(6.124.400,00)	21,71	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	505.400.000,00	503.133.614,00	(2.266.386,00)	99,55	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	505.400.000,00	503.133.614,00	(2.266.386,00)	99,55	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	505.400.000,00	503.133.614,00	(2.266.386,00)	99,55	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	505.400.000,00	503.133.614,00	(2.266.386,00)	99,55	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	497.733.614,00	(2.266.386,00)	99,54	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.220.717.626,00	2.949.590.011,00	(271.127.615,00)	91,58	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.910.300,00	16.731.800,00	(9.178.500,00)	64,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.910.300,00	16.731.800,00	(9.178.500,00)	64,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.910.300,00	16.731.800,00	(9.178.500,00)	64,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.910.300,00	16.731.800,00	(9.178.500,00)	64,57	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.199.252.926,00	2.156.110.473,00	(43.142.453,00)	98,03	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.199.252.926,00	2.156.110.473,00	(43.142.453,00)	98,03	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.199.252.926,00	2.156.110.473,00	(43.142.453,00)	98,03	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.199.252.926,00	2.156.110.473,00	(43.142.453,00)	98,03	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000,00	85.337.136,00	(14.662.864,00)	85,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000,00	85.337.136,00	(14.662.864,00)	85,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	85.337.136,00	(14.662.864,00)	85,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	85.337.136,00	(14.662.864,00)	85,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	472.795.800,00	321.402.638,00	(151.393.162,00)	67,97	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.295.700,00	2.248.000,00	(2.047.700,00)	52,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.295.700,00	2.248.000,00	(2.047.700,00)	52,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.295.700,00	2.248.000,00	(2.047.700,00)	52,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	294.361.800,00	189.386.000,00	(104.975.800,00)	64,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.796.800,00	1.090.000,00	(706.800,00)	60,66	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.796.800,00	1.090.000,00	(706.800,00)	60,66	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	292.565.000,00	188.296.000,00	(104.269.000,00)	64,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292.565.000,00	188.296.000,00	(104.269.000,00)	64,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.443.200,00	19.210.500,00	(3.232.700,00)	85,59	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	22.443.200,00	19.210.500,00	(3.232.700,00)	85,59	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.443.200,00	19.210.500,00	(3.232.700,00)	85,59	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.035.700,00	14.498.500,00	(3.537.200,00)	80,38	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.035.700,00	14.498.500,00	(3.537.200,00)	80,38	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.035.700,00	14.498.500,00	(3.537.200,00)	80,38	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.044.400,00	3.363.000,00	(681.400,00)	83,15	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.044.400,00	3.363.000,00	(681.400,00)	83,15	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.044.400,00	3.363.000,00	(681.400,00)	83,15	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.615.000,00	92.696.638,00	(36.918.362,00)	71,51	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	129.615.000,00	92.696.638,00	(36.918.362,00)	71,51	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.615.000,00	92.696.638,00	(36.918.362,00)	71,51	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143.041.800,00	116.385.175,00	(26.656.625,00)	81,36	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.438.000,00	64.400.000,00	(38.000,00)	99,94	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	64.438.000,00	64.400.000,00	(38.000,00)	99,94	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.438.000,00	64.400.000,00	(38.000,00)	99,94	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	78.603.800,00	51.985.175,00	(26.618.625,00)	66,13	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	78.603.800,00	51.985.175,00	(26.618.625,00)	66,13	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.603.800,00	51.985.175,00	(26.618.625,00)	66,13	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.550.000,00	95.304.708,00	(8.245.292,00)	92,03	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.550.000,00	93.304.708,00	(8.245.292,00)	91,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	101.550.000,00	93.304.708,00	(8.245.292,00)	91,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.550.000,00	93.304.708,00	(8.245.292,00)	91,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.166.800,00	158.318.081,00	(17.848.719,00)	89,86	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.740.000,00	95.591.325,00	(5.148.675,00)	94,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.740.000,00	95.591.325,00	(5.148.675,00)	94,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.740.000,00	95.591.325,00	(5.148.675,00)	94,88	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	1.878.400,00	(3.121.600,00)	37,56	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	1.878.400,00	(3.121.600,00)	37,56	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.878.400,00	(3.121.600,00)	37,56	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.426.800,00	60.848.356,00	(9.578.444,00)	86,39	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	70.426.800,00	60.848.356,00	(9.578.444,00)	86,39	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.426.800,00	60.848.356,00	(9.578.444,00)	86,39	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.016.355.586,00	4.609.538.877,00	(406.816.709,00)	91,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	228.405.600,00	81.183.791,00	(147.221.809,00)	35,54	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	210.330.300,00	70.058.291,00	(140.272.009,00)	33,30	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.105.900,00	10.345.300,00	(6.760.600,00)	60,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.105.900,00	10.345.300,00	(6.760.600,00)	60,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.105.900,00	10.345.300,00	(6.760.600,00)	60,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0006		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.982.500,00	7.185.200,00	(2.797.300,00)	71,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.982.500,00	7.185.200,00	(2.797.300,00)	71,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.982.500,00	7.185.200,00	(2.797.300,00)	71,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	60.764.300,00	51.430.091,00	(9.334.209,00)	84,63	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	57.192.300,00	51.430.091,00	(5.762.209,00)	89,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.192.300,00	51.430.091,00	(5.762.209,00)	89,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	3.572.000,00	0,00	(3.572.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.572.000,00	0,00	(3.572.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	118.727.800,00	0,00	(118.727.800,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	118.727.800,00	0,00	(118.727.800,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.727.800,00	0,00	(118.727.800,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0010		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.749.800,00	1.097.700,00	(2.652.100,00)	29,27	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.749.800,00	1.097.700,00	(2.652.100,00)	29,27	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.749.800,00	1.097.700,00	(2.652.100,00)	29,27	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.075.300,00	11.125.500,00	(6.949.800,00)	61,55	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001		Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	18.075.300,00	11.125.500,00	(6.949.800,00)	61,55	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.175.300,00	11.125.500,00	(3.049.800,00)	78,48	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.175.300,00	11.125.500,00	(3.049.800,00)	78,48	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.787.949.986,00	4.528.355.086,00	(259.594.900,00)	94,57	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.841.800,00	15.572.800,00	(2.269.000,00)	87,28	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.841.800,00	15.572.800,00	(2.269.000,00)	87,28	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.841.800,00	15.572.800,00	(2.269.000,00)	87,28	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.841.800,00	15.572.800,00	(2.269.000,00)	87,28	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.830.992.686,00	3.747.107.370,00	(83.885.316,00)	97,81	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.828.342.786,00	3.746.273.470,00	(82.069.316,00)	97,85	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.828.342.786,00	3.746.273.470,00	(82.069.316,00)	97,85	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.828.342.786,00	3.746.273.470,00	(82.069.316,00)	97,85	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.649.900,00	833.900,00	(1.816.000,00)	31,46	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.649.900,00	833.900,00	(1.816.000,00)	31,46	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.649.900,00	833.900,00	(1.816.000,00)	31,46	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	176.000.000,00	175.653.104,00	(346.896,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	176.000.000,00	175.653.104,00	(346.896,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	176.000.000,00	175.653.104,00	(346.896,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.000.000,00	175.653.104,00	(346.896,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.698.200,00	234.958.992,00	(81.739.208,00)	74,19	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.870.400,00	3.870.400,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.870.400,00	3.870.400,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.729.100,00	10.913.400,00	(815.700,00)	93,04	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.729.100,00	10.913.400,00	(815.700,00)	93,04	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.729.100,00	10.913.400,00	(815.700,00)	93,04	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.848.500,00	16.078.000,00	(8.770.500,00)	64,70	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.848.500,00	16.078.000,00	(8.770.500,00)	64,70	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.848.500,00	16.078.000,00	(8.770.500,00)	64,70	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.598.000,00	7.282.000,00	(7.316.000,00)	49,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	14.598.000,00	7.282.000,00	(7.316.000,00)	49,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.598.000,00	7.282.000,00	(7.316.000,00)	49,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.000.000,00	191.162.992,00	(64.837.008,00)	74,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	256.000.000,00	191.162.992,00	(64.837.008,00)	74,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.000.000,00	191.162.992,00	(64.837.008,00)	74,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.652.200,00	5.652.200,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.652.200,00	5.652.200,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.019.700,00	158.025.995,00	(26.993.705,00)	85,41	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.650.000,00	40.149.179,00	(15.500.821,00)	72,14	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.650.000,00	40.149.179,00	(15.500.821,00)	72,14	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.650.000,00	40.149.179,00	(15.500.821,00)	72,14	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.850.000,00	8.309.900,00	(7.540.100,00)	52,42	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.850.000,00	8.309.900,00	(7.540.100,00)	52,42	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.850.000,00	8.309.900,00	(7.540.100,00)	52,42	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.119.700,00	109.166.916,00	(3.952.784,00)	96,50	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	113.119.700,00	109.166.916,00	(3.952.784,00)	96,50	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.119.700,00	109.166.916,00	(3.952.784,00)	96,50	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.397.600,00	197.036.825,00	(64.360.775,00)	75,37	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,00	25.237.675,00	(13.952.325,00)	64,39	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.190.000,00	25.237.675,00	(13.952.325,00)	64,39	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.190.000,00	25.237.675,00	(13.952.325,00)	64,39	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.412.000,00	112.613.650,00	(49.798.350,00)	69,33	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	162.412.000,00	112.613.650,00	(49.798.350,00)	69,33	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.412.000,00	112.613.650,00	(49.798.350,00)	69,33	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.795.600,00	59.185.500,00	(610.100,00)	98,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	59.795.600,00	59.185.500,00	(610.100,00)	98,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.795.600,00	59.185.500,00	(610.100,00)	98,97	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	45.191.900,00	34.173.300,00	(11.018.600,00)	75,61	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	45.191.900,00	34.173.300,00	(11.018.600,00)	75,61	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	23.673.800,00	20.753.100,00	(2.920.700,00)	87,66	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	16.843.200,00	14.509.900,00	(2.333.300,00)	86,14	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.843.200,00	14.509.900,00	(2.333.300,00)	86,14	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.843.200,00	14.509.900,00	(2.333.300,00)	86,14	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	6.830.600,00	6.243.200,00	(587.400,00)	91,40	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.830.600,00	6.243.200,00	(587.400,00)	91,40	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.830.600,00	6.243.200,00	(587.400,00)	91,40	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	4.076.000,00	2.218.400,00	(1.857.600,00)	54,42	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0002		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	4.076.000,00	2.218.400,00	(1.857.600,00)	54,42	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.076.000,00	2.218.400,00	(1.857.600,00)	54,42	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.076.000,00	2.218.400,00	(1.857.600,00)	54,42	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	17.442.100,00	11.201.800,00	(6.240.300,00)	64,22	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	9.870.100,00	4.671.400,00	(5.198.700,00)	47,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.870.100,00	4.671.400,00	(5.198.700,00)	47,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.870.100,00	4.671.400,00	(5.198.700,00)	47,32	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	7.572.000,00	6.530.400,00	(1.041.600,00)	86,24	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.572.000,00	6.530.400,00	(1.041.600,00)	86,24	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.572.000,00	6.530.400,00	(1.041.600,00)	86,24	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : Dinas Pariwisata

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	30.000.000.000,00	17.728.894.310,00	(12.271.105.690,00)	59,09	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.000.000.000,00	17.728.894.310,00	(12.271.105.690,00)	59,09	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	30.000.000.000,00	17.728.894.310,00	(12.271.105.690,00)	59,09	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	24.183.314.097,00	20.005.739.595,13	(4.177.574.501,87)	82,72	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	12.051.444.107,00	10.502.985.817,13	(1.548.458.289,87)	87,15	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	8.667.454.244,00	7.656.060.830,13	(1.011.393.413,87)	88,33	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0004		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.004.878.622,00	727.085.950,12	(277.792.671,88)	72,35	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	416.364.592,00	219.464.598,00	(196.899.994,00)	52,70	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.364.592,00	219.464.598,00	(196.899.994,00)	52,70	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	588.514.030,00	507.621.352,12	(80.892.677,88)	86,25	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.514.030,00	92.641.000,00	(45.873.030,00)	66,88	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	450.000.000,00	414.980.352,12	(35.019.647,88)	92,21	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0007		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.287.252.896,00	2.908.836.734,00	(378.416.162,00)	88,48	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.114.165.696,00	2.856.186.734,00	(257.978.962,00)	91,71	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.114.165.696,00	2.856.186.734,00	(257.978.962,00)	91,71	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0007	5.2	BELANJA MODAL	173.087.200,00	52.650.000,00	(120.437.200,00)	30,41	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.087.200,00	52.650.000,00	(437.200,00)	99,17	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0007	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	0,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0008		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.375.322.726,00	4.020.138.146,01	(355.184.579,99)	91,88	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.341.821.000,00	4.001.638.146,01	(340.182.853,99)	92,16	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.341.821.000,00	4.001.638.146,01	(340.182.853,99)	92,16	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	33.501.726,00	18.500.000,00	(15.001.726,00)	55,22	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.501.726,00	18.500.000,00	(15.001.726,00)	55,22	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.242.107.063,00	2.715.900.887,00	(526.206.176,00)	83,76	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0003		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	210.619.900,00	195.286.822,00	(15.333.078,00)	92,72	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	210.619.900,00	195.286.822,00	(15.333.078,00)	92,72	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.619.900,00	195.286.822,00	(15.333.078,00)	92,72	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.694.195.163,00	2.306.092.720,00	(388.102.443,00)	85,59	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.588.791.100,00	2.216.079.645,00	(372.711.455,00)	85,60	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.588.791.100,00	2.216.079.645,00	(372.711.455,00)	85,60	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	105.404.063,00	90.013.075,00	(15.390.988,00)	85,39	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.404.063,00	90.013.075,00	(15.390.988,00)	85,39	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	272.568.000,00	149.797.345,00	(122.770.655,00)	54,95	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	272.568.000,00	149.797.345,00	(122.770.655,00)	54,95	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.568.000,00	149.797.345,00	(122.770.655,00)	54,95	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	64.724.000,00	64.724.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.724.000,00	64.724.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	141.882.800,00	131.024.100,00	(10.858.700,00)	92,34	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.04.0010		Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	13.403.800,00	9.719.300,00	(3.684.500,00)	72,51	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	13.403.800,00	9.719.300,00	(3.684.500,00)	72,51	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.403.800,00	9.719.300,00	(3.684.500,00)	72,51	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.04.0011		Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	128.479.000,00	121.304.800,00	(7.174.200,00)	94,41	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.04.0011	5.1	BELANJA OPERASI	128.479.000,00	121.304.800,00	(7.174.200,00)	94,41	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.04.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.479.000,00	121.304.800,00	(7.174.200,00)	94,41	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	854.031.960,00	493.953.608,00	(360.078.352,00)	57,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	854.031.960,00	493.953.608,00	(360.078.352,00)	57,83	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	514.231.700,00	269.876.530,00	(244.355.170,00)	52,48	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	514.231.700,00	269.876.530,00	(244.355.170,00)	52,48	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.231.700,00	269.876.530,00	(244.355.170,00)	52,48	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	339.800.260,00	224.077.078,00	(115.723.182,00)	65,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	339.800.260,00	224.077.078,00	(115.723.182,00)	65,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.800.260,00	224.077.078,00	(115.723.182,00)	65,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	238.742.200,00	131.989.625,00	(106.752.575,00)	55,28	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	238.742.200,00	131.989.625,00	(106.752.575,00)	55,28	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.2.01.0001		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	238.742.200,00	131.989.625,00	(106.752.575,00)	55,28	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	238.482.300,00	131.739.625,00	(106.742.675,00)	55,24	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.482.300,00	131.739.625,00	(106.742.675,00)	55,24	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	259.900,00	250.000,00	(9.900,00)	96,19	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	259.900,00	250.000,00	(9.900,00)	96,19	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.683.406.700,00	1.253.846.607,00	(1.429.560.093,00)	46,72	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2.683.406.700,00	1.253.846.607,00	(1.429.560.093,00)	46,72	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2.520.524.150,00	1.174.982.057,00	(1.345.542.093,00)	46,61	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.520.524.150,00	1.174.982.057,00	(1.345.542.093,00)	46,61	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.524.150,00	1.174.982.057,00	(1.345.542.093,00)	46,61	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	162.882.550,00	78.864.550,00	(84.018.000,00)	48,41	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	162.882.550,00	78.864.550,00	(84.018.000,00)	48,41	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.882.550,00	78.864.550,00	(84.018.000,00)	48,41	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.355.689.130,00	7.622.963.938,00	(732.725.192,00)	91,23	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.508.300,00	93.051.770,00	(13.456.530,00)	87,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.508.300,00	93.051.770,00	(13.456.530,00)	87,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	106.508.300,00	93.051.770,00	(13.456.530,00)	87,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.508.300,00	93.051.770,00	(13.456.530,00)	87,36	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.273.953.130,00	6.062.786.909,00	(211.166.221,00)	96,63	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.273.953.130,00	6.062.786.909,00	(211.166.221,00)	96,63	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.273.953.130,00	6.062.786.909,00	(211.166.221,00)	96,63	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.273.953.130,00	6.062.786.909,00	(211.166.221,00)	96,63	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	130.000.000,00	129.831.528,00	(168.472,00)	99,87	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	130.000.000,00	129.831.528,00	(168.472,00)	99,87	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.831.528,00	(168.472,00)	99,87	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.831.528,00	(168.472,00)	99,87	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.273.200,00	280.445.529,00	(29.827.671,00)	90,38	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.070.500,00	1.757.000,00	(313.500,00)	84,85	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.070.500,00	1.757.000,00	(313.500,00)	84,85	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.070.500,00	1.757.000,00	(313.500,00)	84,85	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.456.700,00	13.320.000,00	(9.136.700,00)	59,31	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	22.456.700,00	13.320.000,00	(9.136.700,00)	59,31	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.456.700,00	13.320.000,00	(9.136.700,00)	59,31	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.273.500,00	21.851.900,00	(3.421.600,00)	86,46	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.273.500,00	21.851.900,00	(3.421.600,00)	86,46	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.273.500,00	21.851.900,00	(3.421.600,00)	86,46	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.753.800,00	4.497.400,00	(256.400,00)	94,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.753.800,00	4.497.400,00	(256.400,00)	94,60	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.753.800,00	4.497.400,00	(256.400,00)	94,60	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.718.700,00	239.019.229,00	(16.699.471,00)	93,46	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	255.718.700,00	239.019.229,00	(16.699.471,00)	93,46	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.718.700,00	239.019.229,00	(16.699.471,00)	93,46	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	881.950.000,00	616.158.707,00	(265.791.293,00)	69,86	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.150.000,00	6.146.850,00	(3.150,00)	99,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.150.000,00	6.146.850,00	(3.150,00)	99,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	6.146.850,00	(3.150,00)	99,94	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	875.800.000,00	610.011.857,00	(265.788.143,00)	69,65	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	875.800.000,00	610.011.857,00	(265.788.143,00)	69,65	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.800.000,00	610.011.857,00	(265.788.143,00)	69,65	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	653.004.500,00	440.689.495,00	(212.315.005,00)	67,48	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	276.592.500,00	169.875.711,00	(106.716.789,00)	61,41	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	276.592.500,00	169.875.711,00	(106.716.789,00)	61,41	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.592.500,00	169.875.711,00	(106.716.789,00)	61,41	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.480.000,00	19.340.420,00	(6.139.580,00)	75,90	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.480.000,00	19.340.420,00	(6.139.580,00)	75,90	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.480.000,00	19.340.420,00	(6.139.580,00)	75,90	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.246.000,00	63.869.960,00	(99.376.040,00)	39,12	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	163.246.000,00	63.869.960,00	(99.376.040,00)	39,12	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.246.000,00	63.869.960,00	(99.376.040,00)	39,12	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.686.000,00	187.603.404,00	(82.596,00)	99,95	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	187.686.000,00	187.603.404,00	(82.596,00)	99,95	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.686.000,00	187.603.404,00	(82.596,00)	99,95	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : Dinas Pertanian dan Pangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	590.860.000,00	590.985.955,00	125.955,00	100,02	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	590.860.000,00	590.985.955,00	125.955,00	100,02	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	590.860.000,00	590.985.955,00	125.955,00	100,02	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.887.512.111,00	8.322.306.245,00	(565.205.866,00)	93,64	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	393.586.800,00	192.050.707,00	(201.536.093,00)	48,79	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	14.999.900,00	13.244.000,00	(1.755.900,00)	88,29	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0012		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	14.999.900,00	13.244.000,00	(1.755.900,00)	88,29	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	14.999.900,00	13.244.000,00	(1.755.900,00)	88,29	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.999.900,00	13.244.000,00	(1.755.900,00)	88,29	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	72.499.400,00	68.808.729,00	(3.690.671,00)	94,90	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.02.0003		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	72.499.400,00	68.808.729,00	(3.690.671,00)	94,90	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	72.499.400,00	68.808.729,00	(3.690.671,00)	94,90	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.499.400,00	68.808.729,00	(3.690.671,00)	94,90	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	306.087.500,00	109.997.978,00	(196.089.522,00)	35,93	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0002		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	296.088.200,00	108.291.578,00	(187.796.622,00)	36,57	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	296.088.200,00	108.291.578,00	(187.796.622,00)	36,57	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.088.200,00	108.291.578,00	(17.796.622,00)	85,88	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.05	Belanja Hibah	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	0,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	9.999.300,00	1.706.400,00	(8.292.900,00)	17,06	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.999.300,00	1.706.400,00	(8.292.900,00)	17,06	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.300,00	1.706.400,00	(8.292.900,00)	17,06	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	21.000.000,00	14.457.570,00	(6.542.430,00)	68,84	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04.2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	21.000.000,00	14.457.570,00	(6.542.430,00)	68,84	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04.2.01.0001		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	21.000.000,00	14.457.570,00	(6.542.430,00)	68,84	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	14.457.570,00	(6.542.430,00)	68,84	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	14.457.570,00	(6.542.430,00)	68,84	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	49.268.300,00	39.145.300,00	(10.123.000,00)	79,45	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	49.268.300,00	39.145.300,00	(10.123.000,00)	79,45	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01.0004		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	39.499.500,00	30.990.500,00	(8.509.000,00)	78,45	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	39.499.500,00	30.990.500,00	(8.509.000,00)	78,45	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.499.500,00	30.990.500,00	(8.509.000,00)	78,45	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01.0007		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	9.768.800,00	8.154.800,00	(1.614.000,00)	83,47	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.768.800,00	8.154.800,00	(1.614.000,00)	83,47	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.768.800,00	8.154.800,00	(1.614.000,00)	83,47	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.423.657.011,00	8.076.652.668,00	(347.004.343,00)	95,88	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.428.392,00	21.260.300,00	(8.168.092,00)	72,24	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.428.392,00	21.260.300,00	(8.168.092,00)	72,24	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.428.392,00	21.260.300,00	(8.168.092,00)	72,24	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.428.392,00	21.260.300,00	(8.168.092,00)	72,24	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.391.289.439,00	7.176.574.526,00	(214.714.913,00)	97,09	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.391.289.439,00	7.176.574.526,00	(214.714.913,00)	97,09	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.391.289.439,00	7.176.574.526,00	(214.714.913,00)	97,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.391.289.439,00	7.176.574.526,00	(214.714.913,00)	97,09	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.386.400,00	151.656.711,00	(43.729.689,00)	77,61	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.089.100,00	7.524.804,00	(564.296,00)	93,02	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.089.100,00	7.524.804,00	(564.296,00)	93,02	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.089.100,00	7.524.804,00	(564.296,00)	93,02	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.794.800,00	11.885.350,00	(909.450,00)	92,89	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.794.800,00	11.885.350,00	(909.450,00)	92,89	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.794.800,00	11.885.350,00	(909.450,00)	92,89	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.256.700,00	22.248.125,00	(5.008.575,00)	81,62	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	27.256.700,00	22.248.125,00	(5.008.575,00)	81,62	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.256.700,00	22.248.125,00	(5.008.575,00)	81,62	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.945.800,00	13.660.400,00	(285.400,00)	97,95	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.945.800,00	13.660.400,00	(285.400,00)	97,95	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.945.800,00	13.660.400,00	(285.400,00)	97,95	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.300.000,00	96.338.032,00	(36.961.968,00)	72,27	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	133.300.000,00	96.338.032,00	(36.961.968,00)	72,27	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.300.000,00	96.338.032,00	(36.961.968,00)	72,27	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.740.000,00	76.761.175,00	(14.978.825,00)	83,67	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.800.000,00	73.821.175,00	(14.978.825,00)	83,13	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.800.000,00	73.821.175,00	(14.978.825,00)	83,13	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	73.821.175,00	(14.978.825,00)	83,13	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	715.812.780,00	650.399.956,00	(65.412.824,00)	90,86	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	365.487.400,00	312.100.905,00	(53.386.495,00)	85,39	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	365.487.400,00	312.100.905,00	(53.386.495,00)	85,39	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.487.400,00	312.100.905,00	(53.386.495,00)	85,39	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.980.000,00	31.960.000,00	(20.000,00)	99,93	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.980.000,00	31.960.000,00	(20.000,00)	99,93	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.980.000,00	31.960.000,00	(20.000,00)	99,93	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	318.345.380,00	306.339.051,00	(12.006.329,00)	96,22	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	318.345.380,00	306.339.051,00	(12.006.329,00)	96,22	
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.345.380,00	306.339.051,00	(12.006.329,00)	96,22	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : Dinas Pertanian dan Pangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	590.860.000,00	590.985.955,00	125.955,00	100,02	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	590.860.000,00	590.985.955,00	125.955,00	100,02	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	590.860.000,00	590.985.955,00	125.955,00	100,02	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000		5	BELANJA DAERAH	775.105.500,00	503.189.420,00	(271.916.080,00)	64,91	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	610.329.300,00	346.422.620,00	(263.906.680,00)	56,75	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	610.329.300,00	346.422.620,00	(263.906.680,00)	56,75	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	57.200,00	(49.942.800,00)	0,11	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	57.200,00	(49.942.800,00)	0,11	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	57.200,00	(49.942.800,00)	0,11	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0003		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	560.329.300,00	346.365.420,00	(213.963.880,00)	61,81	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	546.107.300,00	333.331.420,00	(212.775.880,00)	61,03	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.107.300,00	333.331.420,00	(107.775.880,00)	75,56	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1.05	Belanja Hibah	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	0,00	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.2	BELANJA MODAL	14.222.000,00	13.034.000,00	(1.188.000,00)	91,64	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.838.000,00	9.650.000,00	(1.188.000,00)	89,03	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.384.000,00	3.384.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	154.787.600,00	147.708.400,00	(7.079.200,00)	95,42	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	154.787.600,00	147.708.400,00	(7.079.200,00)	95,42	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.02.0001		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	154.787.600,00	147.708.400,00	(7.079.200,00)	95,42	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	154.787.600,00	147.708.400,00	(7.079.200,00)	95,42	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.787.600,00	147.708.400,00	(7.079.200,00)	95,42	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.988.600,00	9.058.400,00	(930.200,00)	90,68	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.988.600,00	9.058.400,00	(930.200,00)	90,68	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.988.600,00	9.058.400,00	(930.200,00)	90,68	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.988.600,00	9.058.400,00	(930.200,00)	90,68	
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.988.600,00	9.058.400,00	(930.200,00)	90,68	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Pertanian dan Pangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	590.860.000,00	590.985.955,00	125.955,00	100,02	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	590.860.000,00	590.985.955,00	125.955,00	100,02	
	3.27.2.09.3.25.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	590.860.000,00	590.985.955,00	125.955,00	100,02	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.823.988.725,00	1.166.737.199,84	(657.251.525,16)	63,96	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	839.844.690,00	339.584.157,84	(500.260.532,16)	40,43	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	73.976.140,00	29.687.120,00	(44.289.020,00)	40,13	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0001		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	18.676.200,00	6.864.000,00	(11.812.200,00)	36,75	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.676.200,00	6.864.000,00	(11.812.200,00)	36,75	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.676.200,00	6.864.000,00	(11.812.200,00)	36,75	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0002		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	55.299.940,00	22.823.120,00	(32.476.820,00)	41,27	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.299.940,00	22.823.120,00	(32.476.820,00)	41,27	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.299.940,00	22.823.120,00	(32.476.820,00)	41,27	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	735.049.650,00	297.871.687,84	(437.177.962,16)	40,52	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0002		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	511.939.900,00	104.227.388,00	(407.712.512,00)	20,35	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	511.939.900,00	104.227.388,00	(407.712.512,00)	20,35	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.939.900,00	104.227.388,00	(217.712.512,00)	32,37	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	190.000.000,00	0,00	(190.000.000,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0003		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	170.909.850,00	149.969.199,84	(20.940.650,16)	87,74	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	170.909.850,00	149.969.199,84	(20.940.650,16)	87,74	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.909.850,00	149.969.199,84	(20.940.650,16)	87,74	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0004		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	52.199.900,00	43.675.100,00	(8.524.800,00)	83,66	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	52.199.900,00	43.675.100,00	(8.524.800,00)	83,66	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.199.900,00	43.675.100,00	(8.524.800,00)	83,66	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	2.400.500,00	(7.599.500,00)	24,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.03.0001		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	10.000.000,00	2.400.500,00	(7.599.500,00)	24,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	2.400.500,00	(7.599.500,00)	24,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	2.400.500,00	(7.599.500,00)	24,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.818.900,00	9.624.850,00	(11.194.050,00)	46,23	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.05.0006		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	20.818.900,00	9.624.850,00	(11.194.050,00)	46,23	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.05.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.818.900,00	9.624.850,00	(11.194.050,00)	46,23	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.818.900,00	9.624.850,00	(11.194.050,00)	46,23	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	21.132.000,00	17.929.200,00	(3.202.800,00)	84,84	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.03.2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	21.132.000,00	17.929.200,00	(3.202.800,00)	84,84	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.03.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	21.132.000,00	17.929.200,00	(3.202.800,00)	84,84	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.132.000,00	17.929.200,00	(3.202.800,00)	84,84	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.132.000,00	17.929.200,00	(3.202.800,00)	84,84	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	549.962.235,00	491.484.939,00	(58.477.296,00)	89,36	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	32.619.500,00	25.950.400,00	(6.669.100,00)	79,55	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.01.0008		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.619.500,00	25.950.400,00	(6.669.100,00)	79,55	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	32.619.500,00	25.950.400,00	(6.669.100,00)	79,55	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.619.500,00	25.950.400,00	(6.669.100,00)	79,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	225.625.340,00	204.088.490,00	(21.536.850,00)	90,45	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.03.0002		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	225.625.340,00	204.088.490,00	(21.536.850,00)	90,45	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	221.301.540,00	200.690.890,00	(20.610.650,00)	90,68	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.301.540,00	200.690.890,00	(20.610.650,00)	90,68	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.323.800,00	3.397.600,00	(926.200,00)	78,57	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.323.800,00	3.397.600,00	(926.200,00)	78,57	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	291.717.395,00	261.446.049,00	(30.271.346,00)	89,62	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0002		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	33.689.200,00	29.767.050,00	(3.922.150,00)	88,35	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.689.200,00	29.767.050,00	(3.922.150,00)	88,35	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.689.200,00	29.767.050,00	(3.922.150,00)	88,35	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0010		Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	258.028.195,00	231.678.999,00	(26.349.196,00)	89,78	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	258.028.195,00	231.678.999,00	(26.349.196,00)	89,78	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.028.195,00	231.678.999,00	(26.349.196,00)	89,78	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	413.049.800,00	317.738.903,00	(95.310.897,00)	76,92	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	413.049.800,00	317.738.903,00	(95.310.897,00)	76,92	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0002		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	160.046.200,00	142.876.353,00	(17.169.847,00)	89,27	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	152.874.200,00	136.646.353,00	(16.227.847,00)	89,38	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.874.200,00	136.646.353,00	(16.227.847,00)	89,38	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.172.000,00	6.230.000,00	(942.000,00)	86,86	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.172.000,00	6.230.000,00	(942.000,00)	86,86	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0003		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	253.003.600,00	174.862.550,00	(78.141.050,00)	69,11	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	250.093.300,00	174.862.550,00	(75.230.750,00)	69,91	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.093.300,00	174.862.550,00	(75.230.750,00)	69,91	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	2.910.300,00	0,00	(2.910.300,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.910.300,00	0,00	(2.910.300,00)	0,00	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.30.3.31.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	20.196.935.000,00	10.012.865.989,00	(10.184.069.011,00)	49,57	
	3.30.3.31.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.196.935.000,00	10.012.865.989,00	(10.184.069.011,00)	49,57	
	3.30.3.31.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	20.196.935.000,00	9.909.663.900,00	(10.287.271.100,00)	49,06	
	3.30.3.31.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	103.202.089,00	103.202.089,00	0,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	20.024.345.810,00	17.364.707.057,55	(2.659.638.752,45)	86,71	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	70.313.400,00	67.997.200,00	(2.316.200,00)	96,70	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	70.313.400,00	67.997.200,00	(2.316.200,00)	96,70	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.03.0002		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	70.313.400,00	67.997.200,00	(2.316.200,00)	96,70	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.313.400,00	67.997.200,00	(2.316.200,00)	96,70	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.313.400,00	67.997.200,00	(2.316.200,00)	96,70	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	12.247.993.000,00	10.483.323.425,00	(1.764.669.575,00)	85,59	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.776.829.780,00	6.368.631.947,00	(1.408.197.833,00)	81,89	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0001		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.463.810.080,00	2.319.798.581,00	(144.011.499,00)	94,15	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.463.810.080,00	2.319.798.581,00	(144.011.499,00)	94,15	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.463.810.080,00	2.319.798.581,00	(144.011.499,00)	94,15	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0002		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.313.019.700,00	4.048.833.366,00	(1.264.186.334,00)	76,20	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.823.341.300,00	3.629.248.366,00	(1.194.092.934,00)	75,24	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.823.341.300,00	3.629.248.366,00	(1.194.092.934,00)	75,24	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	489.678.400,00	419.585.000,00	(70.093.400,00)	85,68	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.678.400,00	219.785.000,00	(69.893.400,00)	75,87	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	199.800.000,00	(200.000,00)	99,90	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	4.471.163.220,00	4.114.691.478,00	(356.471.742,00)	92,02	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.0001		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.665.841.500,00	2.540.292.692,00	(125.548.808,00)	95,29	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.665.841.500,00	2.540.292.692,00	(125.548.808,00)	95,29	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.665.841.500,00	2.540.292.692,00	(125.548.808,00)	95,29	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.0002		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.805.321.720,00	1.574.398.786,00	(230.922.934,00)	87,20	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.805.321.720,00	1.574.398.786,00	(230.922.934,00)	87,20	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.805.321.720,00	1.574.398.786,00	(230.922.934,00)	87,20	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	45.815.600,00	17.035.050,00	(28.780.550,00)	37,18	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	10.150.100,00	6.565.550,00	(3.584.550,00)	64,68	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10.150.100,00	6.565.550,00	(3.584.550,00)	64,68	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.150.100,00	6.565.550,00	(3.584.550,00)	64,68	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.150.100,00	6.565.550,00	(3.584.550,00)	64,68	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	35.665.500,00	10.469.500,00	(25.196.000,00)	29,35	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.0002		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12.635.200,00	5.872.000,00	(6.763.200,00)	46,47	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.635.200,00	5.872.000,00	(6.763.200,00)	46,47	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.635.200,00	5.872.000,00	(6.763.200,00)	46,47	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.0003		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	23.030.300,00	4.597.500,00	(18.432.800,00)	19,96	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.030.300,00	4.597.500,00	(18.432.800,00)	19,96	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.030.300,00	4.597.500,00	(18.432.800,00)	19,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	152.447.400,00	90.512.449,00	(61.934.951,00)	59,37	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	152.447.400,00	90.512.449,00	(61.934.951,00)	59,37	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.0001		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	144.661.900,00	84.914.949,00	(59.746.951,00)	58,69	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.356.600,00	49.289.949,00	(27.066.651,00)	64,55	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.356.600,00	49.289.949,00	(27.066.651,00)	64,55	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	68.305.300,00	35.625.000,00	(32.680.300,00)	52,15	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.305.300,00	35.625.000,00	(32.680.300,00)	52,15	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.0002		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	7.785.500,00	5.597.500,00	(2.188.000,00)	71,89	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.785.500,00	5.597.500,00	(2.188.000,00)	71,89	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.785.500,00	5.597.500,00	(2.188.000,00)	71,89	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	283.672.500,00	226.871.377,00	(56.801.123,00)	79,97	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07.2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	283.672.500,00	226.871.377,00	(56.801.123,00)	79,97	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.0005		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	272.599.300,00	217.015.377,00	(55.583.923,00)	79,60	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	272.599.300,00	217.015.377,00	(55.583.923,00)	79,60	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.599.300,00	217.015.377,00	(55.583.923,00)	79,60	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.0006		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	11.073.200,00	9.856.000,00	(1.217.200,00)	89,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.073.200,00	9.856.000,00	(1.217.200,00)	89,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.073.200,00	9.856.000,00	(1.217.200,00)	89,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.224.103.910,00	6.478.967.556,55	(745.136.353,45)	89,68	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.739.500,00	108.788.750,00	(950.750,00)	99,13	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.739.500,00	108.788.750,00	(950.750,00)	99,13	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	109.739.500,00	108.788.750,00	(950.750,00)	99,13	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.739.500,00	108.788.750,00	(950.750,00)	99,13	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.610.900.510,00	5.108.561.391,00	(502.339.119,00)	91,04	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.537.981.510,00	5.037.266.891,00	(500.714.619,00)	90,95	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.537.981.510,00	5.037.266.891,00	(500.714.619,00)	90,95	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.537.981.510,00	5.037.266.891,00	(500.714.619,00)	90,95	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	72.919.000,00	71.294.500,00	(1.624.500,00)	97,77	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	72.919.000,00	71.294.500,00	(1.624.500,00)	97,77	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.919.000,00	71.294.500,00	(1.624.500,00)	97,77	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.561.300,00	197.447.736,00	(39.113.564,00)	83,46	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.193.000,00	7.307.300,00	(885.700,00)	89,18	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.193.000,00	7.307.300,00	(885.700,00)	89,18	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.193.000,00	7.307.300,00	(885.700,00)	89,18	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.608.400,00	28.980.000,00	(628.400,00)	97,87	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	29.608.400,00	28.980.000,00	(628.400,00)	97,87	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.608.400,00	28.980.000,00	(628.400,00)	97,87	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.894.400,00	7.766.000,00	(128.400,00)	98,37	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.894.400,00	7.766.000,00	(128.400,00)	98,37	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.894.400,00	7.766.000,00	(128.400,00)	98,37	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.579.200,00	22.448.900,00	(10.130.300,00)	68,90	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	32.579.200,00	22.448.900,00	(10.130.300,00)	68,90	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.579.200,00	22.448.900,00	(10.130.300,00)	68,90	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.167.000,00	21.476.380,00	(10.690.620,00)	66,76	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	32.167.000,00	21.476.380,00	(10.690.620,00)	66,76	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.167.000,00	21.476.380,00	(10.690.620,00)	66,76	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.200.000,00	462.000,00	(3.738.000,00)	11,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	462.000,00	(3.738.000,00)	11,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	462.000,00	(3.738.000,00)	11,00	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.919.300,00	109.007.156,00	(12.912.144,00)	89,40	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	121.919.300,00	109.007.156,00	(12.912.144,00)	89,40	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.919.300,00	109.007.156,00	(12.912.144,00)	89,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.946.000,00	279.211.070,00	(29.734.930,00)	90,37	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	98.866.000,00	98.586.000,00	(280.000,00)	99,71	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	98.866.000,00	98.586.000,00	(280.000,00)	99,71	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.866.000,00	98.586.000,00	(280.000,00)	99,71	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.320.000,00	163.380.620,00	(23.939.380,00)	87,22	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	187.320.000,00	163.380.620,00	(23.939.380,00)	87,22	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.320.000,00	163.380.620,00	(23.939.380,00)	87,22	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.760.000,00	17.244.450,00	(5.515.550,00)	75,76	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.760.000,00	17.244.450,00	(5.515.550,00)	75,76	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.760.000,00	17.244.450,00	(5.515.550,00)	75,76	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	957.956.600,00	784.958.609,55	(172.997.990,45)	81,94	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.312.000,00	75.291.450,00	(20.550,00)	99,97	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.312.000,00	75.291.450,00	(20.550,00)	99,97	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.312.000,00	75.291.450,00	(20.550,00)	99,97	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.962.000,00	166.145.624,00	(52.816.376,00)	75,87	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	218.962.000,00	166.145.624,00	(52.816.376,00)	75,87	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.962.000,00	166.145.624,00	(52.816.376,00)	75,87	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	663.682.600,00	543.521.535,55	(120.161.064,45)	81,89	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	362.842.600,00	343.839.441,72	(19.003.158,28)	94,76	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.842.600,00	343.839.441,72	(19.003.158,28)	94,76	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	300.840.000,00	199.682.093,83	(101.157.906,17)	66,37	
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.840.000,00	199.682.093,83	(101.157.906,17)	66,37	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.30.3.31.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	20.196.935.000,00	10.012.865.989,00	(10.184.069.011,00)	49,57	
	3.30.3.31.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.196.935.000,00	10.012.865.989,00	(10.184.069.011,00)	49,57	
	3.30.3.31.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	20.196.935.000,00	9.909.663.900,00	(10.287.271.100,00)	49,06	
	3.30.3.31.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	103.202.089,00	103.202.089,00	0,00	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	772.024.950,00	593.611.646,00	(178.413.304,00)	76,89	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	704.275.350,00	558.626.146,00	(145.649.204,00)	79,31	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	704.275.350,00	558.626.146,00	(145.649.204,00)	79,31	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	166.619.600,00	145.692.600,00	(20.927.000,00)	87,44	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	166.619.600,00	145.692.600,00	(20.927.000,00)	87,44	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.619.600,00	145.692.600,00	(20.927.000,00)	87,44	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0004		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	304.696.450,00	275.425.047,00	(29.271.403,00)	90,39	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	304.696.450,00	275.425.047,00	(29.271.403,00)	90,39	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.696.450,00	275.425.047,00	(29.271.403,00)	90,39	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0005		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	232.959.300,00	137.508.499,00	(95.450.801,00)	59,02	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	232.959.300,00	137.508.499,00	(95.450.801,00)	59,02	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.959.300,00	137.508.499,00	(95.450.801,00)	59,02	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	67.749.600,00	34.985.500,00	(32.764.100,00)	51,63	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.04.2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	67.749.600,00	34.985.500,00	(32.764.100,00)	51,63	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.04.2.01.0002		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	67.749.600,00	34.985.500,00	(32.764.100,00)	51,63	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.749.600,00	34.985.500,00	(32.764.100,00)	51,63	
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.749.600,00	34.985.500,00	(32.764.100,00)	51,63	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	4.833.020.822,00	4.709.335.258,00	(123.685.564,00)	97,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.944.152.500,00	1.930.645.472,00	(13.507.028,00)	99,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.944.152.500,00	1.930.645.472,00	(13.507.028,00)	99,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0006		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	44.243.500,00	44.090.000,00	(153.500,00)	99,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	44.243.500,00	44.090.000,00	(153.500,00)	99,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.243.500,00	44.090.000,00	(153.500,00)	99,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0008		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.048.955.600,00	1.041.898.672,00	(7.056.928,00)	99,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.048.955.600,00	1.041.898.672,00	(7.056.928,00)	99,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.048.955.600,00	1.041.898.672,00	(7.056.928,00)	99,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0017		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	850.953.400,00	844.656.800,00	(6.296.600,00)	99,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	840.953.400,00	834.666.800,00	(6.286.600,00)	99,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.953.400,00	834.666.800,00	(6.286.600,00)	99,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.888.868.322,00	2.778.689.786,00	(110.178.536,00)	96,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.295.000,00	7.117.100,00	(2.177.900,00)	76,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.295.000,00	7.117.100,00	(2.177.900,00)	76,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.295.000,00	7.117.100,00	(2.177.900,00)	76,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.295.000,00	7.117.100,00	(2.177.900,00)	76,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.546.100.822,00	2.460.193.419,00	(85.907.403,00)	96,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.546.100.822,00	2.460.193.419,00	(85.907.403,00)	96,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.546.100.822,00	2.460.193.419,00	(85.907.403,00)	96,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.546.100.822,00	2.460.193.419,00	(85.907.403,00)	96,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.184.200,00	78.081.096,00	(15.103.104,00)	83,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.828.500,00	2.827.700,00	(800,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.828.500,00	2.827.700,00	(800,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.828.500,00	2.827.700,00	(800,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.321.100,00	9.314.500,00	(6.600,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.321.100,00	9.314.500,00	(6.600,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.321.100,00	9.314.500,00	(6.600,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.396.600,00	2.396.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.396.600,00	2.396.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.458.000,00	1.381.600,00	(76.400,00)	94,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.458.000,00	1.381.600,00	(76.400,00)	94,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.458.000,00	1.381.600,00	(76.400,00)	94,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.180.000,00	62.160.696,00	(15.019.304,00)	80,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	77.180.000,00	62.160.696,00	(15.019.304,00)	80,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.180.000,00	62.160.696,00	(15.019.304,00)	80,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.580.000,00	9.054.984,00	(6.525.016,00)	58,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.180.000,00	8.654.984,00	(6.525.016,00)	57,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.180.000,00	8.654.984,00	(6.525.016,00)	57,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.180.000,00	8.654.984,00	(6.525.016,00)	57,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.708.300,00	224.243.187,00	(465.113,00)	99,79	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	24.984.350,00	(15.650,00)	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.984.350,00	(15.650,00)	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.984.350,00	(15.650,00)	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.510.000,00	107.509.900,00	(100,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	107.510.000,00	107.509.900,00	(100,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.510.000,00	107.509.900,00	(100,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.780.000,00	41.707.525,00	(72.475,00)	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	41.780.000,00	41.707.525,00	(72.475,00)	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.780.000,00	41.707.525,00	(72.475,00)	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.418.300,00	50.041.412,00	(376.888,00)	99,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.418.300,00	50.041.412,00	(376.888,00)	99,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.418.300,00	50.041.412,00	(376.888,00)	99,25	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.194.907.904,00	5.919.433.647,00	(275.474.257,00)	95,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	341.567.400,00	254.549.222,00	(87.018.178,00)	74,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	299.847.000,00	224.497.172,00	(75.349.828,00)	74,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Konsultasi Publik	25.671.400,00	24.005.950,00	(1.665.450,00)	93,51	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.671.400,00	24.005.950,00	(1.665.450,00)	93,51	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.671.400,00	24.005.950,00	(1.665.450,00)	93,51	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3.946.000,00	3.564.300,00	(381.700,00)	90,32	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.946.000,00	3.564.300,00	(381.700,00)	90,32	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.946.000,00	3.564.300,00	(381.700,00)	90,32	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	74.347.300,00	65.956.150,00	(8.391.150,00)	88,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	74.347.300,00	65.956.150,00	(8.391.150,00)	88,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.347.300,00	65.956.150,00	(8.391.150,00)	88,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	195.882.300,00	130.970.772,00	(64.911.528,00)	66,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	195.882.300,00	130.970.772,00	(64.911.528,00)	66,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.882.300,00	130.970.772,00	(64.911.528,00)	66,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	18.570.400,00	12.622.093,00	(5.948.307,00)	67,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	18.570.400,00	12.622.093,00	(5.948.307,00)	67,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.570.400,00	12.622.093,00	(5.948.307,00)	67,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.570.400,00	12.622.093,00	(5.948.307,00)	67,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	23.150.000,00	17.429.957,00	(5.720.043,00)	75,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	23.150.000,00	17.429.957,00	(5.720.043,00)	75,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.150.000,00	17.429.957,00	(5.720.043,00)	75,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.150.000,00	17.429.957,00	(5.720.043,00)	75,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	280.613.900,00	225.182.133,00	(55.431.767,00)	80,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	72.858.100,00	50.024.764,00	(22.833.336,00)	68,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.457.400,00	6.816.000,00	(6.641.400,00)	50,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.457.400,00	6.816.000,00	(6.641.400,00)	50,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.457.400,00	6.816.000,00	(6.641.400,00)	50,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.980.600,00	13.421.980,00	(558.620,00)	96,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.980.600,00	13.421.980,00	(558.620,00)	96,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.980.600,00	13.421.980,00	(558.620,00)	96,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	45.420.100,00	29.786.784,00	(15.633.316,00)	65,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	45.420.100,00	29.786.784,00	(15.633.316,00)	65,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.420.100,00	29.786.784,00	(15.633.316,00)	65,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	157.554.100,00	139.482.923,00	(18.071.177,00)	88,53	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.277.600,00	12.141.609,00	(135.991,00)	98,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.277.600,00	12.141.609,00	(135.991,00)	98,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.277.600,00	12.141.609,00	(135.991,00)	98,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	18.771.400,00	17.113.919,00	(1.657.481,00)	91,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.771.400,00	17.113.919,00	(1.657.481,00)	91,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.771.400,00	17.113.919,00	(1.657.481,00)	91,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.739.900,00	1.461.000,00	(3.278.900,00)	30,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.739.900,00	1.461.000,00	(3.278.900,00)	30,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.739.900,00	1.461.000,00	(3.278.900,00)	30,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	121.765.200,00	108.766.395,00	(12.998.805,00)	89,32	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	121.765.200,00	108.766.395,00	(12.998.805,00)	89,32	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.765.200,00	108.766.395,00	(12.998.805,00)	89,32	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	50.201.700,00	35.674.446,00	(14.527.254,00)	71,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.915.500,00	7.148.055,00	(767.445,00)	90,30	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.915.500,00	7.148.055,00	(767.445,00)	90,30	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.915.500,00	7.148.055,00	(767.445,00)	90,30	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	42.286.200,00	28.526.391,00	(13.759.809,00)	67,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	42.286.200,00	28.526.391,00	(13.759.809,00)	67,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.286.200,00	28.526.391,00	(13.759.809,00)	67,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.572.726.604,00	5.439.702.292,00	(133.024.312,00)	97,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.100.000,00	3.620.000,00	(2.480.000,00)	59,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.100.000,00	3.620.000,00	(2.480.000,00)	59,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.100.000,00	3.620.000,00	(2.480.000,00)	59,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	3.620.000,00	(2.480.000,00)	59,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.703.574.104,00	4.640.190.036,00	(63.384.068,00)	98,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.703.574.104,00	4.640.190.036,00	(63.384.068,00)	98,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.703.574.104,00	4.640.190.036,00	(63.384.068,00)	98,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.703.574.104,00	4.640.190.036,00	(63.384.068,00)	98,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.516.800,00	237.498.850,00	(8.017.950,00)	96,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.162.800,00	525.000,00	(2.637.800,00)	16,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.162.800,00	525.000,00	(2.637.800,00)	16,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.162.800,00	525.000,00	(2.637.800,00)	16,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.892.700,00	5.534.250,00	(358.450,00)	93,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.892.700,00	5.534.250,00	(358.450,00)	93,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.892.700,00	5.534.250,00	(358.450,00)	93,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.567.000,00	2.628.600,00	(938.400,00)	73,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.567.000,00	2.628.600,00	(938.400,00)	73,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.567.000,00	2.628.600,00	(938.400,00)	73,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.999.300,00	3.580.280,00	(419.020,00)	89,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.999.300,00	3.580.280,00	(419.020,00)	89,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.999.300,00	3.580.280,00	(419.020,00)	89,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.895.000,00	225.230.720,00	(3.664.280,00)	98,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	228.895.000,00	225.230.720,00	(3.664.280,00)	98,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.895.000,00	225.230.720,00	(3.664.280,00)	98,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.600.000,00	57.020.300,00	(3.579.700,00)	94,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.600.000,00	57.020.300,00	(3.579.700,00)	94,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	60.600.000,00	57.020.300,00	(3.579.700,00)	94,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.600.000,00	57.020.300,00	(3.579.700,00)	94,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.035.000,00	54.024.657,00	(9.010.343,00)	85,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	875.000,00	500.000,00	(375.000,00)	57,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	875.000,00	500.000,00	(375.000,00)	57,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	500.000,00	(375.000,00)	57,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.800.000,00	50.184.657,00	(8.615.343,00)	85,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.800.000,00	50.184.657,00	(8.615.343,00)	85,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	50.184.657,00	(8.615.343,00)	85,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.360.000,00	3.340.000,00	(20.000,00)	99,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.360.000,00	3.340.000,00	(20.000,00)	99,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.340.000,00	(20.000,00)	99,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	493.900.700,00	447.348.449,00	(46.552.251,00)	90,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.552.000,00	71.418.300,00	(133.700,00)	99,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	71.552.000,00	71.418.300,00	(133.700,00)	99,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.552.000,00	71.418.300,00	(133.700,00)	99,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.650.000,00	126.044.625,00	(33.605.375,00)	78,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	159.650.000,00	126.044.625,00	(33.605.375,00)	78,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.650.000,00	126.044.625,00	(33.605.375,00)	78,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	262.698.700,00	249.885.524,00	(12.813.176,00)	95,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	262.698.700,00	249.885.524,00	(12.813.176,00)	95,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.698.700,00	249.885.524,00	(12.813.176,00)	95,12	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	33.966.000,00	16.729.400,00	(17.236.600,00)	49,25	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	33.966.000,00	16.729.400,00	(17.236.600,00)	49,25	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6.074.000,00	1.755.000,00	(4.319.000,00)	28,89	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0002		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6.074.000,00	1.755.000,00	(4.319.000,00)	28,89	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.074.000,00	1.755.000,00	(4.319.000,00)	28,89	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.074.000,00	1.755.000,00	(4.319.000,00)	28,89	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	27.892.000,00	14.974.400,00	(12.917.600,00)	53,68	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	27.892.000,00	14.974.400,00	(12.917.600,00)	53,68	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.892.000,00	14.974.400,00	(12.917.600,00)	53,68	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.892.000,00	14.974.400,00	(12.917.600,00)	53,68	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Keuangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	700.809.894.963,00	689.686.585.074,72	(11.123.309.888,28)	98,41	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78.896.932.429,00	78.416.603.059,26	(480.329.369,74)	99,39	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.01	Pajak Daerah	54.110.644.633,00	50.098.130.579,00	(4.012.514.054,00)	92,58	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	125.000.000,00	76.578.130,00	(48.421.870,00)	61,26	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	1.553.458.908,00	118,69	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.353.862.488,00	18.381.010.134,26	2.027.147.646,26	112,39	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	621.912.962.534,00	611.269.982.015,46	(10.642.980.518,54)	98,28	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569.055.919.679,00	566.436.096.135,00	(2.619.823.544,00)	99,53	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.857.042.855,00	44.833.885.880,46	(8.023.156.974,54)	84,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	31.563.998.795,00	24.337.689.464,00	(7.226.309.331,00)	77,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	13.111.522.022,00	11.359.483.992,00	(1.752.038.030,00)	86,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.284.371.800,00	862.402.173,00	(421.969.627,00)	67,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	170.968.400,00	112.659.259,00	(58.309.141,00)	65,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	170.968.400,00	112.659.259,00	(58.309.141,00)	65,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.968.400,00	112.659.259,00	(58.309.141,00)	65,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	161.727.800,00	65.112.000,00	(96.615.800,00)	40,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	161.727.800,00	65.112.000,00	(96.615.800,00)	40,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.727.800,00	65.112.000,00	(96.615.800,00)	40,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	37.862.500,00	20.400.000,00	(17.462.500,00)	53,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.862.500,00	20.400.000,00	(17.462.500,00)	53,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.862.500,00	20.400.000,00	(17.462.500,00)	53,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	90.159.200,00	56.400.000,00	(33.759.200,00)	62,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	90.159.200,00	56.400.000,00	(33.759.200,00)	62,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.159.200,00	56.400.000,00	(33.759.200,00)	62,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	368.920.700,00	275.220.171,00	(93.700.529,00)	74,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	368.920.700,00	275.220.171,00	(93.700.529,00)	74,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.920.700,00	275.220.171,00	(93.700.529,00)	74,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	316.665.300,00	263.348.159,00	(53.317.141,00)	83,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	296.709.500,00	263.348.159,00	(33.361.341,00)	88,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.709.500,00	263.348.159,00	(33.361.341,00)	88,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	19.955.800,00	0,00	(19.955.800,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.955.800,00	0,00	(19.955.800,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	138.067.900,00	69.262.584,00	(68.805.316,00)	50,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	138.067.900,00	69.262.584,00	(68.805.316,00)	50,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.067.900,00	69.262.584,00	(68.805.316,00)	50,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	422.391.800,00	245.404.139,00	(176.987.661,00)	58,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	38.869.600,00	32.494.810,00	(6.374.790,00)	83,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.869.600,00	32.494.810,00	(6.374.790,00)	83,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.869.600,00	32.494.810,00	(6.374.790,00)	83,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0004		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	17.030.200,00	1.344.000,00	(15.686.200,00)	7,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.030.200,00	1.344.000,00	(15.686.200,00)	7,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.030.200,00	1.344.000,00	(15.686.200,00)	7,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	88.556.600,00	79.400.944,00	(9.155.656,00)	89,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	88.556.600,00	79.400.944,00	(9.155.656,00)	89,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.556.600,00	79.400.944,00	(9.155.656,00)	89,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36.508.300,00	19.631.850,00	(16.876.450,00)	53,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	36.508.300,00	19.631.850,00	(16.876.450,00)	53,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.508.300,00	19.631.850,00	(16.876.450,00)	53,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0008		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	30.609.000,00	3.080.000,00	(27.529.000,00)	10,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	30.609.000,00	3.080.000,00	(27.529.000,00)	10,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.609.000,00	3.080.000,00	(27.529.000,00)	10,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	29.439.700,00	23.379.400,00	(6.060.300,00)	79,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	29.439.700,00	23.379.400,00	(6.060.300,00)	79,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.439.700,00	23.379.400,00	(6.060.300,00)	79,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0010		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	24.588.600,00	0,00	(24.588.600,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	24.588.600,00	0,00	(24.588.600,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.588.600,00	0,00	(24.588.600,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	156.789.800,00	86.073.135,00	(70.716.665,00)	54,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	156.789.800,00	86.073.135,00	(70.716.665,00)	54,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.789.800,00	86.073.135,00	(70.716.665,00)	54,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	716.078.422,00	596.384.521,00	(119.693.901,00)	83,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0002		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	48.880.600,00	22.172.300,00	(26.708.300,00)	45,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.880.600,00	22.172.300,00	(26.708.300,00)	45,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.880.600,00	22.172.300,00	(26.708.300,00)	45,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	52.211.800,00	48.910.605,00	(3.301.195,00)	93,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	52.211.800,00	48.910.605,00	(3.301.195,00)	93,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.211.800,00	48.910.605,00	(3.301.195,00)	93,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	463.997.922,00	462.347.930,00	(1.649.992,00)	99,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	463.997.922,00	462.347.930,00	(1.649.992,00)	99,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.997.922,00	462.347.930,00	(1.649.992,00)	99,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0007		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	35.663.300,00	14.459.100,00	(21.204.200,00)	40,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	35.663.300,00	14.459.100,00	(21.204.200,00)	40,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.663.300,00	14.459.100,00	(21.204.200,00)	40,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	91.418.900,00	46.851.486,00	(44.567.414,00)	51,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	91.418.900,00	46.851.486,00	(44.567.414,00)	51,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.418.900,00	46.851.486,00	(44.567.414,00)	51,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0012		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	23.905.900,00	1.643.100,00	(22.262.800,00)	6,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	23.905.900,00	1.643.100,00	(22.262.800,00)	6,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.905.900,00	1.643.100,00	(22.262.800,00)	6,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.600.620.000,00	9.597.580.911,00	(1.003.039.089,00)	90,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	(3.420.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	(3.420.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	(3.420.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000,00	380.911,00	(999.619.089,00)	0,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	380.911,00	(999.619.089,00)	0,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	380.911,00	(999.619.089,00)	0,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	88.060.000,00	57.712.248,00	(30.347.752,00)	65,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	88.060.000,00	57.712.248,00	(30.347.752,00)	65,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.060.000,00	57.712.248,00	(30.347.752,00)	65,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.060.000,00	57.712.248,00	(30.347.752,00)	65,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.724.827.900,00	1.495.396.377,00	(229.431.523,00)	86,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.724.827.900,00	1.495.396.377,00	(229.431.523,00)	86,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001		Penyusunan Standar Harga	63.985.500,00	19.200.800,00	(44.784.700,00)	30,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.379.500,00	19.200.800,00	(40.178.700,00)	32,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.379.500,00	19.200.800,00	(40.178.700,00)	32,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.606.000,00	0,00	(4.606.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.606.000,00	0,00	(4.606.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	9.377.500,00	3.154.900,00	(6.222.600,00)	33,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.377.500,00	3.154.900,00	(6.222.600,00)	33,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.377.500,00	3.154.900,00	(6.222.600,00)	33,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005		Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.334.938.000,00	1.257.090.906,00	(77.847.094,00)	94,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.334.938.000,00	1.257.090.906,00	(77.847.094,00)	94,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	1.058.500.000,00	1.054.050.000,00	(4.450.000,00)	99,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.438.000,00	203.040.906,00	(73.397.094,00)	73,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007		Pengamanan Barang Milik Daerah	22.782.400,00	4.091.000,00	(18.691.400,00)	17,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	22.782.400,00	4.091.000,00	(18.691.400,00)	17,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.782.400,00	4.091.000,00	(18.691.400,00)	17,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008		Penilaian Barang Milik Daerah	116.897.300,00	90.834.400,00	(26.062.900,00)	77,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	116.897.300,00	90.834.400,00	(26.062.900,00)	77,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.897.300,00	90.834.400,00	(26.062.900,00)	77,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0009		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.738.900,00	2.970.000,00	(8.768.900,00)	25,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.738.900,00	2.970.000,00	(8.768.900,00)	25,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.738.900,00	2.970.000,00	(8.768.900,00)	25,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	165.108.300,00	118.054.371,00	(47.053.929,00)	71,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	165.108.300,00	118.054.371,00	(47.053.929,00)	71,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.108.300,00	118.054.371,00	(47.053.929,00)	71,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.647.482.400,00	1.290.570.320,00	(356.912.080,00)	78,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.647.482.400,00	1.290.570.320,00	(356.912.080,00)	78,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	47.728.900,00	37.163.405,00	(10.565.495,00)	77,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.728.900,00	37.163.405,00	(10.565.495,00)	77,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.728.900,00	37.163.405,00	(10.565.495,00)	77,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	70.948.800,00	39.146.500,00	(31.802.300,00)	55,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	70.948.800,00	39.146.500,00	(31.802.300,00)	55,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.948.800,00	39.146.500,00	(31.802.300,00)	55,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	120.624.400,00	112.520.694,00	(8.103.706,00)	93,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	90.847.400,00	89.815.644,00	(1.031.756,00)	98,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.847.400,00	89.815.644,00	(1.031.756,00)	98,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	29.777.000,00	22.705.050,00	(7.071.950,00)	76,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.777.000,00	22.705.050,00	(7.071.950,00)	76,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	136.166.600,00	121.942.844,00	(14.223.756,00)	89,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	136.166.600,00	121.942.844,00	(14.223.756,00)	89,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.166.600,00	121.942.844,00	(14.223.756,00)	89,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	225.146.400,00	197.733.800,00	(27.412.600,00)	87,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	225.146.400,00	197.733.800,00	(27.412.600,00)	87,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.146.400,00	197.733.800,00	(27.412.600,00)	87,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.341.500,00	38.465.636,00	(875.864,00)	97,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	39.341.500,00	38.465.636,00	(875.864,00)	97,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.341.500,00	38.465.636,00	(875.864,00)	97,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008		Penetapan Wajib Pajak Daerah	164.435.500,00	151.111.457,00	(13.324.043,00)	91,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	164.435.500,00	151.111.457,00	(13.324.043,00)	91,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.435.500,00	151.111.457,00	(13.324.043,00)	91,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011		Penagihan Pajak Daerah	709.257.600,00	535.056.064,00	(174.201.536,00)	75,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	699.357.600,00	535.056.064,00	(164.301.536,00)	76,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.357.600,00	535.056.064,00	(164.301.536,00)	76,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	102.398.000,00	39.371.470,00	(63.026.530,00)	38,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	102.398.000,00	39.371.470,00	(63.026.530,00)	38,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.398.000,00	39.371.470,00	(63.026.530,00)	38,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0015		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	31.434.700,00	18.058.450,00	(13.376.250,00)	57,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	31.434.700,00	18.058.450,00	(13.376.250,00)	57,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.434.700,00	18.058.450,00	(13.376.250,00)	57,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.080.166.473,00	10.192.238.775,00	(4.887.927.698,00)	67,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.808.900,00	5.019.000,00	(16.789.900,00)	23,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.808.900,00	5.019.000,00	(16.789.900,00)	23,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.808.900,00	5.019.000,00	(16.789.900,00)	23,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.808.900,00	5.019.000,00	(16.789.900,00)	23,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.112.082.573,00	8.624.462.526,00	(4.487.620.047,00)	65,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.112.082.573,00	8.624.462.526,00	(4.487.620.047,00)	65,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.112.082.573,00	8.624.462.526,00	(4.487.620.047,00)	65,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	13.112.082.573,00	8.624.462.526,00	(4.487.620.047,00)	65,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	225.000.000,00	224.820.000,00	(180.000,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	225.000.000,00	224.820.000,00	(180.000,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	224.820.000,00	(180.000,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	224.820.000,00	(180.000,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	841.241.300,00	619.511.851,00	(221.729.449,00)	73,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.838.200,00	4.913.250,00	(924.950,00)	84,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.838.200,00	4.913.250,00	(924.950,00)	84,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.838.200,00	4.913.250,00	(924.950,00)	84,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	499.483.100,00	339.042.540,00	(160.440.560,00)	67,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	499.483.100,00	339.042.540,00	(160.440.560,00)	67,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.483.100,00	339.042.540,00	(160.440.560,00)	67,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.500,00	4.702.500,00	(2.298.000,00)	67,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.500,00	4.702.500,00	(2.298.000,00)	67,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.500,00	4.702.500,00	(2.298.000,00)	67,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.919.500,00	26.383.610,00	(14.535.890,00)	64,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	40.919.500,00	26.383.610,00	(14.535.890,00)	64,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.919.500,00	26.383.610,00	(14.535.890,00)	64,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.000.000,00	244.469.951,00	(43.530.049,00)	84,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	288.000.000,00	244.469.951,00	(43.530.049,00)	84,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.000.000,00	244.469.951,00	(43.530.049,00)	84,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.220.000,00	127.573.216,00	(32.646.784,00)	79,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.220.000,00	125.573.216,00	(32.646.784,00)	79,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	158.220.000,00	125.573.216,00	(32.646.784,00)	79,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.220.000,00	125.573.216,00	(32.646.784,00)	79,36	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.813.700,00	590.852.182,00	(128.961.518,00)	82,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000,00	41.107.750,00	(1.842.250,00)	95,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.950.000,00	41.107.750,00	(1.842.250,00)	95,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.950.000,00	41.107.750,00	(1.842.250,00)	95,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	381.800.000,00	290.650.434,00	(91.149.566,00)	76,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	381.800.000,00	290.650.434,00	(91.149.566,00)	76,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.800.000,00	290.650.434,00	(91.149.566,00)	76,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	7.760.000,00	1.043.000,00	(6.717.000,00)	13,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.760.000,00	1.043.000,00	(6.717.000,00)	13,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.760.000,00	1.043.000,00	(6.717.000,00)	13,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	16.172.500,00	(3.827.500,00)	80,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	16.172.500,00	(3.827.500,00)	80,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.172.500,00	(3.827.500,00)	80,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	267.303.700,00	241.878.498,00	(25.425.202,00)	90,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	267.303.700,00	241.878.498,00	(25.425.202,00)	90,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.303.700,00	241.878.498,00	(25.425.202,00)	90,48	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	(0,20)	99,99	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	(0,20)	99,99	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	(0,20)	99,99	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.500.900.050,00	6.138.704.151,00	(362.195.899,00)	94,42	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.309.795.800,00	2.060.424.527,00	(249.371.273,00)	89,20	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	560.284.900,00	493.648.676,00	(66.636.224,00)	88,10	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	16.446.200,00	14.930.750,00	(1.515.450,00)	90,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.446.200,00	14.930.750,00	(1.515.450,00)	90,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.446.200,00	14.930.750,00	(1.515.450,00)	90,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	146.801.900,00	122.219.230,00	(24.582.670,00)	83,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	146.801.900,00	122.219.230,00	(24.582.670,00)	83,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.801.900,00	122.219.230,00	(24.582.670,00)	83,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	29.619.400,00	23.008.642,00	(6.610.758,00)	77,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.619.400,00	23.008.642,00	(6.610.758,00)	77,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.619.400,00	23.008.642,00	(6.610.758,00)	77,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	180.417.800,00	151.142.241,00	(29.275.559,00)	83,77	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	180.417.800,00	151.142.241,00	(29.275.559,00)	83,77	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.800,00	225.600,00	(192.200,00)	53,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1.05	Belanja Hibah	180.000.000,00	150.916.641,00	(29.083.359,00)	83,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	186.999.600,00	182.347.813,00	(4.651.787,00)	97,51	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	170.880.600,00	166.228.813,00	(4.651.787,00)	97,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.880.600,00	166.228.813,00	(4.651.787,00)	97,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	16.119.000,00	16.119.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.119.000,00	16.119.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	309.511.200,00	253.954.573,00	(55.556.627,00)	82,05	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001		Pengelolaan Mutasi ASN	54.762.000,00	42.907.731,00	(11.854.269,00)	78,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.762.000,00	42.907.731,00	(11.854.269,00)	78,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.762.000,00	42.907.731,00	(11.854.269,00)	78,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	94.795.700,00	75.379.675,00	(19.416.025,00)	79,51	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	94.795.700,00	75.379.675,00	(19.416.025,00)	79,51	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.795.700,00	75.379.675,00	(19.416.025,00)	79,51	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003		Pengelolaan Promosi ASN	159.953.500,00	135.667.167,00	(24.286.333,00)	84,81	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	158.203.500,00	135.667.167,00	(22.536.333,00)	85,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.203.500,00	135.667.167,00	(22.536.333,00)	85,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.230.506.000,00	1.183.814.116,00	(46.691.884,00)	96,20	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1.002.728.500,00	962.086.700,00	(40.641.800,00)	95,94	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.002.728.500,00	962.086.700,00	(40.641.800,00)	95,94	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.728.500,00	962.086.700,00	(40.641.800,00)	95,94	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	225.246.300,00	219.516.216,00	(5.730.084,00)	97,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	225.246.300,00	219.516.216,00	(5.730.084,00)	97,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.246.300,00	219.516.216,00	(5.730.084,00)	97,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0014		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2.531.200,00	2.211.200,00	(320.000,00)	87,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0014	5.1	BELANJA OPERASI	2.531.200,00	2.211.200,00	(320.000,00)	87,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.531.200,00	2.211.200,00	(320.000,00)	87,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	209.493.700,00	129.007.162,00	(80.486.538,00)	61,58	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0001		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24.434.100,00	5.246.150,00	(19.187.950,00)	21,47	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.434.100,00	5.246.150,00	(19.187.950,00)	21,47	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.434.100,00	5.246.150,00	(19.187.950,00)	21,47	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	33.549.700,00	11.480.788,00	(22.068.912,00)	34,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.549.700,00	11.480.788,00	(22.068.912,00)	34,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.549.700,00	11.480.788,00	(22.068.912,00)	34,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0003		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	37.895.700,00	24.345.660,00	(13.550.040,00)	64,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.895.700,00	24.345.660,00	(13.550.040,00)	64,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.895.700,00	24.345.660,00	(13.550.040,00)	64,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	18.038.100,00	17.698.594,00	(339.506,00)	98,11	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.038.100,00	17.698.594,00	(339.506,00)	98,11	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.038.100,00	17.698.594,00	(339.506,00)	98,11	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007		Pembinaan Disiplin ASN	46.929.300,00	45.771.660,00	(1.157.640,00)	97,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	46.929.300,00	45.771.660,00	(1.157.640,00)	97,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.929.300,00	45.771.660,00	(1.157.640,00)	97,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	24.479.300,00	10.340.260,00	(14.139.040,00)	42,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	24.479.300,00	10.340.260,00	(14.139.040,00)	42,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.479.300,00	10.340.260,00	(14.139.040,00)	42,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0009		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	24.167.500,00	14.124.050,00	(10.043.450,00)	58,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.167.500,00	14.124.050,00	(10.043.450,00)	58,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.167.500,00	14.124.050,00	(10.043.450,00)	58,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.191.104.250,00	4.078.279.624,00	(112.824.626,00)	97,30	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.954.600,00	39.622.333,00	(2.332.267,00)	94,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.954.600,00	39.622.333,00	(2.332.267,00)	94,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.454.600,00	24.422.333,00	(2.032.267,00)	92,31	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.454.600,00	24.422.333,00	(2.032.267,00)	92,31	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	15.500.000,00	15.200.000,00	(300.000,00)	98,06	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.500.000,00	15.200.000,00	(300.000,00)	98,06	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.716.411.450,00	3.659.387.838,00	(57.023.612,00)	98,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.716.411.450,00	3.659.387.838,00	(57.023.612,00)	98,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.716.411.450,00	3.659.387.838,00	(57.023.612,00)	98,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.716.411.450,00	3.659.387.838,00	(57.023.612,00)	98,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.123.200,00	0,00	(14.123.200,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0007		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	14.123.200,00	0,00	(14.123.200,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.123.200,00	0,00	(14.123.200,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.123.200,00	0,00	(14.123.200,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.894.100,00	191.202.733,00	(8.691.367,00)	95,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.114.200,00	990.000,00	(124.200,00)	88,85	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.114.200,00	990.000,00	(124.200,00)	88,85	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.200,00	990.000,00	(124.200,00)	88,85	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.765.100,00	6.788.850,00	(976.250,00)	87,42	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.765.100,00	6.788.850,00	(976.250,00)	87,42	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.765.100,00	6.788.850,00	(976.250,00)	87,42	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.127.000,00	4.032.600,00	(94.400,00)	97,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.127.000,00	4.032.600,00	(94.400,00)	97,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.127.000,00	4.032.600,00	(94.400,00)	97,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.937.800,00	3.748.350,00	(1.189.450,00)	75,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.937.800,00	3.748.350,00	(1.189.450,00)	75,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.937.800,00	3.748.350,00	(1.189.450,00)	75,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.950.000,00	175.642.933,00	(6.307.067,00)	96,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	181.950.000,00	175.642.933,00	(6.307.067,00)	96,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.950.000,00	175.642.933,00	(6.307.067,00)	96,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.942.000,00	51.157.909,00	(1.784.091,00)	96,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.942.000,00	49.227.650,00	(714.350,00)	98,56	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.442.000,00	34.027.650,00	(414.350,00)	98,79	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.442.000,00	34.027.650,00	(414.350,00)	98,79	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.2	BELANJA MODAL	15.500.000,00	15.200.000,00	(300.000,00)	98,06	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.500.000,00	15.200.000,00	(300.000,00)	98,06	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000,00	1.930.259,00	(1.069.741,00)	64,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	1.930.259,00	(1.069.741,00)	64,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.930.259,00	(1.069.741,00)	64,34	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.778.900,00	136.908.811,00	(28.870.089,00)	82,58	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,00	35.838.461,00	(3.351.539,00)	91,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.190.000,00	35.838.461,00	(3.351.539,00)	91,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.190.000,00	35.838.461,00	(3.351.539,00)	91,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.700.000,00	94.003.850,00	(22.696.150,00)	80,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	116.700.000,00	94.003.850,00	(22.696.150,00)	80,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.700.000,00	94.003.850,00	(22.696.150,00)	80,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.860.000,00	5.124.500,00	(2.735.500,00)	65,19	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.860.000,00	5.124.500,00	(2.735.500,00)	65,19	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.860.000,00	5.124.500,00	(2.735.500,00)	65,19	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.028.900,00	1.942.000,00	(86.900,00)	95,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.028.900,00	1.942.000,00	(86.900,00)	95,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.028.900,00	1.942.000,00	(86.900,00)	95,71	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	215.816.100,00	187.946.353,00	(27.869.747,00)	87,08	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	215.816.100,00	187.946.353,00	(27.869.747,00)	87,08	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	215.816.100,00	187.946.353,00	(27.869.747,00)	87,08	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	215.816.100,00	187.946.353,00	(27.869.747,00)	87,08	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	215.816.100,00	187.946.353,00	(27.869.747,00)	87,08	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.816.100,00	187.946.353,00	(27.869.747,00)	87,08	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	21.181.923.960,00	19.749.754.011,00	(1.432.169.949,00)	93,23	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.188.656.100,00	1.057.319.796,00	(131.336.304,00)	88,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.188.656.100,00	1.057.319.796,00	(131.336.304,00)	88,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.063.366.400,00	944.423.115,00	(118.943.285,00)	88,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.057.649.900,00	938.762.115,00	(118.887.785,00)	88,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.057.649.900,00	938.762.115,00	(118.887.785,00)	88,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	5.716.500,00	5.661.000,00	(55.500,00)	99,02	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.716.500,00	5.661.000,00	(55.500,00)	99,02	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	125.289.700,00	112.896.681,00	(12.393.019,00)	90,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	125.289.700,00	112.896.681,00	(12.393.019,00)	90,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.289.700,00	112.896.681,00	(12.393.019,00)	90,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	14.721.007.174,00	14.290.957.646,00	(430.049.528,00)	97,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	14.721.007.174,00	14.290.957.646,00	(430.049.528,00)	97,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.394.934.950,00	13.083.446.429,00	(311.488.521,00)	97,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.394.934.950,00	13.083.446.429,00	(311.488.521,00)	97,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.373.100,00	92.884.579,00	(311.488.521,00)	22,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	12.990.561.850,00	12.990.561.850,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.326.072.224,00	1.207.511.217,00	(118.561.007,00)	91,05	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.326.072.224,00	1.207.511.217,00	(118.561.007,00)	91,05	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.758.700,00	470.345.900,00	(80.412.800,00)	85,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	775.313.524,00	737.165.317,00	(38.148.207,00)	95,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	268.410.000,00	67.153.841,00	(201.256.159,00)	25,01	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	268.410.000,00	67.153.841,00	(201.256.159,00)	25,01	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	219.310.000,00	41.121.263,00	(178.188.737,00)	18,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	219.310.000,00	41.121.263,00	(178.188.737,00)	18,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.310.000,00	41.121.263,00	(178.188.737,00)	18,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	49.100.000,00	26.032.578,00	(23.067.422,00)	53,01	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	49.100.000,00	26.032.578,00	(23.067.422,00)	53,01	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.100.000,00	26.032.578,00	(23.067.422,00)	53,01	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	355.775.600,00	334.313.078,00	(21.462.522,00)	93,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	355.775.600,00	334.313.078,00	(21.462.522,00)	93,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	355.775.600,00	334.313.078,00	(21.462.522,00)	93,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	355.775.600,00	334.313.078,00	(21.462.522,00)	93,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.775.600,00	257.323.083,00	(21.452.517,00)	92,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	77.000.000,00	76.989.995,00	(10.005,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.756.116.400,00	1.447.932.196,00	(308.184.204,00)	82,45	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.756.116.400,00	1.447.932.196,00	(308.184.204,00)	82,45	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	459.212.300,00	364.763.752,00	(94.448.548,00)	79,43	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	428.847.600,00	354.662.752,00	(74.184.848,00)	82,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.847.600,00	354.662.752,00	(34.184.848,00)	91,20	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	30.364.700,00	10.101.000,00	(20.263.700,00)	33,26	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.364.700,00	10.101.000,00	(20.263.700,00)	33,26	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.296.904.100,00	1.083.168.444,00	(213.735.656,00)	83,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.296.904.100,00	1.083.168.444,00	(213.735.656,00)	83,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.296.904.100,00	1.083.168.444,00	(213.735.656,00)	83,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.891.958.686,00	2.552.077.454,00	(339.881.232,00)	88,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.275.100,00	21.792.800,00	(7.482.300,00)	74,44	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.275.100,00	21.792.800,00	(7.482.300,00)	74,44	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.275.100,00	21.792.800,00	(7.482.300,00)	74,44	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.275.100,00	21.792.800,00	(7.482.300,00)	74,44	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.434.573.686,00	2.214.574.229,00	(219.999.457,00)	90,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.434.573.686,00	2.214.574.229,00	(219.999.457,00)	90,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.434.573.686,00	2.214.574.229,00	(219.999.457,00)	90,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.434.573.686,00	2.214.574.229,00	(219.999.457,00)	90,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.218.700,00	154.145.369,00	(51.073.331,00)	75,11	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.995.500,00	2.857.500,00	(138.000,00)	95,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.995.500,00	2.857.500,00	(138.000,00)	95,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.995.500,00	2.857.500,00	(138.000,00)	95,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.484.200,00	12.948.000,00	(1.536.200,00)	89,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.484.200,00	12.948.000,00	(1.536.200,00)	89,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.484.200,00	12.948.000,00	(1.536.200,00)	89,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.324.200,00	7.515.200,00	(5.809.000,00)	56,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.324.200,00	7.515.200,00	(5.809.000,00)	56,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.324.200,00	7.515.200,00	(5.809.000,00)	56,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.469.800,00	7.568.200,00	(1.901.600,00)	79,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.469.800,00	7.568.200,00	(1.901.600,00)	79,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.469.800,00	7.568.200,00	(1.901.600,00)	79,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.945.000,00	123.256.469,00	(41.688.531,00)	74,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	164.945.000,00	123.256.469,00	(41.688.531,00)	74,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.945.000,00	123.256.469,00	(41.688.531,00)	74,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.400.000,00	22.067.993,00	(6.332.007,00)	77,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.600.000,00	21.267.993,00	(6.332.007,00)	77,05	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.600.000,00	21.267.993,00	(6.332.007,00)	77,05	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	21.267.993,00	(6.332.007,00)	77,05	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.491.200,00	139.497.063,00	(54.994.137,00)	71,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.310.000,00	84.033.675,00	(50.276.325,00)	62,56	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	134.310.000,00	84.033.675,00	(50.276.325,00)	62,56	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.310.000,00	84.033.675,00	(50.276.325,00)	62,56	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.260.000,00	1.360.000,00	(2.900.000,00)	31,92	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.260.000,00	1.360.000,00	(2.900.000,00)	31,92	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	1.360.000,00	(2.900.000,00)	31,92	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.921.200,00	54.103.388,00	(1.817.812,00)	96,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	55.921.200,00	54.103.388,00	(1.817.812,00)	96,74	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.921.200,00	54.103.388,00	(1.817.812,00)	96,74	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Sekretariat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	69.554.130.876,00	65.819.268.776,00	(3.734.862.100,00)	94,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	31.253.856.995,00	30.039.699.162,00	(1.214.157.833,00)	96,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	431.704.405,00	345.885.583,00	(85.818.822,00)	80,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0001		Penataan Administrasi Pemerintahan	163.046.505,00	151.178.900,00	(11.867.605,00)	92,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	148.046.505,00	136.178.900,00	(11.867.605,00)	91,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.046.505,00	136.178.900,00	(11.867.605,00)	91,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0002		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	192.870.000,00	123.816.889,00	(69.053.111,00)	64,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	167.370.000,00	98.316.889,00	(69.053.111,00)	58,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.370.000,00	98.316.889,00	(69.053.111,00)	58,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	75.787.900,00	70.889.794,00	(4.898.106,00)	93,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.787.900,00	55.889.794,00	(4.898.106,00)	91,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.787.900,00	55.889.794,00	(4.898.106,00)	91,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	29.645.569.190,00	28.665.035.183,00	(980.534.007,00)	96,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02.0001		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.812.269.790,00	2.646.872.322,00	(165.397.468,00)	94,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.812.269.790,00	2.646.872.322,00	(165.397.468,00)	94,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.812.269.790,00	2.646.872.322,00	(165.397.468,00)	94,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02.0002		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	15.269.144.600,00	14.704.908.020,00	(564.236.580,00)	96,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.269.144.600,00	14.704.908.020,00	(564.236.580,00)	96,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.844.600,00	66.695.020,00	(44.149.580,00)	60,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	15.158.300.000,00	14.638.213.000,00	(520.087.000,00)	96,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02.0003		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	11.564.154.800,00	11.313.254.841,00	(250.899.959,00)	97,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.564.154.800,00	11.313.254.841,00	(250.899.959,00)	97,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.398.154.800,00	7.168.254.841,00	(229.899.959,00)	96,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	4.166.000.000,00	4.145.000.000,00	(21.000.000,00)	99,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.043.729.000,00	905.526.426,00	(138.202.574,00)	86,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.03.0001		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	173.093.200,00	98.462.154,00	(74.631.046,00)	56,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	173.093.200,00	98.462.154,00	(74.631.046,00)	56,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.093.200,00	98.462.154,00	(74.631.046,00)	56,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.03.0002		Fasilitasi Bantuan Hukum	743.710.800,00	697.897.433,00	(45.813.367,00)	93,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	743.710.800,00	697.897.433,00	(45.813.367,00)	93,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	743.710.800,00	697.897.433,00	(45.813.367,00)	93,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.03.0003		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	126.925.000,00	109.166.839,00	(17.758.161,00)	86,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	126.925.000,00	109.166.839,00	(17.758.161,00)	86,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.925.000,00	109.166.839,00	(17.758.161,00)	86,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	132.854.400,00	123.251.970,00	(9.602.430,00)	92,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.04.0001		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	132.854.400,00	123.251.970,00	(9.602.430,00)	92,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	132.854.400,00	123.251.970,00	(9.602.430,00)	92,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.854.400,00	123.251.970,00	(9.602.430,00)	92,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.235.730.200,00	994.249.002,00	(241.481.198,00)	80,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	498.501.600,00	401.870.352,00	(96.631.248,00)	80,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	27.534.300,00	21.266.039,00	(6.268.261,00)	77,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.534.300,00	21.266.039,00	(6.268.261,00)	77,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.534.300,00	21.266.039,00	(6.268.261,00)	77,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0002		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	339.418.600,00	330.007.687,00	(9.410.913,00)	97,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	339.418.600,00	330.007.687,00	(9.410.913,00)	97,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.418.600,00	330.007.687,00	(9.410.913,00)	97,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0003		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	39.087.100,00	26.976.869,00	(12.110.231,00)	69,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.087.100,00	26.976.869,00	(12.110.231,00)	69,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.087.100,00	26.976.869,00	(12.110.231,00)	69,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0005		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	92.461.600,00	23.619.757,00	(68.841.843,00)	25,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	92.461.600,00	23.619.757,00	(68.841.843,00)	25,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.461.600,00	23.619.757,00	(68.841.843,00)	25,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	232.383.500,00	140.001.205,00	(92.382.295,00)	60,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0001		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	44.585.500,00	22.920.596,00	(21.664.904,00)	51,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.585.500,00	22.920.596,00	(21.664.904,00)	51,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.585.500,00	22.920.596,00	(21.664.904,00)	51,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0002		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	137.231.000,00	79.621.709,00	(57.609.291,00)	58,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.012.000,00	47.402.709,00	(57.609.291,00)	45,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.012.000,00	47.402.709,00	(57.609.291,00)	45,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	32.219.000,00	32.219.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.219.000,00	32.219.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0003		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	50.567.000,00	37.458.900,00	(13.108.100,00)	74,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.911.100,00	21.273.900,00	(12.637.200,00)	62,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.911.100,00	21.273.900,00	(12.637.200,00)	62,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	16.655.900,00	16.185.000,00	(470.900,00)	97,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.655.900,00	16.185.000,00	(470.900,00)	97,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	458.637.100,00	428.009.945,00	(30.627.155,00)	93,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0001		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	211.367.400,00	197.452.786,00	(13.914.614,00)	93,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	157.123.200,00	144.052.786,00	(13.070.414,00)	91,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	53.122.500,00	53.122.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.000.700,00	90.930.286,00	(13.070.414,00)	87,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	54.244.200,00	53.400.000,00	(844.200,00)	98,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.244.200,00	53.400.000,00	(844.200,00)	98,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0002		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	206.277.900,00	201.045.109,00	(5.232.791,00)	97,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	175.096.900,00	170.298.109,00	(4.798.791,00)	97,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.096.900,00	170.298.109,00	(4.798.791,00)	97,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	31.181.000,00	30.747.000,00	(434.000,00)	98,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.181.000,00	30.747.000,00	(434.000,00)	98,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0003		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40.991.800,00	29.512.050,00	(11.479.750,00)	71,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.991.800,00	29.512.050,00	(11.479.750,00)	71,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.991.800,00	29.512.050,00	(11.479.750,00)	71,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	46.208.000,00	24.367.500,00	(21.840.500,00)	52,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.04.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	15.647.800,00	10.019.250,00	(5.628.550,00)	64,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.647.800,00	10.019.250,00	(5.628.550,00)	64,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.647.800,00	10.019.250,00	(5.628.550,00)	64,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.04.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10.859.600,00	2.417.500,00	(8.442.100,00)	22,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.859.600,00	2.417.500,00	(8.442.100,00)	22,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.859.600,00	2.417.500,00	(8.442.100,00)	22,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.04.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	19.700.600,00	11.930.750,00	(7.769.850,00)	60,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.700.600,00	11.930.750,00	(7.769.850,00)	60,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.700.600,00	11.930.750,00	(7.769.850,00)	60,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.064.543.681,00	34.785.320.612,00	(2.279.223.069,00)	93,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.286.900,00	18.084.640,00	(5.202.260,00)	77,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.286.900,00	18.084.640,00	(5.202.260,00)	77,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.286.900,00	18.084.640,00	(5.202.260,00)	77,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.286.900,00	18.084.640,00	(5.202.260,00)	77,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.500.591.984,00	15.072.177.364,00	(428.414.620,00)	97,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.486.154.084,00	15.058.963.034,00	(427.191.050,00)	97,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.486.154.084,00	15.058.963.034,00	(427.191.050,00)	97,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	15.486.154.084,00	15.058.963.034,00	(427.191.050,00)	97,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.495.100,00	8.789.400,00	(705.700,00)	92,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.495.100,00	8.789.400,00	(705.700,00)	92,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.495.100,00	8.789.400,00	(705.700,00)	92,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.942.800,00	4.424.930,00	(517.870,00)	89,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.942.800,00	4.424.930,00	(517.870,00)	89,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.942.800,00	4.424.930,00	(517.870,00)	89,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.686.308.400,00	4.235.156.358,00	(451.152.042,00)	90,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	124.803.000,00	109.319.329,00	(15.483.671,00)	87,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	124.803.000,00	109.319.329,00	(15.483.671,00)	87,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.803.000,00	109.319.329,00	(15.483.671,00)	87,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.854.000,00	123.982.000,00	(11.872.000,00)	91,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.854.000,00	0,00	(4.854.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.854.000,00	0,00	(4.854.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	131.000.000,00	123.982.000,00	(7.018.000,00)	94,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.000.000,00	123.982.000,00	(7.018.000,00)	94,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.086.300,00	130.238.958,00	(1.847.342,00)	98,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	132.086.300,00	130.238.958,00	(1.847.342,00)	98,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.086.300,00	130.238.958,00	(1.847.342,00)	98,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	232.450.400,00	209.338.287,00	(23.112.113,00)	90,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	232.450.400,00	209.338.287,00	(23.112.113,00)	90,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.450.400,00	209.338.287,00	(23.112.113,00)	90,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.957.914.700,00	1.659.303.032,00	(298.611.668,00)	84,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.957.914.700,00	1.659.303.032,00	(298.611.668,00)	84,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.957.914.700,00	1.659.303.032,00	(298.611.668,00)	84,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.103.200.000,00	2.002.974.752,00	(100.225.248,00)	95,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.103.200.000,00	2.002.974.752,00	(100.225.248,00)	95,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.103.200.000,00	2.002.974.752,00	(100.225.248,00)	95,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.320.000,00	362.129.019,00	(169.190.981,00)	68,15	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.520.000,00	24.020.000,00	(1.500.000,00)	94,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.520.000,00	24.020.000,00	(1.500.000,00)	94,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.520.000,00	24.020.000,00	(1.500.000,00)	94,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	505.800.000,00	338.109.019,00	(167.690.981,00)	66,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	505.800.000,00	338.109.019,00	(167.690.981,00)	66,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.800.000,00	338.109.019,00	(167.690.981,00)	66,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.261.766.400,00	3.046.823.127,00	(214.943.273,00)	93,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	467.502.000,00	467.439.050,00	(62.950,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	467.502.000,00	467.439.050,00	(62.950,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.502.000,00	467.439.050,00	(62.950,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.783.034.000,00	1.684.195.939,00	(98.838.061,00)	94,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.783.034.000,00	1.684.195.939,00	(98.838.061,00)	94,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.783.034.000,00	1.684.195.939,00	(98.838.061,00)	94,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.980.000,00	40.898.115,00	(19.081.885,00)	68,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	59.980.000,00	40.898.115,00	(19.081.885,00)	68,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.980.000,00	40.898.115,00	(19.081.885,00)	68,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	874.250.400,00	800.195.023,00	(74.055.377,00)	91,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	874.250.400,00	800.195.023,00	(74.055.377,00)	91,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	874.250.400,00	800.195.023,00	(74.055.377,00)	91,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.000.000,00	54.095.000,00	(22.905.000,00)	70,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	77.000.000,00	54.095.000,00	(22.905.000,00)	70,25	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	54.095.000,00	(22.905.000,00)	70,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.451.375.494,00	1.309.506.993,00	(141.868.501,00)	90,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	775.375.494,00	642.396.993,00	(132.978.501,00)	82,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	775.375.494,00	642.396.993,00	(132.978.501,00)	82,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	775.375.494,00	642.396.993,00	(132.978.501,00)	82,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.11.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	676.000.000,00	667.110.000,00	(8.890.000,00)	98,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	676.000.000,00	667.110.000,00	(8.890.000,00)	98,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	676.000.000,00	667.110.000,00	(8.890.000,00)	98,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.025.873.600,00	6.255.820.787,00	(770.052.813,00)	89,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0001		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.624.743.000,00	4.086.476.550,00	(538.266.450,00)	88,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.425.243.000,00	3.887.451.550,00	(537.791.450,00)	87,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.425.243.000,00	3.887.451.550,00	(537.791.450,00)	87,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0001	5.2	BELANJA MODAL	199.500.000,00	199.025.000,00	(475.000,00)	99,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.500.000,00	199.025.000,00	(475.000,00)	99,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0002		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.361.219.600,00	2.142.060.437,00	(219.159.163,00)	90,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.263.719.600,00	2.046.810.437,00	(216.909.163,00)	90,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.263.719.600,00	2.046.810.437,00	(216.909.163,00)	90,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0002	5.2	BELANJA MODAL	97.500.000,00	95.250.000,00	(2.250.000,00)	97,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.500.000,00	95.250.000,00	(2.250.000,00)	97,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0003		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	39.911.000,00	27.283.800,00	(12.627.200,00)	68,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.911.000,00	27.283.800,00	(12.627.200,00)	68,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.911.000,00	27.283.800,00	(12.627.200,00)	68,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13		Penataan Organisasi	170.037.194,00	148.299.993,00	(21.737.201,00)	87,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13.0001		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	43.976.500,00	41.294.063,00	(2.682.437,00)	93,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.976.500,00	41.294.063,00	(2.682.437,00)	93,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.976.500,00	41.294.063,00	(2.682.437,00)	93,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13.0002		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	72.849.094,00	56.514.901,00	(16.334.193,00)	77,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.249.264,00	54.764.901,00	(7.484.363,00)	87,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.249.264,00	54.764.901,00	(7.484.363,00)	87,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13.0002	5.2	BELANJA MODAL	10.599.830,00	1.750.000,00	(8.849.830,00)	16,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.599.830,00	1.750.000,00	(8.849.830,00)	16,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13.0003		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	53.211.600,00	50.491.029,00	(2.720.571,00)	94,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	53.211.600,00	50.491.029,00	(2.720.571,00)	94,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.211.600,00	50.491.029,00	(2.720.571,00)	94,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.413.983.709,00	4.337.322.331,00	(76.661.378,00)	98,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.14.0001		Fasilitasi Keprotokolan	3.775.982.700,00	3.702.811.111,00	(73.171.589,00)	98,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.775.982.700,00	3.702.811.111,00	(73.171.589,00)	98,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.775.982.700,00	3.702.811.111,00	(73.171.589,00)	98,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.14.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	155.204.205,00	154.760.926,00	(443.279,00)	99,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	155.204.205,00	154.760.926,00	(443.279,00)	99,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.204.205,00	154.760.926,00	(443.279,00)	99,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.14.0003		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	482.796.804,00	479.750.294,00	(3.046.510,00)	99,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	482.796.804,00	479.750.294,00	(3.046.510,00)	99,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.796.804,00	479.750.294,00	(3.046.510,00)	99,36	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : Sekretariat DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	42.036.544.314,00	36.752.905.983,00	(5.283.638.331,00)	87,43	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.682.796.300,00	18.750.732.883,00	(3.932.063.417,00)	82,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.344.109.600,00	1.707.339.853,00	(636.769.747,00)	72,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0001		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	285.441.400,00	203.337.575,00	(82.103.825,00)	71,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	285.441.400,00	203.337.575,00	(82.103.825,00)	71,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.441.400,00	203.337.575,00	(82.103.825,00)	71,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0002		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.242.313.500,00	846.480.305,00	(395.833.195,00)	68,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.242.313.500,00	846.480.305,00	(395.833.195,00)	68,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.242.313.500,00	846.480.305,00	(395.833.195,00)	68,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0003		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	663.372.700,00	559.870.148,00	(103.502.552,00)	84,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	663.372.700,00	559.870.148,00	(103.502.552,00)	84,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.372.700,00	559.870.148,00	(103.502.552,00)	84,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0004		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	86.229.600,00	43.756.000,00	(42.473.600,00)	50,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	86.229.600,00	43.756.000,00	(42.473.600,00)	50,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.229.600,00	43.756.000,00	(42.473.600,00)	50,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0005		Penyusunan Tata Tertib DPRD	66.752.400,00	53.895.825,00	(12.856.575,00)	80,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	66.752.400,00	53.895.825,00	(12.856.575,00)	80,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.752.400,00	53.895.825,00	(12.856.575,00)	80,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.809.413.300,00	1.225.930.895,00	(583.482.405,00)	67,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0001		Pembahasan KUA dan PPAS	463.641.700,00	257.359.471,00	(206.282.229,00)	55,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	463.641.700,00	257.359.471,00	(206.282.229,00)	55,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.641.700,00	257.359.471,00	(206.282.229,00)	55,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0002		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	244.930.300,00	167.421.150,00	(77.509.150,00)	68,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	244.930.300,00	167.421.150,00	(77.509.150,00)	68,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.930.300,00	167.421.150,00	(77.509.150,00)	68,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0003		Pembahasan APBD	467.581.300,00	250.509.621,00	(217.071.679,00)	53,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	467.581.300,00	250.509.621,00	(217.071.679,00)	53,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.581.300,00	250.509.621,00	(217.071.679,00)	53,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0004		Pembahasan APBD Perubahan	326.803.000,00	271.076.803,00	(55.726.197,00)	82,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	326.803.000,00	271.076.803,00	(55.726.197,00)	82,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.803.000,00	271.076.803,00	(55.726.197,00)	82,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0005		Pembahasan Laporan Semester	12.635.300,00	4.551.150,00	(8.084.150,00)	36,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.635.300,00	4.551.150,00	(8.084.150,00)	36,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.635.300,00	4.551.150,00	(8.084.150,00)	36,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0006		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	293.821.700,00	275.012.700,00	(18.809.000,00)	93,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	293.821.700,00	275.012.700,00	(18.809.000,00)	93,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.821.700,00	275.012.700,00	(18.809.000,00)	93,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.474.004.900,00	3.900.830.535,00	(573.174.365,00)	87,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0001		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.065.916.800,00	937.590.694,00	(128.326.106,00)	87,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.038.041.800,00	909.740.694,00	(128.301.106,00)	87,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.038.041.800,00	909.740.694,00	(128.301.106,00)	87,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	27.875.000,00	27.850.000,00	(25.000,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.875.000,00	27.850.000,00	(25.000,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0002		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	956.440.400,00	831.772.112,00	(124.668.288,00)	86,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	928.565.400,00	803.922.112,00	(124.643.288,00)	86,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	928.565.400,00	803.922.112,00	(124.643.288,00)	86,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	27.875.000,00	27.850.000,00	(25.000,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.875.000,00	27.850.000,00	(25.000,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0003		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	943.343.600,00	809.236.835,00	(134.106.765,00)	85,78	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	915.468.600,00	781.386.835,00	(134.081.765,00)	85,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.468.600,00	781.386.835,00	(134.081.765,00)	85,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	27.875.000,00	27.850.000,00	(25.000,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.875.000,00	27.850.000,00	(25.000,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0004		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	9.778.800,00	2.526.600,00	(7.252.200,00)	25,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.778.800,00	2.526.600,00	(7.252.200,00)	25,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.778.800,00	2.526.600,00	(7.252.200,00)	25,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0006		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	30.238.000,00	20.440.600,00	(9.797.400,00)	67,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	30.238.000,00	20.440.600,00	(9.797.400,00)	67,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.238.000,00	20.440.600,00	(9.797.400,00)	67,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0007		Pengawasan Penggunaan Anggaran	861.253.700,00	714.853.634,00	(146.400.066,00)	83,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	741.453.700,00	595.103.634,00	(146.350.066,00)	80,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	741.453.700,00	595.103.634,00	(146.350.066,00)	80,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0007	5.2	BELANJA MODAL	119.800.000,00	119.750.000,00	(50.000,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.800.000,00	119.750.000,00	(50.000,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0008		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	607.033.600,00	584.410.060,00	(22.623.540,00)	96,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	607.033.600,00	584.410.060,00	(22.623.540,00)	96,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	607.033.600,00	584.410.060,00	(22.623.540,00)	96,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	5.061.105.100,00	4.244.895.513,00	(816.209.587,00)	83,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0001		Orientasi DPRD	371.212.600,00	229.666.600,00	(141.546.000,00)	61,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	371.212.600,00	229.666.600,00	(141.546.000,00)	61,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.212.600,00	229.666.600,00	(141.546.000,00)	61,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0002		Pendalaman Tugas DPRD	1.993.739.400,00	1.794.261.895,00	(199.477.505,00)	89,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.993.739.400,00	1.794.261.895,00	(199.477.505,00)	89,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.993.739.400,00	1.794.261.895,00	(199.477.505,00)	89,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0005		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	212.637.900,00	171.511.800,00	(41.126.100,00)	80,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	212.637.900,00	171.511.800,00	(41.126.100,00)	80,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.637.900,00	171.511.800,00	(41.126.100,00)	80,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0007		Penyusunan Program Kerja DPRD	1.507.554.800,00	1.115.410.544,00	(392.144.256,00)	73,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.507.554.800,00	1.115.410.544,00	(392.144.256,00)	73,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.507.554.800,00	1.115.410.544,00	(392.144.256,00)	73,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0008		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	975.960.400,00	934.044.674,00	(41.915.726,00)	95,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	975.960.400,00	934.044.674,00	(41.915.726,00)	95,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	975.960.400,00	934.044.674,00	(41.915.726,00)	95,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.708.905.800,00	1.029.091.292,00	(679.814.508,00)	60,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.05.0002		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	775.256.500,00	681.206.722,00	(94.049.778,00)	87,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	775.256.500,00	681.206.722,00	(94.049.778,00)	87,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	775.256.500,00	681.206.722,00	(94.049.778,00)	87,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.05.0003		Pelaksanaan Reses	933.649.300,00	347.884.570,00	(585.764.730,00)	37,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	933.649.300,00	347.884.570,00	(585.764.730,00)	37,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	933.649.300,00	347.884.570,00	(585.764.730,00)	37,26	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	181.407.100,00	138.847.938,00	(42.559.162,00)	76,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.06.0001		Penyusunan Kode Etik DPRD	11.391.500,00	3.393.800,00	(7.997.700,00)	29,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.391.500,00	3.393.800,00	(7.997.700,00)	29,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.391.500,00	3.393.800,00	(7.997.700,00)	29,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.06.0002		Pengawasan Kode Etik DPRD	170.015.600,00	135.454.138,00	(34.561.462,00)	79,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	170.015.600,00	135.454.138,00	(34.561.462,00)	79,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.015.600,00	135.454.138,00	(34.561.462,00)	79,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	7.103.850.500,00	6.503.796.857,00	(600.053.643,00)	91,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.08.0001		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.970.474.000,00	5.596.976.462,00	(373.497.538,00)	93,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.970.474.000,00	5.596.976.462,00	(373.497.538,00)	93,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.970.474.000,00	5.596.976.462,00	(373.497.538,00)	93,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.08.0002		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	483.232.700,00	481.228.495,00	(2.004.205,00)	99,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	483.232.700,00	481.228.495,00	(2.004.205,00)	99,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.232.700,00	481.228.495,00	(2.004.205,00)	99,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.08.0004		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	650.143.800,00	425.591.900,00	(224.551.900,00)	65,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	650.143.800,00	425.591.900,00	(224.551.900,00)	65,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.143.800,00	425.591.900,00	(224.551.900,00)	65,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.353.748.014,00	18.002.173.100,00	(1.351.574.914,00)	93,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.792.200,00	39.368.150,00	(1.424.050,00)	96,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.792.200,00	39.368.150,00	(1.424.050,00)	96,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.792.200,00	39.368.150,00	(1.424.050,00)	96,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.792.200,00	39.368.150,00	(1.424.050,00)	96,50	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.697.669.764,00	3.597.650.233,00	(100.019.531,00)	97,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.616.568.464,00	3.519.959.733,00	(96.608.731,00)	97,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.616.568.464,00	3.519.959.733,00	(96.608.731,00)	97,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.616.568.464,00	3.519.959.733,00	(96.608.731,00)	97,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	81.101.300,00	77.690.500,00	(3.410.800,00)	95,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	81.101.300,00	77.690.500,00	(3.410.800,00)	95,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.101.300,00	77.690.500,00	(3.410.800,00)	95,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.000.000,00	198.279.000,00	(1.721.000,00)	99,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000,00	198.279.000,00	(1.721.000,00)	99,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	198.279.000,00	(1.721.000,00)	99,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	198.279.000,00	(1.721.000,00)	99,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.900.000,00	42.075.000,00	(20.825.000,00)	66,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	42.900.000,00	42.075.000,00	(825.000,00)	98,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.900.000,00	42.075.000,00	(825.000,00)	98,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.900.000,00	42.075.000,00	(825.000,00)	98,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.05.0007		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.166.649.600,00	2.075.148.602,00	(91.500.998,00)	95,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.511.700,00	14.771.100,00	(4.740.600,00)	75,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.511.700,00	14.771.100,00	(4.740.600,00)	75,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.511.700,00	14.771.100,00	(4.740.600,00)	75,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.839.600,00	209.605.000,00	(2.234.600,00)	98,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	211.839.600,00	209.605.000,00	(2.234.600,00)	98,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211.839.600,00	209.605.000,00	(2.234.600,00)	98,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.584.100,00	8.669.800,00	(6.914.300,00)	55,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.584.100,00	8.669.800,00	(6.914.300,00)	55,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.584.100,00	8.669.800,00	(6.914.300,00)	55,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	54.954.900,00	54.954.900,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.954.900,00	54.954.900,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	138.401.900,00	90.805.200,00	(47.596.700,00)	65,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	53.901.900,00	7.330.200,00	(46.571.700,00)	13,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.901.900,00	7.330.200,00	(46.571.700,00)	13,59	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0005	5.2	BELANJA MODAL	84.500.000,00	83.475.000,00	(1.025.000,00)	98,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.500.000,00	83.475.000,00	(1.025.000,00)	98,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	414.843.400,00	407.497.500,00	(7.345.900,00)	98,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	414.843.400,00	407.497.500,00	(7.345.900,00)	98,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.843.400,00	407.497.500,00	(7.345.900,00)	98,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.007.164.000,00	1.004.289.494,00	(2.874.506,00)	99,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.007.164.000,00	1.004.289.494,00	(2.874.506,00)	99,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.007.164.000,00	1.004.289.494,00	(2.874.506,00)	99,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.350.000,00	284.555.608,00	(19.794.392,00)	93,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	304.350.000,00	284.555.608,00	(19.794.392,00)	93,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.350.000,00	284.555.608,00	(19.794.392,00)	93,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.750.000,00	164.261.996,00	(54.488.004,00)	75,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.750.000,00	2.000.000,00	(750.000,00)	72,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	2.000.000,00	(750.000,00)	72,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.000.000,00	(750.000,00)	72,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.000.000,00	162.261.996,00	(53.738.004,00)	75,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	216.000.000,00	162.261.996,00	(53.738.004,00)	75,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.000.000,00	162.261.996,00	(53.738.004,00)	75,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.177.809.800,00	893.680.495,00	(284.129.305,00)	75,87	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.090.000,00	100.147.650,00	(77.942.350,00)	56,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	178.090.000,00	100.147.650,00	(77.942.350,00)	56,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.090.000,00	100.147.650,00	(77.942.350,00)	56,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	524.291.200,00	465.903.945,00	(58.387.255,00)	88,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	524.291.200,00	465.903.945,00	(58.387.255,00)	88,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.291.200,00	465.903.945,00	(58.387.255,00)	88,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	427.808.600,00	297.850.200,00	(129.958.400,00)	69,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	427.808.600,00	297.850.200,00	(129.958.400,00)	69,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.808.600,00	297.850.200,00	(129.958.400,00)	69,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.100.000,00	22.433.700,00	(11.666.300,00)	65,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	34.100.000,00	22.433.700,00	(11.666.300,00)	65,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.100.000,00	22.433.700,00	(11.666.300,00)	65,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.520.000,00	7.345.000,00	(6.175.000,00)	54,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	13.520.000,00	7.345.000,00	(6.175.000,00)	54,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.520.000,00	7.345.000,00	(6.175.000,00)	54,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	10.975.091.050,00	10.289.255.680,00	(685.835.370,00)	93,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.387.741.050,00	9.730.039.280,00	(657.701.770,00)	93,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.387.741.050,00	9.730.039.280,00	(657.701.770,00)	93,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.170.910.000,00	9.525.704.080,00	(645.205.920,00)	93,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.831.050,00	204.335.200,00	(12.495.850,00)	94,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.15.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	537.350.000,00	531.826.000,00	(5.524.000,00)	98,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	537.350.000,00	531.826.000,00	(5.524.000,00)	98,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.350.000,00	531.826.000,00	(5.524.000,00)	98,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.15.0003		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50.000.000,00	27.390.400,00	(22.609.600,00)	54,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	27.390.400,00	(22.609.600,00)	54,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	27.390.400,00	(22.609.600,00)	54,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD	814.085.600,00	702.453.944,00	(111.631.656,00)	86,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.16.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	224.128.200,00	186.414.944,00	(37.713.256,00)	83,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1	BELANJA OPERASI	224.128.200,00	186.414.944,00	(37.713.256,00)	83,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.128.200,00	186.414.944,00	(37.713.256,00)	83,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.16.0004		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	589.957.400,00	516.039.000,00	(73.918.400,00)	87,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1	BELANJA OPERASI	356.131.000,00	291.639.000,00	(64.492.000,00)	81,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.131.000,00	291.639.000,00	(64.492.000,00)	81,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.16.0004	5.2	BELANJA MODAL	233.826.400,00	224.400.000,00	(9.426.400,00)	95,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.16.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	233.826.400,00	224.400.000,00	(9.426.400,00)	95,96	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	20.376.195.845,00	20.054.318.331,00	(321.877.514,00)	98,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.008.401.500,00	13.802.381.984,00	(206.019.516,00)	98,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.559.861.800,00	13.374.832.845,00	(185.028.955,00)	98,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	733.803.500,00	715.953.166,00	(17.850.334,00)	97,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	733.803.500,00	715.953.166,00	(17.850.334,00)	97,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	733.803.500,00	715.953.166,00	(17.850.334,00)	97,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	105.454.900,00	92.728.500,00	(12.726.400,00)	87,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	105.454.900,00	92.728.500,00	(12.726.400,00)	87,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.454.900,00	92.728.500,00	(12.726.400,00)	87,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0006		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.591.088.500,00	3.566.226.000,00	(24.862.500,00)	99,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.591.088.500,00	3.566.226.000,00	(24.862.500,00)	99,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.328.188.500,00	1.303.326.000,00	(24.862.500,00)	98,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	2.262.900.000,00	2.262.900.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	865.466.200,00	856.545.500,00	(8.920.700,00)	98,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	865.466.200,00	856.545.500,00	(8.920.700,00)	98,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	865.466.200,00	856.545.500,00	(8.920.700,00)	98,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0016		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	8.264.048.700,00	8.143.379.679,00	(120.669.021,00)	98,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	8.264.048.700,00	8.143.379.679,00	(120.669.021,00)	98,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.264.048.700,00	8.143.379.679,00	(120.669.021,00)	98,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	415.927.000,00	395.076.780,00	(20.850.220,00)	94,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0010		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.199.700,00	14.132.480,00	(1.067.220,00)	92,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	15.199.700,00	14.132.480,00	(1.067.220,00)	92,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.199.700,00	14.132.480,00	(1.067.220,00)	92,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0011		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	221.363.300,00	214.265.300,00	(7.098.000,00)	96,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	221.363.300,00	214.265.300,00	(7.098.000,00)	96,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.363.300,00	214.265.300,00	(7.098.000,00)	96,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	179.364.000,00	166.679.000,00	(12.685.000,00)	92,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	179.364.000,00	166.679.000,00	(12.685.000,00)	92,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.364.000,00	166.679.000,00	(12.685.000,00)	92,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	32.612.700,00	32.472.359,00	(140.341,00)	99,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.03.0006		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	32.612.700,00	32.472.359,00	(140.341,00)	99,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.612.700,00	32.472.359,00	(140.341,00)	99,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.612.700,00	32.472.359,00	(140.341,00)	99,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.367.794.345,00	6.251.936.347,00	(115.857.998,00)	98,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.721.400,00	21.317.150,00	(404.250,00)	98,13	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.721.400,00	21.317.150,00	(404.250,00)	98,13	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.721.400,00	21.317.150,00	(404.250,00)	98,13	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.721.400,00	21.317.150,00	(404.250,00)	98,13	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.466.367.745,00	5.374.997.361,00	(91.370.384,00)	98,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.466.367.745,00	5.374.997.361,00	(91.370.384,00)	98,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.466.367.745,00	5.374.997.361,00	(91.370.384,00)	98,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.466.367.745,00	5.374.997.361,00	(91.370.384,00)	98,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.606.100,00	159.066.809,00	(5.539.291,00)	96,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.999.100,00	10.665.300,00	(333.800,00)	96,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.999.100,00	10.665.300,00	(333.800,00)	96,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.999.100,00	10.665.300,00	(333.800,00)	96,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.862.000,00	11.423.000,00	(3.439.000,00)	76,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.862.000,00	11.423.000,00	(3.439.000,00)	76,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.862.000,00	11.423.000,00	(3.439.000,00)	76,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.623.000,00	3.321.500,00	(301.500,00)	91,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.623.000,00	3.321.500,00	(301.500,00)	91,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.623.000,00	3.321.500,00	(301.500,00)	91,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.992.000,00	4.130.500,00	(861.500,00)	82,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.992.000,00	4.130.500,00	(861.500,00)	82,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.992.000,00	4.130.500,00	(861.500,00)	82,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.130.000,00	129.526.509,00	(603.491,00)	99,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	130.130.000,00	129.526.509,00	(603.491,00)	99,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.130.000,00	129.526.509,00	(603.491,00)	99,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.280.000,00	69.332.222,00	(9.947.778,00)	87,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.600.000,00	65.652.222,00	(9.947.778,00)	86,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.600.000,00	65.652.222,00	(9.947.778,00)	86,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	65.652.222,00	(9.947.778,00)	86,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.819.100,00	627.222.805,00	(8.596.295,00)	98,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,00	38.417.800,00	(772.200,00)	98,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.190.000,00	38.417.800,00	(772.200,00)	98,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.190.000,00	38.417.800,00	(772.200,00)	98,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	381.190.000,00	377.748.705,00	(3.441.295,00)	99,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	381.190.000,00	377.748.705,00	(3.441.295,00)	99,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.190.000,00	377.748.705,00	(3.441.295,00)	99,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.860.000,00	16.225.000,00	(635.000,00)	96,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.860.000,00	16.225.000,00	(635.000,00)	96,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.860.000,00	16.225.000,00	(635.000,00)	96,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.579.100,00	194.831.300,00	(3.747.800,00)	98,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	198.579.100,00	194.831.300,00	(3.747.800,00)	98,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.579.100,00	194.831.300,00	(3.747.800,00)	98,11	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : Inspektorat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.693.250.490,00	8.469.363.348,00	(223.887.142,00)	97,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	492.505.900,00	416.771.133,00	(75.734.767,00)	84,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	426.608.000,00	371.863.468,00	(54.744.532,00)	87,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	147.643.700,00	140.743.268,00	(6.900.432,00)	95,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	147.643.700,00	140.743.268,00	(6.900.432,00)	95,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.643.700,00	140.743.268,00	(6.900.432,00)	95,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	74.618.800,00	65.223.050,00	(9.395.750,00)	87,40	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	74.618.800,00	65.223.050,00	(9.395.750,00)	87,40	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.618.800,00	65.223.050,00	(9.395.750,00)	87,40	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003		Reviu Laporan Kinerja	13.014.400,00	12.018.900,00	(995.500,00)	92,35	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.014.400,00	12.018.900,00	(995.500,00)	92,35	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.014.400,00	12.018.900,00	(995.500,00)	92,35	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004		Reviu Laporan Keuangan	38.041.000,00	35.343.150,00	(2.697.850,00)	92,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	38.041.000,00	35.343.150,00	(2.697.850,00)	92,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.041.000,00	35.343.150,00	(2.697.850,00)	92,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006		Kerja Sama Pengawasan Internal	105.325.000,00	75.190.565,00	(30.134.435,00)	71,38	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	105.325.000,00	75.190.565,00	(30.134.435,00)	71,38	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.325.000,00	75.190.565,00	(30.134.435,00)	71,38	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	47.965.100,00	43.344.535,00	(4.620.565,00)	90,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	47.965.100,00	43.344.535,00	(4.620.565,00)	90,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.965.100,00	43.344.535,00	(4.620.565,00)	90,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	65.897.900,00	44.907.665,00	(20.990.235,00)	68,14	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	38.445.200,00	28.670.660,00	(9.774.540,00)	74,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.445.200,00	28.670.660,00	(9.774.540,00)	74,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.445.200,00	28.670.660,00	(9.774.540,00)	74,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	27.452.700,00	16.237.005,00	(11.215.695,00)	59,14	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.452.700,00	16.237.005,00	(11.215.695,00)	59,14	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.452.700,00	16.237.005,00	(11.215.695,00)	59,14	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	183.738.500,00	144.654.632,00	(39.083.868,00)	78,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		Pendampingan dan Asistensi	183.738.500,00	144.654.632,00	(39.083.868,00)	78,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	91.713.900,00	72.128.633,00	(19.585.267,00)	78,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	91.713.900,00	72.128.633,00	(19.585.267,00)	78,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.713.900,00	72.128.633,00	(19.585.267,00)	78,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23.156.500,00	16.895.900,00	(6.260.600,00)	72,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.156.500,00	16.895.900,00	(6.260.600,00)	72,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.156.500,00	16.895.900,00	(6.260.600,00)	72,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	40.447.900,00	32.866.457,00	(7.581.443,00)	81,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.447.900,00	32.866.457,00	(7.581.443,00)	81,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.447.900,00	32.866.457,00	(7.581.443,00)	81,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	28.420.200,00	22.763.642,00	(5.656.558,00)	80,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	28.420.200,00	22.763.642,00	(5.656.558,00)	80,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.420.200,00	22.763.642,00	(5.656.558,00)	80,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.017.006.090,00	7.907.937.583,00	(109.068.507,00)	98,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.069.521.090,00	7.059.963.953,00	(9.557.137,00)	99,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.069.521.090,00	7.059.963.953,00	(9.557.137,00)	99,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.069.521.090,00	7.059.963.953,00	(9.557.137,00)	99,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.069.521.090,00	7.059.963.953,00	(9.557.137,00)	99,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.638.200,00	255.311.163,00	(327.037,00)	99,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.500.000,00	250.493.663,00	(6.337,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	250.500.000,00	250.493.663,00	(6.337,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.500.000,00	250.493.663,00	(6.337,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.138.200,00	4.817.500,00	(320.700,00)	93,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.138.200,00	4.817.500,00	(320.700,00)	93,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.138.200,00	4.817.500,00	(320.700,00)	93,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.229.400,00	196.693.346,00	(18.536.054,00)	91,38	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.029.700,00	4.723.500,00	(306.200,00)	93,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.029.700,00	4.723.500,00	(306.200,00)	93,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.029.700,00	4.723.500,00	(306.200,00)	93,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.664.300,00	22.799.300,00	(1.865.000,00)	92,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.664.300,00	22.799.300,00	(1.865.000,00)	92,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.664.300,00	22.799.300,00	(1.865.000,00)	92,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.683.400,00	13.519.600,00	(163.800,00)	98,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.683.400,00	13.519.600,00	(163.800,00)	98,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.683.400,00	13.519.600,00	(163.800,00)	98,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.402.000,00	19.165.690,00	(5.236.310,00)	78,54	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	24.402.000,00	19.165.690,00	(5.236.310,00)	78,54	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.402.000,00	19.165.690,00	(5.236.310,00)	78,54	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.450.000,00	136.485.256,00	(10.964.744,00)	92,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	147.450.000,00	136.485.256,00	(10.964.744,00)	92,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.450.000,00	136.485.256,00	(10.964.744,00)	92,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.085.000,00	49.991.091,00	(4.093.909,00)	92,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.465.000,00	1.040.000,00	(425.000,00)	70,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.465.000,00	1.040.000,00	(425.000,00)	70,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.465.000,00	1.040.000,00	(425.000,00)	70,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.620.000,00	48.951.091,00	(3.668.909,00)	93,02	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.620.000,00	48.951.091,00	(3.668.909,00)	93,02	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.620.000,00	48.951.091,00	(3.668.909,00)	93,02	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.532.400,00	345.978.030,00	(76.554.370,00)	81,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.190.000,00	73.908.932,00	(15.281.068,00)	82,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	89.190.000,00	73.908.932,00	(15.281.068,00)	82,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.190.000,00	73.908.932,00	(15.281.068,00)	82,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.950.000,00	92.121.989,00	(34.828.011,00)	72,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	126.950.000,00	92.121.989,00	(34.828.011,00)	72,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.950.000,00	92.121.989,00	(34.828.011,00)	72,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	4.000.000,00	1.250.000,00	(2.750.000,00)	31,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	1.250.000,00	(2.750.000,00)	31,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	1.250.000,00	(2.750.000,00)	31,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.080.000,00	7.341.500,00	(8.738.500,00)	45,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.080.000,00	7.341.500,00	(8.738.500,00)	45,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.080.000,00	7.341.500,00	(8.738.500,00)	45,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	186.312.400,00	171.355.609,00	(14.956.791,00)	91,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	186.312.400,00	171.355.609,00	(14.956.791,00)	91,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.312.400,00	171.355.609,00	(14.956.791,00)	91,97	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	18.645.006.872,00	15.992.218.024,00	(2.652.788.848,00)	85,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.226.720.710,00	2.164.011.249,00	(1.062.709.461,00)	67,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.173.954.710,00	2.112.095.699,00	(1.061.859.011,00)	66,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.440.500,00	15.516.670,00	(923.830,00)	94,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.440.500,00	15.516.670,00	(923.830,00)	94,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.440.500,00	15.516.670,00	(923.830,00)	94,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.157.514.210,00	2.096.579.029,00	(1.060.935.181,00)	66,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.157.514.210,00	2.096.579.029,00	(1.060.935.181,00)	66,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.207.514.210,00	780.243.380,00	(427.270.830,00)	64,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.950.000.000,00	1.316.335.649,00	(633.664.351,00)	67,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	52.766.000,00	51.915.550,00	(850.450,00)	98,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	52.766.000,00	51.915.550,00	(850.450,00)	98,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.388.000,00	48.855.550,00	(532.450,00)	98,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.388.000,00	48.855.550,00	(532.450,00)	98,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.378.000,00	3.060.000,00	(318.000,00)	90,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.378.000,00	3.060.000,00	(318.000,00)	90,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.231.840.500,00	4.032.433.110,00	(1.199.407.390,00)	77,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	532.556.700,00	439.769.794,00	(92.786.906,00)	82,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.034.900,00	20.870.130,00	(2.164.770,00)	90,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.034.900,00	20.870.130,00	(2.164.770,00)	90,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.034.900,00	20.870.130,00	(2.164.770,00)	90,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	494.217.200,00	417.531.064,00	(76.686.136,00)	84,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	440.679.000,00	408.681.064,00	(31.997.936,00)	92,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.679.000,00	408.681.064,00	(31.997.936,00)	92,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	53.538.200,00	8.850.000,00	(44.688.200,00)	16,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.538.200,00	8.850.000,00	(44.688.200,00)	16,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0004		Evaluasi Kelurahan	15.304.600,00	1.368.600,00	(13.936.000,00)	8,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.304.600,00	1.368.600,00	(13.936.000,00)	8,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.304.600,00	1.368.600,00	(13.936.000,00)	8,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.699.283.800,00	3.592.663.316,00	(1.106.620.484,00)	76,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4.699.283.800,00	3.592.663.316,00	(1.106.620.484,00)	76,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.690.039.600,00	3.583.463.316,00	(1.106.576.284,00)	76,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.325.039.600,00	3.533.463.316,00	(791.576.284,00)	81,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	365.000.000,00	50.000.000,00	(315.000.000,00)	13,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	9.244.200,00	9.200.000,00	(44.200,00)	99,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.244.200,00	9.200.000,00	(44.200,00)	99,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29.604.000,00	14.270.600,00	(15.333.400,00)	48,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.604.000,00	14.270.600,00	(15.333.400,00)	48,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.604.000,00	14.270.600,00	(15.333.400,00)	48,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.604.000,00	14.270.600,00	(15.333.400,00)	48,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.604.000,00	14.270.600,00	(15.333.400,00)	48,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64.200.000,00	32.866.600,00	(31.333.400,00)	51,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	64.200.000,00	32.866.600,00	(31.333.400,00)	51,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	64.200.000,00	32.866.600,00	(31.333.400,00)	51,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	64.200.000,00	32.866.600,00	(31.333.400,00)	51,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	32.866.600,00	(31.333.400,00)	51,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.092.641.662,00	9.748.636.465,00	(344.005.197,00)	96,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.305.500,00	10.327.150,00	(1.978.350,00)	83,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.305.500,00	10.327.150,00	(1.978.350,00)	83,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.305.500,00	10.327.150,00	(1.978.350,00)	83,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.305.500,00	10.327.150,00	(1.978.350,00)	83,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.874.970.462,00	8.726.492.236,00	(148.478.226,00)	98,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.874.970.462,00	8.726.492.236,00	(148.478.226,00)	98,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.874.970.462,00	8.726.492.236,00	(148.478.226,00)	98,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.874.970.462,00	8.726.492.236,00	(148.478.226,00)	98,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.850.000,00	42.859.394,00	(990.606,00)	97,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43.850.000,00	42.859.394,00	(990.606,00)	97,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.850.000,00	42.859.394,00	(990.606,00)	97,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.850.000,00	42.859.394,00	(990.606,00)	97,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.968.500,00	170.700.960,00	(51.267.540,00)	76,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.090.800,00	10.188.300,00	(902.500,00)	91,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.090.800,00	10.188.300,00	(902.500,00)	91,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.090.800,00	10.188.300,00	(902.500,00)	91,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.322.000,00	43.945.400,00	(8.376.600,00)	83,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	52.322.000,00	43.945.400,00	(8.376.600,00)	83,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.322.000,00	43.945.400,00	(8.376.600,00)	83,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.819.700,00	11.820.500,00	(4.999.200,00)	70,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.819.700,00	11.820.500,00	(4.999.200,00)	70,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.819.700,00	11.820.500,00	(4.999.200,00)	70,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.820.000,00	17.820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.820.000,00	17.820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.916.000,00	86.926.760,00	(36.989.240,00)	70,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	123.916.000,00	86.926.760,00	(36.989.240,00)	70,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.916.000,00	86.926.760,00	(36.989.240,00)	70,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.370.000,00	105.163.853,00	(25.206.147,00)	80,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.570.000,00	3.470.000,00	(100.000,00)	97,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.570.000,00	3.470.000,00	(100.000,00)	97,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	3.470.000,00	(100.000,00)	97,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.300.000,00	101.693.853,00	(24.606.147,00)	80,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	126.300.000,00	101.693.853,00	(24.606.147,00)	80,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.300.000,00	101.693.853,00	(24.606.147,00)	80,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	809.177.200,00	693.092.872,00	(116.084.328,00)	85,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	272.900.000,00	229.591.693,00	(43.308.307,00)	84,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	272.900.000,00	229.591.693,00	(43.308.307,00)	84,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.900.000,00	229.591.693,00	(43.308.307,00)	84,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.050.000,00	31.790.200,00	(36.259.800,00)	46,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	68.050.000,00	31.790.200,00	(36.259.800,00)	46,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.050.000,00	31.790.200,00	(36.259.800,00)	46,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	468.227.200,00	431.710.979,00	(36.516.221,00)	92,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	434.852.300,00	412.102.979,00	(22.749.321,00)	94,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.852.300,00	412.102.979,00	(22.749.321,00)	94,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	33.374.900,00	19.608.000,00	(13.766.900,00)	58,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.374.900,00	19.608.000,00	(13.766.900,00)	58,75	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Guguk Panjang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	16.385.002.451,00	13.806.561.047,00	(2.578.441.404,00)	84,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.219.922.713,00	927.535.525,00	(1.292.387.188,00)	41,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.173.209.413,00	884.191.325,00	(1.289.018.088,00)	40,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.475.500,00	10.271.000,00	(4.204.500,00)	70,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.475.500,00	10.271.000,00	(4.204.500,00)	70,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.475.500,00	10.271.000,00	(4.204.500,00)	70,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.158.733.913,00	873.920.325,00	(1.284.813.588,00)	40,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.109.278.113,00	834.203.825,00	(1.275.074.288,00)	39,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.203.778.113,00	742.203.825,00	(461.574.288,00)	61,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	905.500.000,00	92.000.000,00	(813.500.000,00)	10,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	49.455.800,00	39.716.500,00	(9.739.300,00)	80,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.455.800,00	39.716.500,00	(9.739.300,00)	80,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	46.713.300,00	43.344.200,00	(3.369.100,00)	92,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	46.713.300,00	43.344.200,00	(3.369.100,00)	92,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.713.300,00	43.344.200,00	(3.369.100,00)	92,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.713.300,00	43.344.200,00	(3.369.100,00)	92,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.539.846.800,00	4.529.261.045,00	(1.010.585.755,00)	81,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	808.202.400,00	718.854.857,00	(89.347.543,00)	88,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.899.300,00	15.180.100,00	(4.719.200,00)	76,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.899.300,00	15.180.100,00	(4.719.200,00)	76,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.899.300,00	15.180.100,00	(4.719.200,00)	76,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	676.507.500,00	602.561.405,00	(73.946.095,00)	89,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	586.287.500,00	537.341.405,00	(48.946.095,00)	91,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	586.287.500,00	537.341.405,00	(48.946.095,00)	91,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	90.220.000,00	65.220.000,00	(25.000.000,00)	72,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.220.000,00	45.220.000,00	(25.000.000,00)	64,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0004		Evaluasi Kelurahan	111.795.600,00	101.113.352,00	(10.682.248,00)	90,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	111.795.600,00	101.113.352,00	(10.682.248,00)	90,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.795.600,00	101.113.352,00	(10.682.248,00)	90,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.731.644.400,00	3.810.406.188,00	(921.238.212,00)	80,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4.731.644.400,00	3.810.406.188,00	(921.238.212,00)	80,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.685.025.800,00	3.764.687.738,00	(920.338.062,00)	80,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.145.025.800,00	3.719.687.738,00	(425.338.062,00)	89,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	540.000.000,00	45.000.000,00	(495.000.000,00)	8,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	46.618.600,00	45.718.450,00	(900.150,00)	98,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.618.600,00	45.718.450,00	(900.150,00)	98,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.530.200,00	26.167.574,00	(10.362.626,00)	71,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36.530.200,00	26.167.574,00	(10.362.626,00)	71,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.530.200,00	26.167.574,00	(10.362.626,00)	71,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.530.200,00	26.167.574,00	(10.362.626,00)	71,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.530.200,00	26.167.574,00	(10.362.626,00)	71,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	86.003.100,00	75.165.495,00	(10.837.605,00)	87,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	86.003.100,00	75.165.495,00	(10.837.605,00)	87,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	86.003.100,00	75.165.495,00	(10.837.605,00)	87,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	81.897.600,00	71.565.495,00	(10.332.105,00)	87,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.897.600,00	71.565.495,00	(10.332.105,00)	87,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	4.105.500,00	3.600.000,00	(505.500,00)	87,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.105.500,00	3.600.000,00	(505.500,00)	87,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.502.699.638,00	8.248.431.408,00	(254.268.230,00)	97,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.465.700,00	38.615.974,00	(3.849.726,00)	90,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.465.700,00	38.615.974,00	(3.849.726,00)	90,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.940.300,00	18.090.974,00	(3.849.326,00)	82,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.940.300,00	18.090.974,00	(3.849.326,00)	82,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	20.525.400,00	20.525.000,00	(400,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.525.400,00	20.525.000,00	(400,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.133.311.592,00	6.988.380.787,00	(144.930.805,00)	97,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.133.311.592,00	6.988.380.787,00	(144.930.805,00)	97,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.133.311.592,00	6.988.380.787,00	(144.930.805,00)	97,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.133.311.592,00	6.988.380.787,00	(144.930.805,00)	97,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	145.000.000,00	138.649.878,00	(6.350.122,00)	95,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	145.000.000,00	138.649.878,00	(6.350.122,00)	95,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	145.000.000,00	138.649.878,00	(6.350.122,00)	95,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	138.649.878,00	(6.350.122,00)	95,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.377.499,00	260.432.796,00	(41.944.703,00)	86,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.194.200,00	12.152.612,00	(1.041.588,00)	92,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.194.200,00	12.152.612,00	(1.041.588,00)	92,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.194.200,00	12.152.612,00	(1.041.588,00)	92,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.176.000,00	72.971.790,00	(6.204.210,00)	92,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	79.176.000,00	72.971.790,00	(6.204.210,00)	92,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.176.000,00	72.971.790,00	(6.204.210,00)	92,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.667.299,00	34.749.530,00	(6.917.769,00)	83,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	41.667.299,00	34.749.530,00	(6.917.769,00)	83,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.667.299,00	34.749.530,00	(6.917.769,00)	83,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000,00	759.000,00	(441.000,00)	63,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	759.000,00	(441.000,00)	63,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	759.000,00	(441.000,00)	63,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.610.000,00	126.269.864,00	(27.340.136,00)	82,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	153.610.000,00	126.269.864,00	(27.340.136,00)	82,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.610.000,00	126.269.864,00	(27.340.136,00)	82,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.980.273,00	52.160.000,00	(1.820.273,00)	96,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	4.040.000,00	3.330.000,00	(710.000,00)	82,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	4.040.000,00	3.330.000,00	(710.000,00)	82,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.040.000,00	3.330.000,00	(710.000,00)	82,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.940.273,00	48.830.000,00	(1.110.273,00)	97,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	49.940.273,00	48.830.000,00	(1.110.273,00)	97,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.940.273,00	48.830.000,00	(1.110.273,00)	97,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.710.000,00	125.920.718,00	(23.789.282,00)	84,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.610.000,00	121.820.718,00	(23.789.282,00)	83,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	145.610.000,00	121.820.718,00	(23.789.282,00)	83,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.610.000,00	121.820.718,00	(23.789.282,00)	83,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.854.574,00	644.271.255,00	(31.583.319,00)	95,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.950.000,00	179.498.295,00	(4.451.705,00)	97,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	183.950.000,00	179.498.295,00	(4.451.705,00)	97,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.950.000,00	179.498.295,00	(4.451.705,00)	97,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.945.850,00	25.410.000,00	(7.535.850,00)	77,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.945.850,00	25.410.000,00	(7.535.850,00)	77,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.945.850,00	25.410.000,00	(7.535.850,00)	77,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	458.958.724,00	439.362.960,00	(19.595.764,00)	95,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	458.958.724,00	439.362.960,00	(19.595.764,00)	95,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.958.724,00	439.362.960,00	(19.595.764,00)	95,73	

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	15.475.061.414,00	13.424.703.305,00	(2.050.358.109,00)	86,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.268.504.000,00	1.299.209.551,00	(969.294.449,00)	57,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.193.827.900,00	1.225.679.601,00	(968.148.299,00)	55,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	378.022.500,00	82.542.391,00	(295.480.109,00)	21,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	378.022.500,00	82.542.391,00	(295.480.109,00)	21,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.022.500,00	82.542.391,00	(295.480.109,00)	21,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.815.805.400,00	1.143.137.210,00	(672.668.190,00)	62,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.815.805.400,00	1.143.137.210,00	(672.668.190,00)	62,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.525.805.400,00	1.003.137.210,00	(522.668.190,00)	65,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	290.000.000,00	140.000.000,00	(150.000.000,00)	48,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	74.676.100,00	73.529.950,00	(1.146.150,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	74.676.100,00	73.529.950,00	(1.146.150,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	74.676.100,00	73.529.950,00	(1.146.150,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.676.100,00	73.529.950,00	(1.146.150,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.827.305.550,00	3.187.407.779,00	(639.897.771,00)	83,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	514.685.550,00	451.578.120,00	(63.107.430,00)	87,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	37.006.100,00	34.267.280,00	(2.738.820,00)	92,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.006.100,00	34.267.280,00	(2.738.820,00)	92,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.006.100,00	34.267.280,00	(2.738.820,00)	92,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	477.679.450,00	417.310.840,00	(60.368.610,00)	87,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	468.589.300,00	412.460.840,00	(56.128.460,00)	88,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.589.300,00	412.460.840,00	(56.128.460,00)	88,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	9.090.150,00	4.850.000,00	(4.240.150,00)	53,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.090.150,00	4.850.000,00	(4.240.150,00)	53,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.312.620.000,00	2.735.829.659,00	(576.790.341,00)	82,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3.312.620.000,00	2.735.829.659,00	(576.790.341,00)	82,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.300.401.000,00	2.735.829.659,00	(564.571.341,00)	82,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.872.401.000,00	2.640.888.509,00	(231.512.491,00)	91,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	428.000.000,00	94.941.150,00	(333.058.850,00)	22,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	12.219.000,00	0,00	(12.219.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.219.000,00	0,00	(12.219.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	74.850.300,00	63.240.980,00	(11.609.320,00)	84,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	74.850.300,00	63.240.980,00	(11.609.320,00)	84,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	74.850.300,00	63.240.980,00	(11.609.320,00)	84,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.850.300,00	63.240.980,00	(11.609.320,00)	84,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.850.300,00	63.240.980,00	(11.609.320,00)	84,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	83.718.000,00	59.618.950,00	(24.099.050,00)	71,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	83.718.000,00	59.618.950,00	(24.099.050,00)	71,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	83.718.000,00	59.618.950,00	(24.099.050,00)	71,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	83.718.000,00	59.618.950,00	(24.099.050,00)	71,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.718.000,00	59.618.950,00	(24.099.050,00)	71,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.220.683.564,00	8.815.226.045,00	(405.457.519,00)	95,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.652.900,00	34.866.000,00	(17.786.900,00)	66,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.652.900,00	34.866.000,00	(17.786.900,00)	66,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.652.900,00	34.866.000,00	(17.786.900,00)	66,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.652.900,00	34.866.000,00	(17.786.900,00)	66,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.745.830.114,00	7.653.678.500,00	(92.151.614,00)	98,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.745.830.114,00	7.653.678.500,00	(92.151.614,00)	98,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.745.830.114,00	7.653.678.500,00	(92.151.614,00)	98,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.745.830.114,00	7.653.678.500,00	(92.151.614,00)	98,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.834.600,00	194.057.954,00	(6.776.646,00)	96,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.834.600,00	194.057.954,00	(6.776.646,00)	96,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	200.834.600,00	194.057.954,00	(6.776.646,00)	96,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.834.600,00	194.057.954,00	(6.776.646,00)	96,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	349.183.150,00	204.199.667,00	(144.983.483,00)	58,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.405.900,00	8.813.000,00	(8.592.900,00)	50,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.405.900,00	8.813.000,00	(8.592.900,00)	50,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.405.900,00	8.813.000,00	(8.592.900,00)	50,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.135.200,00	48.952.787,00	(19.182.413,00)	71,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	68.135.200,00	48.952.787,00	(19.182.413,00)	71,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.135.200,00	48.952.787,00	(19.182.413,00)	71,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.252.050,00	29.152.490,00	(14.099.560,00)	67,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	43.252.050,00	29.152.490,00	(14.099.560,00)	67,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.252.050,00	29.152.490,00	(14.099.560,00)	67,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.860.000,00	11.385.000,00	(2.475.000,00)	82,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.860.000,00	11.385.000,00	(2.475.000,00)	82,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	11.385.000,00	(2.475.000,00)	82,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.530.000,00	105.896.390,00	(100.633.610,00)	51,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	206.530.000,00	105.896.390,00	(100.633.610,00)	51,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.530.000,00	105.896.390,00	(100.633.610,00)	51,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.400.000,00	110.466.415,00	(34.933.585,00)	75,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.400.000,00	108.466.415,00	(34.933.585,00)	75,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	143.400.000,00	108.466.415,00	(34.933.585,00)	75,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.400.000,00	108.466.415,00	(34.933.585,00)	75,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726.782.800,00	617.957.509,00	(108.825.291,00)	85,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.200.000,00	155.757.320,00	(7.442.680,00)	95,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	163.200.000,00	155.757.320,00	(7.442.680,00)	95,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.200.000,00	155.757.320,00	(7.442.680,00)	95,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.150.000,00	21.836.320,00	(24.313.680,00)	47,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	46.150.000,00	21.836.320,00	(24.313.680,00)	47,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.150.000,00	21.836.320,00	(24.313.680,00)	47,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	517.432.800,00	440.363.869,00	(77.068.931,00)	85,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	487.304.800,00	410.263.869,00	(77.040.931,00)	84,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.304.800,00	410.263.869,00	(77.040.931,00)	84,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	30.128.000,00	30.100.000,00	(28.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.128.000,00	30.100.000,00	(28.000,00)	99,90	

Kota Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN I.4
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KOTA BUKITTINGGI

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	332.481.000.008	314.870.591.697,72	64.076.736.565	59.067.543.226,82	0	0,00	0	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	160.381.539.733	156.535.392.574,03	15.695.919.407	14.293.333.388,31	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	146.446.470.044	142.738.075.212,03	11.983.832.600	10.662.957.317,31	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	114.273.980.144	113.526.397.208,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.319.600	45.246.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.319.600	45.246.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	113.241.887.144	112.608.530.434,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	113.241.887.144	112.608.530.434,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.757.100	267.188.352,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.382.500	3.244.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.430.900	25.443.518,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.399.200	9.398.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.272.000	671.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.512.000	179.315.044,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	49.760.500	49.115.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.400.000	67.250.466,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.400.000	67.250.466,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.616.300	538.181.156,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	27.995.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.800.000	171.378.311,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.400.000	8.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	333.226.300	330.747.145,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	32.172.489.900	29.211.678.004,03	11.983.832.600	10.662.957.317,31	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	15.514.079.100	14.661.377.885,00	5.756.385.000	4.816.987.279,95	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13.172.700	12.947.700,00	761.000.000	475.387.249,40	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0,00	1.126.597.000	1.076.241.790,03	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0,00	488.584.000	486.731.171,45	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0,00	217.848.000	217.255.353,74	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0,00	123.732.000	123.005.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	552.000	552.000,00	144.448.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	272.000.000	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	0,00	330.299.000	173.800.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	342.385.400	321.546.791,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.725.254.000	7.647.186.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	95.717.200	85.808.366,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	735.176.700	386.829.473,00	34.515.000	34.340.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	5.968.960.000	5.950.323.262,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	31.199.300	28.397.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	175.001.900	52.939.889,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17.021.900	16.902.900,00	745.734.000	482.668.293,36	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	137.638.000	112.943.104,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	0,00	1.783.628.000	1.747.558.421,97	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6.100.549.200	5.218.562.587,00	4.794.372.600	4.426.129.963,75	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	0,00	2.361.000.000	2.296.563.843,51	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0,00	337.429.000	335.237.430,22	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0,00	256.931.000	254.071.597,07	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	0,00	155.687.000	155.302.859,17	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0,00	305.049.500	212.217.452,87	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0,00	223.076.000	222.229.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	0,00	50.680.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	129.000.000	44.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	0,00	264.027.600	113.340.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	407.260.600	379.223.877,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.102.472.000	3.092.706.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90.905.000	89.359.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	238.545.900	125.460.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.348.790.000	1.333.783.232,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	133.497.700	106.443.304,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	650.078.000	47.085.694,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0,00	840.492.500	837.167.780,91	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.143.119.000	8.305.403.048,03	508.837.400	505.913.288,92	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	519.279.000	518.890.186,03	408.837.400	408.149.288,92	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	800.000.000	783.948.000,00	100.000.000	97.764.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4.131.210.000	4.119.519.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	9.000.000	8.538.489,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.488.020.000	372.924.626,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.195.610.000	2.501.582.747,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.414.742.600	1.026.334.484,00	924.237.600	913.926.784,69	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	0	0,00	826.397.600	817.435.627,99	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	654.288.000	592.161.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	37.334.600	36.489.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	704.980.000	381.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.160.000	2.113.884,00	97.840.000	96.491.156,70	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	15.980.000	14.430.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0001		SDN 01 Campago Ipuh	147.794.177	142.802.600,00	14.000.000	14.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0001	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	147.794.177	142.802.600,00	14.000.000	14.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0001	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	147.794.177	142.802.600,00	14.000.000	14.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0001	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	138.794.177	133.802.600,00	14.000.000	14.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0001	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.02		SDN 02 Campago Guguk Bulek	122.584.779	122.539.035,00	35.451.826	35.451.826,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.02	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	122.584.779	122.539.035,00	35.451.826	35.451.826,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.02	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	122.584.779	122.539.035,00	35.451.826	35.451.826,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.02	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	113.584.779	113.539.035,00	35.451.826	35.451.826,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.02	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.03		SDN 03 Pulai Anak Air	121.199.657	121.058.211,00	17.986.250	17.961.750,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.03	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	121.199.657	121.058.211,00	17.986.250	17.961.750,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.03	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	121.199.657	121.058.211,00	17.986.250	17.961.750,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.03	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	112.199.657	112.058.211,00	17.986.250	17.961.750,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.03	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.04		SDN 04 Garegeh	287.626.421	265.625.687,00	49.050.000	48.735.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.04	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	287.626.421	265.625.687,00	49.050.000	48.735.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.04	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	287.626.421	265.625.687,00	49.050.000	48.735.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.04	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	269.026.421	247.025.687,00	49.050.000	48.735.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.04	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	18.600.000	18.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.05		SDN 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun	219.426.215	219.396.015,00	13.170.000	10.049.965,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.05	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	219.426.215	219.396.015,00	13.170.000	10.049.965,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.05	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	219.426.215	219.396.015,00	13.170.000	10.049.965,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.05	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	205.826.215	205.796.015,00	13.170.000	10.049.965,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.05	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	13.600.000	13.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.06		SDN 06 Pulai Anak Air	120.010.000	119.333.168,00	30.040.000	29.692.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.06	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	120.010.000	119.333.168,00	30.040.000	29.692.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.06	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	120.010.000	119.333.168,00	30.040.000	29.692.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.06	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	111.010.000	110.333.168,00	30.040.000	29.692.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.06	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.07		SDN 07 Kubu Gulai Bancah	198.546.296	198.537.117,00	65.800.000	64.667.667,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.07	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	198.546.296	198.537.117,00	65.800.000	64.667.667,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.07	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	198.546.296	198.537.117,00	65.800.000	64.667.667,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.07	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	184.746.296	184.737.117,00	65.800.000	64.667.667,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.07	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	13.800.000	13.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.08		SDN 08 Campago Ipuh	100.069.589	99.583.454,00	20.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.08	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100.069.589	99.583.454,00	20.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.08	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100.069.589	99.583.454,00	20.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.08	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	91.069.589	90.583.454,00	20.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.08	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.09		SDN 09 Manggis Ganting	172.077.432	170.524.853,00	17.000.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.09	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	172.077.432	170.524.853,00	17.000.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.09	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	172.077.432	170.524.853,00	17.000.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.09	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	163.077.432	161.524.853,00	17.000.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.09	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.10		SDN 10 Puhun Pintu Kabun	121.770.770	121.770.770,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.10	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	121.770.770	121.770.770,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.10	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	121.770.770	121.770.770,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.10	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	112.770.770	112.770.770,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.10	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.11		SDN 11 Campago Guguk Bulek	144.324.310	144.299.602,00	37.410.000	37.409.100,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.11	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	144.324.310	144.299.602,00	37.410.000	37.409.100,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.11	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	144.324.310	144.299.602,00	37.410.000	37.409.100,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.11	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	135.324.310	135.299.602,00	37.410.000	37.409.100,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.11	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.12		SDN 12 Puhun Pintu Kabun	96.726.831	96.713.514,00	13.000.000	13.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.12	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	96.726.831	96.713.514,00	13.000.000	13.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.12	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	96.726.831	96.713.514,00	13.000.000	13.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.12	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	87.726.831	87.713.514,00	13.000.000	13.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.12	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.13		SDN 13 Kubu Gulai Bancah	78.189.087	78.188.450,00	21.000.000	20.986.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.13	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	78.189.087	78.188.450,00	21.000.000	20.986.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.13	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	78.189.087	78.188.450,00	21.000.000	20.986.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.13	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	69.189.087	69.188.450,00	21.000.000	20.986.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.13	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.14		SDN 14 Tanjung Alam	37.180.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.14	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	37.180.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.14	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	37.180.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.14	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	34.580.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.14	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	2.600.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.15		SDN 15 Pulai Anak Air	162.953.212	162.928.275,00	6.950.000	6.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.15	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	162.953.212	162.928.275,00	6.950.000	6.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.15	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	162.953.212	162.928.275,00	6.950.000	6.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.15	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	153.953.212	153.928.275,00	6.950.000	6.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.15	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.16		SDN 16 Campago Ipuh	127.593.252	127.567.971,00	15.200.000	15.200.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.16	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	127.593.252	127.567.971,00	15.200.000	15.200.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.16	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	127.593.252	127.567.971,00	15.200.000	15.200.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.16	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	118.593.252	118.567.971,00	15.200.000	15.200.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.16	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.17		SDN 17 Manggis Ganting	100.154.797	100.151.550,00	24.500.000	24.413.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.17	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100.154.797	100.151.550,00	24.500.000	24.413.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.17	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100.154.797	100.151.550,00	24.500.000	24.413.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.17	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	91.154.797	91.151.550,00	24.500.000	24.413.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.17	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.18		SDN 18 Campago Guguk Bulek	132.299.572	132.260.025,00	8.785.693	8.785.693,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.18	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	132.299.572	132.260.025,00	8.785.693	8.785.693,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.18	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	132.299.572	132.260.025,00	8.785.693	8.785.693,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.18	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	123.299.572	123.260.025,00	8.785.693	8.785.693,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.18	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.19		SDN 01 Benteng Pasar Atas	387.630.310	379.698.846,00	129.502.500	129.192.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.19	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	387.630.310	379.698.846,00	129.502.500	129.192.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.19	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	387.630.310	379.698.846,00	129.502.500	129.192.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.19	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	359.630.310	351.698.846,00	129.502.500	129.192.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.19	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	28.000.000	28.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.20		SDN 02 Percontohan Kayu Kubu	507.353.829	504.308.552,00	30.500.000	30.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.20	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	507.353.829	504.308.552,00	30.500.000	30.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.20	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	507.353.829	504.308.552,00	30.500.000	30.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.20	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	479.153.829	476.108.552,00	30.500.000	30.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.20	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	28.200.000	28.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.21		SDN 03 Pakan Kurai	419.845.561	419.614.866,00	34.735.000	29.885.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.21	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	419.845.561	419.614.866,00	34.735.000	29.885.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.21	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	419.845.561	419.614.866,00	34.735.000	29.885.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.21	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	388.645.561	388.614.866,00	34.735.000	29.885.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.21	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	31.200.000	31.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.22		SDN 04 Bukit Apit Puhun	94.266.314	94.266.314,00	13.300.000	13.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.22	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	94.266.314	94.266.314,00	13.300.000	13.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.22	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	94.266.314	94.266.314,00	13.300.000	13.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.22	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	85.266.314	85.266.314,00	13.300.000	13.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.22	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.23		SDN 05 Tarok Dipo	137.780.594	137.727.920,00	28.964.000	22.964.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.23	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	137.780.594	137.727.920,00	28.964.000	22.964.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.23	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	137.780.594	137.727.920,00	28.964.000	22.964.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.23	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	128.780.594	128.727.920,00	28.964.000	22.964.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.23	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.24		SDN 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah	124.272.608	124.270.654,00	29.110.000	29.110.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.24	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	124.272.608	124.270.654,00	29.110.000	29.110.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.24	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	124.272.608	124.270.654,00	29.110.000	29.110.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.24	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	115.272.608	115.270.654,00	29.110.000	29.110.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.24	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.25		SDN 07 Teladan Bukit Cangang	278.182.300	277.093.189,00	37.600.000	37.596.429,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.25	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	278.182.300	277.093.189,00	37.600.000	37.596.429,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.25	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	278.182.300	277.093.189,00	37.600.000	37.596.429,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.25	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	259.582.300	258.493.189,00	37.600.000	37.596.429,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.25	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	18.600.000	18.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.26		SDN 08 Tarok Dipo	262.769.875	262.114.284,00	72.800.000	72.799.999,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.26	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	262.769.875	262.114.284,00	72.800.000	72.799.999,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.26	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	262.769.875	262.114.284,00	72.800.000	72.799.999,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.26	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	244.169.875	243.514.284,00	72.800.000	72.799.999,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.26	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	18.600.000	18.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.27		SDN 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah	139.799.262	139.798.875,00	30.225.000	30.225.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.27	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	139.799.262	139.798.875,00	30.225.000	30.225.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.27	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	139.799.262	139.798.875,00	30.225.000	30.225.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.27	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	130.799.262	130.798.875,00	30.225.000	30.225.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.27	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.28		SDN 11 Bukit Apit Puhun	126.896.938	124.180.599,00	19.000.000	18.814.070,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.28	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	126.896.938	124.180.599,00	19.000.000	18.814.070,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.28	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	126.896.938	124.180.599,00	19.000.000	18.814.070,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.28	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	117.896.938	115.180.599,00	19.000.000	18.814.070,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.28	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.29		SDN 12 Bukit Cangang	113.319.758	113.315.710,00	1.900.000	1.900.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.29	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	113.319.758	113.315.710,00	1.900.000	1.900.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.29	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	113.319.758	113.315.710,00	1.900.000	1.900.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.29	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	104.319.758	104.315.710,00	1.900.000	1.900.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.29	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.30		SDN 13 Bukit Apit Puhun	138.996.568	138.971.568,00	14.335.000	14.335.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.30	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	138.996.568	138.971.568,00	14.335.000	14.335.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.30	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	138.996.568	138.971.568,00	14.335.000	14.335.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.30	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	129.996.568	129.971.568,00	14.335.000	14.335.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.30	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.31		SDN 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah	294.636.577	293.460.460,00	59.784.000	59.784.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.31	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	294.636.577	293.460.460,00	59.784.000	59.784.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.31	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	294.636.577	293.460.460,00	59.784.000	59.784.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.31	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	272.836.577	271.660.460,00	59.784.000	59.784.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.31	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	21.800.000	21.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.32		SDN 16 Tarok Dipo	252.561.940	252.451.770,00	57.115.000	57.114.250,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.32	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	252.561.940	252.451.770,00	57.115.000	57.114.250,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.32	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	252.561.940	252.451.770,00	57.115.000	57.114.250,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.32	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	233.961.940	233.851.770,00	57.115.000	57.114.250,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.32	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	18.600.000	18.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.33		SDN 17 Pakan Kurai	248.836.000	248.836.000,00	26.384.000	26.383.969,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.33	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	248.836.000	248.836.000,00	26.384.000	26.383.969,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.33	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	248.836.000	248.836.000,00	26.384.000	26.383.969,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.33	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	230.236.000	230.236.000,00	26.384.000	26.383.969,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.33	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	18.600.000	18.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.34		SDN 18 Tarok Dipo	119.947.204	119.912.370,00	5.221.000	5.221.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.34	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	119.947.204	119.912.370,00	5.221.000	5.221.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.34	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	119.947.204	119.912.370,00	5.221.000	5.221.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.34	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	110.947.204	110.912.370,00	5.221.000	5.221.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.34	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.35		SDN 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah	114.551.252	114.551.156,00	25.800.000	25.800.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.35	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	114.551.252	114.551.156,00	25.800.000	25.800.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.35	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	114.551.252	114.551.156,00	25.800.000	25.800.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.35	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	105.551.252	105.551.156,00	25.800.000	25.800.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.35	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.36		SDN 01 Ladang Cakiah	168.048.111	168.047.739,00	23.289.999	23.289.999,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.36	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	168.048.111	168.047.739,00	23.289.999	23.289.999,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.36	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	168.048.111	168.047.739,00	23.289.999	23.289.999,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.36	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	159.048.111	159.047.739,00	23.289.999	23.289.999,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.36	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.37		SDN 02 Aur Kuning	260.865.811	260.618.738,00	95.400.000	92.119.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.37	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	260.865.811	260.618.738,00	95.400.000	92.119.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.37	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	260.865.811	260.618.738,00	95.400.000	92.119.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.37	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	242.265.811	242.018.738,00	95.400.000	92.119.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.37	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	18.600.000	18.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.38		SDN 03 Pakan Labuah	319.334.627	319.334.315,00	35.500.000	35.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.38	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	319.334.627	319.334.315,00	35.500.000	35.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.38	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	319.334.627	319.334.315,00	35.500.000	35.500.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.38	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300.734.627	300.734.315,00	35.500.000	35.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.38	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	18.600.000	18.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.39		SDN 04 Birugo	447.458.411	447.458.411,00	97.212.000	92.931.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.39	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	447.458.411	447.458.411,00	97.212.000	92.931.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.39	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	447.458.411	447.458.411,00	97.212.000	92.931.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.39	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	416.458.411	416.458.411,00	97.212.000	92.931.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.39	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	31.000.000	31.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.40		SDN 05 Birugo	120.970.679	120.947.690,00	6.000.000	5.715.315,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.40	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	120.970.679	120.947.690,00	6.000.000	5.715.315,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.40	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	120.970.679	120.947.690,00	6.000.000	5.715.315,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.40	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	111.970.679	111.947.690,00	6.000.000	5.715.315,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.40	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.41		SDN 06 Parit Antang	112.689.502	112.689.492,00	15.500.000	15.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.41	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	112.689.502	112.689.492,00	15.500.000	15.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.41	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	112.689.502	112.689.492,00	15.500.000	15.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.41	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	103.689.502	103.689.492,00	15.500.000	15.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.41	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.42		SDN 07 Belakang Balok	191.889.174	191.800.974,00	32.300.000	32.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.42	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	191.889.174	191.800.974,00	32.300.000	32.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.42	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	191.889.174	191.800.974,00	32.300.000	32.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.42	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	182.889.174	182.800.974,00	32.300.000	32.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.42	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.43		SDN 08 Kubu Tanjung	128.067.874	124.217.014,00	52.460.000	52.460.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.43	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	128.067.874	124.217.014,00	52.460.000	52.460.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.43	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	128.067.874	124.217.014,00	52.460.000	52.460.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.43	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	119.067.874	115.217.014,00	52.460.000	52.460.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.43	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.44		SDN 09 Belakang Balok	202.580.002	202.579.970,00	30.989.998	30.989.998,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.44	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	202.580.002	202.579.970,00	30.989.998	30.989.998,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.44	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	202.580.002	202.579.970,00	30.989.998	30.989.998,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.44	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	188.980.002	188.979.970,00	30.989.998	30.989.998,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.44	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	13.600.000	13.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.45		SDN 10 Sapiran	226.073.852	225.744.423,00	86.844.000	86.718.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.45	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	226.073.852	225.744.423,00	86.844.000	86.718.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.45	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	226.073.852	225.744.423,00	86.844.000	86.718.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.45	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	207.473.852	207.144.423,00	86.844.000	86.718.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.45	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	18.600.000	18.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.46		SDN 11 Aur Kuning	143.567.953	135.161.283,00	24.800.000	24.760.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.46	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	143.567.953	135.161.283,00	24.800.000	24.760.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.46	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	143.567.953	135.161.283,00	24.800.000	24.760.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.46	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	134.567.953	126.161.283,00	24.800.000	24.760.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.46	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.48		SMPN 1	705.882.709	701.991.536,00	210.340.700	188.382.100,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.48	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	705.882.709	701.991.536,00	210.340.700	188.382.100,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.48	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	705.882.709	701.991.536,00	210.340.700	188.382.100,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.48	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	672.282.709	668.391.536,00	210.340.700	188.382.100,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.48	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	33.600.000	33.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.49		SMPN 2	859.552.221	859.235.602,00	422.252.700	409.749.600,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.49	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	859.552.221	859.235.602,00	422.252.700	409.749.600,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.49	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	859.552.221	859.235.602,00	422.252.700	409.749.600,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.49	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	813.152.221	812.835.602,00	422.252.700	409.749.600,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.49	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	46.400.000	46.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.50		SMPN 3	411.955.747	411.903.443,00	198.612.950	198.612.950,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.50	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	411.955.747	411.903.443,00	198.612.950	198.612.950,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.50	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	411.955.747	411.903.443,00	198.612.950	198.612.950,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.50	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	385.155.747	385.103.443,00	198.612.950	198.612.950,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.50	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	26.800.000	26.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.51		SMPN 4	859.527.600	859.527.600,00	300.088.394	298.583.894,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.51	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	859.527.600	859.527.600,00	300.088.394	298.583.894,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.51	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	859.527.600	859.527.600,00	300.088.394	298.583.894,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.51	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	816.727.600	816.727.600,00	300.088.394	298.583.894,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.51	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	42.800.000	42.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.52		SMPN 5	526.065.917	523.799.740,00	174.813.800	174.813.800,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.52	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	526.065.917	523.799.740,00	174.813.800	174.813.800,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.52	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	526.065.917	523.799.740,00	174.813.800	174.813.800,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.52	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	496.065.917	493.799.740,00	174.813.800	174.813.800,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.52	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	30.000.000	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.53		SMPN 6	552.225.306	538.405.917,00	308.200.000	307.319.600,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.53	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	552.225.306	538.405.917,00	308.200.000	307.319.600,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.53	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	552.225.306	538.405.917,00	308.200.000	307.319.600,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.53	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	523.825.306	510.005.917,00	308.200.000	307.319.600,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.53	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	28.400.000	28.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.54		SMPN 7	557.163.486	553.005.487,00	251.046.400	250.596.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.54	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	557.163.486	553.005.487,00	251.046.400	250.596.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.54	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	557.163.486	553.005.487,00	251.046.400	250.596.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.54	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	530.363.486	526.205.487,00	251.046.400	250.596.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.54	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	26.800.000	26.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.55		SMPN 8	365.271.320	357.070.834,00	260.472.697	260.462.697,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.55	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	365.271.320	357.070.834,00	260.472.697	260.462.697,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.55	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	365.271.320	357.070.834,00	260.472.697	260.462.697,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.55	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	343.271.320	343.270.834,00	260.472.697	260.462.697,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.55	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	22.000.000	13.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.56		UPTD TK NEGERI PEMBINA	167.878.000	162.318.274,00	16.072.000	16.072.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.56	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	167.878.000	162.318.274,00	16.072.000	16.072.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.56	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	167.878.000	162.318.274,00	16.072.000	16.072.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.56	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	65.000.000	59.541.424,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.56	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	102.878.000	102.776.850,00	16.072.000	16.072.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.57		UPTD TK NEGERI 1	60.581.500	58.555.000,00	22.358.500	22.358.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.57	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	60.581.500	58.555.000,00	22.358.500	22.358.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.57	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	60.581.500	58.555.000,00	22.358.500	22.358.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.57	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	30.240.000	30.240.000,00	19.760.000	19.760.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.57	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	30.341.500	28.315.000,00	2.598.500	2.598.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.58		SPNF SKB Kota Bukittinggi	295.246.600	295.050.450,00	26.913.400	26.913.400,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.58	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	295.246.600	295.050.450,00	26.913.400	26.913.400,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.58	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	295.246.600	295.050.450,00	26.913.400	26.913.400,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.58	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	245.246.600	245.246.600,00	26.913.400	26.913.400,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.58	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	50.000.000	49.803.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	102.943.499.889	95.855.587.800,90	29.240.863.846	27.117.233.374,58	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	69.619.066.636	66.126.459.499,00	21.945.061.743	20.561.064.678,58	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.724.346.054	53.148.387.258,00	230.670.500	228.850.854,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.914.107	55.920.300,00	15.590.500	14.985.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.914.107	55.920.300,00	15.590.500	14.985.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.312.030.247	52.062.747.868,00	15.200.000	14.900.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.288.510.745	52.045.203.218,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.519.502	17.544.650,00	15.200.000	14.900.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.397.100	144.353.976,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.560.300	3.700.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.894.000	9.563.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.249.800	9.744.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.693.000	1.693.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.000.000	119.651.836,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	9.880.000	9.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	9.880.000	9.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.900.000	383.522.688,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	448.400.000	382.022.688,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.104.600	501.842.426,00	190.000.000	189.215.854,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.552.000	61.251.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	276.662.000	182.498.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.900.000	8.070.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	263.990.600	250.021.901,00	190.000.000	189.215.854,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	13.184.560.782	11.714.744.695,00	21.626.840.943	20.249.477.824,58	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	673.078.336	605.170.000,00	20.497.033.843	19.189.089.074,58	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	22.260.000	480.000,00	5.652.000.000	5.521.818.753,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	540.000.000	538.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	44.460.000	2.137.500,00	9.327.668.880	8.351.578.802,58	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	126.361	120.000,00	3.401.387.169	3.205.548.519,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0,00	2.115.977.794	2.110.143.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	66.231.975	63.782.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.229.921.846	10.918.951.245,00	1.129.807.100	1.060.388.750,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.908.400	19.269.801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	54.594.300	50.291.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35.005.890	26.305.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	56.875.000	39.133.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.647.500	13.112.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	20.000.000	19.573.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.000.000	14.069.868,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	41.999.917	28.271.800,00	18.000.000	17.544.250,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	252.669.600	249.001.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.340.700	14.643.255,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	461.816.100	453.507.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	302.664.900	244.643.032,00	22.672.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	223.780.000	200.625.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19.399.840	7.816.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	221.591.600	217.263.900,00	899.950.000	899.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	49.763.200	40.341.925,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	14.350.500	11.498.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	152.340.000	77.888.480,00	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	43.212.600	40.433.548,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2.910.000	90.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	764.439.685	627.826.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8.259.207.866	8.086.963.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	166.581.400	150.502.165,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	16.777.648	7.015.100,00	168.208.500	142.894.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.167.000	5.760.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	18.788.200	1.461.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.899.900	1.405.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	466.213.700	126.659.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	188.046.350	17.548.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	148.785.550	54.907.500,00	18.976.600	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	52.399.500	21.171.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	86.745.000	49.949.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	20.000.000	9.157.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20.000.000	9.157.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	261.560.600	181.466.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.990.000	6.236.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	251.570.600	175.229.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	618.028.200	555.898.478,00	39.385.800	38.046.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	6.299.700	5.455.900,00	7.795.300	6.950.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6.299.700	5.455.900,00	7.795.300	6.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	243.316.300	225.742.649,00	31.590.500	31.096.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.110.500	5.414.500,00	16.000.000	16.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	113.055.500	109.078.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	121.150.300	111.249.150,00	15.590.500	15.096.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	368.412.200	324.699.929,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	368.412.200	324.699.929,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	493.773.000	287.714.150,00	16.578.100	14.400.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	79.621.800	58.743.850,00	11.225.200	10.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	79.621.800	58.743.850,00	11.225.200	10.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	152.982.000	110.357.550,00	2.858.300	2.700.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	152.982.000	110.357.550,00	2.858.300	2.700.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	29.087.000	26.633.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	29.087.000	26.633.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	232.082.200	91.978.950,00	2.494.600	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	232.082.200	91.978.950,00	2.494.600	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	598.358.600	419.714.918,00	31.586.400	30.290.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.393.500	26.490.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	71.393.500	26.490.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	276.325.800	178.526.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	276.325.800	178.526.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.639.300	214.698.918,00	31.586.400	30.290.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	250.639.300	214.698.918,00	31.586.400	30.290.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01		UPTD Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad	1.936.623.322	1.748.575.251,00	100.300.000	100.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	993.179.682	967.524.613,00	100.300.000	100.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	993.179.682	967.524.613,00	100.300.000	100.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	993.179.682	967.524.613,00	100.300.000	100.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	934.403.640	772.540.638,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	924.413.000	762.550.638,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.760.000	21.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	44.960.000	37.654.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.650.000	10.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.360.000	1.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.625.000	2.825.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	178.888.000	112.006.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.750.000	9.275.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.610.000	29.230.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	110.715.000	85.805.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	454.335.000	421.019.938,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.000.000	4.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	750.000	675.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	32.010.000	26.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	9.990.640	9.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9.990.640	9.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.040.000	8.510.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.040.000	8.510.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.01	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.040.000	8.510.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02		UPTD Puskesmas Guguk Panjang	2.307.915.343	2.021.645.774,00	131.110.000	118.161.588,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.237.338.203	1.184.238.511,00	122.110.000	118.161.588,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.237.338.203	1.184.238.511,00	122.110.000	118.161.588,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.237.338.203	1.184.238.511,00	122.110.000	118.161.588,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.013.777.140	808.869.763,00	9.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.013.777.140	808.869.763,00	9.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.980.000	6.181.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	51.450.000	32.802.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.800.000	9.975.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.000.000	1.265.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	237.648.000	209.885.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.650.000	8.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.860.000	17.960.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	93.346.800	51.710.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	477.968.340	418.387.463,00	9.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.490.000	3.041.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	38.504.000	37.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	27.080.000	11.501.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	56.800.000	28.537.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.800.000	28.537.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	56.800.000	28.537.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03		UPTD Puskesmas Nilam Sari	1.226.368.291	1.072.008.903,00	62.500.000	62.499.720,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	434.909.418	423.380.312,00	62.500.000	62.499.720,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	434.909.418	423.380.312,00	62.500.000	62.499.720,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	434.909.418	423.380.312,00	62.500.000	62.499.720,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	731.278.873	595.897.091,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	728.416.813	595.897.091,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.720.000	15.612.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	38.000.000	37.832.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.325.000	16.775.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.740.000	3.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	137.938.000	97.225.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.450.000	8.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42.860.000	38.258.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50.720.000	46.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	342.043.813	293.432.591,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.300.000	1.510.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.350.000	3.225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.300.000	2.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	41.970.000	30.737.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2.862.060	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2.862.060	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	60.180.000	52.731.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.180.000	52.731.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	60.180.000	52.731.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04		UPTD Puskesmas Mandiangin	1.807.198.396	1.620.267.074,00	100.000.000	91.983.504,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	839.593.556	817.891.595,00	100.000.000	91.983.504,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	839.593.556	817.891.595,00	100.000.000	91.983.504,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	839.593.556	817.891.595,00	100.000.000	91.983.504,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	967.604.840	802.375.479,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	967.604.840	802.375.479,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	82.935.000	53.952.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	575.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.925.000	13.475.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.880.000	2.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	175.440.000	129.001.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.451.000	8.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	26.545.000	16.325.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	52.528.000	34.162.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	508.898.840	483.989.479,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	42.020.000	19.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.600.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.492.000	8.189.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	39.315.000	29.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05		UPTD Puskesmas Gulai Bancah	1.072.901.101	854.781.582,00	46.500.000	46.348.370,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	338.014.831	333.635.732,00	46.500.000	46.348.370,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	338.014.831	333.635.732,00	46.500.000	46.348.370,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	338.014.831	333.635.732,00	46.500.000	46.348.370,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	721.895.270	514.180.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	717.299.500	510.850.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	29.430.000	13.927.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.664.000	3.170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.555.000	15.752.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	104.734.000	59.964.575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.820.000	2.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.588.000	14.390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	77.130.000	30.430.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	374.904.500	325.910.575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	690.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.560.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.212.000	3.783.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	62.012.000	39.522.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	4.595.770	3.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4.595.770	3.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.991.000	6.965.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.991.000	6.965.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.991.000	6.965.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06		UPTD Puskesmas Tigo Baleh	1.949.125.869	1.420.825.918,00	89.411.000	83.359.575,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	842.021.839	746.035.877,00	89.411.000	83.359.575,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	842.021.839	746.035.877,00	89.411.000	83.359.575,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	842.021.839	746.035.877,00	89.411.000	83.359.575,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.077.184.030	655.726.291,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.062.528.800	642.406.291,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.600.000	9.916.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.940.000	4.927.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.800.000	13.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.500.000	2.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	243.050.000	92.703.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.650.000	5.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	68.565.000	16.037.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	51.900.000	34.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	568.848.800	421.590.541,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.990.000	5.490.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.925.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	600.000	600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.500.000	1.112.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.960.000	5.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	53.700.000	27.858.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	14.655.230	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14.655.230	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	29.920.000	19.063.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.920.000	19.063.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	29.920.000	19.063.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07		UPTD Puskesmas Plus Mandiangin	1.135.803.565	909.549.356,00	52.450.450	52.378.450,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	380.964.945	328.841.130,00	52.450.450	52.378.450,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	380.964.945	328.841.130,00	52.450.450	52.378.450,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	380.964.945	328.841.130,00	52.450.450	52.378.450,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	724.718.620	561.604.226,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	705.605.700	551.614.226,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.634.000	7.092.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.636.000	3.442.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.650.000	11.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.730.000	1.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.125.000	550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	136.182.000	79.626.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.550.000	8.725.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.960.000	19.515.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	63.120.000	39.131.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	373.979.700	342.864.726,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.775.000	3.410.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.200.000	6.574.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	25.164.000	11.982.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	26.900.000	15.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	19.112.920	9.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	19.112.920	9.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	30.120.000	19.104.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.120.000	19.104.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30.120.000	19.104.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08		UPTD Instalasi Farmasi	631.390.253	452.775.117,00	17.247.300	17.200.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	631.390.253	452.775.117,00	17.247.300	17.200.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	356.015.653	210.033.268,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	356.015.653	210.033.268,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	275.374.600	242.741.849,00	17.247.300	17.200.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	275.374.600	242.741.849,00	17.247.300	17.200.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09		UPTD Laboratorium Kesehatan	585.494.100	555.986.031,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	585.494.100	555.986.031,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	585.494.100	555.986.031,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	585.494.100	555.986.031,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10		Rumah Sakit Umum Daerah	20.671.613.013	19.072.713.295,90	6.696.283.353	5.983.937.489,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.778.543.913	12.693.445.345,90	457.825.500	249.845.608,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	12.778.543.913	12.693.445.345,90	457.825.500	249.845.608,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12.778.543.913	12.693.445.345,90	457.825.500	249.845.608,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.893.069.100	6.379.267.950,00	6.238.457.853	5.734.091.881,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.893.069.100	6.379.267.950,00	6.238.457.853	5.734.091.881,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7.893.069.100	6.379.267.950,00	6.238.457.853	5.734.091.881,00	0	0,00	0	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.285.216.264	13.730.715.445,79	16.212.403.900	15.225.240.158,57	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.452.374.144	13.281.015.416,79	16.212.403.900	15.225.240.158,57	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.415.208.044	8.669.461.488,67	89.630.300	68.665.710,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.535.900	12.493.257,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.535.900	12.493.257,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.811.113.044	7.408.970.360,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.789.687.744	7.406.474.360,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.425.300	2.496.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	411.496.000	282.518.694,00	28.504.000	28.067.460,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	411.496.000	282.518.694,00	28.504.000	28.067.460,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.197.900	233.972.591,00	61.126.300	40.598.250,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.169.500	7.960.365,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	61.126.300	40.598.250,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.561.100	13.301.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.218.300	17.994.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.999.000	3.618.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.250.000	191.097.476,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.310.000	140.878.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.710.000	2.710.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.600.000	138.168.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.555.200	590.628.026,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	39.175.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	338.550.000	236.172.205,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.820.000	9.897.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.995.200	305.382.871,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	877.589.200	750.700.811,00	1.350.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	69.227.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	69.227.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	808.362.200	750.700.811,00	1.350.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4.187.600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.188.400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	794.986.200	750.700.811,00	1.350.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	49.845.900	35.861.106,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	49.845.900	35.861.106,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	49.845.900	35.861.106,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	100.744.800	81.500.552,00	11.000.000.000	10.424.350.506,46	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100.744.800	81.500.552,00	11.000.000.000	10.424.350.506,46	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	100.744.800	81.500.552,00	11.000.000.000	10.424.350.506,46	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	81.845.400	39.880.639,00	314.594.000	188.742.400,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	81.845.400	39.880.639,00	314.594.000	188.742.400,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	81.845.400	39.880.639,00	314.594.000	188.742.400,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.192.545.300	917.042.624,00	423.600.000	421.644.164,87	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.192.545.300	917.042.624,00	423.600.000	421.644.164,87	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	26.943.800	4.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	104.667.800	1.017.500,00	423.600.000	421.644.164,87	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.060.933.700	911.735.124,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.010.825.300	783.415.121,12	19.594.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.010.825.300	783.415.121,12	19.594.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	684.167.200	598.643.955,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	47.910.600	26.230.266,00	19.594.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	278.747.500	158.540.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.407.115.800	1.385.659.299,00	4.361.635.600	4.120.212.377,24	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.407.115.800	1.385.659.299,00	4.361.635.600	4.120.212.377,24	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	58.097.800	55.233.858,00	4.181.635.600	4.085.369.921,24	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	218.116.100	212.272.303,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	1.275.600	1.121.000,00	180.000.000	34.842.456,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.129.626.300	1.117.032.138,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	101.708.400	16.243.966,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	35.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	35.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20.692.200	7.215.466,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	20.692.200	7.215.466,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	46.016.200	9.028.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	15.402.200	2.392.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	12.352.000	385.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	18.262.000	6.251.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.214.946.000	601.249.810,00	2.000.000	1.625.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	620.210.300	270.395.086,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	620.210.300	270.395.086,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	230.828.600	191.365.101,00	1.200.000	975.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	230.828.600	191.365.101,00	1.200.000	975.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	363.907.100	139.489.623,00	800.000	650.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	141.857.700	16.515.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	222.049.400	122.973.703,00	800.000	650.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0001		UPTD Penerangan Fasilitas Umum	2.398.400	1.854.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0001	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.398.400	1.854.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0001	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.398.400	1.854.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0001	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.398.400	1.854.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0002		UPTD Perlengkapan dan Peralatan	830.443.720	447.846.029,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0002	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	830.443.720	447.846.029,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0002	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.903.200	2.564.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0002	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.453.200	2.189.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0002	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	450.000	375.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0002	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	827.540.520	445.282.029,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0002	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	827.540.520	445.282.029,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.710.096.944	8.876.731.245,00	2.818.508.512	2.329.505.751,36	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.710.096.944	8.876.731.245,00	2.818.508.512	2.329.505.751,36	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.468.725.344	4.218.320.447,00	87.056.100	68.037.160,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.068.400	24.370.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.068.400	24.370.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.992.207.844	3.826.017.556,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.977.549.244	3.814.470.747,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.658.600	11.546.809,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.892.500	122.215.578,00	87.056.100	68.037.160,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.412.400	2.411.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	87.056.100	68.037.160,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.495.000	12.440.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.367.100	2.781.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.478.000	2.468.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.140.000	102.114.078,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.060.000	12.158.528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.060.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	12.158.528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.496.600	233.557.985,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000	42.606.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.850.000	142.308.585,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.260.000	4.235.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.436.600	44.407.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	782.134.200	569.878.702,00	123.000.000	122.068.405,08	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	146.556.500	29.839.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	146.556.500	29.839.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	635.577.700	540.038.902,00	123.000.000	122.068.405,08	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	136.035.800	105.025.043,00	123.000.000	122.068.405,08	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	499.541.900	435.013.859,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	552.983.300	431.066.811,00	2.028.000	1.627.400,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	552.983.300	431.066.811,00	2.028.000	1.627.400,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	70.107.700	44.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	482.875.600	431.022.811,00	2.028.000	1.627.400,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.140.649.700	3.070.292.470,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.140.649.700	3.070.292.470,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.140.649.700	3.070.292.470,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	765.604.400	587.172.815,00	2.606.424.412	2.137.772.786,28	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	765.604.400	587.172.815,00	2.606.424.412	2.137.772.786,28	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	37.293.700	7.885.000,00	169.756.000	136.948.738,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	700.042.400	573.875.815,00	2.434.918.412	1.999.189.048,28	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	28.268.300	5.412.000,00	1.750.000	1.635.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33.122.302.559	32.196.908.514,00	51.008.500	44.288.554,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.923.085.892	7.443.244.925,00	41.008.500	34.298.554,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.100.726.662	5.715.124.774,00	41.008.500	34.298.554,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.938.000	11.806.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.938.000	11.806.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.952.378.462	4.765.433.823,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.952.378.462	4.765.433.823,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.690.300	105.910.020,00	41.008.500	34.298.554,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.611.600	3.611.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0,00	41.008.500	34.298.554,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.971.500	8.943.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.325.200	4.835.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.432.000	3.348.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.350.000	85.170.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.300.000	90.569.589,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.300.000	89.569.589,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909.419.900	741.404.742,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000	38.858.675,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	713.085.000	584.612.791,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.830.000	8.675.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	118.554.900	109.258.276,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.822.359.230	1.728.120.151,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.742.881.130	1.681.636.451,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.461.530	12.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.433.735.500	1.425.503.801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	103.405.700	99.747.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	67.920.100	30.717.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.000.000	1.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	121.358.300	110.917.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12.281.100	11.572.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12.281.100	11.572.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	9.819.400	7.367.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	9.819.400	7.367.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	57.377.600	27.544.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	30.370.600	27.544.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	27.007.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	20.376.195.845	20.054.318.331,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.367.794.345	6.251.936.347,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.721.400	21.317.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.721.400	21.317.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.466.367.745	5.374.997.361,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.466.367.745	5.374.997.361,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.606.100	159.066.809,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.999.100	10.665.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.862.000	11.423.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.623.000	3.321.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.992.000	4.130.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.130.000	129.526.509,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.280.000	69.332.222,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.680.000	3.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.600.000	65.652.222,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.819.100	627.222.805,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	38.417.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	381.190.000	377.748.705,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.860.000	16.225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.579.100	194.831.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.008.401.500	13.802.381.984,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.559.861.800	13.374.832.845,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	733.803.500	715.953.166,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	105.454.900	92.728.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.591.088.500	3.566.226.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	865.466.200	856.545.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	8.264.048.700	8.143.379.679,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	415.927.000	395.076.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.199.700	14.132.480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	221.363.300	214.265.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	179.364.000	166.679.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	32.612.700	32.472.359,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	32.612.700	32.472.359,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.823.020.822	4.699.345.258,00	10.000.000	9.990.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.888.868.322	2.778.689.786,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.295.000	7.117.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.295.000	7.117.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.546.100.822	2.460.193.419,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.546.100.822	2.460.193.419,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.184.200	78.081.096,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.828.500	2.827.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.321.100	9.314.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.396.600	2.396.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.458.000	1.381.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.180.000	62.160.696,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.580.000	9.054.984,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.180.000	8.654.984,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.708.300	224.243.187,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	24.984.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.510.000	107.509.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.780.000	41.707.525,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.418.300	50.041.412,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.934.152.500	1.920.655.472,00	10.000.000	9.990.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.934.152.500	1.920.655.472,00	10.000.000	9.990.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	44.243.500	44.090.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.048.955.600	1.041.898.672,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	840.953.400	834.666.800,00	10.000.000	9.990.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.038.344.619	7.675.256.118,00	58.032.400	57.942.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		Dinas Sosial	10.038.344.619	7.675.256.118,00	58.032.400	57.942.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.596.402.819	3.483.327.578,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.593.700	22.603.490,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.593.700	22.603.490,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.863.853.219	2.823.664.794,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.849.321.219	2.811.327.044,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.532.000	12.337.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.000.000	93.030.001,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	95.000.000	93.030.001,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.292.700	175.736.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.968.600	1.961.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.343.500	3.343.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.080.600	5.080.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.900.000	165.350.932,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.300.000	35.982.197,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.300.000	33.982.197,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.363.200	332.311.064,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	193.090.000	156.902.075,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.730.000	14.175.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.543.200	161.233.789,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.230.307.100	2.037.779.720,00	16.119.000	16.095.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.230.307.100	2.037.779.720,00	16.119.000	16.095.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.902.890.700	1.758.713.756,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.688.800	15.688.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	37.958.600	34.108.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	252.019.900	225.355.764,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	4.749.100	3.913.300,00	16.119.000	16.095.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	707.123.300	485.666.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	582.235.400	384.337.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	207.625.700	174.617.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	241.747.300	100.432.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50.152.400	42.142.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	82.710.000	67.145.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	124.887.900	101.328.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	24.240.800	8.269.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.780.400	48.191.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	49.866.700	44.867.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.001.895.100	1.282.220.570,00	41.913.400	41.847.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	29.102.100	23.083.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	29.102.100	23.083.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.972.793.000	1.259.137.030,00	41.913.400	41.847.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	234.087.400	35.182.307,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.456.163.800	783.875.223,00	26.913.400	26.862.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.282.541.800	440.079.500,00	15.000.000	14.985.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	392.394.800	283.548.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	154.375.400	88.840.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	115.880.000	71.786.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	3.200.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	35.295.400	17.054.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	238.019.400	194.707.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	238.019.400	194.707.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	110.221.500	102.713.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	110.221.500	102.713.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	110.221.500	102.713.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	125.775.116.862	113.585.763.179,25	2.039.008.440	1.303.318.572,00	0	0,00	0	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	862.191.200	756.820.896,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000		Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	862.191.200	756.820.896,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	117.073.200	113.828.414,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	117.073.200	113.828.414,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	117.073.200	113.828.414,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	279.884.100	218.643.582,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	279.884.100	218.643.582,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	279.884.100	218.643.582,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	10.436.200	8.768.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	10.436.200	8.768.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	10.436.200	8.768.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	454.797.700	415.580.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	454.797.700	415.580.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.866.000	4.433.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.896.800	1.681.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	440.034.900	409.466.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.921.783.200	7.413.193.545,00	95.705.150	76.328.500,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	7.448.991.800	7.047.361.126,00	20.694.850	9.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.139.676.800	4.945.392.891,00	10.000.000	9.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.509.800	20.301.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.509.800	20.301.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.357.223.800	4.282.886.254,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.357.223.800	4.282.886.254,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.488.600	108.780.123,00	10.000.000	9.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.990.900	1.937.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	10.000.000	9.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.384.000	12.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.123.200	9.548.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.500	3.538.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.990.000	80.915.523,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.846.000	136.364.829,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000	29.621.329,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.760.000	10.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.086.000	94.398.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.608.600	397.060.085,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.190.000	72.496.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.900.000	197.050.325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	131.518.600	127.513.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	450.715.100	364.811.476,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40.529.400	38.857.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	40.529.400	38.857.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	410.185.700	325.953.926,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	346.052.300	270.084.326,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	64.133.400	55.869.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	67.738.500	66.636.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	37.500.000	37.422.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	37.500.000	37.422.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.238.500	29.213.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.238.500	29.213.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.329.112.700	1.297.840.390,00	10.694.850	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.329.112.700	1.297.840.390,00	10.694.850	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	545.713.700	523.840.582,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	783.399.000	773.999.808,00	10.694.850	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8.803.800	8.458.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.803.800	8.458.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.803.800	8.458.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	219.609.000	169.661.064,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	154.202.800	110.299.359,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	19.099.100	7.177.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	135.103.700	103.122.159,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	65.406.200	59.361.705,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	65.406.200	59.361.705,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	233.335.900	194.560.305,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	156.837.700	129.512.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	92.837.700	65.711.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	64.000.000	63.801.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.498.200	65.047.675,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	37.716.700	29.373.875,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	38.781.500	35.673.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001		UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	472.791.400	365.832.419,00	75.010.300	66.528.500,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	109.176.000	87.642.109,00	75.010.300	66.528.500,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.674.700	23.404.233,00	27.700.000	25.514.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	896.100	884.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	27.700.000	25.514.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.990.600	4.681.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.388.000	2.293.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.400.000	15.545.833,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	47.310.300	41.014.500,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	47.310.300	41.014.500,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.390.000	8.749.016,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.460.000	8.379.016,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.880.000	320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.111.300	55.488.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.111.300	55.488.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	143.343.400	103.303.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	143.343.400	103.303.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.327.400	39.094.580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	76.016.000	64.209.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	220.272.000	174.886.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.272.000	174.886.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.808.000	24.882.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0001	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	159.464.000	150.004.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	8.887.512.111	8.322.306.245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000		Dinas Pertanian dan Pangan	8.829.364.431	8.270.695.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.365.509.331	8.025.042.422,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.428.392	21.260.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.428.392	21.260.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.391.289.439	7.176.574.526,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.391.289.439	7.176.574.526,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.220.100	149.098.711,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.089.100	7.524.804,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.794.800	11.885.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.090.400	19.690.125,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.945.800	13.660.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.300.000	96.338.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.940.000	50.225.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.940.000	2.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	47.285.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690.631.400	627.882.886,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	365.487.400	312.100.905,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.980.000	31.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	293.164.000	283.821.981,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	393.586.800	192.050.707,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	14.999.900	13.244.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	14.999.900	13.244.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	72.499.400	68.808.729,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	72.499.400	68.808.729,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	306.087.500	109.997.978,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	296.088.200	108.291.578,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	9.999.300	1.706.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	21.000.000	14.457.570,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	21.000.000	14.457.570,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	21.000.000	14.457.570,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	49.268.300	39.145.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	49.268.300	39.145.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	39.499.500	30.990.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.0000	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	9.768.800	8.154.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.01		UPTD Rumah Potong Hewan	39.290.000	35.839.626,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.01	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.290.000	35.839.626,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.01	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.800.000	26.535.176,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.01	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.800.000	26.535.176,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.01	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.490.000	9.304.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.01	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.490.000	9.304.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.02		UPTD Pusat Kesehatan Hewan	18.857.680	15.770.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.02	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.857.680	15.770.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.02	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.166.300	2.558.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.02	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.166.300	2.558.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.02	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.691.380	13.212.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	3.27.2.09.3.25.01.02	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.691.380	13.212.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	467.317.200	329.579.214,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	467.317.200	329.579.214,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	19.439.000	17.332.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.439.000	17.332.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.439.000	17.332.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	16.379.200	3.187.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.379.200	3.187.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.379.200	3.187.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	182.735.300	135.372.998,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	182.735.300	135.372.998,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	182.735.300	135.372.998,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	248.763.700	173.686.636,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	248.763.700	173.686.636,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	34.244.600	1.298.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	214.519.100	172.388.386,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	41.519.175.510	36.977.640.337,00	331.873.192	272.542.160,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	41.519.175.510	36.977.640.337,00	331.873.192	272.542.160,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.621.675.884	20.714.086.582,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.436.800	45.400.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.436.800	45.400.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.210.638.434	11.932.300.634,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.182.755.834	11.910.109.234,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	27.882.600	22.191.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300.000.000	297.180.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	300.000.000	297.180.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.185.300	120.779.271,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.127.200	2.910.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.045.000	13.234.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.627.100	9.261.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.696.000	3.620.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.690.000	91.752.871,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.125.000	103.930.537,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.525.000	1.327.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.600.000	102.603.537,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.796.290.350	8.214.494.830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	39.115.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.370.227.350	7.894.899.245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.880.000	61.193.615,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	317.993.000	219.286.320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	469.870.500	419.040.846,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	220.505.500	192.358.846,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	71.080.500	48.409.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	149.425.000	143.949.346,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	249.365.000	226.682.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	249.365.000	226.682.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	140.971.700	117.470.956,00	22.721.700	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	140.971.700	117.470.956,00	22.721.700	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	68.664.800	67.667.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10.387.300	6.025.000,00	10.289.700	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	61.919.600	43.778.456,00	12.432.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.954.756.300	2.370.145.843,00	112.292.492	112.140.160,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.954.756.300	2.370.145.843,00	112.292.492	112.140.160,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.954.756.300	2.370.145.843,00	112.292.492	112.140.160,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	15.451.400	5.738.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.451.400	5.738.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	15.451.400	5.738.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	75.452.200	60.749.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.452.200	60.749.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	75.452.200	60.749.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	32.703.500	3.108.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	32.703.500	3.108.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	32.703.500	3.108.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	405.829.800	315.493.319,00	12.000.000	11.877.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	405.829.800	315.493.319,00	12.000.000	11.877.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	366.165.300	292.286.537,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	39.664.500	23.206.782,00	12.000.000	11.877.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	107.139.600	96.074.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107.139.600	96.074.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	107.139.600	96.074.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	15.867.600	3.135.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	15.867.600	3.135.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	15.867.600	3.135.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.679.457.026	12.872.595.961,00	184.859.000	148.525.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	14.679.457.026	12.872.595.961,00	184.859.000	148.525.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	18.512.000	5.337.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	728.614.100	564.592.314,00	146.000.000	143.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	73.181.900	69.213.115,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	1.062.300.576	790.626.811,00	4.725.000	4.725.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	12.796.848.450	11.442.826.421,00	34.134.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.190.156.060	4.758.003.148,00	65.794.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.190.156.060	4.758.003.148,00	65.794.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.193.861.460	3.920.801.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.254.600	11.254.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.254.600	11.254.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.499.260.960	3.368.553.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.486.053.960	3.365.243.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.207.000	3.310.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	135.000.000	134.964.663,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	135.000.000	134.964.663,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.117.700	87.690.296,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.263.500	1.988.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.055.700	11.527.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.398.500	3.764.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.000	965.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.000.000	69.445.696,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.390.000	85.303.579,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.560.000	80.076.579,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.830.000	5.227.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.838.200	233.034.932,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	23.537.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.800.000	57.086.185,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.848.200	152.411.047,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	525.681.200	465.168.436,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	508.689.200	448.607.236,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	161.667.800	121.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	347.021.400	327.507.236,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	16.992.000	16.561.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	16.992.000	16.561.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	261.876.500	237.458.936,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	261.876.500	237.458.936,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	55.730.500	36.752.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	206.146.000	200.706.436,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	170.021.000	109.714.946,00	65.794.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	36.155.500	19.420.704,00	65.794.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	21.017.600	9.938.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15.137.900	9.482.304,00	65.794.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	133.865.500	90.294.242,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	79.000.100	41.608.878,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	54.865.400	48.685.364,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	38.715.900	24.859.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	38.715.900	24.859.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	38.715.900	24.859.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.578.485.970	3.128.419.747,00	5.799.800	5.799.800,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	3.578.485.970	3.128.419.747,00	5.799.800	5.799.800,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	36.000.000	34.200.423,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	36.000.000	34.200.423,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	36.000.000	34.200.423,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.662.766.400	2.464.218.264,00	2.899.900	2.899.900,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.064.000.000	994.026.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000	128.194.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	148.800.000	122.837.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	460.800.000	458.570.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	114.400.000	103.929.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000	180.495.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.173.701.700	1.120.600.534,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.173.701.700	1.120.600.534,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	295.314.700	222.467.180,00	2.899.900	2.899.900,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	224.721.000	164.853.730,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33.800.000	33.361.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	36.793.700	24.251.800,00	2.899.900	2.899.900,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	129.750.000	127.123.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	129.750.000	127.123.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	879.719.570	630.001.060,00	2.899.900	2.899.900,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	815.955.700	607.303.060,00	2.899.900	2.899.900,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	436.291.800	260.826.060,00	2.899.900	2.899.900,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	91.663.900	83.389.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	288.000.000	263.088.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	63.763.870	22.698.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	63.763.870	22.698.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	19.134.811.711	17.424.712.249,00	759.581.152	450.824.037,00	0	0,00	0	0,00
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.700.048.200	3.177.669.694,00	651.692.352	450.824.037,00	0	0,00	0	0,00
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.700.048.200	3.177.669.694,00	651.692.352	450.824.037,00	0	0,00	0	0,00
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.700.048.200	3.177.669.694,00	651.692.352	450.824.037,00	0	0,00	0	0,00
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	36.516.800	6.033.500,00	651.692.352	450.824.037,00	0	0,00	0	0,00
2.15	1.03.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.663.531.400	3.171.636.194,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	12.003.250.027	11.443.496.242,00	103.944.400	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.186.273.003	7.897.826.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.770.300	12.250.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.770.300	12.250.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.126.587.003	6.667.607.483,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.101.856.603	6.653.982.783,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24.730.400	13.624.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	85.482.898,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	85.482.898,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.405.700	471.303.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.991.400	1.991.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.241.400	16.117.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.576.900	5.308.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.696.000	346.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	453.900.000	447.538.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.520.000	50.366.275,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.640.000	1.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.880.000	48.806.275,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.990.000	610.815.763,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	35.805.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	217.780.000	203.631.137,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.420.000	18.323.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.600.000	353.055.226,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.816.977.024	3.545.670.193,00	103.944.400	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	339.850.000	230.577.971,00	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0	0,00	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	199.850.000	93.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	140.000.000	136.887.971,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.404.965.724	3.250.883.744,00	3.944.400	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	3.342.461.324	3.192.184.694,00	3.944.400	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	54.751.200	53.908.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	7.753.200	4.790.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	5.821.100	5.807.928,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	5.821.100	5.807.928,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.340.200	58.400.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	66.340.200	58.400.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01		UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	159.025.700	102.841.371,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	109.835.700	102.841.371,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.986.700	42.039.922,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.336.400	1.336.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.858.200	7.135.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.792.100	1.568.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.000.000	31.999.622,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.600.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.249.000	56.801.449,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.249.000	56.801.449,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	49.190.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	49.190.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	26.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.01	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	23.190.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02		UPTD Terminal dan Parkir	3.272.487.784	2.700.704.942,00	3.944.400	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.272.487.784	2.700.704.942,00	3.944.400	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300.000.000	299.190.143,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	300.000.000	299.190.143,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.031.400	44.995.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.997.400	2.509.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.674.500	10.442.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.359.500	2.651.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	29.393.390,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.000.000	107.824.679,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.000.000	107.824.679,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.735.456.384	2.248.694.230,00	3.944.400	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.02	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.735.456.384	2.248.694.230,00	3.944.400	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.474.099.524	7.769.082.244,00	55.936.800	30.835.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	8.474.099.524	7.769.082.244,00	55.936.800	30.835.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.503.499.074	3.338.422.751,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.527.400	15.331.190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.527.400	15.331.190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.128.320.274	3.033.956.538,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.128.320.274	3.033.956.538,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.771.400	102.619.583,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	655.500	588.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.855.000	5.556.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.610.900	4.610.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.650.000	91.864.163,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.150.000	15.002.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.150.000	1.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	13.852.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.730.000	171.513.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	35.003.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.500.000	85.098.075,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.040.000	6.705.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000	44.706.565,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.085.090.450	1.856.664.398,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.085.090.450	1.856.664.398,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	218.037.500	216.283.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	927.207.000	836.139.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	344.164.650	269.889.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	33.119.900	31.199.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	422.883.900	364.202.099,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	139.677.500	138.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.885.510.000	2.573.995.095,00	55.936.800	30.835.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.106.867.500	2.098.048.522,00	28.061.800	3.885.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.106.867.500	2.098.048.522,00	28.061.800	3.885.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	778.642.500	475.946.573,00	27.875.000	26.950.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	101.866.800	72.534.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	175.083.500	46.946.150,00	27.875.000	26.950.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	444.079.200	308.089.078,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	57.613.000	48.376.545,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.078.731.058	6.744.262.237,00	181.140.700	69.171.950,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000		Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	7.078.731.058	6.744.262.237,00	181.140.700	69.171.950,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.497.592.158	3.368.710.869,00	81.657.300	69.171.950,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.906.900	51.938.464,00	11.741.700	8.700.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.906.900	51.938.464,00	11.741.700	8.700.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.105.328.558	3.029.759.308,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.031.834.808	2.957.610.064,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	73.493.750	72.149.244,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.556.700	135.961.422,00	5.477.600	4.884.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.352.200	1.352.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	5.477.600	4.884.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	766.600	534.385,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.461.300	23.634.035,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.086.600	7.676.205,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.990.000	1.903.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.900.000	100.861.597,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	64.438.000	55.587.950,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	64.438.000	55.587.950,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.600.000	6.270.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.100.000	4.770.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.200.000	144.781.675,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.950.000	67.050.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.250.000	77.731.375,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	92.653.000	89.320.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	92.653.000	89.320.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	92.653.000	89.320.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	83.905.000	41.521.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	83.905.000	41.521.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	83.905.000	41.521.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	48.205.900	45.944.010,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	48.205.900	45.944.010,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	48.205.900	45.944.010,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	250.923.400	236.282.176,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	250.923.400	236.282.176,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	250.923.400	236.282.176,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.105.451.600	2.962.483.282,00	99.483.400	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.105.451.600	2.962.483.282,00	99.483.400	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.2.07.0.00.01.0000	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.105.451.600	2.962.483.282,00	99.483.400	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.339.435.366	6.092.616.788,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.339.435.366	6.092.616.788,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.111.863.466	4.980.894.607,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.028.600	20.100.896,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.028.600	20.100.896,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.425.885.166	3.363.161.807,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.425.885.166	3.363.161.807,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	291.348.000	289.894.368,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	291.348.000	289.894.368,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.840.100	201.676.412,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.050.700	8.011.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.335.600	27.659.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.258.800	7.677.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.640.000	13.772.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.555.000	144.555.512,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.490.000	580.260.729,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.990.000	1.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	622.500.000	578.270.729,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	542.271.600	525.800.395,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	39.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.200.000	131.277.195,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.470.000	7.025.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.411.600	348.307.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	16.250.600	14.688.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.250.600	14.688.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	16.250.600	14.688.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	22.240.000	21.880.019,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.240.000	21.880.019,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	22.240.000	21.880.019,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	748.822.100	735.015.386,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	748.822.100	735.015.386,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	688.292.200	675.268.406,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	54.212.700	53.872.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	6.317.200	5.874.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	435.384.000	335.884.970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	435.384.000	335.884.970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	34.139.000	34.074.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	401.245.000	301.810.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	4.875.200	4.253.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.875.200	4.253.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4.875.200	4.253.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.129.397.682	6.457.376.771,13	472.701.600	335.355.175,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemuda dan Olahraga	8.129.397.682	6.457.376.771,13	472.701.600	335.355.175,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.785.110.826	2.644.908.836,00	435.606.800	304.681.175,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.910.300	16.731.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.910.300	16.731.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.199.252.926	2.156.110.473,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.199.252.926	2.156.110.473,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	85.337.136,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	85.337.136,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.230.800	133.106.638,00	292.565.000	188.296.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.295.700	2.248.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.796.800	1.090.000,00	292.565.000	188.296.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.443.200	19.210.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.035.700	14.498.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.044.400	3.363.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.615.000	92.696.638,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	143.041.800	116.385.175,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	64.438.000	64.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	78.603.800	51.985.175,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.550.000	95.304.708,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.550.000	93.304.708,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.166.800	158.318.081,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.740.000	95.591.325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	1.878.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.426.800	60.848.356,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.207.193.560	411.412.400,00	20.741.100	20.445.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	490.507.000	84.964.949,00	20.741.100	20.445.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	384.082.200	72.378.199,00	20.741.100	20.445.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	106.424.800	12.586.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	716.686.560	326.447.451,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	716.686.560	326.447.451,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.631.693.296	2.897.921.921,13	16.353.700	10.229.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	543.874.456	144.729.923,00	1.247.300	1.247.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	417.506.856	76.703.123,00	1.247.300	1.247.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	126.367.600	68.026.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.832.151.800	1.718.545.447,00	7.283.000	7.283.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.832.151.800	1.718.545.447,00	7.283.000	7.283.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.255.667.040	1.034.646.551,13	7.823.400	1.699.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	584.152.280	425.070.336,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	671.514.760	609.576.215,13	7.823.400	1.699.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	505.400.000	503.133.614,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	505.400.000	503.133.614,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	505.400.000	503.133.614,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	46.994.700	37.109.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.21.2.20.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	46.994.700	37.109.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	46.994.700	37.109.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	46.994.700	37.109.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	46.994.700	37.109.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	48.130.700	38.525.548,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	48.130.700	38.525.548,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	48.130.700	38.525.548,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.130.700	38.525.548,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.630.000	17.125.743,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.21.2.20.01.0000	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.500.700	21.399.805,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.042.819.384	2.692.402.133,12	63.004.046	62.461.950,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.042.819.384	2.692.402.133,12	63.004.046	62.461.950,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	490.304.800	406.791.089,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	68.417.800	63.135.349,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	68.417.800	63.135.349,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	421.887.000	343.655.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	421.887.000	343.655.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	271.153.900	157.214.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	271.153.900	157.214.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	271.153.900	157.214.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	192.631.254	103.185.340,00	9.921.846	9.920.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	25.698.754	23.930.860,00	9.921.846	9.920.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	6.507.800	6.132.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	19.190.954	17.797.980,00	9.921.846	9.920.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	166.932.500	79.254.480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	138.932.800	53.858.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	27.999.700	25.395.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.088.729.430	2.025.211.254,12	53.082.200	52.541.950,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.088.729.430	2.025.211.254,12	53.082.200	52.541.950,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	627.900.620	597.873.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1.328.755.580	1.297.897.744,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	132.073.230	129.440.350,00	53.082.200	52.541.950,00	0	0,00	0	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.008.883.586	4.609.538.877,00	7.472.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.008.883.586	4.609.538.877,00	7.472.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.787.949.986	4.528.355.086,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.841.800	15.572.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.841.800	15.572.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.830.992.686	3.747.107.370,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.828.342.786	3.746.273.470,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.649.900	833.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	176.000.000	175.653.104,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	176.000.000	175.653.104,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.698.200	234.958.992,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.870.400	3.870.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.729.100	10.913.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.848.500	16.078.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.598.000	7.282.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.000.000	191.162.992,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.652.200	5.652.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.019.700	158.025.995,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.650.000	40.149.179,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.850.000	8.309.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.119.700	109.166.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.397.600	197.036.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	25.237.675,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.412.000	112.613.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.795.600	59.185.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	220.933.600	81.183.791,00	7.472.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	206.758.300	70.058.291,00	3.572.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.105.900	10.345.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.982.500	7.185.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	57.192.300	51.430.091,00	3.572.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	118.727.800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.749.800	1.097.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.175.300	11.125.500,00	3.900.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	14.175.300	11.125.500,00	3.900.000	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	45.191.900	34.173.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45.191.900	34.173.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	45.191.900	34.173.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	23.673.800	20.753.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	16.843.200	14.509.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	6.830.600	6.243.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	4.076.000	2.218.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	4.076.000	2.218.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	17.442.100	11.201.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	9.870.100	4.671.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	7.572.000	6.530.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	45.738.495.263	38.245.096.797,57	1.840.283.819	1.388.888.120,95	0	0,00	0	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	760.883.500	490.155.420,00	14.222.000	13.034.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000		Dinas Pertanian dan Pangan	450.589.300	189.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	295.801.700	41.351.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	295.801.700	41.351.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	57.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	245.801.700	41.294.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	154.787.600	147.708.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	154.787.600	147.708.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	154.787.600	147.708.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.03		UPTD Balai Benih Ikan Hias	310.294.200	301.095.420,00	14.222.000	13.034.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.03	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.988.600	9.058.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.03	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.988.600	9.058.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.03	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.988.600	9.058.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.03	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	300.305.600	292.037.020,00	14.222.000	13.034.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.03	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	300.305.600	292.037.020,00	14.222.000	13.034.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.27.2.09.3.25.01.03	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.305.600	292.037.020,00	14.222.000	13.034.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	23.260.090.478	19.323.385.168,01	923.223.619	682.354.427,12	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	23.260.090.478	19.323.385.168,01	923.223.619	682.354.427,12	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.333.232.430	7.609.643.938,00	22.456.700	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.508.300	93.051.770,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.508.300	93.051.770,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.273.953.130	6.062.786.909,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.273.953.130	6.062.786.909,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	130.000.000	129.831.528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	130.000.000	129.831.528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.816.500	267.125.529,00	22.456.700	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.070.500	1.757.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	22.456.700	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.273.500	21.851.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.753.800	4.497.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.718.700	239.019.229,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	881.950.000	616.158.707,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.150.000	6.146.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	875.800.000	610.011.857,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	653.004.500	440.689.495,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	276.592.500	169.875.711,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.480.000	19.340.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.246.000	63.869.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.686.000	187.603.404,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	11.150.937.088	9.834.201.390,01	900.507.019	668.784.427,12	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7.872.351.288	7.077.289.478,01	795.102.956	578.771.352,12	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	416.364.592	219.464.598,00	588.514.030	507.621.352,12	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.114.165.696	2.856.186.734,00	173.087.200	52.650.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.341.821.000	4.001.638.146,01	33.501.726	18.500.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.136.703.000	2.625.887.812,00	105.404.063	90.013.075,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	210.619.900	195.286.822,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.588.791.100	2.216.079.645,00	105.404.063	90.013.075,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	272.568.000	149.797.345,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	64.724.000	64.724.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	141.882.800	131.024.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	13.403.800	9.719.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	128.479.000	121.304.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	854.031.960	493.953.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	854.031.960	493.953.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	514.231.700	269.876.530,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	339.800.260	224.077.078,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	238.482.300	131.739.625,00	259.900	250.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	238.482.300	131.739.625,00	259.900	250.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	238.482.300	131.739.625,00	259.900	250.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.683.406.700	1.253.846.607,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2.683.406.700	1.253.846.607,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2.520.524.150	1.174.982.057,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	162.882.550	78.864.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.809.582.625	1.157.109.599,84	14.406.100	9.627.600,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000		Dinas Pertanian dan Pangan	1.335.252.890	724.739.710,84	10.082.300	6.230.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	839.844.690	339.584.157,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	73.976.140	29.687.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	18.676.200	6.864.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	55.299.940	22.823.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	735.049.650	297.871.687,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	511.939.900	104.227.388,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	170.909.850	149.969.199,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	52.199.900	43.675.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	2.400.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	10.000.000	2.400.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.818.900	9.624.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	20.818.900	9.624.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	21.132.000	17.929.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	21.132.000	17.929.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	21.132.000	17.929.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	71.308.700	55.717.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	32.619.500	25.950.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.619.500	25.950.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	38.689.200	29.767.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	33.689.200	29.767.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	5.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	402.967.500	311.508.903,00	10.082.300	6.230.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	402.967.500	311.508.903,00	10.082.300	6.230.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	152.874.200	136.646.353,00	7.172.000	6.230.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.0000	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	250.093.300	174.862.550,00	2.910.300	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.01		UPTD Rumah Potong Hewan	253.028.195	231.678.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.01	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	253.028.195	231.678.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.01	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	253.028.195	231.678.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.01	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	253.028.195	231.678.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.2.09.3.25.01.02		UPTD Pusat Kesehatan Hewan	221.301.540	200.690.890,00	4.323.800	3.397.600,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.02	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	221.301.540	200.690.890,00	4.323.800	3.397.600,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.02	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	221.301.540	200.690.890,00	4.323.800	3.397.600,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.2.09.3.25.01.02	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	221.301.540	200.690.890,00	4.323.800	3.397.600,00	0	0,00	0	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	19.135.913.710	16.680.834.963,72	888.432.100	683.872.093,83	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	18.957.933.110	16.544.617.248,72	740.518.400	569.450.610,70	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.792.031.510	6.163.377.696,72	250.840.000	149.865.610,70	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.739.500	108.788.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.739.500	108.788.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.610.900.510	5.108.561.391,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.537.981.510	5.037.266.891,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	72.919.000	71.294.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.861.600	161.059.336,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.539.400	4.776.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.894.400	7.766.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.713.500	18.137.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.595.000	20.910.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.200.000	462.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.919.300	109.007.156,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.626.000	267.933.704,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	98.866.000	98.586.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.000.000	152.103.254,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.760.000	17.244.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.903.900	517.034.515,72	250.840.000	149.865.610,70	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.312.000	75.291.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.962.000	166.145.624,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	291.629.900	275.597.441,72	250.840.000	149.865.610,70	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	70.313.400	67.997.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	70.313.400	67.997.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	70.313.400	67.997.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	11.758.314.600	10.063.738.425,00	489.678.400	419.585.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.287.151.380	5.949.046.947,00	489.678.400	419.585.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.463.810.080	2.319.798.581,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.823.341.300	3.629.248.366,00	489.678.400	419.585.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	4.471.163.220	4.114.691.478,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.665.841.500	2.540.292.692,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.805.321.720	1.574.398.786,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	45.815.600	17.035.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	10.150.100	6.565.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10.150.100	6.565.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	35.665.500	10.469.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12.635.200	5.872.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	23.030.300	4.597.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	7.785.500	5.597.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	7.785.500	5.597.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	7.785.500	5.597.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	283.672.500	226.871.377,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	283.672.500	226.871.377,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	272.599.300	217.015.377,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	11.073.200	9.856.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001		UPTD Kemetrologian	177.980.600	136.217.715,00	147.913.700	114.421.483,13	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.624.000	86.927.766,00	79.608.400	78.796.483,13	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.091.300	7.408.400,00	29.608.400	28.980.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.653.600	2.530.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	29.608.400	28.980.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.865.700	4.311.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	572.000	566.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.320.000	11.277.366,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.320.000	11.277.366,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.212.700	68.242.000,00	50.000.000	49.816.483,13	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.212.700	68.242.000,00	50.000.000	49.816.483,13	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	76.356.600	49.289.949,00	68.305.300	35.625.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	76.356.600	49.289.949,00	68.305.300	35.625.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	3.30.3.31.0.00.01.0001	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	76.356.600	49.289.949,00	68.305.300	35.625.000,00	0	0,00	0	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	772.024.950	593.611.646,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	467.328.500	318.186.599,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	399.578.900	283.201.099,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	399.578.900	283.201.099,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	166.619.600	145.692.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	232.959.300	137.508.499,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	67.749.600	34.985.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	67.749.600	34.985.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0000	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	67.749.600	34.985.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0002		UPTD Kerajinan Industri	304.696.450	275.425.047,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0002	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	304.696.450	275.425.047,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0002	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	304.696.450	275.425.047,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	3.30.3.31.0.00.01.0002	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	304.696.450	275.425.047,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	110.228.684.260	101.243.336.759,00	1.361.990.930	1.328.838.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	68.925.730.946	65.211.210.776,00	628.399.930	608.058.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000		Sekretariat Daerah	68.925.730.946	65.211.210.776,00	628.399.930	608.058.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.625.943.851	34.365.313.612,00	438.599.830	420.007.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.286.900	18.084.640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.286.900	18.084.640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.500.591.984	15.072.177.364,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.486.154.084	15.058.963.034,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.495.100	8.789.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.942.800	4.424.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.555.308.400	4.111.174.358,00	131.000.000	123.982.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	124.803.000	109.319.329,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.854.000	0,00	131.000.000	123.982.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.086.300	130.238.958,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	232.450.400	209.338.287,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.957.914.700	1.659.303.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.103.200.000	2.002.974.752,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.320.000	362.129.019,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.520.000	24.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	505.800.000	338.109.019,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.261.766.400	3.046.823.127,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	467.502.000	467.439.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.783.034.000	1.684.195.939,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.980.000	40.898.115,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	874.250.400	800.195.023,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.000.000	54.095.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.451.375.494	1.309.506.993,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	775.375.494	642.396.993,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	676.000.000	667.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	6.728.873.600	5.961.545.787,00	297.000.000	294.275.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.425.243.000	3.887.451.550,00	199.500.000	199.025.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.263.719.600	2.046.810.437,00	97.500.000	95.250.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	39.911.000	27.283.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	159.437.364	146.549.993,00	10.599.830	1.750.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	43.976.500	41.294.063,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	62.249.264	54.764.901,00	10.599.830	1.750.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	53.211.600	50.491.029,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.413.983.709	4.337.322.331,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	3.775.982.700	3.702.811.111,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	155.204.205	154.760.926,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	482.796.804	479.750.294,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	31.198.356.995	29.984.199.162,00	55.500.000	55.500.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	376.204.405	290.385.583,00	55.500.000	55.500.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	148.046.505	136.178.900,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	167.370.000	98.316.889,00	25.500.000	25.500.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	60.787.900	55.889.794,00	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	29.645.569.190	28.665.035.183,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.812.269.790	2.646.872.322,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	15.269.144.600	14.704.908.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	11.564.154.800	11.313.254.841,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.043.729.000	905.526.426,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	173.093.200	98.462.154,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	743.710.800	697.897.433,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	126.925.000	109.166.839,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	132.854.400	123.251.970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	132.854.400	123.251.970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.101.430.100	861.698.002,00	134.300.100	132.551.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	498.501.600	401.870.352,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	27.534.300	21.266.039,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	339.418.600	330.007.687,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	39.087.100	26.976.869,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	92.461.600	23.619.757,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	183.508.600	91.597.205,00	48.874.900	48.404.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	44.585.500	22.920.596,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	105.012.000	47.402.709,00	32.219.000	32.219.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	33.911.100	21.273.900,00	16.655.900	16.185.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	373.211.900	343.862.945,00	85.425.200	84.147.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	157.123.200	144.052.786,00	54.244.200	53.400.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	175.096.900	170.298.109,00	31.181.000	30.747.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40.991.800	29.512.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	46.208.000	24.367.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	15.647.800	10.019.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10.859.600	2.417.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	19.700.600	11.930.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	41.302.953.314	36.032.125.983,00	733.591.000	720.780.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000		Sekretariat DPRD	41.302.953.314	36.032.125.983,00	733.591.000	720.780.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.823.582.014	17.484.693.100,00	530.166.000	517.480.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.792.200	39.368.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.792.200	39.368.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.697.669.764	3.597.650.233,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.616.568.464	3.519.959.733,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	81.101.300	77.690.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.000.000	198.279.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	198.279.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.900.000	42.075.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	42.900.000	42.075.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	20.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.870.310.000	1.782.068.602,00	296.339.600	293.080.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.511.700	14.771.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	211.839.600	209.605.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.584.100	8.669.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.954.900	54.954.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.901.900	7.330.200,00	84.500.000	83.475.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	414.843.400	407.497.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.007.164.000	1.004.289.494,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.350.000	284.555.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.750.000	164.261.996,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.750.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.000.000	162.261.996,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.177.809.800	893.680.495,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.090.000	100.147.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	524.291.200	465.903.945,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	427.808.600	297.850.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.100.000	22.433.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.520.000	7.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	10.975.091.050	10.289.255.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.387.741.050	9.730.039.280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	537.350.000	531.826.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50.000.000	27.390.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	580.259.200	478.053.944,00	233.826.400	224.400.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	224.128.200	186.414.944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	356.131.000	291.639.000,00	233.826.400	224.400.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.479.371.300	18.547.432.883,00	203.425.000	203.300.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.344.109.600	1.707.339.853,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	285.441.400	203.337.575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.242.313.500	846.480.305,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	663.372.700	559.870.148,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	86.229.600	43.756.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	66.752.400	53.895.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.809.413.300	1.225.930.895,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	463.641.700	257.359.471,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	244.930.300	167.421.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	467.581.300	250.509.621,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	326.803.000	271.076.803,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	12.635.300	4.551.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	293.821.700	275.012.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.270.579.900	3.697.530.535,00	203.425.000	203.300.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.038.041.800	909.740.694,00	27.875.000	27.850.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	928.565.400	803.922.112,00	27.875.000	27.850.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	915.468.600	781.386.835,00	27.875.000	27.850.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	9.778.800	2.526.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	30.238.000	20.440.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	741.453.700	595.103.634,00	119.800.000	119.750.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	607.033.600	584.410.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.061.105.100	4.244.895.513,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	371.212.600	229.666.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.993.739.400	1.794.261.895,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	212.637.900	171.511.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.507.554.800	1.115.410.544,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	975.960.400	934.044.674,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.708.905.800	1.029.091.292,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	775.256.500	681.206.722,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	933.649.300	347.884.570,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	181.407.100	138.847.938,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	11.391.500	3.393.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	170.015.600	135.454.138,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	7.103.850.500	6.503.796.857,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.970.474.000	5.596.976.462,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	483.232.700	481.228.495,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.02.0000	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	650.143.800	425.591.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	33.735.261.049	26.876.677.754,00	173.707.800	126.244.350,00	1.000.000.000	380.911,00	9.600.620.000	9.597.200.000,00
5.01			PERENCANAAN	6.134.307.904	5.862.413.347,00	60.600.000	57.020.300,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.134.307.904	5.862.413.347,00	60.600.000	57.020.300,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.512.126.604	5.382.681.992,00	60.600.000	57.020.300,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.100.000	3.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.100.000	3.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.703.574.104	4.640.190.036,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.703.574.104	4.640.190.036,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.516.800	237.498.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.162.800	525.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.892.700	5.534.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.567.000	2.628.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.999.300	3.580.280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.895.000	225.230.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	60.600.000	57.020.300,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	60.600.000	57.020.300,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.035.000	54.024.657,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	875.000	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.800.000	50.184.657,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.360.000	3.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	493.900.700	447.348.449,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.552.000	71.418.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.650.000	126.044.625,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	262.698.700	249.885.524,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	341.567.400	254.549.222,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	299.847.000	224.497.172,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	25.671.400	24.005.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3.946.000	3.564.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	74.347.300	65.956.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	195.882.300	130.970.772,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	18.570.400	12.622.093,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	18.570.400	12.622.093,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	23.150.000	17.429.957,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	23.150.000	17.429.957,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	280.613.900	225.182.133,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	72.858.100	50.024.764,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.457.400	6.816.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.980.600	13.421.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	45.420.100	29.786.784,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	157.554.100	139.482.923,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.277.600	12.141.609,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	18.771.400	17.113.919,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.739.900	1.461.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	121.765.200	108.766.395,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	50.201.700	35.674.446,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.915.500	7.148.055,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	42.286.200	28.526.391,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02			KEUANGAN	20.899.139.995	14.717.403.503,00	64.238.800	22.705.050,00	1.000.000.000	380.911,00	9.600.620.000	9.597.200.000,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan	20.899.139.995	14.717.403.503,00	64.238.800	22.705.050,00	1.000.000.000	380.911,00	9.600.620.000	9.597.200.000,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.080.166.473	10.192.238.775,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.808.900	5.019.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.808.900	5.019.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.112.082.573	8.624.462.526,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.112.082.573	8.624.462.526,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	225.000.000	224.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	225.000.000	224.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	841.241.300	619.511.851,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.838.200	4.913.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	499.483.100	339.042.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.500	4.702.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.919.500	26.383.610,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.000.000	244.469.951,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.220.000	127.573.216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.220.000	125.573.216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.813.700	590.852.182,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.950.000	41.107.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	381.800.000	290.650.434,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	7.760.000	1.043.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	16.172.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	267.303.700	241.878.498,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.490.946.222	1.761.903.081,00	19.955.800	0,00	1.000.000.000	380.911,00	9.600.620.000	9.597.200.000,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.264.416.000	862.402.173,00	19.955.800	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	170.968.400	112.659.259,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	161.727.800	65.112.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	37.862.500	20.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	90.159.200	56.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	368.920.700	275.220.171,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	296.709.500	263.348.159,00	19.955.800	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	138.067.900	69.262.584,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	422.391.800	245.404.139,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	38.869.600	32.494.810,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	17.030.200	1.344.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	88.556.600	79.400.944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36.508.300	19.631.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	30.609.000	3.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	29.439.700	23.379.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	24.588.600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	156.789.800	86.073.135,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	716.078.422	596.384.521,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	48.880.600	22.172.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	52.211.800	48.910.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	463.997.922	462.347.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	35.663.300	14.459.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	91.418.900	46.851.486,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	23.905.900	1.643.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0,00	0	0,00	1.000.000.000	380.911,00	9.600.620.000	9.597.200.000,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9.600.620.000	9.597.200.000,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0,00	0	0,00	1.000.000.000	380.911,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	88.060.000	57.712.248,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	88.060.000	57.712.248,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.720.221.900	1.495.396.377,00	4.606.000	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.720.221.900	1.495.396.377,00	4.606.000	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	59.379.500	19.200.800,00	4.606.000	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	9.377.500	3.154.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.334.938.000	1.257.090.906,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	22.782.400	4.091.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	116.897.300	90.834.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.738.900	2.970.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	165.108.300	118.054.371,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.607.805.400	1.267.865.270,00	39.677.000	22.705.050,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.607.805.400	1.267.865.270,00	39.677.000	22.705.050,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	47.728.900	37.163.405,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	70.948.800	39.146.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	90.847.400	89.815.644,00	29.777.000	22.705.050,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	136.166.600	121.942.844,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	225.146.400	197.733.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.341.500	38.465.636,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	164.435.500	151.111.457,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	699.357.600	535.056.064,00	9.900.000	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	102.398.000	39.371.470,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	31.434.700	18.058.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	6.452.031.050	6.092.185.151,00	48.869.000	46.519.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.452.031.050	6.092.185.151,00	48.869.000	46.519.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.160.104.250	4.047.879.624,00	31.000.000	30.400.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.454.600	24.422.333,00	15.500.000	15.200.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.454.600	24.422.333,00	15.500.000	15.200.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.716.411.450	3.659.387.838,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.716.411.450	3.659.387.838,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.123.200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	14.123.200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.894.100	191.202.733,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.114.200	990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.765.100	6.788.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.127.000	4.032.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.937.800	3.748.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.950.000	175.642.933,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.442.000	35.957.909,00	15.500.000	15.200.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.442.000	34.027.650,00	15.500.000	15.200.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	1.930.259,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.778.900	136.908.811,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	35.838.461,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.700.000	94.003.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.860.000	5.124.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.028.900	1.942.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.291.926.800	2.044.305.527,00	17.869.000	16.119.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	544.165.900	477.529.676,00	16.119.000	16.119.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	16.446.200	14.930.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	146.801.900	122.219.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	29.619.400	23.008.642,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	180.417.800	151.142.241,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	170.880.600	166.228.813,00	16.119.000	16.119.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	307.761.200	253.954.573,00	1.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	54.762.000	42.907.731,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	94.795.700	75.379.675,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	158.203.500	135.667.167,00	1.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.230.506.000	1.183.814.116,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1.002.728.500	962.086.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	225.246.300	219.516.216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2.531.200	2.211.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	209.493.700	129.007.162,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24.434.100	5.246.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	33.549.700	11.480.788,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	37.895.700	24.345.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	18.038.100	17.698.594,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	46.929.300	45.771.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	24.479.300	10.340.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	24.167.500	14.124.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	215.816.100	187.946.353,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	215.816.100	187.946.353,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	215.816.100	187.946.353,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	215.816.100	187.946.353,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	215.816.100	187.946.353,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	33.966.000	16.729.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	33.966.000	16.729.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	33.966.000	16.729.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6.074.000	1.755.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6.074.000	1.755.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	27.892.000	14.974.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	27.892.000	14.974.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.693.250.490	8.469.363.348,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	8.693.250.490	8.469.363.348,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat Daerah	8.693.250.490	8.469.363.348,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.017.006.090	7.907.937.583,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.069.521.090	7.059.963.953,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.069.521.090	7.059.963.953,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.638.200	255.311.163,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.500.000	250.493.663,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.138.200	4.817.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.229.400	196.693.346,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.029.700	4.723.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.664.300	22.799.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.683.400	13.519.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.402.000	19.165.690,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.450.000	136.485.256,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.085.000	49.991.091,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.465.000	1.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.620.000	48.951.091,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.532.400	345.978.030,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.190.000	73.908.932,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.950.000	92.121.989,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.000.000	1.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.080.000	7.341.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	186.312.400	171.355.609,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	492.505.900	416.771.133,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	426.608.000	371.863.468,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	147.643.700	140.743.268,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	74.618.800	65.223.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	13.014.400	12.018.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	38.041.000	35.343.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	105.325.000	75.190.565,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	47.965.100	43.344.535,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	65.897.900	44.907.665,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	38.445.200	28.670.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	27.452.700	16.237.005,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	183.738.500	144.654.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	183.738.500	144.654.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	91.713.900	72.128.633,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23.156.500	16.895.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	40.447.900	32.866.457,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	28.420.200	22.763.642,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	50.089.192.714	42.920.874.426,00	415.878.023	302.607.950,00	0	0,00	0	0,00
7.01			KECAMATAN	50.089.192.714	42.920.874.426,00	415.878.023	302.607.950,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	10.551.463.962	9.751.217.703,00	3.378.000	3.060.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.255.190.562	9.054.108.285,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.305.500	10.327.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.305.500	10.327.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.874.970.462	8.726.492.236,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.874.970.462	8.726.492.236,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.850.000	42.859.394,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43.850.000	42.859.394,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.476.600	85.946.820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.744.600	1.731.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.373.200	7.368.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.058.800	2.615.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.300.000	74.231.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.600.000	30.694.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.600.000	30.694.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.988.000	157.787.725,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.950.000	74.294.925,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.160.000	10.051.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.878.000	73.441.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	446.865.900	387.694.640,00	3.378.000	3.060.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	397.477.900	338.839.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.440.500	15.516.670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	381.037.400	323.322.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	49.388.000	48.855.550,00	3.378.000	3.060.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	49.388.000	48.855.550,00	3.378.000	3.060.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	755.603.500	262.277.578,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	15.304.600	1.368.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	15.304.600	1.368.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	740.298.900	260.908.978,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	740.298.900	260.908.978,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29.604.000	14.270.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.604.000	14.270.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.604.000	14.270.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64.200.000	32.866.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	64.200.000	32.866.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	64.200.000	32.866.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001		Kelurahan Koto Salayan	478.592.200	421.768.665,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82.760.500	65.211.115,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.915.200	6.976.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.178.900	1.013.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.181.400	2.539.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	348.900	289.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.226.000	1.155.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.050.000	2.474.190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000	450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000	2.024.190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.795.300	55.759.975,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.050.000	18.804.975,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.790.000	1.870.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.955.300	35.085.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	92.047.000	74.442.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	92.047.000	74.442.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	92.047.000	74.442.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	303.784.700	282.115.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	35.099.600	34.225.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	672.000	387.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	34.427.600	33.838.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	268.685.100	247.890.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	268.685.100	247.890.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02		Kelurahan Campago Ipuh	1.532.235.700	1.451.360.291,00	14.400.000	14.208.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.007.000	77.789.829,00	14.400.000	14.208.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.516.600	11.799.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	912.500	905.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.456.800	5.285.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.593.300	1.593.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.574.000	2.035.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.280.000	5.903.944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	680.000	680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000	5.223.944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.210.400	60.086.285,00	14.400.000	14.208.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.050.000	17.641.475,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.420.000	1.170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.740.400	41.274.810,00	14.400.000	14.208.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	875.773.300	817.442.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	875.773.300	817.442.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	875.773.300	817.442.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	570.455.400	556.128.462,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	70.055.400	69.145.064,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.671.000	4.534.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	65.384.400	64.610.364,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	500.400.000	486.983.398,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	500.400.000	486.983.398,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03		Kelurahan Manggis Ganting	1.017.383.500	525.191.088,00	9.000.000	8.850.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	109.552.300	91.802.190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.913.700	10.427.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	682.400	673.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.838.900	4.949.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.202.400	1.119.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.210.000	1.705.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.240.000	12.562.590,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240.000	240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000	12.322.590,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.398.600	68.812.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.050.000	16.379.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.800.000	1.175.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.548.600	51.258.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	290.754.300	100.664.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	290.754.300	100.664.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	290.754.300	100.664.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	617.076.900	332.724.598,00	9.000.000	8.850.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	47.326.900	46.766.000,00	9.000.000	8.850.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.654.500	2.510.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	44.672.400	44.256.000,00	9.000.000	8.850.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	569.750.000	285.958.598,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	569.750.000	285.958.598,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04		Kelurahan Pulai Anak Air	672.550.500	634.908.815,00	14.648.900	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.043.600	81.530.716,00	5.404.700	2.800.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.161.200	12.002.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	922.000	913.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.172.400	7.410.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.086.800	1.699.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.800.000	8.877.023,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	8.077.023,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.082.400	60.650.893,00	5.404.700	2.800.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.050.000	19.440.893,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	2.135.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.352.400	39.075.000,00	5.404.700	2.800.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.744.600	47.411.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.744.600	47.411.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.744.600	47.411.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	531.762.300	505.966.399,00	9.244.200	9.200.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	35.192.600	34.817.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.555.200	1.481.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	33.637.400	33.336.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	496.569.700	471.148.659,00	9.244.200	9.200.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	496.569.700	471.148.659,00	9.244.200	9.200.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05		Kelurahan Puhun Pintu Kabun	1.121.188.500	554.021.366,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.102.700	76.947.573,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.946.900	9.755.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	835.700	730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.480.300	4.739.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.450.900	1.349.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.200.000	957.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.710.000	9.456.154,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	710.000	710.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	8.746.154,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.445.800	57.736.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.050.000	17.848.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.260.000	7.558.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.135.800	32.329.769,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	568.165.800	63.323.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	568.165.800	63.323.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	568.165.800	63.323.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	460.920.000	413.750.193,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	39.465.000	35.843.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.539.300	1.296.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	37.925.700	34.547.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	421.455.000	377.907.093,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	421.455.000	377.907.093,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06		Kelurahan Puhun Tembok	736.898.710	646.865.379,00	8.008.000	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.212.300	72.716.169,00	8.008.000	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.188.800	11.146.320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.847.800	1.847.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.084.200	3.403.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.876.800	1.725.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.400.000	2.189.220,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.190.000	8.295.699,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	590.000	590.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000	7.705.699,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.833.500	53.274.150,00	8.008.000	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.050.000	18.521.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.150.000	590.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.633.500	34.163.000,00	8.008.000	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	96.405.610	62.973.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96.405.610	62.973.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96.405.610	62.973.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	549.280.800	511.176.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	71.873.900	68.088.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.749.500	2.528.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	69.124.400	65.560.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	477.406.900	443.087.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	477.406.900	443.087.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07		Kelurahan Kubu Gulai Bancah	891.392.100	673.193.853,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.520.900	74.211.054,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.315.700	7.423.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	713.800	680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.787.100	2.579.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.634.800	841.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.200.000	1.343.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.560.000	10.700.679,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.560.000	10.700.679,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.645.200	56.086.575,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.050.000	19.789.075,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.610.000	125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.985.200	36.172.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	309.264.700	184.952.699,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	309.264.700	184.952.699,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	309.264.700	184.952.699,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	493.606.500	414.030.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	35.185.100	34.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.058.000	1.575.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	33.127.100	32.675.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	458.421.400	379.780.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	458.421.400	379.780.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08		Kelurahan Campago Guguk Bulek	931.441.950	858.663.550,00	2.600.000	2.600.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.225.450	76.744.900,00	2.600.000	2.600.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.971.450	6.892.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.224.500	1.001.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.566.950	3.371.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	540.000	540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.660.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.800.000	10.122.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	10.122.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.454.000	59.729.650,00	2.600.000	2.600.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.050.000	18.480.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.880.000	5.896.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.524.000	35.353.000,00	2.600.000	2.600.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	268.106.700	261.987.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	268.106.700	261.987.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	268.106.700	261.987.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	576.109.800	519.931.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	92.125.200	69.904.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.331.900	4.075.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	87.793.300	65.829.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	483.984.600	450.026.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.08	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	483.984.600	450.026.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09		Kelurahan Garegeh	612.324.450	434.309.314,00	47.500.400	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.651.450	57.966.634,00	2.962.200	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.562.350	8.329.670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.028.600	694.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.380.750	2.299.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.027.000	46.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.146.000	3.310.670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.140.000	6.075.864,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.040.000	6.075.864,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.949.100	43.561.100,00	2.962.200	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	8.391.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000	1.220.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.099.100	33.950.000,00	2.962.200	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	226.214.800	160.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	226.214.800	160.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	226.214.800	160.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	310.458.200	216.282.680,00	44.538.200	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	37.390.200	36.510.790,00	44.538.200	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.803.500	2.481.590,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	34.586.700	34.029.200,00	44.538.200	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	273.068.000	179.771.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.09	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	273.068.000	179.771.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Guguk Panjang	9.397.329.216	8.708.774.588,00	54.242.800	52.035.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.748.947.316	7.574.364.084,00	24.565.400	23.855.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.940.300	18.090.974,00	20.525.400	20.525.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.940.300	18.090.974,00	20.525.400	20.525.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.133.311.592	6.988.380.787,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.133.311.592	6.988.380.787,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	145.000.000	138.649.878,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	145.000.000	138.649.878,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.799.300	105.493.614,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.414.500	3.055.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.116.500	17.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.324.300	6.170.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000	759.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.744.000	78.049.164,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	4.040.000	3.330.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	4.040.000	3.330.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.480.000	32.573.676,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.980.000	32.073.676,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.416.124	291.175.155,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.100.000	82.949.595,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000	2.228.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	212.396.124	205.997.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	544.406.300	373.253.125,00	2.899.900	2.700.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	497.693.000	329.908.925,00	2.899.900	2.700.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.475.500	10.271.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	483.217.500	319.637.925,00	2.899.900	2.700.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	46.713.300	43.344.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	46.713.300	43.344.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	985.547.800	663.424.310,00	22.672.000	21.880.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	111.795.600	101.113.352,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	111.795.600	101.113.352,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	873.752.200	562.310.958,00	22.672.000	21.880.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	873.752.200	562.310.958,00	22.672.000	21.880.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.530.200	26.167.574,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36.530.200	26.167.574,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.530.200	26.167.574,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	81.897.600	71.565.495,00	4.105.500	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	81.897.600	71.565.495,00	4.105.500	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	81.897.600	71.565.495,00	4.105.500	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01		Kelurahan Kayu Kubu	626.231.700	513.554.529,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.856.200	59.707.524,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.791.300	17.715.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.515.600	1.044.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.501.400	5.566.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.234.300	3.085.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.560.000	6.039.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.160.000	18.006.224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	760.000	760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	17.246.224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.904.900	23.985.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.531.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	2.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.514.900	10.074.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	131.603.500	32.196.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	131.603.500	32.196.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	131.603.500	32.196.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	427.772.000	421.650.105,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	76.702.100	72.414.705,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.856.400	1.788.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	74.845.700	70.626.705,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	351.069.900	349.235.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.01	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	351.069.900	349.235.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02		Kelurahan Pakan Kurai	986.306.900	633.486.682,00	23.546.000	720.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.108.000	70.370.702,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.822.200	21.729.152,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.441.700	2.363.412,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.315.500	10.381.290,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.785.000	3.533.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.300.000	3.470.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.600.000	17.518.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000	16.918.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.685.800	31.123.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.510.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	4.675.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.455.800	14.938.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	337.310.600	58.713.000,00	3.326.000	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	337.310.600	58.713.000,00	3.326.000	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	337.310.600	58.713.000,00	3.326.000	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	556.888.300	504.402.980,00	20.220.000	720.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	69.017.000	66.996.600,00	20.220.000	720.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.281.000	2.047.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	65.736.000	64.949.000,00	20.220.000	720.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	487.871.300	437.406.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.02	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	487.871.300	437.406.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03		Kelurahan Benteng Pasar Atas	488.188.600	434.350.000,00	19.971.000	19.970.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.306.500	76.902.150,00	19.971.000	19.970.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.446.700	11.854.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	403.100	394.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.428.500	6.299.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.385.100	1.916.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.250.000	1.265.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	19.971.000	19.970.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	19.971.000	19.970.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.100.000	13.321.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	460.000	460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.640.000	12.861.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.759.800	51.725.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.505.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.289.800	40.220.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81.877.300	66.623.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	81.877.300	66.623.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	81.877.300	66.623.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	317.004.800	290.824.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	90.851.900	74.250.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.200.000	1.347.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	86.651.900	72.902.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	226.152.900	216.574.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.03	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	226.152.900	216.574.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04		Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	603.412.800	462.703.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.611.800	94.152.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.923.800	26.889.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.174.800	1.115.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.757.800	8.503.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.069.200	2.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.942.000	12.710.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.440.000	8.466.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.940.000	7.966.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.248.000	58.796.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.543.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	2.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.858.000	44.412.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.720.600	25.187.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.720.600	25.187.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.720.600	25.187.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	468.080.400	343.362.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80.296.700	79.724.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.353.000	1.294.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	78.943.700	78.430.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	387.783.700	263.638.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.04	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	387.783.700	263.638.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05		Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	1.097.665.861	797.196.530,00	75.339.300	64.700.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	117.950.250	97.872.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.241.900	15.557.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	696.500	693.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.625.300	7.619.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.540.100	2.954.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.400.000	2.310.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.230.000	8.287.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	590.000	590.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.640.000	7.697.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.478.350	74.027.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.550.000	27.373.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.445.850	9.487.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.482.500	37.167.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	351.936.011	123.321.150,00	25.339.300	20.200.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	351.936.011	123.321.150,00	25.339.300	20.200.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	351.936.011	123.321.150,00	25.339.300	20.200.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	627.779.600	576.003.150,00	50.000.000	44.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	83.122.700	56.939.000,00	50.000.000	44.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.321.100	4.958.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	77.801.600	51.980.500,00	50.000.000	44.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	544.656.900	519.064.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.05	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	544.656.900	519.064.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06		Kelurahan Tarok Dipo	1.832.201.102	1.231.807.368,00	76.798.473	74.556.500,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.194.500	104.605.168,00	29.969.273	28.860.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.188.100	33.883.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	553.000	553.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.261.800	9.102.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.023.300	9.565.730,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.650.000	1.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.700.000	13.013.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	29.969.273	28.860.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	29.969.273	28.860.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.110.000	9.941.288,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.810.000	9.641.288,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.896.400	60.779.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.534.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.420.000	1.420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.926.400	47.825.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	366.401.902	40.705.500,00	17.890.600	16.816.500,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	366.401.902	40.705.500,00	17.890.600	16.816.500,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	366.401.902	40.705.500,00	17.890.600	16.816.500,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.357.604.700	1.086.496.700,00	28.938.600	28.880.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	129.170.500	126.953.600,00	20.000.000	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.042.800	1.951.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	127.127.700	125.002.100,00	20.000.000	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.228.434.200	959.543.100,00	8.938.600	8.880.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.06	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.228.434.200	959.543.100,00	8.938.600	8.880.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07		Kelurahan Bukit Apit Puhun	1.088.760.699	797.747.900,00	15.008.000	14.958.450,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.219.399	97.771.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.164.199	27.308.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.995.000	2.933.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.169.200	8.039.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.305.999	4.943.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.714.000	9.412.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.590.000	17.806.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390.000	390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.200.000	17.416.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.465.200	52.657.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	11.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.880.000	2.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.035.200	38.727.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	324.210.700	167.818.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	324.210.700	167.818.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	324.210.700	167.818.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	662.330.600	532.158.000,00	15.008.000	14.958.450,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	77.025.900	75.243.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.845.000	1.793.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	75.180.900	73.450.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	585.304.700	456.914.800,00	15.008.000	14.958.450,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.07	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	585.304.700	456.914.800,00	15.008.000	14.958.450,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	10.386.303.114	9.578.910.455,00	14.528.000	14.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.636.526.814	8.362.326.955,00	14.528.000	14.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.652.900	34.866.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.652.900	34.866.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.745.830.114	7.653.678.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.745.830.114	7.653.678.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.834.600	194.057.954,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.834.600	194.057.954,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.927.400	87.874.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.405.900	8.813.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.377.900	7.613.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.483.600	9.452.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.860.000	11.385.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.800.000	50.610.790,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.400.000	110.466.415,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.400.000	108.466.415,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.881.800	281.383.096,00	14.528.000	14.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.200.000	155.757.320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.150.000	21.836.320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.531.800	103.789.456,00	14.528.000	14.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	947.636.200	560.972.671,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	872.960.100	487.442.721,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	378.022.500	82.542.391,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	494.937.600	404.900.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	74.676.100	73.529.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	74.676.100	73.529.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	643.571.800	532.750.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	643.571.800	532.750.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	643.571.800	532.750.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	74.850.300	63.240.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	74.850.300	63.240.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	74.850.300	63.240.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	83.718.000	59.618.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	83.718.000	59.618.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	83.718.000	59.618.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01		Kelurahan Belakang Balok	620.037.900	413.382.480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.486.100	56.029.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.724.900	16.180.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.502.800	5.939.030,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.062.100	3.120.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.160.000	7.120.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.761.200	39.849.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.761.200	39.849.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	130.152.800	51.411.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	130.152.800	51.411.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	130.152.800	51.411.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	418.399.000	305.940.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	74.652.600	63.410.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.880.800	3.753.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	70.771.800	59.657.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	343.746.400	242.530.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.01	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	343.746.400	242.530.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02		Kelurahan Birugo	788.041.200	645.705.494,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.216.300	45.247.490,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.869.500	12.034.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.625.000	1.203.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.074.500	2.952.590,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.170.000	7.879.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.346.800	33.212.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.346.800	33.212.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	210.190.600	134.712.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	210.190.600	134.712.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	210.190.600	134.712.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	510.634.300	465.745.954,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	79.205.500	74.681.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.355.700	3.428.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	74.849.800	71.253.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	431.428.800	391.064.354,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.02	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	431.428.800	391.064.354,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03		Kelurahan Aur Kuning	787.254.400	616.181.368,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.559.500	57.999.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.898.400	15.270.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.691.700	7.107.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.042.700	3.412.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.164.000	4.750.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.661.100	42.728.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.661.100	42.728.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	284.214.500	180.138.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	284.214.500	180.138.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	284.214.500	180.138.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	427.480.400	378.043.938,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	84.323.300	80.903.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.901.900	6.854.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	77.421.400	74.048.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	343.157.100	297.140.558,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.03	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	343.157.100	297.140.558,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04		Kelurahan Sapiran	657.575.800	427.658.327,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.466.900	52.647.214,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.627.900	13.731.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.103.700	6.926.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.354.200	2.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.170.000	4.705.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.839.000	38.916.114,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.839.000	38.916.114,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	114.638.000	55.706.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	114.638.000	55.706.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	114.638.000	55.706.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	473.470.900	319.305.013,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	48.419.500	45.396.614,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.653.400	5.035.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	42.766.100	40.361.514,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	425.051.400	273.908.399,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.04	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	425.051.400	273.908.399,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05		Kelurahan Kubu Tanjung	588.410.050	452.942.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.934.050	54.765.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.278.850	19.445.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.060.200	5.311.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.048.650	2.771.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.170.000	11.362.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.655.200	35.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.655.200	35.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	124.114.900	83.482.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	124.114.900	83.482.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	124.114.900	83.482.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	399.361.100	314.694.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	34.794.100	29.719.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.269.000	4.048.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	30.525.100	25.671.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	364.567.000	284.974.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.05	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	364.567.000	284.974.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06		Kelurahan Pakan Labuah	625.512.900	515.315.650,00	17.429.300	15.600.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73.453.100	49.316.200,00	15.600.000	15.600.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.397.000	12.527.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.492.300	4.039.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.064.700	1.803.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.840.000	6.684.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.056.100	36.789.100,00	15.600.000	15.600.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.056.100	36.789.100,00	15.600.000	15.600.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	130.346.000	83.680.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	130.346.000	83.680.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	130.346.000	83.680.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	421.713.800	382.318.900,00	1.829.300	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	95.363.100	73.872.650,00	1.829.300	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.525.800	5.340.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	89.837.300	68.532.250,00	1.829.300	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	326.350.700	308.446.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.06	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	326.350.700	308.446.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07		Kelurahan Ladang Cakiah	426.287.400	313.525.930,00	12.219.000	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.761.800	48.902.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.699.700	11.361.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.458.100	5.179.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.071.600	2.688.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.170.000	3.494.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.062.100	37.540.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.062.100	37.540.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	129.548.400	45.825.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	129.548.400	45.825.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	129.548.400	45.825.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	233.977.200	218.797.630,00	12.219.000	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	43.787.400	38.875.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.582.400	1.582.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	42.205.000	37.293.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	190.189.800	179.921.930,00	12.219.000	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.07	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	190.189.800	179.921.930,00	12.219.000	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08		Kelurahan Parit Antang	544.201.500	426.131.001,00	7.260.850	4.850.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.151.000	57.890.656,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.759.500	15.772.857,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.823.500	5.633.757,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.050.000	850.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.886.000	9.289.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.391.500	42.117.799,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.391.500	42.117.799,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	197.662.600	103.280.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	197.662.600	103.280.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	197.662.600	103.280.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	277.387.900	264.960.045,00	7.260.850	4.850.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	45.049.900	39.868.476,00	7.260.850	4.850.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.837.100	4.225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	40.212.800	35.643.476,00	7.260.850	4.850.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	232.338.000	225.091.569,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.08	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	232.338.000	225.091.569,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	21.145.842.760	19.733.992.011,00	36.081.200	15.762.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	21.145.842.760	19.733.992.011,00	36.081.200	15.762.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.145.842.760	19.733.992.011,00	36.081.200	15.762.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.891.958.686	2.552.077.454,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.275.100	21.792.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.275.100	21.792.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.434.573.686	2.214.574.229,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.434.573.686	2.214.574.229,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.218.700	154.145.369,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.995.500	2.857.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.484.200	12.948.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.324.200	7.515.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.469.800	7.568.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.945.000	123.256.469,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.400.000	22.067.993,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.600.000	21.267.993,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.491.200	139.497.063,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.310.000	84.033.675,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.260.000	1.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.921.200	54.103.388,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.182.939.600	1.051.658.796,00	5.716.500	5.661.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.182.939.600	1.051.658.796,00	5.716.500	5.661.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.057.649.900	938.762.115,00	5.716.500	5.661.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	125.289.700	112.896.681,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	14.721.007.174	14.290.957.646,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	14.721.007.174	14.290.957.646,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.394.934.950	13.083.446.429,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.326.072.224	1.207.511.217,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	268.410.000	67.153.841,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	268.410.000	67.153.841,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	219.310.000	41.121.263,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	49.100.000	26.032.578,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	355.775.600	334.313.078,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	355.775.600	334.313.078,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	355.775.600	334.313.078,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.725.751.700	1.437.831.196,00	30.364.700	10.101.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.725.751.700	1.437.831.196,00	30.364.700	10.101.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	428.847.600	354.662.752,00	30.364.700	10.101.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.296.904.100	1.083.168.444,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			Jumlah	727.886.843.406	665.945.695.972,54	69.943.686.777	63.533.202.219,77	1.000.000.000	380.911,00	9.600.620.000	9.597.200.000,00

Bukittinggi, Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	Ref	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	33.057.673.164,80	77.322.187.688,46
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	33.057.673.164,80	(77.322.187.688,46)
SubTotal		-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2	35.363.273.389,89	33.057.673.164,80
SubTotal		35.363.273.389,89	33.057.673.164,80
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2	-	-
Lain-lain	5.2	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2	35.363.273.389,89	33.057.673.164,80

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Rekening	Uraian	Ref	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL				
7	**PENDAPATAN**		**841.546.027.198,07**	**753.034.506.635,65**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	5.4.1.1	**134.814.440.618,61**	**142.987.180.928,20**
7.1.01	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	54.580.535.186,00	53.111.344.882,00
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	62.686.102.961,39	39.741.106.632,00
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	10.973.923.679,00	10.097.553.826,00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	6.573.878.792,22	40.037.175.588,20
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO		**134.814.440.618,61**	**142.987.180.928,20**
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	5.4.1.1.2	**609.011.899.262,46**	**588.770.953.422,00**
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.1.2.1	562.524.201.758,00	554.987.256.154,00
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.1.2.2	46.487.697.504,46	33.783.697.268,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO		**609.011.899.262,46**	**588.770.953.422,00**
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**	5.4.1.1.3	**97.719.687.317,00**	**21.276.372.285,45**
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO		97.719.687.317,00	21.142.359.842,00
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-		0,00	134.012.443,45
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		**97.719.687.317,00**	**21.276.372.285,45**
	JUMLAH PENDAPATAN		**841.546.027.198,07**	**753.034.506.635,65**
8	**BEBAN**	5.4.1.2	**778.949.516.230,76**	**766.907.930.194,15**
8.1	**BEBAN OPERASI**		**679.991.012.156,65**	**668.082.892.610,87**
8.1.01	Beban Pegawai	5.4.1.2.1	337.675.834.135,81	302.975.149.463,20
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.4.1.2.2	275.543.981.565,55	311.999.875.352,72
8.1.04	Beban Subsidi	5.4.1.2.3	2.499.986.478,00	2.499.916.363,00
8.1.05	Beban Hibah	5.4.1.2.4	50.747.190.380,00	42.061.418.508,00
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.5	2.897.600.000,00	4.793.000.000,00
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.6	10.626.419.597,29	3.753.532.923,95
	Jumlah Beban Operasi		**679.991.012.156,65**	**668.082.892.610,87**
8.1.08	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	5.4.1.2.7	**89.360.923.163,11**	**89.373.568.583,28**
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		89.360.923.163,11	89.373.568.583,28
8.3	**BEBAN TRANSFER**		**9.597.200.000,00**	**9.450.620.000,00**
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	5.4.1.2.8	9.597.200.000,00	9.450.620.000,00
	JUMLAH BEBAN TRANSFER		**9.597.200.000,00**	**9.450.620.000,00**
8.2	**BEBAN TIDAK TERDUGA**		**380.911,00**	**849.000,00**
8.2.01	Beban Tidak Terduga	5.4.1.2.9	380.911,00	849.000,00
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA		**380.911,00**	**849.000,00**
	JUMLAH BEBAN		**778.949.516.230,76**	**766.907.930.194,15**
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		**62.596.510.967,31**	**(13.873.423.558,50)**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		5.4.2		
8.4	**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**		**5.337.791.842,60**	**311.366.209,17**
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		4.258.127.686,60	311.366.209,17
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		1.079.664.156,00	0,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		**5.337.791.842,60**	**311.366.209,17**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(5.337.791.842,60)**	**(311.366.209,17)**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**57.258.719.124,71**	**(14.184.789.767,67)**
POS LUAR BIASA				
8.5	**BEBAN LUAR BIASA**		**0,00**	**0,00**
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA		**0,00**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.3	**57.258.719.124,71**	**(14.184.789.767,67)**

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN IV
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	Ref	2024	2023
EKUITAS AWAL	5.6	2.023.426.461.579,57	2.033.022.032.295,63
SURPLUS/DEFISIT-LO		57.258.719.124,71	(14.184.789.767,67)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
Lain-lain		(26.432.641.161,19)	4.589.219.051,61
EKUITAS AKHIR		**2.054.252.539.543,09**	**2.023.426.461.579,57**

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN V
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
NERACA
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Rekening	Uraian	Ref	2024	2023
1	**ASET**	**5.3.1**	**2.061.791.213.670,66**	**2.030.035.046.296,96**
1.1	**ASET LANCAR**	**5.3.1.1**	**84.142.784.429,32**	**82.968.942.134,69**
1.1.01	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1	35.411.517.227,89	33.224.700.728,80
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.	30.169.727.325,33	27.739.504.611,02
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.	0,00	166.538.000,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.	797.687.446,00	0,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	5.3.1.1.	3.024.590.848,56	2.501.217.531,78
1.1.01.05	Kas Dana BOS	5.3.1.1.	0,00	986.838.017,00
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.	0,00	1.830.113.005,00
1.1.01.07	Kas Lainnya	5.3.1.1.	0,00	489.564,00
1.1.01.10	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.	160.064.456,00	0,00
1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.	1.259.447.152,00	0,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1	20.540.230.694,00	16.057.104.725,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1	28.616.574.795,00	12.569.263.066,00
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1	10.017.289.316,00	10.097.553.826,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1	2.978.276.787,00	19.810.106.983,00
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1	390.170.000,00	0,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1	10.478.026.512,00	8.824.214.888,00
1.1.09	Piutang Lainnya	5.3.1.1	246.316.601,00	246.316.601,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	5.3.1.1	(33.662.508.807,77)	(26.237.648.977,97)
1.1.12	Persediaan	5.3.1.1	9.126.891.304,20	8.377.330.294,86
	JUMLAH ASET LANCAR		**84.142.784.429,32**	**82.968.942.134,69**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**5.3.1.2.**	**63.087.891.998,08**	**63.264.372.647,68**
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.	546.549.684,40	610.913.343,00
1.2.01.05	Dana Bergulir	5.3.1.2.	546.549.684,40	610.913.343,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN		**546.549.684,40**	**610.913.343,00**
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.	62.541.342.313,68	62.653.459.304,68
1.2.02.01	Penyertaan Modal	5.3.1.2.	62.541.342.313,68	62.653.459.304,68
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN		**62.541.342.313,68**	**62.653.459.304,68**
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**63.087.891.998,08**	**63.264.372.647,68**
1.3	**ASET TETAP**	**5.3.1.3**	**1.894.807.796.735,86**	**1.861.109.977.328,03**
1.3.01	Tanah	5.3.1.3	649.275.694.505,20	565.667.194.505,20
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3	440.132.596.412,19	434.804.893.735,80
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3	1.075.794.578.722,43	1.050.671.756.080,44
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3	726.828.698.866,68	693.238.082.359,11
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3	30.364.684.504,80	31.350.981.575,80
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3	34.190.928.799,08	33.991.683.715,68
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3	(1.061.779.385.074,52)	(948.614.614.644,00)
	JUMLAH ASET TETAP		**1.894.807.796.735,86**	**1.861.109.977.328,03**
	JUMLAH DANA CADANGAN		**0,00**	**0,00**
1.5	**ASET LAINNYA**	**5.3.1.4**	**19.752.740.507,40**	**22.691.754.186,56**
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4	48.175.533,00	48.175.533,00
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4	16.246.002.000,00	16.360.038.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4	8.796.753.581,00	8.596.953.581,00
1.5.04	Aset Lain-lain	5.3.1.4	40.696.816.467,45	38.189.932.375,94
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4	(8.218.416.804,00)	(7.786.257.943,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4	(37.845.126.270,05)	(35.433.257.360,38)
1.5.07	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.4	28.536.000,00	2.716.170.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA		**19.752.740.507,40**	**22.691.754.186,56**
1.6	**PROPERTI INVESTASI**	**5.3.1.5**		
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.5	114.036.000,00	0,00
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.5	(114.036.000,00)	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET		**2.061.791.213.670,66**	**2.030.035.046.296,96**
2	**KEWAJIBAN**	**5.3.2**	**7.538.674.127,57**	**6.608.584.717,39**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**5.3.2.1**	**7.538.674.127,57**	**6.608.584.717,39**
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1	48.243.838,00	0,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1	597.536.465,00	384.879.789,67
2.1.06	Utang Belanja	5.3.2.1	4.967.471.600,57	5.952.258.773,72
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1	1.925.422.224,00	271.446.154,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**7.538.674.127,57**	**6.608.584.717,39**
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN		**7.538.674.127,57**	**6.608.584.717,39**
3	**EKUITAS**		**2.054.252.539.543,09**	**2.023.426.461.579,57**
3.1	**EKUITAS**		**2.054.252.539.543,09**	**2.023.426.461.579,57**
3.1.01	Ekuitas		2.054.252.539.543,09	2.023.426.461.579,57
	JUMLAH EKUITAS		**2.054.252.539.543,09**	**2.023.426.461.579,57**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**2.061.791.213.670,66**	**2.030.035.046.296,96**

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN VI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	Ref	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk			
Pajak Daerah		50.098.130.579,00	51.690.816.406,00
Retribusi Daerah		51.629.686.961,72	39.222.055.481,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.860.884.216,00	8.363.843.874,00
Lain-lain PAD yang Sah		18.475.215.556,22	23.603.666.700,20
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		566.436.096.135,00	554.987.256.154,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		44.833.885.880,46	28.741.470.215,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	134.012.443,45
Jumlah Arus Kas Masuk		741.333.899.328,40	706.743.121.273,65
Arus Kas Keluar		-	-
Belanja Pegawai		336.607.731.061,67	308.535.703.099,00
Belanja Barang dan Jasa		272.602.571.149,75	308.199.944.742,03
Belanja Subsidi		2.499.986.478,00	2.499.916.363,00
Belanja Hibah		51.339.007.283,12	43.676.370.940,88
Belanja Bantuan Sosial		2.897.600.000,00	4.853.000.000,00
Belanja Tidak Terduga		380.911,00	849.000,00
Belanja Bantuan Keuangan		9.597.200.000,00	9.450.620.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		675.544.476.883,54	677.216.404.144,91
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**65.789.422.444,86**	**29.526.717.128,74**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2	-	-
Arus Kas Masuk			
Hasil Penjualan Aset Lainnya		48.180.000,00	232.326.899,00
Jumlah Arus Kas Masuk		48.180.000,00	232.326.899,00
Arus Kas Keluar		-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		12.261.224.480,70	26.111.089.608,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		31.435.241.904,22	27.005.206.763,60
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		18.357.697.907,85	19.501.037.779,33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		1.278.037.927,00	1.406.224.400,00
Belanja Modal Aset Lainnya		199.800.000,00	-
Penyertaan Modal Daerah		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		63.532.002.219,77	74.023.558.551,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(63.483.822.219,77)**	**(73.791.231.652,40)**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.3	-	-
Arus Kas Masuk		-	-
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		28.737.359.396,00	49.239.883.533,00
Jumlah Arus Kas Masuk		28.737.359.396,00	49.239.883.533,00
Arus Kas Keluar		-	-
Koreksi SiLPA			-
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		28.737.359.396,00	49.240.120.533,00
Jumlah Arus Kas Keluar		28.737.359.396,00	49.240.120.533,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**-**	**(237.000,00)**
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.4	**2.186.816.499,09**	**(44.097.723.959,66)**
Saldo Awal Kas		**33.224.700.728,80**	**77.322.424.688,46**
Saldo Akhir Kas		**35.411.517.227,89**	**33.224.700.728,80**
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:		-	-
Kas di Kas Daerah		30.169.727.325,33	27.739.504.611,02
Kas di Bendahara Penerimaan		-	166.538.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		797.687.446,00	-
Kas di BLUD		3.024.590.848,56	2.501.217.531,78
Kas Dana BOSP		160.064.456,00	986.838.017,00
Kas BOK		1.259.447.152,00	1.830.113.005,00
Kas Lainnya		-	489.564,00

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

WALIKOTA BUKITTINGGI

Jln. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi 26122 – Sumatera Barat
Telp. : (0752) 33369 – 21879 Fax.:(0752) 32767

Bukittinggi, 9 Mei 2025 M
11 Dzulqaidah 1446 H

Nomor : 905/ 319A /BK.05/V-2025
Lampiran : -
Hal : Surat Representasi Manajemen

Yth. Bapak Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat
di
Padang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan representasi sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Surat representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material, sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan yaitu:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kota Bukittinggi telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2024 yang belum dicatat atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
    a. Kehandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dihitung dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
    b. Ketaatan kepada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengindentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tahun 2024.

WALI KOTA BUKITTINGGI



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

WALIKOTA BUKITTINGGI

Jln. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi 26122 – Sumatera Barat
Telp. : (0752) 33369 – 21879 Fax.:(0752) 32767

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024, terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (f) Laporan Arus Kas (LAK); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Aset berupa Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bukittinggi, Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas sifat-Nya yang Rahman dan Rahim serta karunia-Nya, penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Tidak lupa juga kami persembahkan shalawat serta salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan semua ummatnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman, semoga kelak kita diberikan syafaat oleh beliau sebagai ganjaran banyak bershalawat dan keterikatan hati dengan beliau.

Laporan keuangan ini disusun dan disampaikan sebagai wujud tanggung jawab konstitusional Kepala Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan ini adalah laporan keuangan konsolidasian, yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan yakni Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Konsolidasi sebagai proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dengan mengeliminasi akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu pelaporan entitas tunggal. Terdapat 30 (tiga puluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi yang digabungkan kedalam 1 (satu) entitas pelaporan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Laporan yang disajikan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri dari 5 (lima) laporan yaitu (1) Laporan Realiasi Anggaran (LRA), (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (LO), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan menggunakan kaidah-kaidah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kota Bukittinggi

sebagai entitas pelaporan melakukan konsolidasi dan menghasilkan 7 (tujuh) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (6) Laporan Arus Kas (LAK) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, LKPD ini disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, BPK RI melakukan serangkaian pemeriksaan, serta memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan. Opini merupakan penyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan beserta laporan keuangan yang telah diaudit kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk memberikan informasi serta pengungkapan yang memadai (*full disclosur*e) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* serta sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi kedepannya.

Wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Bukittinggi, Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAZMAD RAMLAN NURMATIAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **vi**

BAB I Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi **1**
1.1. Umum 1
1.2. Domisili dan Bentuk Geografis 2
1.3. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4
1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 7
1.4.1. Maksud 7
1.4.2. Tujuan 7
1.5. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi 8
1.6. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 10

BAB II Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro **13**
2.1. Kebijakan Keuangan 13
2.1.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 15
2.1.2. Kebijakan Pendapatan Daerah 20
2.1.3. Kebijakan Belanja Daerah 29
2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah 38
2.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 38
2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita 40
2.2.3. Laju Inflasi 41
2.2.4. Ketimpangan Pendapatan 43
2.2.5. Tingkat Kemiskinan 45
2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka 46
2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia 48
2.3. Penetapan APBD dan *Recofusing* Anggaran 49

BAB III Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan **51**
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 51
3.2. Hambatan/Kendala dan Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target Kinerja 58

BAB IV Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi **60**
4.1. Struktur Laporan Keuangan 60
4.2. Kebijakan Akuntansi 64
4.3. Asumsi Dasar Akuntansi 64
4.3.1. Asumsi Kemandirian Entitas 64
4.3.2. Asumsi Kesinambungan Entitas 65
4.3.3.Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*) 65
4.4. Penggina Laporan Keuangan 65
4.5. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 65
4.5.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunanan Laporan 65
4.5.2. Prinsip Nilai Perolehan *(Historical Cost Principle)* 66
4.5.3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*) 66
4.5.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over form)* 66
4.5.5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity*) 67
4.5.6. Prinsip Konsistensi (*Consistency*) 67
4.5.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*) 67

4.5.8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentatio*)..... 67
4.6. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusuna Laporan Keuangan 67
4.7. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian 68
4.7.1. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 68
4.7.2. Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal 69
4.7.3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 69
4.7.4. Jenis dan Unsur Laporan Keuangan 70
4.7.5. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan 70
4.8. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan..... 71
4.8.1. Akuntansi Pendapatan LRA 71
4.8.2. Akuntansi Belanja 71
4.8.3. Akuntansi Pembiayaan 71
4.8.4. Akuntansi Pendapatan-LO 72
4.8.5. Akuntansi Beban 74
4.8.6. Aset..... 75
4.8.7. Kewajiban..... 93
4.8.8. Ekuitas 97
4.8.9. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)..... 98
4.8.10. Perjanjian Konsesi Jasa 99
4.8.11. Properti Investasi 99

BAB V Penjelasan pos-pos laporan keuangan 102
5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 102
5.1.1. Pendapatan Daerah..... 106
5.1.2. Belanja Daerah..... 121
5.1.3. Pembiayaan Daerah 136
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 139
5.3. Neraca 141
5.3.1. Aset..... 141
5.3.2. Kewajiban..... 229
5.3.3. Ekuitas 239
5.4. Laporan Operasional 240
5.4.1. Kegiatan Operasional 240
5.4.1. Kegiatan Non Operasional 269
5.5. Laporan Arus Kas 271
5.5.1. Arus dari Aktivitas Operasi 272
5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 273
5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran 274
5.5.4. Kenaikan/Penurunan Kas 275
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas 276

BAB VI Informasi Lainnya 278
6.1. Aset (Tanah) dan Bangunan Puskesmas Pembantu Bukit apit Dikuasai Pihak lain.....278
6.2. Informasi Dana dan Aset Hibah..... 279
6.3. Informasi Sengketa Tanah untuk Pembangunan Gedung DPRD Kota Bukittinggi 279
6.4. Kewajiban Kontigensi..... 282

BAB VII Penutup.....
Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jarak Kota Bukittinggi dengan Kota-Kota di Sumatera 3

Tabel 1.2 Jumlah Kelurahan, Luas dan Persentase Daerah dan Posisi Geografis per Kecamatan 3

Tabel 1.3 SKPD Selaku Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 5

Tabel 2.1 Perubahan Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 16

Tabel 2.2 Perubahan Target Belanja Tahun Anggaran 2024 18

Tabel 2.3 Perubahan Target Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 20

Tabel 2.4 Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024 28

Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 29

Tabel 2.6 Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 s.d 2024 34

Tabel 2.7 Perubahan Belanja Daerah Beserta Realisasi Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 37

Tabel 2.8 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan daerah setara Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 40

Tabel 2.9 Perkembangan PDRB Perkapita Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024 40

Tabel 2.10 Perbandingan Inflasi dan Laju Inflasi Kota Bukittinggi dengan daerah setara di Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 43

Tabel 2.11 Perbandingan Indeks Gini Kota Bukittinggi dengan Daerah Setara Tahun 2021-2023 44

Tabel 2.12 Penduduk Miskin Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024 45

Tabel 2.13 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024 47

Tabel 2.14 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran Kota Bukittinggi dengan daerah setara di Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 47

Tabel 2.15 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024 48

Table 2.16 Tahapan Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2024 50

Tabel 3.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 dan Tahun 2023 52

Tabel 3.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kota Bukittinggi Tahun 2024 55

Tabel 3.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Bukittinggi Selain Belanja Operasi Tahun 2024 55
Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun 2024 56
Tabel 3.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA SKPD Tahun Anggaran 2024 57
Tabel 3.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja-LRA SKPD Tahun Anggaran 2024 57
Tabel 4.1 Kapitalisasi Aset Tetap 81
Tabel 4.2 UPTD yang Telah Menerapkan PPK BLUD 98
Tabel 5.1 Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2024 103
Tabel 5.2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2023 105
Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan 2023 106
Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023 107
Tabel 5.5 Pemetaan Nomenklatur Pendapatan Pajak Daerah 107
Tabel 5.6 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023 107
Tabel 5.7 Pemetaan Nomenklatur Pendapatan Retribusi Daerah 107
Tabel 5.8 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023 108
Tabel 5.9 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2024 dan 2023 109
Tabel 5.10 Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023 109
Tabel 5.11 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023 111
Tabel 5.12 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023 112
Tabel 5.13 Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023 114
Tabel 5.14 Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 dan 2023 115
Tabel 5.15 Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dan 2023 116
Tabel 5.16 Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Dan Organisasi Tahun 2024 dan 2023 117
Tabel 5.17 Realisasi Belanja Berdasarkan Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah dan Fungsi Tahun 2024 Dan 2023 117
Tabel 5.18 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2023 .....
Tabel 5.19 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023 .....
Tabel 5.20 Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023 .....

Tabel 5.21 Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 .....
Tabel 5.22 Belanja Barang Tahun 2024 .....
Tabel 5.23 Belanja Jasa Tahun 2024 .....
Tabel 5.24 Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024.....
Tabel 5.25 Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 dan 2023 .....
Tabel 5.26 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023.....
Tabel 5.27 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 .....
Tabel 5.28 Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023 (Menurut Jenis Belanja) .....
Tabel 5.29 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024.....
Tabel 5.30 Rincian SiLPA Tahun 2024 .....
Tabel 5.31 Daftar Kas Dibagian Aset Lancar Neraca .....
Tabel 5.32 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Kota Bukittinggi Tahun 2024 dan 2023.....
Tabel 5.33 Daftar Saldo Kas di Rekening Kas Daerah .....
Tabel 5.34 Daftar Rekening Penampung Satuan Kerja.....
Tabel 5.35 Mutasi Kas Bendahara BLUD Tahun 2024.....
Tabel 5.36 Rincian Sisa Kas BLUD Puskesmas dan RSUD Tahun 2024.....
Tabel 5.30 Mutasi Kas Pada Bendahara BOS Sekolah Negeri Tahun 2024 .....
Tabel 5.31 Mutasi Kas pada Bendahara Dana BOP PAUD Tahun 2024.....
Tabel 5.32 Mutasi Kas pada Bendahara Dana BOP Kesetaraan Tahun 2024.....
Tabel 5.33 Mutasi Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun 2024.....
Tabel 5.34 Penyajian Piutang pada Neraca Tahun 2024 dan 2023 .....
Tabel 5.35 Tabel Pemetaan Nomenlatur Piutang Pajak Daerah.....
Tabel 5.36 Mutasi Piutang Pajak Tahun 2024.....
Tabel 5.37 Mutasi Kas Pada Bendahara BOS Sekolah Negeri Tahun 2024 .....
Tabel 5.38 Mutasi Kas Pada Bendahara Dana BOP PAUD Tahun 2024.....
Tabel 5.39 Mutasi Kas Pada Bendahara Dana BOP Kesetaraan Tahun 2024.....

Tabel 5.40 Mutasi Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Tahun 2024 .....
Tabel 5.41 Penyajian Piutang pada Neraca Tahun 2024 dan 2023 .....
Tabel 5.42 Tabel Pemetaan Nomenlatur Piutang Pajak Daerah.....
Tabel 5.43 Mutasi Pajak Tahun 2024.....
Tabel 5.44 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2024.....
Tabel 5.45 Tabel Pemetaan Nomenlatur Piutang Retribusi Daerah.....
Tabel 5.46 Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2024.....
Tabel 5.47 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2024 .....
Tabel 5.48 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2024 .....
Tabel 5.49 Tabel Pemetaan Nomenlatur Piutang Lain-lain PAD yang Sah.....
Tabel 5.50 Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 .....
Tabel 5.51 Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024.....
Tabel 5.52 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 .....
Tabel 5.53 Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 .....
Tabel 5.54 Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2024.....
Tabel 5.55 Persediaan Per SKPD Tahun 2024 dan 2023 .....
Tabel 5.56 Persediaan Per Jenis Barang Tahun 2024 .....
Tabel 5.57 Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir per Kecamatan Tahun 2024 .....
Tabel 5.58 Pinjaman Berdasarkan Umur Pinjaman Tahun 2024 .....
Tabel 5.59 Penyisihan Pinjaman Tahun 2024 .....
Tabel 5.60 Kas Bendahara dan Bank Tahun 2024 .....
Tabel 5.61 Simpanan Anggota Kelompok Dana Bergulir Tahun 2024 .....
Tabel 5.62 Kondisi Kelompok UEMSP di Bukittinggi Tahun 2024 .....
Tabel 5.63 Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi .....
Tabel 5.64 Perhitungan Equity Method untuk Investasi Pemko Bukittinggi pada PT BPRS Jam Gadang Perseroda Tahun 2024 .....
Tabel 5.65 Rincian Dividen yang akan diterima Pemerintah Kota Bukittinggi dari PT BPRS Jam Gadang Perseroda .....

Tabel 5.66 Rincian Nilai Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Tahun 2024 .....

Tabel 5.67 Rincian Aset Pemerintah Kota Bukittinggi yang digunakan oleh PDAM Tirta Jam Gadang .....

Tabel 5.68 Rincian BMD yang Digunakan PDAM Tirta Jam Gadang dan akan ditindaklanjuti dengan Pemindahtanganan dalam Bentuk Penyertaan Modal .....

Tabel 5.69 Kelompok Aset Tetap.....

Tabel 5.70 Rekap Data Aset Tanah Per SKPD .....

Tabel 5.71 Daftar Aset Tanah yang masih dalam Penelusuran.....

Tabel 5.72 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....

Tabel 5.73 Daftar Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lainTahun 2024 .....

Tabel 5.74 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....

Tabel 5.75 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.....

Tabel 6.1 Daftar Aset Tanah yang masih dalam Penelusuran.....314

Tabel 6.2 Daftar Aset Hibah Tahun 2024 316

Tabel 6.3 Langkah dan Upaya Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan 319

Tabel 6.4 Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar (KIP).....323

CALK

BAB I

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

BAB I

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1.1 Umum

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional (LO)

   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, maka Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi telah direviu oleh Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk dilakukan pemeriksaan.

Lebih lanjut diatur bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI tersebut disampaikan kepada DPRD dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas dan disepakati bersama.

1.2 Domisili dan Bentuk Geografis

Bukittinggi merupakan kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai enklave dari Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kota Bukittinggi juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Pada zaman kolonial Belanda, Kota Bukittinggi disebut dengan *Fort de Kock* dan mendapat julukan sebagai *Parijs van Sumatera*. Bukittinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, diantaranya adalah Mohammad Hatta dan Assaat yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat Presiden Republik Indonesia.

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Pegunungan Bukit Barisan atau sekitar 90 km arah utara dari Kota Padang. Kota Bukittinggi berada di tepi Ngarai Sianok dan dikelilingi oleh dua gunung yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Lokasinya pada ketinggian 909 – 941 mdpl menjadikan Bukittinggi kota berhawa sejuk dengan suhu berkisar antara 16,1 – 24,9 °C.

Kota yang terkenal dengan ikon Jam Gadang ini memiliki kondisi geografis yang berbukit dan lembah sehingga luas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan menjadi sangat terbatas. Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,24 km², yang merupakan 0,06 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Bukittinggi yang sangat strategis terletak pada jalur perlintasan regional Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Dari sektor perekonomian, Bukittinggi merupakan kota dengan

PDRB terbesar kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hal tersebut, Bukittinggi harus mengelola keuangannya dengan baik serta menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai.

Berikut perkiraan jarak Kota Bukittinggi dengan kota-kota sekitarnya dan kota provinsi tetangga adalah:

Tabel 1.1 Jarak Kota Bukittinggi dengan Kota-Kota di Sumatera

Kota-Kota	Jarak (km)
1	*2*
Bukittinggi – Medan	730,00
Bukittinggi – Banda Aceh	1,337,00
Bukittinggi – Jambi	537,00
Bukittinggi – Pekanbaru	221,00
Bukittinggi – Palembang	795,00
Bukittinggi – Bengkulu	779,00
Bukittinggi – Tanjung Karang	1,222,00
Bukittinggi – Padang Panjang	19,00
Bukittinggi – Padang	91,00
Bukittinggi – Pariaman	77,00
Bukittinggi – Painan	168,00
Bukittinggi – Tapan	304,00
Bukittinggi – Solok	73,00
Bukittinggi – Sawahlunto	104,00
Bukittinggi – Sijunjung	136,00
Bukittinggi – Payakumbuh	33,00
Bukittinggi – Batusangkar	49,00
Bukittinggi – Lubuk Sikaping	77,00
Bukittinggi – Simpang Empat	199,00
Bukittinggi – Air Bangis	256,00
Bukittinggi – Sitiung	242,00
Bukittinggi – Muaro Labuah	143,00

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan dengan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Kelurahan, Luas, dan Persentase Daerah serta Posisi Geografis per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Daerah (km^2)	Prosentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Guguk Panjang	7	6.831,00	27,07	100^0, 22' 49" BT, 00^0, 18' 40" LS
Mandiangin Koto Selayan	9	12.156,00	48,16	100^0, 22' 23" BT, 00^0, 17' 28" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252,00	24,77	100^0, 23' 22" BT, 0^0, 19' 16" LS

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Secara administratif, Kota Bukittinggi berbatasan dengan nagari-nagari di Kabupaten Agam, yaitu:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam;

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Nagari Guguak, dan Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam; dan

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam dan Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Wilayah Kota Bukittinggi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta administrasi berikut.

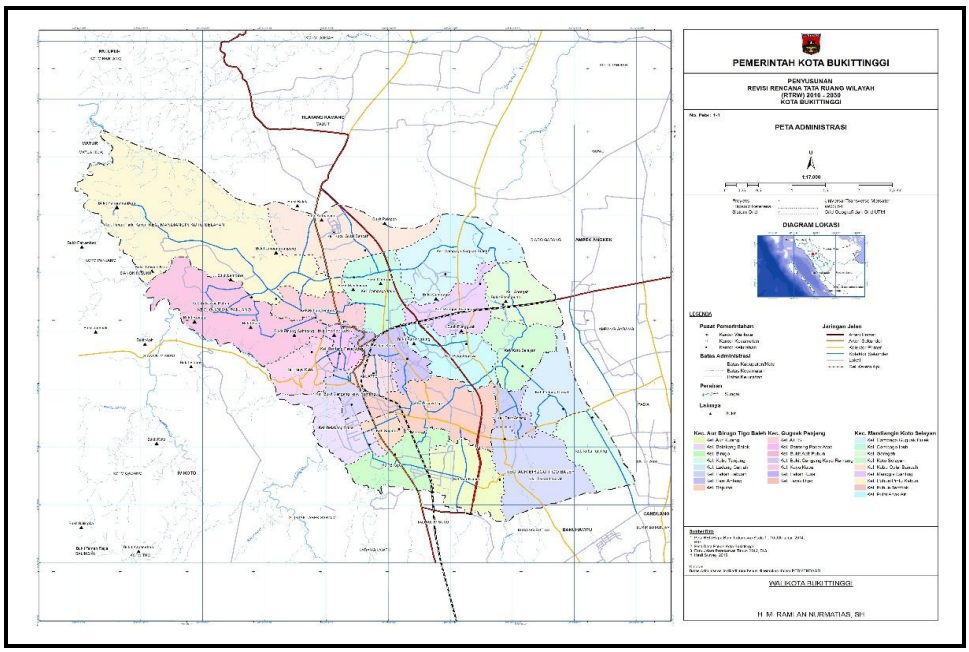

Sumber: RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Bukittinggi

1.3 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundang-undangan melalui penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap kementerian negara merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berangkat dari ketentuan hukum di atas, maka dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) eksistensi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi diberi penjelasan sebagai berikut.

a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

   Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kota Bukittinggi. Fungsi entitas pelaporan melekat pada Badan Keuangan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

b. Entitas Akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

   Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terdiri atas:

Tabel 1.3 SKPD Selaku Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024

No.	Nama SKPD
1	*2*
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8.	Satuan Polisi Pamong Praja
9.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10.	Dinas Sosial
11.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13.	Dinas Pertanian dan Pangan
14.	Dinas Lingkungan Hidup
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.	Dinas Perhubungan
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.	Dinas Pemuda dan Olah Raga
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21.	Dinas Pariwisata
22.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Nama SKPD
1	*2*
23.	Badan Keuangan
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28.	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
29.	Kecamatan Guguk Panjang
30.	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Selain itu, terdapat UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD, sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah, UPTD RSUD Kota Bukittinggi merupakan entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dengan karakteristik sebagai berikut.

1) Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
2) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
4) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
5) Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
6) Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
7) Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
8) Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
9) Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Disamping itu, selaku penerima anggaran belanja pemerintah yang berasal dari APBD, BLUD RSUD Kota Bukittinggi juga berfungsi sebagai Entitas Akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada Dinas Kesehatan sebagai organisasi yang membawahinya.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Entitas Akuntansi menyusun 5 (lima) laporan keuangan, yaitu (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan menyusun 7 (tujuh) jenis laporan, yaitu (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 mencakup transaksi keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada seluruh SKPD baik yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maupun transaksi keuangan tanpa melalui RKUD dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. LKPD ini tidak mencakup transaksi entitas pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun tetap mencantumkan Laporan Keuangan BUMD sebagai lampiran LKPD ini.

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.4.1 Maksud

Penyusunan LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas publik atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, Pemerintah Kota Bukittinggi bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan diantaranya DPRD, pegawai, masyarakat, *investor*, *kreditor*, lembaga donor, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, serta pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2024.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 secara umum bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas pemerintah daerah.

Secara spesifik, tujuan penyusunan LKPD Kota Bukittinggi adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

a. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
b. Kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.5 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

g. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

s. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

t. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

u. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

v. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

w. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2020;

x. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi;

y. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi;

z.Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah;

aa. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan

bb. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.6 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam memahami LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi, maka Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 1.1 Umum
- 1.2 Domisili dan Bentuk Geografis
- 1.3 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.4.1 Maksud
  - 1.4.2 Tujuan
- 1.5 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
- 1.6 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB II Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro

- 2.1 Kebijakan Keuangan
  - 2.1.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
  - 2.1.2 Kebijakan Pendapatan Daerah
  - 2.1.3 Kebijakan Belanja Daerah
- 2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
  - 2.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi
  - 2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
  - 2.2.3 Laju Inflasi
  - 2.2.4 Ketimpangan Pendapatan (Gini *Ratio*)
  - 2.2.5 Tingkat Kemiskinan
  - 2.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka
  - 2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia

2.3 Penetapan APBD dan *Refocusing* Anggaran

BAB III Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan/Kendala dan Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB IV Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi

4.1 Struktur Laporan Keuangan

4.2 Kebijakan Akuntansi

4.3 Asumsi Dasar Akuntansi

4.4 Pengguna Laporan Keuangan

4.5 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

4.6 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.7 Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan Daerah

5.1.2 Belanja Daerah

5.1.3 Pembiayaan Daerah

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.3 Neraca

5.3.1 Aset

5.3.2 Kewajiban

5.3.3 Ekuitas

5.4 Laporan Operasional

5.4.1 Kegiatan Operasional

5.4.1.1. Pendapatan

5.4.1.2. Beban

5.4.2 Kegiatan Nonoperasional

5.4.3 Surplus/Defisit-LO

5.5 Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggaran

5.5.4 Kas Awal dan Kas Akhir.

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Informasi Lainnya

6.1 Aset Tanah dalam Penelusuran

6.2 Informasi Dana dan Aset Hibah

6.3 Informasi Sengketa Tanah

6.4 Kewajiban Kontinjensi

BAB VII Penutup

CALK

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

2.1 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja dan berkomitmen dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Konsep ini sejalan dengan konsep *agency theory* yang menempatkan masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Teori ini menuntut setiap tindakan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Tidak terkecuali keuangan daerah dalam bentuk APBD sebagai instrumen dalam pelaksanaan pemerintahan.

Kebijakan makro fiskal APBN Tahun 2024 masih menghadapi tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal. Tantangan pembangunan antara lain percepatan penanganan dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi. Kondisi perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, transformasi ekonomi, dan kerangka fiskal jangka menengah. Sementara itu tantangan dalam pengelolaan fiskal antara lain: 1) Penerimaan yang melemah, 2) Ruang fiskal yang terbatas, 3) Risiko fiskal yang meningkat, dan 4) Pelaksanaan konsolidasi fiskal.

Pada prinsipnya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (*money follow program*). Oleh sebab itu arah dan kebijakan keuangan daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam APBD memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang didasari oleh berbagai kondisi objektif dan aspirasi yang berkembang di daerah guna mewujudkan rencana-rencana pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan permasalahan mendesak yang berkembang di masyarakat.

Salah satu hal yang perlu dilakukan guna menyusun perhitungan keuangan daerah dan kerangka pendanaan selain memperhatikan proyeksi kerangka ekonomi makro juga perlu dilakukan evaluasi terhadap realisasi APBD beberapa tahun sebelumnya. Semenjak pendemi Covid-19 pada Tahun 2020 yang merontokkan struktur ekonomi masyarakat hingga pada tahun 2024 telah pulih secara utuh sangat berdampak pada proyeksi keuangan daerah kedepan. Dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang terjadi pada Tahun 2024 diantaranya:

a. Kondisi perekonomian yang terus pulih semenjak masa pandemi Covid-19 berpengaruh positif pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pandemi Covid-19 yang terjadi sempat membuat kegiatan perekonomian dari pemerintah, swasta, dan masyarakat mengalami kelesuan, terutama masyarakat berpendapatan rendah.

b. Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi sangat bergantung pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang menjadi terganggu karena pemerintah pusat mengurangi transfernya ke daerah.

c. Aktivitas perekonomian terutama sektor unggulan daerah seperti pariwisata, perdagangan, dan perhotelan yang sempat lumpuh karena Covid-19 dan pembatasan perjalanan karena Covid-19 telah mulai pulih.

d. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan tetap menjaga kualitas belanja (*wise and better spending*) agar lebih efisien, produktif, dan bersifat *counter cyclical* untuk menjadi *enabler* yang kuat bagi percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi berfokus pada sektor strategis daerah.

Dalam rangka mewujudkan target makro ekonomi Kota Bukittingi Tahun 2024 maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 sebagai berikut.

a. Meningkatkan akses masyarakat pada kesempatan usaha, akses permodalan, dan kesempatan kerja;

b. Mengembangkan sarana dan prasarana pasar serta perluasan jangkauan pasar usaha mikro melalui peningkatan kemampuan pemasaran digital;

c. Meningkatkan kunjungan wisata melalui peningkatan jumlah dan revitalisasi kawasan pariwisata kota;

d. Meningkatkan jumlah, ragam usaha, serta kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD;

e. Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan usaha mikro dalam rangka peningkatan akses pelaku usaha mikro terhadap permodalan;

f. Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan social; dan

g. Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air minum dan sanitasi layak.

Seiring dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Bukittinggi, arah kebijakan keuangan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 adalah:

a. Pendapatan Dana Transfer menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;

b. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sesuai dengan potensi yang menyesuaikan dengan kondisi umum daerah, dengan tetap mengoptimalkan setiap potensi PAD Kota Bukittinggi;

c. Belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan pengeluaran wajib, pemenuhan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi arah kebijakan pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024; dan

d. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Besaran SiLPA untuk Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5% dari APBD Tahun Anggaran 2023. Pengeluaran pembiayaan proyeksikan tidak ada pada Tahun 2024.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan telah berjalan sampai Semester I Tahun 2024 diperlukan adanya penyesuaian-

penyesuaian yang diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan, baik dari sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah. Penyesuaian APBD tersebut harus dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBD yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 161 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. Keadaan darurat; dan/atau
e. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024. Perubahan APBD tersebut diawali oleh Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini didasarkan pada huruf C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Arah dan kebijakan umum daerah dijabarkan dalam rincian:

a. Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan;
b. Arah kebijakan pendapatan daerah;
c. Arah kebijakan belanja daerah; dan
d. Arah dan kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

2.1.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun guna mengatur, mengawasi, serta mengendalikan penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Pengelolaan keuangan daerah dilihat dari sisi pendapatan, belanja dan juga pembiayaan.

2.1.1.1 Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerahnya maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah. Untuk itu, penerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, baik dengan meningkatkan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan potensi dan kondisi ekonomi masyarakat.

Proyeksi Pendapatan Daerah tercermin pada target pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah awal tahun begitupun perubahan target pendapatan daerah tercermin pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Perubahan Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024

Rek.	URAIAN	APBD 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2024 (Rp)	% KENAIKAN/ (PENURUNAN)	JUMLAH KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**756.768.257.429,00**	**775.373.477.018,00**	**2,46**	**18.605.219.589,00**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**153.160.514.484,00**	**153.460.514.484,00**	**0,20**	**300.000.000,00**
1.1.1	Pajak Daerah	54.110.644.633,00	54.110.644.633,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	74.053.582.055,00	74.688.582.055,00	0,86	635.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	8.307.425.308,00	8.307.425.308,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.688.862.488,00	16.353.862.488,00	(2,01)	(335.000.000,00)
1.2	**Pendapatan Transfer**	**603.607.742.945,00**	**621.912.962.534,00**	**3,03**	**18.305.219.589,00**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569.917.294.204,00	569.055.919.679,00	(0,15)	(861.374.525,00)
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.690.448.741,00	52.857.042.855,00	56,89	19.166.594.114,00
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-

Target Pendapatan Daerah pada APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp18.605.219.589,00 dari target APBD awal sebesar Rp756.768.257.429,00 menjadi Rp775.373.477.018,00 atau meningkat 2,46%. Peningkatan ini berasal dari peningkatan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp300.000.000,00 atau 0,20% dari target awal serta peningkatan target Pendapatan Transfer sebesar Rp18.305.219.589,00 atau 3,03% dari target awal.

Perubahan target Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer sebagaimana dijelaskan pada keterangan berikut.

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

   Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 diprediksi meningkat Rp300.000.000,00 dengan penjabaran setiap komponen adalah sebagai berikut.

   a. Pajak Daerah, pada Perubahan APBD Tahun 2024 target penerimaan Pajak Daerah tetap sebesar Rp54.110.644.633,00;

   b. Retribusi Daerah, dari target awal APBD Tahun 2024 Retribusi Daerah naik sebesar Rp635.000.000,00 dari Rp74.053.582.055,00 menjadi Rp74.688.582.055,00 atau 0,85%;

   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap sebesar Rp8.307.425.308,00; dan

   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari target awal APBD Tahun 2024 sebesar Rp16.688.862.488,00 turun sebesar Rp335.000.000,00 sehingga menjadi Rp16.353.862.488,00 atau turun 2,01%.

2. **Pendapatan Transfer**

   Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

   Untuk Pendapatan Transfer pada APBD awal Tahun 2024 sebesar Rp603.607.742.945,00 diproyeksikan pada perubahan APBD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp621.912.962.534,00, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp18.305.219.589,00 atau 3,03%. Pendapatan di atas berdasarkan perkiraan sebagai berikut.

   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang semula berjumlah Rp569.917.294.204,00 berkurang sebesar Rp861.374.525,00, sehingga menjadi Rp569.055.919.679,00; dan

   b. Pendapatan Transfer Antar Daerah atas DBH Provinsi Sumatera Barat semula berjumlah Rp33.690.448.741,00 bertambah sebesar Rp19.166.594.114,00, sehingga menjadi Rp52.857.042.855,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap diperkirakan nol rupiah.

2.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali oleh daerah. Adapun gambaran perubahan target belanja daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Perubahan Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	URAIAN	APBD 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2024 (Rp)	% KENAIKAN/ (PENURUNAN)	JUMLAH KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5	**BELANJA**	**806.768.257.429,00**	**808.431.150.183,00**	**0,21**	**1.662.892.754,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**728.968.065.785,00**	**727.886.843.406,00**	**(0,15)**	**(1.081.222.379,00)**
5.1.01	Belanja Pegawai	347.047.302.064,00	343.366.503.439,00	(1,06)	(3.680.798.625,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.761.729.345,00	316.715.324.592,00	(0,33)	(1.046.404.753,00)
5.1.04	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	58.135.934.376,00	57.105.915.374,00	(1,77)	(1.030.019.002,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.523.100.000,00	3.199.100.000,00	(9,20)	(324.000.000,00)
5.2	**BELANJA MODAL**	**67.199.571.644,00**	**69.943.686.777,00**	**4,08**	**2.744.115.133,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.424.131.152,00	14.576.288.033,00	(11,25)	(1.847.843.119,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.810.764.480,00	33.771.313.480,00	(12,98)	(5.039.451.000,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.813.511.912,00	19.966.602.364,00	84,64	9.153.090.452,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.151.164.100,00	1.429.482.900,00	24,18	278.318.800,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	200.000.000,00	-	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**9.600.620.000,00**	**9.600.620.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	9.600.620.000,00	9.600.620.000,00	0,00	0,00

Secara umum, Belanja Daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan APBD Tahun 2024 yang merupakan pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bukittinggi mengalami kenaikan sebesar Rp1.662.892.754,00 atau 0,21% dari APBD awal Tahun 2024

sebesar Rp806.768.257.429,00 menjadi Rp808.431.150.183,00 pada APBD Perubahan 2024. Kenaikan belanja pada APBD Tahun 2024 terhadap perubahan APBD Tahun 2024 merupakan hasil penyesuaian belanja dengan pendapatan dan pembiayaan. Kenaikan belanja pada perubahan APBD Tahun 2024 dibandingkan APBD awal Tahun 2024 merupakan pemenuhan belanja rutin dan mengikat untuk kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran.

2.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk dan atau berfungsi menutupi defisit dan untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar daripada anggaran belanja, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil daripada anggaran belanja.

Apabila terjadi surplus anggaran dapat dimanfaatkan melalui pengeluaran anggaran pembiayaan untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran cicilan utang, penyertaan modal (investasi), dan/atau menjadi Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenan. Sedangkan apabila terjadi defisit anggaran ditutup/dibiayai dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, pinjaman daerah dan atau transfer/penarikan dana cadangan daerah yang dianggarkan pada penerimaan anggaran pembiayaan.

1. **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

   Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
   b. Pencairan Dana Cadangan;
   c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
   d. Penerimaan pinjaman daerah;
   e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
   f. Penerimaan piutang daerah; dan
   g. Penerimaan kembali investasi Dana Bergulir.

2. **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

   Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan pengeluaran pembiayaan meliputi:

   a. Pembentukan Dana Cadangan;
   b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah;

c. Pembayaran pokok utang; dan

d. Pemberian pinjaman daerah.

Proyeksi Pembiayaan Daerah juga tercermin pada target penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perubahan Target Pembiayaan Daerah digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Perubahan Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	% KENAIKAN/ (PENURUNAN)	JUMLAH KENAIKAN/ (PENURUNAN)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**50.000.000.000,00**	**33.057.673.165,00**	**(33,88)**	**(16.942.326.835,00)**
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	50.000.000.000,00	33.057.673.165,00	(33,88)	(16.942.326.835,00)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000,00	33.057.673.165,00	(33,88)	(16.942.326.835,00)
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD awal Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp50.000.000.000,00 dan angka ini disesuaikan dalam perubahan APBD menjadi Rp33.057.673.165,00 sesuai dengan perhitungan SiLPA sebagaimana tercantum pada LKPD Tahun 2023 yang telah diaudit oleh BPK RI, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp16.942.326.835,00 dan nilai tersebut selanjutnya diakomodasi pada APBD Perubahan Tahun 2024. Disisi lain Pengeluaran Pembiayaan Daerah tetap diproyeksikan nol rupiah.

Dari rencana kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dihasilkan Pembiayaan Daerah netto adalah sebesar Rp33.057.673.165,00.

2.1.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Peningkatan pendapatan tentunya tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan termasuk regulasi kebijakan. Di samping itu, peningkatan Pendapatan Daerah tersebut diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dan upaya-upaya melakukan terobosan peluang investasi dunia usaha.

Pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target Pendapatan Daerah setiap

tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum dan pembangunan kota.

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah sebagaimana keterangan di atas terdiri atas:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:**
    a. Pajak Daerah;
    b. Retribusi Daerah;
    c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
    d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. **Pendapatan Transfer, meliputi:**
    a. Transfer Pemerintah Pusat,
        1) Dana Perimbangan;
        2) Dana Otonomi Khusus;
        3) Dana Keistimewaan; dan
        4) Dana Desa;
    b. Transfer Antar Daerah,
        1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
        2) Bantuan Keuangan.
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi:**
    a. Hibah;
    b. Dana Darurat; dan
    c. Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, serta Pendapatan Transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut.

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui peningkatan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya mencegah stagnasi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi yang sangat terdampak oleh adanya pandemi;
3. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur pengelola pendapatan daerah serta pemantapan kinerja organisasi dalam pelayanan yang menyangkut

Pendapatan Daerah;

4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengalokasian Pendapatan Daerah dari Pendapatan Transfer;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan Pendapatan Daerah;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah melalui dividen BUMD dalam upaya peningkatan signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
7. Optimalisasi Barang Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah melalui pemanfaatan Barang Milik Daerah;
8. Penerapan pola pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada SKPD serta unit-unit pelayanan teknis yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
9. Peningkatan program-program kegiatan unggulan yang dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus baik itu DAK Fisik maupun Non Fisik.

2.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. PAD merupakan semua Penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak dan Retribusi Daerah. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah namun secara umum memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

   Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi yang penganggarannya dilakukan dengan pengaturan:

   a. Tahun 2024 pengaturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Tahun 2024 masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

   b. Terdapat dua pendekatan perhitungan potensi Pajak Daerah, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro dilakukan

dengan menggunakan teknik statistik tertentu berdasarkan data-data sekunder tahun-tahun sebelumnya, baik data *time series* atau perkembangan beberapa tahun realisasi penerimaan pajak daerah saja maupun dengan mengkaitkannya dengan faktor lain yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah tersebut. Data sekunder ini mengambarkan capaian kinerja penerimaan Pajak Daerah pada masa lalu, yang belum tentu sesuai dengan potensi, seringkali hanya mengambarkan pencapaian target.

c. Penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada dokumen Riset Potensi Daerah (Rispoda). Selain itu, Pendapatan Asli Daerah pada periode Tahun 2019 digunakan sebagai acuan untuk memprediksi kondisi normal dari Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada periode Tahun 2022 dan 2023 juga digunakan sebagai dasar untuk proyeksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024.

d. Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang meliputi: pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak dan retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Kepala Daerah, serta pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.

e. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, social, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan undang-undang.

2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek yang terdiri atas:

a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

c. Hasil Kerja Sama Daerah;

d. Jasa Giro;

e. Hasil pengelolaan dana bergulir;

f. Pendapatan bunga;

g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa

termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang milik daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan Pendapatan Daerah;

i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

k. Pendapatan denda Pajak Daerah;

l. Pendapatan denda Retribusi Daerah;

m. Pendapatan dari pengembalian;

n. Pendapatan dari BLUD; dan

o. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam usaha peningkatan lain-lain PAD, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan barang daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, bangun serah guna/bangun guna serah, kerjasama pemanfaatan, dan kerjasama penyediaan infrastruktur sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah.

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD memedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

2.1.2.2 Pendapatan Transfer

APBD Kota Bukittinggi terbesar masih disumbang oleh Pendapatan Transfer terutama Transfer Pemerintah Pusat yang berarti ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih relatif tinggi. Kebijakan penganggaran pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan;

Pendapatan dana perimbangan terdiri dari rincian objek:

1) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil yang terdiri atas:

a) Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Tahun 2024 diperkirakan tetap sama dengan tahun 2023, yang terdiri dari:

(1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan;

(2) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN;

(3) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT);

(4) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi;

(5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Landrent;

(6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH); dan

(7) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.

b) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari DAU Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah- langkah:

(1) Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya; dan/atau

(2) Mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.

b. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diuraikan kedalam DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi

DAK Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DID yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Pendapatan yang bersumber dari DID penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

d. Dana Otonomi Khusus

Pendapatan Dana Otonomi Khusus pada Tahun 2024 tidak dianggarkan mengacu pada status Pemerintah Kota Bukittinggi bukan Otonomi Khusus.

e. Dana Desa

Pendapatan Dana Desa untuk Tahun 2024 tidak dianggarkan mengacu pada status Pemerintah Kota Bukittinggi yang tidak memiliki Pemerintahan Desa.

2. Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun 2024 yang diprediksi tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila Pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan bersifat umum diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan, maka harus disesuaikan pada Perda tentang Perubahan APBD tahun 2024 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD.

2.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan tidak ada pada tahun 2024 namun dalam penganggarannya tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. **Pendapatan Hibah**

   Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. **Dana Darurat**

   Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Dana Darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya peraturan presiden mengenai rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. **Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

   Penganggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk satuan pendidikan negeri diselenggarakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

   Adapun Realisasi masing-masing komponen Pendapatan Daerah dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024

Kode Rek.	URAIAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**690.981.742.486,00**	**689.222.919.606,62**	**99,75**	**684.347.061.146,00**	**688.623.475.005,61**	**00,62**	**714.157.721.650,00**	**698.398.510.868,22**	**97,79**	**733.692.996.334,00**	**706.975.448.172,65**	**96,36**	**775.373.477.018,00**	**741.382.079.328,40**	**95,62**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**77.233.207.530,00**	**84.087.662.500,62**	**108,88**	**92.110.528.556,00**	**91.786.008.737,61**	**99,65**	**136.257.791.456,00**	**130.798.717.228,85**	**95,99**	**137.413.209.479,00**	**123.112.709.360,20**	**89,59**	**153.460.514.484,00**	**130.112.1097.312,94**	**84,79**
4.1.01	Pajak Daerah	31.278.967.000,00	35.857.033.610,00	114,64	37.070.692.210,00	40.765.025.893,00	109,97	50.269.852.262,00	49.566.874.943,00	98,60	53.610.644.633,00	51.690.816.406,00	96,42	54.110.644.633,00	50.098.130.579,00	92,58
4.1.02	Retribusi Daerah	24.474.011.211,00	21.833.603.342,00	89,21	25.609.269.920,00	27.401.880.331,00	107,00	48.684.034.000,00	46.662.398.969,00	95,85	51.990.259.000,00	39.222.055.481,00	75,44	74.688.582.055,00	51.629.686.961,72	69,13
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.331.956.191,00	6.331.956.191,00	100,00	5.482.031.608,00	5.482.031.608,00	100,00	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	88,49	8.307.425.308,00	8.363.843.874,00	100,68	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	118,70
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.148.273.128,00	20.065.069.357,62	132,46	23.948.534.818,00	18.137.070.905,61	75,73	29.798.905.194,00	27.928.151.391,85	93,72	23.504.880.538,00	23.835.993.599,20	101,41	16.353.862.488,00	18.523.395.556,22	113,27
4.2	**Pendapatan Transfer**	**592.402.984.956,00**	**585.094.336.619,00**	**98,77**	**92.236.532.590,00**	**593.750.837.738,00**	**100,26**	**577.899.930.194,00**	**567.387.873.682,00**	**98,18**	**596.279.786.855,00**	**583.728.726.369,00**	**97,90**	**621.912.962.534,00**	**611.269.982.015,46**	**98,30**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	567.964.438.500,00	559.635.238.910,00	98,53	562.370.143.182,00	561.075.580.504,00	99,77	543.423.791.657,00	532.574.902.562,00	98,00	558.512.589.194,00	554.987.256.154,00	99,37	569.055.919.679,00	566.436.096.135,00	99,54
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.438.546.456,00	25.459.097.709,00	104,18	29.866.389.408,00	32.675.257.234,00	109,40	34.476.138.537,00	34.812.971.120,00	100,98	37.767.197.661,00	28.741.470.215,00	76,10	52.857.042.855,00	44.833.885.880,46	84,82
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**21.345.550.000,00**	**20.040.920.487,00**	**93,89**	**000**	**3.086.628.530,00**	**100,00**	**0,00**	**211.919.957,37**	**100,00**	**0,00**	**134.012443,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	21.345.550.000,00	20.040.920.487,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086.628.530,00	100,00	0,00	211.919.957,37	100,00	0,00	134.012.443,45	100,00	0,00	0,00	0,00

Berikut proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025:

Tabel 2.5 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025

REK	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2025 (Rp)
1	*2*	*3*
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**743.319.020.000,00**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**154.616.260.000,00**
1.1.1	Pajak Daerah	48.085.500.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	29.245.060.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.388.990.000,00
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	70.926.710.000,00
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**588.672.760.000,00**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	563.900.830.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	24.771.930.000,00
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**-**
1.3.1	Hibah	-
1.3.2	Dana Darurat	-
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan	-

2.1.3 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal guna melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran plafon, kebijakan dan kesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kota Bukittinggi. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi terhadap struktur belanja daerah.

Berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat maka tema Rencana Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 adalah: "Transformasi Sektor Ekonomi Unggulan yang Terintegrasi, Inklusif dan Berkelanjutan". Maka Belanja Daerah diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2024 yaitu:

1. Prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

   Prioritas ini ditujukan untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berbasis masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan masyarakat terhadap dampak ekonomi dari pandemi yang terjadi.

2. Prioritas Pengembangan Sektor Pendidikan

   Prioritas sektor pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan nilai-nilai agama, adat, dan budaya yang telah mengharumkan Bukittinggi khususnya dan masyarakat Minang umumnya, dengan tokoh-tokoh besar di tingkat nasional bahkan internasional.

3. Prioritas Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan

   Prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berperilaku hidup sehat dalam lingkungan yang sehat didukung infrastruktur ramah lingkungan, berkualitas dan berkelanjutan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. Prioritas Pengembangan Kepariwisataan, Seni Budaya, dan Olahraga

   Prioritas ini ditujukan untuk menjadikan Kota Bukittinggi sebagai daerah kunjungan wisata utama dengan menjadikan seluruh sektor pembangunan tumbuh dan berkembang secara beririsan dengan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga bertujuan untuk peningkatan kunjungan wisatawan, rata-rata lama tinggal, dan *spending of money* wisatawan di Bukittinggi.

5. Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

   Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

6. Prioritas Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

   Prioritas ini berorientasi untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai luhur sebagai budaya yang berakar dengan filosofi masyarakat Minang, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dengan memberdayakan potensi kelembagaan yang ada di tengah tatanan kehidupan masyarakat.

7. Prioritas Pengembangan Sektor Pertanian

   Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan keterbatasan lahan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing pertanian yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan petani.

2.1.3.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Secara umum, arah kebijakan keuangan merupakan uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung capaian tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam visi dan misi RPJMD Kota Bukittinggi. Arah Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui:

1. Pengalokasian anggaran belanja daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu penganggaran belanja dilaksanakan juga dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam peningkatan pelayanan dasar. Dengan demikian maka penyusunan belanja daerah mengutamakan pola:

   a. Proporsional

      Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bukittinggi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

   b. Efisien

      Belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik. Untuk itu disusun pedoman Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa dengan diikuti pelaksanaan Analisa Standar Belanja (ASB). Efisiensi anggaran belanja oleh setiap SKPD diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

   c. Efektivitas

      Penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bukittinggi.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, pemerataan tenaga medis maupun peningkatan kapasitas.

3. Dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan pembinaan terhadap masyarakat yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan pencari kerja sehingga mampu mandiri dan bersaing di dunia digital bisnis.
4. Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan jalan lingkung, drainase dan sanitasi berbasis lingkungan.
5. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, diarahkan pada kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan.

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi dan Belanja Modal tersebar pada setiap SKPD sedangkan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer terdapat pada Badan Keuangan selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

1. Belanja Operasi

   Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

   a. Belanja Pegawai

      Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, serta ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

   b. Belanja Barang dan Jasa

      Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

   c. Belanja Bunga

      Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

   d. Belanja Subsidi

      Belanja Subsidi digunakan untuk pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa dapat dijangkau oleh masyarakat.

   e. Belanja Hibah

      Belanja hibah digunakan untuk pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah digunakan untuk belanja pengadaan/pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola/kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk belanja pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk belanja/ pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Modal Jalan Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian/peningkatan aset tetap selain belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan.

3. Belanja Tidak Terduga

   Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan seluruh pengeluaran pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

   Belanja Transfer digunakan untuk menganggarkan seluruh pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Berikut Realisasi Belanja Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024.

Tabel 2.6 Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d 2024

No.	URAIAN	REALISASI (Rp)				
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	**Belanja Daerah**	**796.660.536.289,97**	**650.051.328.563,46**	**744.059.199.525,66**	**751.239.962.696,31**	**739.076.479.103,31**
5.1	**Belanja Operasi**	**515.151.376.193,13**	**555.168.586.260,11**	**611.262.131.931,10**	**667.764.935.144,91**	**665.946.895.972,54**
5.1.1	Belanja Pegawai	360.230.406.322.57	296.371.615.565,25	301.384.096.541,66	308.535.703.099,00	336.607.731.061,67
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	116.356.834.683,56	236.689.663.677,43	264.544.058.412,28	308.199.944.742,03	272.602.571.149,75
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	2.910.989.266,00	2.499.916.363,00	2.499.986.478,00
5.1.5	Belanja Hibah	37.699.077.187,00	21.027.307.017,43	40.192.987.711,16	43.676.370.940,88	51.339.007.283,12
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	865,058,000.00	1.080.000.000,00	2.230.000.000,00	4.853.000.000,00	2.897.600.000,00
5.2	**Belanja Modal**	**249.317.613.815,34**	**93.038.635.113,35**	**124.005.630.244,56**	**74.023.558.551,40**	**63.532.002.219,77**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	9.377.400.000,00	-	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.599.429.086,00	42.231.774.799,80	48.131.479.720,00	26.111.089.608,47	12.261.224.480,70
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	155.160.011.545,15	23.949.425.057,53	25.739.508.574,06	27.005.206.763,60	31.435.241.904,22
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	27.342.160.697,19	24.162.072.116,02	45.500.951.384,50	19.501.037.779,33	18.357.697.907,85
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.838.612.487,00	2.695.363.140,00	4.633.690.566	1.406.224.400,00	1.278.037.927,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	199.800.000,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**31.485.489.291,50**	**1,844,107,190.00**	**271.437.350,00**	**849.000,00**	**380.911,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	31.485.489.291,50	1.844.107.190,00	271.437.350,00	849.000,00	380.911,00
5.4	**Belanja Transfer**	**706.056.990,00**	**-**	**8.520.000.000,00**	**9.450.620.000,00**	**9.597.200.000,00**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	**-**	**-**	**-**	**-**	-
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	706.056.990,00	-	8.520.000.000,00	-	9.597.200.000,00

2.1.3.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Dengan berpedoman pada prinsip–prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja Daerah Tahun 2024 dipergunakan untuk mendanai pencapaian target kinerja daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Rencana belanja digunakan untuk pencapaian prioritas pembangunan nasional, Provinsi Sumatera Barat, dan Kota Bukittinggi. Sebagaimana telah tertuang dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun 2024, belanja Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp808.431.150.183,00, yang meliputi:

1. Belanja Operasi

   Belanja Operasi untuk Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp727.886.843.406,00 yang terdiri dari:

   a. Belanja Pegawai

      Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp348.366.503.439,32 yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan Belanja Pegawai BLUD. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan untuk kebutuhan 12 bulan, Gaji Ketigabelas, dan Tunjangan Hari Raya. *Acress* dilakukan sebesar 2,5%.

   b. Belanja Barang dan Jasa

      Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp316.715.324.592,68 yang terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Barang dan Jasa BLUD. Belanja barang dan jasa dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dengan mempertimbangkan asas efektif dan efisien.

   c. Belanja Bunga

      Belanja Bunga tidak direncanakan atau Rp0,00.

   d. Belanja Subsidi

      Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 untuk subsidi ke BUMD dalam rangka implementasi Program Tabungan Utsman.

   e. Belanja Hibah

      Belanja hibah direncanakan sebesar Rp57.105.915.374,00 yang terdiri dari belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada BUMN, Belanja Hibah kepada

BUMD, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia serta Belanja Hibah Dana BOS.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp3.199.100.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal untuk Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp69.943.686.777,00, yang terdiri dari:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp14.576.288.033,00 yang terdiri dari Belanja Modal Alat Besar, Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, Belanja Modal Alat Pertanian, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Alat Laboratorium, Belanja Modal Komputer, Belanja Modal Rambu-Rambu, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp33.771.313.480,00 yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung dan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.

c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan direncanakan sebesar Rp19.966.602.364,00 yang terdiri dari Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air, Belanja Modal Instalasi dan Belanja Modal Jaringan.

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp1.429.482.900,00 yang terdiri dari belanja biota perairan, dan belanja modal aset tetap lainnya BOS.

e. Belanja Modal Aset Lainnya.

Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 yang merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp9.600.620.000,00 yaitu Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Secara umum perubahan anggaran belanja daerah tahun 2024 dan proyeksi Belanja Daerah tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.7 Perubahan Belanja Daerah Beserta Realisasi Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No.	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI 2024 (Rp)	PROYEKSI 2025 (Rp)
		APBD 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2024 (Rp)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5	**Belanja Daerah**	**806.768.257.429,00**	**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**688.958.929.378,63**
5.1	**Belanja Operasi**	**728.968.065.785,00**	**727.886.843.406,00**	**665.946.895.972,54**	**592.380.033.276,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	347.047.302.064,00	348.366.503.439,32	336.607.731.061,67	340.482.839.654,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	317.761.729.345,00	316.715.324.592,68	272.602.571.149,75	199.741.996.200,00
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	58.135.934.376,00	57.105.915.374,00	51.339.007.283,12	49.632.348.790,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.523.100.000,00	3.199.100.000,00	2.897.600.000,00	2.522.848.632,00
5.2	**Belanja Modal**	**67.199.571.644,00**	**69.943.686.777,00**	**63.532.002.219,77**	**72.078.896.102,63**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.424.131.152,00	14.576.288.033,00	12.261.224.480,70	23.957.771.450,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.810.764.480,00	33.771.313.480,00	31.435.241.904,22	23.420.499.722,63
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.813.511.912,00	19.966.602.364,00	18.357.697.907,85	23.139.515.769,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.151.164.100,00	1.429.482.900,00	1.278.037.927,00	1.561.109.161,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	200.000.000,00	199.800.000,00	0,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**1.000.000.000,00**	**1.000,000.000,00**	**380.911,00**	**15.000.000.000,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000,000.000,00	380.911,00	15.000.000.000,00
5.4	**Belanja Transfer**	**9.600.620.000,00**	**9.600.620.000,00**	**9.597.200.000,00**	**9.500.000.000,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	9.600.620.000,00	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	9.500.000.000,00

Secara keseluruhan perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.662.892.754,00 atau naik sebesar 0,21% dari sebesar Rp806.768.257.429,00 pada APBD awal menjadi sebesar Rp808.431.150.183,00 setelah perubahan APBD.

Pada kelompok Belanja Operasi mengalami pengurangan sebesar Rp1.081.222.379,00 atau sebesar 0,15%, yakni dari sebesar Rp728.968.785,00 sebelum perubahan menjadi sebesar Rp727.886.843.406,00 setelah perubahan.

Sedangkan pada kelompok Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp2.744.115.133,00 atau naik sebesar 4,08% dari sebesar Rp67.199.571.644,00 sebelum perubahan menjadi sebesar Rp69.943.686.777,00 setelah perubahan.

Pada kelompok Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer tidak mengalami perubahan dan tetap di angka sebesar Rp1.000.000.000,00 dan sebesar Rp9.600.620.000,00.

2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Indikator umum (makro) adalah merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan per kapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Indikator ekonomi makro ini merupakan suatu teknik dalam mengukur dan menganalisis kondisi ekonomi makro suatu negara/daerah yang dapat berfungsi untuk membantu dalam memprediksi perkembangan kinerja ekonomi suatu negara/daerah.

Indikator ekonomi makro daerah digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBD dengan memperhatikan sasaran pembangunan dan juga perkembangan perekonomian domestik terkini. Indikator ekonomi makro mampu menganalisis kegiatan perekonomian dan fenomena perekonomian secara menyeluruh dan luas. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi.

2.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2024 mengalami perlambatan sebesar 0,27% dari angka 4,79% pada Tahun 2023 menjadi 4,52% pada Tahun 2004. Angka pertumbuhan ini tidak berhasil melampaui target pertumbuhan ekonomi daerah pada RPJMD yang ditargetkan sebesar 4,63%. Namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Sumatera Barat, angka pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi masih berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang berada pada angka 4,36%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya terjadi pada skala wilayah Kota Bukittinggi saja namun terjadi juga pada skala nasional dan regional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada skala nasional terjadi seiring dengan menurunnya net ekspor Indonesia dan melemahnya aktivitas perekonomian global.

Untuk wilayah Kota Bukittinggi, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 dipicu oleh terjadinya bencana alam dibeberapa wilayah di Provinsi Sumatera Barat berupa banjir dan longsor yang mengakibatkan akses jalan utama Padang – Bukittinggi putus total di kawasan Silaiang Padang Panjang. Kondisi tersebut dan perbaikan jalan yang dilakukan sepanjang Tahun 2024 cukup berdampak terhadap penurunan aktivitas perdagangan dan jasa yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dan perbandingannya dengan Target RPJMD, pertumbuhan ekonomi Regional dan Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

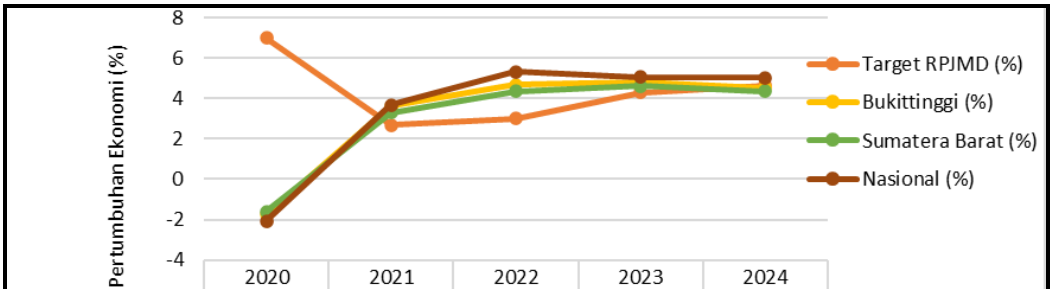

	2020	2021	2022	2023	2024
Target RPJMD (%)	7	2,67	3	4,29	4,63
Bukittinggi (%)	-1,74	3,61	4,68	4,79	4,52
Sumatera Barat (%)	-1,6	3,29	4,36	4,62	4,36
Nasional (%)	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Target RPJMD, Provinsi, dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024

Grafik di atas memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari Tahun 2020 sampai dengan 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi bernilai negatif pada Tahun 2020, yaitu sebesar -1,74%. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian nasional terguncang secara mendadak, ketidakstabilan investasi, dan terjadi pengangguran akibat diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) secara nasional. Setelah berlalunya masa pandemi Covid-19 pada Tahun 2021 sampai dengan 2023, perekonomian nasional tumbuh.

Hal ini juga terjadi di Kota Bukittinggi, pertumbuhan ekonomi bernilai positif semenjak Tahun 2021 sampai Tahun 2024. Dari grafik tersebut juga terlihat sejak kurun waktu empat tahun belakangan, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tetap lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat, namun masih lebih rendah dari pertumbuhan nasional. Meskipun mengalami perlambatan pada Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 0,27%, namun masih berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi tetap konsisten melaksanakan pembangunan ekonomi, mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja untuk menekan tingkat pengangguran kinerja. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya adalah mendorong keterbukaan akses lapangan kerja oleh pencari kerja, menyelenggarakan pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang terdiri dari Usaha Mikro Kecil Menengah melalui SKPD terkait.

Capaian petumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dibandingan dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi tahun

2024 berada di atas pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto, namun berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Payakumbuh dan sama dengan Kota Padang Panjang. Berikut capaian pertumbuhan ekonomi kota di wilayah Sumatera Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2.8 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan Daerah Setara di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 s.d. 2024

Kota	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Kota Padang	-1,86	3,66	4,33	4,54	4,65
Kota Solok	-1,42	3,56	4,60	4,81	4,55
Kota Sawahlunto	-1,27	2,49	3,98	4,46	4,02
Kota Padang Panjang	-1,44	3,46	4,39	4,84	4,52
Kota Bukittinggi	-1,74	3,61	4,68	4,79	4,52
Kota Payakumbuh	-1,65	3,58	4,52	4,70	4,53
Kota Pariaman	-1,32	3,53	4,55	4,79	4,51

Sumber: Sumatera Barat dalam Angka, 2025

2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregrat pendapatan dari waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi diperoleh dari perhitungan PDB atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.9 Perkembangan PDRB per Kapita Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024

URAIAN/TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (juta Rp)	8.627,53	9.026,56	10.194,02	11.131,58	11.747,42
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (juta Rp)	6.045,09	6.263,04	6.555,33	6.869,40	7.180,21
Jumlah Penduduk (jiwa)	121.028,00	121.588,00	122.311,00	124.047,00	125.015,00
PDRB per kapita ADHB (juta Rp)	71,29	74,23	82,85	89,73	93,96
PDRB per Kapita ADHK	49,95	51,51	53,59	55,37	57,43

Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2024 bernilai sebesar Rp93,96 juta berada di atas target yang ditetapkan dalam RPJMD, yaitu Rp83,51 juta dan mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp4,23 juta. Kenaikan ini dipengaruhi oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa terhadap PDRB per kapita penduduk Kota Bukittinggi. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya PDRB pada lapangan usaha bidang pedagangan besar dan eceran serta bidang transportasi dan pergudangan. Kedua sektor ini saling terkait dan sejalan dengan keberadaan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa dimana dalam pemenuhan stok barang yang diperdagangkan akan menggerakan jasa transportasi dan pergudangan karena rata-rata barang tersebut dipasok dari luar Kota Bukittinggi. Hal yang sama juga terjadi pada PDRB per kapita berdasarkan harga konstan.

Dari tabel di atas terlihat perkembangan PDRB per kapita Kota Bukittinggi mengalami kecenderungan naik setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan penambahan pendapatan per kapita penduduknya yang mana hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil dari tahun ke tahunnya. Cukup tingginya nilai PDRB per kapita dan pendapatan regional dari tahun ke tahun belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi itu di dalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

2.2.3 Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh masyarakat. Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat yaitu akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Laju inflasi didefinisikan sebagai peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan adanya ketidaklancaran distribusi barang. Naik turunnya angka inflasi menggambarkan seberapa besar gejolak ekonomi terutama harga disuatu daerah dan lebih jauh lagi dapat mencerminkan sebesar apa kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang di pasaran. Pengukurannya dilakukan berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan harga barang atau jasa tersebut bisa menurunkan daya beli masyarakat karena nilai mata uang yang rendah tidak seimbang dengan kenaikan harga barang yang tajam.

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator inflasi ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu

menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa. Oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi.

Berikut perbandingan Nilai Inflasi Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia dari Tahun 2020 s.d.Tahun 2024.

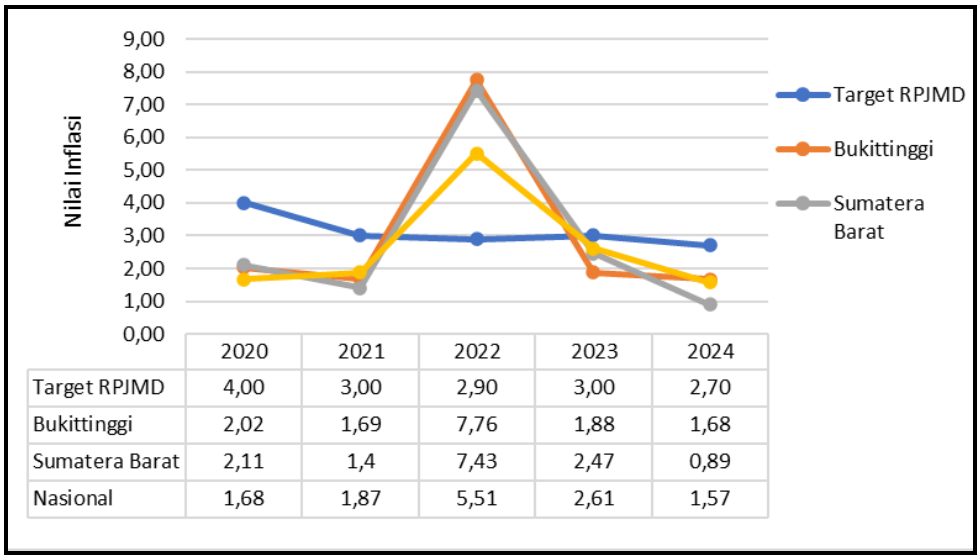

	2020	2021	2022	2023	2024
Target RPJMD	4,00	3,00	2,90	3,00	2,70
Bukittinggi	2,02	1,69	7,76	1,88	1,68
Sumatera Barat	2,11	1,4	7,43	2,47	0,89
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber: BPS Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 2.2 Nilai Inflasi Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia dari Tahun 2020 s.d.Tahun 2024

Inflasi *year on year* Kota Bukittinggi Tahun 2024 tercatat sebesar 1,68%, berada di atas laju inflasi Sumatera Barat yang tercatat sebesar 0,89% dan Laju Inflasi Nasional sebesar 1,57%. Inflasi yang terjadi di Kota Bukittinggi ini sekaligus merupakan inflasi tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi mengalami inflasi terendah yaitu pada Tahun 2021 sebesar 1,69% dan tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 7,76%. Jika dilihat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir laju inflasi Kota Bukittinggi selalu berada di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini menggambarkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok tetap dapat dikendalikan meskipun kondisinya tidak stabil hal ini dipengaruhi banyak hal diantaranya ketersedian bahan pokok yang tidak sesuai tingkat kebutuhan atau terjadi kelangkaan. Fluktuasi laju Inflasi Kota Bukittinggi 5 (lima) tahun terakhir lebih fluktuatif dibandingkan dengan Kota Padang. Perbandingan Inflasi Kota Bukittinggi dengan Kota Padang dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Perbandingan Inflasi dan Laju Inflasi Kota Bukittinggi dengan Daerah Setara di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 s.d. 2024

Kota	Inflasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Padang	2,12	1,37	7,38	2,55	1,00
Bukittinggi	2,02	1,69	7,76	1,88	1,68

Sumber: BPS Tahun 2024

Kota Bukittinggi mengalami inflasi tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 7,76% dan terendah pada Tahun 2024 sebesar 1,68%, namun masih merupakan angka inflasi tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.

2.2.4 Ketimpangan Pendapatan *(Gini Ratio)*

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat (Todaro, 2003). Ketimpangan pendapatan bias menyebabkan kemiskinan yang lebih tinggi di kalangan kelompok dengan pendapatan rendah. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di suatu daerah, salah satu contohnya adalah ketimpangan terjadi karena adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan kemiskinan.

Distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pandapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (Gini *Ratio*) merupakan suatu ukuran kemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Indeks Gini/Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

1. Ketimpangan Rendah (g 0,3);
2. Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5); dan
3. Ketimpangan Tinggi (g 0,5).

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menghitung Koefisien Gini. Koofiesien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024 berada pada ketimpangan rendah dan sedang meskipun pada tahun 2024 Indeks Gini Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari 0,255 pada tahun 2023 menjadi 0,272 pada tahun 2024. Angka ini berada di bawah Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Indeks Gini Nasional yang berada di angka 0,287 dan 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kota Bukittinggi Tahun 2024 masih

dalam kategori merata perpenduduknya dan dapat diartikan juga ketimpangan masih rendah. Perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi, Provinsi, dan Nasional dari Tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

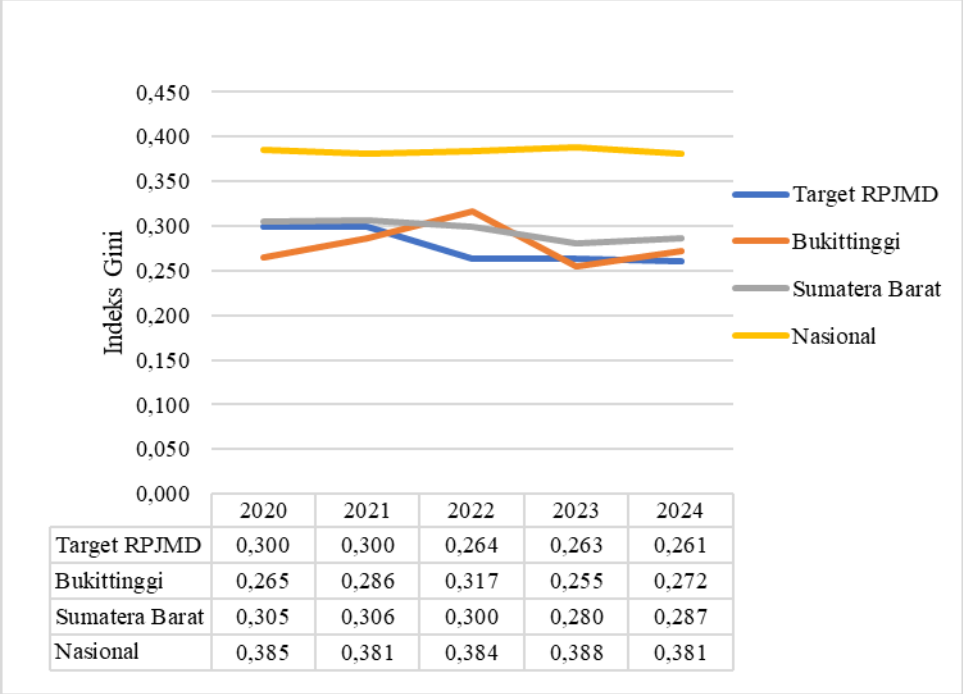

	2020	2021	2022	2023	2024
Target RPJMD	0,300	0,300	0,264	0,263	0,261
Bukittinggi	0,265	0,286	0,317	0,255	0,272
Sumatera Barat	0,305	0,306	0,300	0,280	0,287
Nasional	0,385	0,381	0,384	0,388	0,381

Sumber: Bappelitbangda, BPS Tahun 2025

Gambar 2.3 Indeks Gini Kota Bukittinggi, Provinsi, dan Nasional dari Tahun 2020 s.d. 2024

Dari tabel di atas terlihat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Indeks Gini Kota Bukittinggi selalu lebih rendah dibanding Indeks Gini provinsi dan pusat dengan angka yang juga cenderung menurun. Jika dibandingkan tahun 2020 dengan Tahun 2024 angka Indes Gini Kota Bukittinggi naik tidak signifikan 0,007 poin, artinya dari waktu ke waktu pendapatan masyarakat tetap dalam kondisi merata. Hal ini menggambarkan masyakarat berada pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Untuk perbandingan Indeks Gini Kota Bukittinggi dengan daerah setara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11 Perbandingan Indeks Gini Kota Bukittinggi dengan Daerah Setara Tahun 2021-2024

Indeks Gini	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Kota Padang	0,343	0,354	0,312	0,324
Kota Solok	0,277	0,288	0,256	0,251
Kota Sawahlunto	0,295	0,314	0,308	0,299
Kota Padang Panjang	0,306	0,296	0,273	0,266
Kota Bukittinggi	0,286	0,317	0,255	0,272
Kota Payakumbuh	0,316	0,311	0,316	0,313
Kota Pariaman	0,301	0,272	0,289	0,281

Sumber: BPS Tahun 2025

Pada Tahun 2024 Indeks Gini Kota Bukittinggi berada pada urutan ketiga terendah setelah Kota Solok dan Kota Padang Panjang diantara kota setara di Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya diikuti Kota Pariaman, Kota Sawahlunto dan Kota Padang.

2.2.5 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah besaran rata-rata pengeluaran yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tingkat kemiskinan yang dihitung dari persentase jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026. Garis kemiskinan, gambaran penduduk miskin, kedalaman serta keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi selama 5 tahun terakhir dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Penduduk Miskin Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024

Indikator Kemiskinan	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Garis Kemiskinan (Rupiah)	519.470	540.457	570.032	619.896	658.640
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	4,54	5,14	4,46	4,11	4,08
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	6,01	6,98	6,160	5,78	5,82
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,56	0,80	0,83	0,63	0,43
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,20	0,19	0,24	0,14	0,08

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2025

Garis kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Komponen garis kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GBKM). Peranan garis kemiskinan makanan dalam menentukan besaran garis kemiskinan lebih besar dibanding peranan garis kemiskinan bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan).

Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi terus meningkat setiap tahunnya, Tahun 2024 garis kemiskinan Kota Bukittinggi mencapai Rp658.640,00 per kapita per bulan yang artinya nilai ini adalah pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Kenaikan nilai garis kemiskinan ini diperkirakan karena pengaruh infasi di Kota Bukittinggi yang berdampak pada kenaikan harga komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat miskin. Kenaikan garis kemiskinan ini mengakibatkan biaya hidup yang harus ditanggung oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terus naik. Kenaikan harga bahan makanan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya garis kemiskinan, karena porsinya mencapai 74,08 persen. Sementara itu, 25,92 persen lainnya berasal dari komoditas bukan makanan.

Berdasarkan indikator Garis Kemiskinan yang terus naik dalam rentang tahun 2020-2024, terlihat persentase penduduk miskin semakin menurun dari 4,54 persen pada Tahun 2020 menjadi 4,08 persen di Tahun 2024. Walaupun pada Tahun 2021 tingkat kemiskinan naik sebesar 5,14 persen dimana kondisi pandemic *Covid-19*

dan masa pemulihan ekonomi cukup memberikan pengaruh pada aspek kesejahteraan masyarakat, namun di Tahun 2024 Kota Bukittinggi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan diangka 4,08 persen melalui kebijakan serta melontarkan berbagai program dan kegiatan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat.

Keberhasilan Kota Bukittinggi mengurangi jumlah penduduk miskin ini merupakan keberhasilan Pemerintah yang selalu berupaya menjaga kestabilan harga dengan memberikan bantuan sosial ke masyarakat dan UMKM untuk menguatkan konsumsi masyarakat. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dengan pemberian subsidi kepada pelaku UMKM melalui Tabungan Utsman.

Indikator kemiskinan lainnya yang juga perlu menjadi perhatian yakni tingkat kedalaman kemiskinan *(poverty gap index)* dan tingkat keparahan kemiskinan *(poverty severity index)*.

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran kesenjangan pengeluaran pada masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator makro untuk melihat seberapa besar penduduk yang aktif dalam perputaran perekonomian daerah. Tingkat pengangguran terbuka memperlihatkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Secara konsep, pengangguran terbuka, terdiri dari:

1. Penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. Penduduk yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3. Penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Seiring dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi memperlihatkan angka yang cenderung turun dari tahun ke tahun. Berikut tabel perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran Kota Bukittinggi dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024:

Tabel 2.13 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024

Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka					Jumlah Pengangguran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Bukittinggi	7,51	6,09	4,90	4,99	4,72	5.274	4.209	3.692	3.295	3.096
Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75	190.609	179.948	180.106	179.505	178.278
Indonesia	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91	9.767.750	9.102.050	8.400.000	7.860.000	7.470.000

Sumber: BPS, 2025

Tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2024 sebesar 4,72% turun jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu 4,99% atau turun sebesar 0,27%. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Pusat maka tingkat pengangguran Kota Bukittinggi masih lebih rendah. Angka ini juga sejalan dengan jumlah pengangguran dimana pada Tahun 2024 jumlah pengangguran tejadi penurunan dibanding Tahun 2023 yaitu dari 3.295 orang pada Tahun 2023 turun menjadi 3.096 orang pada Tahun 2024. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, 199 penduduk tidak lagi menganggur. Namun jika dilihat dalam kurun waktu lima tahun terkhusus pascapandemi Covid-19 Tahun 2020 tingkat pengangguran Kota Bukittinggi cenderung tinggi artinya penduduk dalam usia angkatan kerja sejumlah 5.274 orang tidak bekerja secara tetap.

Tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Kota lain di Sumatera Barat berada pada urutan kedua setelah Kota Solok. Sementara jumlah pengangguran pada Tahun 2024 masih relatif lebih tinggi berada di urutan kelima setelah Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Pariaman. Berikut gambaran tingkat pengangguran terbuka dan jumlah pengangguran Kota di Sumatera Barat Tahun 2020 s.d. 2024.

Tabel 2.14 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran Kota Bukittinggi dengan Daerah Setara di Sumatera Barat Tahun 2020 s.d. 2024

Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Tahun)					Jumlah pengangguran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Padang	13,64	13,37	11,69	10,86	9,88	65.014	64.234	56.163	52,014	48.067
Solok	8,35	5,15	3,90	3,72	3,62	2.962	1.858	1501	1,488	1.505
Sawahlunto	8,20	6,38	5,00	4,98	5,55	2.709	2.057	1698	1,782	2.122
Padang Panjang	7,22	4,90	4,84	5,49	4,94	1.994	1.299	1268	1,571	1.443
Bukittinggi	7,51	6,09	4,90	4,99	4,72	5.274	4.209	3295	3,250	3.096
Payakumbuh	6,68	6,47	5,16	4,84	4,87	4.664	4.805	3812	3,770	3.791
Pariaman	5,73	6,09	5,19	5,68	5,32	2.411	2.542	2376	2,953	2.746

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka, 2025

Dikaitkan dengan upaya meningkatkan capaian makro ekonomi sesuai target yang dietapkan pada RPJMD, maka penurunan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah pengangguran ke depan harus menjadi prioritas, salah satunya melalui program-program pemulihan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pecapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga faktor komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata, yaitu hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Lama hidup yang diukur dengan angaka harapan hidup ketika lahir. Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas serta standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuikan menjadi prioritas daya beli. IPM Kota Bukittinggi dan perbandingannya dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.15 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/orang/ tahun)	IPM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2020	Bkt: 74,58 Sbr: 69,47 Ind: 71,47	Bkt: 11,33 Sbr: 8,49 Ind: 8,48	Bkt: 14,97 Sbr: 14,02 Ind: 12,98	Bkt: 13.282 Sbr: 10.733 Ind: 11.010	Bkt: 80,68 Sbr: 72,28 Ind: 71,94
2021	Bkt: 74,70 Sbr: 69,59 Ind: 71,47	Bkt: 11,34 Sbr: 7,07 Ind: 8,48	Bkt: 14,98 Sbr: 14,09 Ind: 12,98	Bkt: 13.331 Sbr: 10.790 Ind: 11.156	Bkt: 80,79 Sbr: 72,65 Ind: 72,29
2022	Bkt: 75,02 Sbr: 69,90 Ind: 71,47	Bkt: 11,63 Sbr: 9,18 Ind: 8,48	Bkt: 14,99 Sbr: 14,10 Ind: 12,98	Bkt: 13.633 Sbr: 11.130 Ind: 11.479	Bkt: 81,52 Sbr: 73,26 Ind: 72,91
2023	Bkt: 75,33 Sbr: 70,19 Ind: 73,93	Bkt: 11,64 Sbr: 9,28 Ind: 8,77	Bkt: 15,01 Sbr: 14,11 Ind: 13,15	Bkt: 13.859 Sbr: 11.380 Ind: 11.899	Bkt: 81,88 Sbr: 73,75 Ind: 73,55
2024	Bkt: 75,62 Sbr: 74,37 Ind: 74,15	Bkt: 11,65 Sbr: 9,44 Ind: 8,85	Bkt: 15,28 Sbr: 14,30 Ind: 13,21	Bkt: 14.297 Sbr: 11.718 Ind: 12.341	Bkt: 82,61 Sbr: 76,43 Ind: 75,02

Sumber: BPS Tahun 2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu Tahun 2020 s.d. 2024, Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi selalu berada di atas Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi sebesar 82,61 berada di atas Provinsi Sumatera Barat 76,43 dan Nasional 75,02.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi mengalami peningkatan cukup signifikan dari 81,78 pada Tahun 2023 menjadi 82,61 pada Tahun 2024 atau meningkat sebesar 0,83. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan pada Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023.

2.3 Penetapan APBD dan *Refocusing* Anggaran

Setelah ditetapkannya APBD Tahun 2024 maka Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pergeseran sebanyak 2 (dua) kali pergeseran dan 1 (satu) kali perubahan APBD sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Penetapan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada tanggal 29 Desember 2023. Selanjutkan dijabarkan melalui Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penetapan Total Pendapatan Daerah sebesar Rp756.768.257.429,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp153.160.514.484,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp603.607.742.945,00, sedangkan total Belanja Daerah sebesar Rp806.768.257.429,00.
2. Pergeseran I (pertama) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pergeseran dilakukan untuk penyesuaian atas beberapa sub rekening yang telah ditetapkan pada penetapan APBD yakni pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan.
3. Pergeseran II (kedua) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pergeseran dilakukan untuk penyesuaian atas sub rekening Belanja Operasi dan Belanja Modal.
4. Penetapan APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harud dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta adanya keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Perubahan APBD dilakukan untuk penyesuaian atas Pendapatan Asli Daerah berupa penambahan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 daa Pendapatan Transfer sebesar Rp18.305.219.589,00, pengurangan atas Belanja Operasi sebesar Rp1.081.2222.379,00, penambahan anggaran belanja modal sebesar

Rp2.744.115.133,00 serta pengurangan terhadap anggaran penerimaan pembiayaan dari APBD awal sebesar Rp16.942.326.835,00.

Secara lebih rinci besaran pergeseran sampai dengan perubahan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Tahapan Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2024

URAIAN	APBD Murni 2024	PERGESERAN I	PERGESERAN II	APBD Perubahan 2024
	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023	Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024	Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PENDAPATAN DAERAH	**756.768.257.429,00**	**773.883.477.018,00**	**773.883.477.018,00**	**775.373.477.018,00**
Pendapatan Asli Daerah	153.160.514.484,00	153.160.514.484,00	153.160.514.484,00	153.460.514.484,00
Pendapatan Transfer	603.607.742.945,00	620.722.962.534,00	620.722.962.534,00	621.912.962.534,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	**806.768.257.429,00**	**806.941.150.183,00**	**806.941.150.183,00**	**808.431.150.183,00**
Belanja Operasi	728.968.065.785,00	723.744.407.205,00	723.746.567.205,00	727.886.843.406,00
Belanja Modal	67.199.571.644,00	72.596.122.978,00	72.593.962.978,00	69.943.686.777,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	9.600.620.000,00	9.600.620.000,00	9.600.620.000,00	9.600.620.000,00
Surplus / (Defisit)	(50.000.000.000,00)	(33.057.673.165,00)	(33.057.673.165,00)	(33.057.673.165,00)
PEMBIAYAAN	**50.000.000.000,00**	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.165,00**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	50.000.000.000,00	33.057.673.165,00	33.057.673.165,00	33.057.673.165,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-
SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-

S-

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Target kinerja APBD Tahun 2024 tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021. Seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua, maka Pemerintah Kota Bukittinggi memandang perlu melakukan perubahan RKPD Tahun 2024. Perubahan RKPD Tahun 2024 dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah maka dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 s.d. 2026 telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Bukittinggi. Selanjutnya untuk mewujudkan prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah maka ditetapkanlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan rencana aksi yang lebih kongkrit yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2023 pada tanggal 29 Desember 2023 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2023 pada tanggal 29 Desember 2023.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2024 pada tanggal 24 September 2024 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 pada tanggal 24 September 2024.

Sebagai alat dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah, APBD memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilakukan secara maksimal didasarkan kepada efisiensi dan efektifitas kegiatan sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pada bagian ini akan diuraikan secara umum beberapa hal terkait dengan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan pelaksanaan anggaran tahun 2024.

Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 pada APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp775.373.477.018,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pendapatan Transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah dari pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Jumlah anggaran belanja daerah Tahun 2024 pada APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp808.431.150.183,00. Komposisi pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp33.057.673.165,00 yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.

Dari target pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 tersebut, dapat dilihat realisasi kinerja keuangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PENDAPATAN DAERAH - LRA	**775.373.477.018,00**	**741.382.079.328,40**	**733.692.996.334,00**	**706.975.448.172,65**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	**153.460.514.484,00**	**130.112.097.312,94**	**137.413.209.479,00**	**123.112.709.360,20**
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	54.110.644.633,00	50.098.130.579,00	53.610.644.633,00	51.690.816.406,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	74.688.582.055,00	51.629.686.961,72	51.990.259.000,00	39.222.055.481,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	8.307.425.308,00	8.363.843.874,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	16.353.862.488,00	18.523.395.556,22	23.504.880.538,00	23.835.993.599,20
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	**621.912.962.534,00**	**611.269.982.015,46**	**596.279.786.855,00**	**583.728.726.369,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569.055.919.679,00	566.436.096.135,00	558.512.589.194,00	554.987.256.154,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	52.857.042.855,00	44.833.885.880,46	37.767.197.661,00	28.741.470.215,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.012.443,45**
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	134.012.443,45
BELANJA DAERAH	**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**811.015.184.022,00**	**751.239.962.696,31**
BELANJA OPERASI	**727.886.843.406,00**	**665.946.895.972,54**	**721.468.847.488,00**	**667.764.935.144,91**
Belanja Pegawai	348.366.503.439,32	336.607.731.061,67	331.188.392.484,00	308.535.703.099,00
Belanja Barang dan Jasa	316.715.324.592,68	272.602.571.149,75	336.418.334.978,00	308.199.944.742,03
Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	2.500.000.000,00	2.499.916.363,00
Belanja Hibah	57.105.915.374,00	51.339.007.283,12	46.304.120.026,00	43.676.370.940,88
Belanja Bantuan Sosial	3.199.100.000,00	2.897.600.000,00	5.058.000.000,00	4.853.000.000,00
BELANJA MODAL	**69.943.686.777,00**	**63.532.002.219,77**	**79.095.716.534,00**	**74.023.558.551,40**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.576.288.033,00	12.261.224.480,70	29.030.076.880,00	26.111.089.608,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.771.313.480,00	31.435.241.904,22	27.930.651.811,00	27.005.206.763,60

URAIAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.966.602.364,00	18.357.697.907,85	20.726.432.153,00	19.501.037.779,33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.429.482.900,00	1.278.037.927,00	1.408.555.690,00	1.406.224.400,00
Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	199.800.000,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.000.000.000,00**	**380.911,00**	**1.000.000.000,00**	**849.000,00**
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	380.911,00	1.000.000.000,00	849.000,00
BELANJA TRANSFER	**9.600.620.000,00**	**9.597.200.000,00**	**9.450.620.000,00**	**9.450.620.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00
JUMLAH BELANJA	**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**811.015.184.022,00**	**751.239.962.696,31**
SURPLUS/(DEFISIT)	**(33.057.673.165,00)**	**2.305.600.225,09**	**(77.322.187.688,00)**	**(44.264.514.523,66)**
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**77.322.187.688,00**	**77.322.187.688,46**
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	77.322.187.688,00	77.322.187.688,46
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Penyetoran Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**77.322.187.688,00**	**77.322.187.688,46**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**35.363.273.389,89**	**0,00**	**33.057.673.164,80**

Berdasarkan tabel di atas terlihat secara umum pendapatan daerah Tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp741.382.079.328,40 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp775.373.477.018,00 atau 95,62%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp733.692.996.334,00 direalisasikan sebesar Rp706.975.448.172,65 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp34.406.631.155,75 atau 4,87%. Pencapaian target pendapatan tersebut meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp130.112.097.312,94 dari target yang ditetapkan sebesar Rp153.460.514.484,00 atau 84,79% dari anggarannya dan mengalami kenaikan dari Tahun 2023 sebesar Rp6.999.387.952,74 atau meningkat 5,69% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023.
2. Pendapatan Transfer dengan realisasi mencapai 98,29% atau sebesar Rp611.269.982.015,46 dari anggaran sebesar Rp621.912.962.534,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp583.728.726.369,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp596.279.786.855,00 terdapat kenaikan sebesar Rp27.541.255.646,46 atau 4,71% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dianggarkan pada Tahun 2024 dan tidak ada realisasi.

Berikut ini dapat dilihat komposisi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 sebagai berikut.

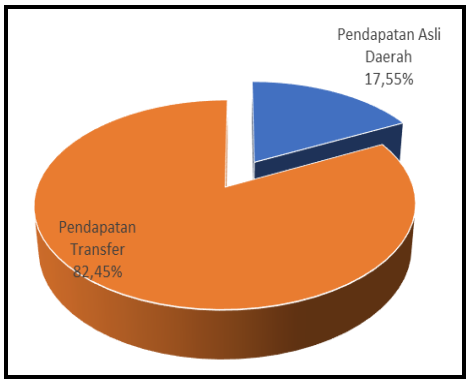

Gambar 3.1 Komposisi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024

Grafik pada gambar di atas menggambarkan bahwa sumber pendapatan Pemerintah Kota Bukittinggi yang terbesar adalah Pendapatan Transfer yakni 82,45% dari total penerimaan APBD. Sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan APBD adalah sebesar 17,55%.

Sedangkan perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada gambar berikut.

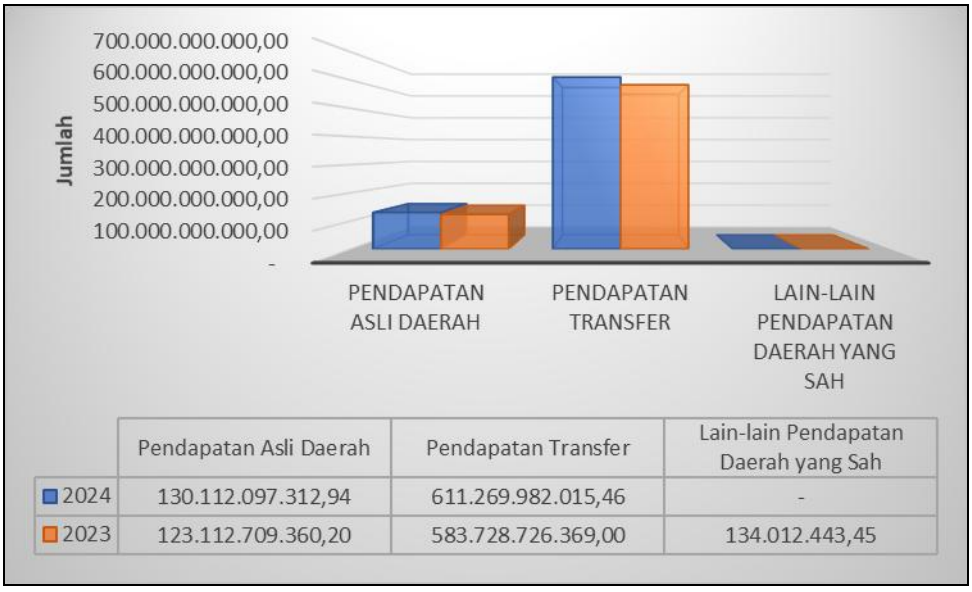

	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
2024	130.112.097.312,94	611.269.982.015,46	-
2023	123.112.709.360,20	583.728.726.369,00	134.012.443,45

Grafik 3.2 Perbandingan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 dan 2023

Seperti dilihat pada grafik di atas, untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan penerimaan PAD Tahun 2023, yaitu dari sebesar Rp123.112.709.360,20 menjadi Rp130.112.097.312,94. Persentase kenaikan tertinggi terdapat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) diamana Pendapatan Retribusi Daerah meningkat 31,63% dari sebesar Rp39.222.055.481 pada Tahun 2023 menjadi Rp51.629.686.961,72 pada Tahun 2024 atau naik sebesar Rp12.407.631.480,72.

Selanjutnya untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah tahun 2024 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

Pendapatan Daerah tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Daerah pada Tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp808.431.150.183,00 dengan realisasi sebesar Rp739.076.479.103,31 atau menyerap anggaran sebesar 91,42%. Dari jumlah anggaran Belanja Daerah tersebut dialokasikan sebesar Rp727.886.843.406,00 untuk Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp665.946.895.972,54 atau 91,49%. Secara ringkas penyerapan anggaran Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kota Bukittinggi Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pegawai	348.366.503.439,32	336.607.731.061,67	96,62	11.758.772.377,65
Belanja Barang dan Jasa	316.715.324.592,68	272.602.571.149,75	86,07	44.112.753.442,93
Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	100,00	13.522,00
Belanja Hibah	57.105.915.374,00	51.339.007.283,12	89,90	5.766.908.090,88
Belanja Bantuan Sosial	3.199.100.000,00	2.897.600.000,00	90,58	301.500.000,00
Jumlah	**727.886.843.406,00**	**665.946.895.972,54**	**91,49**	**61.939.947.433,46**

Selain Belanja Operasi, alokasi selanjutnya Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan jumlah anggaran sebesar Rp80.544.306.777,00 dengan realisasi sebesar Rp73.129.583.130,77 atau 93,22% sebagaimana rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Bukittinggi Selain Belanja Operasi Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal	69.943.686.777,00	63.532.002.219,77	90,83	6.411.684.557,23
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	380.911,00	0,04	999.619.089,00
Belanja Transfer	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	99,96	3.420.000,00
Jumlah	**80.544.306.777,00**	**73.129.583.130,77**	**90,79**	**7.414.723.646,23**

Perbandingan komposisi realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

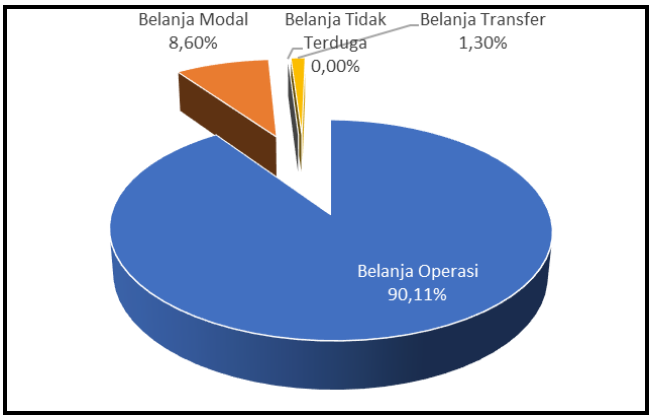

Gambar 3.3 Komposisi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024

Sebagaimana terlihat pada grafik di atas, sekitar 90,11% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan sisanya terdiri atas 8,60% digunakan untuk Belanja Modal dan 1,30% digunakan untuk Belanja Transfer serta 0,0001% untuk Belanja Tidak Terduga.

Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diuraikan di atas, didapatkan surplus sebesar Rp2.305.600.225,09. Dari Pembiayaan Netto berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp33.057.673.164,80 ditambah dengan surplus Tahun Anggaran 2024 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp35.363.273.389,89. Rincian dari pembiayaan daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Surplus / (Defisit)	**(33.057.673.165,00)**	**2.305.600.225,09**	**(6,97)**	**(35.363.273.390,09)**
Penerimaan Pembiayaan	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**100,00**	**0,20**
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	100,00	0,20
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	100,00	0,20
SiLPA	**0,00**	**35.363.273.389,89**	**0,00**	**0,00**

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2024, defisit yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp33.057.673.165,00 dan direncanakan akan ditutupi dengan Penerimaan Pembiayaan yang seluruhnya berasal dari SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya, pada realisasinya menghasilkan surplus sebesar Rp2.305.600.225,09. Nilai Surplus ini ditambah dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp33.057.673.164,80 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) pada realisasi APBD Tahun 2024 sebesar Rp35.363.273.389,89.

Secara umum kegiatan yang sudah direncanakan dan disusun pada Tahun 2024 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Capaian realisasi kinerja pendapatan untuk Tahun 2024 sebesar Rp741.382.079.328,40 dari jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp775.373.477.018,00 atau 95,62%. Adapun rincian realisasi pendapatan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA SKPD Tahun Anggaran 2024

NO.	SKPD	PENDAPATAN		PERSENTASE REALISASI (%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Dinas Pertanian dan Pangan	590.860.000,00	590.985.955,00	100,02
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	820.000.000,00	771.536.752,00	94,09
3.	Badan Keuangan	700.809.894.963,00	689.686.585.074,72	98,41
4.	Dinas Lingkungan Hidup	2.050.000.000,00	1.647.799.500,00	80,38
5.	Dinas Kesehatan	16.865.787.055,00	19.084.179.247,68	113,15
6.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20.196.935.000,00	10.012.865.989,00	49,58
7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	150.000.000,00	113.962.500,00	75,98
8.	Dinas Pariwisata	30.000.000.000,00	17.728.894.310,00	59,1
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	140.000.000,00	127.500.000,00	91,07
10.	Dinas Perhubungan	3.750.000.000,00	1.617.770.000,00	43,14
Jumlah		**775.373.477.018,00**	**741.382.079.328,40**	**95,62**

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi Belanja Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun 2024 mengalami penurunan dibanding Tahun 2023 sebesar 1,62% yakni sebesar Rp12.163.483.593,00. Realisasi belanja Tahun 2024 sebesar Rp739.076.479.103,31 dari anggaran sebesar Rp808.431.150.183,00, sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp751.239.962.696,31. Adapun rincian belanja pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja-LRA SKPD Tahun Anggaran 2024

NO.	SKPD	BELANJA		PERSENTASE REALISASI (%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	20.376.195.845,00	20.054.318.331,00	98,42
2.	Kecamatan Guguk Panjang	16.385.002.451,00	13.806.561.047,00	84,26
3.	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	15.475.061.414,00	13.424.703.305,00	86,75
4.	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	18.645.006.872,00	15.992.218.024,00	85,77
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	12.995.922.656,00	11.535.816.210,36	88,76
6.	Inspektorat Daerah	8.693.250.490,00	8.469.363.348,00	97,42
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	179.183.282.570,00	173.583.590.045,46	96,87
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.181.923.960,00	19.749.754.011,00	93,24
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.601.774.120,00	10.623.741.592,00	91,57
10.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.228.873.904,00	5.936.163.047,00	95,30

NO.	SKPD	BELANJA		PERSENTASE REALISASI (%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.625.161.724,00	7.875.552.692,00	91,31
12.	Dinas Pertanian dan Pangan	11.486.606.336,00	9.992.232.864,84	86,99
13.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.061.547.486,00	4.643.712.177,00	91,74
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.255.950.060,00	4.758.003.148,00	90,53
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	8.122.062.958,00	7.570.255.083,00	93,21
16.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20.796.370.760,00	17.958.318.703,55	86,35
17.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.716.716.150,00	6.326.650.504,00	94,19
18.	Dinas Perhubungan	15.542.652.311,00	14.247.042.555,00	91,66
19.	Sekretariat Daerah	69.554.130.876,00	65.819.268.776,00	94,63
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.339.435.366,00	6.092.616.788,00	96,11
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	36.849.360.716,00	32.584.449.335,36	88,43
22.	Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	132.184.363.735,00	122.972.821.175,48	93,03
23.	Dinas Sosial	10.096.377.019,00	7.733.198.118,00	76,59
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.833.020.822,00	4.709.335.258,00	97,44
25.	Dinas Lingkungan Hidup	41.851.048.702,00	37.250.182.497,00	89,01
26.	Dinas Pariwisata	24.183.314.097,00	20.005.739.595,13	82,73
27.	Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan	7.964.094.392,00	7.477.543.479,00	93,89
28.	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.602.099.282,00	6.792.731.946,13	78,97
29.	Sekretariat DPRD	42.036.544.314,00	36.752.905.983,00	87,43
30.	Badan Keuangan	31.563.998.795,00	24.337.689.464,00	77,11
Jumlah		**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**91,42**

3.2 Hambatan/Kendala dan Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target Kinerja

Terhadap kinerja pembangunan dalam berbagai bidang, adanya kemajuan di dalam penanganan permasalahan-permasalahan yang ada diharapkan mampu mengurangi hambatan dalam pencapaian target sesuai kebijakan yang telah ditetapkan daerah. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun kendala dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun 2024 antara lain adalah:

1. Secara umum target pendapatan belum tercapai seperti pajak restoran dan retribusi parkir disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih belum rendah dalam membayar pajak dan memanfaatkan tempat parkir yang telah disediakan;
2. Belum adanya sikap tegas Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap wajib pajak yang tidak memungut pajak namun Pemerintah Kota Bukittinggi telah memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak/masyarakat;

3. Adanya kebutuhan pendanaan yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan pemilihan umum dan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Tahun 2024; dan
4. Masih kurang maksimalnya pola perencanaan pada SKPD, sehingga dalam tahun berjalan diperlukan penyesuaian anggaran belanja pada kegiatan yang mengakibatkan tertundanya realisasi anggaran.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2024 antara lain adalah:

1. Perbaikan sistem kerja, sarana, dan prasarana yang mendukung guna pencapaian target kinerja;
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan
4. Meningkatnya penyebarluasan informasi terkait pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

CALK

BAB IV

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

BAB IV

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

4.1. Struktur Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pemerintah Kota Bukittinggi selaku entitas pelaporan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 merupakan laporan konsolidasi dari 30 (tiga puluh) SKPD yang terdiri dari Dinas/Badan/Satuan/Kantor/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD termasuk didalamnya fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melekat pada SKPD Badan Keuangan.

Laporan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksana anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finasial. Laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan menggambarkan perbandiangan antara anggaran dan realisasinya serta mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023. Unsur yang dicakup dalam LRA sebagai berikut.

   a. Pendapatan;
   b. Belanja;
   c. Surplus/Defisit;
   d. Pembiayaan; dan

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

   LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023. LPSAL terdiri dari unsur sebagai berikut.

   a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
   b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan;
   c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA);
   d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;
   e. Lain-lain; dan
   f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca Daerah

   Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas sampai dengan tanggal tertentu, Neraca disajikan komparatif antara Tahun 2024 dan Tahun 2023. Neraca Daerah Kota Bukittinggi memuat informasi-informasi akun-akun Aset, yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya, akun Kewajiban yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang serta Ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas. Pemerintah Kota Bukittinggi mengklasifikasikan Neraca dalam struktur akun sebagai berikut.

   a. Aset
      1) Aset Lancar;
      2) Investasi Jangka Panjang;
      3) Aset Tetap;
      4) Dana Cadangan; dan
      5) Aset Lainnya.
   b. Kewajiban
      1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
      2) Kewajiban Jangka Panjang.
   c. Ekuitas

4. Laporan Operasional (LO)

   LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola Pemerintah Kota Bukittinggi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam tahun 2024. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan LO, beban, surplus atau defisit operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional menggambarkan laporan

operasional riil untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023, menyajikan pos-pos sebagai berikut.

a. Kegiatan Operasional
    1) Pendapatan;
    2) Beban; dan
    3) Surplus/Defisit Operasi.
b. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
    1) Surplus Non Operasional;
    2) Defisit Non Operasional; dan
    3) Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa.
c. Pos Luar Biasa
    1) Pendapatan Luar Biasa; dan
    2) Beban Luar Biasa.
d. Surplus/Defisit LO

5. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi yakni Tahun 2024 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran kas tanpa melalui rekening kas umum daerah namun dianggarkan pada APBD maupun yang bersumber dari transitoris (nonanggaran) yang terdiri dari:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
    1) Arus Masuk Kas; dan
    2) Arus Keluar Kas.
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
    1) Arus Masuk Kas; dan
    2) Arus Keluar Kas.
c. Arus Kas Aktivitas Pendanaan
    1) Arus Masuk Kas; dan
    2) Arus Keluar Kas.
d. Arus Kas Aktivitas Transitoris
    1) Arus Masuk Kas; dan
    2) Arus Keluar Kas.

e. Kenaikan/Penurunan Kas

f. Saldo Awal Kas

g. Saldo Akhir Kas

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

   LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyajian LPE terdiri dari:

   a. Ekuitas Awal.

   b. Surplus/Defisit LO

   c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

      1) Koreksi Nilai Persediaan;

      2) Selisih Revaluasi Aset Tetap; dan

      3) Lain-lain.

   d. Ekuitas Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

   a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan, dan pencapaian target peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

   b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;

   c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian penting lainnya; dan

   d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar dan memadai *(full disclosure)* yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

   Unsur yang dicakup dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagaimana sistematika penulisan yang telah dijabarkan pada BAB I, yaitu:

   a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

   b. Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro;

   c. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan;

   d. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;

   e. Penjelasan Pos–pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

   f. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah; dan

   g. Penutup.

4.2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menjadi pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah dan wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD serta pihak perencana termasuk tim anggaran pada pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2024 disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penyajian Laporan Keuangan pada saat penyusunan LKPD Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2020.

Pengaturan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur APBD serta akun/rekening laporan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya yang telah diakomodasi dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi adalah dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

4.3. Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

4.3.1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas baik entitas pelaporan ataupun entitas akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan

mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

4.3.2. Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

4.3.3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.4. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
4. Pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari sekelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan berperan sebagai perwujudan akuntabilitas pengelolaan anggaran maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu meskipun pemerintah memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah harus memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi lebih lanjut.

4.5. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

4.5.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual

untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.5.2. Prinsip Nilai Perolehan *(Historical Cost Principle)*

Prinsip nilai perolehan aset dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration)* untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan, sementara itu untuk kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bukittinggi. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.5.3. Prinsip Realisasi *(Realization Principle)*

Bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, ketersediaan pendapatan yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu periode tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah ataupun membayar utang dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip penandingan biaya-pendapatan *(matching-cost against revenue principle)* dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

4.5.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal *(Substance Over Form)*

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.5.5. Prinsip Periodisitas *(Periodicity)*

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode bulanan, triwulanan, dan semesteran digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.5.6. Prinsip Konsistensi *(Consistency)*

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap *(Full Disclosure)*

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.8. Prinsip Penyajian Wajar *(Fair Presentation)*

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu (konservatisma). Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

4.6. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayar kembali. Ekuitas dana diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.7. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

4.7.1. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan penyusunannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. **Relevan (*Relevance*)**

   Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan pada laporan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan secara jelas agar dapat mencegah terjadinya kekeliruan. Informasi yang relevan jika:

   a. Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value)*, artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menegaskan atau mengoreksi espektasinya dimasa lalu.

   b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

   c. Tepat waktu (*timeliness*), artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berguna dalam mengambil keputusan pengguna laporan keuangan.

   d. Lengkap (*complete*), artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan informasi lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.

2. **Andal (*Reliable*)**

   Informasi dalam laporan keuangan harus terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

   a. Penyajian jujur (*respresentational faithfulness*), bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa yang harus disajikan secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

   b. Dapat diverifikasi *(verifiability)*, bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang dapat diuji apabila dilakukan pengujian oleh pihak lain serta menghasilkan simpulan yang tidak jauh berbeda.

c. Netrali (*neutral*), bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi untuk memenuhi kebutuhan umum dan bukan untuk keperluan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan (*Comparable*)

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami *(Understandable)*

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

4.7.2. Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan--alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, yaitu:

1. Materialitas.
2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat.
3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif.

4.7.3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati dalam penyusunan standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan. Berikut adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut.

1. Basis akuntansi
2. Prinsip nilai historis
3. Prinsip realisasi
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal
5. Prinsip periodisitas
6. Prinsip konsistensi
7. Prinsip pengungkapan lengkap
8. Prinsip penyajian wajar.

4.7.4. Jenis dan Unsur Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Dengan demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terdiri dari terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
3. Neraca.
4. Laporan Operasional (LO).
5. Laporan Arus Kas (LAK).
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sedangkan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4.7.5. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas antara lain:

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi
2. Keandalan Pengukuran

4.8. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara umum prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu:

4.8.1. Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembagian Pendapatan terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

4.8.2. Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung Gaji, SP2D Langsung untuk Belanja Tidak Langsung, SP2D Langsung Barang dan Jasa termasuk belanja Modal dan Transfer.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh fungsi Perbendaharaan;
3. Untuk badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Bagi belanja atas penggunaan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP Pemerintah Kota Bukittinggi mengakui belanja jika telah ada pengesahan pertanggungjawaban belanja tersebut oleh BUD/Kuasa BUD.

4.8.3. Akuntansi Pembiayaan

4.8.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dengan maksud akan dibayar kembali pada masa yang akan datang antara lain berasal dari penerimaan SiLPA/SiKPA penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Pengukuran dan pencatatan penerimaan pembiayaan adalah dengan menggunakan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan potongan dan sebagainya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah dikeluarkan.

4.8.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dengan maksud akan diterima kembali di masa yang akan datang. Pengeluaran Pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, pembentukan/penambahan Investasi/penyertaan modal pemerintah, pembentukan dana cadangan

Pengukuran dan pencatatan pengeluaran pembiayaan adalah dengan menggunakan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran/biaya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah dikeluarkan.

4.8.4. Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar adalah kelompok pendapatan yang bersumber dari APBD, yaitu penerimaan pendapatan daerah yang telah dianggarkan pada APBD Tahun berjalan, baik yang angkanya dapat diestimasi maupun yang tidak. Pada APBD anggaran pendapatan dapat bernilai “0” (nol) karena tidak semua akun penerimaan pendapatan bisa diberikan target. Atas kelompok APBD tersebut, terdapat lima kelompok pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.
2. Pendapatan Transfer-LO.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.
4. Surplus Non Operasional-LO.
5. Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pengakuan Pendapatan LO terdiri dari:

1. Dengan Penetapan.
2. Tanpa Penetapan.
3. Hasil Eksekusi Pengadilan/Jaminan

Penetapan yang dimaksud adalah ketika secara jabatan ditetapkan hak pemerintah atas pendapatan. Penetapan yang dimaksud adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Kurang Bayar/Lebih Bayar atas dokumen yang ditetapkan serta dokumen yang disetarakan dengan penetapan. Tanpa penetapan yang dimaksud adalah penerimaan kas atas pendapatan tanpa didahului oleh penetapan.

Pendapatan dari hasil eksekusi pengadilan/jaminan adalah pendapatan yang merupakan hak Kota Bukittinggi melalui penetapkan oleh pengadilan atas sidang kasus tertentu, sementara hasil eksekusi jaminan merupakan pendapatan yang

menjadi hak Kota Bukittinggi disebabkan eksekusi terhadap jaminan pelaksanaan maupun pemeliharaan akibat kondisi tertentu dari perjanjian/kontrak yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah diakui pada saat sebagai berikut.

1. Timbulnya hak (piutang) pemerintah daerah atas dana transfer tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan penetapan yang bersifat definitif, sedangkan peraturan/ketentuan yang bersifat alokasi belum bisa dijadikan dasar untuk pengakuan hak Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Namun adakalanya penetapan yang berjudul definitif belum dapat diakui sebagai pendapatan jika pemerintah membiasakan penerbitan penetapan kurang/lebih salur. Ketetapan kurang/lebih salur lebih kuat kedudukannya daripada penetapan definitif.

Pada awal penyaluran dari ketentuan tentang alokasi, pendapatan transfer tersebut akan dicatat sebesar realisasinya sebagai kas ke kas daerah atau kas ke bendahara yang telah ditetapkan. Sementara Piutang atau Utang atas Kurang Bayar dan Lebih Bayar akan diakui pada saat terbitnya ketentuan definitif atas Kurang Bayar maupun Lebih Bayar penyalurannya.

Selain pencatatan terhadap kurang/lebih salur, Pemerintah Kota Bukittinggi juga memberlakukan pencatatan dana treasury yang difasilitasi oleh pemerintah pusat ke akun kelompok aset lainnya berdasarkan arahan pihak Pemerintah Pusat. Arahan kebijakan dari pemerintah pusat mungkin berbeda dari lainnya, namun kelengkapan dokumen dan substansi suatu kejadian dan transaksi tetap dipertimbangkan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan PAD dan Pendapatan Transfer, yaitu antara lain: Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Pendapatan hibah diakui pada saat dokumen pengajuan pencairan dana hibah diterbitkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.

Hibah yang berupa barang juga dicatat sebagai pendapatan operasional sebesar nilai hibah pada Berita Acara Hibah atau yang setara. Barangnya diakui sebagai persediaan atau aset apabila nilai perolehan hibah tersebut memenuhi kriteria perolehan dan nilai rupiahnya telah melebihi batasan minimum biaya yang dapat dikapitalisasi bagi barang yang berkategori aset tetap.

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar), dan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan telah diterima.

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,

tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika telah diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

4.8.5. Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset

   Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu (contohnya: penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud).

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban persediaan dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode Pendekatan Beban

   Dengan metode pendekatan beban setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin.

2. Metode Pendekatan Aset

   Dengan metode pendekatan aset setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan metode pendekatan beban dalam pencatatan persediaannya demi memudahkan pengukuran, pencatatan maupun penyajian nilai persediaan.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable asets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus *(straight line method)* dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciableasets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan penghitungan penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah oleh bidang/seksi pengelola pendapatan masing-masing SKPD. Berdasarkan kertas kerja penyisihan piutang tersebut PPK SKPD membuatkan bukti memorial atas penyisihan piutang tersebut untuk melakukan pencatatan transaksi.

4.8.6. Aset

4.8.6.1. Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Daerah.

1. **Kas dari Transaksi Pendapatan**

   Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

   a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau.

   b. Diterima di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

2. **Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja**

   Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) yang selanjutnya dengan Ganti Uang (GU), pembayaran langsung (LS) baik terhadap belanja pegawai, barang dan jasa maupun belanja modal. Pengeluaran kas untuk belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

3. **Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan**

   Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan daerah yang berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun atau tahun-tahun anggaran berikutnya dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

   a. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan

   b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment)*, rekening khusus (*special account)*, dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing)*, penerimaan pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu kejadiannya diantara.

      1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali, atau

      2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4. **Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan**

   Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi:

a. Pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang.

b. Pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang.

c. Pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal negara/ pemerintah daerah, menyebabkan pertambahan investasi pada sisi aset.

d. Pembentukan dana cadangan menyebabkan pertambahan dana cadangan.

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.

b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment)*, rekening khusus (*special account)*, dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing)*, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.8.6.2. Piutang

Piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Mengenai teknis penggolongan dan penyisihan piutang berpedoman kepada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi yang berlaku.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dengan berdasarkan dokumen:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah.
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Beban Dibayar Dimuka diakui untuk jumlah nilai belanja sewa atau semacamnya yang belum menjadi beban pada akhir tahun anggaran.

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian

fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
2. Jumlah piutang dapat diukur.
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan dokumen belanjanya dengan memisahkan beban di tahun berjalan dengan beban di tahun-tahun berikutnya. Jumlah yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah jumlah yang menjadi beban di tahun-tahun berikutnya, karena jumlah tersebut masih berupa hak dan belum dapat dieksekusi oleh pihak lain menjadi kewajiban tahun berjalan Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.8.6.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1. Pengakuan Persediaan

Pengakuan persedian Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem pencatatan akuntansi secara periodik (*periodical system*) dengan pendekatan beban untuk semua SKPD dan untuk semua jenis persediaannya, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan harus dicatat dengan metode *perpetual* untuk akun persediaan tertentu.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem periodik dengan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, artinya setiap adanya perolehan terhadap persediaan, baik yang berasal dari belanja maupun sebab lainnya, SKPD akan mencatatnya sebagai beban, bukan persediaan. Nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal pada akhir periode laporan neraca SKPD pada setiap unit kerja yang ada di SKPD.

Hasil inventarisasi fisik pada penyimpan barang harus menggambarkan nilai akhir persediaan dalam artian saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi jumlah pemakaian persediaan dan dikalikan nilai harga per unit dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

Stock opname dilakukan oleh masing-masing SKPD dan direkapitulasi oleh bendahara/pengurus barang SKPD. Terhadap laporan tersebut PPK SKPD akan mencatat nilai persediaan yang ada dan melakukan penyesuaian terhadap beban persediaan. Pada saat itulah Pemerintah Kota Bukittinggi telah mendapatkan potensi manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal terhadap persediaan dan bebannya.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Pengakuan beban persedian Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, setiap perolehan persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Dengan menggunakan sistem periodik dan pendekatan beban tersebut, nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (stock opname) terhadap persediaan yang tinggal diunit penyimpan barang pada akhir periode laporan neraca SKPD dan beban persediaan disesuaikan dengan nilai persediaan sehingga nilai beban persediaan yang muncul di Laporan Operasional yang disampaikan adalah sebesar nilai persediaan yang terpakai/habis.

Hasil inventarisasi fisik hendaknya juga menggambarkan jumlah beban persediaan pada akhir periode pelaporan, yaitu sebesar persediaan yang telah terpakai/habis. Jumlah beban persediaan tersebut berasal dari jumlah saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi saldo akhir persediaan dan dikalikan nilai harga per unit.

3. Selisih Persediaan

Selisih persediaan sering kali terjadi antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.8.6.4. Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemko Bukittinggi sampai saat ini berupa saham pada kelompok Investasi permanen untuk peruntukan jangka panjang dan dana bergulir yang berada pada kelompok investasi non permanen.

1. Pengakuan investasi

Pengakuan Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas ditambah dengan penambahan dan pengurangan nilai baik akibat setoran Pemerintah Kota Bukittinggi maupun perkembangan dan penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dana oleh penerima investasi (*investee*) yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir (*bruto*) yang secara periodik, Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan penyesuaian terhadap nilai Dana Bergulir yang berasal dari tambahan kucuran dana bergulir dari Pemerintah Kota Bukittinggi maupun penambahan yang berasal dari perkembangan dana bergulir oleh masyarakat. Nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)* merupakan nilai dana bergulir yang dikurangi penyisihan nilai dana bergulir tersebut.

Teknis penyisihan dana bergulir adalah sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

2. Pengakuan Hasil Investasi

Pengakuan hasil investasi diakui sebagai berikut.

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah, sedangkan dividen dalam bentuk saham tidak mengurangi nilai investasi.

4.8.6.5. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan/material dan perlengkapan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah

berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Mempunyai Masa Manfaat Lebih dari 12 Bulan

   Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

2. Biaya Perolehan Aset Dapat Diukur Secara Andal

   Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

3. Tidak Dimaksudkan Untuk Dijual Dalam Operasi Normal Entitas

   Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

4. Diperoleh Atau Dibangun Dengan Maksud Untuk Digunakan

   Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

5. Memenuhi Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap yang Telah Ditetapkan.

   Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya *(capitalization thresholds)* dari aset tetap. Ketentuan tentang batas jumlah biaya ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi. Batasan tersebut adalah Peralatan dan Mesin besar sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Gedung dan Bangunan besar sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Jalan, Irigasi dan Jaringan besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah), Aset Tetap Lainnya besar sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk kelompok lainnya adalah besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah). Terhadap nilai perolehan dan/atau pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak memenuhi batas jumlah biaya diakui sebagai *extracomptable*.

Tabel 4.1 Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Batas Kapitalisasi (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Tanah	1,00	
2.	Peralatan dan Mesin	500.000,00	
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,00	
5.	Aset Tetap Lainnya	50.000,00	

1. Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut.

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

c. Tidak dimaksudkan untuk dijual.

d. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

e. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut.

a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup

mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Tanah yang digunakan/ dipakai oleh instansi pemerintah yang masih berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin, pengakuannya dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini, misalnya ditandai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

3. **Gedung dan Bangunan**

   Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai.

   Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

4. **Jalan Irigasi dan Jaringan**

   Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

5. **Aset Tetap Lainnya**

   Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

6. **Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

   Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

   a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.

   b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal.

   c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

   Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

   Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut.

1) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh SKPD maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
2) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
3) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
4) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
5) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*forcemajeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*forcemajeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan.
6) Apabila ada pemutusan kontrak pekerjaan, dimana Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) dan aset tetap tersebut belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya, maka akan diakui sebagai KDP. Sebaliknya apabila aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, meskipun fisiknya belum selesai 100% (seratus persen), maka dapat diakui sebagai aset tetap.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan diakui pada saat penghitungan tambahan nilai penyusutan dari suatu aset tetap menurut teknis penyusutan yang dilakukan sesuai aturan dan kebijakan yang dipedomani.

Nilai penyusutan aset tetap setiap tahunnya dihitung dengan membandingkan antara nilai perolehan aset tetap dengan umur manfaat aset tetap yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis larus, dengan menggunakan formula sebagai berikut;

$$\textbf{Penyusutan per periode} = \frac{\textbf{Nilai Perolehan Aset}}{\textbf{Umur Manfaat Aset}}$$

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan pola komsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus dengan formula yang sama dengan formula penyusutan aset tetap.

4.8.6.6. Aset Tetap Renovasi

Aset tetap renovasi, pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut.

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis dari aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap sesuai kelompoknya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 diatas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
3. Apabila jumlah nilai biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 diatas adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Perolehan Aset Tetap, selain Aset Tetap Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan aset tetap melalui pembelian didahului dengan pengakuan pada belanja modal.

4.8.6.7. Aset Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan

pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan.

4.8.6.8. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang telah diusulkan untuk dihapus karena telah rusak berat dan hilang (non operasional), serta aset yang nilai perolehannya di bawah nilai batas kapitalisasi untuk aset tetap.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut.

1. **Tagihan Jangka Panjang**

   Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

   a. Tagihan Penjualan Angsuran

      Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

   b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

      Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut

menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga, untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa :

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer–BOT*).

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate–BTO*).

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB dapat diakui sebagai suatu entitas harus dapat dibuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang disetarakan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran *setelah* perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat didistribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya:

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas.

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB. Aset Tak Berwujud (ATB) terdiri atas:

a. *Goodwill*.

b. Royalti.

c. Lisensi.

d. Hak Paten.

e. Aset Tidak Berwujud Lainnya.

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. Pengakuan untuk Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah sebagai berikut.

4. Perlakuan Khusus untuk *Software* Komputer

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri, biasanya sulit untuk

mengidentifikasi nilai perolehan *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB, yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yangdapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut.

1) Tahap awal kegiatan

   Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternative untuk pengembangan *software* tersebut.

2) Tahap pengembangan aplikasi

   Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi software dan *software interface*, *koding*, meng-*instal ke hardware*, *testing*, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan *software*.

3) Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

   Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software.*

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya. Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut.

1) Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai.
2) Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/ operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

b. Perolehan *software* secara eksternal

Ada beberapa kondisi untuk *sofware* yang diperoleh secara eksternal, yaitu:

1) Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah, maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.
2) Untuk software yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri, namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.

3) Untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara *eksternal* tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah;

1) Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian software dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja.
2) Apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*.
3) Berapa lama izin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut.

1) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
2) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
3) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.

c. Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria berikut.

1) Meningkatkan fungsi *software*.
2) Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

1) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.

2) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

5. Perlakuan untuk Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial di masa yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai aset.

a. Pengakuan yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

1) Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

2) Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) *harus diakui jika dan hanya jika*, pemerintah daerah dapat memperlihatkan *seluruh kondisi* di bawah ini, yaitu adanya:

a) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan.

b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;

c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut.

d) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang.

e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut.

f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang didistribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/ kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasikan adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan *(further advance)* atas tahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/ pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

a) Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasilkajian/ pengembangan tersebut.

b) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut.

c) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain.

d) Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

b. Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktik di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan, hal ini merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan.

Pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

6. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan (*intangible aset – work in progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

4.8.6.9. Aset Lain-Lain

Kelompok Aset Lain-lain adalah:

1. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain; dan
2. Aset Tetap yang masih dalam proses serah terima kepada pihak ketiga.

4.8.7. Kewajiban

1. Klasifikasi

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang pajak, utang ke pihak ketiga dan

utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Kewajiban terdiri dari 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada setelah tanggal pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3. Timbulnya Kewajiban

Secara umum kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*),

   Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK dan kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*),

   Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*),

   Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

   Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah

sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.

Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Kewajiban jangka pendek biasanya terdiri atas:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
b. Utang Bunga
c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
d. Pendapatan Diterima di Muka.
e. Utang Jangka Pendek Lainnya.

4. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat:

a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah.
b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah.
c. Pada saat jatuh kewajiban pemerintah daerah untuk membayar kewajiban yang timbul dari belanja dan/ atau kelebihan pendapatan atau dari sebab yang lain.

5. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

4.8.7.1. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain diakhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Contoh:

a. Utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Utang pajak, yaitu kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah pusat sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang pajak diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.8.7.2. Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4.8.7.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.8.7.4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara pendapatan yang diterima dengan manfaat yang telah ditentukan oleh Pihak Ketiga.

4.8.7.5. Utang Belanja

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara serah terima barang.

4.8.7.6. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 (dua belas bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Contoh:

a. Utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

b. Penerimaan pembayaran Dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Dari sifatnya, utang juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan.

Utang yang tidak diperjualbelikan *(non-traded debt)* memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan.

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.8.8. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas akan bertambah bila terdapat pendapatan-LO, yang merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan, yang dapat menurunkan nilai ekuitas adalah beban, yang merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Selisih antara pendapatan-LO dan beban merupakan Surplus Defisit-LO yang akan ditutupkan (menambah) nilai ekuitas pada 1 (satu) periode akuntansi. Ekuitas juga dipengaruhi oleh dampak kebijakan dan kejadian luar biasa yang dinilai menjadi:

1. Koreksi Nilai Aset Tetap.
2. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap.
3. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain.
4. Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
5. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang.
6. Koreksi Nilai Aset Lain-lain.
7. Koreksi Nilai Persediaan.
8. Selisih Revaluasi Aset Tatap.
9. Koreksi atas Pendapatan.
10. Koreksi Lain-lain.

Mengenai klasifikasi dan keterangan lebih lengkap Kebijakan Akuntansi terhadap akun-akun Laporan Keuangan dapat dilihat pada Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.8.9. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Terdapat 8 (delapan) UPTD di Kota Bukittinggi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu:

Tabel 4.2 UPTD yang Telah Menerapkan PPK BLUD

No.	Nama UPTD	Sumber Dana BLUD	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
2	Puskesmas Guguk Panjang	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
3	Puskesmas Nilam Sari	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
4	Puskesmas Mandiangin	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
5	Puskesmas Gulai Bancah	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
6	Puskesmas Tigo Baleh	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
7	Puskesmas Plus Mandiangin	Dana Jaminan Kesehatan Nasional	
8	Rumah Sakit Umum Daerah	Semua penerimaan UPTD	Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi

Dengan diterbitkan dan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, aturan tentang BLUD menjadi lebih jelas dibanding Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 termasuk penyediaan Laporan Keuangan BLUD sebanyak 7 (tujuh) macam sama halnya dengan jenis laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Aturan perundang-undangan sesudahnya menghendaki pemberlakuan PPK BLUD bagi Rumah Sakit Daerah yang baru berdiri. Maka dari itu tanggal 14 Februari 2021 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai UPTD yang mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Sebelumnya pada Tahun 2016, 7 (tujuh) UPTD Puskesmas telah lebih dahulu melaksanakan PPK BLUD dengan status penuh, yakni dengan dana yang bersumber dari dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD), BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan, BLUD adalah juga entitas pelaporan. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya.

4.8.10. Perjanjian Konsesi Jasa

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana :

a. Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan

b. Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Dalam pengertian diatas pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra, sedangkan mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang mengngunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila :

a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan:

b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi maka pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi tersebut menggunakan nilai tercatat aset.

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasikan ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tidak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

4.8.11. Properti Investasi

Sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan adminnistratif; atau
- dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi;

b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

2. Pengukuran

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti invesatsi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti invesatsi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan.

3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti invesatsi kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

4. Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

a. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;

b. Dimulainya pegembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

c. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;

d. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi

5. Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

CALK

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Pada bagian ini akan diuraikan informasi atau penjelasan mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2024. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, ditetapkan dalam Pernyataan SAP (PSAP) 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan PSAP 02 tentang Penyajian Laporan Keuangan terdapat 7 (tujuh) jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus disajikan. yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk penjelasan masing-masing LKPD Kota Bukittinggi akan diuraikan satu per satu sebagai berikut:

5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi pos pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 yang mencakup:

1. Gambaran Anggaran, Realisasi beserta Persentase Pencapaian

   Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp775.373.477.018,00 dengan realisasi sebesar Rp741.382.079.328,40. Target Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

   Anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp808.431.150.183,00 dengan realisasi sebesar Rp739.076.479.103,31 Anggaran Belanja Daerah tahun 2024 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

   Selisih antara Pendapatan dan Belanja adalah Surplus sebesar Rp2.305.600.225,09. Surplus ditambah dengan penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp33.057.673.164,80 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2024 sebesar Rp35.363.273.389,89. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja Kota Bukittinggi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2024

URAIAN	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%
(1)	(2)	(3)	4 (3/2)
PENDAPATAN DAERAH – LRA	**775.373.477.018,00**	**741.382.079.328,40**	**95,62**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	**153.460.514.484,00**	**130.112.097.312,94**	**84,79**
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	54.110.644.633,00	50.098.130.579,00	92,58
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	74.688.582.055,00	51.629.686.961,72	69,13
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	118,70
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	16.353.862.488,00	18.523.395.556,22	113,27
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	**621.912.962.534,00**	**611.269.982.015,46**	**98,29**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569.055.919.679,00	566.436.096.135,00	99,54
Dana Perimbangan	561.901.804.679,00	559.281.981.135,00	99,53
Insentif Fiskal	7.154.115.000,00	7.154.115.000,00	100,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	52.857.042.855,00	44.833.885.880,46	84,82
Pendapatan Bagi Hasil	41.857.042.855,00	34.409.535.374,00	82,21
Bantuan Keuangan	11.000.000.000,00	10.424.350.506,46	94,77
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**91,42**
BELANJA OPERASI	**727.886.843.406,00**	**665.946.895.972,54**	**91,49**
Belanja Pegawai	348.366.503.439,32	336.607.731.061,67	96,62
Belanja Barang dan Jasa	316.715.324.592,68	272.602.571.149,75	86,07
Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	100,00
Belanja Hibah	57.105.915.374,00	51.339.007.283,12	89,90
Belanja Bantuan Sosial	3.199.100.000,00	2.897.600.000,00	90,58
BELANJA MODAL	**69.943.686.777,00**	**63.532.002.219,77**	**90,83**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.576.288.033,00	12.261.224.480,70	84,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.771.313.480,00	31.435.241.904,22	93,08
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.966.602.364,00	18.357.697.907,85	91,94
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.429.482.900,00	1.278.037.927,00	89,41
Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90
BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.000.000.000,00**	**380.911,00**	**0,04**
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	380.911,00	0,04
BELANJA TRANSFER	**9.600.620.000,00**	**9.597.200.000,00**	**99,96**
Belanja Bantuan Keuangan	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	99,96
SURPLUS/(DEFISIT)	**(33.057.673.165,00)**	**2.305.600.225,09**	**(6,97)**
PEMBIAYAAN DAERAH	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**100,00**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**100,00**

URAIAN	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%
(1)	(2)	(3)	4 (3/2)
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	100,00
Pencairan dana Cadangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PEMBIAYAAN NETTO	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**100,00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**35.363.273.389,89**	

2. Penjelasan atas Perbedaan antara Anggaran dan Realisasi

Secara keseluruhan Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp741.382.079.328,40 atau 95,62% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp775.373.477.018,00. Pencapaian target Pendapatan tersebut terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp130.112.097.312,94 atau 84,79% dari anggaran sebesar Rp153.460.514.484,00.

b. Pendapatan Transfer dengan realisasi sebesar Rp611.309.530.338,46 atau 98,29% dari anggaran sebesar Rp621.912.962.534,00 dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Daerah tahun 2024 yang direalisasikan sebesar Rp739.076.479.103,31 atau sebesar 91,42% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp808.431.150.183,00. Realisasi tersebut terdiri dari:

a. Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp665.946.895.972,54 atau 91,49% dari anggaran sebesar Rp727.886.843.406,00.

b. Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp63.532.002.219,77 atau 90,83% dari anggaran sebesar Rp69.943.686.777,00.

c. Belanja Tidak Terduga dengan realisasi sebesar Rp380.911,00 dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00.

d. Belanja Transfer dengan realisasi sebesar Rp9.597.200.000,00 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp9.600.620.000,00.

Dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2024 diperkirakan terjadi Defisit anggaran sebesar (Rp33.057.673.165,00) namun dalam pelaksanaan APBD tahun 2024 terdapat surplus sebesar Rp2.305.600.225,09 atau sebesar 6,97%. Defisit anggaran tahun 2024 direncanakan dibiayai dari Penerimaan Pembiayaan, berupa SiLPA tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp33.057.673.164,80 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp33.057.673.165,00, dengan demikian maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp35.363.273.389,89.

3. Perbandingan dengan Periode yang Lalu

Salah satu kriteria laporan keuangan yang baik adalah laporan tersebut dapat dibandingkan. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka Laporan Realisasi APBD Kota Bukittinggi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 Rp	Realisasi 2023 Rp	% Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan/ (Penurunan) Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(3-4)
1	Pendapatan Asli Daerah	130.112.097.312,94	123.112.709.360,20	5,69	6.999.387.952,74
2	Pendapatan Transfer	611.269.982.015,46	583.728.726.369,00	4,72	27.541.255.646,46
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	134.012.443,45	(100,00)	(134.012.443,45)
Jumlah Pendapatan Daerah		**741.382.079.328,40**	**706.975.448.172,65**	**4,87**	**34.406.631.155,75**
1	Belanja Operasi	665.946.895.972,54	667.764.935.144,91	(0,27)	(1.818.039.172,37)
2	Belanja Modal	63.532.002.219,77	74.023.558.551,40	(14,17)	(10.491.556.331,63)
3	Belanja Tak Terduga	380.911,00	849.000,00	(55,13)	(468.089,00)
4	Belanja Transfer	9.597.200.000,00	9.450.620.000,00	1,55	146.580.000,00
Jumlah Belanja		**739.076.479.103,31**	**751.239.962.696,31**	**(1,62)**	**(12.163.483.593,00)**

Tahun 2024, secara umum realisasi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp34.406.631.155,75 atau 4,87% dari tahun 2023, kenaikan tersebut berupa:

a. Kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp6.999.387.952,74 atau 5,69%.

b. Kenaikan pada Pendapatan Transfer sebesar Rp27.541.255.646,46 atau 4,72%.

c. Penurunan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar (Rp134.012.443,45) atau (100,00)%.

Dari sisi Belanja, terdapat penurunan realisasi sebesar Rp12.163.483.593,00 atau sebesar (1,62)% yang berasal dari:

a. Penurunan pada Belanja Operasi sebesar (Rp1.818.039.172,37) atau (0,27)%.

b. Penurunan pada Belanja Modal sebesar (Rp10.491.556.331,63) atau (14,17)%.

c. Penurunan Belanja Tidak Terduga sebesar (Rp468.089,00) atau (55,13)%.

d. Kenaikan pada Belanja Transfer sebesar Rp146.580.000,00 atau 1,55% dibanding tahun 2023.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
775.373.477.018,00	741.382.079.328,40	706.975.448.172,65

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp775.373.477.018,00 dengan realisasi sebesar Rp741.382.079.328,40 atau 95,62%. Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp34.406.631.155,75 atau 4,87% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp706.975.448.172,65.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Kota Bukittinggi tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	4 (3/2)	(5)
PENDAPATAN DAERAH – LRA	**775.373.477.018,00**	**741.382.079.328,40**	**95,62**	**706.975.448.172,65**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	**153.460.514.484,00**	**130.112.097.312,94**	**84,79**	**123.112.709.360,20**
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	54.110.644.633,00	50.098.130.579,00	92,58	51.690.816.406,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	74.688.582.055,00	51.629.686.961,72	69,13	39.222.055.481,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	118,70	8.363.843.874,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	16.353.862.488,00	18.523.395.556,22	113,27	23.835.993.599,20
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	**621.912.962.534,00**	**611.269.982.015,46**	**98,30**	**583.728.726.369,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569.055.919.679,00	566.436.096.135,00	99,55	554.987.256.154,00
Dana Perimbangan	561.901.804.679,00	559.281.981.135,00	99,53	526.134.883.154,00
Insentif Fiskal	7.154.115.000,00	7.154.115.000,00	100,00	28.852.373.000,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	52.857.042.855,00	44.833.885.880,46	84,82	28.741.470.215,00
Pendapatan Bagi Hasil	41.857.042.855,00	34.409.535.374,00	82,21	28.741.470.215,00
Bantuan Keuangan	11.000.000.000,00	10.424.350.506,46	94,77	**0,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.012.443,45**
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	134.012.443,45

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
153.460.514.484,00	130.112.097.312,94	123.112.709.360,20

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp153.460.514.484,00 dengan realisasi sebesar Rp130.112.097.312,94 atau 84,79%. Realisasi PAD tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.999.387.952,74 atau 5,69% dari tahun 2023 sebesar Rp123.112.709.360,20. Kenaikan tersebut berupa:

1. Penurunan pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp(1.592.685.827,00) atau sebesar (3,08)%.
2. Kenaikan pada Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp12.407.631.480,72 atau sebesar 31,63%.
3. Kenaikan pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.497.040.342,00 atau 17,90%.
4. Penurunan pada Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp(5.312.598.042,98) atau (22,29)%.

Realisasi pendapatan asli daerah tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 Rp	Realisasi 2023 Rp	% Kenaikan/ (Penurunan)	Kenaikan/ (Penurunan) Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	7=(6/5)	*6=(4-5)*
1	Pendapatan Pajak Daerah	50.098.130.579,00	51.690.816.406,00	(3,08)	(1.592.685.827,00)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	51.629.686.961,72	39.222.055.481,00	31,63	12.407.631.480,72
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.860.884.216,00	8.363.843.874,00	17,90	1.497.040.342,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	18.523.395.556,22	23.835.993.599,20	(22,29)	(5.312.598.042,98)
Total		**130.112.097.312,94**	**123.112.709.360,20**	**5,69**	**6.999.387.952,74**

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
54.110.644.633,00	**50.098.130.579,00**	**51.690.816.406,00**

Pada Tahun 2024 ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan nomenklatur pajak daerah. Nomenklatur pendapatan pajak pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.5 Tabel Pemetaan Nomenklatur Pendapatan Pajak Daerah

No.	Akun 2024	Akun 2023
1.	PBJT Makanan dan Minuman	Pajak Restoran
2.	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	Pajak Hiburan
3.	PBJT Jasa Perhotelan	Pajak Hotel
4.	PBJT Tenaga Listrik	Pajak Penerangan Jalan
5.	PBJT Jasa Parkir	Pajak Parkir

Pendapatan Pajak Daerah pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp54.110.644.633,00 dengan realisasi sebesar Rp50.098.130.579,00 atau 92,58%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.592.685.827,00 atau 3,08% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp51.690.816.406,00. Rincian dari realisasi Pajak Daerah tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.6 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	*5=(4/3)*	(6)
1	Pajak Reklame	750.000.000,00	846.030.170,00	112,80	1.022.393.497,00
2	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	56.763.932,00	16,22	73.707.883,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.124.355.367,00	3.326.935.079,00	64,92	4.317.071.019,00
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.551.289.266,00	14.651.555.005,00	94,21	14.287.713.036,00
5	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	9.249.300.000,00	6.598.150.740,00	71,34	7.092.915.280,00
6	PBJT-Tenaga Listrik	5.905.000.000,00	10.125.850.073,00	171,48	6.623.737.093,00
7	PBJT-Jasa Perhotelan	16.480.700.000,00	14.014.244.804,00	85,03	17.056.714.478,00
8	PBJT-Jasa Parkir	200.000.000,00	111.341.830,00	55,67	237.645.300,00
9	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	500.000.000,00	367.258.946,00	73,45	978.918.820,00
Total		**54.110.644.633,00**	**50.098.130.579,00**	**92,58**	**51.690.816.406,00**

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 untuk 9 (sembilan) jenis pajak terdapat 2 (dua) pajak yang melebihi dari target yang dianggarkan yaitu pajak reklame sebesar Rp846.030.170,00 atau 112,80% dari anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dan Pajak Barang Jasa Tertentu – Tenaga Listrik sebesar Rp10.125.850.073,00 atau 171,48% dari anggaran sebesar Rp5.905.000.000,00. Namun, 7 (tujuh) penerimaan pajak

belum mencapai target anggaran. Secara umum, dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan.

Realisasi pajak yang terendah adalah pajak air tanah. Dimana hanya terealisasi sebesar 16,22% atau sebesar Rp56.763.932,00 dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00. Hal ini disebabkan karena target Pajak Air Tanah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 119 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah. Dalam Peraturan Gubernur tersebut diuraikan bahwa nilai pengali ditetapkan sebesar Rp1.540 per m3, sedangkan perhitungan realisasi nilai air tanah di Kota Bukittinggi dilakukan dengan pengalian nilai air tanah masih sebesar Rp500 m3. Dalam rangka merubah pengali nilai air tanah menjadi Rp1.540 per m3 diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada bulan September 2024.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
74.688.582.055,00	51.629.686.961,72	39.222.055.481,00

Pada Tahun 2024 ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan nomenklatur retribusi daerah. Perubahan nomenklatur tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.7 Tabel Pemetaan Nomenlatur Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Akun 2024	Akun 2023
1.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	Retribusi Tempat Khusus Parkir
2.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
3.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Retribusi Rumah Potong Hewan
5.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Retribusi penjualan produksi Usaha Daerah
6.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
7.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pendapatan Retribusi Daerah pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp74.688.582.055,00 dan telah terealisasi sebesar Rp51.629.686.961,72 atau 69,13%. Realisasi retribusi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.407.631.480,72 atau 31,63% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp39.222.055.481,00.

Rincian realisasi Retribusi Daerah tahun 2024 dan 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.8 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Uraian Rekening	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=5/4	(7)
1	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.715.787.055,00	18.971.152.914,72	113,49	383.792.000,00
		Retribusi Pelayanan Kebersihan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	100.000.000,00	73.843.000,00	73,84	0,00
2	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	1.845.835.000,00	1.266.234.000,00	68,60	1.166.633.000,00
		Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.904.165.000,00	351.536.000,00	18,46	585.594.000,00
		Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	170.046.000,00
		Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0,00	25.749.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan dan Persampahan	2.050.000.000,00	1.647.799.500,00	80,38	1.168.156.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	140.000.000,00	127.500.000,00	91,07	0,00
		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
5	Dinas Pariwisata	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	29.630.000.000,00	17.567.985.710,00	59,29	22.714.439.679,00
		Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	220.000.000,00	160.908.600,00	73,14	0,00
		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Keuangan	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	125.000.000,00	76.578.130,00	61,26	62.328.300,00
7	Dinas Pertanian dan Pangan	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	29.760.000,00	11.155.000,00	37,48	0,00
		Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	335.000.000,00	367.600.000,00	109,73	219.760.000,00
		Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	224.500.000,00	211.430.955,00	94,18	61.004.920,00
		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.600.000,00	800.000,00	50,00	12.600.000,00
		Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	161.185.000,00
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	2.798.000.000,00	2.135.691.000,00	76,33	328.704.390,00
		Retribusi Pelayanan Pasar	2.141.935.000,00	952.468.310,00	44,47	1.091.756.172,00

No	SKPD	Uraian Rekening	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=5/4	(7)
		Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	14.503.000.000,00	5.758.247.140,00	39,70	7.325.038.816,00
		Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	684.000.000,00	293.533.000,00	42,91	511.647.000,00
		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	70.000.000,00	769.724.450,00	1.099,61	71.148.450,00
		Retribusi Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	2.141.563.000,00
		Retribusi Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	10.039.600,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	277.160.000,00
10	Dinas PUPR	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	700.000.000,00	709.844.452,00	101,41	623.835.154,00
		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	120.000.000,00	61.692.300,00	51,41	0,00
11	Dians Pemuda Dan Olahraga	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	150.000.000,00	113.962.500,00	75,98	106.725.000,00
Total Retribusi			**74.688.582.055,00**	**51.629.686.961,72**	**69,13**	**39.222.055.481,00**

Secara umum, realisasi Retribusi mengalami kenaikan dari tahun lalu, terdapat 4 (empat) penerimaan retribusi yang melebihi target anggaran dan realisasi penerimaan yang tertinggi adalah retribusi pemanfaatan aset pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp769.724.450,00 atau 1.099,61% dari anggaran sebesar Rp70.000.000,00. Dan untuk realisasi penerimaan terendah adalah retribusi parkir diluar badan jalan pada Dinas Perhubungan yaitu sebesar Rp351.536.000,00 atau 18,46% dari target anggaran sebesar Rp1.904.165.000,00. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya pengawasan terhadap retribusi parkir diluar badan jalan tersebut.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
8.307.425.308,00	**9.860.884.216,00**	**8.363.843.874,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp8.307.425.308,00 dan terealisasi sebesar Rp9.860.884.216,00 atau 118,70%. Realisasi tahun 2024 naik sebesar Rp1.497.040.342,00 atau 17,90% dari tahun 2023 sebesar Rp8.363.843.874,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 berasal dari piutang deviden tahun 2023 yang dibagikan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Sumatera Barat sebesar Rp8.953.721.052,00 dan piutang deviden tahun

2023 atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi pada Perseroda PT. BPRS Jam Gadang sebesar Rp907.163.164,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.9 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		Rp	Rp		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bagian Laba (deviden) sebesar Rp9.860.884.216,00 yang terdiri dari: a. Bank Nagari sebesar Rp8.953.721.052,00; dan b. BUMD PT. Perseroda BPRS Jam Gadang sebesar Rp907.163.164,00.	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	118,70	8.363.843.874,00
Total		**8.307.425.308,00**	**9.860.884.216,00**	**118,70**	**8.363.843.874,00**

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
16.353.862.488,00	18.523.395.556,22	23.835.993.599,20

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp16.353.862.488,00 dan telah terealisasi sebesar Rp18.523.395.556,22 atau 113,27%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp5.312.598.042,98) atau (22,29)% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp23.835.993.599,20.

Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.10 Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	*5=(4/3)*	(6)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	214.186.000,00	48.180.000,00	22,49	232.326.899,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	303.879.747,00
3	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.199.752.534,00	119,98	1.232.417.521,00
4	Pendapatan Bunga	250.000.000,00	801.931.520,44	320,77	1.920.071.031,01
5	Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	4.800.100,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	578.333.157,00	100,00	58.544.492,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	107.664.076,23	100,00	82.474.489,55
8	Pendapatan Denda Pajak	150.000.000,00	290.107.069,00	193,40	331.346.774,00
9	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	103.202.089,00	100,00	133.893.988,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	12.074.676.488,00	12.177.280.890,47	100,85	2.500.000,00

No	Uraian	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	*5=(4/3)*	(6)
11	Pendapatan dari Pengembalian	2.665.000.000,00	3.022.630.749,12	113,42	1.260.317.371,64
12	Pendapatan dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah	0,00	29.813.470,96	100,00	16.313.006.718,00
13	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	164.500.000,00	100,00	65.375.000,00
14	Remunerasi	0,00	0,00	0,00	1.895.039.468,00
TOTAL		**16.353.862.488,00**	**18.523.395.556,22**	**113,27**	**23.835.993.599,20**

Secara lebih rinci lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp48.180.000,00 berupa hasil penjualan aset rusak berat.
2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp0,00.
3. Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp1.199.752.534,00 berupa:
   a. Jasa giro pada kas daerah sebesar Rp895.197.773,00
   b. Jasa giro pada kas bendahara sebesar Rp65.840.288,00
   c. Jasa giro dari dana BOS sebesar Rp1.762.911,00
   d. Jasa giro dana kapitasi dari FKTP sebesar Rp11.176.643,00
   e. Jasa giro dana kapitasi dari BOSP sebesar Rp66.042.068,00
   f. Jasa giro dana kapitasi dari BOK Puskesmas sebesar Rp13.137.069,00
   g. Jasa giro dana hibah KPU sebesar Rp146.595.782,00
4. Pendapatan bunga sebesar Rp801.931.520,44 merupakan jasa bunga atas rekening deposito.
5. Pendapatan atas tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp0,00.
6. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebesar Rp578.333.157,00 berupa bunga dana hibah, Penyetoran Klaim Penggalian Jalan, Berm, dan Trotoar dan lain-lain pendapatan.
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp107.664.076,23.
8. Pendapatan denda pajak sebesar Rp290.107.069,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Denda pajak hotel sebesar Rp11.025.270,00
   b. Denda pajak rumah penginapan sebesar Rp75.498,00
   c. Denda pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp24.409.509,00
   d. Denda jasa boga/catering sebesar Rp9.703.408,00

e. Denda pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan sebesar Rp39.800,00

f. Denda panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran sebesar Rp22.850,00

g. Denda pajak parkir sebesar Rp638.615,00

h. Denda pajak bumi dan bangunan pesedaan dan perkotaan sebesar Rp244.192.119,00

9. Pendapatan denda retribusi sebesar Rp103.202.089,00 dengan rincian sebagai berikut:

   a. Denda pelayanan kebersihan dan persampahan sebesar Rp6.079.090,00

   b. Denda retribusi pelayanan pasar – los sebesar Rp7.539.502,00

   c. Denda retribusi pelayanan pasar – kios sebesar Rp1.243.078,00

   d. Denda retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir sebesar Rp63.969.884,00

   e. Denda retribusi penyediaan pertokoan sebesar Rp24.370.535,00

10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar Rp12.177.280.890,47 terdiri atas realisasi jaminan pelaksanaan CV Pakta Ganda sebesar Rp102.604.402,47 dan jaminan pelaksanaan Pembangunan RSUD sebesar Rp12.177.280.890,47.

11. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp3.022.630.749,12 dengan rincian sebagai berikut:

   a. Pengembalian kelebihan perjalanan dinas sebesar Rp649.312.583,00

   b. Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp30.670.433,00

   c. Pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp113.572.132,92

   d. Pengembalian kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp27.293.112,00

   e. Pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp422.879.000,00

   f. Pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa sebesar Rp48.861.431,00

   g. Pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat sebesar Rp377.851.294,56

   h. Pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp142.788.375,00

   i. Pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal Gedung dan bangunan sebesar Rp1.121.153.444,45

j. Pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi – jalan dan jembatan sebesar Rp59.703.426,57

k. Pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi – bangunan air sebesar Rp14.907.450,62

l. Pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS, belanja modal peralatan dan mesin BOS serta belanja modal asset tetap lainnya BOS sebesar Rp13.638.066,00

12. Pendapatan lain-lain dari pendapatan BLUD yang sah sebesar Rp29.813.470,96 merupakan pendapatan BLUD dari jasa giro.

13. Pendapatan denda atas pelanggaran Perda sebesar Rp164.500.000,00 sesuai Perda no.3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

14. Remunerasi sebesar Rp0,00.

Terlihat bahwa realisasi terendah penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di tahun 2024 adalah pada kelompok Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan yakni sebesar 22,49%. Realisasi tertinggi adalah Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp12.177.280.890,47 dari yang dianggarkan sebesar Rp12.074.676.488,00 atau 100,85%. Pendapatan ini merupakan realisasi atas hasil keputusan pengadilan nomor 28/Pdt.6/2020 terhadap piutang pengembalian atas jaminan Pembangunan Gedung RSUD. Dengan putusan sidang dibacakan pada tanggal 8 Desember 2021 dan hasil keputusan diserahkan kepada Pemko Bukittinggi pada tanggal 15 Februari 2022. Realisasi atas Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp12.074.676.488,00 diterima pada tanggal 7 Mei 2024.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
621.912.962.534,00	611.269.982.015,46	583.728.726.369,00

Pendapatan Transfer yang dianggarkan tahun 2024 sebesar Rp621.912.962.534,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp611.269.982.015,46 atau 98,29%. Realisasi pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp27.541.255.646,46,00 atau 4,72% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp583.728.726.369,00. Berikut beberapa informasi penjelasan yaitu:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp11.448.839.981,00 atau 2,06% dari realisasi tahun 2023;

b. Pendapatan Transfer antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp16.092.415.665,99 atau 55,99%.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.11 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	URAIAN	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp	Kenaikan/ (Penurunan) Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(5)	7=4-5
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569.055.919.679,00	566.436.096.135,00	99,54	554.987.256.154,00	11.488.388.304,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.857.042.855,00	44.833.885.880,46	84,82	28.741.470.215,00	16.092.415.665,46
JUMLAH		**621.912.962.534,00**	**611.269.982.015,46**	**98,29**	**583.728.726.369,00**	**27.580.803.969,46**

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
569.055.919.679,00	566.436.096.135,00	554.987.256.154,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan tahun 2024 sebesar Rp569.055.919.679,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp566.436.096.135,00 atau 99,54%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp11.448.839.981,00 atau 2,06% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp554.987.256.154,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Fiskal. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.12 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023

No	URAIAN	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp	Kenaikan/ (Penurunan) Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=(4-6)
1	Dana Perimbangan	561.901.804.679,00	559.281.981.135,00	99,53	526.134.883.154,00	33.147.097.981,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)/ Intensif Fiskal (IF)	7.154.115.000,00	7.154.115.000,00	100,00	28.852.373.000,00	(21.698.258.000,00)
JUMLAH		**569.055.919.679,00**	**566.436.096.135,00**	**99,54**	**554.987.256.154,00**	**11.448.839.981,00**

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
561.901.804.679,00	559.281.981.135,00	526.134.883.154,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi dari Pemerintah Pusat pada tahun 2024 berasal dari Dana Perimbangan yang dianggarkan sebesar Rp561.901.804.679,00 dengan realisasi sebesar Rp559.281.981.135,00 atau 99,53%. Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp33.147.097.981,00 atau 6,30% dari realisasi tahun 2023 sebesar RpRp526.134.883.154,00. Rincian realisasi

Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.13 Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023

No	URAIAN	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp	Kenaikan/ (Penurunan) Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=(4-6)
1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	11.386.359.000,00	14.136.910.810,00	124,16	13.615.863.000,00	521.047.810,00
2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	451.726.253.000,00	449.518.151.028,00	99,51	436.109.667.075,00	13.408.483.953,00
3	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	33.257.582.204,00	31.503.797.544,00	94,73	12.315.114.685,00	19.188.682.859,00
4	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	65.531.610.475,00	64.123.121.753,00	97,85	64.094.238.394,00	28.883.359,00
JUMLAH		**561.901.804.679,00**	**559.281.981.135,00**	**99,53**	**526.134.883.154,00**	**33.147.097.981,00**

Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Bukittinggi tahun 2024 meliputi DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH Pph Pasal 21, DBH Pph Pasal 25 dan Pasal 29, DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara – Landrent, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara (Royalty), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Porvisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan dan DBH Sawit.

Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Bukittinggi tahun 2024 meliputi DAU Tidak Diperuntukkan, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan, DAU tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.

DAK Fisik untuk Kota Bukittinggi tahun 2024 meliputi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan, DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan, dan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

Untuk pendapatan DAK Non Fisik tahun 2024 terdiri dari: Dana BOS (reguler sekolah negeri dan swasta serta Kinerja), TPG PNSD, Tamsil Guru PNSD, BOP PAUD (reguler dan Kinerja), BOP Kesetaraan (reguler dan Kinerja), BOP Museum dan Taman Budaya, Bantuan Operasional Kesehatan (Dinas), BOK-Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas, BOKKB-BOKB, PK2UKM, Fasilitasi Penamaman Modal, dan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)/ Insentif Fiskal (IF)

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
7.154.115.000,00	7.154.115.000,00	28.852.373.000,00

Dana Insentif Daerah tahun 2023 merupakan Dana Insentif Daerah (DID) namun pada tahun 2024 berganti menjadi Insentif Fiskal (IF) yang merupakan insentif kepada daerah otonom atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp7.154.115.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.154.115.000,00 atau 100,00% dari anggaran tahun 2024. DID tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 dimana Kota Bukittinggi mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp28.852.373.000,00, Realisasi DID dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.14 Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 dan 2023

No	URAIAN	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp	Kenaikan/ (Penurunan) Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=(4-6)
1	DID/ IF	7.154.115.000,00	7.154.115.000,00	100,00	28.852.373.000,00	(21.698.258.000)
JUMLAH		**7.154.115.000,00**	**7.154.115.000,00**	**100,00**	**28.852.373.000,00**	**(21.698.258.000)**

5.1.1.2.1.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
52.857.042.855,00	44.833.885.880,46	28.741.470.215,00

Pendapatan Kota Bukittinggi bersumber dari Transfer Antar Daerah yang dianggarkan tahun 2024 sebesar Rp52.857.042.855,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp44.833.885.880,46 atau 84,82%. Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp16.092.415.665,46 atau 55,99% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp28.741.470.215,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.15 Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp	Kenaikan/ (Penurunan) Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(3-4)
Pendapatan Bagi Hasil pajak	41.857.042.855,00	34.409.535.374,00	82,21	28.741.470.215,00	5.668.065.159,00
Bantuan Keuangan	11.000.000.000,00	10.424.350.506,46	94,77	0,00	10.424.350.506,46
JUMLAH	**52.857.042.855,00**	**44.833.885.880,46**	**84,82**	**28.741.470.215,00**	**16.092.415.665,46**

Realisasi pendapatan transfer antar daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp34.409.535.374,00,00 dengan rincian sebagai berikut:

   a. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 971.1/21/PPD-Bapenda/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember 2023 Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebesar Rp1.767.221.652,00.

b. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/22/PPD-Bapenda/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp2.750.873.598,00.

c. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/20/PPD-Bapenda/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan I tahun 2024 sebesar Rp5.140.263.258,00.

d. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/34/PPD-Bapenda/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp2.391.374.557,00.

e. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/28/PPD-Bapenda/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp5.140.263.258,00.

f. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/42/PPD-Bapenda/2024 tanggal 21 Oktober tentang penetapan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp2.758.138.419,00.

g. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/43/PPD-Bapenda/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan penyaluran Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Kekurangan Salur tahun 2023 sebesar Rp8.824.214.888,00.

h. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/50/PPD-Bapenda/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp1.852.476.057,00.

i. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 971.1/52/PPD-Bapenda/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Triwulan III tahun 2024, penetapannya sebesar Rp8.004.039.551,00, namun hanya terealisasi sebesar Rp3.784.709.687,00.

2. Bantuan Keuangan sebesar Rp10.424.350.506,46 merupakan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 900.1.1-239-2024 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
0,00	0,00	134.012.443,45

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdapat dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2024 merupakan pendapatan hibah dari pemerintah dan pihak lainnya serta lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 adalah Rp0,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar (Rp134.012.443,45) atau (100,00)% dari realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp134.012.443,45.

5.1.2 Belanja Daerah

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
808.431.150.183,00	739.076.479.103,31	751.239.962.696,31

Anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi tahun 2024 sebesar Rp808.431.150.183,00 dengan realisasi sebesar Rp739.076.479.103,31 atau 91,42%. Berdasarkan jenisnya Belanja dapat dibagi atas:

1. Belanja berdasarkan urusan pemerintah dan organisasi, Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi:
   a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
   b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
   c. Urusan Pemerintah Pilihan
   d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
   e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
   f. Unsur Pengawas Pemerintahan
   g. Unsur Kewilayahan; dan
   h. Unsur Pemerintahan Umum Urusan pemerintah fungsi penunjang.

Realisasi Belanja berdasarkan urusan pemerintah dan organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.16 Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Dan Organisasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Urusan Pemerintaham Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan	179.183.282.570,00	173.583.590.045,46	96,87	163.197.408.466,08
		Dinas Kesehatan	132.184.363.735,00	122.972.821.175,48	93,03	105.019.067.133,91
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.849.360.716,00	32.584.449.335,36	88,43	32.258.607.411,84
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.995.922.656,00	11.535.816.210,36	88,76	19.064.951.334,44
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.964.094.392,00	7.477.543.479,00	93,89	6.859.552.116,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.833.020.822,00	4.709.335.258,00	97,44	5.306.260.057,00
		Satuan Polisi Pamong Praja	20.376.195.845,00	20.054.318.331,00	98,42	19.641.994.664,00
		Dinas Sosial	10.096.377.019,00	7.733.198.118,00	76,59	11.576.580.640,00

No.	Urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Urusan Pemerintaham Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.601.774.120,00	10.623.741.592,00	91,57	12.769.933.908,00
		Dinas Lingkungan Hidup	41.851.048.702,00	37.250.182.497,00	89,01	34.844.904.032,47
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.255.950.060,00	4.758.003.148,00	90,53	5.584.147.419,56
		Dinas Perhubungan	15.542.652.311,00	14.247.042.555,00	91,66	13.599.664.951,96
		Dinas Komunikasi dan Informatika	8.625.161.724,00	7.875.552.692,00	91,31	7.528.250.071,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	8.122.062.958,00	7.570.255.083,00	93,21	9852023540
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.339.435.366,00	6.092.616.788,00	96,11	6.523.513.363,00
		Dinas Pemuda dan Olah Raga	8.602.099.282,00	6.792.731.946,13	78,97	8257752177
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.061.547.486,00	4.643.712.177,00	91,74	4.767.073.768,00
3	Urusan Pemerintah Pilihan	Dinas Pariwisata	24.183.314.097,00	20.005.739.595,13	82,73	24.892.657.623,71
		Dinas Pertanian dan Pangan	11.486.606.336,00	9.992.232.864,84	86,99	13.946.071.366,00
		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20.796.370.760,00	17.958.318.703,55	86,35	32.907.703.904,79
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	69.554.130.876,00	65.819.268.776,00	94,63	67.314.319.106,07
		Sekretariat DPRD	42.036.544.314,00	36.752.905.983,00	87,43	36.637.397.786,26
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Keuangan	31.563.998.795,00	24.337.689.464,00	77,11	25.932.246.775,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.716.716.150,00	6.326.650.504,00	94,19	5.886.956.657,00
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.228.873.904,00	5.936.163.047,00	95,30	5.828.054.166,00
6	Unsur Pengawas Pemerintahan	Inspektorat Daerah	8.693.250.490,00	8.469.363.348,00	97,42	8.196.931.221,67

No.	Urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	18.645.006.872,00	15.992.218.024,00	85,77	16.889.281.184,00
		Kecamatan Guguk Panjang	16.385.002.451,00	13.806.561.047,00	84,26	17.703.040.504,15
		Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	15.475.061.414,00	13.424.703.305,00	86,75	15.944.350.796,40
8	Unsur Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.181.923.960,00	19.749.754.011,00	93,24	12.509.266.551,00
TOTAL			**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**91,42**	**751.239.962.696,31**

2. Belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi:

   a. Fungsi pelayanan umum;

   b. Fungsi ketertiban dan keamanan;

   c. Fungsi ekonomi;

   d. Fungsi lingkungan hidup;

   e. Fungsi perumahan dan fasilitas umum;

   f. Fungsi kesehatan;

   g. Fungsi pariwisata dan budaya;

   h. Fungsi pendidikan; dan

   i. Fungsi perlindungan sosial.

   Realisasi Belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.17 Realisasi Belanja Berdasarkan Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah dan Fungsi Tahun 2024 dan 2023

No.	Urusan	Fungsi	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelayanan Umum	Komunikasi dan Informatika	8.625.161.724,00	7.875.552.692,00	91,31	7.528.250.071,00
		Perencanaan	6.228.873.904,00	5.936.163.047,00	95,30	5.828.054.166,00
		Keuangan	31.563.998.795,00	24.337.689.464,00	77,11	25.932.246.775,00
		Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	6.716.716.150,00	6.326.650.504,00	94,19	5.886.956.657,00
		Pelayanan Administrasi Pemerintah	111.590.675.190,00	102.572.174.759,00	91,92	103.951.716.892,33
		Kewilayahan	50.505.070.737,00	43.223.482.376,00	85,58	50.536.672.484,55

No.	Urusan	Fungsi	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pengawasan	8.693.250.490,00	8.469.363.348,00	97,42	8.196.931.221,67
		Kesatuan Bangsa dan Politik	21.181.923.960,00	19.749.754.011,00	93,24	12.509.266.551,00
2	Ketertiban dan Keamanan	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	33.173.311.059,00	32.241.197.068,00	97,19	31.807.806.837,00
3	Ekonomi	Perhubungan	15.542.652.311,00	14.247.042.555,00	91,66	13.599.664.951,96
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.122.062.958,00	7.570.255.083,00	93,21	9.852.023.540,00
		Penanaman Modal	6.339.435.366,00	6.092.616.788,00	96,11	6.523.513.363,00
		Pertanian	11.486.606.336,00	9.992.232.864,84	86,99	13.946.071.366,00
		Perdagangan	20.796.370.760,00	17.958.318.703,55	86,35	32.907.703.904,79
4	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	41.851.048.702,00	37.250.182.497,00	89,01	34.844.904.032,47
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.849.360.716,00	32.584.449.335,36	88,43	32.258.607.411,84
		Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.995.922.656,00	11.535.816.210,36	88,76	19.064.951.334,44
6	Kesehatan	Kesehatan	132.184.363.735,00	122.972.821.175,48	93,03	105.019.067.133,91
7	Pariwisata dan Budaya	Pariwisata	24.183.314.097,00	20.005.739.595,13	82,73	24.892.657.623,71
8	Pendidikan	Pendidikan	179.183.282.570,00	173.583.590.045,46	96,87	163.197.408.466,08
		Kepemuda dan Olah Raga	8.602.099.282,00	6.792.731.946,13	78,97	8.257.752.177,00
		Perpustakaan	5.061.547.486,00	4.643.712.177,00	91,74	4.767.073.768,00
9	Perlindungan Sosial	Sosial	10.096.377.019,00	7.733.198.118,00	76,59	11.576.580.640,00
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.601.774.120,00	10.623.741.592,00	91,57	12.769.933.908,00
		Administrasi Kependudukan dan Capil	5.255.950.060,00	4.758.003.148,00	90,53	5.584.147.419,56
TOTAL			**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**91,42**	**751.239.962.696,31**

3. Belanja berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi:

   a. Belanja Operasi,

   b. Belanja Modal,

   c. Belanja Tidak Terduga, dan

   d. Belanja Transfer.

   Realisasi Belanja berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.18 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	4 =(3/2)	(5)
BELANJA DAERAH	**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**91,42**	**751.239.962.696,31**
BELANJA OPERASI	**727.886.843.406,00**	**665.946.895.972,54**	**91,49**	**667.764.935.144,91**
Belanja Pegawai	348.366.503.439,32	336.607.731.061,67	96,62	308.535.703.099,00
Belanja Barang dan Jasa	316.715.324.592,68	272.602.571.149,75	86,07	308.199.944.742,03
Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	100,00	2.499.916.363,00
Belanja Hibah	57.105.915.374,00	51.339.007.283,12	89,90	43.676.370.940,88
Belanja Bantuan Sosial	3.199.100.000,00	2.897.600.000,00	90,58	4.853.000.000,00
BELANJA MODAL	**69.943.686.777,00**	**63.532.002.219,77**	**90,83**	**74.023.558.551,40**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.576.288.033,00	12.261.224.480,70	84,12	26.111.089.608,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.771.313.480,00	31.435.241.904,22	93,08	27.005.206.763,60
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.966.602.364,00	18.357.697.907,85	91,94	19.501.037.779,33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.429.482.900,00	1.278.037.927,00	89,41	1.406.224.400,00
Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.000.000.000,00**	**380.911,00**	**0,04**	**849.000,00**
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	380.911,00	0,04	849.000,00
BELANJA TRANSFER	**9.600.620.000,00**	**9.597.200.000,00**	**99,96**	**9.450.620.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	99,96	9.450.620.000,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
727.886.843.406,00	**665.946.895.972,54**	**667.764.935.144,91**

Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2024 sebesar Rp727.886.843.406,00 realisasi sebesar Rp665.946.895.972,54 atau 91,49%. Realisasi Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar (Rp1.818.039.172,37) atau 0,27% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp667.764.935.144,91. Realisasi Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.19 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	Realisasi 2023 Rp	% Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ (Penurunan) Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(4-5)	7=(4-5)
1	Belanja Pegawai	348.366.503.439,32	336.607.731.061,67	308.535.703.099,00	8,34	28.072.027.962,67
2	Belanja Barang dan Jasa	316.715.324.592,68	272.602.571.149,75	308.199.944.742,03	(13,06)	(35.597.373.592,28)
3	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	2.499.916.363,00	0,00	70.115,00
4	Belanja Hibah	57.105.915.374,00	51.339.007.283,12	43.676.370.940,88	14,93	7.662.636.342,24
5	Belanja Bantuan Sosial	3.199.100.000,00	2.897.600.000,00	4.853.000.000,00	(67,48)	(1.955.400.000,00)
Total		**727.886.843.406,00**	**665.946.895.972,54**	**667.764.935.144,91**	**(0,27)**	**(1.818.039.172,37)**

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
348.366.503.439,32	336.607.731.061,67	308.535.703.099,00

Anggaran Belanja Pegawai tahun 2024 adalah sebesar Rp348.366.503.439,32 dengan realisasi sebesar Rp336.607.731.061,67 atau 96,62%. Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp28.072.027.962,67 atau 9,10% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp308.535.703.099. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.20 Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(4/3)	(6)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	196.571.498.410,00	191.534.898.876,00	97,44	167.923.564.479,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	91.160.597.246,00	88.152.306.110,00	96,70	81.165.986.891,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	42.736.872.521,00	40.357.719.961,00	94,43	40.291.141.615,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.050.910.000,00	9.432.584.080,00	93,85	9.850.520.992,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.166.042.797,00	768.563.704,67	65,91	939.295.387,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	720.000.000,00	565.062.170,00	78,48	710.880.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	5.960.582.465,32	5.796.596.160,00	97,25	7.654.313.735,00
Jumlah		**348.366.503.439,32**	**336.607.731.061,67**	**96,62**	**308.535.703.099,00**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2022 Rp
316.715.324.592,68	272.602.571.149,75	308.199.944.742,03

Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 adalah sebesar Rp316.715.324.592,68 dengan realisasi sebesar Rp272.602.571.149,75 atau 86,07%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar (Rp35.597.373.592,28) atau 11,55% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp308.199.944.742,03. Realisasi Belanja Barang tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.21 Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(4/3)	(6)
1	Belanja Barang	47.761.152.115,00	35.510.547.931,87	74,35	53.499.794.606,51
2	Belanja Jasa	143.507.819.239,00	129.509.277.875,13	90,25	152.018.771.908,12
3	Belanja Pemeliharaan	27.594.558.895,00	22.044.698.814,85	79,89	22.579.306.504,01
4	Belanja Perjalanan Dinas	53.012.447.833,00	42.860.599.777,00	80,85	46.347.966.470,39
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	17.125.848.000,00	16.404.660.750,00	95,79	8.483.313.000,00

No	Uraian	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(4/3)	(6)
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.560.963.589,00	12.441.993.638,00	99,05	11.886.674.293,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.268.551.000,00	2.132.395.407,00	65,24	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.883.983.921,68	11.698.396.955,90	98,44	13.384.117.960,00
Jumlah		**316.715.324.592,68**	**272.602.571.149,75**	**86,07**	**308.199.944.742,03**

Realisasi Belanja Barang tahun 2024 terdiri atas Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp35.400.622.931,87 dan Belanja Barang Tak Habis Pakai berupa Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu dan Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) sebesar Rp109.925.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.22 Belanja Barang Tahun 2024

NO	SKPD	Belanja Barang Pakai Habis	Belanja Barang Tak Habis Pakai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	119.002.230,00	
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	612.224.609,00	
3	Badan Keuangan	960.065.052,00	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	114.175.900,00	
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	172.903.295,00	
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	317.327.655,00	
7	Dinas Kesehatan	2.585.260.283,00	
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	113.059.970,00	
9	Dinas Koperasi,UKM Dan Tenaga Kerja	175.584.671,00	
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.637.121.850,00	
11	Dinas Pariwisata	3.254.580.046,00	11.195.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	304.876.278,00	4.440.000,00
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	239.134.750,00	
14	Dinas Pemerdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anakn pengendalian Penduduk Dan KB	1.612.827.855,00	
15	Dinas Pemuda Dan Olahraga	333.786.650,00	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	237.591.920,00	
17	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.025.863.792,03	
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	475.842.300,00	
19	Dinas Perhubungan	119.660.128,00	93.690.000,00
20	Dinas Perpustajaan Dan Kearsipan	158.489.191,00	
21	Dinas Pertanian dan Pangan	828.383.510,84	600.000,00
22	Dinas Perumahan Dan kawasan Permukiman	583.717.249,00	
23	Dinas Sosial	866.005.000,00	
24	Inspektorat Daerah	144.617.150,00	
25	Kecamatan ABTB	1.517.965.972,00	
26	Kecamatan Guguak Panjang	1.985.008.612,00	
27	Kecamatan MKS	1.881.901.520,00	
28	Satuan Polisi Pamong Praja	283.167.480,00	
29	Sekretariat Daerah	7.553.576.974,00	
30	Sekretariat DPRD	3.186.901.039,00	
Jumlah		**35.400.622.931,87**	**109.925.000,00**

Realisasi Belanja Jasa tahun 2024 sebesar Rp129.509.277.875,13 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.23 Belanja Jasa Tahun 2024

No	SKPD	Belanja Jasa Kantor	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	Belanja Sewa Tanah	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Belanja Beasiswa Pendidikan Pns	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non Asn/Pemungut Pajak Daerah	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	376.378.122,00	5.448.000,00	2.450.000,00					209.500.000,00	673.355.850,00		
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.610.561.623,00	1.361.825,00			63.569.700,00						
3	Badan Keuangan	2.238.431.380,00	38.871.400,00								294.528.409,00	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.807.279.096,00	53.935.200,00									
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	333.256.181,00	2.724.000,00					68.952.500,00				
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	837.530.411,00	20.430.000,00									
7	Dinas Kesehatan	9.968.573.254,00	8.261.793.100,00	2.000.000,00		13.980.000,00	2.000.000,00					
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.684.332.515,00	25.386.000,00					27.000.000,00				
9	Dinas Koperasi,UKM Dan Tenaga Kerja	386.538.000,00	412.113.200,00	5.895.000,00		12.487.500,00		98.762.000,00				
10	Dinas Lingkungan Hidup	13.551.204.374,00	281.420.862,00								30.959.169,00	114.667.995,00
11	Dinas Pariwisata	7.733.588.236,01	95.893.400,00	54.025.000,00		42.800.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00		4.050.000,00	172.832.797,00	
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.112.210.408,00	71.018.400,00			1.000.000,00						43.839.783,00
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.576.767.502,00	30.821.464,00									
14	Dinas Pemerdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anakn pengendalian Penduduk Dan KB	1.146.828.798,00	20.415.000,00	2.500.000,00		61.950.000,00	13.800.000,00	17.000.000,00				
15	Dinas Pemuda Dan Olahraga	669.783.828,00	13.620.000,00			2.500.000,00						
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1.857.052.553,00	54.480.000,00	4.600.000,00				49.938.900,00				
17	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	17.978.237.734,12	319.509.200,00	21.000.000,00		77.700.000,00	19.500.000,00	5.000.000,00				
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.887.868.573,00	270.756.247,00		2.175.848.283,00	46.750.000,00					53.420.000,00	
19	Dinas Perhubungan	6.143.704.518,00	144.299.526,00									
20	Dinas Perpustajaan Dan Kearsipan	358.599.499,00	1.362.000,00									
21	Dinas Pertanian dan Pangan	956.467.496,00	18.250.800,00			24.710.000,00						
22	Dinas Perumahan Dan kawasan Permukiman	1.160.330.339,00	27.512.400,00			9.554.500,00						
23	Dinas Sosial	608.640.087,00	50.207.536,00									

No	SKPD	Belanja Jasa Kantor	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	Belanja Sewa Tanah	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Belanja Beasiswa Pendidikan Pns	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non Asn/Pemungut Pajak Daerah	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
24	Inspektorat Daerah	423.840.690,00	1.362.000,00									
25	Kecamatan ABTB	1.198.216.025,00	40.944.346,00	2.000.000,00		44.870.000,00						
26	Kecamatan Guguak Panjang	1.196.329.361,00	47.709.000,00	7.000.000,00		52.950.000,00	4.000.000,00					
27	Kecamatan MKS	940.171.060,00	55.526.788,00	850.000,00		39.600.000,00	4.000.000,00					
28	Satuan Polisi Pamong Praja	10.531.277.401,00	274.345.222,00									
29	Sekretariat Daerah	6.557.280.723,00	232.915.800,00	361.705.633,00		1.206.714.965,00	271.950.000,00			40.752.000,00		
30	Sekretariat DPRD	2.754.183.368,00	34.640.200,00	9.100.000,00		237.086.820,00						153.735.000,00
	Jumlah	**111.585.463.155,13**	**10.909.072.916,00**	**473.125.633,00**	**2.175.848.283,00**	**1.938.223.485,00**	**345.250.000,00**	**290.653.400,00**	**209.500.000,00**	**718.157.850,00**	**551.740.375,00**	**312.242.778,00**

Realisasi per 31 Desember 2024 Belanja Pemeliharaan sebesar Rp22.044.698.814,85, Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp42.860.599.777,00, dan Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp16.404.660.750,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.24 Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang/jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak lain/Masyarakat Tahun 2024

NO	SKPD	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyrakat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	134.966.811,00	948.726.012,00	-
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	85.393.675,00	1.341.589.188,00	-
3	Badan Keuangan	358.521.684,00	1.118.675.052,00	29.798.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	174.201.775,00	89.559.868,00	-
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	168.565.925,00	492.550.810,00	-
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91.345.385,00	126.126.537,00	
7	Dinas Kesehatan	411.506.508,00	1.995.266.974,00	46.750.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	214.822.410,00	646.160.259,00	-
9	Dinas Koperasi,UKM Dan Tenaga Kerja	120.263.675,00	831.842.545,00	
10	Dinas Lingkungan Hidup	8.673.393.496,00	728.763.357,00	50.000.000,00
11	Dinas Pariwisata	746.143.665,00	1.059.990.115,00	31.500.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.734.484.212,00	638.224.795,00	-
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	589.213.966,00	241.873.420,00	-
14	Dinas Pemerdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anakn pengendalian Penduduk Dan KB	287.076.445,00	2.197.228.940,00	899.100.000,00
15	Dinas Pemuda Dan Olahraga	245.186.591,13	608.856.792,00	12.750.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	180.660.995,00	345.130.613,00	-
17	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	424.704.861,00	1.154.556.707,00	107.964.000,00
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	523.986.959,72	802.707.356,00	
19	Dinas Perhubungan	413.128.508,00	675.477.092,00	3.100.000,00
20	Dinas Perpustajaan Dan Kearsipan	172.984.725,00	206.003.292,00	-

NO	SKPD	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyrakat
21	Dinas Pertanian dan Pangan	422.481.699,00	439.653.233,00	102.450.000,00
22	Dinas Perumahan Dan kawasan Permukiman	488.954.738,00	313.670.486,00	-
23	Dinas Sosial	237.889.375,00	1.541.587.076,00	1.559.600.000,00
24	Inspektorat Daerah	139.549.931,00	700.029.624,00	
25	Kecamatan ABTB	232.906.212,00	824.832.350,00	1.639.398.750,00
26	Kecamatan Guguak Panjang	254.310.995,00	767.407.342,00	2.139.525.000,00
27	Kecamatan MKS	287.262.223,00	404.885.548,00	2.244.475.000,00
28	Satuan Polisi Pamong Praja	432.391.505,00	322.839.362,00	572.400.000,00
29	Sekretariat Daerah	2.223.503.170,00	5.259.265.984,00	6.965.850.000,00
30	Sekretariat DPRD	574.896.695,00	16.037.119.048,00	-
	Jumlah	**22.044.698.814,85**	**42.860.599.777,00**	**16.404.660.750,00**

Realisasi belanja Barang dan Jasa BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.441.993.638,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayan merupakan belanja pada 46 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 8 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).

Realisasi belanja barang dan Jasa BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.132.395.407,00 pada Dinas Kesehatan merupakan belanja pada 7 Puskesmas.

Realisasi belanja Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.698.396.955,90 pada Dinas Kesehatan merupakan belanja pada 7 Puskesmas dan 1 RSUD.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
2.500.000.000,00	**2.499.986.478,00**	**2.499.916.363,00**

Anggaran Belanja Subsidi tahun 2024 adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.499.986.478,00 atau 100,00% pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Realisasi Belanja Subsidi mengalami kenaikan sebesar Rp70.115,00 dari realisasi 2023 sebesar Rp2.499.916.363,00. Belanja Subsidi yang dianggarkan adalah untuk Tabungan Utsman yang disalurkan melalui BUMD PT. BPRS Jam Gadang sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban Subsidi dan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penugasan Kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Persero) Sebagai Penyalur Subsidi Margin Kepada Pelaku Usaha Mikro.

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.25 Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(4/3)	(6)
1	Belanja Subsidi Kepada BUMN	-	-		-
2	Belanja Subsisi Kepada BUMD	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	100	2.499.916.363,00
3	Belanja Subsidi Kepada Koperasi	-	-		-

No	Uraian	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(4/3)	(6)
Jumlah		2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	100	2.910.989.266,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
57.105.915.374,00	51.339.007.283,12	43.676.370.940,88

Anggaran Belanja Hibah tahun 2024 adalah sebesar Rp57.105.915.374,00 dengan realisasi sebesar Rp51.339.007.283,12 atau 89,90%. Realisasi belanja hibah mengalami kenaikan sebesar Rp7.662.636.342,24 atau 17,54% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp43.676.370.940,88. Realisasi belanja hibah tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.26 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(4/3)	(6)
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	16.136.761.850,00	16.023.578.753,12	99,30	5.599.900.000,00
2	Belanja Hibah Kepada Badan atau Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	32.876.090.000,00	27.294.156.719,00	83,02	30.244.973.984,88
3	Belanja Hibah Dana BOS untuk sekolah SMP, SD Swasta	7.317.750.000,00	7.284.106.494,00	99,54	7.125.439.966,00
4	Belanja Hibah kepada Partai Politik	775.313.524,00	737.165.317,00	95,08	706.056.990,00
Jumlah		**57.105.915.374,00**	**51.339.007.283,12**	**89,90**	**43.676.370.940,88**

Pada Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat tahun 2024 terdapat kenaikan realisasi yang signifikan, karena tahun 2024 diagendakan pemilihan umum serentak Kepala Daerah, sehingga terdapat hibah yang cukup besar kepada KPU Kota Bukittinggi dan BAWASLU Kota Bukittinggi.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia didalamnya mencakup:

1. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp12.227.282.970,00.
2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp15.041.873.749,00.
3. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp25.000.000,00.

Akun Belanja Hibah Dana BOS, digunakan untuk merealisasikan belanja yang sumber dananya dari DAK Non Fisik yang disalurkan Pemerintah Pusat ke Kota Bukittinggi untuk Satdikdas (SD dan SMP) Swasta, Tahun 2024 pendapatan dan belanjanya dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi, sementara fisik dananya

disalurkan langsung kepada pihak sekolah swasta, sehingga Pemerintahan Kota Bukittinggi mengesahkan Belanja Hibah tersebut per kali salurnya terhadap SD dan SMP swasta.

Dan untuk akun Belanja Hibah kepada Partai Politik merupakan belanja hibah yang diberikan kepada Partai-Partai Politik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dasar pencairan hibah kepada partai politik mengacu kepada Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-87-2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Periode 2019-2024 Tahun Anggaran 2024 sebanyak 8 Partai politik dengan total pagu anggaran sebesar Rp429.127.724,00 dan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-225-2024 tanggal 15 November 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Periode 2024-2029 Tahun Anggaran 2024 sebanyak 8 Partai politik dengan total pagu anggaran sebesar Rp346.185.800,-.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
3.199.100.000,00	2.897.600.000,00	4.853.000.000,00

Anggaran Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 adalah sebesar Rp3.199.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.897.600.000,00 atau 90,58% yang objek penerimanya adalah keluarga dan individu. Realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar (Rp1.955.400.000,00) atau 40.29% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp4.853.000.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.27 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(4/3)	(6)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	391.000.000,00	89.500.000,00	22,89	1.318.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga	2.808.100.000,00	2.808.100.000,00	100,00	3.535.000.000,00
Jumlah		**3.199.100.000,00**	**2.897.600.000,00**	**90,58**	**4.853.000.000,00**

Berikut keterangan masing-masing jenis Belanja Sosial yaitu:

1. Bantuan Sosial kepada individu di tahun 2024 merupakan Bantuan Sosial Berupa Uang sebesar Rp500.000,- kepada siswa SD dan SLTP kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pelaksanaan kegiatan ini secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. Dasar pencairan Dana Bantuan Sosial ini mengacu kepada Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-239-2024 tanggal 28 November 2024 Tentang Penerima Bantuan Sosial Biaya Personil Sekolah Dasar Tahun 2024 dan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-240-2024 Tanggal 28 November

2024 Tentang Penerima Bantuan Sosial Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama Tahun 2024.

2. Bantuan Sosial Kepada Keluarga pada tahun 2024 merupakan bantuan berupa uang yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh. program ini dilaksanakan melalui kegiatan yang dianggarkan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pencairan bantuan sosial ini mengacu kepada Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-130-2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang pada Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
69.943.686.777,00	63.532.002.219,77	74.023.558.551,40

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp69.943.686.777,00 dengan realisasi sebesar Rp63.532.002.219,77. Tahun 2023 realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp74.023.558.551,40, artinya pada tahun 2024 realisasinya mengalami penurunan sebesar (Rp10.491.556.331,60) atau (14,17%).

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi menurut jenis belanja adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.28 Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023 (Menurut Jenis Belanja)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 Rp	REALISASI 2024 Rp	REALISASI 2023 Rp	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp	% KENAIKAN/ PENURUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	8=(4-7)	9=(7/8)
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.576.288.033,00	12.261.224.480,70	26.111.089.608,47	(13.849.865.127,77)	(53,04)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.771.313.480,00	31.435.241.904,22	27.005.206.763,60	4.430.035.140,62	16,40
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.966.602.364,00	18.357.697.907,85	19.501.037.779,33	(1.143.339.871,48)	(5,86)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.429.482.900,00	1.278.037.927,00	1.406.224.400,00	(128.186.473,00)	(9,12)
6	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	199.800.000,00	0,00	199.800.000,00	100,00
Jumlah		**69.943.686.777,00**	**63.532.002.219,77**	**74.023.558.551,40**	**(10.491.556.331,63)**	**(14,17)**

Berikut keterangan masing-masing jenis Belanja Modal yaitu:

1. Belanja Modal Tanah tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan pada tahun 2024;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp14.576.288.033,00 dan direalisasikan sebesar Rp12.261.224.480,70 atau sebesar 84,12%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasikan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan antara lain berupa pengadaan alat-alat besar darat, alat bantu, alat-alat angkutan, alat angkutan darat tak bermotor, alat kantor dan rumah tangga, komputer dan sebagainya;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan Rp33.771.313.480,00 dan direalisasikan sebesar Rp31.435.241.904,00 atau sebesar 93,08%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk pengadaan/konstruksi/pembelian bangunan/gedung pemerintah termasuk rehabilitasi bangunan/gedung kantor maupun bangunan lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp19.966.601.364,00 dan direalisasikan sebesar Rp18.357.697.907,00 atau sebesar 91,94%. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk pengadaan ataupun rehab jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi serta jaringan yang dibutuhkan untuk masyarakat Kota Bukittinggi;dan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp1.429.482.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.278.037.927,00 atau sebesar 89,41%. Untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2024 realisasinya mencakup Belanja Modal Biota Peraian , dan Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS.
6. Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp199.800.000,00 atau sebesar 99,90%. Belanja Modal Aset Lainnya selama Tahun Anggaran 2024 realisasinya merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
1.000.000.000,00	380.911,00	849.000,00

Selama Tahun Anggaran 2024 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp380.911,00. Tahun 2023 belanja tersebut direalisasikan sebesar Rp849.000,00 dari anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00.

Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Belanja Belanja Tidak Terduga tahun 2024 mengalami penurunan. Lebih jelasnya realisasi belanja tidak terduga ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.29 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024

NO	TANGGAL	URAIAN	REALISASI Rp
(1)	(2)	(3)	(4)
1	30 Desember 2024	Pembayaran Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Pengembalian atas kelebihan penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Ratna NOP 13.75.010.006.002.0126.0	380.911,00
Jumlah			**380.911,00**

Belanja tidak terduga senilai Rp380.911,00 merupakan pengembalian atas kelebihan penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Ratna. Pencairan Belanja Tidak Terduga sesuai Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-248-2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Atas Nama Ratna Melalui Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	9.450.620.000,00

Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp9.600.620.000,00. Anggaran ini merupakan bantuan ke Pemerintah Provinsi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Bukittinggi yakni Hebat dalam sektor Pendidikan. Pemerintah memandang perlu adanya jaminan terlaksananya Wajib Belajar 12 Tahun berupa subsidi bagi pelajar SMA/SMK dan SLB Negeri yang mempunyai Kartu Keluarga Bukittinggi.

Untuk menjaga keberlangsungan serta untuk penguatan Program Pendidikan pada SMA, SMK dan SLB Negeri, maka Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya melalui salah satu kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-39-2024 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2024, dengan dana sebesar Rp9.597.200.000,00 (Sembilan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah).

5.1.2.5 Surplus / Defisit

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
(33.057.673.165,00)	2.305.600.225,09	(44.264.514.523,66)

Dari Pendapatan dan Belanja yang telah direalisasikan selama Tahun Anggaran 2024 menghasilkan Surplus sebesar Rp2.305.600.225,09 dari anggaran Surplus/Defisit yang ditetapkan sebesar (Rp33.057.673.165,00). Angka Surplus tersebut akan dimanfaatkan sebagai Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun berikutnya.

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2022 Rp
33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	77.322.187.688,46

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi dari setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam pegangan pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam Belanja Badan Keuangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp33.057.673.165,00 yaitu sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran. Sementara realisasi Pembiayaan tahun 2024 adalah 100% yang kurang sedikit dari anggarannya Rp0,20 sebesar Rp33.057.673.164,80. Realisasi Pembiayaan Daerah secara terinci dapat disajikan dibawah ini.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	77.322.181.688,46

Anggaran penerimaan pembiayaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp33.057.673.165,00 direalisasikan sebesar Rp33.057.673.164,80 atau lebih sedikit 100%. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari pelampauan pendapatan/penghematan belanja yang menjadi SiLPA tahun 2023 sebesar Rp33.057.673.164,80

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Anggaran Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2024 Rp	Realisasi Tahun 2023 Rp
0	35.363.273.389,89	33.057.673.164,80

Berdasarkan uraian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada bagian sebelumnya maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaannya mengalami Suprlus sebesar Rp2.305.600.225,09. Angka Surplus ditambah dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp33.057.673.164,80 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.363.273.389,89.

Disamping formula penghitungan SiLPA di atas, dapat juga kami informasikan struktur pembentuk SiLPA Tahun 2024 yang berasal dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja serta pembiayaan yang dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel. 5.30 Rincian SiLPA Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
I	**Pelampauan PAD**	**33.991.397.689,60**
	Pendapatan Asli Daerah	23.348.417.171,06
	Pendapatan Transfer	10.642.980.518,54
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-
II	**Penghematan Belanja**	**69.354.671.079,49**
	Belanja Operasi	61.939.947.433,46
	Belanja Modal	6.411.684.557,23
	Belanja Tidak Terduga	999.619.089,00
	Belanja Transfer	3.420.000,00
	Penyesuaian Realisasi SiLPA tahun lalu	-0,20
III	**Pelampauan Pembiayaan**	
	Penerimaan Pembiayaan	-
	Pengeluaran Pembiayaan	-
	SILPA (I - II + III)	**35.363.273.389,89**

SiLPA sebesar Rp Rp35.363.273.389,89 tersebut adalah dalam bentuk kas sebagaimana juga dijelaskan pada Neraca pos Aset Lancar kas dengan struktur dan nilai sebagai berikut:

Tabel 5.31 Daftar Kas Dibagian Aset Lancar Neraca

No	Uraian	Jumlah
1	Kas pada kasda	30.169.727.325,33
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	797.687.446,00
3	Kas pada Bendahara BLUD	3.024.590.848,56
4	Kas Dana BOSP	160.064.456,00
5	Kas BOK	1.259.447.152,00
	Jumlah	**35.411.517.227,89**

Terdapat selisih antara SiLPA sebesar Rp35.363.273.389,89 dibandingkan dengan jumlah kas dibagian Aset lancar pada Neraca sebesar Rp35.411.517.227,89 selisih tersebut sebesar Rp 48.243.838,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pajak yang belum dibayar pada Sekretariat Daerah sebesar Rp45.878.531,00.
- Pajak yang belum dibayar pada Kecamatan ABTB sebesar Rp1.695.189,00.
- Pajak yang belum dibayar pada Kecamatan ABTB sebesar Rp670.118,00.

Akun Kas di Kas Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp30.169.727.325,33. Dalam saldo Kas Daerah tahun 2024 tersebut masih terdapat sisa dana peruntukan tertentu sebesar Rp5.794.689.183 dengan uraian sebagai berikut:

1. Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik tahun s.d Tahun 2024 sebesar Rp1.023.277,00.

2. Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik sampai dengan tahun 2024 (selain BOSP, BOK Puskesmas dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM) adalah Rp1.444.254.181,00.
3. Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.563.100,00.
4. Sisa Dana Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 sebesar Rp0,00.
5. Sisa Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp27.393.277,00.
6. Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) yang peruntukannya untuk gaji PPPK sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp405.630,00
7. Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan Bidang Pendidikan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp3.505.504.943,00.
8. Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan Bidang Kesehatan sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.
9. Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan Bidang Pekerjaan Umum sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp497.895.076,00.
10. Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan Pendanaan Kelurahan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp218.886.200,00.
11. Sisa DBH Sawit sampai dengan tahun 2024 Rp94.763.499,00.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp
35.363.273.389,89	**33.057.673.164,80**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Perubahan SAL menyajikan pos-pos secara komparatif antara periode berjalan dan periode yang lalu. Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp35.,89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Kota Bukittinggi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	**33.057.673.164,80**	**77.322.187.688,46**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(33.057.673.164,80)	(77.322.187.688,46)
Subtotal	**-**	**-**
Pendapatan	741.382.079.328,40	706.975.448.172,65
Belanja dan Transfer	(739.076.479.103,31)	(751.239.962.696,31)
Surplus (Defisit)	2.305.600.225,09	(44.264.514.523,66)
Penerimaan Pembiayaan	33.057.673.164,80	77.322.187.688,46
Pengeluaran Pembiayaan	-	-
Pembiayaan - Neto	33.057.673.164,80	77.322.187.688,46
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**35.363.273.389,89**	**33.057.673.164,80**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp33.057.673.164,80 yang merupakan nilai dari SiLPA Tahun Anggaran 2023. Saldo Anggaran Lebih ini yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2024.
2. Penggunaan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi pada APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 100% dari total SiLPA tahun 2023 yakni sebesar Rp33.057.673.164,80 sementara penggunaan SAL tahun 2023 adalah Rp77.322.187.688,46.
3. Selisih antara SiLPA yang awal dengan penggunaan SiLPA tahun berjalan Rp0,00.
4. Selama tahun 2024, estimasi Perubahan SAL menghasilkan nilai Rp35.363.273.389,89 nilai ini sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2024 yang menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar

Rp35.363.273.389,89, nilai tersebut merupakan selisih dari nilai Pendapatan dikurangi nilai Belanja dan ditambah dengan Pembiayaan Netto selama tahun 2024.

5. Total nilai SAL Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah Rp35.363.273.389,89.

5.3 Neraca

Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2024 mencatatkan nilai Aset sebesar Rp2.061.791.213.670,66, nilai Kewajiban sebesar Rp7.538.674.127,57 dan nilai Ekuitas sebesar Rp2.054.252.539.543,09. Penjelasan masing-masing pos Neraca adalah sebagai berikut.

5.3.1 Aset

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
2.061.791.213.670,66	2.030.035.046.296,96

Nilai Aset Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.061.791.213.670,66. Nilai Aset tersebut terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp84.142.784.429,32, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp63.087.891.998,08, Aset Tetap sebesar Rp1.894.807.796.735,86, Aset Lainnya sebesar Rp19.752.740.507,40, dan Properti Investasi sebesar 0,00. Terdapat kenaikan nilai aset sebesar Rp31.756.167.373,70 dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp.2.030.035.046.296,96. Penjelasan Aset dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1 Aset Lancar

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
84.142.784.429,32	82.968.942.134,69

Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.142.784.429,32. Terdapat kenaikan nilai Aset Lancar sebesar Rp1.173.842.294,63 dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp82.968.942.134,69. Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang dan Persediaan. Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
35.411.517.227,89	33.224.700.728,80

Kas dan setara kas yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp35.411.517.227,89. Jika dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas tahun 2023 yaitu sebesar Rp33.224.700.728,80, terdapat peningkatan nilai kas dan setara kas sebesar Rp2.186.816.499,09, dan jika dibandingkan dengan SiLPA di LRA yang tercatat adalah sebesar Rp35.363.273.389,89 terdapat selisih antara kas dan setara kas dengan SiLPA di LRA sebesar Rp48.243.838,00, selisih tersebut terdiri dari:

1. Pajak yang belum disetor pada Sekretariat Daerah	45.878.531,00
2. Pajak yang belum disetor pada Kecamatan ABTB	1.695.189,00
3. Pajak yang belum disetor pada Kecamatan Guguk Panjang	670.118,00
	48.243.838,00

Penjelasan masing-masing selisih diatas adalah:

1. Pajak yang belum disetor per 31 Desember pada Sekretariat Daerah sebesar Rp45.878.531,00 terdiri dari PPN sebesar Rp37.694.185,00, PPh Pasal 22 sebesar Rp5.131.188,00 dan PPh Pasal 23 sebesar Rp3.053.158,00.

2. Pajak yang belum disetor pada Kecamatan ABTB per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.695.189 terdiri dari PPN sebesar Rp1.486.486,00 PPh Pasal 22 sebesar Rp202.703,00 dan PPh Pasal 23 sebesar Rp6.000,00 ketiga jenis pajak tersebut telah disetorkan pada Bulan Januari dan Februari 2025.
3. Pajak yang belum disetor pada Kecamatan Guguk Panjang per 31 Desember 2024 merupakan Pajak PPN sebesar Rp670.118,00 yang telah disetorkan pada tanggal 6 Februari 2025.

Rincian kas dan setara kas terdiri dari:

A. Kas di Kas Daerah	Tahun 2024 Rp 30.169.727.325,33	Tahun 2023 Rp 27.739.504.611,02

Kas di Kas Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp30.169.727.325,33. Jika dibandingkan dengan saldo kas di kas daerah tahun 2023 yaitu sebesar Rp27.739.504.611,02, terdapat peningkatan nilai sebesar Rp2.430.222.714,31. Saldo kas di kas daerah adalah sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 5.33 Daftar Saldo Kas di Rekening Kas Daerah

No.	Rekening	No. Rekening	Per 31 Desember 2024 (Rp.)	Per 31 Desember 2023 (Rp.)
1	2	3	4	5
1	KAS UMUM DAERAH	Bank Nagari 0200.0101.00276-1	30.169.727.325,33	27.739.504.611,02
			30.169.727.325,33	27.739.504.611,02

Dalam saldo Kas Daerah tahun 2024 tersebut masih terdapat sisa dana peruntukan tertentu sebesar Rp5.794.689.183 dengan uraian sebagai berikut:

1. Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik tahun s.d Tahun 2024 sebesar Rp1.023.277,00.
2. Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik sampai dengan tahun 2024 (selain BOSP, BOK Puskesmas dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM) adalah Rp1.444.254.181,00
3. Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.563.100,00
4. Sisa Dana Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 sebesar Rp0,00
5. Sisa Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp27.393.277,00
6. Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) yang peruntukannya untuk gaji PPPK sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp405.630,00

7. Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan Bidang Pendidikan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp3.505.504.943,00
8. Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan Bidang Kesehatan sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00
9. Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan Bidang Pekerjaan Umum sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp497.895.076,00
10. Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan Pendanaan Kelurahan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp218.886.200,00
11. Sisa DBH Sawit sampai dengan tahun 2024 Rp94.763.499,00

Rekening penampung penerimaan sementara dari masing-masing Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 5.34 Daftar Rekening Penampung Satuan Kerja

No.	SKPD	Nama Rekening Penampung	Nomor Rekening (Bank Nagari)
1	2	3	4
1	Badan Keuangan	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0200.0101.00343-1
		Pajak Hotel	0200.0101.00373.9
		Pajak Restoran	0200.0101.00374.1
		Pajak Hiburan	0200.0101.00375.2
		Pajak Reklame	0200.0101.00376.4
		Penerangan Jalan	0200.0101.00377.6
		Pajak Parkir	0200.0101.00378.8
		Pajak Air Tanah	0200.0101.00379.1
		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0200.0101.00380.6
2.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Layanan E-Retribusi dan E-Sewa	0200.0101.00436-6
3.	Dinas Pariwisata	Retribusi Tempat Rekreasi	0200.0101.00440.3
4.	Dinas Pertanian dan Pangan	Retribusi Pertanian dan Pangan	0209.0101.00001.3

B. Kas di Bendahara Penerimaan

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
0,00	166.538.000,00

Pada tahun 2024 tidak terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, tahun 2023 terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp166.538.000,00.

C. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
797.687.446,00	0,00

Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp797.687.446,00, jika dibandingkan dengan tahun lalu pada Tahun 2023 tidak terdapat sisa kas di Bendahara Pengeluaran. Sisa kas tahun 2024 tersebut merupakan sisa kas di Bedahara Pengeluaran Sekretariat Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Guguak Panjang dan Kas di

Bendahara Pengeluaran Kecamatan ABTB, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah

   Kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp795.322.139,00. Kas tersebut terdiri dari kurang setor pajak tahun 2024 sebesar Rp45.878.531,00 dan sisa UYHD yang terlambat disetorkan sebesar Rp749.443.608,00. Sisa UYHD tersebut telah disetorkan ke Kasda pada Tanggal 1 Januari 2025.

2. Bendahara Pengeluaran Kecamatan Guguak Panjang

   Kas pada Bendahara pengeluaran Kecamatan Guguak Panjang sebesar Rp670.118,00 merupakan kurang setor pajak Tahun 2024 dan telah disetorkan pada tanggal 6 Februari 2025

3. Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan ABTB.

   Kas pada Bendahara pengeluaran ABTB sebesar Rp1.695.189,00 yang merupakan kurang setor pajak tahun 2024, yaitu kurang setor pajak PPN sebesar Rp1.486.486,00. Kurang setor pajak PPh 23 sebesar Rp6.000,00. Dan Kurang setor PPh 22 sebesar Rp202.703,00. ketiga pajak tersebut telah disetorkan pada bulan Januari dan Februari 2025.

D. Kas di BLUD

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
3.024.590.848,56	2.501.217.531,78

Kas di BLUD yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.024.590.848,56. Jika dibandingkan dengan tahun lalu saldo kas BLUD per tanggal 31 Desember 2023 yang lalu adalah Rp2.501.217.531,78. artinya terdapat kenaikan saldo kas dari tahun 2023 sebesar Rp523.373.316,78. Rician mutasi kas pada Bendahara BLUD tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.35 Mutasi Kas Bendahara BLUD Tahun 2024

No	Uraian	Saldo awal (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Puskesmas Rasimah Ahmad	43.479.682,00	1.389.966.171,00	1.067.824.613,00	365.621.240,00
2	Puskesmas Guguak Panjang	59.448.203,00	1.548.254.317,00	1.302.400.099,00	305.302.421,00
3	Puskesmas Nilam Sari	18.409.418,15	781.552.987,00	485.880.032,00	314.082.373,15
4	Puskesmas Mandiangin	39.593.556,00	1.115.694.150,00	909.875.099,00	245.412.607,00
5	Puskesmas Gulai Bancah	23.069.025,68	524.238.798,00	379.984.102,00	167.323.721,68
6	Puskesmas Tigo Baleh	67.432.839,00	1.037.322.622,00	829.395.452,00	275.360.009,00
7	Puskesmas Plus Mandiangin	13.415.395,00	501.793.485,00	381.219.580,00	133.989.300,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah	2.236.369.412,95	11.924.420.717,68	12.943.290.953,90	1.217.499.176,73
	Total	**2.501.217.531,78**	**18.823.243.247,68**	**18.299.869.930,90**	**3.024.590.848,56**

Pendapatan BLUD Tahun 2024 sebagaimana tabel diatas dirinci pada tabel berikut ini:

Tabel 5.36 Rincian Sisa Kas BLUD Puskesmas dan RSUD Tahun 2024

No	BLUD	PENDAPATAN	Sisa kas per 31 Desember 2024
1	2	3	4
1	Puskesmas Rasimah Ahmad	Pendapatan BLUD dari Kapitasi	202.214.940,00
		Pendapatan BLUD dari Non Kapitasi	77.527.300,00
		Pendapatan BLUD dari Retribusi dan Pemanfaatan Aset Daerah	85.879.000,00
		Jumlah	**365.621.240,00**
2	Puskesmas Guguak Panjang	Pendapatan BLUD dari Kapitasi	230.953.421,00
		Pendapatan BLUD dari Non Kapitasi	0,00
		Pendapatan BLUD dari Retribusi dan Pemanfaatan Aset Daerah	74.349.000,00
		Jumlah	**305.302.421,00**
3	Puskesmas Nilam Sari	Pendapatan BLUD dari Kapitasi	275.841.473,15
		Pendapatan BLUD dari Non Kapitasi	10.318.400,00
		Pendapatan BLUD dari Retribusi dan Pemanfaatan Aset Daerah	27.922.500,00
		Jumlah	**314.082.373,15**
4	Puskesmas Mandiangin	Pendapatan BLUD dari Kapitasi	185.859.907,00
		Pendapatan BLUD dari Non Kapitasi	4.424.200,00
		Pendapatan BLUD dari Retribusi dan Pemanfaatan Aset Daerah	53.643.500,00
		Pendapatan dari Pengembalian kelebihan belanja Cetak	1.485.000,00
		Jumlah	**245.412.607,00**
5	Puskesmas Gulai Bancah	Pendapatan BLUD dari Kapitasi	107.408.821,68
		Pendapatan BLUD dari Non Kapitasi	22.498.900,00
		Pendapatan BLUD dari Retribusi dan Pemanfaatan Aset Daerah	37.416.000,00
		Jumlah	**167.323.721,68**
6	Puskesmas Tigo Baleh	Pendapatan BLUD dari Kapitasi	198.535.509,00
		Pendapatan BLUD dari Non Kapitasi	0,00
		Pendapatan BLUD dari Retribusi dan Pemanfaatan Aset Daerah	76.824.500,00
		Jumlah	**275.360.009,00**
7	Puskesmas Plus Mandiangin	Pendapatan BLUD dari Kapitasi	107.235.700,00
		Pendapatan BLUD dari Non Kapitasi	1.867.100,00
		Pendapatan BLUD dari Retribusi dan Pemanfaatan Aset Daerah	24.886.500,00
		Jumlah	**133.989.300,00**
8	Rumah Sakit Umum Daerah	SILPA 2023	
		Pendapatan BLUD	1.217.499.176,73
		Jumlah	**1.217.499.176,73**
TOTAL			**3.024.590.848,56**

Pada Puskesmas Gulai Bancah terdapat perbedaan saldo kas real dengan saldo kas di rekening koran bendahara BLUD Puskesmas Gulai Bancah, saldo kas rekening koran lebih besar sebesar Rp137.522,00. Perbedaan tersebut adalah uang Bendahara yang disetorkan saat pembukaan rekening tabungan untuk Non Kapitasi JKN sebesar Rp100.000,00 dan Pembukaan rekening Promprev FKTP Gulai Bancah sebesar Rp100.000,00, karena ternyata tidak dibutuhkan kedua rekening tabungan tersebut ditutup kembali dan setelah dikurangi biaya administrasi masing-masing bersisa sebesar Rp69.033,00 dan Rp68.489,00 dengan ditutupnya kedua rekening tersebut sisa uang pada rekening tersebut dipindahkan ke Rekening BLUD Puskesmas Gulai Bancah, sehingga terjadi selisih antara saldo kas real dengan saldo kas di rekening koran sebesar Rp137.522,00 pada Puskesmas Gulai Bancah.

E. Kas Dana BOS

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
0,00	986.838.017,00

Kas Dana BOS Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. sedangkan saldo kas dana BOS sampai dengan Tahun 2023 lalu adalah sebesar

Rp986.838.017,00. Berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tanggal 23 Juni 2023, maka pada tahun 2024 saldo Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di reklas ke Akun Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan dicatat menyatu dengan Kas Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD serta Kas Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan.

F. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
0,00	1.830.113.005,00

Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2023 adalah sebesar Rp1.830.113.005,00 yang merupakan saldo kas Dana BOK Puskesmas tahun 2023, dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat akun Kas Dana BOK, maka dicatat di Kas Dana Kapitasi pada FKTP.

Pada tahun 2024 dengan telah tersedianya akun khusus Dana BOK Puskesmas sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tanggal 23 Juni 2023, maka Kas Dana BOK Puskesmas di reklas ke Akun tersebut.

G. Kas Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
0,00	489.564,00

Kas Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan kas lainnya tahun 2023 adalah sebesar Rp489.564,00 yang merupakan kas atas bunga rekening BOP PAUD TK Negeri Pembina sebesar Rp452.989,00 dan TK Negeri 1 Bukittinggi sebesar Rp36.578,00 dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada Bulan Januari 2024 yang lalu.

H. Kas Dana BOSP

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
160.064.456,00	0,00

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) terdiri dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan), Dana BOSP disalurkan dalam bagian Pendapatan DAK Non Fisik, dimana jika terdapat sisa dana di akhir tahun akan diperhitungkan pada penyaluran tahun berikutnya. Dana BOSP disalurkan langsung oleh Pemerintah Pusat ke rekening Bendahara BOS dan Bendahara BOP yang anggarannya ditetapkan pada rekening Belanja

Operasional BOS dan BOP untuk SD dan SMP Negeri. namun untuk SD, SMP dan PAUD swasta Serta Satuan Pendidikan Kesetaraan dianggarkan di APBD melalui rekening Belanja Hibah. Dana BOSP tersebut dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

Pada Tahun 2023 Kas Dana BOS, dan Kas Dana BOP terletak pada Akun Kas Dana BOS, dan pada Tahun 2024 di reklas ke Akun Kas Dana BOSP, Penjelasan masing-masing Dana BOSP adalah sebagai berikut:

1. Kas Dana BOS

   Saldo Kas Bendahara BOS Tahun 2024 adalah sebesar Rp157.064.305,00 Kas di Bendahara BOS merupakan bagian Kas yang ada pada Bendahara yang memegang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing-masing Sekolah Dasar Negeri dan SMP Negeri. Saldo kas di Bendahara BOS Sekolah Negeri pada Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp157.064.305,00 sedangkan saldo kas pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp986.838.016,00 (reklas dari akun Kas Dana BOS tahun 2023).

   Rincian saldo kas pada masing-masing Bendahara BOS di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.37 Mutasi Kas Pada Bendahara BOS Sekolah Negeri Tahun 2024

No.	Uraian	Saldo Awal	Pendapatan BOS Kinerja	Pendapatan BOS Reguler	Belanja	Pengembalian atas temuan inspektorat	Pengembalian ke RKUN	Saldo 31 Des 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SD N 01 Campago Ipuh	12.176.330,00	-	140.617.847,00	147.802.600,00			4.991.577,00
2	SD N 02 Campago Guguak Bulek	8.311.657,00	-	140.724.948,00	148.990.861,00			45.744,00
3	SD N 03 Pulai Anak Air	2.384.357,00	25.000.000,00	102.801.550,00	130.019.961,00			165.946,00
4	SD N 04 Garegeh	41.410,00	25.000.000,00	271.138.590,00	295.760.687,00			419.313,00
5	SD N 05 PPK	7.825.345,00	22.500.000,00	188.670.870,00	215.845.980,00			3.150.235,00
6	SD N 06 Pulai Anak Air	986.360,00	-	140.161.444,00	140.025.668,00	3.795.000,00		4.917.136,00
7	SD N 07 Kubu Gulai Bancah	13.640.866,00	-	236.905.430,00	249.404.784,00			1.141.512,00
8	BOS SD N 08 Campago Ipuh	203.389,00	-	110.866.200,00	90.583.454,00			20.486.135,00
9	SD N 09 Manggis Ganting	11.104.114,00	22.500.000,00	146.466.818,00	178.524.853,00			1.546.079,00
10	SD N 10 Puhun Pintu Kabun	4.925.553,00	-	122.845.217,00	127.770.770,00	350.000,00		350.000,00
11	SD N 11 Campago Guguk Bulek	11.390.040,00	25.000.000,00	136.344.270,00	172.708.702,00			25.608,00
12	SD N 12 Puhun Pintu Kabun	8.822.489,00	-	91.907.511,00	100.713.514,00			16.486,00
13	SD N 13 Kubu Gulai Bancah	124.482,00	-	90.064.605,00	90.174.450,00			14.637,00
14	SD N 14 Tanjung Alam	22.258.323,00	-	17.290.000,00	-		39.548.323,00	-,00
15	SD N 15 Pulai Anak Air	1.084.942,00	22.500.000,00	137.318.270,00	160.878.275,00			24.937,00
16	SD N 16 Campago Ipuh	54.582,00	-	133.738.670,00	133.767.971,00			25.281,00
17	SD N 17 Manggis Ganting	7.479.347,00	-	108.175.450,00	115.564.550,00	550.000,00		640.247,00
18	SD N 18 Campago Guguak Bulek	5.255.645,00	-	126.829.620,00	132.045.718,00			39.547,00
19	SD N 01 Benteng Pasar Atas	27.665.614,00	22.500.000,00	438.967.196,00	480.891.346,00			8.241.464,00
20	SD N 02 Percontohan	14.546.647,00	25.000.000,00	470.107.182,00	506.608.552,00			3.045.277,00
21	SD N 03 Pakan Kurai	8.191.330,00	-	415.189.231,00	418.499.866,00	300.000,00		5.180.695,00
22	SD N 04 Bukit Apit Puhun	287.276,00	-	98.279.038,00	98.566.314,00			-,00
23	SD N 05 Tarok Dipo	1.500.174,00	25.000.000,00	131.244.420,00	151.691.920,00			6.052.674,00
24	SD N 06 Aur Tajungkang Tangah Sawah	658.071,00	-	143.724.537,00	144.380.654,00			1.954,00

No.	Uraian	Saldo Awal	Pendapatan BOS Kinerja	Pendapatan BOS Reguler	Belanja	Pengembalian atas temuan inspektorat	Pengembalian ke RKUN	Saldo 31 Des 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	SD N 07 Bukit Cangang	20.668.667,00	-	276.513.633,00	296.089.618,00			1.092.682,00
26	SD N 08 Tarok Dipo	52.152.118,00	-	264.817.757,00	316.314.283,00	295.000,00		950.592,00
27	SD N 10 Aur Tajungkang Tangah Sawah	206.392,00	22.500.000,00	138.317.870,00	161.023.875,00	1.612.566,00		1.612.953,00
28	SD N 11 Bukit Apit Puhun	14.429.184,00	-	122.467.754,00	133.994.669,00	1.025.000,00		3.927.269,00
29	SD N 12 Bukit Cangang	900.398,00	-	105.319.360,00	106.215.710,00	200.000,00		204.048,00
30	SD N 13 Bukit Apit Puhun	551.568,00	-	143.780.000,00	144.306.568,00			25.000,00
31	SD N 14 Aur Tajungkang Tangah Sawah	36.020.624,00	-	296.599.953,00	331.444.460,00	25.000,00		1.201.117,00
32	SD N 16 Tarok Dipo	1.705.300,00	-	289.371.640,00	290.966.020,00			110.920,00
33	SD N 17 Pakan Kurai	56.648,00	-	256.563.352,00	256.619.969,00			31,00
34	SD N 18 Tarok Dipo	602.441,00	-	115.565.763,00	116.133.370,00			34.834,00
35	SD N 19 Aur Tajungkang Tangah Sawah	7.591.271,00	-	123.759.981,00	131.351.156,00			96,00
36	SD N 01 Ladang Cakiah	8.098.311,00	25.000.000,00	149.239.799,00	182.337.738,00	725.000,00		725.372,00
37	SD N 02 Aur Kuning	40.153.182,00	-	297.512.629,00	334.137.738,00			3.528.073,00
38	SD N 03 Pakan Labuah	7.349.183,00	45.000.000,00	283.885.444,00	336.234.315,00			312,00
39	SD N 04 Birugo	192.475,00	25.000.000,00	488.477.936,00	509.389.411,00	460.000,00		4.741.000,00
40	SD N 05 Birugo	5.299.899,00	-	112.670.780,00	117.663.005,00			307.674,00
41	SD N 06 Parit Antang	11.817.707,00	-	107.371.795,00	119.189.492,00	1.328.000,00		1.328.010,00
42	SD N 07 Belakang Balok	159.474,00	45.000.000,00	170.029.700,00	215.100.974,00	1.350.000,00		1.438.200,00
43	SD N 08 Kubu Tanjung	8.984.247,00	22.500.000,00	140.043.627,00	167.677.014,00	575.000,00		4.425.860,00
44	SD N 09 Belakang Balok	37.290,00	22.500.000,00	197.432.710,00	219.969.968,00	25.000,00		25.032,00
45	SD N 10 Sapiran	887.856,00	45.000.000,00	248.429.996,00	293.862.423,00			455.429,00
46	SD N 11 Aur Kuning	27.280.331,00	-	132.087.622,00	150.921.283,00	150.000,00		8.596.670,00
47	SMP N 1 Bukittinggi	65.403.765,00	35.000.000,00	782.219.644,00	856.773.636,00			25.849.773,00
48	SMP N 2 Bukittinggi	74.704.451,00	140.000.000,00	1.020.700.470,00	1.222.585.202,00			12.819.719,00
49	SMP N 3 Bukittinggi	81.654.177,00	-	502.114.520,00	583.716.393,00			52.304,00
50	SMP N 4 Bukittinggi	35.538.531,00	140.000.000,00	941.277.463,00	1.115.311.494,00			1.504.500,00
51	SMP N 5 Bukittinggi	4.574.532,00	35.000.000,00	631.305.185,00	668.613.540,00			2.266.177,00
52	SMP N 6 Bukittinggi	189.091.770,00	35.000.000,00	607.933.536,00	817.325.517,00			14.699.789,00
53	SMP N 7 Bukittinggi	64.403.545,00	35.000.000,00	682.006.341,00	776.801.987,00			4.607.899,00
54	SMP N 8 Bukittinggi	55.404.336,00	-	548.339.681,00	603.733.531,00			10.486,00
	Total	**986.838.016,00**	**887.500.000,00**	**14.316.534.855,00**	**16.007.025.809,00**	**12.765.566,00**	**39.548.323,00**	**157.064.305,00**

Pada tahun 2024 terdapat pengembalian Dana BOS oleh SD Negeri 14 Tanjung Alam ke Rekening Kas Umum Daerah untuk diteruskan oleh BUD ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN), pengembalian dikarenakan SDN 14 Tanjung Alam tutup pada bulan Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bukittinggi nomor 188.45-75-2024 tentang Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 14 Tanjung Alam Kota Bukittinggi tanggal 6 Maret 2024. Pengembalian Dana BOS sebesar Rp39.548.323,00 terdiri dari silpa BOS sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp22.258.323,00 dan Dana BOS Tahap 1 Tahun 2024 yang tidak dibelanjakan sebesar Rp17.290.000,00.

2. Kas BOP

Saldo kas di Bendahara BOP Sekolah Negeri pada Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.000.151,00 sedangkan saldo kas BOP pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1,00 (reklas dari

rekening Kas Dana BOS tahun 2023). Uraian mutasi kas BOP pada Sekolah Negeri dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. BOP PAUD Negeri

Tabel 5.38 Mutasi Kas pada Bendahara Dana BOP PAUD Tahun 2024

No	Uraian	Saldo awal	Pendapatan	Pengembalian atas temuan inspektorat	Belanja	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6
1	TK Negeri Pembina	1,00	118.950.000,00	0,00	118.848.850,00	101.151,00
2	TK Negeri 1 Bukittinggi	0,00	32.940.000,00	872.500,00	30.913.500,00	2.899.000,00
	Total	**1,00**	**151.890.000,00**	**872.500,00**	**149.762.350,00**	**3.000.151,00**

b. BOP Kesetaraan Negeri

Tabel 5.39 Mutasi Kas pada Bendahara Dana BOP Kesetaraan Tahun 2024

No.	Uraian	Saldo awal	Pendapatan	Belanja	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	SPNF SKB	0,00	272.160.000,00	272.160.000,00	-
Total		**0,00**	**272.160.000,00**	**272.160.000,00**	**-**

Pendapatan dan belanja diatas telah termasuk Pendapatan BOP Reguler dan Kinerja, begitu juga dengan Belanja.

Sebagai informasi tambahan pada tahun 2024 terdapat pengembalian Dana Hibah BOP Paud dari sekolah swasta yaitu Kelompok Bermain Duta Wahana ke Kas Umum Daerah untuk diteruskan oleh BUD ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar Rp677.300,00. Yang merupakan hibah dana BOP Paud Tahun 2024 yang terlanjur ditransfer Pemerintah Pusat namun sekolah tersebut sudah tidak aktif lagi sejak Tahun Ajaran 2024/2025.

I. Kas Di Bendahara BOK Puskesmas

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
1.259.447.152,00	0,00

Dana BOK Puskesmas merupakan dana yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat. Sejak Tahun 2023 BOK Puskesmas disalurkan dengan cara pemindahbukuan langsung dari RKUN ke Rekening BNI yang dibuka oleh masing-masing Puskesmas yang digunakan khusus untuk menampung Dana BOK Puskesmas.

Saldo kas BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 adalah Rp1.259.447.152,00, sedangkan saldo kas BOK per 31 Desember 2023 pada akun ini adalah sebesar Rp0,00. pada tahun 2023 kas dana BOK dicatat pada akun Kas Dana Kapitasi pada FKTP yang bersaldo sebesar RpRp1.830.113.005,00 dan pada tahun 2024 dengan tersedianya Akun Kas Dana BOK Puskesmas pada Aplikasi SIPD maka saldo kas dana BOK yang berada di Kas Dana Kapitasi pada FKTP di reklas ke akun Kas BOK Puskesmas. Rincian mutasi kas BOK Puskesmas selama tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.40 Mutasi Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun 2024

No	Puskesmas	Saldo awal	Pendapatan	Belanja	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	PUSKESMAS GUGUK PANJANG	338.246.420,00	368.275.020,00	531.681.500,00	174.839.940,00
2	PUSKESMAS RASIMAH AHMAD	386.087.156,00	217.356.484,00	463.331.901,00	140.111.739,00
3	PUSKESMAS MANDIANGIN	197.226.100,00	368.226.840,00	412.758.669,00	152.694.271,00
4	PUSKESMAS TIGO BALEH	292.923.641,00	368.191.589,00	331.214.007,00	329.901.223,00
5	PUSKESMAS NILAM SARI	279.978.862,00	257.834.198,00	413.695.558,00	124.117.502,00
6	PUSKESMAS PLUS MANDIANGIN	121.510.648,00	365.056.272,00	330.150.951,00	156.415.969,00
7	PUSKESMAS GULAI BANCAH	214.140.178,00	229.667.592,00	262.441.262,00	181.366.508,00
	Jumlah	**1.830.113.005,00**	**2.174.607.995,00**	**2.745.273.848,00**	**1.259.447.152,00**

Sisa Dana BOK Puskesmas diperhitungkan pada penyaluran Dana BOK Puskesmas tahun berikutnya.

5.3.1.1.2 Piutang

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
73.266.884.705,00	67.604.560.089,00

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Sedangkan Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang.

Total Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi secara bruto sebagaimana yang tertera pada Neraca tahun 2024 adalah Rp73.266.884.705,00 Penyajian piutang pada Neraca tahun 2024 adalah berdasarkan IPSAP 04 PP. 71 tahun 2010, piutang secara golongan beserta nilai nettonya adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.41 Penyajian Piutang pada Neraca Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023
1	2	3
Piutang Pajak	20.540.230.694,00	16.057.104.725,00
Penyisihan Piutang Pajak	(10.152.959.524,18)	(8.992.223.316,02)
Piutang Pajak Netto	**10.387.271.169,82**	**7.064.881.408,98**
Piutang Retribusi	28.616.574.795,00	12.569.263.066,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(20.300.247.900,15)	(10.205.156.510,00)
Piutang Retribusi Netto	**8.316.326.894,85**	**2.364.106.556,00**
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.017.289.316,00	10.097.553.826,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan netto	**10.017.289.316,00**	**10.097.553.826,00**
Piutang Lain -Lain PAD Yang Sah	2.978.276.787,00	19.810.106.983,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(2.962.984.782,44)	(6.793.952.550,95)
Piutang Lain-lain PAD yang sah Netto	**15.292.004,56**	**13.016.154.432,05**
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	390.170.000,00	-
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto	**390.170.000,00**	**-**
Piutang Transfer Antar Daerah	10.478.026.512,00	8.824.214.888,00
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah netto	**10.478.026.512,00**	**8.824.214.888,00**
Piutang Lainnya	246.316.601,00	246.316.601,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(246.316.601,00)	(246.316.601,00)
Piutang Lainnya Netto	**-**	**-**
Total Piutang Bruto	**73.266.884.705,00**	**67.604.560.089,00**
Total Penyisihan Piutang	**33.662.508.807,77**	**26.237.648.977,97**
Total Piutang Netto	**39.604.375.897,23**	**41.366.911.111,03**

A. Piutang Pajak Daerah

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
20.540.230.694,00	16.057.104.725,00

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dikelola oleh Badan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa perubahan nomenklatur akun piutang pajak pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.42 Tabel Pemetaan Nomenklatur Piutang Pajak Daerah

No	Akun 2023	Akun 2024
1	Piutang Pajak Hotel	Piutang PBJT-Hotel
2	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage
3	Piutang Pajak Restoran	Piutang PBJT-Restoran
4	Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman
5	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering
6	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	Piutang PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
7	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
8	Piutang Pajak Parkir	Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir

Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp20.540.230.694,00 terdapat kenaikan sebesar Rp4.483.125.969,00 dari saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 yang lalu. Rincian Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.43 Mutasi Piutang Pajak Tahun 2024

No	Nama Akun	Saldo Awal 2023 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6
	PIUTANG PAJAK DAERAH	**16.057.104.725,00**	**5.505.326.834,00**	**1.022.200.865,00**	**20.540.230.694,00**
1	**BADAN KEUANGAN**	**646.008.067,00**	**863.460.488,00**	**1.326.000,00**	**1.508.142.555,00**
	Piutang Pajak Hotel	645.068.067,00	863.460.488,00	1.326.000,00	1.507.202.555,00
	Piutang PBJT-Hotel				-
	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	940.000,00	-	-	940.000,00
2	***Piutang Pajak Restoran***	**346.921.614,00**	**499.500,00**	**16.450.523,00**	**330.970.591,00**
	BADAN KEUANGAN	346.921.614,00	499.500,00	16.450.523,00	330.970.591,00
-	Piutang PBJT-Restoran	342.482.574,00	499.500,00	16.450.523,00	326.531.551,00
-	Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4.439.040,00	-	-	4.439.040,00
3	***Piutang Pajak Hiburan***	**7.059.954,00**	-	-	**7.059.954,00**
	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	7.059.954,00	-	-	7.059.954,00
	Piutang PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	7.059.954,00	-	-	7.059.954,00
4	***Piutang Pajak Reklame***	**805.021.863,00**	**49.975.750,00**	**87.329.000,00**	**767.668.613,00**
	BADAN KEUANGAN	805.021.863,00	49.975.750,00	87.329.000,00	767.668.613,00
	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	792.736.363,00	49.660.750,00	86.819.000,00	755.578.113,00
	Piutang Pajak Reklame Kain	12.285.500,00	315.000,00	510.000,00	12.090.500,00
5	***Piutang Pajak Penerangan Jalan***	**400.000,00**	-	-	**400.000,00**
	BADAN KEUANGAN	400.000,00	-	-	400.000,00
	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	400.000,00	-	-	400.000,00
6	***Piutang Pajak Parkir***	**1.096.520,00**	-	-	**1.096.520,00**
	BADAN KEUANGAN	1.096.520,00	-	-	1.096.520,00
	Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.096.520,00	-	-	1.096.520,00
7	**Piutang Pajak Air Tanah**	**21.861.679,00**	**79.397.765,00**	**3.817.321,00**	**97.442.123,00**
8	**Piutang PBBP2**	**14.149.786.707,00**	**4.511.993.331,00**	**891.778.221,00**	**17.770.001.817,00**
9	**Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**78.948.321,00**	-	**21.499.800,00**	**57.448.521,00**
-	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	49.663.521,00	-	10.215.000,00	39.448.521,00
-	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	29.284.800,00	-	11.284.800,00	18.000.000,00

B. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
(10.152.959.524,18)	**(8.992.223.316,02)**

Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp(10.152.959.524,18). Untuk nilai penyisihan piutang pajak tahun 2023 adalah

sebesar Rp(8.992.223.316,02) Rincian perhitungan penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.44 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2024

Nama Piutang	Nilai	Kurang 1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	Lebih 5 Tahun	Jumlah
		(0,5%)	(25%)	(50%)	(100%)	Penyisihan
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	**20.540.230.694,00**	**27.526.634,18**	**1.170.184.765,50**	**1.398.916.673,50**	**7.556.331.451,00**	**10.152.959.524,18**
Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	755.578.113,00	248.303,75	21.975.749,75	49.155.500,00	519.703.364,00	591.082.917,50
Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Kain	12.090.500,00	1.575,00	2.943.875,00	-	-	2.945.450,00
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	97.442.123,00	396.988,83	1.831.885,25	1.779.142,00	7.158.533,00	11.166.549,08
Penyisihan Piutang PBBP2	17.770.001.817,00	22.559.966,66	1.122.170.398,75	1.172.890.913,50	6.423.545.064,00	8.741.166.342,91
Penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	39.448.521,00	-	7.019.512,50	5.685.235,50	-	12.704.748,00
Penyisihan Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	18.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00
Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	326.531.551,00	2.497,50	12.010.629,50	38.468.530,00	201.052.473,00	251.534.130,00
Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4.439.040,00	-	1.109.760,00	-	-	1.109.760,00
Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	400.000,00	-	-	-	400.000,00	400.000,00
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	1.507.202.555,00	4.317.302,44	1.122.954,75	121.347.492,50	396.555.263,00	523.343.012,69
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort / Cottage	940.000,00	-	-	470.000,00	-	470.000,00
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.096.520,00	-	-	119.860,00	856.800,00	976.660,00
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	7.059.954,00	-	-	-	7.059.954,00	7.059.954,00

C. Piutang Retribusi Daerah

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
28.616.574.795,00	**12.569.263.066,00**

Piutang Retribusi Daerah timbul apabila sampai akhir periode laporan terdapat tagihan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi oleh Wajib Retribusi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah terdapat beberapa perubahan nomenklatur akun piutang pajak pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.45 Tabel Pemetaan Nomenklatur Piutang Retribusi Daerah

No	Akun 2023	Akun 2024
1	Piutang Hasil Sewa BMD	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
2	Piutang Pendapatan BLUD	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
3	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Piutang Retribusi Pelayanan Temapat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.616.574.795,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.047.311.729,00 dari saldo Piutang Retribusi per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp12.569.263.066,00. Rincian Piutang Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.46 Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2024

NO	NAMA AKUN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	6	7	8=5+6-7
	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH	**12.569.263.066,00**	**24.183.470.085,00**	**8.136.158.356,00**	**28.616.574.795,00**
1	***Piutang Retribusi Jasa Umum***	***3.234.918.542,00***	***7.040.930.566,00***	***2.328.048.606,00***	***7.947.800.502,00***
	DINAS KESEHATAN				
-	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**-**	**5.310.662.896,00**	**1.388.648.296,00**	**3.922.014.600,00**
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah/Piutang Pendapatan BLUD		5.310.662.896,00	1.388.648.296,00	3.922.014.600,00
-	***Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan***	***996.292.950,00***	***853.963.000,00***	***406.402.000,00***	***1.443.853.950,00***
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	38.560.000,00	-	-	38.560.000,00
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	957.732.950	853.963.000	406.402.000	1.405.293.950
-	**Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**	**60.393.850,00**	**-**	**-**	**60.393.850,00**
	DINAS PERHUBUNGAN	60.393.850,00	-	-	60.393.850,00
-	**Piutang Retribusi Pelayanan Pasar**	**2.171.471.742,00**	**876.304.670,00**	**532.998.310,00**	**2.514.778.102,00**
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
	Piutang Retribusi Los	1.790.239.492,00	601.518.864,00	460.289.685,00	1.931.468.671,00
	Piutang Retribusi Kios	381.232.250,00	274.785.806,00	72.708.625,00	583.309.431,00
-	**Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**	**6.760.000,00**	**-**	**-**	**6.760.000,00**
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.760.000,00	-	-	6.760.000,00
2	**Piutang Retribusi Jasa Usaha**	**8.849.263.924,00**	**17.137.336.833,00**	**5.808.109.750,00**	**20.178.491.007,00**
-	**Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset/Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan**	**268.768.232,00**	**102.363.065,00**	**33.276.100,00**	**337.855.197,00**
	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				
	DINAS PARIWISATA	-	71.559.500,00	-	71.559.500,00
	BADAN KEUANGAN	268.768.232,00	30.803.565,00	33.276.100,00	266.295.697,00
-	**Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**	**8.394.342.150,00**	**16.318.029.768,00**	**5.758.247.140,00**	**18.954.124.778,00**
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	4.809.339.810,00	5.284.907.880,00	4.207.954.620,00	5.886.293.070,00
	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	3.585.002.340,00	11.033.121.888,00	1.550.292.520,00	13.067.831.708,00
-	**Piutang Retribusi Terminal**	**23.364.170,00**	**-**	**-**	**23.364.170,00**
	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal				
	DINAS PERHUBUNGAN	23.364.170,00	-	-	23.364.170,00
-	**Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**	**300.000,00**	**-**	**-**	**300.000,00**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	300.000,00	-	-	300.000,00
-	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	**-**	**716.944.000,00**	**6.487.800,00**	**710.456.200,00**
	DINAS PARIWISATA		716.944.000,00	6.487.800,00	710.456.200,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	**162.489.372,00**	**-**	**10.098.710,00**	152.390.662,00
	DINAS PARIWISATA	162.489.372,00	-	10.098.710,00	152.390.662,00
	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu				
3	***Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan***	***485.080.600,00***	***5.202.686,00***	**-**	***490.283.286,00***
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	485.080.600,00	5.202.686,00	-	490.283.286,00

D. Penyisihan Piutang Retribusi

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
(20.300.247.900,15)	(10.205.156.510,00)

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp(20.300.247.900,15) terjadi kenaikan sebesar Rp(10.095.091.390,15) dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2023 sebesar Rp(10.205.156.510,00), sehingga Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.47 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2024

NO	Uraian	Nilai	Kurang 1 Bulan (0,5%)	1-3 Bulan (25%)	3-12 Bulan (50%)	Lebih 12 Bulan (100%)	Jumlah Penyisihan
1	3	4	5	6	7	8	9
A	**Penyisihan Piutang Retribusi**	**28.616.574.795,00**	**6.023.899,15**	**3.165.001,50**	**7.108.075.959,50**	**13.182.983.040,00**	**20.300.247.900,15**
I	**Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum**	**7.947.800.502,00**	**6.012.298,00**	**-**	**592.459.661,00**	**5.560.421.580,00**	**6.158.893.539,00**
1	**Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah**	**3.922.014.600,00**	**6.012.298,00**	**-**	**-**	**2.719.555.000,00**	**2.725.567.298,00**
	DINAS KESEHATAN	3.922.014.600,00	6.012.298,00	-	-	2.719.555.000,00	2.725.567.298,00
2	**Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**	**1.443.853.950,00**	**-**	**-**	**290.241.250,00**	**863.371.450,00**	**1.153.612.700,00**
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.405.293.950,00	-	-	290.241.250,00	824.811.450,00	1.115.052.700,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	38.560.000,00	-	-	-	38.560.000,00	38.560.000,00
3	**Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**	**60.393.850,00**	**-**	**-**	**-**	**60.393.850,00**	**60.393.850,00**
	DINAS PERHUBUNGAN	60.393.850,00	-	-	-	60.393.850,00	60.393.850,00
4	**Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los**	**2.514.778.102,00**	**-**	**-**	**302.218.411,00**	**1.910.341.280,00**	**2.212.559.691,00**
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2.514.778.102,00	-	-	302.218.411,00	1.910.341.280,00	2.212.559.691,00
5	**Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan**	**6.760.000,00**	**-**	**-**	**-**	**6.760.000,00**	**6.760.000,00**
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.760.000,00	-	-	-	6.760.000,00	6.760.000,00
II	**PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**	**20.178.491.007,00**	**-**	**2.444.387,50**	**6.515.616.298,50**	**7.137.480.860,00**	**13.655.541.546,00**
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	**337.855.197,00**	**-**	**2.444.387,50**	**46.292.757,50**	**235.492.132,00**	**284.229.277,00**
	BADAN KEUANGAN	266.295.697,00	-	2.444.387,50	10.513.007,50	235.492.132,00	248.449.527,00
	DINAS PARIWISATA	71.559.500,00	-	-	35.779.750,00	-	35.779.750,00
2	**Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan**	**18.954.124.778,00**	**-**	**-**	**6.440.546.341,00**	**6.073.032.096,00**	**12.513.578.437,00**
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	18.954.124.778,00	-	-	6.440.546.341,00	6.073.032.096,00	12.513.578.437,00

NO	Uraian	Nilai	Kurang 1 Bulan (0,5%)	1-3 Bulan (25%)	3-12 Bulan (50%)	Lebih 12 Bulan (100%)	Jumlah Penyisihan
3	**Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum**	**23.364.170,00**	**-**	**-**	**-**	**23.364.170,00**	**23.364.170,00**
	DINAS PERHUBUNGAN	23.364.170,00	-	-	-	23.364.170,00	23.364.170,00
4	**Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga**	**300.000,00**	**-**	**-**	**-**	**300.000,00**	**300.000,00**
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	300.000,00	-	-	-	300.000,00	300.000,00
5	**Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**	**710.456.200,00**	**-**	**-**	**28.777.200,00**	**652.901.800,00**	**681.679.000,00**
	DINAS PARIWISATA	710.456.200,00	-	-	28.777.200,00	652.901.800,00	681.679.000,00
6	**Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**	**152.390.662,00**	**-**	**-**	**-**	**152.390.662,00**	**152.390.662,00**
	DINAS PARIWISATA	152.390.662,00	-	-	-	152.390.662,00	152.390.662,00
III	**Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan**	**490.283.286,00**	**11.601,15**	**720.614,00**	**-**	**485.080.600,00**	**485.812.815,15**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	490.283.286,00	11.601,15	720.614,00	-	485.080.600,00	485.812.815,15

E. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun 2024
Rp
10.017.289.316,00

Tahun 2023
Rp
10.097.553.826,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 digunakan untuk mencatat Piutang Dividen/Piutang Bagi Hasil atas kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bukittinggi pada Bank Nagari dan BPRS Jam Gadang Perseroda.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 adalah sebesar Rp10.017.289.316,00yang terdiri dari piutang atas dividen Bank Nagari sebesar Rp8.976.336.988,00 dan dividen PT BPRS Jam Gadang Perseroda sebesar Rp1.040.952.328,00.

Tahun 2024 terdapat mutasi kurang piutang sebesar Rp10.097.553.826,00 yang terdiri dari:

1. Mutasi kurang piutang atas dividen Bank Nagari sebesar Rp236.669.610,00 karena adanya penyesuaian nilai piutang pada Bank Nagari. Saat melaporkan nilai piutang, Bank Nagari menghitung nilai dividen dari laba sebelum audited dan nilai piutang masih bersifat proyeksi. Setelah dilakukan audit oleh

Akuntan Publik terjadi perubahan nilai piutang yang awalnya Rp9.190.390.662,00 menjadi Rp8.953.721.052,00 dan didukung dengan hasil RUPS Tahun Buku 2023 pada Bank Nagari.

2. Mutasi kurang dengan direalisasikannya dividen bagian Pemerintah Kota Bukittinggi oleh Bank Nagari sebesar Rp8.953.721.052,00 pada tanggal 3 April 2024.
3. Mutasi kurang dengan direalisasikannya dividen bagian Pemerintah Kota Bukittinggi oleh PT. BPRS Jam Gadang Perseroda sebesar Rp907.163.164,00.

Selama Tahun 2024 terdapat mutasi tambah piutang hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp10.017.289.316,00 dengan diumumkannya dividen tahun buku 2024 yang akan dibagikan di tahun 2025 dengan rincian:

1. Dividen Bank Nagari sebesar Rp8.976.336.988,00
2. Dividen PT. BPRS Jam Gadang Perseroda sebesar Rp1.040.952.328,00

Sehingga saldo akhir Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2024 adalah sebesar Rp10.017.289.316,00

Piutang deviden tidak dilakukan penyisihan karena potensi penerimaan yang sangat besar di tahun berikutnya.

Rincian mutasi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.48 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2024

NAMA AKUN	SALDO AWAL (Rp)	MUTASI (Rp)		SALDO AKHIR (Rp)
		BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	4	5	6=3+4-5
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**10.097.553.826,00**	**10.017.289.316,00**	**10.097.553.826,00**	**10.017.289.316,00**
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank Nagari	9.190.390.662,00	8.976.336.988,00	9.190.390.662,00	8.976.336.988,00
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) PT.BPR Jam Gadang	907.163.164,00	1.040.952.328,00	907.163.164	1.040.952.328,00

F. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
2.978.276.787,00	**19.810.106.983,00**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah terdapat beberapa perubahan nomenklatur akun piutang pajak pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.49 Tabel Pemetaan Nomenklatur Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Akun 2023	Akun 2024
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel - Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel - Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Hotel - Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort / Cottage - Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya - Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan sejenisnya - Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran - Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya - Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya - Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
5	Piutang Pendapatan BLUD	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
6	Piutang Hasil Sewa BMD	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.978.276.787,00 terdapat mutasi bertambah sebesar Rp18.472.599,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp16.850.302.795,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.50 Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024

NO	NAMA AKUN	SALDO AWAL AUDITED	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
1	***Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan***	***2.512.898.286,00***	***-***	***659.389.600,00***	***1.853.508.686,00***
-	**Piutang Hasil Sewa BMD**				
	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
	DINAS PARIWISATA (mutasi ke retribusi)	659.389.600,00		659.389.600,00	-
-	**Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah**	**1.849.008.686,00**	**-**	**-**	**1.849.008.686,00**
	BADAN KEUANGAN	1.849.008.686,00	-	-	1.849.008.686,00
2	**Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**	**448.551,00**	**-**	**-**	**448.551,00**
	BADAN KEUANGAN	448.551,00	-	-	448.551,00
3	**Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**49.947.084,00**	**18.406.121,00**	**1.943.483,00**	**66.409.722,00**
	BADAN KEUANGAN				
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	**49.947.084,00**	**18.406.121,00**	**1.943.483,00**	**66.409.722,00**
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)				**62.170.202,00**
A	**Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel**	**31.322.206,00**	**18.397.130,00**	**38.400,00**	**49.680.936,00**
a	Piutang pendapatan Denda PBJT)-Jasa Perhotelan-Hotel (Piutang	31.190.051,00	18.396.530,00	38.400,00	49.548.181,00

NO	NAMA AKUN	SALDO AWAL AUDITED	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Pendapatan Denda Pajak Hotel)				
b	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort / Cottage	132.155,00	600,00	-	132.755,00
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya	9.955,00	-	-	9.955,00
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	122.200,00	-	-	122.200,00
B	**Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran**	**14.127.475,00**	**8.991,00**	**1.905.083,00**	**12.231.383,00**
	Piutang pendapatan Denda PBJT-Makan dan /atau Minuman-Restoran	**-**	**-**	**-**	**12.016.064,00**
a	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	13.893.312,00	8.991,00	1.905.083,00	11.997.220,00
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	18.844,00	-	-	18.844,00
-	Piutang pendapatan Denda PBJT)-Makan dan /atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering.(Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya)	215.319,00	-	-	215.319,00
C	**Piutang pendapatan Denda PBJT-jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan.(Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan)**	**179.250,00**	**-**	**-**	**179.250,00**
a	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	179.250,00	-	-	179.250,00
F	**Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir**	**78.633,00**	**-**	**-**	**78.633,00**
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	78.633,00	-	-	78.633,00
G	**Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan**	**4.192.978,00**	**-**	**-**	**4.192.978,00**
a	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	4.192.978,00	-	-	4.192.978,00
H	**Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah**	**46.542,00**	**-**	**-**	**46.542,00**
a	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	46.542,00	-	-	46.542,00
4	**Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah**	**235.473.240,00**	**66.478,00**	**89.928,00**	**235.449.790,00**
a	**Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum**	**6.429.514,00**	**66.478,00**	**10.370,00**	**6.485.622,00**
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
-	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.930.410,00	1.440,00	5.450,00	2.926.400,00
-	Piutang Pendapatan Dendan Retribusi Pelayanan Sampah	3.499.104,00	65.038,00	4.920,00	3.559.222,00
b	**Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha**	**2.866.478,00**	**-**	**79.558,00**	**2.786.920,00**
-	**Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**1.101.243,00**	**-**	**-**	**1.101.243,00**
	BADAN KEUANGAN	1.101.243,00	-	-	1.101.243,00
-	**Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**	**1.765.235,00**	**-**	**79.558,00**	**1.685.677,00**
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.765.235,00	-	79.558,00	1.685.677,00
-	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizininan Tertentu				

NO	NAMA AKUN	SALDO AWAL AUDITED	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
c	**Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**	**226.177.248,00**	**-**	**-**	**226.177.248,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	226.177.248,00	-	-	226.177.248,00
-	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan				
5	**Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa**	**814.113.850,00**	**-**	**-**	**814.113.850,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	782.629.500,00	-	-	782.629.500,00
	DINAS PERHUBUNGAN	31.484.350,00	-	-	31.484.350,00
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian				
6	**Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan**	**14.346.188,00**	**-**	**6.000.000,00**	**8.346.188,00**
	DINAS PERHUBUNGAN	12.500.000,00	-	6.000.000,00	6.500.000,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.846.188,00	-	-	1.846.188,00
7	**Piutang Pendapatan BLUD**	**4.108.203.296,00**	**-**	**4.108.203.296,00**	**-**
	DINAS KESEHATAN				
-	Piutang Pendapatan BLUD (mutasi ke retribusi)	4.105.520.434,00		4.105.520.434,00	-
	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.682.862,00	-	2.682.862,00	-
8	**Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)**	**12.074.676.488**	**-**	**12.074.676.488**	**-**
	Jumlah	**19.810.106.983,00**	**18.472.599,00**	**16.850.302.795,00**	**2.978.276.787,00**

Beberapa hal penting dari daftar di atas dapat dijelaskan terkait Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp2.978.276.787,00 karena terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan nomenklatur akun yang terdiri dari:

1. Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel untuk saldo awal sebesar Rp31.322.206,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel sebesar Rp31.190.051,00.
   - Piutang Pendapatan Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya sebesar Rp9.955,00.
   - Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebesar Rp122.200,00.
2. Saldo awal Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran sebesar Rp14.127.475,00 yang terdiri dari Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar Rp13.893.312,00 dan Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebesar Rp18.844,00 dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 per 31 Desember 2024 digabungkan pada akun Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman Restoran sebesar Rp12.016.064,00.

3. Piutang Pendapatan Denda Pajak parkir sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 berubah menjadi akun Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir.
4. Piutang Jaminan dari Dinas PUPR sebesar Rp782.629.500,00 yang terdiri dari dari:
   - Jaminan pekerjaan PT. ARSHALIA sebesar Rp22.455.000,00 atas pembangunan Mushala Sekretariat Daerah pada Tahun 2010;
   - Jaminan kepada PT. Adhiwira ikaputra sebesar Rp760.174.500,00 atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir Representatif Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013;

     Pemerintah Kota Bukittinggi mengakui Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut berdasarkan hasil audit yang disepakati bahwa hasil pekerjaan hanya mencapai 93,82% sehingga rekanan tersebut wanprestasi dan Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan klaim terhadap jaminan pelaksanaan pekerjaan rekanan tersebut. Atas kekurangan prestasi rekanan, Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah menyurati Kepala LKPP-RI dengan Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600.484/DPU-BKT/VI-2014 tanggal 5 juni 2014 perihal usulan Masuk Daftar Hitam Penyedia Jasa Konstruksi a.n. PT.ADHIWIRA IKAPUTRA. Pengakuan piutang juga berdasarkan Pasal 5 Akta Perdamaian antara Pemerintah Kota Bukittinggi yang diwakili Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir Representatif Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 dengan Ir. H. Soetrisno Direktur PT. Adhiwira Ikaputra yang menyatakan bahwa kedua pihak menyepakati akan merealisasikan klaim Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp5% dari nilai addendum kontrak. Akta perdamaian tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/ /2014/PN BT tanggal 20 November 2014. Pada tahun 2015 juga terdapat jaminan yang belum dieksekusi oleh Pemko Bukittinggi akibat terdapat perselisihan atas final quantity pekerjaan. Pekerjaan tersebut adalah Rehabilitasi Taman DPRD. Selain adanya jaminan yang belum dieksekusi, pekerjaan tersebut juga menimbulkan hutang kekurangan pembayaran pekerjaan dan piutang denda keterlambatan pekerjaan yang telah dicatat pada pos masing-masing.
5. Piutang Jaminan dari Dinas Perhubungan sebesar Rp31.484.350,00.
6. Piutang Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Terminal Aur Kuning tahun 2007 oleh CV.Khandra Utama.
7. Saldo awal Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp4.108.203.296,00,00 yang terdiri dari:
   - Klaim BPJS bulan Oktober 2023 sebesar Rp1.365.317.600,00.
   - Klaim Covid Tahun 2022 sebesar Rp2.719.555.000,00.
   - Klaim BPJS Tenaga Kerja sebesar Rp654.460,00.

- Klaim Jasa Raharja sebesar Rp19.993.374,00.
- Kelebihan pembayaran jasa pelayanan tahun 2022 sebesar Rp2.682.862,00

  Dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga` rekening Piutang Pendapatan BLUD menjadi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar R4.108.203.296,00,00.

8. Piutang Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp8.346.188,00 yang terdiri dari:

   - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.846.188,00 yang merupakan kelebihan pebayaran tunjangan dari gaji.an Suryadi pada tahun 2021 sebesar Rp1.045.744,00 dan kelebihan pebayaran tunjangan dari gaji an. Erwin St Bagindo berjumlah Rp800.444,00 sejak tahun 2009 tidak bisa ditagih karen yang bersangkutan sudah meninggal dunia.
   - Dinas Perhubungan sebesar Rp6.500.000,00 yang merupakan keterlanjuran pembayaran tunjangan istri an.Neli Efendi sejak tahun 2017 yang dicicil melalui Taspen.

G. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
(2.962.984.782,44)	(6.793.952.550,95)

Saldo Penyisihan Piutang PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.962.984.782,44) dari nilai penyisihan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp6.793.952.550,95). Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.51 Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024

Uraian	Nilai	Kurang 1 Tahun (0,5%)	1-3 Tahun (25%)	3-5 Tahun (50%)	Lebih 5 Tahun (100%)	Jumlah Penyisihan
1	2	3	4	5	6	7
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**2.978.276.787,00**	**30.455,69**	**3.073.831,25**	**9.829,50**	**2.959.870.666,00**	**2.962.984.782,44**
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	**4.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.500.000,00	-	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00
Penyisihan Piutang Hasil dari bangunan Guna Serah	**1.849.008.686,00**	**-**	**-**	**-**	**1.849.008.686,00**	**1.849.008.686,00**
BADAN KEUANGAN	1.849.008.686,00	-	-	-	1.849.008.686,00	1.849.008.686,00
Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	**448.551,00**	**-**	**-**	**-**	**448.551,00**	**448.551,00**
BADAN KEUANGAN	448.551,00	-	-	-	448.551,00	448.551,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Hotel	**49.548.181,00**	**30.407,73**	**3.073.831,25**	**9.829,50**	**31.151.651,00**	**34.265.719,48**
BADAN KEUANGAN	49.548.181,00	30.407,73	3.073.831,25	9.829,50	31.151.651,00	34.265.719,48
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran	**12.364.138,00**	**47,96**	**-**	**-**	**12.354.547,00**	**12.354.594,96**
Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort / Cottage	132.755,00	3,00	-	-	132.155,00	132.158,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau katering	215.319,00	-	-	-	215.319,00	215.319,00

Uraian	Nilai	Kurang 1 Tahun (0,5%)	1-3 Tahun (25%)	3-5 Tahun (50%)	Lebih 5 Tahun (100%)	Jumlah Penyisihan
1	2	3	4	5	6	7
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Restoran dan Sejenisnya	12.016.064,00	44,96	-	-	12.007.073,00	12.007.117,96
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	**179.250,00**	**-**	**-**	**-**	**179.250,00**	**179.250,00**
BADAN KEUANGAN	179.250,00	-	-	-	179.250,00	179.250,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Reklame-Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	**4.192.978,00**	**-**	**-**	**-**	**4.192.978,00**	**4.192.978,00**
BADAN KEUANGAN	4.192.978,00	-	-	-	4.192.978,00	4.192.978,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Parkir	**78.633,00**	**-**	**-**	**-**	**78.633,00**	**78.633,00**
BADAN KEUANGAN	78.633,00	-	-	-	78.633,00	78.633,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	**46.542,00**	**-**	**-**	**-**	**46.542,00**	**46.542,00**
BADAN KEUANGAN	46.542,00	-	-	-	46.542,00	46.542,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	**2.926.400,00**	**-**	**-**	**-**	**2.926.400,00**	**2.926.400,00**
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2.926.400,00	-	-	-	2.926.400,00	2.926.400,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los	**5.244.899,00**	**-**	**-**	**-**	**5.244.899,00**	**5.244.899,00**
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	5.244.899,00				5.244.899,00	5.244.899,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**1.101.243,00**	**-**	**-**	**-**	**1.101.243,00**	**1.101.243,00**
BADAN KEUANGAN	1.101.243,00	-	-	-	1.101.243,00	1.101.243,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	**814.113.850,00**	**-**	**-**	**-**	**814.113.850,00**	**814.113.850,00**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	782.629.500,00	-	-	-	782.629.500,00	782.629.500,00
DINAS PERHUBUNGAN	31.484.350,00	-	-	-	31.484.350,00	31.484.350,00
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	**1.846.188,00**	**-**	**-**	**-**	**1.846.188,00**	**1.846.188,00**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.846.188,00	-	-	-	1.846.188,00	1.846.188,00
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK	**6.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**
DINAS PERHUBUNGAN	6.500.000,00	-	-	-	6.500.000,00	6.500.000,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	**226.177.248,00**	**-**	**-**	**-**	**226.177.248,00**	**226.177.248,00**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	226.177.248,00	-	-	-	226.177.248,00	226.177.248,00

H. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
390.170.000,00	**0,00**

Saldo Piutang Transfer Tahun 2023 pada neraca Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp0,00. sesuai perhitungan Kurang Bayar Lebih Bayar Tahun 2023 masih terdapat piutang Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp3.237,00 namun tidak dicatat pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pertimbangan:

1. Jumlah nilainya sangat kecil (Rp3.237)

2. Mengingat jika telah tercatat sebagai piutang, untuk proses penghapusannya sangat sulit dan proses penghapusannya panjang, (karna nilainya yg kecil bisa jadi Pemerintah Pusat tidak mengakuinya lagi di PMK berikutnya, maka akan sulit untuk penghapusannya)

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024 terdapat mutasi tambah piutang sebesar Rp509.957.000,00 yang merupakan piutang tahun 2023 sehingga piutang menjadi Rp509.960.237,00 dan dibulatkan menjadi Rp509.963.000,00.

Rincian pembulatan setelah penambahan Piutang tahun 2023 sebesar Rp2.763 terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 nilai setelah penambahan Piutang sebesar Rp732,00 dibulatkan menjadi Rp1.000,00.
2. Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 25/29 nilai setelah penambahan Piutang sebesar Rp116.511.724,00 dibulatkan menjadi Rp116.512.000,00
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba-Royalty nilai setelah penambahan Piutang sebesar Rp607,00 dibulatkan menjadi Rp1.000,00
4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi - Iuran Produksi nilai setelah penambahan Piutang sebesar Rp7.777.029,00 dibulatkan menjadi Rp7.778.000,00
5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi - Iuran Tetap nilai setelah penambahan Piutang sebesar Rp348,00 dibulatkan menjadi Rp1.000,00
6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-PSDH nilai setelah penambahan Piutang Rp22.532.797,00 dibulatkan menjadi Rp22.533.000,00

Dan selama tahun 2024 terdapat penurunan Piutang Transfer sebesar Rp119.793.000,00 yang penyalurannya dengan memperhitungkan lebih bayar kepada Pemerintah Kota Bukittinggi. Pencatatan Piutang transfer mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 Tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada tahun 2024, sehingga Piutang Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2024 menjadi 390.170.000,00. Piutang Transfer Pemerintah Kota Bukittingi Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 5.52 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024

No.	Rincian	Piutang 31 Desember 2023	Mutasi (Rp)		Sisa Piutang 31 Desember 2024	Keterangan
			Tambah (Piutang s.d 2022 + Piutang th 2023 + Pembulatan)	Kurang		
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5	7
A	Pajak					**Dasar Hukum : 1. PMK No. 89 Tahun 2024** tentang Penetapan Kurang
	1 PPh					
	- PPh Pasal 21	-	1.000,00	1.000,00	-	

No.	Rincian	Piutang 31 Desember 2023	Mutasi (Rp)		Sisa Piutang 31 Desember 2024	Keterangan
			Tambah (Piutang s.d 2022 + Piutang th 2023 + Pembulatan)	Kurang		
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5	7
	- PPh Pasal 25/29	-	116.512.000,00	27.369.000,00	89.143.000,00	Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 Tanggal 25 Oktober 2024 2. **KMK NO 44/KM.7/2024** ttg Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH pada Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2024
	2 PBB	-	-	-	-	
	- Bagi rata	-	-	-	-	
	- Bagian Daerah Sektor Perkebunan	-	139.038.000,00	32.660.000,00	106.378.000,00	
	- Bagian Daerah Sektor Perhutanan	-	-	-	-	
	- Bagian Daerah Sektor Pertambangan Migas	-	10.060.000,00	2.363.000,00	7.697.000,00	
	- Bagian Daerah Sektor Pertambangan Minerba/ Non Migas	-	87.036.000,00	20.445.000,00	66.591.000,00	
	- Bagian Daerah Sektor Pertambangan Panas Bumi	-	48.829.000,00	11.470.000,00	37.359.000,00	
	- Bagian Daerah Sektor lainnya	-	72.158.000,00	16.950.000,00	55.208.000,00	
	- Biaya Pemungutan Sektor Perhutanan	-	-	-	-	
	- Biaya Pemungutan Sektor Perkebunan	-	-	-	-	
	- Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan Migas	-	-	-	-	
	- Biaya Pemungutan sektor Pertambangan Non Migas	-	-	-	-	
	- Biaya Pemungutan sektor pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	
	- Biaya Pemungutan Sektor lainnya	-	-	-	-	
	3 CHT	-	6.016.000,00	1.413.000,00	4.603.000,00	
B	SDA	-	-	-	-	
	1 Migas	-	-	-	-	
	- Minyak Bumi 15%	-	-	-	-	
	- Minyak Bumi 0,5%	-	-	-	-	
	- Minyak Bumi dalam rangka Otsus	-	-	-	-	
	- Gas Bumi 30%	-	-	-	-	
	- Gas Bumi 0,5%	-	-	-	-	
	- Gas Bumi dalam rangka Otsus	-	-	-	-	
	2 Minerba	-	-	-	-	
	- Landrent	-	-	-	-	
	- Royalti	-	1.000,00	1.000,00	-	
	3 Panas Bumi	-	-	-	-	
	- Iuran Produksi	-	7.778.000,00	1.827.000,00	5.951.000,00	
	- Iuran Tetap	-	1.000,00	1.000,00	-	
	- Setoran Bagian Pemerintah	-	-	-	-	
	4 Kehutanan	-	-	-	-	
	- DR	-	-	-	-	
	- IIUPH	-	-	-	-	

No.	Rincian	Piutang 31 Desember 2023	Mutasi (Rp)		Sisa Piutang 31 Desember 2024	Keterangan
			Tambah (Piutang s.d 2022 + Piutang th 2023 + Pembulatan)	Kurang		
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5	7
	- PSDH	-	22.533.000,00	5.293.000,00	17.240.000,00	
	Perikanan	-	-	-	-	
	JUMLAH		**509.958.661,00**	**119.788.661,00**	**390.170.000,00**	

I. Piutang Transfer Antar Daerah

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
10.478.026.512,00	**8.824.214.888,00**

Saldo Awal Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 adalah Rp8.824.214.888,00 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda Provinsi Sumbar No.971.1/04/PPD-Bapenda/2024 Tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Alokasi Defenitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/ Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, selama tahun 2024 terdapat mutasi kurang piutang sebesar Rp8.824.214.888,00 yaitu penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai dengan Keputusan Kepala Bapenda Provinsi Sumbar No.971.1/43/PPD-Bapenda/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kab/ Kota Se Sumatera Barat Kekurangan Salur Tahun 2023, dan mutasi tambah piutang sebesar Rp10.478.026.512,00 yaitu dengan ditetapkannya piutang Kota Bukittinggi Tahun 2024 sesuai Keputusan Kepala Bapenda Provinsi Sumbar No.971.1/008/PPD-Bapenda/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Alokasi Defenitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kab/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, sehingga nilai piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.478.026.512,00.

Rincian piutang Transfer Antar Daerah tersebut seperti tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.53 Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024

No	Jenis Pajak	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp)	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5	6=2+7-6	10
1	PKB	2.736.851.417,00	2.511.364.709,00	2.736.851.417,00	2.511.364.709,00	Dasar Hukum : 1. Keputusan Ka. Bapenda Prov Sumbar No.971.1/04/PPD-Bapenda/2024 Tanggal 30 Januari 2024 2. Keputusan Ka. Bapenda Prov Sumbar No.971.1/43/PPD-Bapenda/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 3. Keputusan Ka. Bapenda Prov Sumbar No.971.1/008/PPD-Bapenda/2025 Tanggal 5 Maret 2025
2	BBNKB	1.097.283.836,00	844.504.301,00	1.097.283.836,00	844.504.301,00	
3	PBBKB	4.981.263.387,00	7.068.136.469,00	4.981.263.387,00	7.068.136.469,00	
4	PAP	8.816.248,00	54.021.033,00	8.816.248,00	54.021.033,00	
Jumlah		**8.824.214.888,00**	**10.478.026.512,00**	**8.824.214.888,00**	**10.478.026.512,00**	

J. Piutang Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
246.316.601,00	246.316.601,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp246.316.601,00 tidak ada penambahan, saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp246.316.601,00.

Untuk Piutang Lainnya pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp246.316.601,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa yang terdapat pada:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

      Jumlah Piutang Uang Muka yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp113.622.000,00 yang terdiri dari:

      - Uang Muka Pengadaan Komputer/PC Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2007 sebesar Rp93.060.000,00 (30% dari nilai kontrak sebesar Rp310.200.000,00) merupakan Uang Muka yang belum dikembalikan oleh CV.Ferry Permana selaku rekanan.
      - Sisa Uang Muka CV.Billysarius dengan PT.Asuransi Parolamas sebagai penjamin atas pekerjaan pengadaan meja kursi siswa SMP tahun 2012 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp20.562.000,00. Sesuai dengan surat PT.Asuransi Parolama Nomor PDG/PR/221/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 tidak mengakui adanya piutang tersebut dengan alasan bahwa jaminan pelaksanaan sudah dicairkan dari PT.Asuransi Parolama, dan dana sebesar Rp20.562.000,00 merupakan pajak yang dipotong langsung pada saat realisasi pembayaran uang muka yang terdiri dari:
        - PPh 22 sebesar Rp2.682.000,00
        - PPn 10% sebesar Rp17.880.000,00

   b. Dinas Pekerjaan Umum

      Jumlah Piutang Uang Muka yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan umum sampai dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp132.694.601,00 yang terdiri dari:

      - Sisa Piutang Uang Muka kepada PT.Arshalia atas pembangunan Mushala Sekretariat Daerah pada tahun 2010 sebesar Rp10.158.539,00.
      - Piutang dari pembayaran uang Muka pada Kegiatan Leger Jalan (Sistem Informasi Jaringan Jalan) tahun 2015 yang belum dikembalikan oleh rekanan oleh PT. MATURO NUANSATAMA sesuai dengan temuan pemeriksaan sebesar Rp122.536.062,00.

K. Penyisihan Piutang Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
(246.316.601,00)	(246.316.601,00)

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp246.316.601,00 yang terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.54 Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2024

Nama Piutang	Nilai	Kurang 1 Tahun (0,5%)	1-3 Tahun (25%)	3-5 Tahun (50%)	Lebih 5 Tahun (100%)	Jumlah Penyisihan
1	2	3	4	5	6	7
PIUTANG LAINNYA	**246.316.601,00**	**-**	**-**	**-**	**246.316.601,00**	**246.316.601,00**
Uang Muka	**246.316.601,00**	**-**	**-**	**-**	**246.316.601,00**	**246.316.601,00**
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	**246.316.601,00**	**-**	**-**	**-**	**246.316.601,00**	**246.316.601,00**
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	113.622.000,00	-	-	-	113.622.000,00	113.622.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	132.694.601,00	-	-	-	132.694.601,00	132.694.601,00

5.3.1.1.3 Persediaan

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
9.126.891.304,20	8.377.330.294,86

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode yang digunakan dalam pencatatan persediaan adalah metode periodik, metode periodik dilaksanakan dengan melakukan perhitungan barang secara fisik stock opname. Berdasarkan stock opname posisi tanggal 31 Desember 2024 terdapat nilai persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp9.126.891.304,20.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, stock opname Tahun 2024 telah dilakukan sendiri oleh SKPD pada akhir Tahun 2024. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian entitas, namun Bidang Pengelolaan BMD tetap melakukan asistensi dan pengawasan. Berikut ini data persediaan dirinci berdasarkan SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.55 Persediaan Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	4	3
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	647.357.088,00	653.668.113,00
2	Dinas Kesehatan	3.223.247.826,09	2.815.258.377,87
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.443.731.104,11	2.850.311.850,99
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	40.562.591,00	45.530.841,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	23.259.970,00	24.300.080,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.152.000,00	851.600,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.900.000,00	9.900.000,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	70.980.590,00	79.420.727,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	437.026.700,00	691.656.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	301.237.872,00	389.536.945,00
12	Dinas Perhubungan	2.245.200,00	4.495.700,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	8.804.550,00	7.771.260,00
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11.189.900,00	13.167.825,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	29.967.815,00	16.334.100,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.414.520,00	23.007.840,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	31.471.626,00	32.722.226,00
18	Dinas Pariwisata	34.520.800,00	41.502.600,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.573.000,00	5.983.000,00
20	Dinas Pertanian Dan Pangan	19.511.845,00	15.740.880,00
21	Sekretariat Daerah	110.982.625,00	105.885.316,00
22	Sekretariat DPRD	3.994.192,00	7.682.491,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	57.701.300,00	64.675.035,00
24	Badan Keuangan	522.342.670,00	406.738.253,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	6.309.610,00	4.630.400,00
26	Inspektorat Daerah	20.403.140,00	19.935.000,00
27	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	12.835.150,00	23.772.600,00
28	Kecamatan Guguk Panjang	3.766.600,00	2.706.100,00
29	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	6.103.220,00	9.490.134,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.297.800,00	10.655.000,00
Jumlah		**9.126.891.304,20**	**8.377.330.294,86**

Berdasarkan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah, secara rinci persediaan dibagi per jenis barang. Rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.56 Persediaan Per Jenis Barang Tahun 2024

No	SKPD	BAHAN/ MATERIAL	SUKU CADANG	ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	OBAT-OBATAN	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/ DISERAHKAN	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS /BERJAGA JAGA	NATURA DAN PAKAN	PERSEDIAAN DALAM PROSES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	392.000,00	90.000,00	636.804.458,00	9.215.630,00	230.000,00			625.000,00	647.357.088,00
2	Dinas Kesehatan	354.637.530,00	6.321.250,00	343.472.388,00	2.518.501.058,09	0	300.000,00	15.600,00		2.885.222.336,60
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			10.707.950,00		3.433.023.154,11			0	3.443.731.104,11
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman			2.403.500,00		38.159.091,00				40.562.591,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			23.259.970,00						23.259.970,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja			1.152.000,00						1.152.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					9.900.000,00				9.900.000,00
8	Dinas Sosial									0
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			1.722.910,00	69.257.680,00					70.980.590,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	30.352.000,00	38.737.400,00	311.321.300,00		56.616.000,00				437.026.700,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			301.237.872,00						301.237.872,00
12	Dinas Perhubungan			2.245.200,00						2.245.200,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika			8.804.550,00						8.804.550,00
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			11.189.900,00						11.189.900,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja			29.967.815,00						29.967.815,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			28.414.520,00						28.414.520,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan			31.471.626,00						31.471.626,00
18	Dinas Pariwisata			34.520.800,00						34.520.800,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga			10.573.000,00						10.573.000,00
20	Dinas Pertanian Dan Pangan	3.384.000,00		16.127.845,00						19.511.845,00
21	Sekretariat Daerah			23.203.175,00		87.779.450,00				110.982.625,00
22	Sekretariat DPRD			3.994.192,00						3.994.192,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah			57.701.300,00						57.701.300,00
24	Badan Keuangan			522.342.670,00						522.342.670,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			6.309.610,00						6.309.610,00
26	Inspektorat Daerah			20.403.140,00						20.403.140,00
27	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan			12.835.150,00						12.835.150,00

No	SKPD	BAHAN/ MATERIAL	SUKU CADANG	ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	OBAT-OBATAN	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/ DISERAHKAN	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS /BERJAGA JAGA	NATURA DAN PAKAN	PERSEDIAAN DALAM PROSES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Kecamatan Guguk Panjang			3.766.600,00						3.766.600,00
29	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh			6.103.220,00						6.103.220,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			6.752.900,00				544.900,00		7.297.800,00
Jumlah		**388.765.530,00**	**45.148.650,00**	**2.468.809.561,00**	**2.596.974.368,09**	**3.625.707.695,11**	**300.000,00**	**560.500,00**	**625.000,00**	**9.126.891.304,20**

Pada persediaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp3.433.023.154,11 berupa revitalisasi pembangunan kantor kejaksaan. Kegiatan revitalisasi ini tahun sebelumnya sebesar Rp2.841.206.250,99 dan pada tahun 2024 ini bertambah sebesar Rp591.816.903,12 dengan anggaran pada belanja hibah dan diakui sebagai persediaan.

5.3.1.2. Investasi

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
63.087.891.998,08	63.264.372.647,68

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Secara pengelompokan akun, Investasi pemerintah daerah terdiri dari dua yaitu:

1. Investasi Jangka Pendek

   Sampai saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi tidak mempunyai investasi jangka pendek. Adapun deposito yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2024 hanya berumur kurang dari 3 (tiga) bulan yang tidak dapat dikategorikan investasi jangka pendek dan hanya bertujuan untuk manajemen kas dengan sistem on call yang sewaktu-waktu dapat dicairkan.

2. Investasi Jangka Panjang

   Investasi Jangka Panjang Kota Bukittinggi terdiri dari Investasi Jangka Panjang Permanen dan Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
546.549.684,40	610.913.343,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk digulirkan secara berkelanjutan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat di Kota Bukittinggi. Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Neraca menggambarkan nilai Investasi sampai dengan 31 Desember 2024 serta penyisihannya.

Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp546.549.684,40, sedangkan Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp610.913.343,00. selama tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp64.363.658,60 sehingga Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2024 bersaldo sebesar Rp546.549.684,40.

Dana Bergulir diberikan kepada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang penyalurannya direalisasikan dari pos Belanja Bantuan Sosial Kota Bukittinggi pada tahun 2001 s.d. 2005. Penyaluran dana ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang dilanjutkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri c.q. Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Nomor 412/2440/SJ tanggal 26 Oktober 1998 tentang Pedoman Pembentukan dan Pemantapan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), yang kemudian berubah nama menjadi UEM-SP. Dalam suratnya, pada poin 12 Mendagri menyatakan bahwa: *"Modal kerja UED-SP adalah modal usaha untuk kegiatan bagi anggota dalam rangka menumbuh kembangkan usaha-usaha ekonomi produktif di pedesaan yang dananya bersumber dari bantuan pemerintah (APBN, APBD I, APBD II), masyarakat, lembaga perbankan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat".*

Pada tingkat Provinsi pun telah beberapa kali mengeluarkan pedoman pengelolaan, terakhir adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 412.25/283/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pedoman Administrasi dan Keuangan UEM-SP di Sumatera Barat, yang sampai saat ini diacu oleh pengelola di tingkat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dana Bergulir tersebut disajikan sebagai Investasi Non Permanen dalam Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi adalah berpedoman kepada Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir sebagai petunjuk teknis lebih lanjut PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tabel-tabel berikut adalah gugusan data Dana Bergulir yang merupakan hasil inventarisasi tim monitoring dan evaluasi UEM-SP per 31 Desember 2024 yakni sebagai berikut:

Tabel 5.57 Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	No	Kelurahan	Kelompok	Pinjaman (Rp)
1	2	3	4	5
A	1	Koto Selayan	Maju Jaya	145.270.000,00
	2	Campago Ipuh	Campago Sepakat	17.440.000,00
	3	Kubu Gulai Bancah	Sepakat Jaya	64.606.388,00
	4	Puhun Pintu kabun	Mekar	36.565.000,00
Mandiangin Koto Selayan	5	Manggis Ganting	Amanah	53.207.000,00
	6	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	53.895.000,00
	7	Garegeh	Tunas Harapan	64.260.000,00
	8	Pulai Anak Aia	Anggrek	52.705.000,00
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	57.040.000,00
		Sub Total		**544.988.388,00**
B	1	Tarok Dipo	Mekar jaya	44.890.000,00
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	121.200.000,00
	3	Pakan Kurai	Pakan Kurai	58.300.000,00
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	75.650.000,00
Guguk Panjang	5	Aur Tajungkang Tangah Sawah	Mutiara Indah	85.465.000,00
	6	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	43.597.000,00
	7	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	-
		Sub Total		**429.102.000,00**
C	1	Ladang Cakiah	Lansura	57.224.000,00
	2	Aur Kuning	Flamboyan	112.710.000,00
	3	Belakang balok	Dian	67.617.500,00
	4	Birugo	Biru Indah	46.559.000,00
Aur Birugo Tigo Baleh	5	Parit Antang	Serba Usaha	93.770.000,00
	6	Sapiran	Kelapa Gading	49.757.000,00
	7	Pakan Labuah	Palapa	34.450.000,00
	8	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	23.925.000,00
		Sub Total		**486.012.500,00**
		Total		**1.460.102.888,00**

Nilai dari posisi pinjaman yang dilaporkan oleh pengelola dana bergulir kemudian dikelompokkan berdasarkan umur piutang. Daftar umur piutang terhadap data pinjaman dana bergulir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.58 Pinjaman Berdasarkan Umur Pinjaman Tahun 2024

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Pinjaman (Rp)	Kelompok			
			0-1 Tahun (Rp)	2-3 Tahun (Rp)	4-5 Tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
1	2	3 = 4+5+6+7	4	5	6	7
A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN						
1	Koto Selayan	145.270.000,00	-	-	-	145.270.000,00
2	Campago Ipuh	17.440.000,00	5.000.000,00	-	-	12.440.000,00
3	Kubu Gulai Bancah	64.606.388,00	-	64.606.388,00	-	-
4	Puhun Pintu kabun	36.565.000,00	-	-	-	36.565.000,00
5	Manggis Ganting	53.207.000,00	-	-	-	53.207.000,00
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000,00	-	-	-	53.895.000,00
7	Garegeh	64.260.000,00	-	-	-	64.260.000,00
8	Pulai Anak Aia	52.705.000,00	-	-	-	52.705.000,00
9	Puhun Tembok	57.040.000,00	-		-	57.040.000,00
Sub Total		**544.988.388,00**	**5.000.000,00**	**64.606.388,00**	-	**475.382.000,00**
B. GUGUK PANJANG						
1	Tarok Dipo	44.890.000,00	16.200.000,00	18.200.000,00	10.490.000,00	-
2	Benteng Pasar Atas	121.200.000,00	29.150.000,00	30.450.000,00	61.600.000,00	-
3	Pakan Kurai	58.300.000,00	-	9.500.000,00	21.700.000,00	27.100.000,00
4	Kayu Kubu	75.650.000,00	-	-	-	75.650.000,00
5	Aur Tajungkang Tangah Sawah	85.465.000,00	18.200.000,00	1.100.000,00	5.150.000,00	61.015.000,00
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000,00	-	-	-	43.597.000,00
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-	-
Sub Total		**429.102.000,00**	**63.550.000,00**	**59.250.000,00**	**98.940.000,00**	**207.362.000,00**
C. AUR BIRUGO TIGO BALEH						
1	Ladang Cakiah	57.224.000,00	-	-	-	57.224.000,00
2	Aur Kuning	112.710.000,00	112.710.000,00	-	-	-
3	Belakang balok	67.617.500,00	-	-	-	67.617.500,00
4	Birugo	46.559.000,00	4.500.000,00	-	-	42.059.000,00
5	Parit Antang	93.770.000,00	19.200.000,00	9.500.000,00	1.650.000,00-	63.420.000,00
6	Sapiran	49.757.000,00	-	-	-	49.757.000,00
7	Pakan Labuah	34.450.000,00	-	-	-	34.450.000,00
8	Kubu Tanjung	23.925.000,00	-	-	-	23.925.000,00
Sub Total		**486.012.500,00**	**136.410.000,00**	**9.500.000,00**	**1.650.000,00**	**338.452.500,00**
Total		**1.460.102.888,00**	**204.960.000,00**	**133.356.388,00**	**100.590.000,00**	**1.021.196.500,00**

Terhadap penyisihan nilai tak tertagih dari piutang kelompok UEM-SP, diberlakukan aging schedule sebagai berikut:

1. Pinjaman dengan umur 0 s/d 1 tahun disisihkan sebesar 0,50%
2. Pinjaman dengan umur 2 s/d 3 tahun disisihkan sebesar 10%

3. Pinjaman dengan umur 4 s/d 5 tahun disisihkan sebesar 50%
4. Pinjaman dengan umur >5 tahun sebesar 100%

Setelah mendapatkan saldo berdasarkan umur pinjaman, untuk menyajikan Nilai Investasi Non Permanen di dalam Neraca, dilakukan Penyisihan Piutang untuk mendapatkan perhitungan NRV (Net Realizable Value) per kelompok sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.59 Penyisihan Pinjaman Tahun 2024

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)					
			0-1 Tahun 0,50%	2-3 Tahun 10%	4-5 Tahun 50%	> 5 Tahun 100%	Jumlah	NRV
1	2	3	4	5	6	8	9 = (4+5+6+7+8)	10 =(3-9)
A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN								
1	Koto Selayan	145.270.000,00	-	-	-	145.270.000,00	145.270.000,00	-
2	Campago Ipuh	17.440.000,00	25.000,00	-	-	12.440.000,00	12.465.000,00	4.975.000,00
3	Kubu Gulai Bancah	64.606.388,00	-	6.460.638,80	-	-	6.460.638,80	58.145.749,20
4	Puhun Pintu kabun	36.565.000,00	-	-	-	36.565.000,00	36.565.000,00	-
5	Manggis Ganting	53.207.000,00	-	-	-	53.207.000,00	53.207.000,00	-
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000,00	-	-	-	53.895.000,00	53.895.000,00	-
7	Garegeh	64.260.000,00	-	-	-	64.260.000,00	64.260.000,00	-
8	Pulai Anak Aia	52.705.000,00	-	-	-	52.705.000,00	52.705.000,00	-
9	Puhun Tembok	57.040.000,00	-	-	-	57.040.000,00	57.040.000,00	-
Sub Total		**544.988.388,00**	**25.000,00**	**6.460.638,80**	**-**	**475.382.000,00**	**481.867.638,80**	**63.120.749,20**
B. GUGUK PANJANG								
1	Tarok Dipo	44.890.000,00	81.000,00	1.820.000,00	5.245.000,00	-	7.146.000,00	37.744.000,00
2	Benteng Pasar Atas	121.200.000,00	145.750,00	3.045.000,00	30.800.000,00	-	33.990.750,00	87.209.250,00
3	Pakan Kurai	58.300.000,00	-	950.000,00	10.850.000,00	27.100.000,00	38.900.000,00	19.400.000,00
4	Kayu Kubu	75.650.000,00	-	-	-	75.650.000,00	75.650.000,00	-
5	Aur Tajungkang Tangah Sawah	85.465.000,00	91.000,00	110.000,00	2.575.000,00	61.015.000,00	63.791.000,00	21.674.000,00
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000,00	-	-	-	43.597.000,00	43.597.000,00	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total		**429.102.000,00**	**317.750,00**	**5.925.000,00**	**49.470.000,00**	**207.362.000,00**	**263.074.750,00**	**166.027.250,00**
C. AUR BIRUGO TIGO BALEH								
1	Ladang Cakiah	57.224.000,00	-	-	5.245.000,00	57.224.000,00	57.224.000,00	-
2	Aur Kuning	112.710.000,00	563.550,00	-	-	-	563.550,00	112.146.450,00
3	Belakang balok	67.617.500,00	-	-	-	67.617.500,00	67.617.500,00	-
4	Birugo	46.559.000,00	22.500,00	-	-	42.059.000,00	42.081.500,00	4.477.500,00
5	Parit Antang	93.770.000,00	96.000,00	950.000,00	825.000,00	63.420.000,00	65.291.000,00	28.479.000,00
6	Sapiran	49.757.000,00	-	-		49.757.000,00	49.757.000,00	-
7	Pakan Labuah	34.450.000,00	-	-	-	34.450.000,00	34.450.000,00	-
8	Kubu Tanjung	23.925.000,00	-	-	-	23.925.000,00	23.925.000,00	-
Sub Total		**486.012.500,00**	**682.050,00**	**950.000,00**	**825.000,00**	**338.452.500,00**	**340.909.550,00**	**145.102.950,00**
TOTAL		**1.460.102.888,00**	**1.024.800,00**	**13.335.638,80**	**50.295.000,00**	**1.021.196.500,00**	**1.085.851.938,80**	**374.250.949,20**

Selanjutnya, nilai NRV yang didapat dari penghitungan aging schedule didapat total nilai NRV dari seluruh kelompok sebesar Rp374.250.949,20 Nilai tersebut masih belum menggambarkan nilai total Investasi yang akan disajikan dalam Neraca, karena masih terdapat saldo kas di tangan pengelola, saldo kas yang terdapat pada

bank serta simpanan anggota kelompok Dana Bergulir. Rincian kas dan simpanan yang ada pada pengelola Dana Bergulir tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.60 Kas Bendahara dan Bank Tahun 2024

No	Kecamatan/ Kelurahan	Kas (Rp)	Bank (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket Rek Bank atas nama
1	2	3	4	5 = (3+4)	6
A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN					
1	Koto Selayan	42.000.000,00	-	42.000.000,00	
2	Campago Ipuh	-	31.696.777,00	31.696.777,00	NURMI HAMZAH
3	Kubu Gulai Bancah	1.021.499,00	32.381.155,00	33.402.654,00	UED SEPAKAT JAYA
4	Puhun Pintu kabun	-	22.793.729,00	22.793.729,00	MASNIZAR
5	Manggis Ganting	-	12.109.184,00	12.109.184,00	UM-SP QQ DT PARPATIAH
6	Campago Guguk Bulek	-	-	-	
7	Garegeh	1.827.000,00	-	1.827.000,00	
8	Pulai Anak aia	6.570.500,00	-	6.570.500,00	
9	Puhun Tembok	2.320.000,00	-	2.320.000,00	
Sub Total		**53.738.999,00**	**98.980.845,00**	**152.719.844,00**	
B. GUGUK PANJANG					
1	Tarok Dipo	38.235.000,00	-	38.235.000,00	
2	Benteng Pasar Atas	4.473.800,00	-	4.473.800,00	
3	Pakan Kurai	-	-	-	
4	Kayu Kubu	-	6.239.749,00	6.239.749,00	UEMSP KELURAHAN KAYU KUBU
5	Aur Tajungkang Tangah Sawah	29.131.044,00	-	29.131.044,00	
6	Bukit Apit Puhun	-	-	-	
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	45.023.397,20	45.023.397,20	HELMA BS
Sub Total		**71.839.844,00**	**51.263.146,20**	**123.102.990,20**	
C. AUR BIRUGO TIGO BALEH					
1	Ladang Cakiah	10.187.000,00	-	10.187.000,00	
2	Aur Kuning	48.015.823,00	108.512,00	48.124.335,00	UEM SP PLAMBOYAN
3	Belakang Balok	-	11.397.384,00	11.397.384,00	ZULISMALINDA
4	Birugo	17.000.000,00	6.101.049,00	23.101.049,00	ROSMANIAR
5	Parit Antang	23.960.000,00	470.000,00	24.430.000,00	UEM SP KELURAHAN PARIT ANTANG
6	Sapiran	-	17.585.089,00	17.585.089,00	UEM SP KELAPA GADING KELURAHAN SAPIRAN
7	Pakan Labuah	9.912.000,00	-	9.912.000,00	
8	Kubu Tanjung	-	25.705.656,00	25.705.656,00	NOVALINDA
Sub Total		**109.074.823,00**	**61.367.690,00**	**170.442.513,00**	
Total		**234.653.666,00**	**211.611.681,20**	**446.265.347,20**	

Besaran nilai Investasi sebesar Rp1.460.102.888,00 ditambahkan dengan jumlah kas yang ada pada pengurus Rp234.653.666,00 dan kas yang ada pada bank sebesar Rp211.611.681,20 sehingga nilai Investasi menjadi sebesar Rp1.906.368.235,20 Pada angka tersebut masih terdapat simpanan dari anggota yang bukan merupakan pendapatan dari Dana Bergulir sebesar Rp273.966.612,00 yang rinciannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.61 Simpanan Anggota Kelompok Dana Bergulir Tahun 2024

No	Kecamatan/Kelurahan	Simpanan			
		Pokok (Rp)	Wajib (Rp)	Sukarela (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
A.MANDIANGIN KOTO SELAYAN					
1	Koto Selayan	225.000,00	680.000,00	75.000,00	980.000,00
2	Campago Ipuh	290.000,00	1.799.500,00	-	2.089.500,00
3	Kubu Gulai Bancah	430.000,00	952.837,00	281.200,00	1.664.037,00
4	Puhun Pintu kabun	285.000,00	6.225.000,00	-	6.510.000,00
5	Manggis Ganting	1.875.000,00	3.850.000,00	140.000,00	5.865.000,00
6	Campago Guguk Bulek	265.000,00	2.384.000,00	-	2.649.000,00
7	Garegeh	505.000,00	4.045.000,00	542.500,00	5.092.500,00
8	Pulai Anak aia	860.000,00	6.477.500,00	10.000,00	7.347.500,00
9	Puhun Tembok	290.000,00	8.745.000,00	-	9.035.000,00
Sub Total		**5.025.000,00**	**35.158.837,00**	**1.048.700,00**	**41.232.537,00**
B.GUGUK PANJANG					
1	Tarok Dipo	-	-	-	-
2	Benteng Pasar Atas	585.000,00	40.515.000,00	-	41.100.000,00
3	Pakan Kurai	-	-	-	-
4	Kayu Kubu	380.000,00	13.327.000,00	1.840.000,00	15.547.000,00
5	Aur Tajungkang Tangah Sawah	2.659.000,00	9.998.000,00	16.607.069,00	29.264.069,00
6	Bukit Apit Puhun	-	-	-	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-
Sub Total		**3.624.000,00**	**63.840.000,00**	**18.447.069,00**	**85.911.069,00**
C.AUR BIRUGO TIGO BALEH					
1	Ladang Cakiah	175.000,00	9.046.000,00	669.000,00	9.890.000,00
2	Aur Kuning	385.000,00	44.687.500,00	1.437.000,00	46.509.500,00
3	Belakang Balok	102.000,00	14.295.000,00	-	14.397.000,00
4	Birugo	180.000,00	7.092.250,00	1.310.750,00	8.583.000,00
5	Parit Antang	295.000,00	51.112.700,00	2.987.306,00	54.395.006,00
6	Sapiran	1.806.000,00	9.610.500,00	75.000,00	11.491.500,00
7	Pakan Labuah	575.000,00	982.000,00	-	1.557.000,00
8	Kubu Tanjung	-	-	-	-
Sub Total		**3.518.000,00**	**136.825.950,00**	**6.479.056,00**	**146.823.006,00**
Total		**12.167.000,00**	**235.824.787,00**	**25.974.825,00**	**273.966.612,00**

Untuk mendapatkan nilai Investasi Non Permanen (dana bergulir UEM-SP) yang akan disajikan dalam Neraca, maka nilai sebesar Rp1.906.368.235,20 dikurangi dengan jumlah simpanan anggota kelompok masyarakat yang ada pada pengelola sebesar Rp273.966.612,00 sehingga dana Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Bukittinggi yang disajikan sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp1.632.401.623,20.

Dari data yang telah tersusun tersebut didapatkan nilai bruto Dana Bergulir yang ada di tangan pengurus/kelurahan maupun yang masih beredar di masyarakat sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.632.401.623,20 Dari data tersebut dikurangi dengan Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp1.085.851.938,80 Sehingga diperoleh netto dana bergulir sebesar Rp546.549.684,40 Hingga tahun 2024 masih banyak ditemui kendala dalam tertib administratif Dana Bergulir, antara lain kepengurusan yang ada di beberapa kelurahan tidak lagi aktif (vakum) dan ada pengurusnya yang telah meninggal, sehingga pengelola dana tidak ada lagi. Dari 24 kelompok, terdapat 19 (Sembilan belas) unit UEM-SP yang tidak lagi beroperasi, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.62 Kondisi Kelompok UEM-SP Di Bukittinggi 2024

KECAMATAN	NO	KELURAHAN	KELOMPOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A Mandiangin Koto Selayan	1	Koto Selayan	Maju Jaya	Tidak Aktif
	2	Campago Ipuh	Campago Sepakat	Tidak Aktif
	3	Kubu Gulai Bancah	Sepakat Jaya	Tidak Aktif
	4	Puhun Pintu kabun	Mekar	Tidak Aktif
	5	Manggis Ganting	Amanah	Tidak Aktif
	6	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	Tidak Aktif
	7	Garegeh	Tunas Harapan	Tidak Aktif
	8	Pulai Anak aia	Anggrek	Tidak Aktif
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	Tidak Aktif
B Guguk Panjang	1	Tarok Dipo	Mekar jaya	Aktif
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	Aktif
	3	Pakan Kurai	Pakan Kurai	Tidak Aktif
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	Tidak Aktif
	5	Aur Tajungkang Tangah Sawah	Mutiara Indah	Tidak Aktif
	6	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	Tidak Aktif
	7	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	Tidak Aktif
C Aur Birugo Tigo Baleh	1	Ladang Cakiah	Lansura	Tidak Aktif
	2	Aur Kuning	Flamboyan	Aktif
	3	Belakang balok	Dian	Tidak Aktif
	4	Birugo	Biru Indah	Aktif
	5	Parit Antang	Serba Usaha	Aktif
	6	Sapiran	Kelapa Gading	Tidak Aktif
	7	Pakan Labuah	Palapa	Tidak Aktif
	8	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	Tidak Aktif

Hingga saat ini sangat banyak kendala yang dihadapi dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban dari Dana Bergulir tersebut diantaranya sulitnya mengubah persepsi masyarakat akan Dana Bergulir yang terlanjur menganggap bahwa Dana Bergulir tersebut tidak perlu di pertanggungjawabkan maupun dikembalikan, karena Dana Bergulir tersebut pada awal pengguliran berasal dari kelompok belanja Bantuan Sosial, apalagi saat ini dari 24 Kelompok hanya tinggal 5 yang masih aktif. Dan dari 18 kelompok usaha yang tidak aktif tersebut hampir semua pengurusnya tidak diketahui lagi keberadaannya/telah meninggal/pikun, begitupun dengan Peminjam, ada peminjam yang telah meninggal, pindah tempat tinggal, tidak diketahui keberadaannya dan bahkan ada yang mengaku sudah tak sanggup melunasi karna usahanya tidak berjalan lagi, diperparah dengan tidak lengkap lagi dokumen-dokumen pinjaman, buku data pinjaman dan dokumen pendukung yang dulunya dipegang pengurus. Sehingga untuk mendapatkan nilai Dana Bergulir yang benar-benar valid sangat sulit.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
62.541.342.313,68	62.653.459.304,68

Investasi jangka panjang permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Sampai dengan 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp62.541.342.313,68 yang merupakan akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Sedangkan nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan 31

Desember 2023 yang lalu adalah Rp62.653.459.304,68 artinya terdapat penurunan nilai investasi sebesar Rp112.116.991,00.

Selama tahun 2024 terdapat mutasi tambah nilai investasi sebesar Rp1.863.797.527,00 dan mutasi kurang sebesar Rp1.975.914.518,00. penambahan nilai investasi tersebut terdiri dari:

1. Pengakuan investasi dengan telah diumumkannya dividen tahun 2023 oleh BPRS Jam Gadang sebesar Rp907.163.164,00;
2. Penambahan nilai penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang atas laba tahun 2024 sebesar Rp956.634.363,00.

Sementara itu untuk mutasi kurang sebesar Rp1.975.914.518,00 merupakan Pengurangan nilai investasi yang terdiri dari:

1. Dividen tahun buku 2023 yang telah diumumkan dan disetorkan berupa uang oleh PT. BPRS Jam Gadang Perseroda kepada Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar RpRp907.163.164,00 pada tanggal 20 Januari 2024.
2. Penyesuaian laba (rugi) ditahan pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang karena terdapat defisit iuran Dapenma Pamsi dan Hutang Pajak sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.068.751.354,00.

Dengan adanya mutasi penambahan dan pengurangan di atas selama tahun 2024 nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2024 menjadi Rp62.541.342.313,68 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.63 Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Nagari	44.524.000.000,83	-	-	44.524.000.000,83
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda	8.250.000.000,00	907.163.164,00	907.163.164,00	8.250.000.000,00
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang	9.879.459.303,85	956.634.363,00	1.068.751.354,00	9.767.342.312,85
	Jumlah Penyertaan Modal	**62.653.459.304,68**	**1.863.797.527,00**	**1.975.914.518,00**	**62.541.342.313,68**

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari

Investasi Saham pada Bank Nagari Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2023 yang lalu bersaldo Rp44.524.000.000,83 dan pada tahun 2024 tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang sehingga sampai tanggal 31 Desember 2024 nilai Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada Bank Nagari masih tetap sebesar Rp44.524.000.000,83. Sedangkan porsi kepemilikan saham Pemerintah Kota Bukittinggi di Bank Nagari adalah 2,34% per 31 Desember 2024.

Pencatatan nilai investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada Bank Nagari adalah dengan menggunakan Metode Biaya (*Cost Method*).

Dari nilai tersebut di atas, sampai saat ini telah diterbitkan sertifikat saham sebanyak 44.524 lembar yaitu Saham Seri A senilai Rp1.000.000,00 perlembar dengan total nominal Rp44.524.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000015, Nomor Seri 280.611 s.d. 284.690 sebanyak 4.080 lembar dengan nominal Rp4.080.000.000,00,
2) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000035, Nomor Seri 363.149 s.d. 363.549 sebanyak 401 lembar dengan nominal Rp401.000.000,00,
3) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000054, Nomor Seri 418.791 s.d. 420.252 sebanyak 1.462 lembar dengan nominal Rp1.462.000.000,00,
4) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000077, Nomor Seri 482.324 s.d. 484.436 sebanyak 2.113 lembar dengan nominal Rp2.113.000.000,00 yang berasal dari tambahan investasi saham Tahun 2011,
5) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000104, Nomor Seri 607.550 s.d. 609.919 sebanyak 2.370 lembar seri A dengan nominal Rp2.370.000.000,00 yang merupakan setoran investasi saham tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012,
6) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000133, Nomor Seri 761.620s.d.765.551 sebanyak 3.932 lembar dengan nominal Rp3.932.000.000,00 yang disetor tanggal 14 November 2013,
7) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000145, Nomor Seri 895.366 s.d. 899.365 sebanyak 4.000 lembar dengan nominal sebesar Rp4.000.000.000,00 yang berasal dari tambahan setoran modal tanggal 23 April 2014,
8) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000158, Nomor Seri 984.016 s.d 984.598 sebanyak 583 lembar dengan nilai nominal Rp583.000.000,00 yang merupakan setoran investasi saham tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015,
9) Surat Kolekti Sertifikat Saham Seri A.000166, Nomor Seri 1.021.190 s.d 1.025.589 sebanyak 4.400 lembar dengan nominal Rp4.400.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015,
10) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000181, Nomor Seri 1.161.281 s.d 1.163.263 sebanyak 1.983 lembar dengan nominal Rp1.983.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2016 tanggal 2 Februari 2016,
11) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000202, Nomor Seri 1.365.722 s.d 1.373.921 sebanyak 8.200 lembar dengan nominal Rp8.200.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017,
12) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000219, Nomor Seri 1.516.803 s.d 1.520.802 sebanyak 4.000 lembar dengan nominal Rp4.000.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018.

13) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000259, Nomor Seri 1.750.499 s.d 1.755.232 sebanyak 4.734 lembar dengan nominal Rp4.734.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022.

14) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000263, Nomor Seri 1.768.327 s.d 1.770.592 sebanyak 2.226 lembar dengan nominal Rp2.266.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2022 tanggal 01 September 2022.

Berdasarkan surat dari Pimpinan Bank Nagari Cabang Bukittinggi Nomor SR/BT/UM/05-2025 tanggal 16 Mei 2025 bahwa terdapat dividen bagian Pemko Bukittinggi Tahun buku 2024 sebesar Rp8.976.336.988,00 yang dibagikan pada tahun 2025. Nilai dividen tersebut telah dicatat Pemerintah Kota Bukittinggi pada Neraca tahun 2024 pos akun Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda.

PT. BPRS Jam Gadang Perseroda sebelumnya bernama BPR Jam Gadang, penggantian nama menjadi PT.BPRS Jam Gadang Perseroda pada tanggal 27 Mei 2021 sesuai dengan Keputusan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-76/D.03/2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat PT Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang Perseroda yang telah berstatus BUMD.

Nilai Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda kondisi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.250.000.000,00 dengan persentase kepemilikan saham sebesar 87,36%, dan nilai investasi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2023 juga sama sebesar Rp8.250.000.000,00 karena tidak ada penambahan penyertaan modal di tahun 2024. Saham tersebut disetor tahun 2007, 2017, 2018 dan tahun 2022. Nilai uang tersebut jika dikonversikan ke nilai saham adalah sebanyak 825.000 lembar saham @Rp10.000,00.

Dari nilai tersebut, sampai saat ini sudah diterbitkan sertifikat sahamnya semua yaitu sebanyak 825.000 lembar. Saham tersebut senilai Rp10.000,00 per lembar saham, total nominal Rp8.250.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Sertifikat Saham Nomor Seri JG.00001 sebanyak 25.000 lembar senilai Rp10.000,00 per lembar saham dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)

2) Sertifikat Saham Nomor Seri JG.00166 sebanyak 200.000 lembar senilai Rp10.000,00 per lembar saham dengan nominal Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah)

3) Sertifikat Saham Nomor Seri JG.00189 sebanyak 300.000 lembar senilai Rp10.000,00 per lembar saham dengan nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah)

4) Sertifikat Saham Nomor Seri JG.00001 sebanyak 300.000 lembar senilai Rp10.000,00 per lembar saham dengan nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah)

Pada tahun 2024 terdapat penambahan nilai investasi Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp907.163.164,00 dan pengurangan sebesar Rp907.163.164,00. Penambahan dan pengurangan nilai tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai kepemilikan lebih dari 50%, sesuai SAP dalam pencatatan nilai saham adalah dengan menggunakan metode ekuitas (equity method) yakni memperhitungkan porsi laba PT.BPR Jam Gadang tahun 2023 untuk Pemerintah Kota Bukittinggi dikurangi dengan dividen yang dibagikan tahun 2024 sebagai penambah dan pengurang nilai investasi.

Berikut penghitungan nilai investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada BPRS Jam Gadang tahun 2024:

Tabel 5.64 Perhitungan Equity Method untuk Investasi Pemko Bukittinggi pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi tahun 2023 *(Neraca Audited)*	8.250.000.000,00
2	Jumlah Modal Disetor s.d tahun 2024	8.250.000.000,00
3	Jumlah Total Saham BPR s.d tahun 2023	9.165.900.000,00
4	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi dari Rp8.250.000.000,00	0,9001
5	Jumlah Laba BPR Jam Gadang tahun 2023 setelah pajak *(L/R Audited BPR)*	1.832.499.580,00
6	Dividen yang akan dibagi untuk Pemerintah (55%)	1.007.874.768,55
7	Laba BPR Jam Gadang tahun 2023 Sesuai porsi kepemilikan Pemko Bukittinggi 90,01% (dibulatkan)	907.163.164,00
8	dividen 2023 yang dibagikan di 2024	907.163.164,00
9	Tambahan Pengakuan Nilai Investasi merupakan dari selisih Laba BPR dengan dividen yang diterima	-
10	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi tahun 2023 dengan metode ekuitas	8.250.000.000,00

Berdasarkan surat Direktur PT.BPRS Jam Gadang Perseroda Nomor 02/BPRS.JG/UM/0125 tanggal 02 Januari 2025 dinyatakan terdapat proyeksi bagian dividen Pemko Bukittinggi tahun 2024 sebesar Rp1.035.084.065,00 yang akan dibagikan pada tahun 2025, rincian dividen yang akan diterima Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2025 adalah:

Tabel 5.65 Rincian Dividen yang Akan Diterima Pemerintah Kota Bukittinggi dari PT.BPRS Jam Gadang Perseroda

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi tahun 2023 *(Neraca Audited)*	8.250.000.000,00
2	Jumlah Modal Disetor s.d tahun 2024	8.250.000.000,00
3	Jumlah Total Saham BPR s.d tahun 2024	9.443.400.000,00
4	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi dari Rp8.250.000.000,00	87,36
5	Jumlah Laba BPR Jam Gadang tahun 2024 setelah pajak *(L/R udited BPR)*	2.166.419.662,00
6	Bagian Laba untuk Pembagian Deviden (55%)	1.191.530.814,00
7	Laba BPR Jam Gadang tahun 2024 Sesuai porsi kepemilikan Pemko Bukittinggi 87,36% (dibulatkan)	1.040.952.328,00
8	Deviden 2024 yang akan dibagikan di 2025	1.040.952.328,00

Nilai dividen tersebut telah dicatat Pemko Bukittinggi pada Neraca tahun 2024 pos akun Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang

Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp9.767.342.312,85. Sampai dengan tahun 2023 nilai investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang sebesar Rp9.879.459.303,85. Terdapat penurunan nilai investasi sebesar Rp112.116.991,00 dari tahun lalu. penurunan nilai investasi ini terjadi karena adanya defisit atas iuran Dapenma Pamsi dan hutang pajak sampai dengan tahun 2024.

Untuk penentuan nilai investasi pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang, Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan metode ekuitas, karena kepemilikan saham Pemerintah Kota Bukittinggi atas saham Perumda adalah seratus persen (100%) dengan konsekuensi seluruh laba atau rugi juga menjadi milik Pemerintah dan dicatat sebagai penambah atau pengurang investasi Pemerintah. Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang mengalami defisit dari tahun ke tahun yang menyebabkan berkurangnya nilai investasi Pemerintah Kota Bukittinggi. Penyesuaian tersebut dilakukan karena konsekuensi dari metode kepemilikan modal ekuitas 100% Pemko Bukittinggi atas Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang mengakui laba sebagai penambah nilai investasi dan mengakui rugi sebagai pengurang nilai investasi.

Rincian nilai investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang yang disajikan pada Laporan Keuangan tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.66 Rincian Nilai Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Tahun 2024

No	Rincian	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Penyertaan modal pemda sampai dengan tahun 2023	9.879.459.303,85
2	Penyesuaian Laba (Rugi) di tahan	-1.068.751.354,00
3	Laba (Rugi) tahun 2024	956.634.363,00
Total		**9.767.342.312,85**

Menindak lanjuti hasil temuan BPK tahun 2021 atas penyertaan modal Pemko sebesar Rp15.960.699.456,93 (14.544.620.510 +1.416.078.946,93) pada Perumda Air minum Tirta Jam Gadang belum ditetapkan status kepemilikannya. Pemerintah Kota Bukittinggi dan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengalihan aset tersebut, Direktur Perumda pernah beberapa kali bersurat kepada Dirjen Cipta Karya tahun 2007, tahun 2012, tahun 2015 serta 2021 perihal Aset Eks Departemen PU.

Tahun 2022, untuk mendorong percepatan penyelesaian serah terima aset tersebut, Pemko Bukittinggi juga telah menindaklanjuti dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1) Surat Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR-RI c.q. Kepala Balai Prasarana Permukiman Nomor 905.647/BK.05/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Permohonan Serah Terima Aset.
2) Surat Kepala Badan Keuangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi nomor 905.889/BK.05/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal serah terima aset.

Selain melalui surat, telah dilakukan beberapa kali pertemuan baik di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun pihak Kementerian/Balai yang berkunjung ke Badan Keuangan dan Perumda.

Tindak lanjut dari pertemuan tersebut telah dilakukan verifikasi data oleh Perumda sesuai dengan kontrak dan asbuilt drawing dari beberapa pekerjaan dan ditindaklanjuti dengan Surat pernyataan dari Direktur Perumda Nomor : 173/ IX/Perumda.AMTJ-Bkt/11-2022 tanggal 4 November 2022 atas Hasil Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa:

1) Pekerjaan pemasangan dan pengadaan Pipa Dn 250mm Banpro Penyehatan PDAM Kota Bukittinggi (paket 05) tahun 2010 dengan nilai Perolehan Rp.1.077.074.700.-
2) Pekerjaan IPA Kapasitas 20 L/detik Pengadaan dan Pemasangan Pipa Dn 200 mm dan Dn 225 mm Banpro Penyehatan PDAM Kota Bukittinggi (paket 09) Tahun 2011 dengan Nilai Perolehan Rp. 9.727.186.000.
3) Pembuatan Dinding Penahan dan Tumpuan Jembatan Pipa Pengadaan dan Pemasangan Pipa Dn 250mm Banpro PDAM Kota Bukitinggi (PAMS-9) Tahun 2015 dengan nilai Perolehan Rp.2.901.547.000.-

Selanjutnya Surat pernyataan dari Direktur Perumda dikuatkan dengan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN) oleh Walikota Bukittinggi dengan nomor 030/2455/BK.06/2022 tanggal 29 November 2022. Surat Pernyataan ini sebagai persyaratan atas usulan alih status/hibah Barang Milik Negara dan merupakan bagian dari proses alih status/hibah.

Untuk Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Pipa Dn 250mm Banpro Penyehatan PDAM Kota Bukittinggi (paket 05) tahun 2010 dengan nilai Perolehan Rp.1.077.074.700.-, proses alih status/hibah telah ditindaklanjuti dengan BAST Nomor 291.1/BA/DC/2024 / 000.2.3.2/20/BK.06/2024 tanggal 4 April 2024 senilai Rp1.084.720.100,00. Belum dilakukan pencatatan pada Laporan BMD karena rincian dan spesifikasi nilai yang tertera pada BAST belum dilengkapi.

Untuk pekerjaan IPA Kapasitas 20 L/detik Pengadaan dan Pemasangan Pipa Dn 200 mm dan Dn 225 mm Banpro Penyehatan PDAM Kota Bukittinggi (paket 09) Tahun 2011 senilai Rp9.727.186.000 dan Pembuatan Dinding Penahan dan Tumpuan Jembatan Pipa Pengadaan dan Pemasangan Pipa Dn 250mm Banpro PDAM Kota Bukitinggi (PAMS-9) Tahun 2015 senilai Rp.2.901.547.000 masih dalam proses hibah dari Kementrian PUPR kepada Pemerintah Kota Bukittinggi.

Selain aset pemerintah pusat (APBN) di atas, juga terdapat aset Pemerintah Kota Bukittinggi (APBD) yang masih dalam proses penyertaan modal Pemko Bukittinggi pada PDAM yang tercatat pada Buku Inventaris Dinas PUPR, dengan jumlah nilai aset sebesar Rp1.416.078.946,93 dengan rincian:

1) Saluran Pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang) dengan nilai Rp177.476.000,00 dengan BAST Sementara Nomor 030/571.B/BK.06/2019 dan Nomor 671.A/IX-PDAM/08-2019 tanggal 15 Agustus 2019.
2) Saluran pembawa air baku tertutup dengan BAST Sementara Nomor 030/26.a/BK.06/2020 dan Nomor 03.a/IX-PDAM/01-2020 tanggal 6 Januari 2020 dengan total nilai sebesar Rp1.238.602.946,93 dengan rincian sebagai berikut:
    a) Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Parit Antang) senilai Rp335.615.469,98;
    b) Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di KelurahanTarok Dipo) senilai Rp411.943.479,93;
    c) Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Kubu Tanjung) senilai Rp166.475.376,00;
    d) Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Pulai Anak Air) senilai Rp172.139.811,34;
    e) Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Puhun Pintu Kabun) senilai Rp152.428.809,68.

Aset-aset pemerintah Kota Bukittinggi tersebut sedang dalam proses penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang. Penilaian terhadap BMD yang akan dilakukan penyertaan modal sudah dianggarkan di tahun 2023, namum gagal dalam proses lelang karena Pihak ke 3 tidak ada yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan.

Selanjutnya pada LHP BPK tahun 2023 masih terdapat aset sebesar Rp7.942.448.726,00 yang digunakan untuk operasional PDAM belum ditetapkan status kepemilikannya dan masih tercatat pada buku inventaris pengelola. Rincian aset tersebut terdiri dari:

a. Aset senilai Rp4.909.914.546,00 berdasarkan BAST Pengelolaan Sementara Nomor 030/1718/BK.06/2018 tanggal 30 Desember 2018 antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan PDAM Tirta Jam Gadang yang terdiri dari:

Tabel 5.67 Rincian Aset Pemerintah Kota Bukittinggi yang digunakan oleh PDAM Tirta Jam Gadang

No	Nama BMD	satuan	Vol	Asal Usul	Nilai
1	Mobil Tangki air 2015 B9128 SMA dan B 9129 SMA	unit	2	Hibah dari Kementerian PUPR	631.200.000,00
2	Hidran Umum L + Pondasi	unit	1	Hibah dari Kementerian PUPR	23.320.000,00
3	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	unit	1	Hibah dari Kementerian PUPR	2.999.604.874,00
4	Truck + *Attachment* 2004 BA 9608 LG dan BA 9609 LG	unit	2	APBD	400.000.000,00
5	Sumur bor dalam (SGL) Kubu Gulai Bancah	paket	1	Hibah dari Kementerian PUPR	432.204.686,00
6	Sumur bor dalam (SGL) Bukit Apit	paket	1	Hibah dari Kementerian PUPR	423.584.986,00
	Jumlah				**4.909.914.546,00**

b. Aset senilai Rp3.032.534.180,00 berdasarkan BAST no 46/BAST/BPPW-SUMBAR/2020 tanggal 20 Juni 2020 antara Balai Sarana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota Bukittinggi, Aset berupa SPAM IKK Belakang Balok KAP.40 L/DET Kota Bukittinggi (PSPAM-6)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menindaklanjuti dengan surat perintah tugas nomor 000.2.3.2/62/BK-062023 tanggal 3 April 2023 untuk Melakukan pemeriksaan / penelitian fisik BMD Pemerintah Kota Bukittinggi yang akan dilakukan penilaian untuk Penyertaan modal pada PDAM Tirta Jam Gadang serta Surat Sekretaris Daerah Nomor 030/919/BK.06/2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal Informasi Penggunaan Truck Tangki Air.

Dari tindak lanjut hal diatas terdapat BMD Kota Bukittinggi tidak optimal penggunaannya oleh PDAM diantaranya:

a. Truck + Attachment 2004 (BA 9608 LG dan BA 9609 LG) dikembalikan karena kondisinya rusak berat

b. Hidran Umum 2000 L + Pondasi dikembalikan karena fisik dan lokasi tidak ditemukan

c. Sumur Bor Dalam (SGL) Kubu Gulai Bancah (Jaringan dan sumber energi penggerak) dikembalikan karena Listrik belum ada.

d. Sumur Bor Dalam (SGL) Bukit Apit (Jaringan dan sumber energi penggerak) dikembalikan karena Listrik belum ada.

Maka Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang menyerahkan kembali aset tersebut kepada Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai BAST no 157/IX-Perumda.AMTJ-Bkt/08-2023 dan 030/48/BAST/BK.06/2023. Dan terhadap aset senilai Rp3.032.534.180,00 SPAM IKK Belakang Balok KAP.40 L/DET Kota Bukittinggi (PSPAM-6) sedang melakukan proses penyertaan modal kepada

Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang. Penilaian terhadap BMD yang akan dilakukan penyertaan modal tersebut sudah dianggarkan di tahun 2023, namum gagal dalam proses lelang karena Pihak ke 3 tidak ada yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan.

Rincian BMD yang digunakan PDAM Tirta Jam Gadang, dan akan ditindaklanjuti dengan Pemindahtanganan dalam bentuk Penyertaan Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 5.68 Rincian BMD yang digunakan PDAM Tirta Jam Gadang dan akan ditindaklanjuti dengan Pemindahtanganan dalam bentuk Penyertaan Modal

No	URAIAN	PENGADAAN TAHUN	ASAL USUL	NILAI PEROLEHAN	STATUS
1	Mobil Tangki Air	2017	Hibah	315.600.000,00	Tercatat BI Pengelola
2	Mobil Tangki Air	2017	Hibah	315.600.000,00	Tercatat BI Pengelola
3	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	2020	Hibah	3.032.534.180,00	Tercatat BI Pengelola
4	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar		Hibah	2.999.604.874,00	Tercatat BI Pengelola
5	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup /Pengembangan Jaringan Spam Zona Tabek Gadang di Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB	2018	APBD	177.476.000,00	Tercatat BI DPUPR
6	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup/Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Zona Tabek Gadang di Kel. Parit Antang Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi	2019	APBD	335.615.889,80	Tercatat BI DPUPR
7	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup/Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Zona Tabek Gadang di Kel. Tarok Dipo Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi	2019	APBD	411.944.057,13	Tercatat BI DPUPR
8	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup/Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Zona Tabek Gadang di Kel. Pulai Anak Air Kec. Mandiangin Koto Selayan	2019	APBD	172.140.000,00	Tercatat BI DPUPR
9	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup/Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Zona Tabek Gadang di Simpang Sumua Kel. Kubu Tanjung Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi	2019	APBD	166.475.000,00	Tercatat BI DPUPR
10	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup/Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Zona Tabek Gadang di Kel. Puhun Pintu Kabun Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi	2019	APBD	152.428.000,00	Tercatat BI DPUPR

5.3.1.3 Aset Tetap

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.894.807.796.735,86	1.861.109.977.328,03

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.894.807.796.735,86 mengalami kenaikan sebesar Rp33.697.819.407,83 dari saldo Tahun 2023 sebesar Rp1.861.109.977.328,03. Berdasarkan kelompoknya, Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi yang disajikan pada Neraca Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.69 Kelompok Aset Tetap

No	Akun/ Rekening	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2024 (Rp)
1	1.3.01	Tanah	565.667.194.505,20	83.608.500.000,00	0,00	649.275.694.505,20
2	1.3.02	Peralatan dan Mesin	434.804.893.735,80	14.413.905.160,99	9.086.202.484,60	440.132.596.412,19
3	1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.050.671.756.080,44	53.322.982.701,85	28.200.160.059,86	1.075.794.578.722,43
4	1.3.04	Jalan, Jaringan dan Irigasi	693.238.082.359,11	34.361.871.624,85	771.255.117,28	726.828.698.866,68
5	1.3.05	Aset Tetap Lainnya	31.350.981.575,80	1.518.035.027,00	2.504.332.098,00	30.364.684.504,80
6	1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.991.683.715,68	312.523.075,40	113.277.992,00	34.190.928.799,08
7	1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(948.614.614.644,00)	(127.390.519.150,67)	(14.225.748.720,15)	(1.061.779.385.074,52)
Jumlah Aset Tetap			**1.861.109.977.328,03**	**60.147.298.439,42**	**(26.449.479.031,59)**	**1.894.807.796.735,86**

5.3.1.3.1 Tanah

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
649.275.694.505,20	565.667.194.505,20

Nilai Tanah pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp649.275.694.505,20. Dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi penambahan Aset Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp83.608.500.000,00. Aset Tanah terlihat dalam rincian berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2024		**Rp 565.667.194.505,20**
Mutasi Tambah		
Belanja Modal Tanah	Rp	0,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
Hibah Masuk dari pihak ke-3	Rp	83.608.500.000,00
Penilaian Tanah yang sebelumnya bernilai Nol	Rp	0,00
Mutasi Masuk Antar SKPD	Rp	0,00
Koreksi Pencatatan		
Total Mutasi Tambah		**Rp83.608.500.000,00**
Mutasi Kurang		
Mutasi Keluar antar SKPD	Rp	0,00
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00
Total Mutasi Kurang	**Rp**	**0,00**
Saldo Akhir 31 Desember 2024		**Rp649.275.694.505,20**

Penambahan Aset Tanah berasal dari Hibah Tanah Jalan Sudirman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai BAST Barang Milik Negara Nomor: PL.04.0-Bb3-PJNW1-SB/799 dan Nomor: 000.2-3.2/24/BK.06./2024 sebesar Rp83.608.500.000,00.

Berdasarkan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah, tanah dapat diklasifikasikan menjadi tanah persil, tanah non-persil dan tanah lapangan. Dari nilai total tanah Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp649.275.694.505,20 terdiri dari tanah persil senilai Rp400.366.953.476,00, tanah non-persil senilai Rp20.017.663.908,20 dan tanah lapangan senilai Rp228.891.077.121,00.

Secara rinci data aset tetap tanah per SKPD dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 5.70 Rekap Data Aset Tetap Tanah Per SKPD

NO	SKPD	Tanah (Rp)
1	Sekretariat DPRD	5.683.900.000,00
2	Sekretariat Daerah	19.256.977.652,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	229.626.027.875,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.885.142.908,20
5	Dinas Perhubungan	7.906.450.000,00
6	Dinas Kesehatan	17.427.408.500,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.491.265.001,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	278.250.000,00
9	Dinas Sosial	1.001.400.000,00
10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	810.000.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	960.000.000,00
13	Dinas Pertanian dan Pangan	13.718.684.469,00
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	78.173.490.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.624.000.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja	0,00
17	Pengelola Barang Milik Daerah	26.795.906.000,00
18	Badan Keuangan	6.139.500.000,00
19	Inspektorat Daerah	437.500.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	7.813.703.000,00
22	Dinas Pariwisata	122.805.684.000,00
23	Dinas Pemuda dan Olahraga.	10.052.950.000,00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00

NO	SKPD	Tanah (Rp)
25	Satuan Polisi Pamong Praja	909.000.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	282.000.000,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
29	Kecamatan Guguk Panjang	12.790.706.000,00
30	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	9.203.607.100,00
31	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	3.202.142.000,00
TOTAL		**649.275.694.505,20**

Disamping itu, terdapat Aset Tetap Tanah yang digunakan oleh pihak lain dengan status pinjam pakai sebagai berikut:

1. Status pinjam pakai dengan Komisi Pemilihan Umum berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 344,75 M2 dan ukuran bangunan 344.24 M2 melalui perjanjian pinjam pakai Aset Tanah dan Bangunan nomor: 42/DKUKMdP/IX/2021 dan Nomor: 292/RT.07-SPj/1375/KPU-KOTA/IX/2021 tanggal 17 September 2021 dengan jangka waktu perjanjian 17 September 2021 s.d 16 September 2026.
2. Status pinjam pakai dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 2.250 m2 yang digunakan untuk pembangunan gedung UPTD SAMSAT Bukittinggi melalui perjanjian pinjam pakai Nomor: 000.2.3.2/812/DPUPR-SET/X-2024 dan 000.2.3.2/995/Sekrt-Bappeda/X-2024 tanggal 7 Oktober 2024 dengan jangka waktu perjanjian 7 Oktober 2024 s.d 6 oktober 2029.

Pada Tahun 2013, di Buku Inventaris Sekretariat Daerah terdapat beberapa Aset Tanah yang diragukan keberadaannya sehingga Aset tersebut memerlukan penelusuran. Untuk proses lebih lanjut, karena Tanah tesebut tidak digunakan untuk penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, maka aset tersebut di pindahkan pencatatannya ke Pengelola pada Aset Tetap Tanah berupa 9 (sembilan) bidang tanah yang belum diketahui lokasi fisiknya. Tanah tersebut telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Bukittinggi dalam jangka waktu yang cukup lama dan hingga saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan upaya untuk menelusuri keberadaan fisik tanah tersebut namun belum menemui titik terangnya. Rincian aset tanah yang masih dalam penelusuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.71 Daftar Aset Tanah yang masih dalam Penelusuran

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Asal usul	Nilai	Keterangan
1	*2*	*5*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Tanah Untuk Jalan					187.900.000,00	Lokasi tidak diketahui
2	Tanah kosong	715	1952	Pinang Sabatang Kel Bukit Apit	Eks Jepang	14.300.000,00	Longsor masuk ngarai
3	Tanah kosong	4.740.00	1952	Pinang Sabatang	Pembelian	127.980.000,00	Longsor masuk ngarai

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Asal usul	Nilai	Keterangan
1	*2*	*5*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Kel Bukit Apit			
4	Tanah kosong	430	1956	Campago Guguk Bulek	Pembelian	20.640.000,00	Tidak ditemukan
5	Tanah kosong	28.062.00	1945	Ngarai Bawah	Eks Jepang	31.963.000,00	Dikuasai masyarakat. proses tambahan ganti rugi tidak selesai
6	Tanah kosong	18.866.00	0	Ateh Birugo Kelurahan Birugo	Pembelian	394.639.000,00	Dikuasai masyarakat
7	Tanah kosong	5.642.00	1956	Bukit Campago Kel Campago Guguk Bulek		1.547.014.000,00	Tidak ditemukan
8	Tanah kosong	600	1956	Campago Guguk Bulek	Pembelian	361.088.000,00	Dirjen Pemasyarakatan II
9	Tanah kosong	4.027.00	1956	Bukit Campago Kel Campago GB	Eks Jepang	198.095.000,00	Tidak ditemukan
TOTAL		**63.082.00**				**2.883.619.000,00**	

5.3.1.3.2 Peralatan Dan Mesin

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
440.132.596.412,19	434.804.893.735,80

Nilai Aset Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp440.132.596.412,19. Dibandingkan dengan Tahun 2023 Peralatan dan Mesin tersebut mengalami mutasi bertambah sebesar Rp14.413.905.160,99 dan mutasi berkurang sebesar Rp9.086.202.484,60. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.72 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Akun/ Rekening	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.3.02	**Peralatan dan Mesin**	**440.132.596.412,19**	**434.804.893.735,80**
A	**1.3.02.01**	**Alat Besar**	**22.561.282.876,90**	**22.140.331.876,90**
1	1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	9.415.283.384,00	9.415.283.384,00
2	1.3.02.01.02	Alat Besar Apung	353.149.840,00	353.149.840,00
3	1.3.02.01.03	Alat Bantu	12.792.849.652,90	12.371.898.652.90
B	**1.3.02.02**	**Alat Angkutan**	**93.932.402.677,00**	**92.098.024.747,00**
1	1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	92.646.935.534,00	90.953.132.604,00
2	1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	856.126.143,00	715.551.143,00
3	1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	429.341.000,00	429.341.000,00
C	**1.3.02.03**	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**2.416.670.503,00**	**2.435.722.128,00**
1	1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	574.228.833,00	572.295.658,00
2	1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	284.232.165,00	284.852.165,00
3	1.3.02.03.03	Alat Ukur	1.558.209.505,00	1.578.574.305,00
D	**1.3.02.04**	**Alat Pertanian**	**875.623.004,00**	**868.468.844,00**
1	1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	875.623.004,00	868.468.844,00
E	**1.3.02.05**	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**115.894.937.828,15**	**115.091.654.999,55**
1	1.3.02.05.01	Alat Kantor	39.335.614.771,59	38.753.395.545,59
2	1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	69.512.158.537,56	69.350.197.389,96
3	1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.047.164.519,00	6.988.062.064,00
F	**1.3.02.06**	**Alat Studio. Komunikasi. dan Pemancar**	**12.566.990.431,54**	**12.235.172.608,54**
1	1.3.02.06.01	Alat Studio	8.018.455.565,00	7.690.258.232,00
2	1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	4.162.641.024,71	4.157.745.534,71

No.	Akun/ Rekening	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3	1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	385.893.841,83	387.168.841,83
G	**1.3.02.07**	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**61.288.305.837,21**	**61.497.184.845,71**
1	1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	60.007.573.032,21	60.316.641.540,71
2	1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	1.280.732.805,00	1.180.543.305,00
H	**1.3.02.08**	**Alat Laboratorium**	**29.388.770.404,77**	**28.553.984.161,48**
1	1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	15.964.917.349,00	15.621.900.251,00
2	1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	24.622.000,00	32.118.500,00
3	1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	12.542.342.843,77	11.934.689.198,48
4	1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	71.570.024,00	71.570.024,00
5	1.3.02.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	76.290.000,00	184.678.000,00
6	1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	664.357.380,00	664.357.380,00
7	1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	2.500.000,00	2.500.000,00
8	1.3.02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	42.170.808,00	42.170.808,00
I	**1.3.2.09**	**Alat Persenjataan**	**202.273.400,00**	**202.273.400,00**
1	1.3.2.09.02	Persenjataan Non senjata api	175.670.000,00	175.670.000,00
2	1.3.2.09.04	Alat khusus Kepolisian	26.603.400,00	26.603.400,00
J	**1.3.02.10**	**Komputer**	**82.987.338.959,47**	**81.865.230.634,47**
1	1.3.02.10.01	Komputer Unit	65.759.148.571,30	64.671.395.443,30
2	1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	17.228.190.388,17	17.193.835.191,17
K	**1.3.02.13**	**Alat Produksi. Pengolahan. dan Pemurnian**	**295.721.684,62**	**280.721.684,62**
1	1.3.02.13.01	Sumur	295.721.684,62	280.721.684,62
L	**1.3.02.15**	**Alat Keselamatan Kerja**	1.898.552.888,30	**1.911.532.888,30**
1	1.3.02.15.02	Alat Pelindung	327.255.101,30	327.255.101,30
2	1.3.02.15.03	Alat SAR	1.553.514.387,00	1.566.494.387,00
3	1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	17.783.400,00	17.783.400,00
M	**1.3.02.17**	**Peralatan Proses/ Produksi**	**57.291.750,00**	**55.441.750,00**
	1.3.02.17.01	Unit Peralatan/ Proses Produksi	57.291.750,00	55.441.750,00
N	**1.3.02.18**	**Rambu-rambu**	**14.484.765.040,23**	**14.287.480.040,23**
1	1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	14.484.765.040,23	14.287.480.040,23
O	**1.3.02.19**	**Peralatan Olahraga**	**1.281.669.127,00**	**1.281.669.127,00**
1	1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	1.281.669.127,00	1.281.669.127,00

Penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Saldo Awal 1 Januari 2024 **Rp 434.804.893.735,80**

Penambahan Peralatan Mesin:

- Belanja Modal (LRA) Rp 12.261.224.480,70
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa Rp 62.787.550,00
- Mutasi dari SKPD Lain (BAST) Rp 1.629.969.875,00
- Hibah dari Pihak ke 3 Rp 105.000.000,00
- Koreksi Kurang Catat Hibah Rp 171.971.079,00
- Koreksi Pencatatan Rp 0,00
- Reklas Antar Kelompok Barang (Masuk) Rp 179.952.176,29
- Hasil Penilaian Kurang Catat Rp 3.000.000,00

Jumlah Penambahan **Rp 14.413.905.160,99**

Pengurangan Peralatan Mesin:			
-	Penghapusan berdasarkan SK Wako	Rp	2.550.292.863,00
-	Mutasi ke SKPD Lain (BAST)	Rp	1.629.969.875,00
-	Koreksi Pencatatan	Rp	0,00
-	Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar)	Rp	4.539.312.005,50
-	Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi (Ekstrakomtabel)	Rp	307.821.024,50
-	Belanja Modal Reklas ke Barang Pakai Habis	Rp	58.806.716,60
-	Belanja Modal Reklas ke Gol. Lain (Pemeliharaan)	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan		**Rp**	**9.086.202.484,60**
Saldo akhir per 31 Desember 2024		**Rp**	**440.132.596.412,19**

Rincian penambahan dari Peralatan dan Mesin dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin dari Belanja Modal (LRA)

   Penambahan Aset dari Pengadaan merupakan seluruh Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemko Bukittinggi. Total Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Aggaran 2024 adalah sebesar Rp12.261.224.480,70.

2. Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin berasal dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa

   Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp62.787.550,00 merupakan Belanja pada SKPD yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa yang menambah nilai Aset SKPD yang bersangkutan. Ada beberapa SKPD yang terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menambah Nilai Aset, diantaranya sebagai berikut:

   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp54.792.550.00 berupa:
      - Alat Peraga Sekolah bidang kesenian sebesar Rp34.269.000,00.
      - CCTV sebesar Rp14.579.850,00
      - Router sebesar Rp700.000,00
      - Gordyn/ kain kray sebesar Rp5.243.700,00

   b. Badan Keuangan sebesar Rp4.995.000,00 adalah belanja pemeliharaan komputer jaringan yang menjadi Aset tetap berupa pembelian Router.

   c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp3.000.000,00 adalah Belanja Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor yang menjadi aset berupa pengadaan Pompa air 2 (dua) unit serta pengadaan Tangki air.

3. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa mutasi dari SKPD lain.

   Penambahan Peralatan dan Mesin berupa mutasi dari SKPD lain sebesar Rp1.629.969.875,00 adalah penambahan yang berasal dari mutasi masuk antar

SKPD. Berikut rincian Penambahan Aset Peralatan Mesin berupa mutasi masuk antar SKPD:

a. Sekretariat Daerah sebesar Rp679.920.000,00 terdiri dari mutasi masuk Kendaraan bermotor penumpang (minibus) yang berasal dari Sekretariat DPRD sebesar Rp433.200.000,00 dan dari Kantor Satpol PP sebesar Rp246.720.000,00.

b. Dinas Kesehatan sebesar Rp130.000.000,00 berupa mutasi masuk Kendaraan bermotor penumpang (minibus) dari Sekretariat Daerah.

c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp194.416.500,00 berupa mutasi Alat rumah Tangga Lainnya (panggung) dari Dinas Periwisata.

d. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp388.033.375,00 terdiri dari mutasi masuk dari Dinas Pariwisata berupa:

   - Alat rumah tangga lainnya sebesar Rp95.675.000,00.
   - Meubeler sebesar Rp12.500.000,00
   - Alat Kantor Lainnya sebesar Rp167.643.375,00
   - Alat angkutan darat bermotor lainnya (betor) sebesar Rp35.000.000,00
   - Pompa sebesar Rp7.215.000,00

   Serta mutasi masuk Alat angkutan darat bermotor lainnya (bentor) sebesar Rp70.000.000,00 dari Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp237.600.000,00 berupa mutasi Kendaraan bermotor penumpang (minibus) dari Sekretariat Daerah.

4. Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin dari Hibah Pihak ke tiga

   Penambahan aset yang berasal dari hibah pihak ketiga yakni Hibah CSR dari Bank BNI sebesar Rp105.000.000,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa 50 (lima puluh) set meja makan, kursi dan payung di Street Food Stasiun Lambuang.

5. Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin dari Kurang Catat Hibah Pihak ketiga

   Penambahan aset ini adalah hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2022 sebesar Rp171.971.079,00 ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa:

   - Peralatan personal komputer sebanyak 4 (empat) unit sebesar Rp63.744.192,00
   - Digital Library Station (DLS) sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp14.940.045,00
   - Televisi LED sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp7.968.135,00
   - Unit Power Supply sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp2.988.009,00
   - Meubeler dan Jaringan Komunikasi sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp62.410.638,00.

- Tablet Android sebanyak 5 (lima) unit sebesar Rp19.920.060,00

6. Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin dari reklas antar kelompok barang masuk.

   Penambahan Aset dari Reklas antar kelompok Barang Masuk sebesar Rp179.952.176,29 merupakan mutasi antar kelompok rekening barang yang disebabkan oleh kesalahan dalam penganggaran Belanjanya, reklas masuk antar kelompok rekening barang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

   a. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp7.000.000,00 adalah mutasi masuk (ubah konsisi) dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Peralatan Mesin berupa Mobil Pickup.

   b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp172.952.176,29 adalah mutasi masuk dari belanja gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin berupa alat peraga praktek sekolah.

7. Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin dari hasil penilaian kurang catat

   Penambahan aset Peralatan Mesin dari hasil penilaian kurang catat sebesar Rp3.000.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa bendera panjang tahun perolehan 2021.

Selanjutnya Rincian pengurangan dari Peralatan dan Mesin dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin dari Penghapusan Peralatan dan Mesin.

   Pengurangan aset Berdasarkan SK Penghapusan Tahun 2024 sebesar Rp2.550.292.863,00 merupakan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin SKPD yang berasal dari Proses penjualan, pemusnahan atau pun sebab kondisi lainnya. Rincian Penghapusan pada SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

   a. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.830.419.363,00 berupa Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin melalui proses penjualan.

   b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp560.360.100 yang terdiri dari:

      - Penghapusan Aset Tetap Peralatan Mesin melalui proses penjualan sebesar Rp326.079.600,00.
      - Penghapusan Aset Tetap Peralatan Mesin melalui Pemusnahan sebesar Rp234.280.500,00.

   c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp123.949.400,00 berupa penghapusan aset peralatan mesin melalui proses penjualan.

   d. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp35.564.000,00 berupa penghapusan aset peralatan mesin melalui proses penjualan.

2. Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin berasal dari Mutasi ke SKPD lain.

   Pengurangan Aset Peralatan Mesin berasal dari Mutasi ke SKPD lain merupakan mutasi keluar antar SKPD. Mutasi keluar ke SKPD lain sama dengan Mutasi

Masuk ke SKPD lain yakni sebesar Rp1.629.969.875,00. Berikut pengurangan aset peralatan mesin sebab mutasi ke SKPD lain sebagai berikut:

a. Sekretariat DPRD sebesar Rp670.800.000,00 berupa mutasi Kendaraan bermotor penumpang (minibus) ke Sekretariat Daerah yang terdiri dari Toyota Fortuner Rp433.200.000,00 dan Toyota Innova Rp237.600.000,00.

b. Sekretariat Daerah sebesar Rp 130.000.000,00 berupa mutasi Kendaraan bermotor penumpang (minibus) ke Dinas Kesehatan merk Innova BA 1481 LO.

c. Dinas Pariwisata sebesar Rp512.449.875,00 berupa mutasi peralatan dan mesin ke Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp318.033.375,00 terdiri dari:

   - Alat rumah tangga lainnya sebesar Rp95.675.000,00.
   - Meubeler sebesar Rp12.500.000,00
   - Alat Kantor Lainnya sebesar Rp167.643.375,00
   - Alat angkutan darat bermotor lainnya (betor) sebesar Rp35.000.000,00
   - Pompa sebesar Rp7.215.000,00

   Serta mutasi peralatan dan Mesin sebesar Rp194.416.500,00 berupa mutasi Alat rumah Tangga Lainnya (panggung) ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

d. Kantor Satpol PP sebesar Rp246.720.000,00 berupa mutasi Kendaraan bermotor penumpang (minibus) merk Ford Escape ke Sekretariat Daerah.

e. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar Rp70.000.000,00 berupa mutasi keluar Alat angkutan darat bermotor lainnya (betor) ke Dinas Lingkungan Hidup.

3. Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin karena reklas antar Kelompok Barang.

Pengurangan aset tetap peralatan dan Mesin karena reklas antar kelompok barang sebesar Rp4.539.312.005,50 merupakan mutasi keluar antar kelompok rekening barang yang disebabkan oleh kesalahan dalam penganggaran rekening belanjanya, atau ubah kondisi dari Aset tetap ke aset lainnya. Reklas keluar antar kelompok rekening barang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp62.175.600,00 berupa reklas dari Aset Tetap peralatan mesin (Laptop dan printer) ke aset Lainnya dikarenakan konsisi rusak berat/ usang.

b. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.794.293.014,50 berupa reklas dari Aset tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya karena Ubah Kondisi/ rusak berat.

c. Dinas P3APPKB sebesar Rp219.087.000,00 berupa reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang ke Aset Lainnya karena rusak berat/ usang.

d. Inspektorat Daerah sebesar Rp143.782.037,00 berupa reklas dari aset tetap Peralatan dan Mesin (alat rumah tangga, personal komputer dan peralatan personal komputer) ke Aset lainya karena ubah kondisi (rusak berat).

e. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp296.385.100,00 berupa reklas dari aset tetap peralatan mesin (alat angkutan darat bermotor, alat studio video dan film, dan peralatan personal komputer) ke aset lainya karena ubah kondisi (rusak berat).

f. Kecamatan ABTB sebesar Rp23.589.254,00 berupa aset tetap peralatan mesin (alat kantor, alat rumah tangga, serta peralatan personal komputer) yang reklas ke Aset lainnya karena ubah kondisi (rusak berat).

4. Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin karena berasal dari belanja modal yang reklas ke aset ektrakomtabel.

   Pengurangan Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal di tahun 2024 yang menjadi Aset Non Kapitalisasi (Ekstrakomtabel) adalah sebesar Rp307.821.024,50 karena tidak memenuhi jumlah nilai kapitalisasi Asetnya. Penjelasan dan rincian Belanja Modal menjadi Aset Non Kapitalisasi adalah sebagai berikut:

   a. Dinas PUPR sebesar Rp1.625.000,00 berupa belanja modal meteran gulung 100 meter sebanyak 5 (lima) buah.

   b. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp477.400,00 berupa belanja modal meteran ukur panjang 50 meter.

   c. Dinas Kesehatan sebesar Rp28.202.351,00 berupa belanja modal Peralatan mesin (Alat kedokteran gigi, alat kedokteran umum,alat kesehatan kebidanan, Alat kedokteran keluarga berencana, meubeler, dan alat dapur).

   d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp270.860.673,50 berupa belanja modal Peralatan mesin yang reklas ke aset ektrakomtabel.

   e. Dinas Pariwisata sebesar Rp1.060.000,00 berupa belanja modal peralatan dan mesin (kipas angin 3 unit dan kalkulator 1 unit) yang reklas ke aset ektrakomtabel.

   f. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp480.000,00 berupa belanja modal peralatan mesin (kompor gas) sebanyak 1 (satu).

   g. Kecamatan Guguk Panjang sebesar Rp720.000,00 berupa belanja modal peralatan mesin (marawa) sebanyak 6 helai.

   h. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar Rp4.395.600,00 berupa belanja modal peralatan mesin (marawa) sebanyak 22 helai.

5. Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin berasal dari belanja modal yang reklas ke Persediaan.

   Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin menjadi Persediaan adalah sebesar Rp58.806.716,00 merupakan pengurangan Aset tetap dari Belanja Modal menjadi barang Persediaan. Penjelasan dan rincian Pengurangan aset dari Belanja Modal menjadi persediaan adalah sebagai berikut:

   a. Sekretariat DPRD sebesar Rp19.425.000,00 berupa belanja modal Alat kantor lainnya (logo HUT RI) sebanyak 1 unit.

b. Sekretariat Daerah sebesar Rp14.985.000,00 berupa belanja modal Alat kantor lainnya (logo HUT RI) sebanyak 1 unit.

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp24.396.716,60 berupa belanja modal Alat komunikasi Lainnya (kabel) dan belanja alat Dapur (cangkir, baki, Gelas) yang reklas ke persediaan.

Terdapat Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain dan tidak dalam penguasaan Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan akhir tahun 2024, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.73 Daftar Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain Tahun 2024

NO	URAIAN	INSTANSI PEMINJAM PAKAI	TANGGAL	NOMOR PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	BERAKHIR
1	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1567 L	Kejaksaan Negeri Bukittinggi	10 September 2020	020/240/Umperl/XII-2020 B-1254/L.3.11/Cpl/9/2020	5 Tahun	10 Sept 2020 s/d 09 September 2025
2	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1121 L	Pengadilan Agama Bukittinggi Klas I.B	10 September 2020	020/238/Umperl/XII-2020 W3.A4/2335/PL.01/XII-2019	5 Tahun	10 Sept 2020 s/d 09 September 2025
3	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1123 L	Kodim 0304 / Agam	10 September 2020	020/239/Umperl/XII-2020 B/983/XI/2020	5 Tahun	10 Sept 2020 s/d 09 September 2025
4	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1537 L (Eks.12 L)"	Sub Denpon 1/4-3 Bukittinggi	15 September 2020	030/02/Umum-PP/IX-2020	5 Tahun	16 September 2022 s/d 15 September 2027
5	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1590 LO	Kepolisaian Resor Bukittinggi	01 Februari 2021	030/01/Umum-PP/II-2023	5 Tahun	01 Februari 2021 s/d 30 Januari 2026
6	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 2743 LG	Kodim 0304 / Agam	15 September 2020	030/02/Umum-PP/II-2021	5 Tahun	22 Februari 2021 s/d 21 Februari 2026
7	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1545 L	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	01 April 2021	030/02/Umum-PP/II-2021	5 Tahun	01 April 2021 s/d 30 Maret 2026
8	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1320 L	Kepolisaian Resor Bukittinggi	10 Januari 2022	030/01/Umum-PP/I-2022	5 Tahun	10 Januari 2022 s/d 9 Januari 2027
9	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1520 L	Kepolisaian Resor Bukittinggi	13 Maret 2023	030/01/Umum-PP/III-2023 B/119/III/2023/Reskrim"	5 Tahun	13 Maret 2023 s/d 12 Maret 2028
10	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1560 L	Pengadilan Negeri Klas I.B Bukittinggi	13 April 2023	030/02/Umum-PP/IV-2023 W3.U2/01/UM-PP/IV/2023	5 Tahun	13 Maret 2023 s/d 12 Maret 2028
11	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1048 L	Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Bukittinggi	25 March 2024	030/01/Umum-PP/III-2024 W3.PAS.PAB.2-883.PB.04.a Tahun 2024	5 Tahun	25 Maret 2024 s/d 24 Maret 2029
12	Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1755 L (Eks.BA.58L)	Kejaksaan Negeri Bukittinggi	27 September 2024	020/373/Umum/IX-2024	5 Tahun	27 september /2024 s/d 26 September 2029

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
1.075.794.578.722,43	**1.050.671.756.080,44**

Nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 adalah Rp1.075.794.578.722,43. Selama Tahun 2024 terdapat penambahan sebesar Rp53.322.982.701,85 dan pengurangan sebesar Rp28.200.160.059,86 dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 adalah Rp1.050.671.756.080,44. Rinciannya dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Tabel 5.74 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Akun/ Rekening	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.3.03	**Gedung dan Bangunan**	**1.075.794.578.722,43**	**1.050.671.756.080,44**
1	**1.3.03.01**	**Bangunan Gedung**	**1.033.932.076.838,50**	**1.009.558.971.393,59**
	1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	976.171.266.380,79	951.671.478.935,88
	1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	57.760.810.457,71	57.887.492.457,71
2	**1.3.03.02**	**Monumen**	**27.307.393.155,19**	**27.307.393.155,19**
	1.3.03.02.01	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	27.307.393.155,19	27.307.393.155,19
3	**1.3.03.03**	**Bangunan Menara**	**115.989.000,00**	**115.989.000,00**
	1.3.03.03.01	Bangunan Menara Perambuan	115.989.000,00	115.989.000,00
4	**1.3.03.04**	**Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**14.439.119.728,74**	**13.689.402.531,66**
	1.3.03.04.01	Tugu/ Tanda Batas	14.439.119.728,74	13.689.402.531,66

Penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Saldo Awal 1 Januari 2024			**Rp1.050.671.756.080,44**
Penambahan karena:			
- Belanja Modal (LRA)	Rp	31.435.241.904,22	
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	16.650.000,00	
- Mutasi dari SKPD Lain (BAST)	Rp	21.666.493.466,63	
- Hibah dari pihak ke 3	Rp	0,00	
- Koreksi Pencatatan	Rp	0,00	
- Reklas Antar Kelompok Barang (Masuk)	Rp	176.277.833,00	
- Hasil Penilaian Kurang Catat	Rp	28.319.498,00	
Jumlah Penambahan	**Rp**	**53.322.982.701,85**	
Pengurangan karena:			
- Penghapusan berdasarkan SK Wako	Rp	6.117.242.834,54	
- Mutasi ke SKPD Lain (BAST)	Rp	21.666.493.466,63	
- Koreksi Pencatatan	Rp	0,00	
- Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar)	Rp	416.423.758,69	
- Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi (Ekstrakomptabel)	Rp	0,00	
- Belanja Modal Reklas ke Persediaan	Rp	0,00	
- Belanja Modal Reklas ke Pemeliharaan	Rp	0,00	
- **Jumlah Pengurangan**	**Rp**	**28.200.160.059,86**	
Saldo akhir per 31 Desember 2024			**Rp1.075.794.578.722,43**

Berikut rincian dari Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

1. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal (LRA) tahun 2024 sebesar Rp31.435.241.904,22 dapat dijelaskan sebagai berikut;
   a. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp291.631.769,08.
   b. Dinas Kesehatan sebesar Rp20.819.899.528,58
   c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp9.689.048.160,61.
   d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp199.682.093,83
   e. Dinas Pariwisata sebesar Rp414.980.352,12.
   f. Kecamatan Guguk Panjang sebesar Rp20.000.000,00
2. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa.

   Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa terdapat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp16.650.000,00 berupa belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan/ pengadaan dinding sekat alumunium ACP dan Kaca sesuai SPK nomor: 28/PPTK/ Disperperin/VII/2024.
3. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari mutasi dari SKPD lain

   Penambahan Gedung dan Bangunan berupa mutasi dari SKPD lain sebesar Rp21.666.493.466,63 adalah penambahan yang berasal dari mutasi masuk antar SKPD. Berikut rincian Penambahan Aset gedung dan bangunan berupa mutasi masuk antar SKPD yang terdiri dari:
   a. Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp485.154.687,20 berupa mutasi bangunan Eks.Kantor kelurahan Pakan Kurai dari Kecamatan Guguk Panjang.
   b. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp21.181.338.779,43 merupakan mutasi dari Dinas Pariwisata berupa:
      - Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen sebesar Rp4.994.676.832,00
      - Taman Permanen sebesar Rp 86.180.583,43
      - Tugu Peringatan Lainnya sebesar Rp 1.504.481.196,00
      - Tugu Jam Gadang sebesar Rp 14.596.000.168,00
4. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari reklas antar kelompok barang (masuk).

   Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklas antar kelompok barang sebesar Rp176.277.833,00 merupakan penambahan dari kelompok barang Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang mana pengerjaan fisiknya telah selesai di Tahun 2024 ataupun dari Belanja Lainya adalah sebagai berikut:

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp62.999.841,00 berupa belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasiyang reklas ke Bangunan (pembuatan Handrail).

b. Dinas Kesehatan sebesar Rp113.277.992,00 berupa KDP tahun lalu yang telah selesai pengerjaannya dan reklas Gedung dan Bangunan Puskesmas Birugo Bukittinggi.

5. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari Hasil Penilaian kurang catat.

   Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari Hasil Penilaian kurang catat terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp28.319.498,00 berupa perencanaan 20% Puskesmas Birugo, dimana telah selesainya fisik bangunan tapi belum dibayarkan perencanaan 20% untuk tahun anggaran 2024 sehingga di akui sebagai hutang dan dianggarakan kembali tahun 2025 untuk pembayarannya sesuai Telaahan Staf Dinas Kesehatan Nomor: 400-7/78/DKK-PSDK/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024.

Selanjutnya untuk pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Penghapusan.

   Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Penghapusan sebesar Rp6.117.242.834,54 merupakan pengurangan Aset SKPD yang berasal dari penjualan, pemusnahan atau pun sebab kondisi lainnya. Rincian Penghapusan Aset Tetap Gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

   a. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.707.923.426,54 yang terdiri dari Penghapusan Bangunan Klinik/ Puskesmas Guguk Panjang dengan proses penjualan senilai Rp1.169.234.980,00 dan penghapusan Laboratorium Puskesmas Guguk Panjang senilai Rp538.688.446,00 sesuai SK Penghapusan Nomor: 188.46/17/PBMD/2024.

   b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp933.594.634,53 berupa penghapusan bangunan gedung kantor permanen dengan proses penjualan yang terdiri dari:

      - SD 05 Puhun Pintu Kabun senilai Rp217.430.461,77 berupa ruang Kepsek dan Guru sesuai SK penghapusan nomor: 188.46/19/PBMD/2024.
      - SD 07 Teladan senilai Rp120.738.539,41 berupa ruang kelas sesuai SK penghapusan nomor: 188.46/21/PBMD/2024.
      - SMPN 6 senilai Rp144.006.094,39 berupa bangunan 6 ruang kelas tidak bertingkat sesuai SK penghapusan nomor: 188.46/20/PBMD/2024.
      - SDN 13 Kubu Gulai Bancah senilai Rp419.099.043,68 berupa bangunan sekolah sesuai SK penghapusan nomor: 188.46/15/PBMD/2024.
      - SMPN 6 senilai Rp26.500.000,00 berupa bangunan tempat kerja lainnya sesuai SK penghapusan nomor: 188.46/20/PBMD/2024.

c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rp.3.475.724.773,47 berupa Penghapusan gedung dan Bangunan yang terdiri dari:

- Bangunan gedung pertokoan/koperasi/Pasar Semi Permanen (pasar penampungan) senilai Rp3.355.579.773,47 sesuai SK penghapusan nomor: 188.46/1/PBMD/2024.
- Pagar Permanen senilai Rp120.145.000,00 sesuai SK penghapusan nomor: 188.46/22/PBMD/2024.

2. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Mutasi Ke SKPD Lain

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena mutasi ke SKPD Lain (mutasi antar SKPD keluar) sebesar Rp21.666.493.466,63 terdiri dari:

a. Kecamatan Guguk Panjang sebesar Rp485.154.687,20 berupa mutasi bangunan Eks.Kantor kelurahan Pakan Kurai ke Pengelola Barang Milik Daerah.

b. Dinas Pariwisata sebesar Rp21.181.338.779,43 merupakan mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup berupa:

- Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen sebesar Rp4.994.676.832,00
- Taman Permanen sebesar Rp 86.180.583,43
- Tugu Peringatan Lainnya sebesar Rp 1.504.481.196,00
- Tugu Jam Gadang sebesar Rp 14.596.000.168,00

3. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklas antar kelompok barang (keluar).

Pengurangan karena reklas antar kelompok barang (keluar) sebesar Rp416.423.75c8,69 merupakan mutasi belanja modal Gedung dan Bangunan ke kelompok rekening lainnya sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan sebesar Rp126.682.000,00 merupakan ubah kondisi dari Aset tetap gedung dan Bangunan ke Aset lain-lain (Rusak berat).

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp273.091.758,69 terdiri dari belanja modal gedung dan bangunan yang reklas ke Peralatan mesin sebesar Rp172.952.176,29 dan reklas ke KDP sebesar Rp100.139.582,40.

c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp16.650.000,00 berupa Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung yang dikapitalisasi yang reklas ke Aset Ektrakomptabel.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2024 Rp 726.828.698.866,68	Tahun 2023 Rp 693.238.082.359,11

Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 adalah sebesar Rp726.828.698.866,68. Selama Tahun 2024 terdapat penambahan sebesar Rp34.361.871.624,85 dan pengurangan sebesar

Rp771.255.117,28 dibandingkan dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp693.238.082.359,11. Rinciannya dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Tabel 5.75 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

No.	Rekening	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.3.04	**Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**726.828.698.866,68**	**693.238.082.359,11**
A	**1.3.04.01**	**Jalan dan Jembatan**	**483.256.527.604,30**	465.108.288.844,58
1	1.3.04.01.01	Jalan	467.317.441.005,26	449.169.202.245,54
2	1.3.04.01.02	Jembatan	15.939.086.599,04	15.939.086.599,04
B	**1.3.04.02**	**Bangunan Air**	**198.500.688.078,16**	**198.058.691.190,77**
1	1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	51.641.866.070,35	51.641.866.070,35
2	1.3.04.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	9.663.585.164,19	9.663.585.164,19
3	1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	92.747.337.179,34	92.567.259.372,95
4	1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.839.049.000,00	1.839.049.000,00
5	1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	14.902.374.733,67	14.902.374.733,67
6	1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	27.706.475.930,61	27.444.556.849,61
C	**1.3.04.03**	**Instalasi**	**22.085.294.377,17**	**7.084.913.516,71**
1	1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.281.205.606,03	2.281.205.606,03
2	1.3.04.03.02	Instalasi Air Kotor	4.435.427.738,68	3.991.741.110,68
3	1.3.04.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	11.182.972.306,46	758.621.800,00
4	1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	53.345.000,00	53.345.000,00
5	1.3.04.03.10	Instalasi Lain	4.132.343.726,00	0
D	**1.3.04.04**	**Jaringan**	**22.986.188.807,05**	**22.986.188.807,05**
1	1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	6.293.363.054,00	6.293.363.054,00
2	1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	16.692.825.753,05	16.692.825.753,05

Penambahan dan pengurangan jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Saldo Awal 1 Januari 2024	**Rp**	**693.238.082.359,11**
Mutasi bertambah:		
- Belanja Modal (LRA)	Rp	18.357.697.907,85
- Mutasi dari SKPD lain	Rp.	79.560.000,00
- Hibah dari pihak ke 3	Rp	14.006.187.317,00
- Reklas Antar Kelompok Barang	Rp	1.918.426.400,00
- Hasil Penilaian Kurang Catat	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Bertambah	**Rp**	**34.361.871.624,85**
Mutasi berkurang:		
- Mutasi ke SKPD lain	Rp	79.560.000,00
- Koreksi Pencatatan tahun sebelumnya (pembayaran utang)	Rp	59.998.411,28
- Reklas Antar Kelompok Barang	Rp	631.696.706,00
- Belanja Modal tidak dikapitalisasi (Ekstrakomtabel)	Rp	0,00
Jumlah Mutasi berkurang	**Rp.**	**771.255.117,28**
Saldo per 31 Desember 2024	**Rp.**	**726.828.698.866,68**

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari Belanja Modal (LRA)

   Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari Belanja Modal (LRA) sebesar Rp18.357.697.907,85 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

   a. Dinas PUPR sebesar Rp15.591.123.485,57

   b. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sebesar Rp1.966.574.422,28

   c. Dinas Kesehatan sebesar Rp800.000.000,00

2. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi karena Mutasi dari SKPD lain

   Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi karena mutasi dari SKPD lain sebesar Rp79.560.000,00 berupa Mutasi Sumur gali (SGL) dari Dinas Pariwisata ke Dinas Lingkungan Hidup.

3. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari Hibah Pihak ketiga.

   Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari Hibah Pihak ke 3 sebesar Rp14.006.187.317,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari:

   - Hibah Instalasi Penerangan Jalan Umum dari Kementerian PUPR Republik Indonesia sebesar Rp3.681.519.689,00 sesuai BAST Hibah nomor: PL.06.04-Bb3-PJNW1-SB/363 dan nomor: 000.2.3.2/14BK.06/2024
   - Hibah Jalan Kota Arteri (Jalan Jenderal Sudirman) sebesar Rp10.324.667.628,00 sesuai BAST Hibah nomor: PL.04.0-Bb3-PJNW1-SB/799 dari Kementerian PUPR.

4. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari Reklas antar kelompok barang (masuk)

   Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasiberasal dari Reklas antar kelompok barang (masuk) tahun 2024 adalah sebesar Rp1.918.426.400,00 merupakan reklas dari Aset Tetap Lainnya/ Aset Tetap Renovasi Jalan Jenderal Sudirman.

Selanjutnya untuk pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari:

1. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari Mutasi ke SKPD lain.

   Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasikarena mutasi ke SKPD lain sebesar Rp79.560.000,00 berupa mutasi sumur gali (SGL) dari Dinas Pariwisata ke Dinas Lingkungan Hidup.

2. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari koreksi pencatatan.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari koreksi pencatatan sebesar Rp59.998.411,28 berupa pembayaran hutang jalan yang sudah dicatat sebagai aset tahun 2023.

3. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari reklas antar kelompok barang (keluar).

   Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari reklas antar kelompok barang (keluar) sebesar Rp631.696.706,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

   a. Dinas PUPR sebesar Rp208.934.856,00 adalah reklas dari JJI ke KDP berupa Penyusunan DED Pembangunan IPLT dan Perencanaan Pembangunan Dam Jalan di Tabiang Takuruang Koto Selayan dan Dam Jalan di Pakan Labuah.

   b. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp66.448.478,00 reklas dari JJI ke KDP berupa Perencanaan Pengecoran Jalan Parak Kaco Kel. Pulai Anak Air dan reklas dari JIJ ke gedung bangunan berupa Pagar lain-lainnya.

   c. Dinas Kesehatan sebesar Rp356.313.372,00 berupa reklas dari JJI ke Aset Lain lain karena Ubah Kondisi (rusak berat).

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	30.364.684.504,80	31.350.981.575,80

Nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 adalah Rp30.364.684.504,80. Selama tahun 2024 terdapat penambahan sebesar Rp1.518.035.027,00 dan pengurangan sebesar Rp2.504.332.098,00 dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp31.350.981.575,80. Rincian Aset tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.76 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

No.	Akun/ Rekening	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.3.05	**Aset Tetap Lainnya**	**30.364. 684.504,80**	**31.350.981.575,80**
A	**1.3.05.01**	**Bahan Perpustakaan**	**19.847.914.022,80**	**18.915.845.893,80**
1	1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan tercetak	19.204.353.297,80	18.272.285.168,80
2	1.3.05.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	248.643.290,00	248.643.290,00
3	1.3.05.01.03	Kartografi. Naskah dan Lukisan	389.460.435,00	389.460.435,00
4	1.3.05.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	5.457.000,00	5.457.000,00
B	**1.3.05.02**	**Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga**	**2.144.055.935,00**	**2.143.994.735,00**
1	1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	1.381.626.185,00	1.381.564.985,00
2	1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	761.347.750,00	761.347.750,00
3	1.3.05.02.03	Tanda Penghargaan	1.082.000,00	1.082.000,00
C	**1.3.05.03**	**Hewan**	**1.339.913.000,00**	**1.339.913.000,00**

No.	Akun/ Rekening	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	1.3.05.03.01	Hewan Piaraan	1.339.913.000,00	1.339.913.000,00
D	**1.3.05.04**	**Biota Perairan**	**14.778.667,00**	**14.778.667,00**
1	1.3.05.04.01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	14.778.667,00	14.778.667,00
E	**1.3.05.05**	**Tanaman**	**22.184.800,00**	**22.184.800,00**
1	1.3.05.05.01	Tanaman	22.184.800,00	22.184.800,00
F	1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	**6.995.838.080,00**	**8.914.264.480,00**
1	1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	6.995.838.080,00	8.914.264.480,00

Penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Saldo Awal 1 Januari 2024	**Rp**	**31.350.981.575,80**
Mutasi bertambah:		
- Belanja Modal (LRA)	Rp	1.278.037.927,00
- Mutasi antar SKPD (masuk)	Rp	198.620.000,00
- Kurang Catat Hibah dari Pihak ke 3	Rp	41.377.100,00
Jumlah Mutasi Bertambah	**Rp**	**1.518.035.027,00**
Mutasi berkurang:		
- Penghapusan berdasarkan SK Wako	Rp	0,00
- Mutasi antar SKPD (keluar)	Rp	198.620.000,00
- Reklas Keluar antar kelompok barang	Rp	1.925.039.798,00
- Belanja Modal tidak kapitalisasi	Rp	370.552.300,00
- Belanja Modal reklas ke Persediaan	Rp	10.120.000,00
- Belanja Modal Aset tidak berwujud	Rp.	0,00
Jumlah Mutasi berkurang	**Rp**	**2.504.332.098,00**
Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**30.364.684.504,80**

Rincian penambahan dari Aset Tetap Lainnya dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal (LRA)

   Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal (LRA) sebesar Rp1.278.037.927,00 dapat dirinci sebagai berikut:

   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.274.653.927,00

   b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp3.384.000,00

2. Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal Mutasi antar SKPD Lain (Masuk).

   Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Mutasi antar SKPD (masuk) sebesar Rp198.620.000,00 berupa mutasi Aset Tetap Renovasi dari Dinas Pariwisata ke Dinas Lingkungan Hidup.

3. Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal Mutasi Hibah Pihak ke Tiga.

   Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal Hibah Pihak ke tiga sebesar Rp.41.377.100,00 terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Hibah Buku Siap Layan (Pojok Baca Digital) sebanyak 700 buah buku sesuai dengan BAST Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9071/4.2/PKL.03.07/XI.2022 tanggal 22 Juli 2022.

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengurangan Aset Tetap Lainnya berasal dari Mutasi ke SKPD Lain (keluar).

   Pengurangan Aset Tetap Lainnya berasal dari Mutasi ke SKPD Lain (keluar) sebesar Rp198.620.000,00 berupa mutasi Aset Tetap Renovasi dari Dinas Pariwisata ke Dinas Lingkungan Hidup.

2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya berasal dari reklas antar kelompok barang (keluar)

   Pengurangan Aset Tetap Lainnya berasal dari reklas antar kelompok barang (keluar) sebesar Rp.1.925.039.798,00 yang terdiri dari:

   a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp6.613.398,00 berupa Hibah Buku Siap Layan (Pojok Baca Digital) yang reklas ke Aset Ekstrakomtabel.

   b. Dinas PUPR sebesar Rp1.918.426.400,00 berupa reklas Aset Tetap Lainnya/ Aset Tetap Renovasi Jalan Jenderal Sudirman yang reklas ke Jalan, Jaringan dan Irigasi.

3. Pengurangan Aset Tetap Lainnya berasal dari Belanja Modal Non Kapitalisasi/Ekstrakomtabel.

   Pengurangan Aset Tetap Lainnya berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang reklas ke Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp370.552.300,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Buku Perpustakaan Tercetak.

4. Pengurangan Aset Tetap Lainnya berasal dari Belanja Modal reklas ke Persediaan.

   Pengurangan Aset Tetap Lainnya berasal dari Belanja Modal reklas ke Persediaan sebesar Rp10.120.000,00 terdapat pada:

   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.736.000,00 berupa buku AKM SMP literasi dan Numerasi.
   - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp3.384.000,00 berupa pengadaan Ikan Air tawar (ikan lele dan nila).

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	34.190.928.799,08	33.991.683.715,68

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 adalah Rp34.190.928.799,08. Selama tahun 2024 terdapat penambahan sebesar Rp312.523.075,40 dan pengurangan sebesar Rp113.277.992,00 dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp33.991.683.715,68. Rincian konstruksi dalam pengerjaan sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Akun/ Rekening	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.3.06	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**34.190.928.799,08**	**33.991.683.715,68**
	1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.190.928.799,08	33.991.683.715,68
1	1.3.06.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	0,00	0,00
2	1.3.06.01.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	18.574.200,00	18.574.200,00
3	1.3.06.01.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	31.776.809.664,24	31.789.948.073,84
4	1.3.06.01.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan. Irigasi. dan Jaringan	2.395.544.934,84	2.183.161.441,84
5	1.3.06.01.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya		0,00

Penambahan dan pengurangan konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Saldo Awal 1 Januari 2024	**Rp**	**33.991.683.715,68**
Mutasi bertambah:		
- Reklas Antar Kelompok Barang (masuk)	Rp.	312.523.075,40
Jumlah Mutasi Bertambah	**Rp.**	**312.523.075,40**
Mutasi berkurang:		
- Koreksi pencatatan	Rp	0,00
- Reklas antar kelompok barang	Rp	113.277.992,00
- Belanja Modal tidak kapitalisasi	Rp	0,00
Jumlah Mutasi berkurang	**Rp**	**113.277.992,00**
Saldo per 31 Desember 2024	**Rp**	**34.190.928.799,08**

Rincian penambahan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan KDP berasal dari Reklas antar kelompok barang (masuk).

   Penambahan KDP berasal dari reklas antar kelompok barang (masuk) sebesar Rp312.523.075,00 merupakan penambahan KDP yang berasal dari pengadaan Gedung dan Bangunan maupun Jalan, Jaringan dan Irigasidimana pengerjaannya belum selesai 100%. Rincian penambahan KDP dapat dijelaskan sebagai berikut:

   a. Pengadaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasipada DPUPR yang belum selesai pengerjaannya berupa Penyusunan DED Pembangunan IPLT

serta Perencanaan Pembangunan DAM jalan di Tabiang Takuruang Koto Selayan dan DAM Jalan di Pakan Labuah sebesar Rp208.934.856,00.

b. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp3.448.637,00 adalah reklas dari JIJ ke KDP berupa perencanaan Jalan Khusus Komplek.

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp100.139.582,40 berupa Belanja Modal Gedung yang reklas ke KDP berupa perencanaan termin I 80% pengerjaan gedung sekolah SDN 19 Aur kuning, SDN 12 Puhun Pintu Kabun, SDN 08 Campago Ipuh, SDN 17 Pakan Kurai, SMPN 7, SDN 14 ATTS, SDN 16 Tarok Dipo.

2. Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan berasal dari reklas antar kelompok barang (keluar).

   Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan berasal dari reklas antar kelompok barang (keluar) sebesar Rp113.277.992,00 merupakan pengurangan KDP karena telah selesainya 100% pekerjaan fisik dari Gedung dan Bangunan yang terdapat pada Dinas Kesehatan berupa Bangunan Puskesmas Birugo Bukittinggi.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
(1.061.779.385.074,52)	**(948.614.614.644,00)**

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2024 adalah (Rp1.061.779.385.074,52). Selama tahun 2024 terdapat penambahan sebesar (Rp127.390.519.150,67) dan pengurangan sebesar (Rp14.225.748.720,15) dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 adalah sebesar (Rp948.614.614.644,00).

Tabel 5.78 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Akun/ Rekening	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.3.07	**Akumulasi Penyusutan**	**(1.061.779.385.074,52)**	**(948.614.614.644,00)**
1.	1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(347.379.111.579,41)	(305.618.657.441,00)
2.	1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(206.652.671.642,35)	(170.860.919.320,00)
3.	1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(507.717.127.686,09)	(472.132.693.716,00)
4.	1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(30.474.166,67)	(2.344.167)

Rinciannya dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Saldo Awal 1 Januari 2024	**Rp**	**(948.614.614.644,00)**
Mutasi bertambah:		
- Koreksi Penyusutan saldo awal 2024 dari Simda ke E-BMD	Rp	(21.475.882.779,30)
- Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp	(88.809.021.886,05)
- Mutasi masuk	Rp	(15.179.051.418,65)
- Reklas masuk	Rp	(1.925.513.066,67)
- kurang catat	Rp	(1.050.000,00)
Jumlah Mutasi Bertambah	**Rp**	**(127.390.519.150,67)**

Mutasi berkurang:		
- Koreksi penyusutan saldo awal 2024 dari Simda ke E-BMD	Rp	(1.634.359.510,75)
- Penghapusan	Rp	(4.470.215.370,94)
- Ubah Kondisi ke rusak berat	Rp	(738.163.628,00)
- Mutasi keluar	Rp	(7.382.932.543,00)
- Reklas keluar	Rp	(86.666,67)
- Selisih akumulasi penyusutan karena perbedaan angka dibelakang koma (e-BMD 5 angka dibelakang koma)	Rp	(0,79)
Jumlah Mutasi berkurang	**Rp**	**(14.225.748.720,15)**
Saldo Akhir 31 Desember 2024	**Rp**	**(1.061.779.385.074,52)**

Rincian penambahan Akumulasi Penyusutan selama tahun 2024 dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari koreksi Akumulasi penyusutan saldo awal.

   Penambahan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari koreksi penyusutan saldo awal merupakan penambahan akumulasi penyusutan yang disebabkan karena peralihan atau migrasi Aplikasi Simda BMD ke Aplikasi E-BMD. Penambahan akumulasi penyusutan saldo awal tahun 2024 adalah sebesar (Rp21.475.882.779.30).

Tabel 5.79 Rincian Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan bertambah 2024

No	SKPD	Saldo Awal SIMDA (Rp)	Saldo awal E-BMD (Rp)	Koreksi Bertambah (Rp)
1	Sekretariat Daerah	(41.049.866.097,00)	(41.195.063.829,85)	(145.197.732,85)
2	Dinas Perhubungan	(22.714.093.151,00)	(24.909.994.899,18)	(2.195.901.748,18)
3	Dinas Kesehatan	(77.035.187.615,00)	(79.616.329.746,04)	(2.581.142.131,04)
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(115.942.285.017,00)	(131.119.632.662,16)	(15.177.347.645,16)
5	BPBD	(3.373.215.458,00)	(3.457.629.826,53)	(84.414.368,53)
6	Dinas Sosial	(2.077.013.321,00)	(2.081.013.336,07)	(4.000.015,07)
7	Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan	(12.775.418.644,00)	(12.781.279.440,86)	(5.860.796,86)
8	DP3APPKB	(5.197.177.239,00)	(5.331.637.292,36)	(134.460.053,36)
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(14.933.395.449,00)	(14.936.140.133,63)	(2.744.684,63)
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(38.646.605.025,00)	(39.173.729.513,51)	(527.124.488,51)
11	DPMPTSP	(5.620.764.358,00)	(5.764.454.079,04)	(143.689.721,04)
12	DKUKMTK	(935.633.694,00)	(942.223.254,28)	(6.589.560,28)
13	Badan Keuangan	(10.845.449.906,00)	(10.849.250.206,66)	(3.800.300,66)
14	Inspektorat Daerah	(2.485.172.987,00)	(2.489.635.318,68)	(4.462.331,68)
15	Bappelitbangda	(3.590.305.085,00)	(3.590.972.598,50)	(667.513,50)
16	Dinas Lingkungan Hidup	(21.819.686.979,00)	(21.998.695.341,66)	(179.008.362,66)
17	Dinas Pariwisata	(19.873.372.557,00)	(20.082.907.651,26)	(209.535.094,26)
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	(2.472.952.319,00)	(2.494.994.361,66)	(22.042.042,66)
19	Kantor Satpol PP	(5.725.212.624,00)	(5.745.808.474,00)	(20.595.850,00)

No	SKPD	Saldo Awal SIMDA (Rp)	Saldo awal E-BMD (Rp)	Koreksi Bertambah (Rp)
20	BKPSDM	(2.243.747.543,00)	(2.243.747.565,00)	(22,00)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(3.192.035.918,00)	(3.192.346.176,16)	(310.258,16)
22	Kecamatan Guguk Panjang	(6.110.711.584,00)	(6.128.309.152,38)	(17.597.568,38)
23	Kecamaytan ABTB	(5.705.200.924,00)	(5.714.134.431,50)	(8.933.507,50)
24	Kecamatan MKS	(7.550.712.175,00)	(7.551.169.157,33)	(456.982,33)
	TOTAL			**(21.475.882.779.30)**

2. Penambahan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari Beban Penyusutan tahun berjalan.

   Beban penyusutan merupakan pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu Aset/ Aktiva. Beban penyusutan tahun 2024 sebesar Rp88.809.021.886,05. Rincian beban penyusutan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.80 Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2024

No	SKPD	Beban Penyusutan 2024 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	1.532.596.811,77
2	Sekretariat Daerah	3.797.544.628,51
3	Dinas PUPR	18.861.110.637,91
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	6.078.272.307,64
5	Dinas Perhubungan	2.681.496.566,60
6	Dinas Kesehatan	20.156.669.671,61
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.113.415.996,53
8	BPBD	234.571.881,35
9	Dinas Sosial	99.460.527,90
10	Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan	222.946.265,56
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	229.608.762,65
12	P3APKB	494.324.103,53
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	688.506.987,29
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.973.194.172,83
15	DPMPTSP	1.581.092.175,13
16	DKUKMTK	121.634.858,59
17	Pengelola	379.586.311,00
18	Badan Keuangan	495.955.504,40
19	Inspektorat Daerah	177.440.844,62
20	Bappelitbang	185.084.164,67
21	Dinas Lingkungan Hidup	3.536.888.884,80
22	Dinas Pariwisata	2.012.285.324,89
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	328.704.646,82
24	Bankesbangpol	85.000.900,29
25	Kantor Satpol PP	510.817.023,00
26	BKPSDM	134.048.951,17
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	378.814.658,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	880.680.722,09
29	Kecamatan Guguk Panjang	676.117.304,88
30	Kecamatan ABTB	505.117.415,33
31	Kecamatan MKS	656.032.874,69
	TOTAL	**88.809.021.886,05**

3. Penambahan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari Mutasi masuk akumulasi Penyusutan.

   Tahun 2024 terdapat penambahan akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari Mutasi masuk akumulasi Penyusutan sebesar (Rp15.179.138.085,32). Mutasi akumulasi penyusutan merupakan penambahan akumulasi penyusutan karena perpindahan (mutasi) Aset antar SKPD (masuk) ataupun sebab lainnya (hibah). Berikut rincian mutasi penyusutan antar SKPD (masuk):

   a. Sekretariat Daerah sebesar (Rp679.920.000,00) berupa mutasi akumulasi penyusutan kendaraan bermotor penumpang (minibus) dari Kantor Satpol PP dan Sekretariat DPRD.

   b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Rp11.735.932.033,65) berupa Hibah Aset Penerangan Jalan Umum dan Jalan Arteri Nasional.

   c. Dinas Kesehatan sebesar (Rp130.000.000,00) berupa Mutasi akumulasi penyusutan kendaraan bermotor penumpang (minibus) dari sekretariat Daerah.

   d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar (Rp42.123.575,00) berupa mutasi akumulasi penyusutan peralatan mesin (panggung) dari Dinas Pariwisata.

   e. Pengelola BMD sebesar (Rp128.542.274,00) beerupa mutasi akumulasi penyusutan bangunan gedung kantor Permanen (eks.Kantor Lurah Pakan Kurai) dari Kecamatan Guguk Panjang.

   f. Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp2.224.933.536,00) terdiri dari:

      - Mutasi akumulasi penyusutan peralatan mesin sebesar (Rp313.199.275,00) dari Kecamatan MKS dan Dinas Pariwisata.
      - Mutasi akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp1.908.861.261,00) dari Dinas Pariwisata.
      - Mutasi akumulasi penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi (sumur gali) sebesar (Rp2.873.000,00) dari Dinas Pariwisata.

   g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar (Rp237.600.000,00) berupa mutasi akumulasi penyusutan kendaraan bermotor penumpang dari Sekretariat Daerah.

4. Penambahan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari reklas masuk akumulasi Penyusutan.

   Penambahan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari reklas masuk akumulasi Penyusutan sebesar (Rp1.925.513.066,67) terdapat pada:

   - Dinas PUPR berupa reklas antar rekening dari Aset Tetap Lainnya/ Aset Tetap Renovasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang akumulasi penyusutannya sebesar (Rp1.918.426.400,00).
   - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar (Rp.7.000.000,00) adalah reklas (ubah kondisi) dari Aset Lainnya ke Aset Tetap berupa Alat angkutan barang lainya.

- Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar (Rp.86.666,67) berupa reklas antar rekening dari peralatan Studio film ke Peralatan Personal komputer.

5. Penambahan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari kurang catat akumulasi Penyusutan.

   Penambahan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari kurang catat akumulasi Penyusutan sebesar (Rp1.050.000,00) berupa kurang catat bendera panjang.

Selanjutnya rincian pengurangan Akumulasi Penyusutan selama tahun 2024 dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pengurangan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari koreksi Akumulasi penyusutan saldo awal.

   Pengurangan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari koreksi penyusutan saldo awal merupakan pengurangan akumulasi penyusutan yang disebabkan karena peralihan atau migrasi Aplikasi Simda BMD ke Aplikasi E-BMD. Pengurangan akumulasi penyusutan Saldo awal sebesar (Rp1.634.359.510,75). Rincian koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyusutan sebagai berikut:

Tabel 5.81 Rincian Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan berkurang 2024

No	SKPD	Saldo Awal SIMDA (Rp)	Saldo awal E-BMD (Rp)	Koreksi Bertambah (Rp)
1	Sekretariat DPRD	(15.913.052.613,00)	(15.900.458.330,59)	(12.594.282,41)
2	Dinas PUPR	(440.879.225.209,00)	(439.448.302.575,85)	(1.430.922.633,15)
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(39.325.541.747,00)	(39.139.712.017,55)	(185.829.729,45)
4	Disdukcapil	(4.776.428.389,00)	(4.771.415.552,20)	(5.012.836,80)
5	Pengelola BMD	(6.284.997.012,00)	(6.284.997.011,00)	(1,00)
6	Bankesbangpol	(784.273.232,00)	(784.273.215,96)	(16,04)
7	Diskominfo	(8.735.880.778,00)	(8.735.880.766,10)	(11,90)
	TOTAL			(1.634.359.510,75)

2. Pengurangan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari Penghapusan Aset Tetap

   Tahun 2024 terdapat pengurangan Aset Tetap yang berasal dari penghapusan sebesar Rp8.667.535.697,54 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar (Rp4.470.215.370,94) yang terdapat pada:

   a. Sekretariat Daerah sebesar (Rp1.830.419.363,00) berupa penghapusan Peralatan mesin melalui proses penjualan.

   b. Dinas Kesehatan sebesar (Rp685.156.554,00) berupa penghapusan Klinik/ Puskesmas Guguk Panjang dengan proses penjualan dan penghapusan Laboratorium Puskesmas Guguk Panjang sesuai SK Penghapusan Nomor: 188.46/17/PBMD/2024.

   c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp1.390.654.306,12) yang terdiri dari:

- Penghapusan Aset Tetap Peralatan Mesin melalui proses penjualan sebesar (Rp326.079.600,00) serta Penghapusan Aset Tetap Peralatan Mesin melalui Pemusnahan sebesar (Rp234.280.500,00).
- Penghapusan bangunan gedung kantor permanen sebesar (Rp830.294.206,12) melalui proses penjualan.

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar (Rp123.949.400,00) berupa penghapusan aset peralatan mesin melalui proses penjualan.

e. Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp35.564.000,00) berupa penghapusan aset peralatan mesin melalui proses penjualan.

f. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar (Rp404.471.747,82) berupa Penghapusan gedung pertokoan/ koperasi/ pasar semi permanen dan penghapusan pagar kantor melalui proses penjualan.

3. Pengurangan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari Ubah Kondisi ke aset Lainnya (rusak berat).

   Pengurangan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari ubah kondisi Aset tetap ke aset lainnya (rusak berat) sebesar (Rp738.163.628,00) yang terdapat pada:

   a. Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman sebesar Rp62.175.600,00 dengan nilai akumulasi penyusutan (Rp58.677.683,00).

   b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp219.087.000,00 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar (Rp219.087.000,00).

   c. Inspektorat Daerah sebesar Rp143.782.037,00 berupa reklas dari aset tetap Peralatan dan Mesin (alat rumah tangga, personal komputer dan peralatan personal komputer) ke Aset lainya karena ubah kondisi (rusak berat) dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar (Rp143.331.355,00).

   d. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp296.385.100,00 berupa reklas dari aset tetap peralatan mesin (alat angkutan darat bermotor, alat studio video dan film, dan peralatan personal komputer) ke aset lainya karena ubah kondisi (rusak berat) dengan nilai Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp296.385.100,00).

   e. Kecamatan ABTB sebesar Rp23.589.254,00 berupa aset tetap peralatan mesin (alat kantor, alat rumah tangga, serta peralatan personal komputer) yang reklas ke Aset lainnya karena ubah kondisi (rusak berat) dengan nilai Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp20.682.490,00).

4. Pengurangan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari Mutasi Keluar Akumulasi Penyusutan.

   Pengurangan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari Mutasi Keluar Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp7.382.923.543,00) terdapat pada:

   a. Sekretariat DPRD sebesar (Rp670.800.000,00) berupa mutasi akumulasi penyusutan Kendaraan bermotor penumpang (minibus) ke Sekretariat

Daerah yang terdiri dari Toyota Fortuner (Rp433.200.000,00) dan Toyota Innova (Rp237.600.000,00).

b. Sekretariat Daerah sebesar (Rp130.000.000,00) berupa mutasi akumulasi penyusutan kendaraan bermotor penumpang (minibus) ke Dinas Kesehatan.

c. Dinas Kesehatan sebesar (Rp3.939.804.158,00) terdiri dari ubah kondisi dari Aset Tetap peralatan mesin ke Aset Lainnya (rusak berat) dengan nilai penyusutan sebesar (Rp3.773.524.586,00) dan ubah kondisi dari Aset Tetap Jalan irigasi dan jaringan ke Aset Lainnya (rusak berat) dengan nilai penyusutan sebesar (Rp166.279.572,00).

d. Dinas Pariwisata sebesar (Rp2.207.057.111,00) terdiri dari:

e. Mutasi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan mesin sebesar (Rp253.199.275,00) ke Dinas Lingkungan Hidup dan mutasi akumulasi penyusutan panggung sebesar (Rp42.123.575,00) ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

- Mutasi akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan sebesar (Rp1.908.861.261,00) ke Dinas Lingkungan Hidup.
- Mutasi akumulasi penyusutan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasiberupa sumur gali sebesar (Rp2.873.000,00) ke Dinas Lingkungan Hidup.

a. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar (Rp246.720.000,00) berupa mutasi akumulasi penyusutan kendaraan bermotor penumpang (minibus) ke Sekretariat Daerah.

b. Kecamatan Guguk Panjang sebesar (Rp128.542.274,00) berupa mutasi akumulasi penyusutan Bangunan Gedung Kantor Permanen ke Pengelola.

c. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar (Rp60.000.000,00) berupa mutasi akumulasi penyusutan kendaraan bermotor penumpang sebesar (Rp60.000.000,00) ke Dinas Lingkungan Hidup.

5. Pengurangan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari Reklas Keluar Akumulasi Penyusutan.

   Pengurangan Akumulasi penyusutan Aset Tetap berasal dari Reklas Keluar Akumulasi Penyusutan terdapat pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar (Rp.86.666,67) berupa reklas antar rekening dari peralatan Studio film ke Peralatan Personal komputer.

   Terdapat perbedaan nilai data akumulasi penyusutan aset tetap antara data di neraca dengan data dalam aplikasi e-BMD sebesar Rp0,79. Hal ini disebabkan karena pada aplikasi e-BMD menggunakan 5 (lima) angka dibelakang koma sementara pengentrian di aplikasi SIPD hanya 2 (angka) dibelakang koma.

5.3.1.4 ASET LAINNYA

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
19.752.740.507,40	22.691.754.186,56

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.752.740.507,40, terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp2.939.013.679,16 dari nilai tahun 2023 sebesar Rp22.691.754.186,56. Rincian aset lainnya diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
48.175.533,00	48.175.533,00

Tagihan Jangka Panjang pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah berupa Tagihan Jangka Panjang atas tuntutan ganti kerugian daerah oleh Bendahara SKPD, Bendahara BOS dan non bendahara, yang sampai saat ini belum selesai.

Nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.175.533,00. Tagihan tersebut merupakan utang TGR atas 2 (dua) orang yang belum diselesaikan sampai dengan tahun 2024 yaitu Bendahara pada SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Bendahara SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah meninggal dalam masa tugas jadi bendahara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.82 Mutasi Tagihan Jangka Panjang Tahun 2024

NO.	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Dinas Kebakaran	2.431.169,00	2.431.169,00
2.	Bapelitbang	45.744.364,00	45.744.364,00
JUMLAH		**48.175.533,00**	**48.175.533,00**

5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
16.246.002.000,00	16.360.038.000,00

Nilai kemitraan dengan pihak ketiga tahun 2024 sebesar Rp16.246.002.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp114.036.000,00 dibandingkan dengan nilai tahun 2023 sebesar Rp16.360.038.000,00. Kemitraan dengan pihak ketiga pada Pemerintah Kota Bukittinggi dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.4.2.1 Bangun Guna Serah

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
16.246.002.000,00	16.246.002.000,00

Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai beberapa Aset Tanah yang telah dilakukan kerjasama Pemanfaatan Aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) sebagaimana yang tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2024 dengan nilai Rp.16.246.002.000,00. Aset tanah tersebut tercatat pada Pengelola Barang Pemerintah Kota Bukittinggi dengan status tanah Hak Pengelolaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83 Aset Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah dilaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Bangun Guna Serah (BGS)

No	Nama Pemegang Hak	Pengembang	Aset Tanah Yang Dikerja samakan	Asal Usul	Letak/ Alamat	Luas (m2)	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT. RANAH GARUDA MINANG	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.1/TD	Tanah Negara	Pertokoan Pasar Simpang Aur Kel.Tarok Dipo Kec. GGP	1153	345.900.000
2	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT. RANAH GARUDA MINANG	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.2/TD	Tanah Negara	Pertokoan Pasar Simpang Aur Kel.Tarok Dipo Kec. GGP	1246	11.004.749.000
3	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT. RANAH GARUDA MINANG	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.3/TD	Tanah Negara	Pertokoan Pasar Simpang Aur Kel.Tarok Dipo Kec. GGP	1183	354.900.000
4	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT INKORBA	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.4/TD: No 5/TD	Tanah Negara	Pertokoan Pasar Simpang Aur Kel.Tarok Dipo Kec. GGP	774	232.200.000
5	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT.SUMAJAYA	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.5/TD : No 6/TD	Tanah Negara	Pertokoan Pasar Simpang Aur Kel.Tarok Dipo Kec. GGP	558	111.600.000
6	Pemerintah Kota Bukittinggi	Pertokoan Pasar Banto	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No2/ATTS	Tanah Negara	Kel.ATTS Kec. GP	7484	4.196.653.000
Jumlah							**16.246.002.000**

Berdasarkan tabel diatas, ada 5 (lima) buah Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga yang berlokasi pada Pertokoan Pasar Simpang Aur Kelurahan Tarok Dipo yang dituangkan dalam 5 (lima) buah perjanjian kerjasama dengan PT. Ranah Garuda Minang (PT. RGM), PT. Inkorba dan PT. Suma Jaya. Kelima perjanjian kerjasama tersebut merupakan kerjasama pemanfaatan Aset tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dengan nilai aset sebesar Rp12.049.349.000,00.

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pihak Ketiga tersebut untuk membangun 5 (lima) Blok Bangunan Ruko pada Pertokoan Pasar Simpang Aur yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun. Untuk 5 (lima) Blok Bangunan Ruko telah diterbitkan 5 (lima) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Induk atas nama PT. RGM 3 (tiga) Buah Sertifikat HGB, PT. Inkorba 1 (satu) Buah Sertifikat HGB dan PT. Suma Jaya 1 (satu) Buah Sertifikat HGB dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84 Daftar Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pihak Ketiga di Pertokoan Pasar Simpang Aur

No	Nama Pemegang Hak	Pengembang	Perjanjian	Aset Tanah Yang Dikerja samakan	Luas (m2)	Nilai (Rp.)	HGB Induk	Jumlah HGB Pecahan
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT. RANAH GARUDA MINANG	1946/0-VI/ 1983 tgl. 15 Maret 1983	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.1/TD	1153	345.900.000	HGB No.9 GS no.465/1983	15
2	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT. RANAH GARUDA MINANG	1946/0-VI/ 1983 Tgl. 15 Maret 1983	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.2/TD	1246	11.004.749.000	HGB No.8 GS No.466/1983	14
3	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT. RANAH GARUDA MINANG	1946/0-VI/ 1983 Tgl.15 Maret 1983	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.3/TD	1183	354.900.000	HGB No.7 GS NO.483/1983	23
4	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT INKORBA	Tgl. 12 Maret 1987	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.4/TD: No 5/TD	774	232.200.000	HGB No.65 GS No.65/1987	16

No	Nama Pemegang Hak	Pengembang	Perjanjian	Aset Tanah Yang Dikerja samakan	Luas (m2)	Nilai (Rp.)	HGB Induk	Jumlah HGB Pecahan
1	2	3	4	5	8	9	10	11
5	Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi	PT.SUMAJAYA	01/PRJ/1985 Tgl 30 Desember 1985	Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.5/TD: No 6/TD	558	111.600.000	HGB No.82 GS No.187/1987	8
Jumlah						12.049.349.000		76

Terhadap Bangunan Ruko yang dibangun tersebut, Pihak Ketiga menjualnya kepada Pedagang dan terhadap masing-masing ruko dikeluarkan Sertifikat HGB sebagai pecahan dari HGB Induk. Sertifikat HGB yang dikeluarkan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah Sertifikat HGB atas nama pedagang. Ketujuh puluh enam Sertifikat HGB diatas HPL pada Pertokoan Pasar Simpang Aur tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.85 Daftar Pemegang Sertifikat HGB diatas HPL di Pertokoan Pasar Simpang Aur

No.	Nama Pemegang Hak	Alamat Objek HGB	No. Sertifikat HGB	No. Sertifikat HPL
1	2	3	4	5
1	PT.Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	156	1
2	H Yoni Agusti,SH;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln.Diponegoro 1 Bukittinggi	142	1
3	Andri Sukma Jaya;	Pertokoan Simpang Aur Blok N,Bukittinggi	166	1
4	Asweti;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Bukittinggi	139	1
5	Desmawati	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	146	1
6	Asweti	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Bukittinggi	140	1
7	H Syofyan;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Bukittinggi	171	1
8	PT.Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Diponegoro 04 Bukittinggi	158	1
9	Hendry;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Bukittinggi	138	1
10	A.DT.Batuah;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Bukittinggi	181	1
11	Hj.Suwarni;Ir.Herrizon Anton Zainal;Syaril Zainal, H.AfriS.E,Susi Sandra;Witra	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Bukittinggi	145	1
12	Enita Tjuatja;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	194	1
13	H.Baiyar;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Bukittinggi	143	1
14	H.Yemrizal;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln.Diponegoro 2 Bukittinggi	167	1
15	Zahara	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Bukittinggi	141	1
16	H.Zakaria;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	169	2
17	Yasman;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	148	2
18	H.Telvi Robbel,SH;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Diponegoro Bukittinggi	190	2
19	Delwinda Nofia;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	209	2
20	1Yunaidi Amir,St Marajo; 2.Ainil Mardiah.	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Diponegoro Bukittinggi	180	2
21	PT.Ranah Garuda Minang;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	159	2
22	Romi Ardiansyah;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	208	2
23	1.Yusneli; 2.Efendi	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	205	2
24	Fadlan Aryndra Haviz;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	151	2
25	Haviz Dt.Manindih;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	195	2
26	Haviz Dt.Manindih;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	150	2
27	Haviz Dt.Manindih;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	149	2
28	PT.Ranah Garuda Minang,	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Diponegoro Bukittinggi	157	2
29	PT.Ranah Garuda Minang,	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Diponegoro Bukittinggi	155	2
30	H.Yoni Agusti,SH.	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	172	3
31	H.Muhammad Ikhsan	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	197	3
32	Marshall Mansyur	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	211	3
33	Marshall Mansyur	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	212	3
34	H.Muslim;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	179	3
35	Arniza;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Bukittinggi	207	3
36	Yarlis;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	206	3
37	H.Ratinis St Mudo	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 5, Bukittinggi	165	3
38	H.Asrizal Ahmad;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 4, Bukittinggi	178	3
39	Guswir;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 3, Bukittinggi	210	3
40	H.Em Mirfal Effendi;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 2, Bukittinggi	168	3
41	H.Em Mirfal Effendi;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 1, Bukittinggi	170	3

No.	Nama Pemegang Hak	Alamat Objek HGB	No. Sertifikat HGB	No. Sertifikat HPL
1	2	3	4	5
42	Haji Dasril;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam, Bukittinggi	147	3
43	PT.Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam, Bukittinggi	160	3
44	PT.Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	161	3
45	PT.Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	162	3
46	PT.Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	163	3
47	PT.Ranah Garuda Minang	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Simpang Aur Dalam Bukittinggi	164	3
48	Chaiyar	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln.Auri 10 Bukittinggi	130	3
49	Rosmanidar	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 9 Bukittinggi	131	3
50	H. Yoni Syafri. SH	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 7 Bukittinggi	132	3
51	H. ASWIR	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 8 Bukittinggi	133	3
52	Haji Ruslami Rasyid Datuak Sati;	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Bukittinggi	144	3
53	Muhammad Habdi; Ahmad Fadhil;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl.Diponegoro 16 Tarok Dipo Bukittinggi	176	5
54	Alibar Nain	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl.Diponegoro 14 Tarok Dipo Bukittinggi	189	5
55	Ermizal	Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi	173	5
56	1.Mawardi, 2.Dasriwati	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	177	5
57	H.M.Ramsi Suman,SM	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Bukittinggi	182	5
58	Dra.Afnita	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	192	5
59	Nailul Autar St.Kayo	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	191	5
60	H.Evi Arons	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	183	5
61	H.Evi Arons	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	184	5
62	H.Evi Arons	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	186	5
63	1.Hj.Baenar, 2.Syafwan St.Btk Ameh	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi	202	5
64	Asrul Nain	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl.Diponegoro 15 Tarok Dipo Bukittinggi	196	5
65	H.Syahrial;Erlin Sikumbang;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl.Diponegoro 13 Tarok Dipo Bukittinggi	187	5
66	Helmawati	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro 11 Bukittinggi	201	5
67	Asrul Nain	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro 12 Bukittinggi	203	5
68	1.Yunizal, 2.Hasnon;	Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro 10 Bukittinggi	204	5
69	Adril Syaribaluddin	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	174	6
70	Marshall Mansyur	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	175	6
71	Marshall Mansyur	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	185	6
72	Rizal	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi	188	6
73	H.Amrizal	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri Bukittinggi	193	6
74	Haji Ruslaini Rasyid Dt.Sati	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Bukittinggi	198	6
75	H.Sofiardi	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri Bukittinggi	199	6
76	Sunerti	Pertokoan Simpang Aur Blok O, Bukittingg	200	6

Saat ini Sertifikat HGB yang dipegang oleh pedagang tersebut dalam masa perpanjangan/pembaharuan hak untuk jangka waktu 20 Tahun. Namun pada waktu perpanjangan/pembaharuan Sertifikat HGB tersebut tidak ada perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi selaku Pemegang HPL dengan pedagang sebagai pemegang HGB. Pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 18 (delapan) buah Sertifikat HGB yang telah diperpanjang/diperbaharui tersebut telah habis masa berlakunya, sisanya akan habis pada tahun 2025 dan tahun 2027.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai Pemegang Hak Pengelolaan telah menerima pendapatan berupa uang kontribusi dari Pihak Ketiga yaitu dari PT. RGM, PT. Inkorba dan PT. Suma Jaya. Semenjak tahun 2018 hingga tahun 2021 Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah mengeluarkan Surat

Ketetapan Penerimaan Daerah atas Uang Wajib Tahunan dan Uang Pemasukan atas Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan pada Pertokoan Pasar Simpang Aur berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Daerah Atas Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi.

Namun pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi tidak lagi mengeluarkan Surat Ketetapan Penerimaan Daerah atas Uang Wajib Tahunan atas Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan tersebut dikarenakan aturan yang mendasari Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dan aturan lainnya telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah , Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, dimana pada Pasal 9 Ayat (4) terkait uang wajib tahunan dinyatakan "*Rumusan Tarif dan/atau Uang wajib tahunan yang dikenakan oleh Pemegang Hak Pengelolaan ditetapkan oleh Menteri*". Dalam hal ini yang dimaksud Menteri adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Sampai saat ini, ketetapan terkait rumusan tarif dan/atau uang wajib tahunan sebagaiman diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tersebut belum keluar dan Pemerintah Kota Bukittinggi terkait hal ini juga telah menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, terakhir dengan Surat Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi nomor 000.2.3.2/155/BK-06/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Rumusan Tarif dan uang Wajib Tahunan yang dibales dengan surat Dirjend Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor AT.02/1814-400.5/XI/2023 tanggal 2023 perihal Rumusan Tarif dan Uang Wajib Tahunan.

Pemerintah Kota Bukittinggi juga masih dalam masa perjanjian bagi tempat usaha dengan PT. Citicon Mitra Bukittinggi dengan HPL Nomor 02/Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah Kecamatan Guguak Panjang. Terkait perjanjian ini sampai saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi belum mendapatkan manfaat dari PT. CMB. Berbagai upaya perundingan telah diupayakan tetapi belum mencapai titik temu.

Aset Tanah terletak pada Pengelola Barang Milik Daerah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor Surat Ukur Nomor 41/ATTS/2004 tanggal 25 Agustus 2004 dengan luas 7484 m2.

Aset Pemerintah Kota Bukittinggi yang dikerjasamakan lainnya memiliki luas tanah sebesar 7.484 m2 adalah Tanah Pasar Banto dalam bentuk Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 002 Aur Tajungkang Tengah Sawah yang saat ini sedang dikerjasamakan dengan pihak PT. Citicon Mitra Bukittinggi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Citicon Mitra Bukittinggi yang berakhir tanggal 31 Juli 2026. Tanah Hak Pengelolaan tersebut dicatat di Aset Lain-Lain dengan nilai aset sebesar Rp4.196.653.000,00.

Berdasarkan LHP BPK Nomor : 05.C/LHP/XVIII.PDG/ 05/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Perjanjian Kerjasama pemanfaaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bukittinggi direkomendasikan agar Pemerintah Kota Bukittinggi menginventarisir kembali dan menelaah hak- hak Pemerintah Kota Bukittinggi dan kewajiban-kewajiban PT. CMB sesuai perjanjian kerjasama.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak PT. CMB dengan beberapa kesepakatan. Namun tindak lanjut dari kesepakatan tersebut belum memberikan hasil maksimal, terutama terhadap kewajiban-kewajiban pihak PT. CMB.

1. Pertemuan tanggal 5 Juli 2014 di Jakarta menyepakati Seluruh kewajiban PT. CMB yang terjadi karena adanya kerjasama akan dibayarkan, termasuk seluruh dokumen-dokumen perusahaan sebagai mitra kerjasama akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi paling lambat tanggal 20 Agustus 2014.
2. Pertemuan tanggal 29 Januari 2015 di Bukittinggi, Pihak PT CMB (E.J dan A) tidak dapat memberikan laporan keuangan sebelum peralihan, karena Laporan keuangan Tahun 2006 s/d 2011 merupakan tanggung jawab J.P (Kuasa Direktur lama). Pihak PT. CMB (baru) tidak dapat menerima Nilai Aset BTC sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa penilai Publik Kampianus Roman.
3. Pertemuan tanggal 9 Mei 2016 di Bukittinggi, J.P menyatakan bahwa peralihan pemegang Saham telah dilakukan sejak tanggal 21 Mei 2012 kepada E.J dan A. Pemegang saham yang baru menyatakan bersedia membayar kewajiban paling lambat 15 hari setelah pertemuan.
4. Pertemuan tanggal 3 September 2016 di Jakarta, Pemko Bukittinggi meminta kepada PT. CMB untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 9 Mei 2016. Kedua pihak bersedia melakukan renegosiasi atau revisi perjanjian sesuai aturan yang berlaku, tetapi hal ini belum dapat dilakukan karena Laporan Keuangan yang diserahkan oleh PT. CMB kepada Pemko Bukittinggi, belum berupa laporan keuangan yang sudah di audit oleh Akuntan Publik, sehingga sulit menentukan kualitas Laporan Keuangan, hal ini mengakibatkan kesulitan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengetahui posisi keuangan yang sebenarnya. Pemko Bukittinggi telah meminta kepada PT. CMB untuk menyerahkan laporan keuangan yang meliputi:
    a. Neraca Perusahaan.
    b. Laporan Laba/Rugi Perusahaan.
    c. Laporan Arus Kas.
    d. Utang Piutang termasuk Kredit Bank.
    e. Daftar Penyertaan Modal.
5. Pada tanggal 28 Juli 2023 kembali diadakan pertemuan antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan PT.CMB (E.J) untuk membicarakan status E.J dan A terhadap kepemilikan saham PT.CMB. Pada pertemuan tersebut E.J menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan didalam Akte Pengakuan Hutang. Hal ini disampaikan oleh E.J kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dengan menandatangani Surat Pernyataan pada Tanggal 28 Juli 2023. Untuk itu E.J akan melengkapi dengan dokumen /Akta Penyerahan kembali atas pembelian saham-saham PT.CMB kepada penjual/pemegang awal PT.CMB. Namun pada tanggal 11 September 2023 Pemerintah Kota Bukittinggi menerima surat dari E.J tertanggal 3 September 2023 perihal Pengembalian Saham PT.CMB kepada pemegang saham semula.

5.3.1.4.2.2 Kerjasama Sewa

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
0,00	114.036.000,00

Nilai Kerjasama Sewa tahun 2024 sebesar Rp0,00, sedangkan nilai Tahun 2023 sebesar Rp114.036.000,00. Terdapat mutasi pengurangan karena aset yang disewakan tersebut di reklas ke kelompok rekening Properti Investasi. Aset yang disewakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut berupa bangunan yang terletak pada Taman Benteng Fort de Kock dengan nilai bangunan sebesar Rp114.036.000,00 yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pariwisata, yang disewakan kepada saudara H. Yul Bray Pili.

1.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
8.796.753.581,00	8.596.953.581,00

Nilai Aset Tidak Berwujud pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.796.753.581,00. Selama tahun 2024 terdapat penambahan sebesar Rp199.800.000,00 dibandingkan dengan nilai tahun 2023 sebesar Rp8.596.953.581,00. Aset tidak berwujud dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Saldo Awal	**Rp**	**8.352.406.781,00**
Mutasi bertambah:		
- Pengadaan dari belanja modal	Rp	199.800.000,00
- Reklas antar kelompok barang	Rp	0,00
- Hasil penilaian kurang catat	Rp	0.00
Jumlah	**Rp**	**199.800.000,00**
Mutasi berkurang:		
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
- Hasil Penilaian Kurang Catat	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
Saldo akhir	**Rp**	**8.796.753.581,00**

Nilai Aset Tidak Berwujud tahun 2024 sebesar Rp199.800.000,00 merupakan pengadaan software pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

1.3.1.4.4 Aset Lain-lain

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
40.696.816.467,45	38.189.932.375,94

Aset yang tercatat pada aset lain-lain merupakan aset tetap yang kondisinya sudah tidak dapat digunakan, baik itu rusak berat maupun aset yang sudah tidak ditemukan lagi dan diusulkan untuk dihapuskan serta aset sedang dalam penelusuran.

Nilai Aset Lain-Lain pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp40.696.816.467,45. Selama tahun 2024 terdapat kenaikan nilai Aset Lain-lain sebesar Rp2.506.884.091,51 dari nilai tahun 2023 sebesar Rp38.189.932.375,94, sehingga saldo akhir tahun 2024 adalah Rp40.696.816.467,45. Rincian yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Saldo Awal	**Rp**	**38.189.932.375,94**
Penambahan:		
- Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00

- Reklas antar kelompok barang (masuk)	Rp	5.022.307.377,50
- Koreksi Saldo Awal	Rp	0,01
Jumlah	**Rp**	**5.022.307.377,51**
Pengurangan:	Rp	
- Penghapusan berdasarkan SK Wako	Rp	2.508.423.286,00
- Mutasi ke SKPD lain	Rp	0,00
- Koreksi Pencatatan	Rp	0,00
- Reklas antar kelompok barang (keluar)	**Rp**	7.000.000,00
Jumlah		**2.515.423.286,00**
Saldo Akhir	**Rp**	**40.696.816.467,45**

Rincian penambahan Aset Lain-lain dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Lain-lain dari reklas antar kelompok barang (masuk)

   Penambahan Aset Lain-lain dari reklas antar kelompok barang (masuk) merupakan ubah kondisi dari Aset Tetap (baik) ke Aset Lainnya (rusak berat). Tahun 2024 terdapat penambahan Aset Lainnya sebesar Rp5.022.307.377,50. Berikut rincian penambahan Aset Lain-lain karena ubah kondisi dari Aset Tetap:

   - Dinas Kesehatan sebesar Rp4.277.288.386,50.
   - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp62.175.600,00
   - DP3APPKB sebesar Rp219.087.000,00.
   - Inspektorat Daerah sebesar Rp143.782.037,00.
   - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp296.385.100,00
   - Kecamatan ABTB sebesar Rp23.589.254,00

Rincian pengurangan dari aset lain-lain dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pengurangan Aset Lain-lain berasal dari SK Penghapusan

   Pengurangan Aset Lain-lain dari SK penghapusan sebesar Rp2.508.423.286,00 yang terdiri dari:

   - Sekretariat Daerah sebesar Rp789.740.100,00
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp40.471.875,00
   - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp46.752.770,00
   - Dinas Kesehatan sebesar Rp548.253.807,00
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp354.195.160,00
   - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp263.475.598,00
   - DP3APPKB sebesar Rp196.521.650,00
   - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp242.709.600,00
   - Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar Rp26.302.726,00

2. Pengurangan Aset Lain-lain dari reklas antar kelompok barang (keluar)

   Pengurangan Aset Lain-lain dari reklas antar kelompok barang (keluar) merupakan ubah kondisi Aset Lain-lain (rusak berat) menjadi Aset Tetap (baik) yang terdapat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp7.000.000,00 berupa kendaraan bermotor Angkutan barang/ Mobil Pickup.

A. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
(8.218.416.804,00)	**(7.786.257.943,00)**

Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan masa manfaat untuk Aset Tidak Berwujud selama 5 (lima) tahun dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp8.218.416.804,00) dan (Rp7.786.257.943,00). Untuk perhitungan nilai buku Aset Tidak Berwujud dapat disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal	**Rp**	**(7.786.257.943,00)**
Penambahan:		
- Penyesuaian saldo awal karena perubahan aplikasi e-BMD	Rp	(13.904.935,00)
- Beban Amortisasi Tahun 2024	Rp	(418.253.926,00)
Jumlah	**Rp**	**(432.158.861,00)**
Saldo Akhir	**Rp**	**(8.218.416.804,00)**

Rincian penambahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud berasal dari Koreksi Saldo Awal.

   Penambahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari Koreksi Saldo Awal sebesar (Rp13.904.935,00) terdapat pada:

   - Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar (Rp5.984.935,00)
   - Dinas Kesehatan Sebesar (Rp7.920.000,00).

2. Penambahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud berasal dari Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2024 sebesar (Rp418.253.926,00), dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.86 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2024

No	SKPD	Beban Penyusutan 2024 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	0,00
2	Sekretariat Daerah	10.633.333,00
3	Dinas PUPR	16.281.500,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	62.443.000,00
5	Dinas Perhubungan	0,00
6	Dinas Kesehatan	10.140.000,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00

No	SKPD	Beban Penyusutan 2024 (Rp)
8	BPBD	0,00
9	Dinas Sosial	0,00
10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48.307.000,00
12	DP3APPKB	0,00
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100.821.227,00
15	DPMPTSP	98.074.580,00
16	DKUKMTK	0,00
17	Pengelola	0,00
18	Badan Keuangan	11.192.232,00
19	Inspektorat Daerah	0,00
20	Bappelitbangda	56.800.012,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
22	Dinas Pariwisata	0,00
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00
24	Bankesbangpol	0,00
25	Kantor Satpol PP	0,00
26	BKPSDM	0,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	524.810,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.036.232,00
29	Kecamatan Guguk Panjang	0,00
30	Kecamatan ABTB	0,00
31	Kecamatan MKS	0,00
	TOTAL	**418.253.926,00**

B. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
(37.845.126.270,05)	(35.433.257.360,38)

Nilai akumulasi penyusutan aset Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp37.845.126.270,05). Selama Tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar (Rp2.411.868.909,67) dibandingkan dengan tahun 2023. Rinciannya dapat disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal	**Rp**	**(35.433.257.360,38)**
Penambahan:		
- Penyesuaian saldo awal	Rp	157.992.896,17)
- Beban Penyusutan Tahun 2024	Rp	(133.647.351,00)
- Ubah kondisi dari Baik ke Rusak Berat	Rp	(4.738.775.146,00)
Jumlah	**Rp**	**(5.030.415.393,17)**
Pengurangan:		
- Penghapusan	Rp	(2.497.510.483,50)
- Reklas ke Akun Properti Investasi	Rp	(114.036.000,00)
- Reklas ke Akun Aset Tetap karena perubahan kondisi dari rusak berat ke baik	Rp	7.000.000,00)
Jumlah	**Rp**	**(2.618.546.483,50)**
Saldo Akhir	**Rp**	**(37.845.126.270,05)**

Rincian penambahan akumulasi penyusutan aset lainnya dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan akumulasi penyusutan aset lainnya karena karena penyesuaian saldo awal sebesar (Rp157.992.896,29) terdapat pada SKPD:
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp155.416.182,00)
   - Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar (Rp2.576.714,17)
2. Penambahan akumulasi penyusutan aset lainnya karena beban penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp133.647.351,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87 Beban Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2024

No	SKPD	Beban Penyusutan 2024 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	0,00
2	Sekretariat Daerah	0,00
3	Dinas PUPR	24.642.395,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00
5	Dinas Perhubungan	0,00
6	Dinas Kesehatan	5.947.723,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.022.800,00
8	BPBD	0,00
9	Dinas Sosial	0,00
10	Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
12	DP3APPKB	7.482.788,00
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.526.700,00
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.518.143,00
15	DPMPTSP	0,00
16	DKUKMTK	0,00
17	Pengelola	0,00
18	Badan Keuangan	0,00
19	Inspektorat Daerah	5.763.682,00
20	Bappelitbangda	0,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	36.856.718,00
22	Dinas Pariwisata	17.886.402,00
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00
24	Bankesbangpol	0,00
25	Kantor Satpol PP	0,00
26	BKPSDM	0,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
29	Kecamatan Guguk Panjang	0,00
30	Kecamatan ABTB	0,00
31	Kecamatan MKS	0,00
	TOTAL	**133,647,351,00**

3. Penambahan akumulasi penyusutan aset lainnya karena ubah kondisi dari baik ke rusak berat tahun 2024 sebesar (Rp4.738.775.146,00) dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Kesehatan sebesar (Rp4.000.611.518,00).
   - Inspektorat Daerah sebesar (Rp143.331.355,00)

- Kecamatan ABTB sebesar (Rp20.682.490,00)
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp296.385.100,00)
- DP3APPKB sebesar (Rp219.087.000,00)
- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar (Rp58.677.683,00)

Sedangkan Rincian pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain karena penghapusan sebesar (Rp2.497.510.483,50) yang terdiri dari:
   - Sekretariat Daerah sebesar (Rp789.740.100,00)
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp354.195.160,00)
   - Dinas Kesehatan Sebesar (Rp548.253.807,00)
   - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar (Rp263.475.598,00)
   - Kecamatan MKS sebesar (Rp26.302.726,00)
   - Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp242.709.600,00)
   - DP3APPKB sebesar (Rp185.608.847,50)
   - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar (Rp46.752.770,00)
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp40.471.875,00)
2. Pengurangan akumulasi penyusutan aset lainnya karena reklas ke akumulasi penyusutan properti investasi sebesar (Rp114.036.000,00). Merupakan bangunan yang terletak pada Taman Benteng Fort de Kock yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Tahun 2023 dicatat pada akun akumulasi penyusutan aset lain-lain dan tahun 2024 ini direklas ke akumulasi properti investasi gedung dan bangunan.
3. Pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain karena reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain ke Akumulasi Penyusutan Aset Tetap karena perubahan kondisi dari rusak berat ke baik sebesar (Rp7.000.000,00) berupa kendaraan bermotor Angkutan barang/ Mobil Pickup pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

c. **Kas yang Dibatasi Penggunaannya/ Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)**	**Tahun 2024 (Rp)**	**Tahun 2023 (Rp)**
	28.536.000,00	**2.716.170.000,00**

Nilai Kas yang Dibatasi Penggunaannya/ TDF Tahun 2024 sebesar Rp28.536.000,00. Terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp2.687.634.000,00 dari nilai saldo Tahun 2023 sebesar Rp2.716.170.000,00. Penambahan TDF selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp28.536.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar dan Bagi Hasil Pada Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2024.

5.3.1.5 Properti Investasi

Dalam PSAP 17 menjelaskan bahwa Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

5.3.1.5.1 Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
	Rp114.036.000,00	Rp0,00

Properti Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 sebesar Rp114.036.000,00. Properti investasi Pemerintah Kota Bukittinggi berupa bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga. Bangunan tersebut terletak pada Taman Benteng Fort de Kock dengan nilai bangunan sebesar Rp114.036.000,00 yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Bangunan tersebut disewakan kepada saudara H. Yul Bray Pili Perjanjian Sewa Sebagian Tanah dan atau Bangunan di Taman Benteng Fort De Kock antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Rumah Makan dan Restoran Family Benteng Indah Nomor 556/70/DISPAR/I-2025.

Pada Tahun 2023, bangunan yang terletak pada taman Benteng Fort de Kock tersebut tercatat sebagai Kerjasama Sewa pada Dinas Pariwisata senilai Rp114.036.000,00. Dan pada tahun 2024 di reklas ke properti investasi.

5.3.1.5.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
	(Rp114.036.000,00)	Rp0,00

Akumulasi Properti Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 sebesar (Rp114.036.000,00) merupakan akumulasi penyusutan properti investasi gedung dan bangunan. Akumulasi Properti investasi ini Tahun 2023 dicatat pada akun akumulasi penyusutan aset lain-lain. Dan pada Tahun 2024 ini direklas ke akumulasi properti investasi gedung dan bangunan.

5.3.2 Kewajiban

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
7.538.674.127,57	6.608.584.717,39

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah. Pada Neraca Kota Bukittinggi Kewajiban Tahun 2024 diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel. 5.88 Kewajiban Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Awal (Rp) Audited	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Kewajiban Jangka Pendek	6.608.584.717,39	7.264.439.373,10	6.334.349.962,92	7.538.674.127,57
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
TOTAL		**6.608.584.717,39**	**7.264.439.373,10**	**6.334.349.962,92**	**7.538.674.127,57**

Sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Kota Bukittinggi hanya mempunyai kewajiban jangka pendek sebesar Rp7.538.674.127,57.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
7.538.674.127,57	6.608.584.717,39

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp7.538.674.127,57 dan Rp6.608.584.717,39 artinya terdapat kenaikan angka kewajiban sebesar Rp930.089.410,18 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 5.89 Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp) (Audited)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	48.243.838,00	-	48.243.838,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	384.879.789,67	813.612.278,33	600.955.603,00	597.536.465,00
3	Utang Belanja	5.952.258.773,72	4.658.757.256,77	5.643.544.429,92	4.967.471.600,57
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	271.446.154,00	1.743.826.000,00	89.849.930,00	1.925.422.224,00
Jumlah		**6.608.584.717,39**	**7.264.439.373,10**	**6.334.349.962,92**	**7.538.674.127,57**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
48.243.838,00	0,00

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 adalah Rp48.243.838,00 pada tahun 2023 sebesar Rp0,00, selama tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp48.243.838,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 5.90 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2024

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp) (Audited)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
	UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA	**-**	**48.243.838,00**	-	**48.243.838,00**
1	**Utang PPH Pusat**	**-**	**8.393.049,00**	**-**	**8.393.049,00**
	Sekretariat Daerah	-	8.184.346,00	-	8.184.346,00
	Kecamatan ABTB		208.703,00		208.703,00
2	**Utang PPN Pusat**	**-**	**39.850.789,00**	**-**	**39.850.789,00**
	Kecamatan Guguak panjang	-	670.118,00	-	670.118,00
	Kecamatan ABTB	-	1.486.486,00	-	1.486.486,00
	Sekretariat Daerah	-	37.694.185,00	-	37.694.185,00
	Jumlah	**-**	**48.243.838,00**	-	**48.243.838,00**

Berikut uraian Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK) Tahun 2024 adalah:

a. Sekretariat Daerah

Saldo Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK) Sekretariat Daerah per 31 Desember 2024 terdiri dari Utang PPH Pusat sebesar Rp8.184.346,00 dan Utang PPN Pusat sebesar Rp37.694.185 dengan rician:

- Kekurangan pembayaran PPH 22 sebesar Rp5.131.188,00.
- Kekurangan PPH 23 sebesar Rp3.053.158,00.
- Kekurangan PPN sebesar Rp37.694.185,00

b. Kecamatan ABTB

Saldo Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK) Kecamatan ABTB per 31 Desember 2024 terdiri dari Utang PPH sebesar Rp208.703,00 dan Utang PPN Pusat sebesar Rp1.486.486,00 dengan rincian:

- Kekurangan PPN sebesar Rp1.486.486,00.
- Kekurangan PPH 23 sebesar Rp6.000,00.
- Kekurangan pembayaran PPH 22 sebesar Rp202.703,00.

c. Kecamatan Guguak Panjang

Saldo Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK) Kecamatan Guguak Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp670.118,00 yang merupakan kekurangan pembayaran PPN Pusat.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
597.536.465,00	**384.879.789,67**

Saldo Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2024 pada neraca per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp597.536.465,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp384.879.789,67, selama tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp813.612.278,33 dan mutasi kurang sebesar Rp600.955.603,00 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 5.91 Daftar Mutasi Pendapatan Diterima di Muka

No.	Uraian	Saldo Awal (Audited)	Mutasi		Saldo akhir 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	PENDAPATA DITERIMA DIMUKA	**384.879.789,67**	**813.612.278,33**	**600.955.603,00**	**597.536.465,00**
1	**Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan**	**76.369.400,00**	**327.145.413,33**	**76.369.400,00**	**327.145.413,33**
	BADAN KEUANGAN	76.369.400,00	22.206.800,00	76.369.400,00	22.206.800,00
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	-	304.938.613,33	-	304.938.613,33
2	**Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah**	**215.485.823,00**	**486.466.865,00**	**485.745.503,00**	**216.207.185,00**
	BADAN KEUANGAN	215.485.823,00	486.466.865,00	485.745.503,00	216.207.185,00
	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	214.135.823,00	457.216.865,00	461.445.503,00	209.907.185,00
	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame kain	0,00	29.250.000,00	23.400.000,00	5.850.000,00
	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Berjalan	1.350.000,00	-	900.000,00	450.000,00
3	**Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**	**93.024.566,67**	**-**	**38.840.700,00**	**54.183.866,67**
	DINAS KESEHATAN	93.024.566,67	-	38.840.700,00	54.183.866,67

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
4.967.471.600,57	**5.952.258.773,72**

Utang Belanja pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.967.471.600,57 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.952.258.773,72 Adapun rincian Utang Belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.92 Daftar Mutasi Utang Belanja

No.	Uraian	Saldo Awal (Audited)	Mutasi		Saldo akhir 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Utang Belanja Pegawai	665.062.939,20	1.923.010.405,85	680.752.418,00	1.907.320.927,05
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	563.996.236,20	2.707.427.352,92	483.813.499,71	2.787.610.089,41
3	Utang Belanja Hibah	120.867.986,11	-	-	120.867.986,11
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.542.333.200,93	28.319.498,00	4.418.980.100,93	151.672.598,00
5	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	59.998.411,28	-	59.998.411,28	-
Jumlah		**5.952.258.773,72**	**4.658.757.256,77**	**5.643.544.429,92**	**4.967.471.600,57**

5.3.2.1.3.1 Utang Belanja Pegawai

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
1.907.320.927,05	**665.062.939,20**

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.907.320.927,05. Terdapat penambahan Utang Belanja Pegawai sebesar Rp1.923.010.405,85 dan pengurangan utang sebesar Rp680.752.418,00. Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp665.062.939,20. Rincian mutasi utang belanja pegawai tersebut dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel. 5.93 Daftar Mutasi Utang Belanja Pegawai Tahun 2024

No.	SKPD	Saldo awal (Audited)	Mutasi		Saldo akhir 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.120.000,00	59.458.800,00	6.120.000,00	59.458.800,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	-	4.805.800,00	-	4.805.800,00
3	Dinas Pariwisata	-	9.219.000,00	-	9.219.000,00
4	Dinas Pemadam dan Penyelamatan	171.050,00	-	171.050,00	-
5	Dinas Kesehatan	654.289.759,20	1.794.883.195,85	674.461.368,00	1.774.711.587,05
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.482.130,00	51.089.430,00	-	55.571.560,00
7	Dinas Pustaka dan Arsip	-	3.554.180,00	-	3.554.180,00
Jumlah		**665.062.939,20**	**1.923.010.405,85**	**680.752.418,00**	**1.907.320.927,05**

Berikut uraian Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 adalah:

a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.458.800,00 yang terdiri dari:

- Kekurangan pembayaran tunjangan fungsional ASN Tahun 2024 sebesar Rp28.740.000,00.
- Kekurangan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Tahun 2024 sebesar Rp3.628.800,00.
- Kekurangan pembayaran honorarium pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Tahun 2024 sebesar Rp27.090.000,00.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Saldo utang Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.805.800,00 merupakan kekurangan pembayaran gaji ASN.

c. Dinas Kesehatan

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.774.711.587,05 yang terdiri dari:

- Kekurangan pembayaran gaji PNS sebesar Rp64.080.745,00.
- Kekurangan pembayaran Iuran BPJS 4% pada Puskesmas sebesar Rp168.927.553,00.
- Utang iuran jaminan kesehatan perubahan gaji PNS bulan januari s.d desember 2024 Rp2.501.679,00.
- Kekurangan pembayaran jasa layanan kesehatan ASN (RSUD) dari pasien umum, BPJS, jasa raharja, BPJS tenaga kerja sebesar Rp894.949.402,05 dan utang jasa pelayanan ASN Puskesmas sebesar Rp644.252.208,00

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2024 sebesar Rp55.571.560,00 yang merupakan kekurangan pembayaran BPJS gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dan PPPK.

e. Dinas Pariwisata

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Pariwisata per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.219.000,00 yang merupakan kekurangan gaji ASN.

f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Saldo Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.554.180,00 yang merupakan kekurangan pembayaran BPJS Kesehatan atas Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2024.

5.3.2.1.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
2.787.610.089,41	563.996.236,20

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp2.787.610.089,41 dan Tahun 2023 sebesar Rp563.996.236,20. Terdapat mutasi bersih utang tersebut selama tahun 2024 berupa penambahan sebesar Rp2.707.427.352,92 pengurangan sebesar Rp483.813.499,71 dan yang riciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.94 Daftar Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

No.	SKPD	Saldo akhir (Audited)	Mutasi		Saldo akhir 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Dinas Lingkungan Hidup	11.270.000,00	42.026.208,75	11.270.000,00	42.026.208,75
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	19.399.470,00	-	-	19.399.470,00
3	Dinas Kesehatan	517.994.498,20	2.662.401.144,17	457.211.231,71	2.723.184.410,66
4	Sekretariat DPRD	15.332.268,00	-	15.332.268,00	0,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Jumlah		**563.996.236,20**	**2.707.427.352,92**	**483.813.499,71**	**2.787.610.089,41**

Berdasarkan tabel di atas dapat kami jelaskan SKPD yang mencatat utang dijelaskan sebagai berikut:

a. Dinas Lingkungan Hidup

Saldo Utang Barang dan Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.026.208,75 yang terdiri dari:

- Utang belanja kompensasi Jasa Pelayanan Pemprosesan Sampah pada TPA Regional Padang sebesar Rp27.452.880,00.
- Utang belanja Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hanggar sebesar Rp14.573.328,75

b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Utang pada tahun 2022 sebesar 20% adalah terhadap perencanaan penampungan pedagang pasar bawah/ex pedagang kuliner stasiun/parkir tahun 2022 sebesar Rp19.399.470,00

c. Dinas Kesehatan

Saldo Utang Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.723.184.410,66 yang terdiri dari:

- Utang jasa layanan Non ASN (RSUD) dari pasien Jasa Raharja, BPJS Tenaga Kerja, dll sebesar Rp276.824.977,66.
- Utang Jasa Pelayanan Non ASN Puskesmas sebesar Rp12.871.033,00.
- Utang iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 (utang UHC) sebesar Rp2.412.908.400,00.
- Utang Jasa Pihak Ketiga (Hutang RSUD ke PMI) sebesar Rp20.580.000,00.

d. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Saldo Utang Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.000.000,00 merupakan utang jasa Tenaga Pemadam kebakaran dan penyelamatan.

5.3.2.1.3.3 Utang Belanja Hibah

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
120.867.986,11	120.867.986,11

Saldo Utang belanja Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp120.867.986,11 merupakan Utang Belanja Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang atas pekerjaan revitalisasi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi. Pekerjaan Revitalisasi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi pada tahun 2023 terlaksana dengan progres pekerjaan sebesar 72,39% senilai Rp1.485.506.538,99 dan telah dibayarkan sebesar 70% senilai Rp1.364.638.552,88 sehingga sisa yang belum dibayar adalah sebesar 2,39% senilai Rp120.867.986,11.

Pekerjaan Revitalisasi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi tidak dibayarkan sebesar 2,39% pada tahun 2023 dikarenakan Penyedia tidak sanggup melanjutkan pekerjaan tersebut berdasarkan surat dari Penyedia CV.Pakta Ganda yang ditujukan kepada PPK pekerjaan Revitalisasi Kantot Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor 01/Perm-PG/XII-2023 tanggal 24 Desember 2023.

5.3.2.1.3.4 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
151.672.598,00	4.542.333.200,93

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp151.672.598,00 dan tahun 2023 sebesar Rp4.542.333.200,93. Selama tahun 2024 terdapat mutasi bertambah sebesar Rp28.319.498,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp4.418.980.100,93 dengan rincian sebagai berikut:

a. Mutasi bertambah 20% perencanaan Puskesmas Birugo sebesar Rp28.319.498,00 dan terdapat pengurangan utang sebesar Rp4.418.980.100,93 yang merupakan realisasi kekurangan bayar pembangunan RSUD.

b. Utang sebesar Rp101.467.600,00 pada Dinas Pariwisata merupakan Belanja Modal (fisik) tahun 2020 belum bisa dibayarkan karena fisik pekerjaan belum dilaksanakan sampai tahun anggaran 2024 yaitu DED Kandang Tahap II sebesar

Rp19.912.200,00 dan DED Gedung TIC sebesar Rp81.555.400,00.

c. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp21.885.500,00 merupakan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Perencanaan Pembangunan Awning Jalan Minangkabau tahun 2021 sebesar Rp19.426.000,00 dan Pembayaran Kanopi Gedung Kantor Tahun 2017 sebesar Rp2.459.500,00.

Sehingga saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp151.672.598,00 sebagaimana dapat dijelaskan tabel berikut:

Tabel. 5.95 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No.	SKPD	Saldo Akhir 31 Desember 2023 Audited	Mutasi		Saldo akhir 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Dinas Kesehatan	4.418.980.100,93	28.319.498,00	4.418.980.100,93	28.319.498,00
2	Dinas Pariwisata	101.467.600,00	-	-	101.467.600,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	21.885.500,00	-	-	21.885.500,00
Jumlah		**4.542.333.200,93**	**28.319.498,00**	**4.418.980.100,93**	**151.672.598,00**

5.3.2.1.3.5 Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
0,00	59.998.411,28

Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 adalah Rp0,00 dan Tahun 2023 Rp59.998.411,28 mengalami pengurangan utang sebesar Rp59.998.411,28 merupakan pekerjaan jalan lingkungan paket 3 yang dilaksanakan oleh CV.UTAMA MULTI KARYA pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang telah dibayarkan pada Tahun 2024.

Sehingga saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 menjadi Rp0,00.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
1.925.422.224,00	271.446.154,00

Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah Rp1.925.422.224,00 dan tahun 2023 Rp271.446.154,00. Utang Jangka Pendek Lainnya bertambah sebesar Rp1.743.826.000,00 dan berkurang sebesar Rp89.849.930,00 dengan rincian sebagaimana berikut:

1. Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi
   - Utang jangka pendek tersebut merupakan lebih setor retribusi oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan ke kas daerah pada Tahun 2022 sebesar Rp2.169.000,00.
   - Utang jangka pendek kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu oleh wajib retribusi sebesar Rp6.328.224,00 karena ada kesalahan hitung

terhadap SKRD yang terkait sehingga diterbitkan SKRD baru yang telah disesuaikan dengan luas yang seharusnya an.Novia Melinda dan Afdhal Salman.

2. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Saldo Awal Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 adalah sebesar Rp262.948.930,00 selama Tahun 2024 terdapat mutasi tambah Utang kelebihan transfer sebesar Rp1.743.826.000,00. sehingga jumlah Utang menjadi sebesar Rp2.006.774.930,00 yang kemudian dibulatkan menjadi Rp2.006.769.000,00. Penambahan Utang tersebut diatas merupakan penambahan Utang Kota Bukittinggi Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada tahun 2024. Rincian pembulatan setelah penambahan Utang tahun 2023 sebesar (Rp5.930,00) terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajak PBB Bagi Rata nilai setelah penambahan Utang sebesar Rp552,00 dibulatkan menjadi Rp0,00.
b. Dana Bagi Hasil Pajak PBB Bagian Daerah Sektor Pertambangan Migas nilai setelah penambahan Utang sebesar Rp883,00 dibulatkan menjadi Rp0,00.
c. Dana Bagi Hasil Pajak PBB Bagian Daerah Sektor lainnya nilai setelah penambahan Utang sebesar Rp407,00 dibulatkan menjadi Rp0,00.
d. Dana Bagi Hasil Pajak PBB Biaya Pungut Sektor Pertambangan nilai setelah penambahan Utang sebesar Rp1.737,00 dibulatkan menjadi Rp1.000,00.
e. Dana Bagi Hasil Pajak PBB Biaya Pungut Sektor lainnya nilai setelah penambahan Utang sebesar Rp924,00 dibulatkan menjadi Rp0,00.
f. Dana Bagi Hasil Pajak CHT nilai setelah penambahan Utang sebesar Rp1.969.986,00 dibulatkan menjadi Rp1.969.000,00
g. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba-Royalty nilai setelah penambahan Utang sebesar Rp23.442.149,00 dibulatkan menjadi Rp23.442.000,00
h. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-PSDH nilai setelah penambahan Utang Rp747,00 dibulatkan menjadi Rp0,00
i. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan nilai setelah penambahan Utang Rp907.387.545,00 dibulatkan menjadi Rp907.387.000,00
j. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp358.345,00.
k. Dana Bagi hasil PBB Bagian Daerah Sektor Perhutanan sebesar Rp6.630.000,00.
l. Dana Bagi hasil PBB Bagian Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan-Migas sebesar Rp1.000,00.
m. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Iuran Tetap sebesar Rp12.024.000,00.

n. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perkebunan Sawit sebesar Rp607.127.000,00.

Dan selama tahun 2024 terdapat mutasi kurang Utang Kelebihan Transfer sebesar Rp89.844.000,00 yang diperhitungkan dalam penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 Tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada tahun 2024, sehingga Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2024 menjadi 1.916.925.000,00.

Sehingga saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.925.422.224,00 sebagaimana dapat dijelaskan tabel berikut:

Tabel. 5.96 Daftar Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024

No.	Rincian	Saldo Awal (Rp) 31 Des 2023	Mutasi Tambah (Rp)	Pembulatan	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo akhir (Rp) 31 Desember 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5-6)	8
	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	**271.446.154,00**	**1.743.826.000,00**	**(5.930,00)**	**89.844.000,00**	**1.925.422.224,00**	
1	**Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas**	**8.497.224,00**	**-**	**0,00**	**-**	**8.497.224,00**	
	DINAS KESEHATAN	2.169.000,00	-	-	-	2.169.000,00	
	DINAS PEKERJAAN UMUM	6.328.224,00	-	-	-	6.328.224,00	
2	**Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**	**262.948.930,00**	**1.743.826.000,00**	**(5.930,00)**	**89.844.000,00**	**1.916.925.000,00**	
	BADAN KEUANGAN	**262.948.930,00**	**1.743.826.000,00**	**(5.930,00)**	**89.844.000,00**	**1.916.925.000,00**	
I	**Pajak**						
	a) PPh						
	- PPh Pasal 21		448.189.000,00		89.844.000,00	358.345.000,00	
	- PPh Pasal 25/29					-	
	b) PBB					-	
	- Bagi rata	552,00		(552,00)		-	Dasar Hukum: 1. PMK No. 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 Tanggal 25 Oktober 2024 2. KMK Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2024
	- Bagian Daerah Sektor Perkebunan					-	
	- Bagian Daerah Sektor Perhutanan		6.630.000,00			6.630.000,00	
	- Bagian Daerah Sektor Pertambangan-Migas	883,00		(883,00)		-	
	- Bagian Daerah Sektor Pertambangan - Mineral dan Batubara /non migas					-	
	- Bagian Daerah Sektor Pertambangan - Panas Bumi					-	
	- Bagian Daerah Sektor lainnya	407,00		(407,00)		-	
	- Biaya Pemungutan Perkebunan					-	
	- Biaya Pemungutan Perhutanan					-	
	- Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan - Migas	1.737,00		(737,00)		1.000,00	
	- Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara/non migas					-	
	- Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan - Panas Bumi					-	
	- Biaya Pemungutan Sektor lainnya	924,00		(924,00)		-	
	c) CHT			(986,00)			

No.	Rincian	Saldo Awal (Rp) 31 Des 2023	Mutasi Tambah (Rp)	Pembulatan	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo akhir (Rp) 31 Desember 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5-6)	8
		1.969.986,00				1.969.000,00	
II	**SDA**					-	
	a) Migas					-	
	- Landrent					-	
	- Royalti	149,00	23.442.000,00	(149,00)		23.442.000,00	
	b) Panas Bumi					-	
	- Iuran Produksi					-	
	- Iuran Tetap		12.024.000,00			12.024.000,00	
	- Setoran Bagian Pemerintah					-	
	c) Kehutanan					-	
	- DR					-	
	- IIUPH					-	
	- PSDH	747,00		(747,00)		-	
	d) Perikanan	260.973.545,00	646.414.000,00	(545,00)		907.387.000,00	
	e) Perkebunan Sawit		607.127.000,00			607.127.000,00	

5.3.3. Ekuitas

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
2.054.252.539.543,09	2.023.426.461.579,57

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.054.252.539.543,09 dan Rp2.023.426.461.579,57. ***Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas ini dapat dilihat pada bagian Laporan Perubahan Ekuitas.***

5.4 Laporan Operasional

	Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp
	57.258.719.124,71	(14.184.789.767,67)

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan keuangan yang berisi informasi tentang kegiatan operasional suatu entitas dalam satu periode yang terdiri dari berbagai unsur antara lain Pendapatan-LO, Beban-LO, serta Surplus/Defisit-LO. Laporan Operasional juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Penyajian-LO disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan-LO diakui dalam 3 (tiga) kondisi yaitu saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan, saat pendapatan direalisasi dan setelah penerimaan kas (jika jika terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah).

Manfaat Laporan Operasional:

1. Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan
2. Memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima
3. Menjalankan unit entitas pemerintah
4. Menyempurnakan laporan keuangan berbasis akrual
5. Menghubungkan Laporan Operasional dengan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan neraca

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 menghasilkan surplus sebesar Rp57.258.719.124,71 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Operasional

   Selama tahun 2024 Kegiatan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan surplus sebesar Rp62.596.510.967,31 dengan Pendapatan Kegiatan Operasional sebesar Rp841.546.027.198,07 dan Beban Operasional sebesar Rp778.949.516.230,76

2. Kegiatan Non Operasional

   Selama tahun 2024 Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan defisit sebesar (Rp5.337.791.842,60)

   Adapun realisasi Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.97 Realisasi Laporan Operasional Tahun 2024

Kode	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	841.546.027.198,07	753.034.506.635,65	88.511.520.562,42	11,75
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	134.814.440.618,61	142.987.180.928,20	(8.172.740.309,59)	(5,72)
7.1.01	Pajak Daerah-LO	54.580.535.186,00	53.111.344.882,00	1.469.190.304,00	2,77

Kode	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	62.686.102.961,39	39.741.106.632,00	22.944.996.329,39	57,74
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	10.973.923.679,00	10.097.553.826,00	876.369.853,00	8,68
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	6.573.878.792,22	40.037.175.588,20	(33.463.296.795,98)	(83,58)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**134.814.440.618,61**	**142.987.180.928,20**	**(8.172.740.309,59)**	**(5,72)**
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	**609.011.899.262,46**	**588.770.953.422,00**	**20.240.945.840,46**	**3,44**
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	562.524.201.758,00	554.987.256.154,00	7.536.945.604,00	1,36
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**562.524.201.758,00**	**554.987.256.154,00**	**7.536.945.604,00**	**1,36**
7.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO**	**46.487.697.504,46**	**33.783.697.268,00**	**12.704.000.236,46**	**37,60**
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	**46.487.697.504,46**	**33.783.697.268,00**	**12.704.000.236,46**	**37,60**
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	**609.011.899.262,46**	**588.770.953.422,00**	**20.240.945.840,46**	**3,44**
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**	**97.719.687.317,00**	**21.276.372.285,45**	**76.443.315.031,55**	**359,29**
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	97.719.687.317,00	21.142.359.842,00	76.577.327.475,00	362,20
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	134.012.443,45	(134.012.443,45)	(100,00)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**97.719.687.317,00**	**21.276.372.285,45**	**76.443.315.031,55**	**359,29**
	JUMLAH PENDAPATAN	**841.546.027.198,07**	**753.034.506.635,65**	**88.511.520.562,42**	**11,75**
8	**BEBAN**	**778.949.516.230,76**	**766.907.930.194,15**	**12.041.586.036,61**	**1,57**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**679.991.012.156,65**	**668.082.892.610,87**	**11.908.119.545,78**	**1,78**
8.1.01	Beban Pegawai	337.675.834.135,81	302.975.149.463,20	34.700.684.672,61	11,45
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	275.543.981.565,55	311.999.875.352,72	(36.455.893.787,17)	(11,68)
8.1.04	Beban Subsidi	2.499.986.478,00	2.499.916.363,00	70.115,00	0,00
8.1.05	Beban Hibah	50.747.190.380,00	42.061.418.508,00	8.685.771.872,00	20,65
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	2.897.600.000,00	4.793.000.000,00	(1.895.400.000,00)	(39,55)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	10.626.419.597,29	3.753.532.923,95	6.872.886.673,34	183,10
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**679.991.012.156,65**	**668.082.892.610,87**	**11.908.119.545,78**	**1,78**
8.1.08	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**89.360.923.163,11**	**89.373.568.583,28**	**(12.645.420,17)**	**(0,01)**
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	**89.360.923.163,11**	**89.373.568.583,28**	**(12.645.420,17)**	**(0,01)**
8.3	**BEBAN TRANSFER**	**9.597.200.000,00**	**9.450.620.000,00**	**146.580.000,00**	**1,55**
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	9.597.200.000,00	9.450.620.000,00	146.580.000,00	1,55
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	**9.597.200.000,00**	**9.450.620.000,00**	**146.580.000,00**	**1,55**
8.2	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	**380.911,00**	**849.000,00**	**(468.089,00)**	**(55,13)**
8.2.01	Beban Tidak Terduga	380.911,00	849.000,00	(468.089,00)	(55,13)
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	**380.911,00**	**849.000,00**	**(468.089,00)**	**(55,13)**
	JUMLAH BEBAN	**778.949.516.230,76**	**766.907.930.194,15**	**12.041.586.036,61**	**1,57**
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**62.596.510.967,31**	**(13.873.423.558,50)**	**76.469.934.525,81**	**(551,20)**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4	**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**	**5.337.791.842,60**	**311.366.209,17**	**5.026.425.633,43**	**1.614,31**

Kode	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	4.258.127.686,60	311.366.209,17	3.946.761.477,43	1.267,56
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.079.664.156,00	0,00	1.079.664.156,00	100,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	**5.337.791.842,60**	**311.366.209,17**	**5.026.425.633,43**	**1.614,31**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(5.337.791.842,60)**	**(311.366.209,17)**	**(5.026.425.633,43)**	**1.614,31**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**57.258.719.124,71**	**(14.184.789.767,67)**	**71.443.508.892,38**	**(503,66)**
POS LUAR BIASA					
8.5	**BEBAN LUAR BIASA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**57.258.719.124,71**	**(14.184.789.767,67)**	**71.443.508.892,38**	**(503,66)**

5.4.1 Kegiatan Operasional

Kegiatan Operasional menyajikan informasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Bukittinggi serta besarnya beban yang harus ditanggung untuk melakukan pelayanan dan pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2024. Rincian Kegiatan Operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.98 Kegiatan Operasional Tahun 2024

Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan
1	*2*	*3*	*4*
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	**841.546.027.198,07**	**753.034.506.635,65**	**88.511.520.562,42**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	134.814.440.618,61	142.987.180.928,20	(8.172.740.309,59)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	609.011.899.262,46	588.770.953.422,00	20.240.945.840,46
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	97.719.687.317,00	21.276.372.285,45	76.443.315.031,55
JUMLAH PENDAPATAN	**841.546.027.198,07**	**753.034.506.635,65**	**88.511.520.562,42**

5.4.1.1 Pendapatan

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
841.546.027.198,07	**753.034.506.635,65**

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang diakui oleh pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang merupakan hak pemerintah daerah yang menambah ekuitas dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi Pendapatan-LO selama Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp841.546.027.198,07 merupakan jumlah pendapatan yang diakui dikarenakan timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan yang telah direalisasikan.

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2024 Rp 134.814.440.618,61	Tahun 2023 Rp 142.987.180.928,20

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dengan dasar pemungutannya adalah peraturan daerah. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah, mendukung pemerintah daerah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), membiayai berbagai program pembangunan di daerah, menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dengan mengikuti ketentuan bahwa setiap penetapan oleh pemerintah daerah (secara jabatan) menjadi Pendapatan Asli Daerah. Penetapan yang dimaksud ini adalah Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan ketentuan sesuai dengan SAP. Selain pendapatan dengan penetapan Pendapatan-LO juga memuat pendapatan yang diterima langsung dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi (WP/WR) dan wajib bayar lainnya, baik melalui Kas Bendahara Penerimaan maupun langsung ke Kas Daerah tanpa didahului dengan penetapan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2024 adalah sebesar Rp134.814.440.618,61 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.99 Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah LO dan LRA Daerah Tahun 2024

Uraian Rekening	Realisasi LO Rp	Realisasi LRA Rp	Selisih Rp
1	*2*	*3*	*4 = (2-3)*
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**134.814.440.618,61**	**130.112.097.312,94**	**4.702.343.305,67**
Pajak Daerah-LO	54.580.535.186,00	50.098.130.579,00	4.482.404.607,00
Retribusi Daerah-LO	62.686.102.961,39	51.629.686.961,72	11.056.415.999,67
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	10.973.923.679,00	9.860.884.216,00	1.113.039.463,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	6.573.878.792,22	18.523.395.556,22	(11.949.516.764,00)

5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	*Tahun 2024*	*Tahun 2023*
	Rp	*Rp*
	54.580.535.186,00	*53.111.344.882,00*

Pajak Daerah adalah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Ciri-Ciri Pajak Daerah

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya dan apabila wajib pajak tidak melunasinya maka akan dianggap sebagai utang pajak. Untuk ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah, maka diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak terutang yang dibayarkan melewati batas waktu pembayaran.

Pajak Daerah dikelola sepenuhnya oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Pada Tahun 2024 Pendapatan Pajak Daerah pada Pendapatan-LO direalisasikan sebesar Rp54.580.535.186,00 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.100 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian Rekening	Realisasi Rp
1	*2*	*3*
7.1.01	**PAJAK DAERAH – LO**	**54.580.535.186,00**
7.1.01.09	Pajak Reklame-LO	807.955.558,00
7.1.01.12	Pajak Air Tanah-LO	132.344.376,00
7.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	6.947.150.189,00
7.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	14.630.055.205,00
7.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	32.063.029.858,00

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan turunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdapat sedikit perbedaan pengelompokan jenis pajak daerah seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.101 Pengelompokan Jenis Pajak Daerah

No.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
1.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Pajak Hotel
2.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.	Pajak Restoran
3.	PBJT	Pajak Hiburan
4.	Pajak Reklame;	Pajak Reklame
5.	Pajak Air Tanah	Pajak Penerangan Jalan
6.	Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan;	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7.	Pajak Sarang Burung Walet;	Pajak Parkir
8.	Opsen PKB	Pajak Air Tanah
9.	Opsen BBNKB.	Pajak Sarang Burung Walet
10.		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11.		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis Pajak yang dimaksud dalam PBJT adalah PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Tenaga Listrik, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Jasa Parkir, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp4.482.404.607,00. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.102 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak-LO dengan LRA Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Pajak-LO Rp	Realisasi Pendapatan Pajak-LRA Rp	Selisih Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5=(3-4)*
1	Pajak Reklame-LO	807.955.558,00	846.030.170,00	(38.074.612,00)
2	Pajak Air Tanah-LO	132.344.376,00	56.763.932,00	75.580.444,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	6.947.150.189,00	3.326.935.079,00	3.620.215.110,00
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	14.630.055.205,00	14.651.555.005,00	(21.499.800,00)
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	32.063.029.858,00	31.216.846.393,00	846.183.465,00
Jumlah		**54.580.535.186,00**	**50.098.130.579,00**	**4.482.404.607,00**

Selisih antara Pendapatan LO dan pendapatan LRA sebesar Rp4.482.404.607,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi pembayaran piutang tahun 2023 sebesar Rp1.022.200.865,00 dengan rincian yaitu:
   a. Realisasi Piutang Pajak Reklame senilai Rp87.329.000,00
   b. Realisasi Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp3.817.321,00
   c. Realisasi Piutang PBB-P2 senilai Rp891.778.221,00
   d. Realisasi Piutang BPHTB senilai Rp21.499.800,00

e. Realisasi Piutang PBJT senilai Rp17.776.523,00 dengan rincian sebagai berikut :

- PBJT-Jasa Perhotelan Rp1.326.000,00
- PBJT-Makanan dan/atau Minuman Rp16.450.523,00

2. Penambahan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp5.505.326.834,00 dengan rincian yaitu:

a. Penambahan Piutang Pajak Reklame senilai Rp49.975.750,00

b. Penambahan Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp79.397.765,00

c. Penambahan Piutang PBB-P2 senilai Rp4.511.993.331,00

d. Penambahan Piutang PBJT senilai Rp863.959.988,00 dengan rincian sebagai berikut:

- PBJT-Jasa Perhotelan Rp863.460.488,00
- PBJT-Makanan dan/atau Minuman Rp499.500,00

3. Pengurangan/Penyesuaian pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame tahun lalu sebesar Rp485.745.503,00

4. Penambahan/Penyesuaian pendapatan diterima dimuka atas pembayaran Pajak Reklame tahun berjalan sebesar Rp486.466.865,00

Selisih Pendapatan LO dan pendapatan LRA tersebut juga dapat dirinci sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.103 Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LRA dengan LO Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Awal Piutang 1 Januari 2024	Realisasi Piutang 2023	Penambahan Piutang	Koreksi Piutang yang telah hapus buku	Pendapatan diterima dimuka		Selisih
		Rp	Rp	Rp	Rp	Berkurang	Bertambah	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = (4-5+6-7+8)*
1	Pajak Reklame-LO	805.021.863,00	87.329.000,00	49.975.750,00		485.745.503,00	486.466.865,00	38.074.612,00
2	Pajak Air Tanah-LO	21.861.679,00	3.817.321,00	79.397.765,00				(75.580.444,00)
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	14.149.786.707,00	891.778.221,00	4.511.993.331,00				(3.620.215.110,00)
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	78.948.321,00	21.499.800,00	-				21.499.800,00
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	1.001.486.155,00	17.776.523,00	863.959.988,00				(846.183.465,00)
Jumlah		**16.057.104.725,00**	**1.022.200.865,00**	**5.505.326.834,00**		**485.745.503,00**	**486.466.865,00**	**4.482.404.607,00**

5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	*Tahun 2024*	*Tahun 2023*
	Rp	*Rp*
	62.686.102.961,39	*39.741.106.632,00*

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah, pemungutan retribusi daerah terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya. Retribusi Daerah dikelola oleh SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD. Realisasi Pendapatan Retribusi–LO selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp62.686.102.961,39 seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.104 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah- LO Tahun 2024

Kode	Uraian Rekening	Realisasi Rp
1	*2*	*3*
7.1.02	**Retribusi Daerah-LO**	**62.686.102.961,39**
7.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	6.720.453.530,00
7.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	11.732.606.188,72
7.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	260.936.000,00
7.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	447.561.000,00
7.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.252.088.000,00
7.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran-LO	419.470.000,00
7.1.02.01.05.0002	Retribusi Los-LO	601.518.864,00
7.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios-LO	274.785.806,00
7.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan-LO	2.054.201.500,00
7.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	1.729.289.000,00
7.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO	1.076.953.260,00
7.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	9.482.829.368,00
7.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	11.155.000,00
7.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	5.970.222.340,00
7.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	639.021.000,00
7.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	367.600.000,00
7.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	17.671.849.500,00
7.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	211.430.955,00
7.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	1.047.084.511,67
7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	715.047.138,00

Tabel 5.105 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah–LO per SKPD Tahun 2024

No.	Nama SKPD	Realisasi per SKPD Rp	Uraian Rekening APBD	Realisasi Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	DINAS KESEHATAN	18.787.838.718,72	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	6.720.453.530,00
			Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	11.732.606.188,72
			Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	260.936.000,00
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	73.843.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	776.739.438,00	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	61.692.300,00
			Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	715.047.138,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	127.500.000,00	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	127.500.000,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.647.799.500,00	Retribusi Pelayanan Persampahan-LO	1.647.799.500,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	1.597.576.000,00	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.252.088.000,00
			Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	345.488.000,00
6	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	113.962.500,00	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	113.962.500,00
7	DINAS PARIWISATA	17.841.421.700,00	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	211.975.200,00
			Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	17.557.887.000,00
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	71.559.500,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	590.985.955,00	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	11.155.000,00
			Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	367.600.000,00
			Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	211.430.955,00
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	800.000,00
9	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	21.128.173.554,67	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	447.561.000,00
			Retribusi Pelataran-LO	419.470.000,00
			Retribusi Los-LO	601.518.864,00
			Retribusi Kios-LO	274.785.806,00
			Retribusi Pelayanan Persampahan-LO	406.402.000,00
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	1.729.289.000,00

No.	Nama SKPD	Realisasi per SKPD Rp	Uraian Rekening APBD	Realisasi Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO	1.076.953.260,00
			Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	9.482.829.368,00
			Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	5.758.247.140,00
			Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	293.533.000,00
			Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	637.584.116,67
10	BADAN KEUANGAN	74.105.595,00	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	74.105.595,00
JUMLAH		**62.686.102.961,39**		**62.686.102.961,39**

Terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Retribusi-LRA dengan Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp11.056.415.999,67 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.106 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Retribusi - LO Rp	Realisasi Pendapatan Retribusi - LRA Rp	Selisih Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3-4)*
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	6.720.453.530,00	6.866.797.530,00	(146.344.000,00)
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	11.732.606.188,72	11.843.419.384,72	(110.813.196,00)
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	260.936.000,00	260.936.000,00	-
4	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	447.561.000,00		447.561.000,00
5	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.252.088.000,00	1.266.234.000,00	(14.146.000,00)
6	Retribusi Pelataran-LO	419.470.000,00	419.470.000,00	-
7	Retribusi Los-LO	601.518.864,00	460.289.685,00	141.229.179,00
8	Retribusi Kios-LO	274.785.806,00	72.708.625,00	202.077.181,00
9	Retribusi Pelayanan Persampahan-LO	2.054.201.500,00	2.054.201.500,00	-
10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	1.729.289.000,00	1.729.289.000,00	-

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Retribusi - LO Rp	Realisasi Pendapatan Retribusi - LRA Rp	Selisih Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3-4)*
11	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO	1.076.953.260,00		1.076.953.260,00
12	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	9.482.829.368,00		9.482.829.368,00
13	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	11.155.000,00	11.155.000,00	-
14	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	5.970.222.340,00	5.919.155.740,00	51.066.600,00
15	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	639.021.000,00	645.069.000,00	(6.048.000,00)
16	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	367.600.000,00	367.600.000,00	-
17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	17.671.849.500,00	17.681.948.210,00	(10.098.710,00)
18	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	211.430.955,00	211.430.955,00	-
19	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	1.047.084.511,67	1.110.137.880,00	(63.053.368,33)
20	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	715.047.138,00	709.844.452,00	5.202.686,00
TOTAL		**62.686.102.961,39**	**51.629.686.961,72**	**11.056.415.999,67**

Penguraian perbedaan realisasi Pendapatan Retribusi-LRA dengan Pendapatan Retribusi-LO pada SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.107 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO Per SKPD Tahun 2024

No.	Nama SKPD	Uraian Rekening APBD	Realisasi Pendapatan Retribusi - LO Rp	Realisasi Pendapatan Retribusi - LRA Rp	Selisih Rp
1	*2*	*3*	*4*	5	6
1	DINAS KESEHATAN	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	6.720.453.530,00	6.866.797.530,00	(146.344.000,00)
		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	11.732.606.188,72	11.843.419.384,72	(110.813.196,00)
		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	260.936.000,00	260.936.000,00	-
		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	73.843.000,00	73.843.000,00	-
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	61.692.300,00	61.692.300,00	-
		Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	715.047.138,00	709.844.452,00	5.202.686,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	127.500.000,00	127.500.000,00	-

No.	Nama SKPD	Uraian Rekening APBD	Realisasi Pendapatan Retribusi - LO Rp	Realisasi Pendapatan Retribusi - LRA Rp	Selisih Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Pelayanan Persampahan-LO	1.647.799.500,00	1.647.799.500,00	-
5	DINAS PERHUBUNGAN	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.252.088.000,00	1.266.234.000,00	(14.146.000,00)
		Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	345.488.000,00	351.536.000,00	(6.048.000,00)
6	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	113.962.500,00	113.962.500,00	-
7	DINAS PARIWISATA	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	211.975.200,00	160.908.600,00	51.066.600,00
		Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	17.557.887.000,00	17.567.985.710,00	(10.098.710,00)
		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	71.559.500,00	-	71.559.500,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	11.155.000,00	11.155.000,00	-
		Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	367.600.000,00	367.600.000,00	-
		Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	211.430.955,00	211.430.955,00	-
		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	800.000,00	800.000,00	-
9	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	447.561.000,00		447.561.000,00
		Retribusi Pelataran-LO	419.470.000,00	419.470.000,00	-
		Retribusi Los-LO	601.518.864,00	460.289.685,00	141.229.179,00
		Retribusi Kios-LO	274.785.806,00	72.708.625,00	202.077.181,00
		Retribusi Pelayanan Persampahan-LO	406.402.000,00	406.402.000,00	-
		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	1.729.289.000,00	1.729.289.000,00	-
		Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO	1.076.953.260,00		1.076.953.260,00
		Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	9.482.829.368,00		9.482.829.368,00

No.	Nama SKPD	Uraian Rekening APBD	Realisasi Pendapatan Retribusi - LO Rp	Realisasi Pendapatan Retribusi - LRA Rp	Selisih Rp
1	*2*	*3*	*4*	5	6
		Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	5.758.247.140,00	5.758.247.140,00	-
		Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	293.533.000,00	293.533.000,00	-
		Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	637.584.116,67	769.724.450,00	(132.140.333,33)
10	BADAN KEUANGAN	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	74.105.595,00	76.578.130,00	(2.472.535,00)
JUMLAH			**62.686.102.961,39**	**51.629.686.961,72**	**11.056.415.999,67**

Selisih antara Pendapatan Retribusi-LO dan Pendapatan Retribusi-LRA sebesar Rp11.056.415.999,67 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas selisih sebesar Rp146.344.000,00 merupakan Pendapatan Retribusi tahun 2023 yang baru disetor pada tahun 2024.
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah selisih sebesar Rp110.813.196,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Rp 107.475.874,00 yang merupakan selisih Penerimaan atas tagihan tahun 2023 yang dibayar oleh BPJS sebesar Rp1.309.935.474 dengan pengajuan klaim baru BPJS tahun 2024 sebesar Rp1.202.459.600,00
   b. Rp2.682.862,00 yang merupakan pembayaran atas piutang pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
   c. Rp654.460 yang merupakan pembayaran atas piutang BPJS Tenaga Kerja.
3. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selisih sebesar Rp5.202.686 merupakan pengakuan piutang retribusi 2024 yang belum dibayar.
4. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum selisih sebesar Rp14.146.000,00 merupakan retribusi tahun 2023 yang baru disetor di tahun 2024.
5. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan selisih sebesar Rp6.048.000,00 merupakan retribusi tahun 2023 yang baru disetor di tahun 2024.
6. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya selisih sebesar Rp51.066.600,00 penambahan mutasi piutang tahun 2024.

7. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga selisih sebesar Rp10.098.710,00 merupakan penerimaan pembayaran tunggakan retribusi tahun 2023.
8. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah selisih sebesar Rp63.053.368,33 dengan rincian sebagai berikut:
    a. Pada Dinas Pariwisata yaitu piutang atas sewa RM Family Benteng tahun 2024 sebesar Rp71.559.500,00
    b. Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu adanya Pendapatan Diterima Dimuka Menara Telkomsel di Pelataran Lantai 1 dan Selasar pada gedung Pertokoan Pasar Atas (Persetujuan Pengelola Barang No : 030/06/BK.06/2022 Tanggal 23 Desember 2022) sebesar Rp132.140.333,33
    c. Pada Badan Keuangan yaitu pembayaran Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar (Rp2.472.535).
9. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan selisih sebesar Rp447.561.000,00 merupakan penambahan mutasi piutang tahun 2024.
10. Retribusi Los selisih sebesar Rp141.229.179,00 merupakan penambahan mutasi piutang tahun 2024.
11. Retribusi Kios selisih sebesar Rp202.077.181,00 merupakan penambahan mutasi piutang tahun 2024.
12. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan selisih sebesar Rp1.076.953.260,00 merupakan penambahan mutasi piutang tahun 2024.
13. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan selisih sebesar Rp9.482.829.368,00 merupakan penambahan mutasi piutang tahun 2024.

		Tahun 2024	*Tahun 2023*
		Rp	*Rp*
5.4.1.1.1.3	*Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO*	*10.973.923.679,00*	*10.097.553.826,00*

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/ deviden. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 merupakan bagian laba/deviden yang dibagikan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi atas aktifitas Penyertaan Modal yang dilakukan pada Perusahaan Bank Nagari BPD Sumatera Barat dan pada PT. BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi serta pada Perumda Tirta Jam Gadang. Selama Tahun 2024 realisasi Pendapatan-LO dari Deviden adalah sebesar Rp10.973.923.679,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.108 Perbandingan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian Rekening	Realisasi LO Rp	Realisasi LRA Rp	Selisih Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5=(3-4)*
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.973.923.679,00	9.860.884.216,00	1.113.039.463,00
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	10.017.289.316,00	9.860.884.216,00	156.405.100,00
	- Bank Nagari	8.976.336.988,00	8.953.721.052,00	22.615.936,00
	- BPRS Jam Gadang	1.040.952.328,00	907.163.164,00	133.789.164,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	956.634.363,00	-	956.634.363,00

Perbedaan antara realisasi LRA dan realisasi LO sebesar Rp1.113.039.463,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Deviden atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan selisih sebesar Rp156.405.100,00 dengan keterangan sebagai berikut:
   a. Bank Nagari

      Selisih sebesar Rp22.615.936,00 yaitu Deviden Tahun 2024 yang akan diterima Tahun 2025 sebesar Rp8.976.336.988,00 dengan piutang Deviden Tahun 2023 yang telah direalisasikan di Tahun 2024 sebesar Rp 8.953.721.052,00

   b. PT. BPRS Jam Gadang Selisih sebesar Rp133.789.164,00 yaitu Deviden Tahun 2024 yang akan diterima Tahun 2025 sebesar Rp1.040.952.328,00 dengan piutang Deviden Tahun 2023 yang telah direalisasikan di Tahun 2024 sebesar Rp907.163.164,00
2. Pada PDAM selisih sebesar 956.634.363,00 merupakan Laba ditahan yang tidak diterima dari PDAM karena adanya Defisit pada PDAM

5.4.1.1.1.4 *Lain-lain PAD yang Sah*	*Tahun 2024* *Rp*	*Tahun 2023* *Rp*
	6.573.878.792,22	*40.037.175.588,20*

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selama Tahun 2024 Lain-lain PAD yang Sah-LO adalah sebesar Rp6.573.878.792,22. berikut perbandingan realisasi LRA serta rinciannya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.109 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian Rekening	Realisasi LO Rp	Realisasi LRA Rp	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5(3-4)*
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH - LO	**6.573.878.792,22**	**18.523.395.556,22**	**(11.949.516.764,00)**
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO	0,00	0,00	-
2	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO	48.180.000,00	48.180.000,00	-
3	Hasil Sewa BMD-LO	115.210.100,00	-	115.210.100,00
4	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.041.793.555,00	1.041.793.555,00	-
5	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	65.840.288,00	65.840.288,00	-
6	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	67.804.979,00	1.762.911,00	66.042.068,00
7	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	11.176.643,00	11.176.643,00	-
8	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	0,00	0,00	-
9	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	66.042.068,00	(66.042.068,00)
10	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	13.137.069,00	13.137.069,00	-
11	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	801.441.956,44	801.931.520,44	(489.564,00)
12	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	0,00	0,00	-
13	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	578.333.157,00	578.333.157,00	-
14	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	107.664.076,23	107.664.076,23	-
15	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	0,00	11.025.270,00	(11.025.270,00)
16	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	0,00	75.498,00	(75.498,00)
17	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0,00	24.409.509,00	(24.409.509,00)
18	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	0,00	0,00	-
19	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	0,00	9.703.408,00	(9.703.408,00)
20	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	0,00	0,00	-
21	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	0,00	0,00	-
22	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	0,00	39.800,00	(39.800,00)
23	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	0,00	22.850,00	(22.850,00)
24	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	0,00	0,00	-
25	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	0,00	638.615,00	(638.615,00)
26	Pendapatan Denda PBBP2-LO	244.192.119,00	244.192.119,00	-
27	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO	22.513.417,00	0,00	22.513.417,00
28	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	9.703.408,00	0,00	9.703.408,00
29	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO	29.384.000,00	0,00	29.384.000,00
30	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort / Cottage -LO	75.498,00	0,00	75.498,00
31	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	638.615,00	0,00	638.615,00
32	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO	39.800,00	0,00	39.800,00

No	Uraian Rekening	Realisasi LO Rp	Realisasi LRA Rp	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5(3-4)*
33	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	22.850,00	0,00	22.850,00
34	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-LO	60.118,00	0,00	60.118,00
35	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	6.075.080,00	6.079.090,00	(4.010,00)
36	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los-LO	7.539.502,00	7.539.502,00	-
37	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios-LO	1.243.078,00	1.243.078,00	-
38	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	0,00	0,00	-
39	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO	63.890.326,00	63.969.884,00	(79.558,00)
40	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	24.370.535,00	24.370.535,00	-
41	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	0,00	-
42	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	102.604.402,47	12.177.280.890,47	(12.074.676.488,00)
43	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	0,00	-
44	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	649.312.583,00	649.312.583,00	-
45	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK-LO	0,00	0,00	-
46	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	24.670.433,00	30.670.433,00	(6.000.000,00)
47	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS-LO	113.572.132,92	113.572.132,92	-
48	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-LO	2.682.862,00	2.682.862,00	-
49	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan-LO	19.408.250,00	19.408.250,00	-
50	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa-LO	5.202.000,00	5.202.000,00	-
51	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak-LO	1.485.000,00	1.485.000,00	-
52	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu-LO	421.394.000,00	421.394.000,00	-
53	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur-LO	22.820.838,00	22.820.838,00	-
54	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS-LO	23.040.593,00	23.040.593,00	-
55	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2-LO	3.000.000,00	3.000.000,00	-
56	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain-LO	377.851.294,56	377.851.294,56	-

No	Uraian Rekening	Realisasi LO Rp	Realisasi LRA Rp	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5(3-4)*
57	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan-LO	142.788.375,00	142.788.375,00	-
58	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-LO	1.121.153.444,45	1.121.153.444,45	-
59	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya-LO	59.703.426,57	59.703.426,57	-
60	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya-LO	14.907.450,62	14.907.450,62	-
61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS-LO	13.638.066,00	13.638.066,00	-
62	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00		-
63	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO	29.796.507,00	29.796.507,00	-
64	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga-LO	16.963,96	16.963,96	-
65	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	0,00	0,00	-
66	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	164.500.000,00	164.500.000,00	-

Dari tabel di atas realisasi pendapatan LO dan LRA terdapat selisih sebesar Rp11.949.516.764,00 dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini:

1. Hasil Sewa BMD selisih sebesar Rp115.210.100,00 dengan keterangan sebagai berikut:
   a. Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp38.840.700,00 disebabkan oleh:
      - Penyesuaian pendapatan diterima dimuka Sewa Bank Nagari sebesar Rp17.297.000,00
      - Penyesuaian pendapatan diterima dimuka Sewa Bank BPR sebesar Rp8.521.500,00
      - Penyesuaian pendapatan diterima dimuka Sewa Tower sebesar Rp13.022.200,00
   b. Badan Keuangan sebesar Rp76.369.400,00 merupakan penyesuaian pendapatan diterima dimuka atas sewa ruang kantor Bank Nagari dan ATM Bank Nagari di Gedung Badan Keuangan yang pada tahun 2024 telah habis masa sewanya
2. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah selisih sebesar Rp489.564 yang merupakan mutasi kas lainnya atas pendapatan jasa giro pada TK Pembina (Rp452.989,00) dan TK Negeri 1 (Rp36.578,00)
3. Selisih yang terjadi pada Pendapatan Denda Pajak merupakan selisih karena perbedaan pencatatan realisasi denda pajak yang masih menggunakan rekening nomenklatur yang lama diantaranya Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya, Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya, Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan, Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi

Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) dan Pendapatan Denda Pajak Parkir.

4. Untuk Pendapatan Denda Pajak Hotel telah dipindahkan ke rekening Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel dengan selisih sebesar Rp18.358.130,00 yang merupakan penambahan mutasi piutang tahun 2024.
5. Untuk Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya telah dipindahkan ke rekening Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran dengan selisih sebesar Rp1.896.092,00 yang merupakan mutasi berkurang piutang tahun 2024.
6. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar selisih sebesar Rp60.118,00 merupakan penyesuaian (koreksi) kurang catat untuk keadaan piutang tahun 2023.
7. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan selisih sebesar Rp4.010,00 merupakan angka penyesuaian (koreksi) lebih catat untuk keadaan piutang tahun 2023 sebesar Rp.2.210,00 kemudian adanya penambahan SKRD senilai Rp. 4.100,00 untuk pembayaran retribusi dibawah 2014. Angka ini tidak mempengaruhi saldo akhir karena pada awalnya tidak tercatat dalam ketetapan. Selain itu terdapat realisasi pembayaran dari ketetapan untuk pembayaran retribusi dibawah tahun 2014 yang dibayar pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.800,00.
8. Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan selisih sebesar Rp79.558,00 merupakan koreksi penyesuaian (lebih catat) untuk saldo piutang tahun 2023 senilai Rp. 60.118,00 dan adanya realisasi pembayaran dari ketetapan untuk pembayaran retribusi dibawah tahun 2014 yang dibayar pada tahun 2024 sebesar Rp. 19.440,00.
9. Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa selisih sebesar Rp12.074.676.488,00 merupakan pelunasan piutang DKK atas Jaminan Uang Muka pengerjaan Konstruksi pembanguna RSUD kota Bukittinggi Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) Nomor 103/PDT/2022/PT PDG
10. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS selisih sebesar Rp6.000.000,00 merupakan kelebihan gaji tahun sebelumnya yang disetorkan pada Dinas Perhubungan

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
609.011.899.262,46	588.770.953.422,00

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Celah fiskal daerah merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk menutupi kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, perlu adanya tambahan pendapatan berupa transfer ke daerah

adapun realisasi penerimaan Pendapatan Transfer selama tahun 2024 adalah sebesar Rp 609.011.899.262,46. adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.110 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024

No	Uraian Rekening	Realisasi LO Rp	Realisasi LRA Rp	Selisih Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5=(3-4)*
PENDAPATAN TRANSFER - LO		**609.011.899.262,46**	**611.309.530.338,46**	**(2.297.631.076,00)**
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		**562.524.201.758,00**	**566.475.644.458,00**	**(3.951.442.700,00)**
1	Dana Perimbangan	555.370.086.758,00	559.321.529.458,00	(3.951.442.700,00)
2	Insentif Fiskal-LO	7.154.115.000,00	7.154.115.000,00	-
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		**46.487.697.504,46**	**44.833.885.880,46**	**1.653.811.624,00**
3	Pendapatan Bagi Hasil-LO	36.063.346.998,00	34.409.535.374,00	1.653.811.624,00
4	Bantuan Keuangan	10.424.350.506,46	10.424.350.506,46	-

5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2024	*Tahun 2023*
Rp	*Rp*
562.524.201.758,00	*554.987.256.154,00*

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari Dana Perimbangan-LO dan Insentif Fiskal. Dana Perimbangan-LO terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO. Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dan LO dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.111 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2024

Uraian Rekening	Realisasi LO Rp	Realisasi LRA Rp	Selisih Rp
2	*3*	*4*	*5=(3-4)*
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	**562.524.201.758,00**	**566.436.096.135,00**	**(3.911.894.377,00)**
Dana Perimbangan-LO	555.370.086.758,00	559.281.981.135,00	(3.911.894.377,00)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	10.185.468.110,00	14.136.910.810,00	(3.951.442.700,00)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	449.518.151.028,00	449.518.151.028,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	31.503.797.544,00	31.503.797.544,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	64.162.670.076,00	64.123.121.753,00	39.548.323,00
Insentif Fiskal-LO	7.154.115.000,00	7.154.115.000,00	-

		Tahun 2024	Tahun 2023
		Rp	Rp
5.4.1.1.2.2	*Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO*	46.487.697.504,46	33.783.697.268,00

Pendapatan Transfer Antar Daearah LO pada tahun 2024 hanya berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LO. Selama Tahun 2024 realisasi bagi hasil tersebut adalah sebesar Rp46.487.697.504,46

Perbandingan antara realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dan LRA serta rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.112 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah LO Tahun 2024

Uraian Rekening	Realisasi LO Rp	Realisasi LRA Rp	Selisih Rp
1	2	3	*4=(2-3)*
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	**46.487.697.504,46**	**44.833.885.880,46**	**1.653.811.624,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	8.637.878.590,00	8.863.365.298,00	(225.486.708,00)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	3.771.153.689,00	4.023.933.224,00	(252.779.535,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	12.011.186.497,00	9.924.313.415,00	2.086.873.082,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	123.043.939,00	77.839.154,00	45.204.785,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	11.520.084.283,00	11.520.084.283,00	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.424.350.506,46	10.424.350.506,46	-

Dari tabel di atas realisasi pendapatan LO dan LRA terdapat selisih sebesar Rp1.653.811.624,00 dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor selisih sebesar Rp225.486.708,00 merupakan selisih antara realisasi DBH PKB yang diterima Tahun 2024 sebesar Rp2.736.851.417 dengan piutang transfer karena kekurangan salur 2024 sebesar Rp 2.511.364.709,00
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selisih sebesar Rp252.779.535,00 merupakan selisih antara realisasi DBH BBNKB yang diterima Tahun 2024 sebesar Rp 1.097.283.836,00 dengan piutang transfer karena kekurangan salur 2024 sebesar Rp 844.504.301,00
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selisih sebesar Rp2.086.873.082,00 merupakan selisih antara realisasi DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang diterima Tahun 2024 sebesar Rp4.981.263.387,00 dengan piutang transfer karena kekurangan salur 2024 sebesar Rp 7.068.136.469,00

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan selisih sebesar Rp45.204.785,00 selisih antara realisasi DBH Pajak Air Permukaan yang diterima Tahun 2024 sebesar Rp8.816.248,00 dengan piutang transfer karena kekurangan salur 2024 sebesar Rp54.021.033,00

5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp
97.824.687.317,00	**21.276.372.285,45**

Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer.

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2024 sebesar Rp97.824.687.417,00 adalah akumulasi berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat, dari badan/ lembaga organisasi dalam negeri/luar negeri berupa aset. Adapun rincian dari Pendapatan Hibah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.113 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 2024

No	Uraian Rekening	Realisasi LO Rp	Realisasi LRA Rp	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5(3-4)*
	PENDAPATAN HIBAH - LO	**97.824.687.317,00**	**-**	**97.824.687.317,00**
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	97.719.687.317,00	-	97.719.687.317,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	105.000.000,00	-	105.000.000,00

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat senilai Rp97.719.687.317,00 dapat dirinci sebagai berikut :
   - Hibah Instalasi Penerangan Jalan Umum dari Kementerian PUPR Republik Indonesia sebesar Rp3.681.519.689,00 sesuai BAST Hibah nomor : PL.06.04-Bb3-PNW1-SB/363 dan nomor : 000.2-3.2/14BK.06/2024
   - Hibah Jalan Kota Arteri (Jalan Jenderal Sudirman) sebesar Rp10.324.667.628,00 sesuai BAST Hibah nomor : PL.04.0-Bb3-PJNW1-SB/799 dari Kementerian PUPR.
   - Hibah Tanah Jalan Sudirman dari Kementerian PUPR sesuai BAST Barang Milik Negara Nomor PL.04.0-Bb3-PJNW1-SB/799 dan nomor : 000.2-3.2/24BK.06/2024 sebesar Rp83.608.500.000,00
2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri senilai Rp105.000.000,00 merupakan Hibah CSR dari PT.Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk ke Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa 50 (lima puluh) set meja makan, kursi dan payung untuk Street Food Stasiun Lambung

5.4.1.2 Beban

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
778.949.516.230,76	766.907.930.194,15

Beban adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Realisasi Beban pada tahun 2024 sebesar Rp778.949.516.230,76 mengalami kenaikan sebesar Rp12.041.586.036,61 dari Beban tahun 2023 sebesar Rp766.907.930.194,15. Rincian Beban-LO Pemerintah Kota Bukittinggi tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.114 Beban Tahun 2024

NO	Uraian	2024 Rp	2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (2-3)*
	BEBAN	**778.949.516.230,76**	**766.907.930.194,15**	**12.041.586.036,61**
1	Beban Pegawai	337.675.834.135,81	302.975.149.463,20	34.700.684.672,61
2	Beban Barang dan Jasa	275.543.981.565,55	311.999.875.352,72	(36.455.893.787,17)
3	Beban Subsidi	2.499.986.478,00	2.499.916.363,00	70.115,00
4	Beban Hibah	50.747.190.380,00	42.061.418.508,00	8.685.771.872,00
5	Beban Bantuan Sosial	2.897.600.000,00	4.793.000.000,00	(1.895.400.000,00)
6	Beban Penyisihan Piutang	10.626.419.597,29	3.753.532.923,95	6.872.886.673,34
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	89.360.923.163,11	89.373.568.583,28	(12.645.420,17)
8	Beban Bantuan Keuangan	9.597.200.000,00	9.450.620.000,00	146.580.000,00
9	Beban Tidak Terduga	380.911,00	849.000,00	(468.089,00)

5.4.1.2.1 Beban Pegawai

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp.	Rp
337.675.834.135,81	302.975.149.463,20

Beban Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beban Pegawai terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan ASN. Beban Tambahan Penghasilan ASN. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Penggunaan objek tersebut didasarkan pada penggunaan model konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis No.04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.

Realisasi Beban Pegawai dalam Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp337.675.834.135,81 dengan realisasi Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp336.607.731.061,67. Selanjutnya Realisasi Belanja dan Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.115 Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2024

No	Uraian	Beban 2024 Rp	Belanja 2024 Rp	Selisih Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3-4*
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	192.101.184.068,00	191.534.898.876,00	566.285.192,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	88.407.266.458,00	88.152.306.110,00	254.960.348,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.401.173.655,14	40.357.719.961,00	6.043.453.694,14
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	9.432.584.080,00	9.432.584.080,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	768.563.704,67	768.563.704,67	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	565.062.170,00	565.062.170,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	0,00	5.796.596.160,00	(5.796.596.160,00)
Jumlah		**337.675.834.135,81**	**336.607.731.061,67**	**1.068.103.074,14**

Selisih antara Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai sebesar Rp1.068.103.074,14 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan beban pegawai karena adanya hutang pegawai selama tahun 2024 adalah sebesar Rp1.923.010.405,85 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp59.458.800,00
   b. Dinas Lingkungan hidup sebesar Rp4.805.800,00
   c. Dinas Pariwisata sebesar Rp9.219.000,00
   d. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.794.883.195,85
   e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp51.089.430,00
   f. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp3.554.180,00
2. Penambahan beban pegawai karena koreksi hutang iuran jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp10.479.818,00
3. Penambahan beban pegawai karena koreksi beban pegawai dari beban barang dan jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp11.200.000
4. Pengurangan beban pegawai karena pembayaran hutang selama tahun 2024 sebesar (Rp680.752.418,00) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp6.120.000,00
   b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp171.050,00
   c. Dinas Kesehatan sebesar Rp674.461.368,00
5. Pengurangan beban pegawai karena reklas hutang belanja pegawai ke hutang belanja barang dan jasa pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp193.466.279,71)
6. Pengurangan beban pegawai karena koreksi gaji pegawai pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp2.143.733,00)

7. Pengurangan beban pegawai karena koreksi iuran BPJS ASN pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp224.719,00).

5.4.1.2.2 Beban Barang dan Jasa	Tahun 2024 Rp. 275.543.981.565,55	Tahun 2023 Rp 311.999.875.352,72

Tabel 5.116 Perbandingan Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

No	Uraian	Beban 2024 Rp	Belanja 2024 Rp	Selisih Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3-4*
1	Belanja Barang	49.160.480.563,75	35.510.547.931,87	13.649.932.631,88
2	Belanja Jasa	140.812.506.318,05	129.509.277.875,13	11.303.228.442,92
3	Belanja Pemeliharaan	23.497.548.269,85	22.044.698.814,85	1.452.849.455,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	45.271.027.125,00	42.860.599.777,00	2.410.427.348,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.802.419.288,90	16.404.660.750,00	397.758.538,90
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	12.441.993.638,00	(12.441.993.638,00)
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	2.132.395.407,00	(2.132.395.407,00)
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	11.698.396.955,90	(11.698.396.955,90)
Jumlah		**275.543.981.565,55**	**272.602.571.149,75**	**2.941.410.415,80**

Selisih antara Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp2.941.410.415,80 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan beban barang dan jasa karena adanya penambahan hutang barang dan jasa selama tahun 2024 sebesar Rp2.707.427.352,92 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp42.026.208,75
   b. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.662.401.144,17
   c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp3.000.000,00
2. Penambahan beban barang dan jasa karena reklas dari beban pegawai pada Dinas Kesehatan sebesar Rp193.466.279,71
3. Penambahan beban barang dan jasa dari reklas aset tetap non kapitalisasi dan barang pakai habis sebesar Rp753.913.439,10 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.625.000,00
   b. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp480.000,00
   c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp6.613.398,00
   d. Kecamatan Mandiangin Koto Salayan sebesar Rp4.395.600,00
   e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp672.545.690,10

f. Dinas Pariwisata sebesar Rp1.060.000,00

g. Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp477.400,00

h. Kecamatan Guguk Panjang sebesar Rp720.000,00

i. Sekretariat Daerah sebesar Rp14.985.000,00

j. Dinas Kesehatan sebesar Rp28.202.351,00

k. Dinas Pertanian sebesar Rp3.384.000,00

l. Sekretariat DPRD sebesar Rp19.425.000,00

4. Penambahan beban barang dan jasa karena koreksi utang sebesar Rp0,93 pada Dinas Kesehatan

5. Penambahan beban barang dan jasa karena berkurangnya utang belanja modal dari belanja barang dan jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.148.499,07

6. Pengurangan beban barang dan jasa dari pengurangan utang selama tahun 2024 sebesar (Rp483.813.499,71) dengan rincian sebagai berikut:

   a. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp11.270.000,00

   b. Dinas Kesehatan sebesar Rp457.211.231,71

   c. Sekretariat DPRD sebesar Rp15.332.268,00

7. Pengurangan beban barang dan jasa karena kapitalisasi menjadi aset tetap sebesar (Rp62.787.550,00) dengan rincian sebagai berikut:

   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp54.792.550,00

   b. Badan Keuangan sebesar Rp4.995.000,00

   c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp3.000.000,00

8. Pengurangan beban karena penambahan persediaan sebesar (Rp157.744.106,22)

9. Pengurangan beban karena reklas dari beban barang dan jasa ke beban pegawai pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp11.200.000,00).

5.4.1.2.3 Beban Subsidi

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
2.499.986.478,00	**2.499.916.363,00**

Beban Subsidi Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp2.499.986.478,00. Tidak ada selisih antara Beban Subsidi dengan Belanja Subsidi Pemerintah Kota Bukittinggi, rincian Realisasi Beban Subsidi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.117 Beban Subsidi Tahun 2024

No	Uraian	Beban 2024 Rp	Belanja 2024 Rp	Selisih Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3-4*
1	Beban Subsidi kepada BUMD	2.499.986.478,00	2.499.986.478,00	0,00
Jumlah		**2.499.986.478,00**	**2.499.986.478,00**	**0,00**

5.4.1.2.4 Beban Hibah

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
50.747.190.380,00	42.061.418.508,00

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk pemberian uang/barang atau jasa kepada lembaga/organisasi masyarakat. pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2024 yaitu sebesar Rp50.747.190.380,00. Rincian Realisasi Beban Subsidi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.118 Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2024

No	Uraian	Beban 2024 Rp	Belanja 2024 Rp	Selisih Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3-4*
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	15.431.761.850,00	15.431.761.850,00	0,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	591.816.903,12	(591.816.903,12)
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.227.282.970,00	12.227.282.970,00	0,00
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.041.873.749,00	15.041.873.749,00	0,00
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
6	Beban Hibah kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00
7	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	7.284.106.494,00	7.284.106.494,00	0,00
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	737.165.317,00	737.165.317,00	0,00
Jumlah		**50.747.190.380,00**	**51.339.007.283,12**	**(591.816.903,12)**

Selisih antara Beban Hibah dan Belanja Hibah sebesar Rp591.816.903,12 merupakan reklas beban hibah ke persediaan barang untuk diserahkan ke Pemerintah Pusat ke kantor Kejaksaaan Negeri Kota Bukittinggi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2024.

5.4.1.2.5 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp 4.793.000.000,00
2.897.600.000,00	

Beban Bantuan Sosial adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban Bantuan Sosial yang direalisasi pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah Beban Bantuan Sosial direncanakan kepada Keluarga dengan total beban selama tahun 2024 sebesar Rp2.808.100.000,00 dan Beban Bantuan Sosial Uang yang akan di Rencanakan Kepada Individu sebesar Rp89.500.000,00.

Tabel 5.119 Beban Bantuan Sosial Tahun 2024

No	Uraian	Beban 2024 Rp	Belanja 2024 Rp	Selisih Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3-4*
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	89.500.000,00	89.500.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.808.100.000,00	2.808.100.000,00	0,00
Jumlah		**2.897.600.000,00**	**2.897.600.000,00**	**0,00**

5.4.1.2.6 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2024
Rp
10.626.419.597,29

Tahun 2023
Rp
3.753.532.923,95

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp10.626.419.597,29 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.120 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024

No	Uraian	Beban 2024 Rp
1	*2*	*3*
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.167.768.540,16
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	9.447.897.380,15
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	10.753.676,98
Jumlah		**10.626.419.597,29**

5.4.1.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2024
Rp
89.360.923.163,11

Tahun 2023
Rp
89.373.568.583,28

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap. Aset Lain-Lain serta Aset Tidak Berwujud yang dapat disusutkan/diamortisasikan (depreciableasets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp89.360.923.163,11 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp42.625.091.413,06 karena penambahan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin selama tahun 2024.
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.299.266.333,77 disebabkan karena adanya penambahan nilai akumulasi penyusutan aset gedung dan bangunan selama tahun 2024.

3. Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp23.856.534.139,28 karena penambahan nilai akumulasi penyusutan aset jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2024.
4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp28.130.000,00 karena adanya penambahan nilai akumulasi penyusutan aset tetap lainnya selama tahun 2024.
5. Beban Penyusutan Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp133.647.351,00 digunakan untuk mencatat penambahan nilai akumulasi penyusutan aset rusak berat/usang disebabkan karena tidak tersedianya rekening yang lebih terperinci untuk mencatat beban akumulasi penyusutan aset rusak berat atau usang.
6. Beban Amortisasi Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud sebesar Rp418.253.926,00 karena adanya penambahan nilai amortisasi aset lainnya/aset tidak berwujud selama tahun 2024.

Tabel 5.121 Beban Penyusutan Tahun 2024

No	Uraian	Beban 2023 Rp
1	*2*	*3*
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	42.625.091.413,06
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.299.266.333,77
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23.856.534.139,28
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	28.130.000,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	133.647.351,00
6	Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	418.253.926,00
Jumlah		**89.360.923.163,11**

5.4.1.2.8 Beban Bantuan Keuangan

Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp
9.597.200.000,00	**9.450.620.000,00**

Beban Bantuan Keuangan merupakan beban yang dikeluarkan oleh suatu entitas untuk memberikan bantuan keuangan kepada pihak-pihak tertentu. Sesuai dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-47-2024 Tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sebagai Penerima Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2024. Realisasi Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2024 adalah sebesar Rp9.597.200.000,00.

5.4.1.2.9 Beban Tidak Terduga

Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp
380.911,00	**849.000,00**

Beban Tidak Terduga sebesar Rp380.911,00 pada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2024 adalah pengembalian atas kelebihan penerimaan Pembayaraan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama Ratna dengan NOP 13.75.010.006.002.0126.0 di Badan Keuangan.

5.4.2 Kegiatan Non Operasional

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
5.337.791.842,60	(311.366.209,17)

Kegiatan Non Operasional Pemko Bukittinggi merupakan pendapatan dan beban yang bukan merupakan aktifitas rutin. seperti Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar. Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Tahun 2024 terdapat defisit dari kegiatan ini dengan rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut:

Tabel 5.122 Beban Non Operasional Tahun 2024

No	Uraian	Beban 2024 Rp
1	*2*	*3*
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	4.258.127.686,60
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.079.664.156,00
JUMLAH		**5.337.791.842,60**

5.4.3 Surplus/Defisit

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp	Rp
57.258.719.124,71	(14.184.789.767,67)

Surplus/Defisit LO adalah hasil dari penjumlahan selish lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa sehingga pada tahun 2024 Pemerintah Kota Bukittinggi mengalami defisit sebesar Rp(38.661.574.768,62)dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.123 Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2024

No	Uraian	Beban 2024 Rp
1	*2*	*3*
1	Surplus/Defisit Dari Operasional	62.596.510.967,31
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(5.337.791.842,60)
3	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		**57.258.719.124,71**

Berikut ini penjelasan dari Surplus/Defisit LO sebagai berikut:

1. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

   Selama tahun 2024 Kegiatan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan surplus sebesar Rp62.596.510.967,31 dengan Pendapatan Kegiatan Operasional sebesar Rp841.546.027.198,07 dan Beban Operasional sebesar Rp778.949.516.230,76.

2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

   Selama tahun 2024 Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan defisit sebesar (Rp5.337.791.842,60) dengan Defisit Penjualan

Aset Non Lancar LO sebesar (Rp4.258.127.686,60) dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp1.079.664.156,00)

3. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

   Selama tahun 2024 tidak terdapat realisasi terhadap Pos Luar Biasa pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi.

4. Sehingga Surplus/ Defisit LO tahun 2024 adalah Rp57.258.719.124,71.

5.5 Laporan Arus Kas

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
35.411.517.227,89	**33.224.700.728,80**

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan serta perubahan kas dan setara kas yang terjadi pada Kas Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2024. Penerimaan dan pengeluaran tersebut diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dan Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.124 Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023
1	2	3
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah	50.098.130.579,00	51.690.816.406,00
Retribusi Daerah	51.629.686.961,72	39.222.055.481,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.860.884.216,00	8.363.843.874,00
Lain-lain PAD yang Sah	18.475.215.556,22	23.603.666.700,20
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	566.436.096.135,00	554.987.256.154,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.833.885.880,46	28.741.470.215,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	134.012.443,45
Jumlah Arus Kas Masuk	741.333.899.328,40	706.743.121.273,65
Arus Kas Keluar	-	-
Belanja Pegawai	336.607.731.061,67	308.535.703.099,00
Belanja Barang dan Jasa	272.602.571.149,75	308.199.944.742,03
Belanja Subsidi	2.499.986.478,00	2.499.916.363,00
Belanja Hibah	51.339.007.283,12	43.676.370.940,88
Belanja Bantuan Sosial	2.897.600.000,00	4.853.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	380.911,00	849.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	9.597.200.000,00	9.450.620.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	675.544.476.883,54	677.216.404.144,91
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**65.789.422.444,86**	**29.526.717.128,74**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-	-
Arus Kas Masuk	-	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya	48.180.000,00	232.326.899,00
Jumlah Arus Kas Masuk	48.180.000,00	232.326.899,00
Arus Kas Keluar	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.261.224.480,70	26.111.089.608,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.435.241.904,22	27.005.206.763,60
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.357.697.907,85	19.501.037.779,33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.278.037.927,00	1.406.224.400,00

URAIAN	2024	2023
1	2	3
Belanja Modal Aset Lainnya	199.800.000,00	-
Penyertaan Modal Daerah	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	63.532.002.219,77	74.023.558.551,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(63.483.822.219,77)**	**(73.791.231.652,40)**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	-	-
Arus Kas Masuk	-	-
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	28.737.359.396,00	49.239.883.533,00
Jumlah Arus Kas Masuk	28.737.359.396,00	49.239.883.533,00
Arus Kas Keluar	-	-
Koreksi SiLPA	-	-
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	28.737.359.396,00	49.240.120.533,00
Jumlah Arus Kas Keluar	28.737.359.396,00	49.240.120.533,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	**(237.000,00)**
Kenaikan / (Penurunan) Kas	**2.186.816.499,09**	**(44.097.723.959,66)**
Saldo Awal Kas	**33.224.700.728,80**	**77.322.424.688,46**
Saldo Akhir Kas	**35.411.517.227,89**	**33.224.700.728,80**
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:	-	-
Kas di Kas Daerah	30.169.727.325,33	27.739.504.611,02
Kas di Bendahara Penerimaan	-	166.538.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	797.687.446,00	-
Kas di BLUD	3.024.590.848,56	2.501.217.531,78
Kas Dana BOSP	160.064.456,00	986.838.017,00
Kas BOK	1.259.447.152,00	1.830.113.005,00
Kas Lainnya	-	489.564,00

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
65.789.422.444,86	29.526.717.128,74

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi bersumber dari pendapatan daerah (selain penjualan aset tetap) dikurangi dengan belanja daerah (selain belanja modal) selama tahun 2024.

Arus kas masuk tahun 2024 sebesar Rp741.333.899.328,40 naik sebesar Rp34.590.778.054,75 bila dibanding tahun 2023 sebesar Rp706.743.121.273,65, arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp65.789.422.444,86 yang merupakan selisih dari arus kas masuk sebesar Rp741.333.899.328,40 yang merupakan seluruh Realisasi APBD tahun 2024 dari Pos Pendapatan Daerah selain pendapatan dari penjualan aset dengan Arus Kas Keluar Rp675.544.476.883,54 yang merupakan Realisasi APBD tahun 2024 dari Pos Belanja Daerah selain

Belanja Modal. Arus Kas dari Aktivitas Operasi lebih rinci seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.125 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	2024	2023
1	2	3
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah	50.098.130.579,00	51.690.816.406,00
Retribusi Daerah	51.629.686.961,72	9.222.055.481,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.860.884.216,00	8.363.843.874,00
Lain-lain PAD yang Sah	18.475.215.556,22	23.603.666.700,20
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	566.436.096.135,00	554.987.256.154,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.833.885.880,46	28.741.470.215,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	134.012.443,45
Jumlah Arus Kas Masuk	741.333.899.328,40	706.743.121.273,65
Arus Kas Keluar	-	-
Belanja Pegawai	336.607.731.061,67	308.535.703.099,00
Belanja Barang dan Jasa	272.602.571.149,75	308.199.944.742,03
Belanja Subsidi	2.499.986.478,00	2.499.916.363,00
Belanja Hibah	51.339.007.283,12	43.676.370.940,88
Belanja Bantuan Sosial	2.897.600.000,00	4.853.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	380.911,00	849.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	9.597.200.000,00	9.450.620.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	675.544.476.883,54	677.216.404.144,91
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**65.789.422.444,86**	**29.526.717.128,74**

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
(63.483.822.219,77)	(73.791.231.652,40)

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang bertujuan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, aset lainnya serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas investasi bersumber dari pendapatan atas penjualan investasi Pemerintah Kota Bukittinggi baik berupa aset tetap maupun investasi selain aset tetap dikurangi dengan pengeluaran investasi baik berupa investasi terhadap aset tetap maupun investasi dalam bentuk lainnya.

Arus kas bersih dari aktivitas ini adalah selisih antara arus kas masuk dari aktivitas investasi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp(63.483.822.219,77).

Arus kas Masuk dari aktivitas Investasi pada tahun 2024 berjumlah Rp48.180.000,00 yang merupakan aktivitas penjualan investasi Pemerintah Kota Bukittinggi berupa aset lainnya.

Arus kas keluar dari aktivitas investasi selama tahun 2024 adalah sebesar Rp63.532.002.219,77 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.261.224.480,70
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp31.435.241.904,22
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp18.357.697.907,85
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.278.037.927,00
5. Belanja Modal Aset Lainnya Rp199.800.000,00

Tabel 5.126 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2024	2023
1	2	3
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Aset Lainnya	48.180.000,00	232.326.899,00
Jumlah Arus Kas Masuk	48.180.000,00	232.326.899,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.261.224.480,70	26.111.089.608,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.435.241.904,22	27.005.206.763,60
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.357.697.907,85	19.501.037.779,33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.278.037.927,00	1.406.224.400,00
Belanja Modal Aset Lainnya	199.800.000,00	-
Penyertaan Modal Daerah	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	63.532.002.219,77	74.023.558.551,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(63.483.822.219,77)**	**(73.791.231.652,40)**

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
(0)	(237.000,00)

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan BPJS. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar Rp(0,00) yang merupakan selisih dari penerimaan sebesar Rp28.737.359.396,00 dan pengeluaran Rp28.737.359.396,00. Rincian penerimaan dan pengeluaran pada aktivitas transitoris dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.127 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	28.737.359.396,00	49.239.883.533,00
Jumlah Arus Kas Masuk	28.737.359.396,00	49.239.883.533,00
Arus Kas Keluar		
Koreksi SiLPA	-	-
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	28.737.359.396,00	49.240.120.533,00
Jumlah Arus Kas Keluar	28.737.359.396,00	49.240.120.533,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**-**	**(237.000,00)**

5.5.4 Kenaikan/Penurunan Kas

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2.186.816.499,09	**(44.097.723.959,66)**

Angka 5.5.1 sampai dengan angka 5.5.4 di atas adalah menjelaskan kronologis atau pembagian dari mutasi kas daerah selama tahun 2024 yaitu terjadi kenaikan kas daerah sebesar Rp2.186.816.499,09. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Dimana terjadi penurunan kas sebesar Rp(44.097.723.959,66).

Posisi kas daerah tahun 2024 dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan pada 31 Desember 2024 menjadi Rp35.411.517.227,89 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.128 Saldo Kas dari Arus Kas

URAIAN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3
Saldo Awal Kas	**33.224.700.728,80**	**77.322.424.688,46**
Saldo Akhir Kas	**35.411.517.227,89**	**33.224.700.728,80**
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:	-	-
Kas di Kas Daerah	30.169.727.325,33	27.739.504.611,02
Kas di Bendahara Penerimaan	-	166.538.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	797.687.446,00	-
Kas di BLUD	3.024.590.848,56	2.501.217.531,78
Kas Dana BOSP	160.064.456,00	986.838.017,00
Kas BOK	1.259.447.152,00	1.830.113.005,00
Kas Lainnya	-	489.564,00
Saldo Akhir Kas	**35.411.517.227,89**	**33.224.700.728,80**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2.054.252.539.543,09	2.023.426.461.579,57

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan perubahan nilai kakayaan bersih Pemerintah Kota Bukittinggi. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri atas saldo ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif kesalahan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir. Saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.054.252.539.543,09 Berikut rincian penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023:

Tabel 5.129 Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	**2.023.426.461.579,57**	2.033.022.032.295,63
SURPLUS/DEFISIT-LO	57.258.719.124,71	(14.184.789.767,67)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(26.432.641.161,19)	4.589.219.051,61
EKUITAS AKHIR	**2.054.252.539.543,09**	**2.023.426.461.579,57**

Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai yang terdapat pada Ekuitas awal tahun 2024 merupakan nilai Ekuitas akhir Tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.023.426.461.579,57;
2. Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, dan Kejadian Luar Biasa. Surplus/defisit Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2024 sebesar Rp57.258.719.124,71.
3. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar berupa koreksi ekuitas sebesar (Rp26.432.641.161,19) dengan rincian sebagai berikut:
   - Koreksi karena adanya penyetoran dana BOS sebesar (Rp39.548.323,00)
   - Koreksi nilai piutang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar (Rp75.375.500,00)
   - Koreksi saldo awal piutang dividen atas penyertaan modal pada BUMD (Bank Nagari) sebesar Rp(236.669.610,00)
   - Koreksi nilai dana transfer umum – DBH PPh Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29/WPOPDN, SDA pengusahaan panas bumi Dan PSDH sebesar Rp2.630,00
   - Koreksi nilai penyisihan piutang BPHTB - pemindahan hak Rp7.032.332,00
   - Koreksi nilai penyisihan piutang penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp3.243.900,00

- Koreksi nilai penyisihan piutang tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebesar Rp172.588.082,00
- Koreksi nilai penyisihan piutang pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp944.840,05
- Koreksi nilai penyisihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp4.010,00
- Koreksi nilai penyisihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pasar sebesar Rp19.440,00
- Koreksi penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp6.000.000,00
- Koreksi penyisihan piutang pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (Inkracht) sebesar Rp3.011.727.163,44
- Koreksi dana bergulir kepada Masyarakat sebesar (Rp64.363.658,60)
- Koreksi pencatatan aset tetap peralatan dan mesin Rp174.971.079,00
- Koreksi Gedung dan Bangunan – Bangunan Kesehatan Rp4.421.128.600,00
- Koreksi Aset Tetap lainnya sebesar Rp41.377.100,00
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp6.190.343.802,35)
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp15.412.408.496,52)
- Koreksi nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar (Rp11.894.179.402,81)
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya sebesar Rp0.33
- Koreksi Akumulasi Aset Tidak Berwujud Soptware dan Kajian sebesar (Rp13.904.935,00)
- Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp157.992.896,67)
- Koreksi nilai aset lain-lain sebesar Rp0,01
- Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar (Rp195.005.080,00)
- Koreksi Utang Belanja sebesar Rp8.111.366,93

4. Ekuitas Akhir sebesar Rp2.054.252.539.543,09.

CALK

BAB VI

INFORMASI LAINNYA

BAB VI

INFORMASI LAINNYA

6.1. Aset Tanah dan Bangunan Puskesmas Pembantu Bukit Apit Dikuasai Pihak Lain

Pada KIBAR A dan KIBAR C Dinas Kesehatan terdapat aset Pemerintah Kota Bukittinggi berupa sebidang tanah dengan luas 200 m2 dengan nilai perolehan sebesar Rp60.000.000,00 dan bangunan yang didirikan di atasnya dengan nilai perolehan sebesar Rp280.510.814,00 yang difungsikan sebagai Puskesmas Pembantu (Pustu) Bukit Apit.

Informasi dari Pengurus Barang Dinas Kesehatan, tanah yang digunakan sebagai Pustu Bukit Apit merupakan tanah yang dipinjamkan oleh warga atas nama alm. Sdr. Ramli dengan dasar Surat Penyerahan Tanah kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tk II Bukittinggi tanggal 23 Juni 1983. Dalam Surat Penyerahan tersebut dicantumkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut.

1. Apabila tanah yang diserahkan tidak digunakan untuk Pustu, maka penyerahan batal;
2. Apabila bangunan tidak dimanfaatkan lagi guna kepentingan umum selama lima tahun berturut-turut, maka tanah dan bangunan harus diserahkan kepada pemilik tanah;
3. Pemerintah Kota Bukittinggi selaku yang menerima tanah harus memprioritaskan pemilik tanah dalam hal perekrutan tenaga kerja Pustu; dan
4. Pemerintah Kota Bukittinggi harus membebaskan biaya pengobatan pemilik tanah di Pustu.

Selain itu, terdapat penyampaian empat surat dari pemilik tanah atau ahli waris tanah kepada Pemerintah Kota Bukittinggi yang menilai Pemerintah Kota Bukittinggi wanprestasi dalam pengelolaan Pustu dan melakukan pembiaran sejak Tahun 2012, sehingga aset terbengkalai. Adapun rincian keempat surat tersebut adalah:

1. Surat ditujukan kepada Lurah Bukit Apit tanggal 2 Agustus 2022 perihal Pencabutan Hak Pakai Tanah Pustu Bukit Apit Puhun;
2. Surat ditujukan kepada Wali Kota Bukittinggi tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permasalahan Pustu Bukit Apit;
3. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tanggal 14 September Tahun 2023 perihal permohonan penyelesaian permasalahan Pustu Bukit Apit; dan
4. Surat ditujukan kepada Lurah Bukit Apit Puhun tanggal 18 Januari 2024 perihal Penegasan Penarikan Aset Tanah dari Pemerintah Daerah.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari gugatan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan mediasi beberapa kali selama kurun waktu Tahun 2022 s.d. 2023 dengan melibatkan SKPD terkait. Namun sampai akhir Tahun 2024 belum terdapat keputusan atau penyelesaian oleh Dinas Kesehatan dan pemilik tanah tetap meminta

tanah tersebut untuk dikembalikan. Telaah staf yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan kepada Wali Kota/Sekretaris Daerah pada tanggal 26 Mei 2023 menyimpulkan bahwa agar aset tersebut segera diserahkan agar prosesnya tidak berlarut-larut dan mengganggu operasional Pustu. Sedangkan berdasarkan hasil telaah staf selanjutnya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tanggal 20 Juli 2023 menyimpulkan bahwa permasalahan ini masih harus digulirkan dengan melakukan mediasi kembali tingkat pimpinan dengan pihak keluarga, ninik mamak Suku Guci, dan tokoh masyarakat di wilayah Lapau Batu Kelurahan Bukit Apit Puhun.

6.2. Informasi Dana Dan Aset Hibah

Pada tahun 2024 tidak terdapat dana yang bersumber dari selain APBD, namun terdapat penambahan aset tahun 2024 baik bersumber dari APBD/APBN ataupun non APBD sebagai berikut:

Tabel 6.1 Daftar Aset Hibah Tahun 2024

NO	SKPD/PPKD YANG MENCATAT	INSTANSI PEMBERI	URAIAN	JUMLAH BARANG	JUMLAH (RP)	STATUS NERACA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kementerian PUPR	Aset berupa Instalasi Penerangan Lampu Jalan (Penerangan Jalan Umum)	162 unit	3.325.282.794,00	Tercatat
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral-Dirjen Energi baru, Terbarukan dan Konvervasi Energi	Aset berupa Instalasi Penerangan Lampu Jalan (Penerangan Jalan Umum)	25 unit	356.236.895,00	Tercatat
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	CSR Bank BNI	Meja makan dan Payung	50 set	105.000.000,00	Tercatat
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan Nasional RI	Peralatan Mesin	13 unit	171.971.079,00	Tercatat
			Buku Bacaaan Pokadi (Pojok Bacaan Digital)	556 exemplar	34.763.702,00	Tercatat
			Buku Bacaaan Pokadi (Pojok Bacaan Digital)	144 exemplar	6.613.398,00	Tidak tercatat
Jumlah Belum Tercatat					**-**	
Jumlah Semua Hibah Aset Tahun 2023					**3.999.867.868,00**	

6.3. Informasi Sengketa Tanah untuk Pembangunan Gedung DPRD Kota Bukittinggi

Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki tanah yang berasal dari pengadaan tahun anggaran 2007 yang diperuntukan untuk Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Bukittinggi sesuai dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-147-2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi. Tanah ini tercatat pada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi selaku Pengguna Barang pada Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB A) Kode Register 01.01.02.02.002.000002 seluas 5.528 m2 beralamat di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan SHM Nomor 655/Kel. Manggis Ganting, tanggal 18-06-2007, SU Nomor 12/MG/2007 tanggal 25-05-2007 atas nama Syafri. Pengurusan balik nama sertifikat setelah pembelian saat itu tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dikarenakan terjadi peristiwa

pidana yang melanda pejabat Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2009 dan dilakukannya upaya pemblokiran oleh pihak Yayasan Fort De Kock kepada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. Pemblokiran ini dilakukan oleh Yayasan Fort De Kock karena merasa berhak atas tanah tersebut sebagai objek PPJB No.150/D/XI/2005 tanggal 23 November 2005 antara H. Arjulis Dt BAsa, Syafri dan M. Nur selaku Penjual dengan Dra Mufni Murad, M.Pd (mewakili Yayasan Fort De Kock) selaku Pembeli atas objek tanah luas + 12.000 m2 di Kelurahan Manggis Ganting.

Pada tanggal 27 Juli 2019 Pihak Yayasan Fort De Kock melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada:

1. Syafri St Pangeran (Tergugat I)
2. H. Arjulis Dt Basa (Tergugat II)
3. Muhammad Nur (Terggat III)
4. Walikota Bukittinggi (Tergugat IV)
5. Hj Tessi Levino, SH (Tergugat V)

Proses hukum di pengadilan terus berjalan sejak tahun 2019 sampai dengan 2022. Pada tahun 2020, Walikota Bukittinggi mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI. Tahun 2022 Mahkamah Agung RI menetapkan Putusan Nomor 2108 K/PDT/2022, tanggal 28 Juli 2022 yang memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi. Pada tanggal 4 Oktober 2022 Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi memanggil para pihak dalam rangka melakukan aanmaning. Pada tanggal 14 Oktober 2022 Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi menerbitkan Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Bkt jo Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bkt, menjelaskan bahwa:

Amar ke-5 hanya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Para Tergugat dan tidak termasuk Pemerintah Kota Bukittinggi selaku Tergugat IV.

Amar ke-5 berupa "*Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan serta melanjutkan kembali seluruh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 23 November 2005, di legalisasi oleh Hj. Tessi Levino, SH, Notaris di Bukittingi dengan Nomor: 150/D/XI/2005 secara penuh dan tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku"*, telah diganti dengan penetapan secara limitatif berupa hanya eksekusi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 1.243.800.000,- yang dihitung dari nilai jual harga tanah sesuai PPJB di atas sebesar Rp 225.000,- x 5528 M2, dan tidak ada kewajiban lain termasuk penyerahan SHM Nomor 655/Kel. Manggis Gantiang, Luas 5.528 m2.

Pada surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Bkt jo Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bkt menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (H. NAZARUDDIN, SKM, M.Kes) yakni melaksanakan eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2108K/Pdt/2022 tanggal 28 Juli 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 68/PDT/2020/PTPDG, tanggal 28 Mei 2020, jo Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bkt tanggal 11 Maret 2020.

2. Menyatakan pelaksanaa eksekusi putusan yang menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan serta melanjutkan kembali seluruh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 23 November 2005, dilegalisasi oleh *Hj. Tessi Levino, SH, Notaris di Bukittingi dengan Nomor: 150/D/XI/2005 secara penuh dan tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku*, diganti dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 1.243.800.000,- yang dihitung dari nilai jual harga tanah sesuai PPJB di atas sebesar Rp 225.000,- x 5528 m2 sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 23 November 2005 yang dituangkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bkt tanggal 11 Maret 2020 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2108K/Pdt/2022 tanggal 28 Juli 2022

Menindaklanjuti hal tersebut, dilakukanlah eksekusi PPJB di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB, yang disaat itu Pemerintah Kota Bukittinggi hadir dalam menyaksikan acara tersebut. Pemerintah Kota Bukittinggi sampai saat ini tidak menyerahkan aset berupa tanah beserta sertifikat kepada pihak Yayasan Fort De Kock dikarenakan tidak adanya pembatalan Akta Jual Beli Nomor 36/MKS/2007 tanggal 29 Desember 2007 antara Syafri St Pangeran dan Drs. H.Djufri (selaku Walikota Bukittinggi). Dalam kelanjutannya, pihak Yayasan Fort De Kock telah melakukan okupasi atau penyerobotan lahan SHM Nomor 655/Kel. Manggis Gantiang, Luas 5.528 m2 yang menjadi aset Pemerintah Kota Bukittinggi.

Langkah yang telah dilakukan dalam rangka upaya pengamanan barang milik daerah Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai berikut:

Tabel 6.2 Langkah dan Upaya Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan

Nama Instansi	Waktu	Hasil Kegiatan
1	2	3
a) BPKP Perwakilan Sumatera Barat	29 November 2022	BPKP tidak memberikan opini karena permasalahan terkait hokum (surat BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat No.PE.08.00/S-475/PW03/3/ 2023)
b) Komisi Pemberantasan Korupsi RI	16 Februari 2023	Pertemuan secara daring di BCC Kota Bukittinggi tentang ekspose kronologis dan proses hukum dipengadilan oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
	27 Februari s/d 1 Maret 2023	Pertemuan di KPK RI Jakarta dalam rangka konsultasi dengan hasil : 1. Proses persertifikatan tanah agar segera terus dilanjutkan. 2. KPK akan memfasilitasi mediasi dengan para pihak.
c) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat	14 Maret 2023	Pertemuan di BPK Perwakilan Sumatera Barat dengan hasil : 1. Agar Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan informasi seimbang /press release kepada publik terhadap putusan-putusan pengadilan dan langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi 2. Agar permasalahan ini diinformasikan dalam Calk pada point informasi/penjelasan lain-lain.
d) Komisi Pemberantasan Korupsi RI	7 Juni 2023	Kunjungan Tim KPK ke Kejaksaan Negeri Bukittinggi, STIKES Fort De Kock, dan BPN Bukittinggi mengumpulkan informasi terkait permasalahan tanah.

Sampai saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang disarankan oleh KPK dan BPK Perwakilan Sumatera Barat.

6.4. Kewajiban Kontingensi

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bukitinggi melakukan koreksi pencatatan Kewajiban Jangka Pendek-Bagian Lancar Utang Jangka Panjang berupa Kredit Inpres Pasar (KIP) ke Kewajiban Kontingensi.

Koreksi tersebut dilakukan karena dalansultasi, koordinasi dan penelusuran kewajiban tersebut ke pemerintah pusat, pihak pemerintah pusat mengaku tidak memiliki piutang tersebut ke pemerintah Kota Bukittinggi, maka pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi tidak lagi mencatatnya dalam komponen Neraca Tahun 2022 namun mengungkapkan dengan memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada neraca Per 31 Desember 2021 sebesar Rp999.500.000,00. Selama tahun 2022 tidak ada mutasi penambahan maupun pengurangan sehingga nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 tetap sebesar Rp999.500.000,00.

Utang Kredit Inpres Pasar (KIP) pada Kota Bukittinggi sampai saat ini belum jelas status kepemilikannya walaupun telah beberapa kali dikonfirmasi baik lisan maupun tulisan ke pihak Departemen Keuangan Republik Indonesia maupun Kementrian Keauangan RI dan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta.

Melalui konfirmasi tulisan langsung di Departemen Keuangan RI maupun via telepon dengan pihak Subdit Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Pemko Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa angsuran KIP ini hanya menjadi Penerimaan Lain-lain Negara.

1. Pada Tahun 2013, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan upaya:

    a. Menghadiri undangan Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah atas nama Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI. Undangan tersebut ditujukan selain kepada Pemko Bukittinggi, juga kepada pihak-pihak terkait Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda Pembahasan permasalahan Hutang Pemerintah Kota Bukittinggi yang berasal dari Kredit Inpres Pasar (KIP). Undangan rapat tersebut merupakan respon positif dari Kementerian Dalam Negeri RI atas Surat Walikota Nomor 970.1372/DPKAD.05/XII-2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Informasi mengenai Kredit Inpres Pasar (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada notulen rapat tersebut terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh pihak Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya mengumpulkan dokumen perjanjian, bukti setor, surat tagihan dan menyampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi. Selanjutnya pihak-pihak tersebut akan menindaklanjutinya;

    b. Dalam rangka menindaklanjuti rapat tersebut, pada tanggal 13 Desember 2013 Pemko Bukittinggi telah mengirimkan kembali surat konfirmasi data dan status utang Kredit Inpres Pasar Sistem (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor. 970.1970/DPKAD.05/XII- 2013 kepada Dirjen

Keuangan Daerah RI Kementrian Dalam Negeri. DirekturPengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi DirjenPerbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk meminta jadwal rapat/diskusi langsung pada tanggal 19 Desember 2013. Beberapa Staf Pemko Bukittinggi telah melakukan rapat/diskusi sesuai permohonan agenda tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1) Rapat di Kementerian Keuangan RI

   a) Dirjen Perbendaharaan dan Pemerintah Kota Bukittinggi sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang KIP. Pihak SMI pun sangat berharap mereka mampu membantu Pemko Bukittinggi dalam menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang telah disampaikan kepada mereka;

   b) Pemko Bukittinggi diharapkan bisa mendapatkan dan mencari dokumen yang menunjukkan tanggal mutasi kas daerah dari Bank Nagari ke pihak BRI sebagai bank penerusan pembayaran angsuran sebesar Rp500.000.000,00 yang merupakan pembayaran terakhir tanggal 28 Desember 2006, baik berupa rekening koran maupun keterangan konfirmasi dari pihak Bank Nagari dan BRI Cabang Bukittinggi.

   c) Rapat di Kementerian Dalam Negeri RI

   d) Dirjen Keuangan Daerah (DKD) sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang. Pihak DKD pun berharap pihak Ditjen Perbendaharaan akan mampu mengungkap data dan status dengan menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang disampaikan Pemko Bukittinggi;

   e) Pihak DKD juga menyarankan agar Pemko Bukittinggi tetap memegang perjanjian awal dengan pihak BRI dan jika keuangan daerah memungkinkan saldo hutang KIP yang ada tersebut diangsur saja sembari menunggu kejelasan data dan status dari Kementerian Keuangan RI. Pemko Bukittinggi menanggapi bahwa demi efisiensi dan efektif serta tepat sasarannya pengeluaran kas daerah. Pemko Bukittinggi bertekad menunda pembayaran sampai mendapatkan data dan status yang jelas mengenai hutang Kredit Inpres Pasar (KIP) dari pemerintah pusat;

   f) Pihak DKD pun dalam rapat telah memohon maaf atas kekurangan informasi dan data yang dimiliki oleh DKD sekaitan dengan Kredit Inpres Pasar Pemko Bukittinggi, antara lain disebabkan karena perpindahan kantor yang sering, struktur organisasi kementerian yang telah berganti serta mutasi SDM yang cukup tinggi.

2) Pada tahun 2019 atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI, Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan rekonsiliasi dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 11 April

2019 yang menyatakan bahwa utang KIP Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2019 berjumlah sebesar Rp999.500.000.00,00 sebagaimana yang tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6.3 Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar (KIP)

No	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Uraian Kredit Pasar	Realisasi Kredit (Rp)	Pelunasan s.d. Desember 2007 (Rp)	Tunggakan (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(5-6)*
	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Banto TA 1982/1983	325.000.000,00	59.500.000,00	265.500.000,00
	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Aur Tajungkang TA 1982/1983	275.000.000,00	27.500.000,00	247.500.000,00
	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Atas TA 1982	460.000.000,00	-	460.000.000,00
	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Aur Kuning TA 1983/1984	300.000.000,00	300.000.000,00	-
	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Bawah TA 1983/1984	285.000.000,00	258.500.000,00	26.500.000,00
Total				**1.645.000.000,00**	**645.500.000,00**	**999.500.000,00**

2. Dalam masa audit Laporan Keuangan Tahun 2021 Pemko Bukittinggi telah kembali menyurati Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk meminta konfirmasi mengenai status utang ini, dan telah dilakukan komunikasi telepon dengan petugas yang terkait. Dalam hasil komunikasi tersebut pihak Direktorat Sistem Manajemen Investasi akan berupaya menelusuri dan menentukan status utang ini dan akan mengikuti prosedur untuk Proses pemutihan jika memungkinkan nantinya. Sampai sekarang status masih menunggu kabar selanjutnya dari Kementerian Keuangan.
3. Sampai dengan tahun 2024 belum ada peluang atau perkembangan yang berarti untuk utang ini, dan besar harapan Pemko Bukittinggi agar ada rekomendasi untuk penghapusan utang tersebut.

CALK

BAB VII

PENUTUP

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi merupakan amanat dari paket peraturan terkait pengelolaan keuangan negara/daerah yang dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sampai kepada peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelola keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota harus mempertanggungjawabkan kepada publik (*stakeholders*) mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu Pemerintah Daerah Otonom, dalam hal pengelolaan keuangan daerah diwajibkan untuk menyusun LKPD Kota Bukittinggi setiap tahunnya. LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024 adalah laporan keuangan berbasis akrual sebagai amanah dari paket peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dalam hal pengelolaan keuangan.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disajikan dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai bagian dari LKPD, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan untuk memberikan informasi ataupun penjelasan, baik yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun 2024, dalam rangka pengungkapan penuh (*full disclosure*). Dengan demikian diharapkan para pembaca dan pengguna dapat memahami secara komprehensif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi ini secara bebas dari kesalahan penafsiran.

Laporan Keuangan ini juga dilampiri dengan daftar-daftar pendukung serta laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang dan PT BPRS Jam Gadang (Perseroda), yang mana keduanya adalah Badan Usaha Milik Daerah dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dan merupakan juga fokus investasi Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sebagaimana maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan tersebut di atas, mudah-mudahan manfaatnya melebihi muatannya, sehingga berdampak strategis untuk evaluasi dan penyusunan kebijakan di masa yang akan datang serta juga dapat dikembangkan menjadi sumber data penelitian ilmiah dan analisis keuangan.

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS
NIUKAP.1107/KM.I/2016, Tanggal 10 Oktober 2016
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKIT TINGGI

LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2024

Dengan angka perbandingan Tahun 2023
(Audited) Serta untuk tahun yang berakhir
Pada tanggal tersebut
dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2024
Dengan angka perbandingan Tahun 2023
(Audited) Serta untuk tahun yang berakhir
Pada tanggal tersebut
dan
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN KEUANGAN	Halaman
NERACA	1
LAPORAN LABA (RUGI)	2
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	3
LAPORAN EKUITAS	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5-26

PERUMDA AIR MINUM TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKITTINGGI

Jl. Panorama No. 3 Telp. (0752) 21125-25329 Fax. (0752) 25329 Bukittinggi 26116
Email : pdamtirta@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024

Kami yang bertanda tangan dibawah Ini:

1. Nama : **BUDI SUHENDRA, ST.**
   Alamat Kantor : Jl. Panorama No 3 Kota Bukittinggi
   Nomor Telephone : (0752) 21125
   Jabatan : **Direktur**

2. Nama : **NINA CHAIRINA, ST.**
   Alamat Kantor : Jl. Panorama No 3 Kota Bukittinggi
   Nomor Telepon : (0752) 21125
   Jabatan : **Plt. Kepala Bagian Adm & Keuangan**

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi
2. Laporan Keuangan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP)
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi telah dimuat secara lengkap dan benar
   b. Laporan Keuangan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern yang diterapkan di Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bukittinggi, 21 April 2025

Direktur	Plt. Kepala Bagian Adm & Keuangan
BUDI SUHENDRA, ST.	NINA CHAIRINA, ST.

Dipindai dengan CamScanner

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS
NIUKAP.1107/KM.I/2016, Tanggal 10 Oktober 2016
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Jalan Pisangan Baru Tengah Nomor 5, Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Jakarta Timur
Phone. 021 8660.7259, Fax. 021 860 1415, Email. info@kap-sbg.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00114/2.1081/AU.2/11/1209-1/1/IV/2025

Kepada Yth,
Dewan Pengawas dan Direksi

PERUMDA AIR MINUM TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKITTINGGI

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi terlampir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perumdam tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perumdam berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain dengan nomor: 00004/2.0587/AU.2/05/1794-1/1/III/2024 yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 13 Mei 2024.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Kami telah menentukan bahwa tidak terdapat hal audit utama untuk dikomunikasikan dalam laporan kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan denganaudit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan,termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tatakelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUPARMAN BAMBANG GHANIS

00114

Bambang Haryanto P, MSi, CA, CPA
Izin Akuntan Publik No AP.1209

Jakarta, 21 April 2025

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
NERACA
Per 31 Desember 2024 dan 2023

ASET	Cat	2024	2023
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	B.4,C.1	1.472.268.440	2.480.596.099
Piutang Air dan Non Air	B.5,C.2	1.701.901.665	1.677.275.665
Akumulasi Penyisihan Piutang	B.5,C.2	(229.651.854)	(244.529.295)
Persediaan	B.6,C.3	679.143.314	648.575.537
Sub Total Aset Lancar		**3.623.661.564**	**4.561.918.006**
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap :			
Harga Perolehan	B.8,C.4	45.648.365.276	44.502.617.456
Akumulasi Penyusutan		(22.109.757.661)	(20.945.357.141)
Nilai Buku Asset Tetap		**23.538.607.615**	**23.557.260.314**
- Aset Tidak Lancar Lainnya	C.5	1.309.261.000	1.309.261.000
TOTAL ASET		**28.471.530.179**	**29.428.439.320**
KEWAJIBAN dan EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Usaha		14.130.000	-
Utang Non Usaha	C.6	218.420.812	167.251.303
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	C.7	899.689.651	1.740.184.320
Utang Pajak	C.8	351.812.184	217.608.675
Pendapatan Diterima Dimuka	C.9	43.916.600	35.547.100
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.10	55.575.000	4.000.000
Sub Total Kewajiban Jangka Pendek		**1.583.544.247**	**2.164.591.398**
Kewajiban Jangka Panjang			
Cadangan Dana	C.11	3.414.835.918	6.756.567.039
Sub Total Kewajiban Jangka Panjang		**3.414.835.918**	**6.756.567.039**
EKUITAS			
Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	A.2, C.12	-	1.177.102.241
Penyertaan Modal Pemda	A.2, C.13	8.810.707.950	16.496.904.508
Penyertaan Modal Pemerintah Yang Belum Ditetapkan	A.2, C.14	13.705.807.700	14.544.620.510
Hibah	A.2, C.15	-	972.316.208
Laba (Rugi) Ditahan		-	(13.878.267.898)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		956.634.363	1.194.605.314
Sub Total Ekuitas		**23.473.150.013**	**20.507.280.883**
TOTAL KEWAJIBAN dan EKUITAS		**28.471.530.179**	**29.428.439.320**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
LAPORAN LABA (RUGI)
Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	Cat	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan Air	B.13, C17	12.048.196.200	12.007.303.100
Pendapatan Non Air	B.13, C18	826.335.300	901.529.750
Jumlah Pendapatan Usaha		**12.874.531.500**	**12.908.832.850**
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Operasional	B.13, C19	10.551.201.994	10.389.519.992
Beban Penyusutan		1.164.400.520	1.179.206.008
Jumlah Beban Operasional		**11.715.602.514**	**11.568.726.000**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	B.13, C20		
Pendapatan Non Operasional		194.059.619	179.329.639
Beban Non Operasional		(40.662.730)	(40.179.767)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		**153.396.889**	**139.149.872**
LABA (RUGI) OPERASIONAL BERSIH SEBELUM PAJAK		**1.312.325.875**	**1.479.256.722**
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN		355.691.512	284.651.408
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		**956.634.363**	**1.194.605.314**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Penyertaan Modal Pemda	Penyertaan Modal Pempus Yang Belum Ditetapkan	Hibah	Laba (Rugi) Ditahan	Junlah
1.	**Saldo Akhir per 31 Desember 2022**	**1.177.102.241**	**16.496.904.508**	**14.544.620.510**	**972.316.208**	**(12.295.857.898)**	20.895.085.569
	Penyesuaian Laba Tahun Lalu					(1.582.410.000)	(1.582.410.000)
	Laba(Rugi) tahun 2023					1.194.605.314	1.194.605.314
2.	**Saldo Akhir per 31 Desember 2023**	**1.177.102.241**	**16.496.904.508**	**14.544.620.510**	**972.316.208**	**(12.683.662.584)**	**20.507.280.883**
	Penyertaan Modal Pemda		(7.686.196.558)				(7.686.196.558)
	Penyertaan Modal Pemda yang Belum Diitetapkan			(838.812.810)			(838.812.810)
	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	(1.177.102.241)					(1.177.102.241)
	Hibah				(972.316.208)		(972.316.208)
	Penyesuaian Laba Tahun Lalu					12.683.662.584	12.683.662.584
	Laba (Rugi) tahun berjalan 2024					956.634.363	956.634.363
3.	**Saldo per 31 Desember 2024**	**-**	**8.810.707.950**	**13.705.807.700**	**-**	**956.634.363**	**23.473.150.013**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2024 dan 2023

	2024 Rp	2023 Rp
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Bersih	956.634.363	1.194.605.314
Ditambah (dikurangi) transaksi Non Kas		
Beban Penyusutan Aset Tetap	1.164.400.520	1.179.206.008
Biaya Penyisihan Piutang Air	(14.877.441)	(2.113.164)
Penyesuaian Laba (Rugi) Ditahan	12.683.662.584	(1.582.409.999,98)
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	**14.789.820.026**	**789.288.158**
(Kenaikan)/Penurunan Aset Lancar		
Piutang Air dan Non Air	(24.626.000)	(117.518.300)
Persediaan	(30.567.777)	168.710.783
Biaya Dibayar Dimuka		150.000
Jumlah (Kenaikan)/ Penurunan Aset Lancar	**(55.193.777)**	**51.342.483**
Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban Jk. Pendek		
Utang Usaha	14.130.000	96.034.626
Hutang Non Usaha	51.169.509	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(840.494.669)	(131.927.661)
Utang Pajak	134.203.509	(67.560.793)
Pendapatan Diterima Dimuka	8.369.500	(21.463.100)
Utang Jk. Pendek Lainnya	51.575.000	(33.830.000)
Jumlah Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Jk. Pendek	**(581.047.151)**	**(158.746.928)**
Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban Jk. Panjang		
Cadangan Dana	(3.341.731.121)	(341.236.864)
Jumlah Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Jk. Panjang	**(3.341.731.121)**	**(341.236.864)**
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	**10.811.847.978**	**340.646.849**
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi		
(Kenaikan)/Penurunan Aset Tetap	(1.145.747.820)	(1.303.896.341)
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	**(1.145.747.820)**	**(1.303.896.341)**
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan / (Penurunan) Modal Pemda	(7.686.196.558)	-
Kenaikan / (Penurunan) Hibah	(972.316.208)	-
Kenaikan / (Penurunan) Penyertaan Pemerintah yg Belum Ditetapkan Sta	(838.812.810)	-
Kenaikan / (Penurunan) Penyertaan Modal yang dipisahkan	(1.177.102.241)	-
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	**(10.674.427.817)**	**-**
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	**(1.008.327.660)**	**(963.249.492)**
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	2.480.596.099	3.443.845.591
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	**1.472.268.440**	**2.480.596.099**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
KOTA BUKIT TINGGI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2024 dan 2023

A UMUM

1 Pendirian Perusahaan

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum dan berkedudukan di Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2021 tangga 21 Mei 2021. Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi merupakan kelanjutan dari Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1975 tanggal 31 Juli 1975 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 26/GSB/1976 tanggal 6 Februari 1976.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021, maksud dan tujuan dari pendirian Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi adalah bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.

2 Penyertaan Modal, Hibah dan Sumber Modal Lainnya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021, modal PDAM (Perumda Air Minum) terdiri dari atas semua aset dan kewajiban pada saat pendirian.

3 Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Perumda Air Minum Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Direktur No: 12/KPTS/09/2014 Tentang SOTK PDAM. Direktur Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi untuk periode 2020-2025 diangkat melalui Keputusan Walikota No: 188.45-267-2020, Tanggal 16 September 2020, sehingga susunan pengurus untuk pertanggung jawaban laporan keuangan tahun buku 2023 adalah sebagai berikut :

- Direktur : Budi Suhendra, ST
- Kabag Administrasi & Keuangan (Plt.) : Fitrialni S.Kom.

Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukit Tinggi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukit Tinggi No 188.45.219-2022 tanggal 30 agustus 2022. Adapun susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut::

- Dewan Pengawas : Drs. Martias Manto, M.M

Jumlah Karyawan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- Pegawai Tetap	63
Jumlah	**63**

Satuan Pengawas Internal belum ditetapkan.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1 Pernyataan Kepatuhan

Perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku secara retrospektif sejak 1 Januari 2011. Terkait dengan hal tersebut, Perusahaan menyajikan laporan posisi keuangan awal periode komparatif dan melakukan reklasifikasi saldo dalam laporan keuangan periode komparasi untuk tujuan peningkatan daya banding informasi antar periode.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2024 dengan angka komparatif 2023 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratan.

2 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penyusunan laporan keuangan ini berdasarkan prinsip harga perolehan (historical cost) dan akrual, kecuali untuk investasi pada efek dinyatakan sebesar nilai wajar. Angka - angka dalam laporan keuangan disajikan dalam angka rupiah penuh.

SAK ETAP yang telah dipergunakan adalah :

a Bab 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan
b Bab 4 tentang Neraca
c Bab 5 tentang Laporan Laba Rugi
d Bab 6 tentang Laporan Perubahan Equitas
e Bab 7 tentang Laporan Arus Kas
f Bab 8 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
g Bab 9 tentang Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan
h Bab 15 tentang Aset Tetap
i Bab 17 tentang Sewa
j Bab 20 tentang Pendapatan
k Bab 21 tentang Biaya Pinjaman
l Bab 23 tentang Imbalan Kerja
m Bab 24 tentang Pajak Penghasilan
n Bab 25 tentang Mata Uang Pelaporan
o Bab 26 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing
p Bab 27 tentang Peristiwa setelah Akhir Periode Laporan
q Bab 28 tentang Pengungkapan Pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa

3 Auditor Pendahulu (Sebelumnya)

Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukit Tinggi per 31 Desember 2023, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Trisnowati dan Mariati dengan nomor Laporan: 00004/2.0587/AU.2/05/1794-1/1/III/2024, yang menyatakan opininya Wajar Tanpa Pengecualian, pada tanggal 11 Maret 2024.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

4 Kas dan Setara Kas

Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya"

yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

5 Piutang Usaha dan Piutang Lain lain

Piutang disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai.

Piutang disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. Berdasarkan pengalaman dan data historis, perusahaan menetapkan estimasi kerugian piutang usaha tak tertagih yang berasal dari penjualan air berdasarkan SAK ETAP sebagai berikut :

Kelompok Pelanggan	**%tase penyisihan**
Sosial 1B	2%
Sosial 1C	0%
Rumah Tangga 2A	58%
Rumah Tangga 2B	9%
Rumah Tangga 2C	7%
Niaga Kecil 3A	12%
Niaga Menengah 3B	11%
Pelanggan Khusus 4	1%

6 Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP)/ First In First Out (FIFO)

Nilai realisasi bersih ditentukan sebesar harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Entitas mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

Persediaan entitas dikelompokkan kedalam dua jenis:

1 Persediaan bahan instalasi
2 Persediaan bahan operasi

Persediaan Bahan Instalasi meliputi perpipaan, water meter dan accessories lainnya. Persediaan Bahan Instalasi ini dikelompokkan sebagai bagian dari Aset lancar. Metode pencatatan untuk persediaan Bahan Instalasi menggunakan Perpetual Inventory Method yaitu pencatatan administrasi persediaan atas mutasi penerimaan dan pengeluaran, sehingga saldo nilai persediaan dapat diketahui setiap saat dari administrasi yang diselenggarakan.

Persediaan Bahan Operasi meliputi bahan kimia, pelumas, bahan bakar, alat tulis kantor (ATK) dan bahan operasi lainnya. Metode pencatatan untuk persediaan Bahan Operasi menggunakan Physical Inventory Method.

Persediaan bahan operasi ini merupakan persediaan yang apabila telah digunakan akan dianggap habis terpakai, sehingga layak dikelompokkan kedalam aset lancar.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

7 Biaya dibayar dimuka

Beban dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai masa manfaat biaya yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus (*"straight-line method"*).

8 Aset Tetap

Berdasarkan SAK ETAP Bab 15 "Aset Tetap", aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai aset, jika ada. Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Keuangan yang berlaku. Peningkatan nilai aset karena penilaian kembali dikreditkan pada " Surplus Revaluasi Aset Tetap " di akun Ekuitas.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi, maka nilai buku terakhir akan dicatat sebagai nilai buku aset tersebut (karena depresiasi atas aset tetap tersebut dihentikan) dan dicatat sebagai aset tidak lancar lainnya.

Apabila aset tetap tersebut sudah tidak digunakan lagi, maka aset ini harus dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan dicatat sebagai aset tidak lancar lainnya.

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya, perhitungan penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus *("straight line method")*, sesuai dengan metode penyusutan berdasarkan undang undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diperbaharui dengan undang undang nomor 10 tahun 1994 serta peraturan perpajakkan lainnya (SE Dirjen Pajak nomor: SE-07/PJ.42/2002, tanggal 8 Mei 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor: 138/KMK.03 tanggal 18 April 2002) sebagai berikut:

a) Kelompok harta berwujud bukan bangunan

- Kelompok 1, tarif penyusutannya 25% dari nilai buku
  Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 tahun.
- Kelompok 2, tarif penyusutannya 12,5% dari nilai buku
  Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 tahun dan tidak lebih dari 8 tahun.
- Kelompok 3, tarif penyusutannya 6,2% dari nilai buku
  Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 8 tahun dan tidak lebih dari 16 tahun.
- Kelompok 4, tarif penyusutannya 5% dari nilai buku
  Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 16 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

8 Aset Tetap - Lanjutan

b) Kelompok harta berwujud bangunan

- Permanen dengan masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutannya 5% dari nilai perolehan.
- Tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun, tarif penyusutannya 10% dari nilai perolehan.

Pengeluaran untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap untuk menjaga manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai (kegunaan) dan masa manfaat, dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan.

9 Aset sewa pembiayaan

Untuk transaksi sewa pembiayaan yang memenuhi kriteria sewa pembiayaan modal *(capital lease)* , aset dan kewajiban yang bersangkutan disajikan di laporan posisi keuangan (neraca) dengan nilai sekarang *(present value)* dari nilai pelunasan sewa pembiayaan tersebut yang jumlahnya ditentukan pada saat mulai berlakunya sewa pembiayaan yang bersangkutan. Utang sewa pembiayaan akan berkurang sesuai dengan jumlah pembayaran angsuran pokoknya, sedangkan komponen bunga yang terkandung dalam angsuran sewa pembiayaan dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan.

10 Penurunan nilai aset

SAK ETAP Bab 22 tentang "Penurunan Nilai Aset" mensyaratkan manajemen Perusahaan melakukan penelaahan untuk menentukan adanya indikasi terjadinya penurunan nilai aset pada akhir tahun. Bila terdapat indikasi penurunan nilai aset, Perusahaan menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali *(recoverable value)* atas nilai aset dan mengakui rugi penurunan nilai aset tersebut dalam laporan laba rugi.

11 Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

12 Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

SAK ETAP Bab 28 mensyaratkan entitas untuk memberikan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangannya dan memberi perhatian pada kemungkinan posisi keuangan dan laba atau rugi entitas telah terpengaruh oleh adanya pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta transaksi dan saldo dengan pihak-pihak tersebut.

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

a Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
  - i Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan fellow subsidiaries);
  - ii Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifian atas entitas; atau
  - iii Memiliki pengendalian bersama atas entitas

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

12 Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa - Lanjutan

b Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari
c Pihak tersebut adalah joint ventures dimana entitas tersebut merupakan venture;
d Pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
e Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (a) atau (d);
f Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (d) atau (e); atau
g Pihak tersebut adalah program imbalan kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

12 Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa-Lanjutan

Dalam tahun 2024 entitas tidak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
Pada tahun 2024 entitas memberikan kompensasi kepada personel manajemen kunci entitas (dewan pengawas dan direksi) adalah sebagai berikut :

Direksi	443.520.153
Dewan Pengawas	71.408.737

13 Pengakuan Pendapatan dan beban

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (imputed interest rate).

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai :

a Penjualan Air

Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi, yaitu:

1) Risiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada pembeli;
2) Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun *control* efektif atas barang yang terjual;
3) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
4) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan, dan
5) Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

b Penjualan jasa diakui dengan metode penyelesaian dalam periode akuntansi, ketika semua kondisi berikut terpenuhi :

1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan;
3) Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
4) Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual)

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

14 Imbalan Kerja, BPJS, Dapenma Pamsi

a. Imbalan Kerja

Imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "imbalan kerja", pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut entitas diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompetensi karyawan pada saat penyelesaian hitungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti

Imbalan Kerja tersebut adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen.

Imbalan kerja terdiri dari

1) Imbalan kerja jangka pendek
2) Imbalan pasca kerja
3) Imbalan kerja jangka panjang lainnya
4) Pesangon pemutusan kerja

Imbalan kerja terdiri dari iuran pasti dan imbalan pasti. **Iuran pasti** adalah imbalan kerja dimana entitas membayar secara tetap kepada lembaga pengelola dana imbalan kerja dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran berikutnya atau melakukan pembayaran langsung ke pekerja jika dana yang ada tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait jasa mereka periode kini dan periode lalu. **Imbalan pasti** adalah imbalan kerja, dimana kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada pekerja dan mantan pekerja dan risiko akturia (dimana imbalan lebih besar daripada yang diperkirakan) dan resiko investasi secara substantif berada pada entitas.

Dalam hal ini, entitas sudah melaksanakan program imbalan kerja bagi para karyawannya, antara lain : Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, untuk tunjangan pensiun diberikan kepada karyawan dengan masa kerja mencapai 56 tahun.

1) Jika dana imbalan kerja ini dikelola sendiri oleh perusahaan (imbalan pasti) maka setiap memperhitungkan beban imbalan kerja akan dicatat sebagai berikut: beban imbalan kerja di **debet** dan kewajiban imbalan kerja di **kredit**. Kemudian pada saat membayar dana pensiun, dana kematian, dan dana sakit, maka kewajiban imbalan kerja di **debet** dan kas dan setara kas di **kredit**
2) Jika dana imbalan kerja ini dikelola oleh institusi diluar perusahaan **(Iuran Pasti)**, yaitu perusahaan asuransi, bank atau Dapenma Pamsi, maka setiap memperhitungkan imbalan kerja akan dicatat sebagai berikut: beban imbalan kerja di **debet** dan kas dan setara kas di **kredit.** Kemudian pada saat membayar dana pensiun, dana kematian, dan dana sakit, maka perusahaan sudah tidak perlu mencatat transaksi atas pembayaran tersebut karena yang melakukan transaksi pembayaran adalah bukan dari perusahaan.

Dalam tahun 2023 perusahaan tidak menghitung imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP bab 23, dan juga bekerjasama dengan Program BPJS.

b. Dapenma Pamsi

Sesuai dengan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan Dapenma Pamsi, setiap tahun perusahaan membebankan iuran dana pensiun ke Dapenma Pamsi, sesuai dengan hasil perhitungan aktuaria yang ditunjuk oleh Dapenma Pamsi, dengan jurnal : **(debet)** Beban Dana Pensiun dan **(kredit)** Utang Dapenma Pamsi. Pada waktu menyetor iuran dana pensiun dengan jurnal : **(debet)** Utang Dapenma Pamsi dan **(kredit)** Kas dan Setara Kas.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

15 Pajak penghasilan

Taksiran pajak penghasilan perusahaan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan SAK ETAP Bab 24 " Pajak Penghasilan", Perusahaan mencatat kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar *(tax payable concept)* . Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tanggguhan (deferred tax) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antar laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak.

Pajak penghasilan final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau pajak yang masih harus dibayar.

Kebijakan pajak penghasilan Perusahaan dikenakan pajak penghasilan final pasal 15 sebagai kewajiban pajak atas jasa pelayaran dalam negeri.

Pajak penghasilan tidak final

Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, utang pajak penghasilan dihitung oleh wajib pajak sendiri *(self assessment system)* . Pajak penghasilan yang dibebankan pada laporan laba rugi ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

16 Kewajiban Kontijensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, Perusahaan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan jika ada, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

		2024	2023
1	**Kas dan Setara Kas**	**1.472.268.440**	**2.480.596.099**
	Jumlah tersebut merupakan saldo kas/ bank Perumda Air Minum per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut		
	Kas Kecil	15.000.000	15.000.000
	Bank Nagari Cabang Bukittinggi (No Rek. 0200.0101.00852-0)	436.221.070	585.273.245
	Bank Nagari Cabang Bukittinggi (No Rek. 0200.0101.00354-5)	421.727.611	1.317.408.459
	Bank BNI 1946 Cabang Bukittinggi (No Rek. 0059225904)	117.398.366	152.387.875
	Bank BNI 1946 Cabang Bukittinggi (No Rek. 3532935325)	12.966.121	16.915.487
	Batara Pos (No Rek 00010035-01-57-0015594)	-	-
	BPR Jam Gadang (No Rek 0000-331.015555)	355.839.947	278.845.950
	Bank BRI (No Rek. 001501001882307)	107.390.025	106.532.283
	Deposit Agensi Pos	-	-
	Deposit in Transit	5.725.300	8.232.800
	Jumlah Kas dan Bank	**1.472.268.440**	**2.480.596.099**

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

1 Kas dan Setara Kas - Lanjutan

Perincian Deposit in Transit per 31 Desember :

1. LPP BNI 30-31 Desember	931.500	3.166.800
2. LPP BSA 30-31 Desember	813.300	1.595.700
3. LPP Puskud 30-31 Desember	999.500	397.800
4. LPP Pos 30-31 Desember	2.981.000	2.860.500
5. LPP Nagari 30-31 Desember	-	212.000
Jumlah Deposit in Transit	**5.725.300**	**8.232.800**

	2024	**2023**
2 Piutang Air dan Non Air	**1.701.901.665**	**1.677.275.665**
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang air per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
Piutang Rekening Air	1.701.901.665	1.677.275.665
Penyisihan Nilai Piutang Air	*(229.651.854)*	(244.529.295)
Jumlah	**1.472.249.811**	**1.432.746.370**

Berdasarkan Kelompok Pelanggan :

Piutang Rekening Air Sosial 1A	4.102.600	2.421.800
Piutang Rekening Air Sosial 1B	12.951.400	14.661.800
Piutang Rekening Air Rumah Tangga 2A	271.963.500	255.191.500
Piutang Rekening Air Rumah Tangga 2B	470.396.700	450.508.600
Piutang Rekening Air Rumah Tangga 2C	126.371.500	125.089.500
Piutang Rekening Air Instansi Pemerintah 2D	-	15.039.965
Piutang Rekening Air Niaga Kecil 3A	299.578.500	293.845.000
Piutang Rekening Air Niaga Menengah 3B	110.186.000	105.497.000
Piutang Rekening Air Niaga Besar 3C	154.630.000	110.884.000
Piutang Rekening Air Instansi Pemerintah 3D	227.173.465	289.328.500
Piutang Rekening Air Pelanggan Khusus 4	10.208.000	5.688.000
	1.687.561.665	**1.668.155.665**
Piutang Air Tanki	14.340.000	9.120.000
Jumlah	**1.701.901.665**	**1.677.275.665**

Akumulasi Penyisihan Piutang

Sosial			-	293.236
Sosial 1A	4.102.600	3%	123.078	-
Sosial 18A	12.951.400	7%	906.598	-
Rumah Tangga 2A	271.963.500	50%	135.981.750	148.011.070
Rumah Tangga 2B	470.396.700	9%	42.335.703	40.545.774
Rumah Tangga 2C	126.371.500	7%	8.846.005	8.756.265
Niaga Kecil 3A	299.578.500	12%	35.949.420	35.261.400
Niaga Menengah 3B	110.186.000	5%	5.509.300	11.604.670
Pelanggan Khusus 4	10.208.000	0%	-	56.880
Dipindahkan			**229.651.854**	**244.529.295**

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

2 Piutang Air dan Non Air - Lanjutan

Pindahan			**229.651.854**	**244.529.295**
Piutang yang tidak disisihkan:			-	-
Instansi Pemerintah 3D	227.173.465	5%	-	-
Air Tangki	14.340.000	0%	-	-
Jumlah	**1.547.271.665**		**229.651.854**	**244.529.295**

Piutang Non Air dibayar telah tunai oleh pelanggan

		2024	**2023**
3	**Persediaan**	**679.143.314**	**648.575.537**
	Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
	Persediaan Bahan Operasional	67.032.740	51.942.800
	Persediaan Bahan Instalasi	612.110.574	596.632.737
	Jumlah	**679.143.314**	**648.575.537**
	Persediaan Bahan Operasional :		
	Bahan Operasi Kimia	52.417.200	49.442.631
	Alat-Alat Tulis	3.023.540	2.500.169
	Perlengkapan Komputer	11.592.000	-
	Jumlah	**67.032.740**	**51.942.800**
	Persediaan Bahan Instalasi :		
	Perlengkapan Komputer	-	10.070.000
	Bahan Instalasi Pipa	141.277.937	145.742.081
	Bahan Instalasi Meter	75.117.031	57.720.851
	Bahan Instalasi Accesories	395.715.606	383.099.805
	Jumlah	**612.110.574**	**596.632.737**

Tidak Terdapat Persediaan diatas satu Tahun

		2024	**2023**
4	**Aset Tetap**	**23.538.607.615**	**23.557.260.314**
	Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap yang dikuasai Perumda Air Minum yang masih dimanfaatkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :		

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

4 *Aset Tetap - Lanjutan*

31 Desember 2024

Harga Perolehan	Saldo Per 31 Des 2023	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah dan Hak Atas Tanah	14.151.385.128	-	-	14.151.385.128
Instalasi Sumber	11.509.865.091		-	11.509.865.091
Instalasi Pengolahan	1.621.274.004	975.565.000	-	2.596.839.004
Instalasi Trandis	13.864.321.360	146.222.820	-	14.010.544.180
Bangunan Umum	553.419.363		-	553.419.363
Peralatan & Perlengkapan	563.440.400		-	563.440.400
Kendaraan	1.057.708.440		-	1.057.708.440
Inventaris / Perabot Kantor	1.181.203.671	23.960.000	-	1.205.163.671
Jumlah	**44.502.617.456**	**1.145.747.820**	**-**	**45.648.365.276**

Akumulasi Penyusutan	Saldo Per 31 Des 2023	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Instalasi Sumber	6.075.794.930	543.419.510		6.619.214.440
Instalasi Pengolahan	925.372.049	167.143.723		1.092.515.772
Instalasi Trandis	10.884.770.224	372.310.485		11.257.080.709
Bangunan Umum	481.050.789	5.452.040		486.502.829
Peralatan & Perlengkapan	538.255.262	6.996.905		545.252.168
Kendaraan	984.073.336	30.767.500		1.014.840.836
Inventaris / Perabot Kantor	1.056.040.551	38.310.357		1.094.350.908
Jumlah	**20.945.357.141**	**1.164.400.520**	**-**	**22.109.757.661**
Nilai Buku	**23.557.260.314**			**23.538.607.615**

31 Desember 2023

Harga Perolehan	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah dan Hak Atas Tanah	13.400.685.128	750.700.000	-	14.151.385.128
Instalasi Sumber	11.509.865.091		-	11.509.865.091
Instalasi Pengolahan	1.409.051.255	212.222.749	-	1.621.274.004
Instalasi Trandis	13.555.088.140	309.233.220	-	13.864.321.360
Bangunan Umum	553.419.363		-	553.419.363
Peralatan & Perlengkapan	540.652.528	22.787.872	-	563.440.400
Kendaraan	1.057.708.440		-	1.057.708.440
Inventaris / Perabot Kantor	1.172.251.171	8.952.500	-	1.181.203.671
Jumlah	**43.198.721.115**	**1.303.896.341**	**-**	**44.502.617.456**

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

4 *Aset Tetap - Lanjutan*

31 Desember 2023

Akumulasi Penyusutan	Saldo Per 31 Des 2022	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Instalasi Sumber	5.532.375.420	543.419.510	-	6.075.794.930
Instalasi Pengolahan	791.671.599	133.700.450	-	925.372.049
Instalasi Trandis	10.460.436.368	424.333.857	-	10.884.770.224
Bangunan Umum	475.598.749	5.452.040	-	481.050.789
Peralatan & Perlengkapan	534.841.366	3.413.896	-	538.255.262
Kendaraan	953.305.836	30.767.500	-	984.073.336
Inventaris / Perabot Kantor	1.017.921.795	38.118.756	-	1.056.040.551
Jumlah	**19.766.151.133**	**1.179.206.008**	**-**	**20.945.357.141**
Nilai Buku	**23.432.569.981**			**23.557.260.314**

Dalam Laporan Keuangan, apabila terdapat aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi oleh Perusahaan, hendaknya segera dilakukan opname fisik, segera ditentukan berapa nilainya, kemudian segera dikeluarkan dari kelompok aset tetap, dan disajikan dalam kelompok aset tidak lancar lainnya.

		2024	2023
5	**Aset Lainnya**	**1.309.261.000**	**1.309.261.000**
	Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
	Aktiva Tetap dalam Penyelesaian	532.829.000	532.829.000
	Instalasi trans/Dist dalam penyelesaian	776.432.000	776.432.000
	Jumlah	**1.309.261.000**	**1.309.261.000**

Saldo Aktiva Tetap dalam Penyelesaian merupakan nilai proyek konsultasi perancangan jaringan distribusi jaringan Transmisi sbb :

DED Jaringan Pipa Jln. Yos sudarso - Simp. Jambu Air	40.000.000	40.000.000
DED Inteke Pipa Tabek Gadang-Belakang Balok	45.240.000	45.240.000
DED Revitalisasi Pipa 250 - 150	49.170.000	49.170.000
Tambahan Revitalisasi jalur pipa -250-150	18.240.000	18.240.000
DED Pekerjaan sipil/sarana penunjang /bron dan reservoir	29.500.000	29.500.000
DED Pekerjaan Pemas.pipa dan Revitalisasi jaringan	46.250.000	46.250.000
Ganti rugi Tanaman Masyarakat dll.	346.623.000	346.623.000
Penyusunan Zoning System DED	195.836.000	195.836.000
Penyusunan DED	146.429.000	146.429.000
Penyusunan Dokumen upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan h	15.000.000	15.000.000
DED studi kelayakan SPAM Panoram Baru	72.886.000	72.886.000
DED Spam Mata Air Sariak	149.087.000	149.087.000
DED Penambahan kapasitas SPAM Tabek Gadang	74.000.000	74.000.000
DED studi kelayakan Penambahan kapasitas SPAM Tabek Gadang	69.000.000	69.000.000
Foto Udara lingkup SPAM Panorama Baru	12.000.000	12.000.000
Jumlah	**1.309.261.000**	**1.309.261.000**

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

		2024	2023
6	**Utang Usaha**	**14.130.000**	**-**
	Jumlah tersebut merupakan saldo utang usaha per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
	Utang Bahan Kimia	14.130.000	-
	Jumlah	**14.130.000**	**-**

		2024	2023
7	**Hutang Non Usaha**	**218.420.812**	**167.251.303**
	Jumlah tersebut merupakan Utang Non usaha per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
	Beban Kompensasi ke Masyarakat Sumber Air	54.704.000	34.875.800
	Beban Air Baku/ Permukaan ke Pemda Tk I	5.963.166	5.470.000
	Beban Bahan Bakar Kendaraan Dinas	200.000	400.000
	Beban Alat Tulis Kantor dan Foto Copy	3.978.750	362.750
	Rupa-rupa Biaya Kantor	970.200	2.258.000
	Beban Pemeliharaan Pipa Transmisi	110.000	330.000
	Rupa-rupa Biaya instalasi transmisi dan Distribusi	12.403.945	17.166.269
	Beban Penagihan	1.172.305	1.011.620
	Beban sewa	9.362.430	9.306.864
	Rupa-rupa Biaya Non Operasional	820.000	1.750.000
	Pengakuan hutang iuran keanggotaan Perpamsi	15.000.000	15.000.000
	Beban Perencanaan Bidang Usaha dan Keuangan	26.937.500	-
	Cadangan Dana Sosial Pendidikan & Kesra	84.835.000	-
	Beban Bahan Bakar Kendaraan Tangki	1.003.816	-
	Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas	467.000	-
	Rupa-rupa Biaya Pengolahan Air	-	171.000
	Rupa-rupa Biaya Umum Lainnya	-	43.917.000
	Beban Rapat dan Tamu	492.700	172.000
	Beban Badan Pengawas	-	300.000
	Titipan Retribusi Sampah	-	33.015.000
	Beban Pemeriksaan Kualitas Air	-	1.745.000
	Jumlah	**218.420.812**	**167.251.303**

		2024	2023
8	**Biaya Yang Masih Harus Dibayar**	**899.689.651**	**1.740.184.320**
	Jumlah tersebut merupakan biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023,		
	Hutang penyesuaian PhDP Karyawan yang akan pensiun	899.689.651	1.740.184.320
	Jumlah	**899.689.651**	**1.740.184.320**

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

						2024		2023
9	**Perpajakan**					351.812.184		217.608.675
	a. Piutang pajak							
	b. Utang Pajak							
	Utang PPh Pasal 21					553.500		-
	Utang PPh Pasal 21 final					318.050		440.161
	Utang PPh Pasal 22					-		160.500
	Utang PPh Pasal 23					1.378.370		1.044.648
	Utang PPN					1.050.885		189.936
	Utang PPh Pasal 25 Tahun lalu					343.107.618		215.773.430
	Utang PPh Final					5.403.761		-
	Jumlah					**351.812.184**		**217.608.675**
	c. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan							
	Laba/(Rugi) sebelum Pajak Tahun 2024					1.312.325.875		
	Koreksi Fiskal Positif :							
	Beban Rapat dan Tamu				13.377.408			
	Beban Dana Representasi				173.000.000			
	Penyisihan Piutang				15.122.559			
	Beban Penyusutan Aset				542.213.035			
	Beban Pajak				6.921.921			
	Beban Administrasi Bank				4.598.335			
	Jumlah Koreksi Positif					755.233.258		
	Koreksi Fiskal Negatif :							
	Jasa Giro				(18.961.685)			
	Agency				(61.209.176)			
	Jumlah Koreksi Negatif					(80.170.861)		
	Laba (rugi) Fiskal Tahun 2023							
	Dasar pengenaan PPH Badan					**1.987.388.272**		
	b. Laba Kena Pajak							**1.987.388.272**
	I		4.800.000.000 / 12.874.531.500		X	1.987.388.272	=	740.956.182
	II		1.987.388.272		-	740.956.182	=	1.246.432.090
	A	22%	X		50%	740.956.182	=	81.505.180
	B	22%			X	1.246.432.090	=	274.215.060
		Penghasilan Kena Pajak / PKP						**355.720.240**
	PPH Badan							355.720.240
	Uang Muka PPH Badan							(221.813.936)
	Kurang/(Lebih) Bayar PPH Badan							**133.906.304**

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

		2024	2023
10	**Pendapatan Diterima Dimuka**	**43.916.600**	**35.547.100**
	Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan diterima dimuka , per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
	Sewa Papan Billboard	-	6.666.900
	Tanki Air	3.870.000,00	630.000
	Sewa Ruang ATM - BNI BRI dan Sewa Tanah V Suku	40.046.600	28.250.200
	Jumlah	**43.916.600**	**35.547.100**

		2024	2023
11	**Utang Jangka Pendek Lainnya**	**55.575.000**	**4.000.000**
	Jumlah tersebut merupakan saldo utang jangka pendek lainnya , per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
	Retribusi Sampah	51.575.000	-
	Jaminan Pelanggan	4.000.000	4.000.000
	Jumlah	**55.575.000**	**4.000.000**

		2024	2023
12	**Cadangan Dana**	**3.414.835.918**	**6.756.567.039**
	Jumlah tersebut merupakan saldo cadangan dana , per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
	Cadangan Dana Sosial dan Pendidikan	1.139.489.348	1.231.634.348
	Cadangan Dana Produksi	296.434	296.434
	Cadangan Dana Pensiun	490.754.278	662.354.278
	Cadangan Dana Pemda	-	3.077.986.121
	Cadangan Dana Umum	1.659.619.367	1.659.619.367
	Cadangan Dana lainnya	124.676.492	124.676.492
	Jumlah	**3.414.835.918**	**6.756.567.039**

Perhitungan nilai cadangan dana berasal dari perolehan laba tahun tahun sebelumnya

		2024	2023
13	**Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan**	**-**	**1.177.102.241**
	Jumlah tersebut merupakan kekayaan Pemda yang dipisahkan , per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.		

		2024	2023
14	**Penyertaaan Modal Pemda**	**8.810.707.950**	**16.496.904.508**
	Jumlah tersebut merupakan nilai penyertaan modal Pemda per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
	Penyertaan Pemerintah Daerah	421.384.000	421.384.000
	PMP dari anggaran Belanja Daerah	12.500.000.000	12.500.000.000
	Penyertaan modal Pemda dr bagian laba	2.255.970.498	2.255.970.498
	Laba rugi ditahan	1.319.550.011	1.319.550.011
	Penyertaan Pemerintah Daerah	1.177.102.241	-
	Cadangan Dana Pemda	3.077.986.121	-
	Daftar Asset barang eks Dep.PU yang belum ditetapkan melalui Surat N0. PL.07.03-DC/69 tgl 5 Desember 2007.	838.812.810	-
	Modal Awal	473.824.549	-
	Tambahan Modal Cadangan (SK Walikota Dati II Bukittinggi No. 188.45.88/1987 tanggal 24 September 1987)	25.200.000	-
	Tambahan Modal dari Proyek Air Bersih Dep. PU sesuai BAST No. BA-8/MBK/91 tanggal 26 Maret 1991	250.091.419	-
	Tambahan Modal dari Proyek Air Bersih Dep. PU sesuai BAST No. PL.07.03-SJ369 tanggal 22 April 1996	223.200.240	-
	Laba rugi ditahan 2014 s/d 2024	(13.752.413.938)	
	Jumlah	**8.810.707.950**	**16.496.904.508**

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

		2024	2023
15	**Penyertaaan Modal Pemda Yang Belum Ditetapkan**	**13.705.807.700**	**14.544.620.510**
	Jumlah tersebut merupakan nilai penyertaan modal Pemda yang belum ditetapkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
	Daftar Asset barang eks Dep.PU yang belum ditetapkan melalui Surat N0. PL.07.03-DC/69 tgl 5 Desember 2007.	-	838.812.810
	Berita Acara Serah Terima Aset Sementara pengadaan dan Pemasangan Pipa DN 250 MM No.01/BASTPS/I-2011 tgl 3 Januari 2011	1.077.074.700	1.077.074.700
	Berita Acara Serah Terima Aset Sementara IPA Kapasitas20 l/dtk, pengadaan dan Pemasangan Pipa DN 200 MM No.02/BASTPS/I-2012 tgl 2 Januari 2012	9.727.186.000	9.727.186.000
	Berita Acara Serah Terima Aset Sementara Nomor. 03/BASTAS/IX-2018, Tanggal 19 September 2018 pembuatan dinding penahan dan tumpuan jembatan pipa distribusi utama.	2.901.547.000	2.901.547.000
	Jumlah	**13.705.807.700**	**14.544.620.510**

		2024	2023
16	**Hibah**	**-**	**972.316.208**
	Jumlah tersebut merupakan hibah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
	Modal Awal	-	473.824.549
	Tambahan Modal Cadangan (SK Walikota Dati II Bukittinggi No. 188.45.88/1987 tanggal 24 September 1987)	-	25.200.000
	Tambahan Modal dari Proyek Air Bersih Dep. PU sesuai BAST No. BA-8/MBK/91 tanggal 26 Maret 1991	-	250.091.419
	Tambahan Modal dari Proyek Air Bersih Dep. PU sesuai BAST No. PL.07.03-SJ369 tanggal 22 April 1996	-	223.200.240
	Jumlah	**-**	**972.316.208**

		2024	2023
17	**Pendapatan Air**		
	Jumlah tersebut merupakan pendapatan air tahun 2024 dan 2023	**12.048.196.200**	**12.007.303.100**
	Rincian lebih lanjut atas rekening penjualan air sebagai berikut dibawah ini :		
	Harga Air	10.867.764.200	10.900.653.100
	Jasa Administrasi	254.336.000	253.330.000
	Dana Meter	737.546.000	733.950.000
	Jumlah	**11.859.646.200**	**11.887.933.100**
	Tanki Air	188.550.000	119.370.000
	Total	**12.048.196.200**	**12.007.303.100**

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

17 Pendapatan Air - Lanjutan

Berdasarkan Kelompok Pelanggan :

PRA Sosial Umum (1A)	23.605.700	23.251.800
PRA Sosial Khusus (1B)	107.774.800	106.697.800
PRA Rumah Tangga A (2A)	863.740.000	885.192.000
PRA Rumah Tangga B (2B)	3.154.804.300	3.204.172.500
PRA Rumah Tangga C (2C)	937.405.500	917.643.000
PRA Niaga Kecil (3A)	1.884.239.000	1.815.360.500
PRA Niaga Menengah (3B)	1.032.811.000	914.576.000
PRA Niaga Khusus (3C)	1.458.895.000	1.379.825.000
PRA Instansi Pemerintah	2.267.634.900	2.554.830.500
Pelanggan Khusus	128.736.000	86.384.000
Jumlah	**11.859.646.200**	**11.887.933.100**
Tanki Air	188.550.000	119.370.000
Total	**12.048.196.200**	**12.007.303.100**

	2024	**2023**
18 Pendapatan Non Air	**826.335.300**	**901.529.750**

Jumlah tersebut merupakan pendapatan penjualan Non Air per 31 Desember 2024 dan 2023

Rincian lebih lanjut atas rekening penjualan non air sebagai berikut dibawah ini :

Pendapatan Sambungan Baru	470.681.300	530.356.300
Pendapatan Denda	170.695.000	168.340.000
Pendapatan Sambung Kembali	108.011.600	102.330.000
Pendapatan Penggantian Meter Air	31.197.500	24.050.700
Pendapatan Biaya Balik Nama	980.000	450.000
Pendapatan Non Air Lainnya	44.769.900	76.002.750
T o t a l	**826.335.300**	**901.529.750**

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

		2024	2023
19	**Beban Operasional**	**11.715.602.514**	**11.568.726.000**
	Jumlah tersebut merupakan beban operasional Perumda Air Minum 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
	Beban Pegawai	6.360.267.382	6.403.063.793
	Beban Listrik	956.961.645	897.311.181
	Beban Bahan Bakar	258.353.288	194.035.258
	Beban Pemakaian Bahan Kimia	518.917.431	510.170.830
	Beban Pemakaian Bahan Pembantu	58.619.204	82.996.732
	Beban Pemeriksaan Kwalitas Air Minum	16.401.775	7.929.000
	Beban Air Baku / Air Curah	624.816.316	495.326.100
	Beban Pemeliharaan	349.912.650	375.684.341
	Beban Penyisihan Piutang	96.338.259	99.962.236
	Beban Kantor	281.074.445	264.774.028
	Beban ATK dan Barang Cetakan	41.615.879	48.622.961
	Beban Penelitian dan Pengembangan	88.683.000	80.335.000
	Beban Pajak dan Retribusi	9.263.836	8.536.931
	Beban Hubungan Langganan	41.543.042	45.331.746
	Beban Operasional Lainnya	127.034.855	122.806.150
	Beban Administrasi dan Umum Lainnya	721.398.987	752.633.706
	Jumlah	**10.551.201.994**	**10.389.519.992**
	Beban Penyusutan Akt tetap	1.164.400.520	1.179.206.008
	Total	**11.715.602.514**	**11.568.726.000**
	a. Beban Pegawai Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :		
	Sumber	*536.198.691*	487.855.099
	Pengolahan	*1.222.314.880*	1.211.185.736
	Transmisi dan Distribusi	*1.626.565.445*	1.340.354.474
	Administrasi & Umum	*2.975.188.366*	3.363.668.484
	Jumlah	***6.360.267.382***	***6.403.063.793***
	Beban Pegawai Administrasi dan Umum terdiri dari :		
	Gaji dan Honor Pegawai	1.444.766.154	1.440.722.616
	Tunjangan	947.318.162	992.332.297
	Iuran Pensiun	583.104.050	930.613.571
	Jumlah	**2.975.188.366**	**3.363.668.484**
	b. Beban Listrik Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :		
	Beban Listrik Sumber	*22.934.061*	26.108.919
	Beban Listrik Palolok	*221.531.069*	243.126.034
	Beban Listrik Tabek Gadang	*308.333.311*	329.384.823
	Beban Listrik Bukit Apit	*22.209.415*	23.037.588
	Beban Listrik WTP Belakang Balok	*74.047.084*	75.483.826
	Beban Listrik Embung Tabek Gadang	*286.239.015*	178.190.266
	Beban Listrik Reservoir/Bron	*4.248.715*	4.687.951
	Beban Penerangan Kantor	*17.418.975*	17.291.774
	Jumlah	***956.961.645***	***897.311.181***

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

19 Beban Operasional-Lanjutan

c. Beban Bahan Bakar		
Beban Bahan Bakar Kendaraan Tangki	*17.675.180*	29.582.568
Beban Bahan Bakar Sumber	*850.000*	-
Beban Bahan Bakar Kendaraan Dinas	*239.828.108*	164.452.690
Jumlah	***258.353.288***	***194.035.258***
d. Beban Pemakaian Bahan Kimia		
Bahan Kimia Tabek Gadang	*124.830.700*	109.090.000
Bahan Kimia Wtp Belakang Balok	*233.145.000*	257.436.250
Bahan kimia Kaporit Tabek Gadang	*26.909.564*	15.378.248
Bahan kimia Kaporit Wtp Tabek Gadang	*37.505.124*	27.452.390
Bahan kimia Kaporit Sungai Tanang	*87.727.185*	93.258.593
Bahan kimia Kaporit Kubang Putih	*2.951.379*	4.372.080
Bahan kimia Kaporit Cingkariang	*2.924.240*	2.455.770
Bahan kimia Kaporit Sumur Bor Bukit Apik	*2.924.240*	727.500
Jumlah	***518.917.431***	***510.170.830***
e. Beban Pemakaian Bahan Pembantu		
Instalasi Transmisi dan Distribusi - Beban Pemakaian Pipa Persil	*58.619.204*	82.996.732
Jumlah	***58.619.204***	***82.996.732***
f, Beban Pemeriksaan Kwalitas Air		
Beban Pemeriksaan Kwalitas Air	*16.401.775*	*7.929.000*
Jumlah	***16.401.775***	***7.929.000***
g. Beban Air Baku / Curah		
Kompensasi ke Masyarakat Sumber	*550.060.100*	*453.133.900*
Pajak Air Bawah Tanah	*74.756.216*	*42.192.200*
Jumlah	***624.816.316***	***495.326.100***
h. Beban Pemeliharaan Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :		
Sumber	*25.594.473*	65.658.576
Instalasi Pengolahan Air	*5.124.895*	7.670.797
Instalasi Transmisi dan Distribusi	*276.462.608*	262.807.932
Administrasi & Umum	*42.730.675*	39.547.036
Jumlah	***349.912.650***	***375.684.341***
i. Beban Penyisihan /Penghapusan Piutang Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :		
Beban Penyisihan Piutang	*15.122.559*	27.886.836
Beban Penghapusan Piutang	*81.215.700*	72.075.400
Jumlah	***96.338.259***	***99.962.236***

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

19 Beban Operasional-Lanjutan

j. Beban Kantor Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :

Beban Telepon, Internet	*24.264.052*	*24.487.137*
Beban TAD	*200.053.628*	*187.983.666*
Beban Rapat dan Tamu	*13.377.408*	10.722.750
Beban Kantor Lainnya	*43.379.357*	*41.580.475*
Jumlah	***281.074.445***	***264.774.028***

k. Beban ATK dan Barang Cetakan Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :

Beban Alat2 tulis dan foto copy	*17.873.879*	24.289.281
Beban Perlengkapan Computer	*21.116.000*	22.918.680
Beban Barang2 Cetakan	*2.626.000*	1.415.000
Jumlah	***41.615.879***	***48.622.961***

l. Beban Penelitian dan Pengembangan Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :

Penelitian dan survei	*283.000*	235.000
Beban Perencanaan bidang keuangan	*88.400.000*	80.100.000
Jumlah	***88.683.000***	***80.335.000***

m. Beban Pajak dan Retribusi Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :

Beban Pajak	-	-
Beban Pajak Pemerintah (PBB)	9.263.836	8.536.931
Jumlah	***9.263.836***	***8.536.931***

n. Beban Hubungan Langganani Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :

Beban Pengawasan Meter	*225.000*	274.000
Beban Penagihan Rekening	*40.669.042*	42.257.746
Beban Pendataan Pelanggan	-	-
Beban Iklan/Promosi	*649.000*	2.800.000
Jumlah	***41.543.042***	***45.331.746***

o. Beban Operasi lainnya Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :

Rupa-rupa Biaya Operasi Sumber	*26.467.500*	21.865.800
Rupa-rupa Biaya Pengolahan Air	*19.621.700*	12.688.700
Rupa-rupa inst.trans/dist.	*80.945.655*	88.251.650
Jumlah	***127.034.855***	***122.806.150***

C INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

19 Beban Operasional-Lanjutan

p. Beban Administrasi dan Umum lainnya Terinci sebagaimana berikut dibawah ini :

Beban Iuran Keanggotaan	*12.000.000*	12.000.000
Beban Langganan Media Cetak	-	150.000
Beban Badan Pengawas	*83.689.411*	78.201.997
Beban Perjalanan Dinas	*89.215.160*	80.755.275
Beban Representasi	*173.000.000*	134.000.000
Beban Audit	*36.500.000*	39.666.200
Beban sewa	127.040.832	126.538.335
Beban Asuransi	195.728.584	190.923.386
Beban Pajak	-	5.966.513
Beban Rupa-rupa Biaya Umum Lainnya	4.225.000	84.432.000
Jumlah	***721.398.987***	***752.633.706***

q. Beban Penyusutan terdiri dari :

Instalasi Sumber Air	*543.419.510*	543.820.396
Instalasi Pengolahan Air	*167.143.723*	133.299.563
Instalasi Transmisi dan distribusi	*372.310.485*	424.333.857
Bangunan/Gedung	*5.452.040*	5.452.040
Peralatan dan Perlengkapan	*6.996.905*	3.413.896
Kendaraan	*30.767.500*	30.767.500
Investasi Perabot Kantor	*38.310.357*	38.118.756
Jumlah	***1.164.400.520***	***1.179.206.008***

	2024	**2023**
20 Pendapatan (Beban) Non Operasional	**153.396.889**	**139.149.872**
Jumlah tersebut merupakan beban non operasional Perumda Air Minum 31 Desember 2024 dan 2023,dengan rincian sebagai berikut:		
Pendapatan Non Operasional		
Pendapatan Jasa Giro	18.961.685	25.690.031
Penerimaan Penghapusan Piutang	14.893.750	32.442.600
Pendapatan Agensi Pos	61.209.176	50.875.033
Penyesuaian Pajak	160.500	-
Pendapatan Non Operasional Lainnya	98.834.508	70.321.975
Jumlah	**194.059.619**	**179.329.639**
Beban Non Operasional		
Beban Jasa Administrasi dan Bank	(4.598.335)	(5.373.507)
Penyesuaian Pajak	(6.921.921)	(151.500)
Penyesuaian atas Piutang Air	(29.142.474)	(34.654.760)
Jumlah	**(40.662.730)**	**(40.179.767)**
Jumlah seluruhnya	**153.396.889**	**139.149.872**

21 Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

22 Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Manajemen Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukit Tinggi bertanggung jawab atas laporan keuangan yang penyusunannya diselesaikan pada tanggal ……. Maret 2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN POKOK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LAPORAN ARUS KAS
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
ASET			
Kas	3	432.868.343	325.419.720
Penempatan Pada Bank Lain	4	29.095.229.932	29.871.898.503
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		(53.837)	(5.012.506)
Jumlah Setelah Dikurangi Penyisihan		29.095.176.095	29.866.885.997
Pembiayaan yang diberikan	5	93.825.183.449	77.273.225.923
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		(662.478.265)	(484.864.024)
Jumlah Setelah Dikurangi Penyisihan		93.162.705.184	76.788.361.899
Aset Tetap dan Inventaris	6	1.526.500.454	1.372.635.450
Akumulasi Penyusutan		(1.160.047.449)	(978.285.553)
Nilai Buku		366.453.005	394.349.897
Aset Lain-Lain	7	1.047.283.570	739.004.521
Jumlah Aset		**124.104.486.196**	**108.114.022.034**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	8	94.324.883	43.268.461
Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan	9	212.197.339	156.294.356
Hutang Pajak	10	105.952.437	129.064.536
Tabungan Wadiah	11	46.731.983.328	45.017.546.551
Deposito	12	22.534.246.639	12.481.037.000
Simpanan dari bank lain	13	35.217.016.272	37.000.000.000
Pinjaman Diterima	14	4.130.132.318	-
Kewajiban Lain-Lain	15	1.776.157.612	947.233.919
Jumlah Kewajiban		**110.802.010.828**	**95.774.444.822**
EKUITAS			
Modal Disetor	1b	9.443.400.000	9.165.900.000
Cadangan	16		
Cadangan umum		1.508.129.150	1.156.651.075
Cadangan tujuan		184.526.557	184.526.557
Belum Ditentukan Tujuannya		2.166.419.662	1.832.499.580
Jumlah		3.859.075.369	3.173.677.212
Jumlah Ekuitas		**13.302.475.369**	**12.339.577.212**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**124.104.486.196**	**108.114.022.034**

30 Januari 2025

Feri Irawan, SE, ME
Direktur Utama

Dewi Fitria, SE
Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
LAPORAN LABA-RUGI
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	17		
Dari penempatan pada bank syariah lain		1.573.703.068	1.465.285.703
Pembiayaan yang diberikan		13.267.197.476	10.299.797.542
Jumlah Pendapatan Operasional		14.840.900.544	11.765.083.245
Beban Bagi Hasil kepada Pemilik Dana	18		
Kepada Bank Lain		3.122.636.568	1.781.582.388
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		1.487.675.478	986.576.193
Jumlah Beban Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana		4.610.312.046	2.768.158.582
Pendapatan Bagi Hasil - Bersih		10.230.588.498	8.996.924.663
Pendapatan Operasional Lainnya	19	1.436.284.274	499.628.214
Beban Operasional	20	603.997.599	616.565.582
Beban Operasional Lainnya	21	8.326.958.855	6.594.697.860
Jumlah Beban Operasional		8.930.956.454	7.211.263.442
LABA (RUGI) OPERASIONAL		**2.735.916.318**	**2.285.289.435**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	22		
Pendapatan Non Operasional		499.999	-
Beban Non Operasional		(68.034.862)	(57.133.423)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		(67.534.863)	(57.133.423)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**2.668.381.455**	**2.228.156.012**
Pajak Penghasilan		(501.961.793)	(395.656.432)
LABA (RUGI) BERSIH		**2.166.419.662**	**1.832.499.580**

30 Januari 2025

Feri Irawan, SE, ME
Direktur Utama

Dewi Fitria, SE
Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

KETERANGAN	Modal Disetor	Saldo Laba			Total Ekuitas
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Belum Ditentukan	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023, disajikan terdahulu	9.165.900.000	915.708.974	184.526.557	1.204.710.506	11.470.846.037
Deviden	-	-	-	(1.204.710.506)	(1.204.710.506)
Modal	-	-	-	-	-
Pembentukan Cadangan	-	240.942.101	-	-	240.942.101
Koreksi fiskal tahun lalu	-	-	-	-	-
Laba (rugi) Periode Berjalan	-	-	-	1.832.499.580	1.832.499.580
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**9.165.900.000**	**1.156.651.075**	**184.526.557**	**1.832.499.580**	**12.339.577.212**
Deviden	-	-	-	(1.832.499.580)	(1.832.499.580)
Modal	277.500.000	-	-	-	277.500.000
Pembentukan Cadangan	-	366.499.916	-	-	366.499.916
Koreksi fiskal tahun lalu	-	(15.021.841)	-	-	(15.021.841)
Laba (rugi) Periode Berjalan	-	-	-	2.166.419.662	2.166.419.662
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**9.443.400.000**	**1.508.129.150**	**184.526.557**	**2.166.419.662**	**13.302.475.369**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023
I	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**		
	Laba (Rugi) Setelah Pajak	2.166.419.662	1.832.499.580
	Penyesuaian Untuk :		
	Penyisihan Pengh. Aset Penempatan Pada Bank Lain	(4.958.669)	(15.633.652)
	Amortisasi Administrasi Pembiayaan	(12.589.398)	704.567.915
	Penyisihan Pengh. Aset Pembiayaan Yang Diberikan	177.614.241	74.592.097
	Penyusutan Aset Tetap	181.761.896	199.967.950
	Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	2.508.247.732	2.795.993.890
	Penurunan (Kenaikan) Pembiayaan yang diberikan	(16.539.368.128)	(30.223.813.209)
	Penurunan (Kenaikan) Aset Lain-Lain	(308.279.049)	(67.706.610)
	Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Segera	51.056.422	(24.447.681)
	Kenaikan (Penurunan) Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan	55.902.983	121.587.547
	Kenaikan (Penurunan) Tabungan Wadiah	1.714.436.777	5.174.158.716
	Kenaikan (Penurunan) Deposito	10.053.209.639	4.173.750.000
	Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak	(23.112.099)	59.654.175
	Kenaikan (Penurunan) Simpanan dari bank lain	(1.782.983.728)	27.900.000.000
	Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lain-Lain	828.923.693	(591.724.477)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	3.188.166.560	7.317.452.351
II	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**		
	Pembelian (Penjualan) Aset Tetap dan Inventaris	(153.865.004)	(66.979.000)
	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(153.865.004)	(66.979.000)
III	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**		
	Penerimaan (Pembayaran) Modal Disetor	277.500.000	-
	Kenaikan (Penurunan) Cadangan	351.478.075	240.942.101
	Pembagian Laba Tahun Lalu (Bonus)	(1.832.499.580)	(1.204.710.506)
	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	(1.203.521.505)	(963.768.405)
	Kenaikan Bersih Kas	1.830.780.051	6.286.704.946
	Kas Pada Awal Periode	24.197.318.223	17.910.613.278
	Kas Pada Akhir Periode	26.028.098.274	24.197.318.223
	Kas dan Setara Kas terdiri dari :		
	Kas	432.868.343	325.419.720
	Giro pada Bank Lain	104.465.878	7.695.436
	Tabungan	8.240.764.054	8.614.203.067
	Deposito Berjangka 1 s/d 3 bulan	17.250.000.000	15.250.000.000
	Jumlah	26.028.098.274	24.197.318.223

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Sumber Dana Kebajikan pada awal periode	1.591.526	1.136.003
2	Sumber Dana Kebajikan		
	a. Infaq dan Shadaqah	-	-
	b. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
	c. Denda	-	450.000
	d. Pendapatan non halal	7.355	5.523
	e. Lainnya	-	-
	Jumlah Sumber Dana Qardh	7.355	455.523
3	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana Kebajikan Produktif	-	-
	b. Sumbangan	-	-
	c. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	-	-
	Jumlah Penggunaan Dana Qardh	-	-
4	Sumber Dana Kebajikan pada akhir periode	**1.598.881**	**1.591.526**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Sumber Dana Zakat pada awal periode	-	-
2	Sumber Dana Zakat		
	a. Zakat dari Bank	68.034.862	57.133.423
	b. Zakat dari pihak luar Bank	-	-
	c. Pembayaran Qardul Hasan	-	-
	d. Infaq dan Shadaqah	-	-
	e. Lain-Lain	-	-
	Jumlah Sumber Dana Zakat	68.034.862	57.133.423
3	Penggunaan Dana Zakat		
	a. Disalurkan ke lembaga/pihak lain	68.034.862	57.133.423
	b. Disalurkan sendiri	-	-
	c. Lainnya	-	-
	Jumlah Penggunaan Dana Zakat	68.034.862	57.133.423
4	Sumber Dana Zakat pada akhir periode	-	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

1 U M U M

a. Pendirian Perusahaan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang, berkedudukan di Bukittinggi, didirikan dengan Akta Nomor 02 tanggal 10 September 2004 pada notaris Anna Ninif Zuryani, SH, notaris di Padang. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repulik Indonesia Nomor C-11536.HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 April 2006. Akta tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 14 tanggal 18 Juli 2019 oleh Notaris Zurlina Meryanti, SH, M.Kn notaris di Bukittinggi. Akta perubahan tersebut telah disyahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0121993.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 01 tanggal 5 Mei 2021 Notaris Zurlina Meryanti, SH, MKn, Notaris di Bukittinggi, menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda). Akta Perobahan Anggaran Dasar tersebut telah disyahkan oleh Menhunkam Nomor AHU-0029690.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021. Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-76-D.03/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda).

PT. BPR Syariah Jam Gadang (Perseroda) mempunyai 3 kantor kas yang beralamat sebagai berikut :

Kantor Kas	: Jl. Raya Tigo Baleh Pakan Labuah Bukittinggi
Kantor Kas	: Pasar Ateh Lantai II No. 81
Kantor Kas	: RSUD Ahmad Mochtar

Maksud dan tujuan didirikannya perseroan ini adalah berusaha dalam bidang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Memasarkan produk-produk perbankan dan memobilisasi dana masyarakat melalui Tabungan, Deposito serta Pembiayaan bagi masyarakat disekitarnya.
2. Menunjang perekonomian daerah dengan menyalurkan pembiayaan bagi kegiatan usaha yang bersifat produktif.

b. Modal Dasar Serta Modal Ditempatkan Dan Disetor

Berdasarkan Akta Nomor 63 tanggal 31 Desember 2018 modal dasar perseroan menjadi sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) terbagi atas 2.000.000 (dua juta) lembar saham biasa masing-masing dengan nominal Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per lembar saham.

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh tahun 2024 dan 2023 dengan pemegang saham sebagai berikut :

Tahun 2024

Pemegang Saham	Jumlah lembar saham	Prosentase kepemilikan (%)	Jumlah (Rupiah)
Pemerintah Kota Bukittinggi	825.000	87,36%	8.250.000.000
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumbar	7.500	0,79%	75.000.000
Dana Pensiun BPD Sumbar	1.000	0,11%	10.000.000
KSUKB BPD Sumbar	2.500	0,26%	25.000.000
Pemegang Saham Lainnya Dibawah 5%	108.340	11,47%	1.083.400.000
J u m l a h	**944.340**	**100,00%**	**9.443.400.000**

Tahun 2023

Pemegang Saham	Jumlah lembar saham	Prosentase kepemilikan (%)	Jumlah (Rupiah)
Pemerintah Kota Bukittinggi	165.000	90,01%	8.250.000.000
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumbar	1.500	0,82%	75.000.000
Dana Pensiun BPD Sumbar	200	0,11%	10.000.000
KSUKB BPD Sumbar	500	0,27%	25.000.000
Pemegang Saham Lainnya Dibawah 5%	16.118	8,79%	805.900.000
J u m l a h	**183.318**	**100,00%**	**9.165.900.000**

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

c. Susunan Pengurus

PT. BPR Syariah Jam Gadang Perseroda pada saat ini memiliki karyawan 33 orang dan dikelola oleh suatu Badan Pengurus dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah :
Ketua : DR. Gusrizal Gazahar, LC. MA
Anggota : Aidil Alfin, MA, Phd

Komisaris :
Komisaris Utama : Rismal Hadi, S.STP, M.Si
Komisaris : Uskavinov SE, MM

Direksi :
Direktur Utama : Feri Irawan, SE, ME
Direktur : Dewi Fitria, SE

d. Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan

Manajemen PT. BPR Syariah Jam Gadang Perseroda bertanggungjawab atas laporan keuangan yang penyusunannya diselesaikan pada tanggal 30 Januari 2025.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan PT. BPR Syariah Jam Gadang (Perseroda) disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan IAI, serta pedoman akuntansi yang ditetapkan otoritas perbankan.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

① Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip berkesinambungan (going concern) serta mengikuti konvensi harga historis (historical cost). Kebijakan akuntansi ini diterapkan secara konsisten kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dianut.
② Laporan keuangan disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan dengan metode tidak langsung (*indirect method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
③ Periode akuntansi adalah menurut tahun takwim atau tahun kalender, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.
④ Laporan keuangan disajikan dalam satuan mata uang Rupiah.

b. Konsep Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan.

Dasar pengukuran adalah biaya hstoris dan nilai wajar. Aset dicatat sebesar kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Penghasilan dan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

c. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait)

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang dimaksud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) adalah sebagai berikut :

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) dengan entitas, jika :
❶ secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut :
- mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak dan fellow subsidiaries);
- memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan; atau
- memiliki pengendalian bersama dari entitas;

❷ pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
❸ pihak tersebut adalah joint venture dimana entitas tersebut merupakan venturer;
❹ pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
❺ pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam ❶ atau ❹;

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

❻ pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam ❹ atau ❺; atau
❼ pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Hubungan istimewa (pihak terkait) terutama berkenaan dengan akun penempatan pada bank lain, pembiayaan yang diberikan dan simpanan dalam laporan keuangan. Tidak terdapat perlakukan yang berbeda atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait).

Seluruh transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan kondisi dan persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas, giro pada bank lain, penempatan pada bank-bank lain, sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

e. *Penempatan pada Bank Lain*

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian aset/penyisihan penilaian kualitas aset. Penyisihan penilaian kualitas aset/penyisihan kerugian ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing saldo penempatan akhir tahun yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 24 tanggal 24 Nopember 2024 dan Peraturan OJK No. 29/POJK.03/2019 tanggal 27 November 2019.

Kualitas aset produktif dalam bentuk penempatan pada bank lain ditetapkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar dan Macet dengan klasifikasi sebagai berikut :

① Lancar
- Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah

② Kurang Lancar
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/gabi hasil/ujrah paling lama 5 (lima) hari kerja

③ Macet
- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/gabi hasil/ujrah lebih dari 5 (lima) hari kerja
- BPRS, bank umum syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenai sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha, telah dicabut izin usaha atau telah dilikuidasi.

Pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) lihat catatan 2g.

f. Pembiayaan yang diberikan

Pembiayaan yang diberikan dinyatakan sebesar saldo pembiayaan yang diberikan dikurangi dengan penyisihan kerugian aset/ penyisihan penilaian kualitas aset. Penyisihan penilaian kualitas aset/penyisihan kerugian ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing saldo pembiayaan yang diberikan akhir tahun yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 24 tanggal 24 Nopember 2024 dan Peraturan OJK No. 29/POJK.03/2019 tanggal 27 November 2019.

Kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan yang diberikan ditetapkan dalam 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dengan klasifikasi sebagai berikut :

Pembiayaan diklasifikasikan sebagai berikut :
❶ Pembiayaan dengan angsuran
- kurang dari 1 (satu) bulan
- 1 (satu) bulan atau lebih

Kualitas Pembiayaan dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan
a. Lancar
- Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan pembiayaan belum jatuh tempo

b. Dalam Perhatian Khusus
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran
- Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.

c. Kurang Lancar
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari
- Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

d. Diragukan
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari
- Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.

e. Macet
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran
- Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari;
- Pembiayaan telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan/atau
- Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.

Kualitas Pembiayaan dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih

a. Lancar
- Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin; atau
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan pembiayaan belum jatuh tempo

b. Dalam Perhatian Khusus
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran
- Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.

c. Kurang Lancar
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari
- Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

d. Diragukan
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari
- Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.

e. Macet
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran
- Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari;
- Pembiayaan telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan/atau
- Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.

Pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) lihat catatan 2g.

Pendapatan bagi hasil atas pembiayaan lancar diakui secara akrual dan pendapatan bagi hasil atas pembiayaan yang telah diklasifikasikan sebagai "non-performing" diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

g. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

Aset yang digolongkan sebagai aset produktif sesuai dengan Peraturan OJK No, 24 Tahun 2024 tanggal 29 Nopember 2024 dan Peraturan OJK No. 29/POJK.03/2019 tanggal 27 November 2019 adalah penyediaan dana BPRS dalam bentuk rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank dan Pembiayaan Yang Diberikan.

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset/Penyisihan Penilaian Kualitas Aset tersebut sesuai dengan Peraturan OJK No, 24 Tahun 2024 tanggal 29 Nopember 2024 dan Peraturan OJK No. 29/POJK.03/2019 tanggal 27 November 2019 berdasarkan prosentase tetap dari saldo akhir aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut. Besarnya prosentase penyisihan penghapusan aset produktif adalah sebagai berikut :

Kolektibilitas Aset Produktif	
Lancar	0,50%
Dalam Perhatian Khusus	3,00%
Kurang Lancar	10,00%
Diragukan	50,00%
Macet	100,00%

Penyisihan Penghapusan Aset/Penyisihan Penilaian Kualitas Asetterdiri dari penyisihan umum dan khusus. Aset produktif dengan kolektibilitas Lancar digolongkan dalam PPAP umum, sedang untuk yang koletibilitasnya Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet digolongkan dalam PPAP khusus.

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

h. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Dalam menghitung rasio KPMM, BPR Syariah wajib memperhitungkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang dibentuk dan penyisihan penilaian kualitas aset atas aset produktif.
- Dalam hal hasil perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk lebih kecil dan penyisihan penilaian kualitas aset atas aset produktif, BPR Syariah wajib memperhitungkan selisih perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk dengan penyisihan penilaian kualitas aset atas aset produktif menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.
- Dalam hal hasil perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk sama atas lebih besar dan penyisihan penilaian kualitas aset atas aset produktif, BPR Syariah tidak perlu memperhitungkan selisih perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk dengan penyisihan penilaian kualitas aset atas aset produktif menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.

i. Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih yang dicatat dalam neraca hanya yang berasal dari penyelesaian kredit yang diberikan. Pada saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian prmbiayaan yang diberikan dicatat sebesar nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya tetapi tidak melebihi nilai tercatat pembiayaan yang diberikan. Bank tidak mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. Setelah pengakuan awal, agunan yang diambil alih dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. Selisih lebih antara nilai tercatat dengan nilai wajar agunan yang diambil alih setelah dikurangi biaya untuk menjualnya diakui sebagai kerugian penurunan

Agunan yang diambil alih tidak disusutkan dan beban-beban sehubungan dengan perolehan dan pemeliharaan aset tersebut dibebankan pada saat terjadinya transaksi.

Selisih antara nilai tercatat dan hasil penjualan dari agunan yang diambil alih diakui sebagai laba atau rugi pada saat penjualan agunan yang diambil alih dan diakui sebagai pendapatan atau beban non-operasional dalam laporan laba rugi.

Apabila agunan yang diambil alih tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun, nilai agunan yang dicatat pada laporan keuangan wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM.

Adapun agunan yang diambil alih sebagai pengurang modal inti sebagai berikut :

a. Agunan dalam bentuk Tanah dan Bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan, Tanah dan Bangunan yang memiliki sertifikat berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak dibebani dengan hak tanggungan, Tanah dan Bangunan dari NJOP berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terakhir dari instansi berwenang, yang tidak dibebani dengan hak tanggungan dan harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan berupa tempat usaha yang disertai buki pemilikan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat oleh notaris.
   - 15% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun s/d 3 (tiga) tahun
   - 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun s/d 5 (lima) tahun
   - 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun
b. Kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan.
   - 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun s/d 2 (dua) tahun
   - 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun

j. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

Jenis	Masa Manfaat (tahun)
Bangunan	20 - 25
Kendaraan bermotor	4 - 8
Perlengkapan kantor	4 - 8

Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (kapitalisasi).

Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan/kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan.

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

k. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

l. Investasi Tidak Terikat

Investasi tidak terikat merupakan dana yang dipercayakan masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan dana terdiri dari tabungan dan deposito dan dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah.

m. Pendapatan dan Beban Bagi Hasil Pemilik Dana

Pendapatan operasi utama :
❶ Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari transaksi jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan bagi hasil dan pendapatan operasi utama lainnya.
❷ Pendapatan dari jual beli
❸ Pendapatan bersih sewa
❹ Pendapatan non operasi

Beban bagi hasil pemilik dana :
❶ Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan bagian bagi hasil pihak ketiga (tabungan dan deposito).
❷ Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat akan diakui sebesar bagi hasil yang merupakan porsi berdasarkan nisbah yang telah disepakati..

n. Taksiran Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba pajak kena pajak dalam periode berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

Perseroan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan peride sebelumnya yang belum dibayar. Kelebihan pembayaran pada periode berjalan dan periode sebelumnya atas jumlah pajak penghasilan terutang diakui sebagai

o. Imbalan Kerja

Imbalan kerja kepada karyawan terbatas pada imbalan kerja jangka pendek dan kewajiban pesangon pemutusan kerja. Kewajiban pesangon pemutusan kerja dalam bentuk penghargaan pada saat karyawan memasuki masa pensiun, sedang imbalan kerja jangka pendek meliputi :
a. upah, gaji dan iuran pensiun
b. jasa produksi terutang dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa terkait.
Jasa produksi terutang dalam waktu 12 bulan dibayarkan setelah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan diperlakukan sebagai bagian dari pembagian laba.

Lihat catatan 24.

Berikut ini penjelasan atas pos-pos neraca dan laba/rugi tahun 2024 dan 2023 (angka-angka disajikan dalam rupiah).

3 KAS

Akun ini merupakan

	2024	2023
Kas	432.868.343	325.419.720

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

4 PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Klasifikasi penempatan pada Bank lain berdasarkan jenis dan kualitas, sebagai berikut :

Tahun 2024

Jenis	Lancar	Kurang Lancar	Macet
Giro			
Terkait	-	-	-
Tidak Terkait	104.465.878	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	-	-	-
Sub Jumlah	104.465.878	-	-
Tabungan			
Terkait	-	-	-
Tidak Terkait	8.240.764.054	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	(53.837)	-	-
Sub Jumlah	8.240.710.217	-	-
Deposito Berjangka			
Terkait			
Jangka waktu 1 bulan	-	-	-
Jangka waktu 3 bulan	-	-	-
Jangka waktu 6 bulan	-	-	-
Jangka waktu 12 bulan	-	-	-
Jangka waktu > 12 bulan	-	-	-
Tidak terkait			
Jangka waktu 1 bulan	6.750.000.000	-	-
Jangka waktu 3 bulan	10.500.000.000	-	-
Jangka waktu 6 bulan	500.000.000	-	-
Jangka waktu 12 bulan	3.000.000.000	-	-
Jangka waktu > 12 bulan	-	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	-	-	-
Sub Jumlah	20.750.000.000	-	-
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	**29.095.229.932**	-	-
Jumlah Peny. Pengh. Aset	**(53.837)**	-	-
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain Setelah Penyisihan	**29.095.176.095**	-	-

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Tahun 2023

Jenis	Lancar	Kurang Lancar	Macet
Giro			
Terkait	-	-	-
Tidak Terkait	7.695.436	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	-	-	-
Sub Jumlah	7.695.436	-	-
Tabungan			
Terkait	-	-	-
Tidak Terkait	8.614.203.067	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	(5.012.506)	-	-
Sub Jumlah	8.609.190.561	-	-
Deposito Berjangka			
Terkait			
Jangka waktu 1 bulan	-	-	-
Jangka waktu 3 bulan	-	-	-
Jangka waktu 6 bulan	-	-	-
Jangka waktu 12 bulan	-	-	-
Jangka waktu > 12 bulan	-	-	-
Tidak terkait			
Jangka waktu 1 bulan	4.250.000.000	-	-
Jangka waktu 3 bulan	11.000.000.000	-	-
Jangka waktu 6 bulan	2.000.000.000	-	-
Jangka waktu 12 bulan	4.000.000.000	-	-
Jangka waktu > 12 bulan	-	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	-	-	-
Sub Jumlah	21.250.000.000	-	-
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	**29.871.898.503**	**-**	**-**
Jumlah Peny. Pengh. Aset	**(5.012.506)**	**-**	**-**
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain Setelah Penyisihan	**29.866.885.997**	**-**	**-**

Tingkat bagi hasil rata-rata pertahun untuk penempatan dalam rupiah adalah sebesar 5,45% pada tahun 2024 dan 5,80% pada tahun

Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut :

Uraian	2024	2023
Saldo awal tahun	5.012.506	20.646.158
Penyisihan penghapusan aktiva yang dibentuk	-	-
Pembalikan penyisihan	(4.958.669)	(15.633.652)
Penghapusbukuan yang telah dilakukan	-	-
Saldo akhir tahun	**53.837**	**5.012.506**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan aktiva yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan dana pada bank lain serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

5 PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN

Akun ini merupakan pembiayaan yang diberikan :

	2024	2023
Piutang		
Piutang Murabahah	54.275.473.396	48.204.093.791
Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan	(16.359.333.170)	(15.003.610.050)
Piutang Multijasa	75.939.581.645	60.979.012.643
Pendapatan Margin Multijasa yang ditangguhkan	(25.441.091.071)	(19.546.469.359)
Piutang Qardh	190.573.635	200.989.297
Pembiayaan Bagi Hasil		
Mudharabah	1.685.937.491	3.000.000.000
Musyarakah	4.778.742.524	696.500.000
Pembiayaan Sewa		
Aset Ijarah	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-
Jumlah Pembiayaan (bake debet)	95.069.884.450	78.530.516.322
Administrasi pembiayaan	(1.244.701.001)	(1.257.290.399)
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (bake debet - administrasi pembiayaan)	93.825.183.449	77.273.225.923
Penyisihan Penghapusan Aset	(662.478.265)	(484.864.024)
Jumlah Pembiayaan yang diberikan setelah penyisihan	**93.162.705.184**	**76.788.361.899**

Pembiayaan yang diberikan berdasarkan jenis, sektor ekonomi, jangka waktu dan kualitas terdiri dari :

❶ Jenis

Tahun 2024

Jenis	Baki Debet	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Modal Kerja						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	27.980.563.283	26.385.910.100	1.505.700.000	15.806.042	14.450.000	58.697.141
Sub jumlah	27.980.563.283	26.385.910.100	1.505.700.000	15.806.042	14.450.000	58.697.141
Penyisihan Penghapusan Aset	(225.088.365)	(131.498.219)	(26.087.400)	(1.580.605)	(7.225.000)	(58.697.141)
Sub Jumlah	27.755.474.918	26.254.411.881	1.479.612.600	14.225.437	7.225.000	-
Investasi						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	6.360.414.472	6.360.414.472	-	-	-	-
Sub jumlah	6.360.414.472	6.360.414.472	-	-	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	(31.802.072)	(31.802.072)	-	-	-	-
Sub Jumlah	12.689.026.872	12.689.026.872	-	-	-	-
Konsumsi						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	60.728.906.695	60.298.708.305	109.036.660	34.222.861	220.450.939	66.487.930
Sub jumlah	60.728.906.695	60.298.708.305	109.036.660	34.222.861	220.450.939	66.487.930
Penyisihan Penghapusan Aset	(405.587.828)	(301.493.542)	(1.771.100)	(3.422.286)	(32.412.970)	(66.487.930)
Sub Jumlah	121.052.225.562	120.295.923.068	216.302.220	65.023.436	408.488.908	66.487.930
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet)	95.069.884.450	93.045.032.877	1.614.736.660	50.028.903	234.900.939	125.185.071
Administrasi pembiayaan	(1.244.701.001)	-	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet - administrasi pembiayaan)	93.825.183.449	93.045.032.877	1.614.736.660	50.028.903	234.900.939	125.185.071
Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset	(662.478.265)	(464.793.833)	(27.858.500)	(5.002.891)	(39.637.970)	(125.185.071)
Jumlah Pembiayaan setelah Penyisihan	**93.162.705.184**	**92.580.239.044**	**1.586.878.160**	**45.026.012**	**195.262.969**	-

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Tahun 2023

Jenis	Baki Debet	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Modal Kerja						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	17.468.813.978	17.322.262.106	104.483.322	15.426.886	7.925.000	18.716.664
Sub jumlah	17.468.813.978	17.322.262.106	104.483.322	15.426.886	7.925.000	18.716.664
Penyisihan Penghapusan Aset	(112.540.549)	(86.184.196)	(2.134.500)	(1.542.689)	(3.962.500)	(18.716.664)
Sub Jumlah	17.356.273.429	17.236.077.910	102.348.822	13.884.197	3.962.500	-
Investasi						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	7.040.065.153	7.040.065.153	-	-	-	-
Sub jumlah	7.040.065.153	7.040.065.153	-	-	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset	(35.220.747)	(35.220.747)	-	-	-	-
Sub Jumlah	14.044.909.559	14.044.909.559	-	-	-	-
Konsumsi						
Terkait	-	-	-	-	-	-
Tidak Terkait	54.021.637.191	53.861.998.487	12.666.662	76.666.662	11.431.097	58.874.283
Sub jumlah	54.021.637.191	53.861.998.487	12.666.662	76.666.662	11.431.097	58.874.283
Penyisihan Penghapusan Aset	(337.102.728)	(269.466.230)	(380.000)	(2.666.666)	(5.715.549)	(58.874.283)
Sub Jumlah	107.706.171.654	107.454.530.744	24.953.324	150.666.658	17.146.645	58.874.283
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet)	78.530.516.322	78.224.325.746	117.149.984	92.093.548	19.356.097	77.590.947
Administrasi pembiayaan	(1.257.290.399)	-	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet - administrasi pembiayaan)	77.273.225.923	78.224.325.746	117.149.984	92.093.548	19.356.097	77.590.947
Jumlah PPA	(484.864.024)	(390.871.173)	(2.514.500)	(4.209.355)	(9.678.049)	(77.590.947)
Jumlah Pembiayaan setelah Penyisihan	**76.788.361.899**	**77.833.454.573**	**114.635.484**	**87.884.193**	**9.678.048**	-

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

❷ Sektor Usaha

Tahun 2024

Jenis	Baki Debet	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Pertanian, perburuan dan kehutanan	5.416.663	5.416.663	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-	-
Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-	-
Industri pengolahan	702.254.435	702.254.435	-	-	-	-
Listrik, air dan gas	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	4.272.063.203	4.272.063.203	-	-	-	-
Perdagangan besar dan eceran	11.315.540.195	11.221.820.340	8.100.000	15.806.042	14.450.000	55.363.813
Penyediaan akomodasi dan makan minum	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.273.075.557	1.273.075.557	-	-	-	-
Perantara keuangan	1.685.937.491	1.685.937.491	-	-	-	-
Real Estate	11.267.893.277	9.770.293.277	1.497.600.000	-	-	-
Adm. pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosal wajib	-	-	-	-	-	-
Jasa pendidikan	-	-	-	-	-	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-	-
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya hiburan dan perorangan lainnya	3.490.112.750	3.486.779.422	-	-	-	3.333.328
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-	-
Kegiatan usaha yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-
Bukan lapangan usaha rumah tangga	186.833.360	186.833.360	-	-	-	-
Bukan lapangan usaha lainnya	60.870.757.519	60.440.559.129	109.036.660	34.222.861	220.450.939	66.487.930
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet)	95.069.884.450	93.045.032.877	1.614.736.660	50.028.903	234.900.939	125.185.071
Administrasi pembiayaan	(1.244.701.001)	-	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet - administrasi pembiayaan)	93.825.183.449	93.045.032.877	1.614.736.660	50.028.903	234.900.939	125.185.071
Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset	(662.478.265)	(464.793.833)	(27.858.500)	(5.002.891)	(39.637.970)	(125.185.071)
Jumlah Pembiayaan setelah Penyisihan	**93.162.705.184**	**92.580.239.044**	**1.586.878.160**	**45.026.012**	**195.262.969**	**-**

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

	Tahun 2023					
Jenis	**Baki Debet**	**Lancar**	**DPK**	**Kurang Lancar**	**Diragukan**	**Macet**
Pertanian, perburuan dan kehutanan	43.541.663	43.541.663	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-	-
Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-	-
Industri pengolahan	1.177.666.673	1.177.666.673	-	-	-	-
Listrik, air dan gas	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	4.272.416.669	4.272.416.669	-	-	-	-
Perdagangan besar dan eceran	11.612.076.967	11.471.080.647	104.483.322	9.871.334	7.925.000	18.716.664
Penyediaan akomodasi dan makan minum	7.500.009	7.500.009	-	-	-	-
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-	-	-
Perantara keuangan	-	-	-	-	-	-
Real Estate	3.727.011.679	3.727.011.679	-	-	-	-
Adm. pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosal wajib	-	-	-	-	-	-
Jasa pendidikan	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-	-
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya hiburan dan perorangan lainnya	7.403.352.974	7.392.935.756	-	5.555.552	2.161.666	2.700.000
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-	-
Kegiatan usaha yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-
Bukan lapangan usaha rumah tangga	263.855.661	263.855.661	-	-	-	-
Bukan lapangan usaha lainnya	48.023.094.027	47.868.316.989	12.666.662	76.666.662	9.269.431	56.174.283
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet)	78.530.516.322	78.224.325.746	117.149.984	92.093.548	19.356.097	77.590.947
Administrasi pembiayaan	(1.257.290.399)	-	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet - administrasi pembiayaan)	77.273.225.923	78.224.325.746	117.149.984	92.093.548	19.356.097	77.590.947
Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset	(484.864.024)	(390.871.173)	(2.514.500)	(4.209.355)	(9.678.049)	(77.590.947)
Jumlah Pembiayaan setelah Penyisihan	**76.788.361.899**	**77.833.454.573**	**114.635.484**	**87.884.193**	**9.678.048**	**-**

❸ Jangka Waktu

Klasifikasi pembiayaan yang diberikan dilakukan berdasarkan perjanjian pembiayaan dan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya sebagai berikut :

a. Berdasarkan perjanjian pembiayaan yang diberikan :

Jangka Waktu	**2024**	**2023**
<= 1 tahun	11.064.376.268	12.419.763.854
1 < X <= 2 tahun	10.925.233.796	2.218.846.582
2 < X <= 5 tahun	43.598.920.312	40.610.860.837
> 5 tahun	29.481.354.074	23.281.045.049
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet)	95.069.884.450	78.530.516.322
Administrasi pembiayaan	(1.244.701.001)	(1.257.290.399)
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet - administrasi pembiayaan)	93.825.183.449	77.273.225.923
Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset	(662.478.265)	(484.864.024)
Jumlah Pembiayaan setelah penyisihan	93.162.705.184	76.788.361.899

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

Jangka Waktu	2024	2023
<= 1 tahun	25.586.959.907	13.279.708.482
1 < X <= 2 tahun	11.876.910.565	2.955.175.903
2 < X <= 5 tahun	39.637.024.626	39.374.517.140
> 5 tahun	17.968.989.352	22.921.114.797
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet)	95.069.884.450	78.530.516.322
Administrasi pembiayaan	(1.244.701.001)	(1.257.290.399)
Jumlah Pembiayaan yang diberikan (baki debet - administrasi pembiayaan)	93.825.183.449	77.273.225.923
Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset	(662.478.265)	(484.864.024)
Jumlah Pembiayaan setelah penyisihan	93.162.705.184	76.788.361.899

❸ Perubahan penyisihan kerugian sebagai berikut :

Uraian	2024	2023
Saldo awal tahun	484.864.024	410.271.927
Penyisihan penghapusan aktiva yang dibentuk	177.614.241	243.786.329
Pembalikan penyisihan	-	9.144.414
Penghapusbukuan yang telah dilakukan	-	(178.338.646)
Saldo akhir tahun	**662.478.265**	**484.864.024**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan aktiva yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya pembiayaan yang diberikan serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan :
1. Tingkat bagi hasil rata-rata pertahun dalam rupiah sebesar 14,25% tahun 2024 dan 15,18% tahun 2023.
2. Pembiayaan yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh perbankan.
3. Ikhtisar pembiayaan yang dihapus buku adalah sebagai berikut :

Uraian	2024	2023
Saldo awal tahun	704.731.506	526.392.860
Penyisihan penghapusan aktiva yang dibentuk	-	-
Pembalikan penyisihan (koreksi tahun lalu)	-	-
Penghapusbukuan yang telah dilakukan	-	178.338.646
Penerimaan kembali yang telah dihapus buku	(4.298.600)	-
Saldo akhir tahun	**700.432.906**	**704.731.506**

6 ASET TETAP

Aset tetap terdiri dari :

Tahun 2024

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan bermotor & Inventaris	1.372.635.450	168.003.127	14.138.123	1.526.500.454
Jumlah	1.372.635.450	168.003.127	14.138.123	1.526.500.454
Akumulasi Penyusutan	(978.285.553)	(195.400.020)	(13.638.124)	(1.160.047.449)
Nilai Buku	**394.349.897**			**366.453.005**

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Tahun 2023

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan bermotor & Inventaris	1.305.656.450	76.123.414	9.144.414	1.372.635.450
Jumlah	1.305.656.450	76.123.414	9.144.414	1.372.635.450
Akumulasi Penyusutan	(778.317.603)	(209.112.364)	(9.144.414)	(978.285.553)
Nilai Buku	**527.338.847**			**394.349.897**

Jumlah penyusutan aset tetap sebesar Rp 195.400.020 dan Rp 209.112.364 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

7 ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri dari :

	2024	2023
Bagi hasil accrual deposito	8.113.249	8.113.249
Bagi hasil accrual piutang murabahah	328.092.420	253.984.569
Bagi hasil accrual transaksi multijasa	274.654.232	224.328.506
Bagi hasil accrual piutang mudharabah	6.762.097	-
Bagi hasil accrual piutang musyarakah	20.382.491	43.548.398
Bagi hasil accrual piutang qardh	162.000	162.000
Sewa dibayar dimuka	215.227.312	64.603.249
Biaya dibayar dimuka ustman	70.113.074	16.393.927
PPOB Muamalat dan Mobile Banking	22.446.617	35.073.132
Persediaan alat tulis kantor	101.330.078	92.797.491
J u m l a h	**1.047.283.570**	**739.004.521**

8 KEWAJIBAN SEGERA

Kewajiban segera terdiri dari :

	2024	2023
Pajak PPh Pasal 21	39.231.582	18.936.879
Pajak Tabungan dan Deposito	23.451.651	14.067.193
Titipan DPLK	-	225.000
Titipan Jamsostek	19.573.156	9.017
Titipan BPJS	9.685.480	7.988.359
Titipan DPLK	225.000	-
Titipan lainnya	2.158.013	2.042.012
J u m l a h	**94.324.883**	**43.268.461**

9 HUTANG BAGI HASIL

Kewajiban segera terdiri dari :

	2024	2023
Bagi hasil yang belum dibagikan - Deposito	105.698.722	30.314.802
Bagi hasil yang belum dibagikan - Deposito ABP	106.498.617	125.979.554
J u m l a h	**212.197.339**	**156.294.356**

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

10 HUTANG PAJAK

Hutang pajak terdiri dari :

				2024	2023
Hutang Pajak PPh Pasal 29				105.952.437	129.064.536
Pendapatan operasional					
Pendapatan operasional				16.277.184.818	12.264.711.459
Pendapatan non operasional				499.999	-
Pendapatan operasional				16.277.684.817	12.264.711.459
Laba sebelum pajak					
Laba sebelum pajak (Januari - Desember)				2.668.381.455	2.228.156.012
Koreksi fiskal :					
Sumbangan dan hadiah				7.850.002	7.827.000
Laba setelah koreksi fiskal				2.676.231.457	2.235.983.012
Pembulatan				2.676.231.000	2.235.983.000
Perhitungan pajak					
Jumlah penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	11,00%	789.172.966	875.089.352	86.809.026	96.259.829
Jumlah penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	22,00%	1.887.058.034	1.360.893.648	415.152.767	299.396.603
				501.961.793	395.656.432
Kredit Pajak (PPh Pasal 25)				(396.009.356)	(266.591.896)
Pajak kurang (lebih) bayar				**105.952.437**	**129.064.536**

11 TABUNGAN WADIAH

Jenis Tabungan	2024		2023	
	Pihak terkait	Pihak tdk terkait	Pihak terkait	Pihak tdk terkait
Tabungan Wadiah	-	3.555.979	-	2.685.979
Tabungan Puro Nagari	182.508.753	43.486.298.489	394.308.525	41.437.698.780
Tabungan Puro Pelajar	221.282	1.080.482.430	-	1.137.217.782
Tabungan Qurban	-	127.730.733	-	157.435.827
Tabungan Haji	-	25.535.030	-	23.387.020
Tabungan Al Qahswa	584.493	525.164.569	-	473.355.999
Tabungan Utsman	-	1.299.901.569	-	1.391.456.639
J u m l a h	**183.314.528**	**46.548.668.799**	**394.308.525**	**44.623.238.026**

Tingkat bagi hasil per tahun adalah sebesar 0,00% pada tahun 2024 dan 0,00% pada tahun 2023.

12 DEPOSITO

Jenis Deposito	2024		2023	
	Pihak terkait	Pihak tdk terkait	Pihak terkait	Pihak tdk terkait
Jangka waktu 1 bulan	1.225.000.000	7.560.546.639	100.000.000	5.818.537.000
Jangka waktu 3 bulan	-	3.532.700.000	-	1.698.000.000
Jangka waktu 6 bulan	-	2.352.000.000	-	1.153.000.000
Jangka waktu 12 bulan	40.000.000	7.824.000.000	40.000.000	3.671.500.000
Jangka waktu > 12 bulan	-	-	-	-
J u m l a h	**1.265.000.000**	**21.269.246.639**	**140.000.000**	**12.341.037.000**

Tingkat bagi hasil per tahun adalah sebesar 11,69% pada tahun 2024 dan 15,45% pada tahun 2023.

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

13 SIMPANAN DARI BANK LAIN

Keterangan	2024		2023	
	Pihak terkait	Pihak tdk terkait	Pihak terkait	Pihak tdk terkait
Tabungan	-	1.017.016.272	-	-
Deposito Mudharabah				
Jangka waktu 1 bulan	-	4.000.000.000	-	2.000.000.000
Jangka waktu 3 bulan	-	19.400.000.000	-	28.500.000.000
Jangka waktu 6 bulan	-	7.800.000.000	-	6.500.000.000
Jumlah	**-**	**35.217.016.272**	**-**	**37.000.000.000**

Tingkat bagi hasil per tahun adalah sebesar 3,55% pada tahun 2024 dan 2,93% pada tahun 2023.

14 PINJAMAN DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri dari :

Keterangan	2024	2023
Bank Syari'ah Indonesia	4.130.132.318	-

Bank Syari'ah Indonesia

Jenis Pembiayaan	:	Mudharabah
No. PK	:	Akta No.
Plafond	:	Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
Jangka waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan
Jenis kredit	:	Pembiayaan Mudharabah
Nisbah bagi hasil	:	94,92% untuk nasabah 5,08% untuk bank
Jaminan	:	Gadai deposito dengan nilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

15 KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Kewajiban lain-lain terdiri dari :

	2024	2023
Subsidi margin Ustman	1.269.092.055	810.338.252
Titipan margin Ustman	105.222.874	-
Titipan dana CSR	7.175.690	8.879.517
Fee Bima Sakti	627.849	591.641
Cadangan biaya penagihan	100.000	100.000
Titipan asuransi	91	91
Titipan zakat	68.034.862	57.133.423
Titipan zakat karyawan	2.019.974	-
Cadangan penghargaan	323.190.995	70.190.995
Penampungan biaya tenaga kerja	560.367	-
Titipan dana kebajikan	7.355	-
Titipan lainnya	125.500	-
Jumlah	**1.776.157.612**	**947.233.919**

16 SALDO LABA (RUGI)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 18 Januari 2024 laba tahun buku 2024 dibagi dengan rincian sebagai berikut :

Laba (rugi) bersih	1.832.499.580
	1.832.499.580
Pembagian :	
55,00% Deviden	1.007.874.782
20,00% Cadangan Umum	366.499.916
3,00% CSR	54.974.987
8,50% Pengurus	155.762.464
13,50% Karyawan	247.387.443
Jumlah	**1.832.499.592**

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

	2024	2023
Cadangan Umum		
Saldo awal	1.156.651.075	915.708.974
Penambahan - dari pembagian laba	366.499.916	240.942.101
Penyesuaian fiskal positif	(15.021.841)	-
Saldo akhir	**1.508.129.150**	**1.156.651.075**
Cadangan Tujuan		
Saldo awal	184.526.557	184.526.557
Penambahan - dari pembagian laba	-	-
Saldo akhir	**184.526.557**	**184.526.557**
Saldo Laba (Rugi)		
Laba (Rugi) Tahun Lalu	1.832.499.580	1.204.710.506
Pembagian Laba	(1.832.499.580)	(1.204.710.506)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.166.419.662	1.832.499.580
Jumlah Saldo Laba	**2.166.419.662**	**1.832.499.580**

17 PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PENYALURAN DANA

Pendapatan operasional dari penyaluran dana terdiri dari :

	2024	2023
Pendapatan dari penyaluran dana		
Dari penempatan pada bank syariah lain		
Bagi hasil		
Giro	635.768	5.914.463
Tabungan	66.344.232	160.982.018
Deposito	1.506.723.068	1.298.389.222
Jumlah	1.573.703.068	1.465.285.703
Pembiayaan yang diberikan		
Pendapatan piutang		
Murabahah	4.179.482.271	6.260.748.189
Multijasa	8.501.276.207	4.017.141.398
Pendapatan bagi hasil		
Musyarakah	491.376.498	-
Pendapatan sewa		
Pendapatan ijarah	-	46.772.542
Penyusutan aset ijarah	-	(24.864.587)
J u m l a h	**13.267.197.476**	**10.299.797.542**

18 BEBAN BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA

Akun ini merupakan beban bagi hasil kepada pemilik dana terdiri dari :

	2024	2023
Kepada Bank Lain		
Deposito	2.684.490.241	1.780.026.388
Lainnya	-	1.556.000
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
Tabungan	-	175.599.793
Deposito	1.377.603.625	681.689.561
Kepada Pemerintah Daerah		
Pembiayaan Utsman	-	129.286.839
J u m l a h	**4.610.312.046**	**2.768.158.582**

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

19 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan operasional lainnya terdiri dari :

	2024	2023
Pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif	4.958.669	15.625.781
Administrasi	-	357.673.303
Lainnya	105.216.553	126.329.130
Jumlah	**1.436.284.274**	**499.628.214**

20 BEBAN OPERASIONAL

Akun ini merupakan beban operasional terdiri dari :

	2024	2023
Beban Asuransi		
Penjaminan dana pihak ketiga	220.989.720	154.146.249
Premi asuransi kebakaran	651.000	585.900
Premi asuransi kendaraan	7.207.618	8.934.740
Premi cash in safe	2.135.000	-
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
Piutang		
Piutang murabahah	177.614.241	243.786.329
Penyusutan/amortisasi		
Aset tetap dan inventaris	195.400.020	209.112.364
Jumlah	**603.997.599**	**616.565.582**

21 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Akun ini merupakan beban operasional lainnya terdiri dari :

	2024	2023
Beban tenaga kerja	6.069.831.189	4.978.723.996
Beban pendidikan dan pelatihan	1.027.009.112	544.788.295
Beban administrasi & umum	1.230.118.554	1.071.185.569
Jumlah	**8.326.958.855**	**6.594.697.860**

(rincian selengkapnya lihat lampiran)

22 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Rincian akun ini terdiri dari :

	2024	2023
Pendapatan non operasional lainnya		
Keuntungan dari penjualan aset tetap dan inventaris	499.999	-
Lainnya	-	-
	499.999	-
Beban non operasional lainnya		
Zakat	(68.034.862)	(57.133.423)
	(68.034.862)	**(57.133.423)**

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

23 KEWAJIBAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagai berikut :

Keterangan	2024		2023	
	Pihak terkait	Pihak tdk terkait	Pihak terkait	Pihak tdk terkait
Tagihan Komitmen				
Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik				
Bank	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
Kewajiban Komitmen				
Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik				
Bank	-	-	-	-
Lainnya	-	287.924.140	-	-
Lainnya	-	-	-	-
Tagihan Kontinjensi				
Jaminan atau garansi (kafalah) yang diterima	-	-	-	-
Pendapatan dalam penyelesaian				
Murabahah	-	2.665.000	-	-
Istishna	-	-	-	-
Multijasa	-	16.043.919	-	-
Sewa	-	-	-	-
Bagi hasil	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
Lainnya				
Aset produktif yang dihapusbuku				
Aset produktif	-	700.432.906	-	704.731.506
Aset produktif dihapusbuku yang dipulihkan atau berhasil ditagih	-	4.170.933	-	-
Aset produktif yang dihapus tagih	-	-	-	-
Penerusan dana (channeleling)	-	-	-	-

24 PENERAPAN IMBALAN PASCA KERJA

Bank belum membentuk cadangan imbalan kerja sebagaimana dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 23, namun para karyawan telah disertakan dalam program Jamsostek.
Jumlah iuran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan yang dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp 238.307.074 dan tahun 2023 sebesar Rp 163.503.410.

25 TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (PIHAK TERKAIT)

Bank melakukan transaksi usaha dengan pihak yang mempunyai hubugan istimewa (pihak terkait). Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait) terutama berhubungan dengan pemberian pinjaman dalam kegiatan normal perbankan. Tidak terdapat perlakukan yang berbeda atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait).

Keterangan	2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Asset				
Penempatan Pada Bank Lain	-	0,00%	-	0,00%
Pembiayaan yang diberikan	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah	-	0,00%	-	**0,00%**
Jumlah Assets	124.104.486.196		108.114.022.034	
Kewajiban				
Simpanan	1.448.314.528	1,31%	534.308.525	0,56%
Pembiayaan yang diterima	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah	**1.448.314.528**	1,31%	**534.308.525**	**0,56%**
Jumlah Kewajiban	110.802.010.828		95.774.444.822	

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

26 PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

SAK Entitas Privat (SAK EP) bagi BPRS berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2025. Penerapan SAK EP oleh BPRS akan menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang selama ini diterapkan.

Pada saat ini BPRS masih mempelajari dan belum menghitung dampak yang mungkin timbul dari penerapan SAK EP pada laporan keuangan, terutama pada perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhdap Pinjaman Yang Diberikan (Pembiayaan). Selisih lebih atau kurang dibandingkan dengan PPKA Pinjaman Yang Diberikan (Pembiayaan) per 31 Desember 2024 yang telah dihitung atas Nilai Wajar penerapan CKPN per 1 Januari 2025 akan berdampak terhadap penyesuaian Laba Ditahan (Saldo Laba) pada Laporan Keuangan.

27 INFORMASI PENTING LAINNYA

a. Rasio kecukupan modal (CAR) bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 23,75% dan 23,34%
b. Rasio pembiayaan yang diberikan terhadap dana pihak ketiga (FDR) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 137,25% dan 136,58%
c. Rasio pembiayaan yang tergolong Non Performing Financing (NPF) Gross pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 0,43% dan 0,24%
d. Rasio pembiayaan yang tergolong Non Performing Financing (NPF) Netto pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 0,25% dan 0,12%
e. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 83,19% dan
f. Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar (CAR) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 83,19% dan 81,37%
g. Rasio aset produktif bermasalah terhadap jumlah aset produktif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 0,27% dan
h. Rasio PPAP tehadap PPAP yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 1,00% dan 100,00%
i. Rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata aset (ROA) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 2,22% dan 2,36%
j. Rasio laba setelah pajak terhadap ekuitas (ROE) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 22,94% dan 19,99%

LAMPIRAN

PT. BPR SYARIAH JAM GADANG PERSERODA
RINCIAN BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023
Beban tenaga kerja		
Honor Direksi	936.889.260	868.455.000
Gaji pejawai tetap	958.402.464	908.975.978
Honor komisaris	349.799.197	347.382.000
Honor DPS	109.799.927	66.000.000
Uang cuti	128.507.147	97.503.410
Insentif	434.369.654	295.183.235
Tunjangan pajak	233.303.522	181.624.464
Tunjangan BPJS ketenagakerjaan	175.328.117	160.383.223
Tunjangan BPJS kesehatan	72.576.734	61.907.168
Tunjangan sandang	96.100.000	91.800.000
Resiko kasir	5.800.000	6.430.000
Tunjangan transport	154.867.500	142.652.800
Tunjangan pangan	157.555.000	140.769.400
Uang lauk pauk	100.840.196	43.812.230
Gaji pokok kedua	189.132.870	186.505.931
Tunjangan kesejahteraan	118.552.103	117.002.727
Tungangan jabatan	130.100.000	112.275.000
Tunjangan AO	30.933.545	43.385.000
Penghargaan	253.000.000	70.000.000
Gaji pegawai kontrak	47.372.919	34.535.465
Tunjangan Hari Raya	264.390.718	227.911.439
Insidentil	647.800.886	480.420.777
Tunjangan Kinerja	175.891.060	68.633.318
Lembur	102.289.634	91.990.431
Tunjangan bagian pembiayaan	38.898.736	11.200.000
Beban tenaga kerja lainnya	157.330.000	121.985.000
Sub Jumlah	6.069.831.189	4.978.723.996
Beban pendidikan dan pelatihan		
Beban Pendidikan Dewan Komisaris dan DPS	19.000.000	5.450.000
Beban Perjalanan Diklat Dewan Komisaris	55.081.697	34.572.812
Beban Pendidikan Direksi	64.432.201	75.250.000
Beban Perjalanan Diklat Direksi	173.790.182	202.168.658
Beban Pendidikan Karyawan	545.905.387	128.932.500
Beban Perjalanan Diklat Karyawan	168.799.645	98.414.325
Sub Jumlah	1.027.009.112	544.788.295

Uraian	2024	2023
BEBAN ADMINISTRASI & UMUM		
Beban Pemasaran	144.842.575	107.730.401
Beban sewa	194.450.700	188.103.873
Beban pajak (selain PPh)	15.560.344	14.587.060
Beban pemeliharaan	47.230.376	33.836.300
Beban barang dan jasa		
Beban majalah dan harian	4.273.800	4.122.900
Beban air, listrik dan telepon	63.646.527	50.778.837
Beban cetakan dan alat tulis	61.546.750	77.729.210
Beban rumah tangga kantor	19.557.471	10.362.400
Beban BBM kendaraan	51.613.439	49.060.800
Beban perjalanan dinas	173.899.035	78.894.758
Beban perangko dan materai	4.768.000	2.536.552
Beban expedisi dan ongkos administrasi	11.877.010	3.841.400
Beban dapur kantor	31.594.190	36.949.500
Beban keamanan dan kebersihan	3.181.000	4.851.600
Beban tamu kantor	21.639.800	5.534.000
Beban iuran	3.600.000	1.200.000
Beban olahraga dan kesenian	41.100.000	2.000.000
Beban sumbangan	7.050.002	2.250.000
Beban jasa pihak III	44.260.000	22.900.000
Beban RUPS	57.862.034	35.578.000
Beban acara dan pertemuan	21.752.000	4.731.000
Jumlah Beban Barang dan Jasa	623.221.058	393.320.957
Beban lainnya		
Beban rekreasi sosial	106.936.582	262.109.944
Beban resiko lapangan	9.986.000	12.772.500
Iuran OJK	66.490.919	41.091.034
Denda	2.000.000	450.000
Beban iuran	18.600.000	12.906.500
Beban Perkawinan dan perhelatan	800.000	4.277.000
Jumlah Beban Lainnya	204.813.501	333.606.978
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	**8.326.958.855**	**6.594.697.860**

LAMPIRAN VIII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1	Badan Keuangan	Piutang Pajak Daerah	16.057.104.725,00	5.505.326.834,00	1.022.200.865,00	20.540.230.694,00
2	Dinas Kesehatan	Piutang Retribusi Daerah	-	5.310.662.896,00	1.388.648.296,00	3.922.014.600,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Piutang Retribusi Daerah	300.000,00	-	-	300.000,00
4	Dinal Lingkungan Hidup	Piutang Retribusi Daerah	38.560.000,00	-	-	38.560.000,00
5	Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi Daerah	83.758.020,00	-	-	83.758.020,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Piutang Retribusi Daerah	6.760.000,00	-	-	6.760.000,00
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Piutang Retribusi Daerah	11.523.546.842,00	18.048.297.438,00	6.697.647.450,00	22.874.196.830,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Piutang Retribusi Daerah	485.080.600,00	5.202.686,00		490.283.286,00
9	Badan Keuangan	Piutang Retribusi Daerah	268.768.232,00	30.803.565,00	33.276.100,00	266.295.697,00
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Piutang Retribusi Daerah	162.489.372,00	788.503.500,00	16.586.510,00	934.406.362,00
11	Badan Keuangan	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.097.553.826,00	10.017.289.316,00	10.097.553.826,00	10.017.289.316,00
12	Dinas Kesehatan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	16.182.879.784,00	-	16.182.879.784,00	-
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.008.806.748,00	-	-	1.008.806.748,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.846.188,00	-	-	1.846.188,00
15	Dinas Perhubungan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	43.984.350,00		6.000.000,00	37.984.350,00
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.194.749,00	9.020,00	32.470,00	8.171.299,00
17	Dinas Pariwisata		659.389.600,00		659.389.600,00	-
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
19	Badan Keuangan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.900.505.564,00	18.406.121,00	1.943.483,00	1.916.968.202,00
20	Badan Keuangan	Piutang Transfer Antar Daerah	8.824.214.888,00	10.478.026.512,00	8.824.214.888,00	10.478.026.512,00
21	Badan Keuangan	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	509.958.268,00	119.788.268,00	390.170.000,00
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Piutang Lainnya	113.622.000,00	-	-	113.622.000,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Piutang Lainnya	132.694.601,00	-	-	132.694.601,00
	Jumlah		**67.604.560.089,00**	**50.712.486.156,00**	**45.050.161.540,00**	**73.266.884.705,00**

Bukittinggi, Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN IX
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Piutang Pajak Daerah	20.540.230.694,00	10.152.959.524,18	10.387.271.169,82
2	Piutang Retribusi Daerah	28.616.574.795,00	20.300.247.900,15	8.316.326.894,85
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.017.289.316,00	-	10.017.289.316,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.978.276.787,00	2.962.984.782,44	15.292.004,56
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	390.170.000,00	-	390.170.000,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	10.478.026.512,00	-	10.478.026.512,00
7	Piutang Lainnya	246.316.601,00	246.316.601,00	-
	Jumlah	**73.266.884.705,00**	**33.662.508.807,77**	**39.604.375.897,23**

Bukittinggi, Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN X
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TA 2024

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.632.401.623,20	1.085.851.938,80	546.549.684,40

Bukittinggi, Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KOTA BUKITTINGGI
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal Daerah	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah (target di Perda)	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Penyertaan Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-8	11	12	13=9-12
A	BANK NAGARI											
1	2008	Bank Nagari				-		5.943.118.102,83				
2	2011	Bank Nagari	Perda No 8 Tahun 2010	Saham	2.113.881.897,17	5.943.118.102,83	2.112.881.898,00	8.056.000.000,83				
3	2012	Bank Nagari	Perda No.12 Tahun 2012	Saham	2.370.000.000,00	8.056.000.000,83	2.370.000.000,00	10.426.000.000,83				
4	2013	Bank Nagari	Perda No.17 Tahun 2013	Saham	3.932.000.000,00	10.426.000.000,83	3.932.000.000,00	14.358.000.000,83				
5	2014	Bank Nagari	Perda No.20 Tahun 2013	Saham	4.000.000.000,00	14.358.000.000,83	4.000.000.000,00	18.358.000.000,83				
6	2014	Bank Nagari	Perda No.14 Tahun 2014	Saham	583.000.000,00	18.358.000.000,83	583.000.000,00	18.941.000.000,83				
7	2015	Bank Nagari	Perda No.17 Tahun 2014	Saham	6.383.000.000,00	18.941.000.000,83	6.383.000.000,00	25.324.000.000,83				
8	2016	Bank Nagari	Perda No.5 Tahun 2016	Saham	8.200.000.000,00	25.324.000.000,83	8.200.000.000,00	33.524.000.000,83				
9	2017	Bank Nagari	Perda No.12 Tahun 2016	Saham	4.000.000.000,00	33.524.000.000,83	4.000.000.000,00	37.524.000.000,83				
10	2018	Bank Nagari	-	Saham		37.524.000.000,83	0,00	37.524.000.000,83				
11	2019	Bank Nagari	-	Saham		37.524.000.000,83	0,00	37.524.000.000,83				
12	2020	Bank Nagari	-	Saham		37.524.000.000,83	0,00	37.524.000.000,83				
13	2021	Bank Nagari	-	Saham		37.524.000.000,83	0,00	37.524.000.000,83				
15	2022	Bank Nagari	Perda No.7 Tahun 2021	Saham	28.860.000.000,00	37.524.000.000,83	7.000.000.000,00	44.524.000.000,83	21.860.000.000,00	6.252.795.492,00		
16	2023	Bank Nagari	-	Saham		44.524.000.000,83	0,00	44.524.000.000,83	21.860.000.000,00	7.771.282.394,00		
17	2024	Bank Nagari	-	Saham		44.524.000.000,83	0,00	44.524.000.000,83	21.860.000.000,00	8.976.336.988,00		
B	BPRS JAM GADANG											
1	2005	BPR Jam Gadang	-	Saham		-	250.000.000,00	250.000.000,00				
2	2015	BPR Jam Gadang	-	Saham		250.000.000,00	0,00	250.000.000,00				
3	2016	BPR Jam Gadang	-	Saham		250.000.000,00	0,00	250.000.000,00				
4	2017	BPR Jam Gadang	-	Saham		250.000.000,00	0,00	250.000.000,00				
5	2018	BPR Jam Gadang	Perda No 7 Tahun 2017	Saham		250.000.000,00	2.000.000.000,00	2.250.000.000,00				
6	2018	BPR Jam Gadang	Perda No 7 Tahun 2017	Saham		2.250.000.000,00	3.000.000.000,00	5.250.000.000,00				
6	2019	BPR Jam Gadang	-	Saham		5.250.000.000,00	0,00	5.250.000.000,00				
7	2020	BPR Jam Gadang	-	Saham		5.250.000.000,00	0,00	5.250.000.000,00				
8	2021	BPR Jam Gadang	-	Saham		5.250.000.000,00	0,00	5.250.000.000,00				

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal Daerah	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah (target di Perda)	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Penyertaan Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-8	11	12	13=9-12
9	2022	BPRS Jam Gadang	Perda No 8 Tahun 2021	Saham	9.750.000.000,00	5.250.000.000,00	3.000.000.000,00	8.250.000.000,00	6.750.000.000,00	388.496.433,00		
10	2023	BPRS Jam Gadang	-	Saham		8.250.000.000,00	0,00	8.250.000.000,00	6.750.000.000,00	592.561.480,00		
11	2024	BPRS Jam Gadang	-	Saham		8.250.000.000,00	0,00	8.250.000.000,00	6.750.000.000,00	8.976.336.988,00		
	PERUMDA AIR MINUM TIRTA JAM GADANG											
1	2012	PDAM	-			6.432.975.291,48	0,00	6.432.975.291,48				
2	2015	PDAM	Perda No 4 Tahun 2014		32.500.000.000,00	6.432.975.291,48	0,00	6.432.975.291,48				
3	2016	PDAM	Perda No 15 Tahun 2014			6.432.975.291,48	2.500.000.000,00	8.932.975.291,48				
4	2017	PDAM	Perda No 4 Tahun 2017			8.932.975.291,48	10.000.000.000,00	18.932.975.291,48				
5	2018	PDAM	-			27.023.516.586,38	-14.995.799.246,00	12.027.717.340,38				
6	2019	PDAM	-			12.027.717.340,38	-1.329.780.587,09	10.697.936.753,29				
7	2020	PDAM	-			10.697.936.753,29	-1.471.710.444,81	9.226.226.308,48				
8	2021	PDAM	perda No 1 Tahun 2021			9.226.226.308,48	-828.619.427,00	8.397.606.881,48				
9	2022	Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang	-			8.397.606.881,86	388.878.959,83	8.786.485.841,69				
10	2023	Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang	-			8.786.485.841,69	1.092.973.462,16	9.879.459.303,85				
11	2024	Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang	-			9.879.459.303,85	-112.116.991,00	9.767.342.312,85				

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI

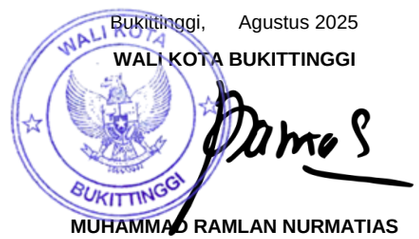

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DAFTAR REKAPITULASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan	264.713.568.163,37	(13.697.124.874,46)	956.946.997,46	250.059.496.291,45
2	Dinas Kesehatan	199.687.611.844,94	4.212.944.500,31	1.193.656.882,40	202.706.899.462,85
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	326.045.931.642,48	82.317.273.021,89	112.692.948,25	408.250.511.716,12
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	77.500.397.978,93	(3.684.496.450,56)	(57.585.895,43)	73.873.487.423,80
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.599.339.787,00	(194.508.523,32)	(14,90)	2.404.831.278,58
6	Satuan Polisi Pamong Praja	11.232.364.880,00	(531.412.873,00)	-	10.700.952.007,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	989.509.619,00	(309.027.072,36)	(30.822,49)	680.513.369,13
8	Dinas Sosial	2.205.067.752,00	(45.518.542,97)	-	2.159.549.209,03
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.966.039.756,89	(546.655.861,30)	(4,40)	3.419.383.899,99
10	Dinas Lingkungan Hidup	39.919.369.346,91	16.070.914.943,17	(108.348.587,80)	56.098.632.877,88
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.956.727.336,79	(233.151.464,66)	(8.555.538,81)	1.732.131.410,94
12	Dinas Perhubungan	43.592.727.116,00	(4.877.398.325,78)	(11,00)	38.715.328.801,22
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.331.164.892,00	(849.845.740,84)	(32,66)	1.481.319.183,82
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	375.742.244,00	(61.610.289,54)	(2.557.820,67)	316.689.775,13
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	411.710.357.408,22	(7.742.357.695,60)	3.087.848.972,55	400.880.150.740,07
16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	30.213.464.513,75	(1.734.748.638,46)	(9.966.742,29)	28.488.682.617,58
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.534.324.699,00	(162.800.696,99)	6.589.438,16	4.364.934.563,85
18	Dinas Pariwisata	196.089.230.588,07	(1.545.567.608,06)	19.759.869.927,42	174.783.793.052,59
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	16.111.294.174,70	(15.826.634,91)	44.879,57	16.095.422.660,22
20	Dinas Pertanian dan Pangan	32.275.620.834,43	(699.721.580,60)	(27.747.503,67)	31.603.646.757,50
21	Sekretariat Daerah	64.563.083.957,22	(4.106.168.034,31)	(756.498.672,97)	61.213.414.595,88
22	Sekretariat DPRD	15.132.645.507,26	(826.324.903,29)	(6.477.373,91)	14.312.797.977,88
23	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1.308.271.360,50	(128.731.378,17)	-	1.179.539.982,33
24	Badan Keuangan	43.333.227.701,22	1.405.499.438,15	1.900.529.090,01	42.838.198.049,36
25	Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia	261.327.067,00	(87.529.973,17)	-	173.797.093,83

NO.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
26	Inspektorat	2.035.402.737,67	(184.938.026,37)	(2.584.168,07)	1.853.048.879,37
27	Kecamatan Mandiangin Koto Salayan	18.464.063.033,56	(615.875.190,49)	14.292.265,19	17.833.895.577,88
28	Kecamatan Guguak Panjang	27.912.502.507,18	(429.653.240,49)	394.454.095,98	27.088.395.170,71
29	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	19.711.682.516,94	(479.100.934,83)	2.906.752,00	19.229.674.830,11
30	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	337.916.361,00	(69.238.909,57)	(28,33)	268.677.479,76
	Jumlah	**1.861.109.977.328,03**	**60.147.298.439,42**	**26.449.479.031,59**	**1.894.807.796.735,86**

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XIII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022	Mutasi		Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tanah	565.667.194.505,20	83.608.500.000,00	-	649.275.694.505,20
2	Peralatan dan Mesin	434.804.893.735,80	14.413.905.160,99	9.086.202.484,60	440.132.596.412,19
3	Gedung dan Bangunan	1.050.671.756.080,44	53.322.982.701,85	28.200.160.059,86	1.075.794.578.722,43
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	693.238.082.359,11	34.361.871.624,85	771.255.117,28	726.828.698.866,68
5	Aset Tetap Lainnya	31.350.981.575,80	1.518.035.027,00	2.504.332.098,00	30.364.684.504,80
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.991.683.715,68	312.523.075,40	113.277.992,00	34.190.928.799,08
7	Akumulasi Penyusutan	(948.614.614.644,00)	(127.390.519.150,67)	(14.225.748.720,15)	(1.061.779.385.074,52)
		1.861.109.977.328,03	**60.147.298.439,42**	**26.449.479.031,59**	**1.894.807.796.735,86**

Bukittinggi, Agustus 2025
WALIKOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XIV
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KOTA BUKITTINGGI
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI									REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			BERTAMBAH				BERKURANG						
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	PERALATAN DAN MESIN	ASET NON KAPITALISASI		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.220.618.949,71	-	100.139.582,40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.320.758.532,11
2	Dinas Kesehatan	310.829.392,00	-	-	-	-	-	113.277.992,00	-	-	-	-	197.551.400,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.803.456.574,52	-	-	208.934.856,00	-	-	-	-	-	-	-	5.012.391.430,52
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	272.151.529,00	-	-	3.448.637,00	-	-	-	-	-	-	-	275.600.166,00
5	Dinas Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah	94.995.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.995.200,00
8	Dinas Sosial	79.620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.620.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Lingkungan Hidup	179.416.996,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.416.996,25
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	176.642.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.642.200,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	77.704.000,00											77.704.000,00
16	Dinas Pelayanan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.400.000,00
18	Dinas Pariwisata	15.778.933.988,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.778.933.988,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	165.669.856,02											165.669.856,02
20	Dinas Pertanian dan Pangan	2.955.957.639,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.955.957.639,03
21	Sekretariat Daerah	47.684.943,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.684.943,15
22	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Badan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	111.576.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.576.960,00
28	Kecamatan guguk Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	638.025.488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638.025.488,00
30	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**33.991.683.715,68**	**-**	**100.139.582,40**	**212.383.493,00**	**-**	**-**	**113.277.992,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.190.928.799,08**

Bukittinggi, Agustus 2025
WALIKOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XV
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	832.741.965,00	354.195.160,00	512.634.142,00	674.302.983,00
2	Dinas Kesehatan	119.513.565,87	4.825.542.193,50	4.572.873.048,00	372.182.711,37
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	885.514.597,80	40.471.875,00	81.395.770,00	844.590.702,80
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	153.478.883,00	115.928.370,00	174.873.453,00	94.533.800,00
5	Dinas Kebakaran	2.431.169,00	-	-	2.431.169,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah	-	-	-	-
8	Dinas Sosial	-	-	-	-
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	18.395.590,00	404.695.848,00	423.091.438,00	-
10	Dinas Lingkungan Hidup	473.034.028,66	539.094.700,01	575.951.418,00	436.177.310,67
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	114.951.250,00	511.374.398,00	559.681.398,00	66.644.250,00
12	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.437.168,00	-	3.036.232,00	2.400.936,00
14	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	177.373.148,43	12.446.434.000,00	309.186.020,00	12.314.621.128,43
16	Dinas Pelayanan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTK	149.279.581,00	-	98.074.580,00	51.205.001,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	524.810,00	0,33	524.810,00	0,33
18	Dinas Pariwisata	539.332.496,80	114.036.000,00	131.922.402,00	521.446.094,80

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-
20	Dinas Pertanian dan Pangan	29.526.700,00	-	29.526.700,00	-
21	Sekretariat Daerah	10.633.333,00	789.740.100,00	800.373.433,00	-
22	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
23	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	200.908.668,00		56.800.012,00	144.108.656,00
24	Badan Keuangan	18.973.364.232,00	28.536.000,00	14.776.711.232,00	4.225.189.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	-			-
26	Inspektorat	5.313.000,00	143.782.037,00	149.095.037,00	-
27	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	-	26.302.726,00	26.302.726,00	-
28	Kecamatan guguk Panjang	-			-
29	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	-	23.589.254,00	20.682.490,00	2.906.764,00
30	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-			-
	JUMLAH	**22.691.754.186,56**	**20.363.722.661,84**	**23.302.736.341,00**	**19.752.740.507,40**

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XVI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KOTA BUKITTINGGI
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								

Bukittinggi, Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XVII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	Kewajiban Jangka Pendek	6.608.584.717,39	7.264.439.373,10	6.334.349.962,92	7.538.674.127,57
	TOTAL	**6.608.584.717,39**	**7.264.439.373,10**	**6.334.349.962,92**	**7.538.674.127,57**

Bukittinggi, Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XVII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KOTA BUKITTINGGI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	48.243.838,00	-	48.243.838,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	384.879.789,67	813.612.278,33	600.955.603,00	597.536.465,00
3.	Utang Belanja	5.952.258.773,72	4.658.757.256,77	5.643.544.429,92	4.967.471.600,57
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	271.446.154,00	1.743.826.000,00	89.849.930,00	1.925.422.224,00
	TOTAL	**6.608.584.717,39**	**7.264.439.373,10**	**6.334.349.962,92**	**7.538.674.127,57**

Bukittinggi, Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XVIII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KOTA BUKITTINGGI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
N I H I L					

Bukittinggi, Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XIX
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KOTA BUKITTINGGI

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2024 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DINAGGARAKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XX.1
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	BUMD/Perusahaan DAerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan Diluar Usaha	Beban Diluar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Bidang Perbankan								
	PT BPRS Jam Gadang Perseroda	Laporan Audited	Sehat	16.277.184.818,00	13.541.268.500,00	2.735.916.318,00	499.999,00	68.034.862,00	2.668.381.455,00
2	Bidang Air Minum								
	Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang	Laporan Audited	Sehat	12.874.531.500,00	11.715.602.514,00	1.158.928.986,00	194.059.619,00	40.662.730,00	1.312.325.875,00

Bukittinggi, Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XX.2
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	BUMD/Perusahaan DAerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan Diluar Usaha	Beban Diluar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Bidang Perbankan								
	PT BPRS Jam Gadang Perseroda	Laporan Audited	Sehat	16.277.184.818,00	13.541.268.500,00	2.735.916.318,00	499.999,00	68.034.862,00	2.668.381.455,00
2	Bidang Air Minum								
	Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang	Laporan Audited	Sehat	12.874.531.500,00	11.715.602.514,00	1.158.928.986,00	194.059.619,00	40.662.730,00	1.312.325.875,00

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				**Pelayanan Umum**	**211.360.805.337,00**	**187.389.143.279,00**	**2.007.513.553,00**	**1.788.525.300,00**	**1.000.000.000,00**	**380.911,00**	**9.600.620.000,00**	**9.597.200.000,00**
1	01	2	20	Statistik	46.994.700,00	37.109.900,00			-	-	-	-
1	02	2	24	Kearsipan	45.191.900,00	34.173.300,00			-	-	-	-
1	03	2	26	Komunikasi & Informatika	8.474.099.524,00	7.769.082.244,00	55.936.800,00	30.835.000,00	-	-	-	-
1	04	2	21	Persandian	48.130.700,00	38.525.548,00			-	-	-	-
1	05	5	01	Perencanaan Pembangunan	6.134.307.904,00	5.862.413.347,00	60.600.000,00	57.020.300,00	-	-	-	-
1	06	5	05	Penelitian dan Pengembangan	33.966.000,00	16.729.400,00			-	-	-	-
1	07	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	215.816.100,00	187.946.353,00			-	-	-	-
1	08	5	02	Keuangan	20.899.139.995,00	14.717.403.503,00	64.238.800,00	22.705.050,00	1.000.000.000,00	380.911,00	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00
1	09	5	03	Kepegawaian	6.452.031.050,00	6.092.185.151,00	48.869.000,00	46.519.000,00	-	-	-	-
1	10	4	01	Sekretariat Daerah	68.925.730.946,00	65.211.210.776,00	628.399.930,00	608.058.000,00	-	-	-	-
1	11	4	02	Sekretariat DPRD	41.302.953.314,00	36.032.125.983,00	733.591.000,00	720.780.000,00	-	-	-	-
1	12	6	01	Inspektorat	8.693.250.490,00	8.469.363.348,00			-	-	-	-
1	13	7	01	Kecamatan	50.089.192.714,00	42.920.874.426,00	415.878.023,00	302.607.950,00	-	-	-	-
2				**Ketertiban Umum**	**62.372.337.438,00**	**57.685.501.172,03**	**135.122.100,00**	**108.002.554,58**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	01	8	01	Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.145.842.760,00	19.733.992.011,00	36.081.200,00	15.762.000,00	-	-	-	-
2	02	1	05	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	41.226.494.678,00	37.951.509.161,03	99.040.900,00	92.240.554,58	-	-	-	-
3				**Ekonomi**	**55.893.574.120,00**	**49.940.123.799,56**	**1.857.782.052,00**	**1.226.529.680,83**	**-**	**-**	**-**	**-**
3	01	2	15	Perhubungan	19.134.811.711,00	17.424.712.249,00	759.581.152,00	450.824.037,00	-	-	-	-
3	02	2	07	Tenaga Kerja	862.191.200,00	756.820.896,00			-	-	-	-
3	03	2	17	Menengah	7.078.731.058,00	6.744.262.237,00	181.140.700,00	69.171.950,00	-	-	-	-
3	04	2	18	Penanaman Modal	6.339.435.366,00	6.092.616.788,00			-	-	-	-
3	06	3	27	Pertanian	1.809.582.625,00	1.157.109.599,84	14.406.100,00	9.627.600,00	-	-	-	-
3	09	3	25	Kelautan dan Perikanan	760.883.500,00	490.155.420,00	14.222.000,00	13.034.000,00	-	-	-	-
3	10	3	30	Perdagangan	19.135.913.710,00	16.680.834.963,72	888.432.100,00	683.872.093,83	-	-	-	-
3	11	3	31	Perindustrian	772.024.950,00	593.611.646,00						
4				**Perlindungan Lingkungan Hidup**	**41.986.492.710,00**	**37.307.219.551,00**	**331.873.192,00**	**272.542.160,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	02	2	11	Lingkungan Hidup	41.519.175.510,00	36.977.640.337,00	331.873.192,00	272.542.160,00	-	-	-	-

KODE				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	2	10	Pertanahan	467.317.200,00	329.579.214,00			-	-	-	-
5				**Perumahan dan Fasilitasi Umum**	**25.995.313.208,00**	**22.607.446.690,79**	**19.030.912.412,00**	**17.554.745.909,93**	**-**	**-**	**-**	**-**
5	01	1	03	Pekerjaan Umum	16.285.216.264,00	13.730.715.445,79	16.212.403.900,00	15.225.240.158,57	-	-	-	-
5	02	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.710.096.944,00	8.876.731.245,00	2.818.508.512,00	2.329.505.751,36	-	-	-	-
6				**Kesehatan**	**106.521.985.859,00**	**98.984.007.547,00**	**29.246.663.646,00**	**27.123.033.174,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	01	1	03	Kesehatan	102.943.499.889,00	95.855.587.800,00	29.240.863.846,00	27.117.233.374,00	-	-	-	-
6	02	1	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.578.485.970,00	3.128.419.747,00	5.799.800,00	5.799.800,00	-	-	-	-
7				**Pariwisata**	**26.302.909.862,00**	**22.015.787.301,13**	**986.227.665,00**	**744.816.377,12**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	01	2	22	Kebudayaan	3.042.819.384,00	2.692.402.133,12	63.004.046,00	62.461.950,00	-	-	-	-
7	02	3	26	Pariwisata	23.260.090.478,00	19.323.385.168,01	923.223.619,00	682.354.427,12	-	-	-	-
8				**Pendidikan**	**173.519.821.001,00**	**167.602.308.222,03**	**16.176.093.007,00**	**14.628.688.563,31**	**-**	**-**	**-**	**-**
8	01	1	01	Pendidikan	160.381.539.733,00	156.535.392.574,03	15.695.919.407,00	14.293.333.388,31	-	-	-	-
8	02	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	8.129.397.682,00	6.457.376.771,00	472.701.600,00	335.355.175,00	-	-	-	-
8	03	2	23	Perpustakaan	5.008.883.586,00	4.609.538.877,00	7.472.000,00		-	-	-	-
9				**Perlindungan Sosial**	23.933.603.871,00	22.414.158.410,00	171.499.150,00	86.318.500,00	**-**	**-**	**-**	**-**
9	01	1	01	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.190.156.060,00	4.758.003.148,00	65.794.000,00	-	-	-	-	-
9	02	2	28	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.921.783.200,00	7.413.193.545,00	95.705.150,00	76.328.500,00	-	-	-	-
9	04	1	06	Sosial	10.038.344.619	7.675.256.118,00	58.032.400	57.942.000,00	-	-	-	-
9	05	2	09	Pangan	8.887.512.111,00	8.322.306.245,00			-	-	-	-
9	06			Penanggulangan Bencana	1.934.152.500,00	1.920.655.472,00	10.000.000,00	9.990.000,00				
				Jumlah	**727.886.843.406,00**	**665.945.695.972,54**	**69.943.686.777,00**	**63.533.202.219,77**	**1.000.000.000,00**	**380.911,00**	**9.600.620.000,00**	**9.597.200.000,00**

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING* BIDANG PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT PERHITUNGAN ALOKASI FUNGSI PENDIDIKAN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	**a. Urusan Bidang Pendidikan**	**176.077.459.140,00**	**170.828.725.962,34**
	1) Belanja Operasi:	160.381.539.733,00	156.535.392.574,03
	a. Belanja Pegawai;	113.242.907.144,00	112.608.530.434,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	34.420.292.589,00	33.112.532.899,03
	c. Belanja Hibah;	12.327.340.000,00	10.724.829.241,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.	391.000.000,00	89.500.000,00
	2 Belanja Modal:	15.695.919.407,00	14.293.333.388,31
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	**3.105.823.430,00**	**2.754.864.083,12**
	1) Belanja Operasi	3.042.819.384,00	2.692.402.133,12
	a. Belanja Pegawai;	0,00	0,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	2.662.819.384,00	2.463.497.033,12
	c. Belanja Hibah;	380.000.000,00	228.905.100,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.	0,00	0,00
	2 Belanja Modal	63.004.046,00	62.461.950,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	**5.016.355.586,00**	**4.609.538.877,00**
	1) Belanja Operasi	5.008.883.586,00	4.609.538.877,00
	a. Belanja Pegawai;	3.828.342.786,00	3.746.273.470,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	1.180.540.800,00	863.265.407,00
	c. Belanja Hibah;	0,00	0,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.	0,00	0,00
	2 Belanja Modal	7.472.000,00	0,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	**8.602.099.282,00**	**6.792.731.946,13**
	1) Belanja Operasi	8.129.397.682,00	6.457.376.771,13
	a. Belanja Pegawai;	2.199.252.926	2.156.110.473,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	3.430.144.756	1.886.483.861,13
	c. Belanja Hibah;	2.500.000.000	2.414.782.437,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.	0,00	0,00
	2 Belanja Modal	472.701.600	335.355.175,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	**13.766.620.000,00**	**13.742.200.000,00**
	1) Belanja Operasi	4.166.000.000,00	4.145.000.000,00
	a. Belanja Pegawai;	0,00	0,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	0,00	0,00
	c. Belanja Hibah;	4.166.000.000,00	4.145.000.000,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.	0,00	0,00
	2 Belanja Modal	0,00	0,00
	3 Belanja Transfer	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00
2.	**Jumlah Fungsi pendidikan (a+b+c+d+e)**	**206.568.357.438,00**	**198.728.060.868,59**
3.	**Total Belanja Daerah**	**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**
4.	**Porsi Fungsi Pendidikan (2/3 x 100%)**	**25,55**	**26,89**

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING* BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	**a. Urusan bidang Kesehatan:**	**132.184.363.734,00**	**122.972.821.175,48**	**93,03**
	1) Belanja Operasi:	102.943.499.888,00	95.855.587.800,90	93,11
	a. belanja pegawai;	59.617.465.210,00	58.210.215.319,00	97,64
	b. belanja barang dan jasa;	42.786.034.678,00	37.106.722.481,90	86,73
	c. belanja hibah;	540.000.000,00	538.650.000,00	99,75
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	
	2) Belanja Modal;	29.240.863.846,00	27.117.233.374,58	92,74
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	**1.213.395.300,00**	**1.147.752.234,00**	**94,59**
	1) Belanja Transfer:	0,00	0,00	
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	
	2) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	
	3) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.173.701.700,00	1.120.600.534,00	95,48
	4) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	
	5) Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.693.600,00	27.151.700,00	68,40
	6) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	
	7) Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	
2	**Anggaran Kesehatan (a+b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Total Belanja Daerah**	**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**91,42**
4	**Gaji ASN**	**196.571.498.410,00**	**191.534.898.876,00**	**97,44**
5	**Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)**	**611.859.651.773,00**	**547.541.580.227,31**	**89,49**
6	**Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%**	**0,00**	**0,00**	

Bukittinggi, Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING* BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2024

A. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.	Persentase (%)
1.	**Total Belanja Daerah**	**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	91,42
	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa:			
	a. Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	
	b. Belanja Bantuan Keuangan	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	99,96
2.	**Jumlah (a+b)**	**9.600.620.000,00**	**9.597.200.000,00**	99,96
3.	**Selisih (1-2)**	**798.830.530.183,00**	**729.479.279.103,31**	91,32
4.	**Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)**	**319.532.212.073,20**	**291.791.711.641,32**	

B. RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.	Persentase (%)
1.	a) Belanja Modal			
	1) Tanah;	0,00	0,00	
	2) Peralatan dan Mesin;	14.576.288.033,00	12.261.224.480,70	84,12
	3) Bagunan dan Gedung;	33.771.313.480,00	31.435.241.904,22	93,08
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi;	19.966.602.364,00	18.357.697.907,85	91,94
	5) Aset Tetap Lainnya;	1.429.482.900,00	1.278.037.927,00	89,41
	6) Aset Lainnya.	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availabel Payment).	-	-	
2.	a) Belanja Hibah;	16.468.300.000,00	15.768.679.903,12	95,75
	b) Belanja Bantuan Sosial.	2.808.100.000,00	2.808.100.000,00	100,00
3.	**Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)**	**89.220.086.777,00**	**82.108.782.122,89**	
4.	**Porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (B3/A3 x 100%)**	**11,17**	**11,26**	

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

KOTA BUKITTINGGI

REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TA 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A	SPM Bidang Pendidikan			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1 12.683.720.800,00	1 11.635.833.126,97
		2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 6.836.028.500,00	2 5.809.016.017,51
		3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3 6.528.230.000,00	3 5.382.694.115,00
		4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 720.268.000,00	4 656.395.150,00
		Total	26.768.247.300,00	23.483.938.409,48
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan		
B	SPM Bidang Kesehatan	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 1.881.143.307,00	1 1.546.114.106,00
		Total	1.881.143.307,00	1.546.114.106,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan		
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1 49.845.900,00	1 35.861.106,00
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 396.439.400,00	2 228.623.039,00
		Total	446.285.300,00	264.484.145,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pengembangan Perumahan	1 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 146.556.500,00	1 29.839.800,00
		Total	146.556.500,00	29.839.800,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
E	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1		1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 970.921.100,00	1 949.274.000,00
		2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3 850.953.400,00	3 844.656.800,00
		3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	4 57.377.600,00	4 27.544.000,00
		4 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 1.619.522.830,00	5 1.568.769.151,00
		Total	3.498.774.930,00	3.390.243.951,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		
F	SPM Bidang Sosial	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1		1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1 582.235.400,00	1 384.337.600,00
		2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2 154.375.400,00	2 88.840.500,00
		Total	736.610.800,00	473.178.100,00
		Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Sosial		

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	TAMBAH KURANG	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/5
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**775.373.477.018,00**	**741.382.079.328,40**	**33.991.397.689,60**	**95,62**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**153.460.514.484,00**	**130.112.097.312,94**	**23.348.417.171,06**	**84,79**
4.1.01	Pajak Daerah	54.110.644.633,00	50.098.130.579,00	4.012.514.054,00	92,58
4.1.01.09	Pajak Reklame	750.000.000,00	846.030.170,00	-96.030.170,00	112,80
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	687.097.479,00	792.523.170,00	-105.425.691,00	115,34
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	687.097.479,00	792.523.170,00	-105.425.691,00	115,34
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	31.375.311,00	49.307.000,00	-17.931.689,00	157,15
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	31.375.311,00	49.307.000,00	-17.931.689,00	157,15
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	31.527.210,00	4.200.000,00	27.327.210,00	13,32
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	31.527.210,00	4.200.000,00	27.327.210,00	13,32
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	56.763.932,00	293.236.068,00	16,22
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	56.763.932,00	293.236.068,00	16,22
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	56.763.932,00	293.236.068,00	16,22
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.124.355.367,00	3.326.935.079,00	1.797.420.288,00	64,92
4.1.01.15.01	PBBP2	5.124.355.367,00	3.326.935.079,00	1.797.420.288,00	64,92
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.124.355.367,00	3.326.935.079,00	1.797.420.288,00	64,92
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.551.289.266,00	14.651.555.005,00	899.734.261,00	94,21
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	15.551.289.266,00	13.683.928.405,00	1.867.360.861,00	87,99
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15.551.289.266,00	13.683.928.405,00	1.867.360.861,00	87,99
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	967.626.600,00	-967.626.600,00	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	967.626.600,00	-967.626.600,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	32.335.000.000,00	31.216.846.393,00	1.118.153.607,00	96,54
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	9.249.300.000,00	6.598.150.740,00	2.651.149.260,00	71,34
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	8.740.200.000,00	6.173.940.555,00	2.566.259.445,00	70,64
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	509.100.000,00	424.210.185,00	84.889.815,00	83,33
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	5.905.000.000,00	10.125.850.073,00	-4.220.850.073,00	171,48
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	5.905.000.000,00	10.125.850.073,00	-4.220.850.073,00	171,48
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	16.480.700.000,00	14.014.244.804,00	2.466.455.196,00	85,03
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	16.146.700.000,00	13.958.005.973,00	2.188.694.027,00	86,44
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	334.000.000,00	56.238.831,00	277.761.169,00	16,84
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	200.000.000,00	111.341.830,00	88.658.170,00	55,67
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	200.000.000,00	111.341.830,00	88.658.170,00	55,67
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	500.000.000,00	367.258.946,00	132.741.054,00	73,45

4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	440.490.000,00	359.478.946,00	81.011.054,00	81,61
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	35.010.000,00	5.708.500,00	29.301.500,00	16,31
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	10.000.000,00	1.071.500,00	8.928.500,00	10,72
4.1.02	Retribusi Daerah	74.688.582.055,00	51.629.686.961,72	23.058.895.093,28	69,13
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	25.601.557.055,00	24.973.345.724,72	628.211.330,28	97,55
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.715.787.055,00	18.971.152.914,72	-2.255.365.859,72	113,49
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	5.515.787.055,00	6.866.797.530,00	-1.351.010.475,00	124,49
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	10.850.000.000,00	11.843.419.384,72	-993.419.384,72	109,16
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	350.000.000,00	260.936.000,00	89.064.000,00	74,55
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.845.835.000,00	1.266.234.000,00	579.601.000,00	68,60
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.845.835.000,00	1.266.234.000,00	579.601.000,00	68,60
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.141.935.000,00	952.468.310,00	1.189.466.690,00	44,47
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	300.000.000,00	419.470.000,00	-119.470.000,00	139,82
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.633.935.000,00	460.289.685,00	1.173.645.315,00	28,17
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	208.000.000,00	72.708.625,00	135.291.375,00	34,96
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	4.898.000.000,00	3.783.490.500,00	1.114.509.500,00	77,25
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	2.725.000.000,00	2.054.201.500,00	670.798.500,00	75,38
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.123.000.000,00	1.729.289.000,00	393.711.000,00	81,45
4.1.02.01.14.0003	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	48.387.025.000,00	25.946.496.785,00	22.440.528.215,00	53,62
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	29.760.000,00	11.155.000,00	18.605.000,00	37,48
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	29.760.000,00	11.155.000,00	18.605.000,00	37,48
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	14.723.000.000,00	5.919.155.740,00	8.803.844.260,00	40,20
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	14.723.000.000,00	5.919.155.740,00	8.803.844.260,00	40,20
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.588.165.000,00	645.069.000,00	1.943.096.000,00	24,92
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.588.165.000,00	645.069.000,00	1.943.096.000,00	24,92
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	335.000.000,00	367.600.000,00	-32.600.000,00	109,73
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	335.000.000,00	367.600.000,00	-32.600.000,00	109,73
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	29.780.000.000,00	17.681.948.210,00	12.098.051.790,00	59,38
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	29.780.000.000,00	17.681.948.210,00	12.098.051.790,00	59,38
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	224.500.000,00	211.430.955,00	13.069.045,00	94,18
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	224.500.000,00	211.430.955,00	13.069.045,00	94,18
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	706.600.000,00	1.110.137.880,00	-403.537.880,00	157,11
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	706.600.000,00	1.110.137.880,00	-403.537.880,00	157,11
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000,00	709.844.452,00	-9.844.452,00	101,41
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	700.000.000,00	709.844.452,00	-9.844.452,00	101,41
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	700.000.000,00	709.844.452,00	-9.844.452,00	101,41
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	-1.553.458.908,00	118,70
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	-1.553.458.908,00	118,70

4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	-1.553.458.908,00	118,70
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	-1.553.458.908,00	118,70
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.353.862.488,00	18.523.395.556,22	-2.169.533.068,22	113,27
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	214.186.000,00	48.180.000,00	166.006.000,00	22,49
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	214.186.000,00	48.180.000,00	166.006.000,00	22,49
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	214.186.000,00	48.180.000,00	166.006.000,00	22,49
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.199.752.534,00	-199.752.534,00	119,98
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.041.793.555,00	-41.793.555,00	104,18
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.041.793.555,00	-41.793.555,00	104,18
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	65.840.288,00	-65.840.288,00	0,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	65.840.288,00	-65.840.288,00	0,00
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	1.762.911,00	-1.762.911,00	0,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	1.762.911,00	-1.762.911,00	0,00
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	11.176.643,00	-11.176.643,00	0,00
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	11.176.643,00	-11.176.643,00	0,00
4.1.04.05.06	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	66.042.068,00	-66.042.068,00	0,00
4.1.04.05.06.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	66.042.068,00	-66.042.068,00	0,00
4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	13.137.069,00	-13.137.069,00	0,00
4.1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	13.137.069,00	-13.137.069,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	250.000.000,00	801.931.520,44	-551.931.520,44	320,77
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	250.000.000,00	801.931.520,44	-551.931.520,44	320,77
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	250.000.000,00	801.931.520,44	-551.931.520,44	320,77
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	578.333.157,00	-578.333.157,00	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	578.333.157,00	-578.333.157,00	0,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	578.333.157,00	-578.333.157,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	107.664.076,23	-107.664.076,23	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	107.664.076,23	-107.664.076,23	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	107.664.076,23	-107.664.076,23	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	150.000.000,00	290.107.069,00	-140.107.069,00	193,40
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	25.000.000,00	11.100.768,00	13.899.232,00	44,40
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	20.000.000,00	11.025.270,00	8.974.730,00	55,13
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000,00	75.498,00	4.924.502,00	1,51
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	65.000.000,00	34.112.917,00	30.887.083,00	52,48
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	55.000.000,00	24.409.509,00	30.590.491,00	44,38
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	10.000.000,00	9.703.408,00	296.592,00	97,03
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	62.650,00	-62.650,00	0,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	39.800,00	-39.800,00	0,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	22.850,00	-22.850,00	0,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	638.615,00	-638.615,00	0,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	638.615,00	-638.615,00	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	60.000.000,00	244.192.119,00	-184.192.119,00	406,99
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	60.000.000,00	244.192.119,00	-184.192.119,00	406,99

4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	103.202.089,00	-103.202.089,00	0,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	14.861.670,00	-14.861.670,00	0,00
4.1.04.13.01.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	6.079.090,00	-6.079.090,00	0,00
4.1.04.13.01.0025	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los	0,00	7.539.502,00	-7.539.502,00	0,00
4.1.04.13.01.0026	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	0,00	1.243.078,00	-1.243.078,00	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	88.340.419,00	-88.340.419,00	0,00
4.1.04.13.02.0019	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0,00	63.969.884,00	-63.969.884,00	0,00
4.1.04.13.02.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	24.370.535,00	-24.370.535,00	0,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	12.074.676.488,00	12.177.280.890,47	-102.604.402,47	100,85
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	12.074.676.488,00	12.177.280.890,47	-102.604.402,47	100,85
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	12.074.676.488,00	12.177.280.890,47	-102.604.402,47	100,85
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.665.000.000,00	3.022.630.749,12	-357.630.749,12	113,42
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	649.312.583,00	-649.312.583,00	0,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	649.312.583,00	-649.312.583,00	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.665.000.000,00	30.670.433,00	2.634.329.567,00	1,15
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	2.665.000.000,00	30.670.433,00	2.634.329.567,00	1,15
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	113.572.132,92	-113.572.132,92	0,00
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	113.572.132,92	-113.572.132,92	0,00
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	27.293.112,00	-27.293.112,00	0,00
4.1.04.15.10.0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	2.682.862,00	-2.682.862,00	0,00
4.1.04.15.10.0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	19.408.250,00	-19.408.250,00	0,00
4.1.04.15.10.0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	5.202.000,00	-5.202.000,00	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	422.879.000,00	-422.879.000,00	0,00
4.1.04.15.15.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	1.485.000,00	-1.485.000,00	0,00
4.1.04.15.15.0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	421.394.000,00	-421.394.000,00	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	48.861.431,00	-48.861.431,00	0,00
4.1.04.15.16.0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur	0,00	22.820.838,00	-22.820.838,00	0,00
4.1.04.15.16.0086	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	0,00	23.040.593,00	-23.040.593,00	0,00
4.1.04.15.16.0986	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
4.1.04.15.18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	377.851.294,56	-377.851.294,56	0,00
4.1.04.15.18.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	377.851.294,56	-377.851.294,56	0,00

4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	142.788.375,00	-142.788.375,00	0,00
4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	142.788.375,00	-142.788.375,00	0,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	1.121.153.444,45	-1.121.153.444,45	0,00
4.1.04.15.61.0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	1.121.153.444,45	-1.121.153.444,45	0,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	59.703.426,57	-59.703.426,57	0,00
4.1.04.15.65.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya	0,00	59.703.426,57	-59.703.426,57	0,00
4.1.04.15.66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	14.907.450,62	-14.907.450,62	0,00
4.1.04.15.66.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	14.907.450,62	-14.907.450,62	0,00
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	13.638.066,00	-13.638.066,00	0,00
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	13.638.066,00	-13.638.066,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	29.813.470,96	-29.813.470,96	0,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	29.813.470,96	-29.813.470,96	0,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,00	29.796.507,00	-29.796.507,00	0,00
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	0,00	16.963,96	-16.963,96	0,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	164.500.000,00	-164.500.000,00	0,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	164.500.000,00	-164.500.000,00	0,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	164.500.000,00	-164.500.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**153.460.514.484,00**	**130.112.097.312,94**	**23.348.417.171,06**	**84,79**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**621.912.962.534,00**	**611.269.982.015,46**	**10.642.980.518,54**	**98,29**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569.055.919.679,00	566.436.096.135,00	2.619.823.544,00	99,54
4.2.01.01	Dana Perimbangan	561.901.804.679,00	559.281.981.135,00	2.619.823.544,00	99,53
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.386.359.000,00	14.136.910.810,00	-2.750.551.810,00	124,16
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	663.958.000,00	783.054.000,00	-119.096.000,00	117,94
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.927.738.000,00	8.116.806.000,00	-1.189.068.000,00	117,16
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	461.050.000,00	-461.050.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35.943.000,00	39.361.710,00	-3.418.710,00	109,51
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	133.689.000,00	243.346.000,00	-109.657.000,00	182,02
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	628.378.000,00	0,00	628.378.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	1.465.677.000,00	-1.465.677.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	49.347.000,00	-49.347.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	49.347.000,00	30.963.100,00	18.383.900,00	62,75
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.073.811.000,00	1.073.811.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	1.873.495.000,00	1.873.495.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	451.726.253.000,00	449.518.151.028,00	2.208.101.972,00	99,51
4.2.01.01.02.0001	DAU	412.801.306.000,00	412.801.306.000,00	0,00	100,00

4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.467.301.000,00	4.259.199.028,00	2.208.101.972,00	65,86
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	16.976.382.000,00	16.976.382.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	8.047.733.000,00	8.047.733.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	2.633.531.000,00	2.633.531.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	33.257.582.204,00	31.503.797.544,00	1.753.784.660,00	94,73
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.748.189.000,00	1.728.926.361,00	19.262.639,00	98,90
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.033.323.000,00	3.914.467.267,00	118.855.733,00	97,05
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.103.939.000,00	4.030.057.258,00	73.881.742,00	98,20
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	854.701.000,00	844.419.491,00	10.281.509,00	98,80
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	99.950.000,00	99.950.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	22.417.480.204,00	20.885.977.167,00	1.531.503.037,00	93,17
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	65.531.610.475,00	64.123.121.753,00	1.408.488.722,00	97,85
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	(39.548.323,00)	39.548.323,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	29.769.334.000,00	30.004.001.000,00	-234.667.000,00	100,79
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	413.525.000,00	596.500.000,00	-182.975.000,00	144,25
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.400.000.000,00	1.392.995.830,00	7.004.170,00	99,50
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.848.271.000,00	1.636.327.096,00	211.943.904,00	88,53
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	401.245.000,00	281.574.012,00	119.670.988,00	70,18
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	284.263.350,00	121.736.650,00	70,02
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	21.326.118.480,00	21.275.641.349,00	50.477.131,00	99,76
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.212.500.000,00	1.212.500.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.287.500.000,00	2.267.353.750,00	20.146.250,00	99,12
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	63.355.000,00	-3.355.000,00	105,59
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	887.140.000,00	886.063.997,00	1.076.003,00	99,88
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.828.038.000,00	1.997.486.697,00	830.551.303,00	70,63
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	427.331.000,00	0,00	427.331.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.174.607.995,00	2.174.607.995,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**561.901.804.679,00**	**559.281.981.135,00**	**2.619.823.544,00**	**99,53**
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.154.115.000,00	7.154.115.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	7.154.115.000,00	7.154.115.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.154.115.000,00	7.154.115.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**7.154.115.000,00**	**7.154.115.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.857.042.855,00	44.833.885.880,46	8.023.156.974,54	84,82
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	41.857.042.855,00	34.409.535.374,00	7.447.507.481,00	82,21
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.857.042.855,00	34.409.535.374,00	7.447.507.481,00	82,21
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.479.228.643,00	8.863.365.298,00	3.615.863.345,00	71,02
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.697.283.836,00	4.023.933.224,00	673.350.612,00	85,67
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.581.263.387,00	9.924.313.415,00	5.656.949.972,00	63,69
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	99.266.989,00	77.839.154,00	21.427.835,00	78,41
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.000.000.000,00	11.520.084.283,00	-2.520.084.283,00	128,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.000.000.000,00	10.424.350.506,46	575.649.493,54	94,77

4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	11.000.000.000,00	10.424.350.506,46	575.649.493,54	94,77
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	11.000.000.000,00	10.424.350.506,46	575.649.493,54	94,77
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**52.857.042.855,00**	**44.833.885.880,46**	8.023.156.974,54	84,82
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**621.912.962.534,00**	**611.269.982.015,46**	**10.642.980.518,54**	**98,29**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**775.373.477.018,00**	**741.382.079.328,40**	**33.991.397.689,60**	**95,62**
5	**BELANJA DAERAH**	**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**69.354.671.079,69**	**91,42**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**727.886.843.406,00**	**665.946.895.972,54**	**61.939.947.433,46**	**91,49**
5.1.01	Belanja Pegawai	348.366.503.439,32	336.607.731.061,67	11.758.772.377,65	96,62
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	196.571.498.410,00	191.534.898.876,00	5.036.599.534,00	97,44
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	147.327.296.708,00	143.494.767.350,00	3.832.529.358,00	97,40
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	129.572.259.149,00	125.830.871.372,00	3.741.387.777,00	97,11
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	17.755.037.559,00	17.663.895.978,00	91.141.581,00	99,49
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	13.811.644.152,00	13.603.202.673,00	208.441.479,00	98,49
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12.364.759.438,00	12.166.656.103,00	198.103.335,00	98,40
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.446.884.714,00	1.436.546.570,00	10.338.144,00	99,29
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.460.633.606,00	4.373.365.650,00	87.267.956,00	98,04
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.460.633.606,00	4.373.365.650,00	87.267.956,00	98,04
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.957.939.345,00	9.770.157.500,00	187.781.845,00	98,11
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.019.174.450,00	7.868.675.500,00	150.498.950,00	98,12
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.938.764.895,00	1.901.482.000,00	37.282.895,00	98,08
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.928.534.700,00	1.856.155.000,00	72.379.700,00	96,25
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.928.534.700,00	1.856.155.000,00	72.379.700,00	96,25
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.027.918.457,00	7.899.863.280,00	128.055.177,00	98,40
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.969.306.419,00	6.856.363.500,00	112.942.919,00	98,38
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.058.612.038,00	1.043.499.780,00	15.112.258,00	98,57
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	506.656.355,00	464.663.928,00	41.992.427,00	91,71
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	506.556.355,00	464.663.928,00	41.892.427,00	91,73
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.152.217,00	1.957.308,00	1.194.909,00	62,09
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.776.765,00	1.716.795,00	1.059.970,00	61,83
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	375.452,00	240.513,00	134.939,00	64,06
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.263.189.580,00	8.887.756.049,00	375.433.531,00	95,95
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.214.678.568,00	7.872.206.267,00	342.472.301,00	95,83
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.048.511.012,00	1.015.549.782,00	32.961.230,00	96,86
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	320.529.445,00	295.812.504,00	24.716.941,00	92,29
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	279.181.045,00	258.296.125,00	20.884.920,00	92,52
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	41.348.400,00	37.516.379,00	3.832.021,00	90,73
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	964.003.845,00	887.197.634,00	76.806.211,00	92,03
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	838.461.891,00	774.831.690,00	63.630.201,00	92,41
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	125.541.954,00	112.365.944,00	13.176.010,00	89,50

5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	91.160.597.246,00	88.152.306.110,00	3.008.291.136,00	96,70
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	42.813.318.240,00	40.945.291.866,00	1.868.026.374,00	95,64
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	37.282.518.594,00	35.640.465.990,00	1.642.052.604,00	95,60
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.530.799.646,00	5.304.825.876,00	225.973.770,00	95,91
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	48.347.279.006,00	47.207.014.244,00	1.140.264.762,00	97,64
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	45.839.458.955,00	44.804.987.204,00	1.034.471.751,00	97,74
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.507.820.051,00	2.402.027.040,00	105.793.011,00	95,78
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.736.872.521,00	40.357.719.961,00	2.379.152.560,00	94,43
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.044.759.818,00	1.136.475.814,00	908.284.004,00	55,58
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	38.475.141,00	21.944.105,00	16.531.036,00	57,03
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	11.550.000,00	1.500.856,00	10.049.144,00	12,99
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	157.468.850,00	53.208.534,00	104.260.316,00	33,79
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	501.351.065,00	344.835.285,00	156.515.780,00	68,78
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],	1.335.914.762,00	714.987.034,00	620.927.728,00	53,52
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	811.017.710,00	511.857.453,00	299.160.257,00	63,11
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	15.000.000,00	5.390.000,00	9.610.000,00	35,93
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	29.000.000,00	28.228.500,00	771.500,00	97,34
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	37.287.000,00	24.231.000,00	13.056.000,00	64,99
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	66.288.000,00	45.034.000,00	21.254.000,00	67,94
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	276.200,00	0,00	276.200,00	0,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.145.760,00	0,00	1.145.760,00	0,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	285.000.000,00	284.991.421,00	8.579,00	100,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	100,00
5.1.01.03.02.0034	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	12.429.000,00	7.635.000,00	4.794.000,00	61,43
5.1.01.03.02.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	262.390.000,00	61.554.000,00	200.836.000,00	23,46
5.1.01.03.02.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	22.096.000,00	7.737.000,00	14.359.000,00	35,02
5.1.01.03.02.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	12.897.500,00	9.878.094,00	3.019.406,00	76,59
5.1.01.03.02.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	8.643.250,00	6.482.438,00	2.160.812,00	75,00
5.1.01.03.02.0044	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.615.000,00	3.746.000,00	2.869.000,00	56,63
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	26.772.567.700,00	26.671.971.200,00	100.596.500,00	99,62
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	26.772.567.700,00	26.671.971.200,00	100.596.500,00	99,62

5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	167.500.000,00	164.750.000,00	2.750.000,00	98,36
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	167.500.000,00	164.750.000,00	2.750.000,00	98,36
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	368.372.000,00	357.215.941,00	11.156.059,00	96,97
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	368.372.000,00	357.215.941,00	11.156.059,00	96,97
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.615.293.293,00	6.612.142.353,00	1.003.150.940,00	86,83
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.276.680.793,00	6.423.389.853,00	853.290.940,00	88,27
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	290.612.500,00	140.752.500,00	149.860.000,00	48,43
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.058.500.000,00	1.054.050.000,00	4.450.000,00	99,58
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.058.500.000,00	1.054.050.000,00	4.450.000,00	99,58
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	3.605.337.000,00	3.586.507.200,00	18.829.800,00	99,48
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	3.605.337.000,00	3.586.507.200,00	18.829.800,00	99,48
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	293.525.000,00	262.750.000,00	30.775.000,00	89,52
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	293.525.000,00	262.750.000,00	30.775.000,00	89,52
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.050.910.000,00	9.432.584.080,00	618.325.920,00	93,85
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	560.000.000,00	535.605.000,00	24.395.000,00	95,64
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	560.000.000,00	535.605.000,00	24.395.000,00	95,64
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	57.000.000,00	41.498.100,00	15.501.900,00	72,80
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	57.000.000,00	41.498.100,00	15.501.900,00	72,80
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	75.000.000,00	51.128.520,00	23.871.480,00	68,17
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	75.000.000,00	51.128.520,00	23.871.480,00	68,17
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	62.000.000,00	46.483.500,00	15.516.500,00	74,97
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	62.000.000,00	46.483.500,00	15.516.500,00	74,97
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	800.000.000,00	776.627.250,00	23.372.750,00	97,08
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	800.000.000,00	776.627.250,00	23.372.750,00	97,08
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	105.000.000,00	72.303.525,00	32.696.475,00	68,86
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	105.000.000,00	72.303.525,00	32.696.475,00	68,86
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.915.300.000,00	1.827.000.000,00	88.300.000,00	95,39
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.915.300.000,00	1.827.000.000,00	88.300.000,00	95,39
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	462.500.000,00	308.700.000,00	153.800.000,00	66,75
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	462.500.000,00	308.700.000,00	153.800.000,00	66,75
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	650.000,00	346.612,00	303.388,00	53,32
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	650.000,00	346.612,00	303.388,00	53,32
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.264.750.000,00	2.200.382.750,00	64.367.250,00	97,16
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	57.000.000,00	42.292.068,00	14.707.932,00	74,20
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.750.000,00	1.115.604,00	634.396,00	63,75
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.000.000,00	3.346.812,00	2.653.188,00	55,78
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.200.000.000,00	2.153.628.266,00	46.371.734,00	97,89
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.517.500.000,00	3.341.298.823,00	176.201.177,00	94,99
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.517.500.000,00	3.341.298.823,00	176.201.177,00	94,99
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	231.210.000,00	231.210.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	231.210.000,00	231.210.000,00	0,00	100,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.166.042.797,00	768.563.704,67	397.479.092,33	65,91
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.692.000,00	54.600.000,00	1.092.000,00	98,04
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.692.000,00	54.600.000,00	1.092.000,00	98,04
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.168.960,00	6.048.000,00	120.960,00	98,04

5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.168.960,00	6.048.000,00	120.960,00	98,04
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.245.600,00	98.280.000,00	1.965.600,00	98,04
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.245.600,00	98.280.000,00	1.965.600,00	98,04
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.170.788,00	5.069.400,00	101.388,00	98,04
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.170.788,00	5.069.400,00	101.388,00	98,04
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	569.529,00	558.073,00	11.456,00	97,99
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	569.529,00	558.073,00	11.456,00	97,99
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.142,00	1.110,00	32,00	97,20
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.142,00	1.110,00	32,00	97,20
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.992.832,00	5.448.960,00	1.543.872,00	77,92
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.992.832,00	5.448.960,00	1.543.872,00	77,92
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	133.661,00	112.320,00	21.341,00	84,03
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	133.661,00	112.320,00	21.341,00	84,03
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	400.982,00	336.960,00	64.022,00	84,03
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	400.982,00	336.960,00	64.022,00	84,03
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	623.272.413,00	370.982.985,00	252.289.428,00	59,52
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	11.492.575,00	7.125.000,00	4.367.575,00	62,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.450.000,00	428.750,00	3.021.250,00	12,43
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	47.036.150,00	6.277.333,00	40.758.817,00	13,35
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	149.754.214,00	115.986.695,00	33.767.519,00	77,45
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],	399.039.474,00	241.165.207,00	157.874.267,00	60,44
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	367.394.890,00	227.125.896,67	140.268.993,33	61,82
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	15.000.000,00	1.610.000,00	13.390.000,00	10,73
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.000.000,00	16.400.000,00	1.600.000,00	91,11
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	15.525.000,00	9.851.000,00	5.674.000,00	63,45
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	27.600.000,00	18.307.000,00	9.293.000,00	66,33
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	342.240,00	0,00	342.240,00	0,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	138.000.000,00	136.988.000,00	1.012.000,00	99,27
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	8.050.000,00	7.166.666,67	883.333,33	89,03
5.1.01.05.11.0034	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	5.175.000,00	3.103.000,00	2.072.000,00	59,96
5.1.01.05.11.0036	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	109.250.000,00	25.017.000,00	84.233.000,00	22,90

5.1.01.05.11.0038	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	9.200.000,00	3.145.500,00	6.054.500,00	34,19
5.1.01.05.11.0039	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	3.852.500,00	2.347.917,00	1.504.583,00	60,95
5.1.01.05.11.0043	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.581.750,00	1.936.313,00	645.437,00	75,00
5.1.01.05.11.0044	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.203.400,00	1.253.500,00	949.900,00	56,89
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	720.000.000,00	565.062.170,00	154.937.830,00	78,48
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	120.000.000,00	93.120.000,00	26.880.000,00	77,60
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	120.000.000,00	93.120.000,00	26.880.000,00	77,60
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	471.942.170,00	128.057.830,00	78,66
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	471.942.170,00	128.057.830,00	78,66
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	5.960.582.465,32	5.796.596.160,00	163.986.305,32	97,25
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	5.960.582.465,32	5.796.596.160,00	163.986.305,32	97,25
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	5.960.582.465,32	5.796.596.160,00	163.986.305,32	97,25
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.715.324.592,68	272.602.571.149,75	44.112.753.442,93	86,07
5.1.02.01	Belanja Barang	47.761.152.115,00	35.510.547.931,87	12.250.604.183,13	74,35
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	47.591.292.115,00	35.400.622.931,87	12.190.669.183,13	74,38
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	22.930.400,00	3.222.400,00	19.708.000,00	14,05
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	835.726.360,00	742.676.569,00	93.049.791,00	88,87
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	908.557.050,00	360.955.500,00	547.601.550,00	39,73
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	5.214.000,00	5.144.520,00	69.480,00	98,67
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	334.032.500,00	256.149.000,00	77.883.500,00	76,68
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	52.500.000,00	36.533.000,00	15.967.000,00	69,59
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	35.533.000,00	24.852.000,00	10.681.000,00	69,94
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	18.874.800,00	11.637.600,00	7.237.200,00	61,66
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.003.794.371,00	892.959.595,00	110.834.776,00	88,96
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.362.100,00	492.000,00	2.870.100,00	14,63
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.474.000,00	1.590.000,00	3.884.000,00	29,05
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	54.980.800,00	43.179.000,00	11.801.800,00	78,53
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	104.462.224,00	86.853.280,00	17.608.944,00	83,14
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	9.363.700,00	5.627.900,00	3.735.800,00	60,10
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.424.000,00	2.240.000,00	6.184.000,00	26,59
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.112.108.909,00	3.803.677.435,00	1.308.431.474,00	74,41
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	850.272.407,00	736.477.384,00	113.795.023,00	86,62
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	708.251.050,00	551.851.145,00	156.399.905,00	77,92
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	114.520.000,00	105.540.000,00	8.980.000,00	92,16
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.040.902.300,00	825.421.989,00	215.480.311,00	79,30
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.726.977.640,00	1.433.538.567,00	293.439.073,00	83,01
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	499.675.100,00	372.581.275,00	127.093.825,00	74,56
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.189.920.311,00	809.520.425,00	380.399.886,00	68,03
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	51.654.400,00	38.063.960,00	13.590.440,00	73,69
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	50.764.806,00	19.855.900,00	30.908.906,00	39,11
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.257.048.000,00	1.144.695.000,00	112.353.000,00	91,06

5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36.608.800,00	8.516.750,00	28.092.050,00	23,26
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	356.567.690,00	223.433.831,00	133.133.859,00	62,66
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.634.800,00	7.046.000,00	588.800,00	92,29
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.316.515.097,00	6.451.548.939,87	3.864.966.157,13	62,54
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.321.483.400,00	1.211.734.551,00	109.748.849,00	91,70
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	2.611.646.500,00	2.516.409.030,00	95.237.470,00	96,35
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	68.305.000,00	64.835.000,00	3.470.000,00	94,92
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.599.287.500,00	5.100.279.675,00	3.499.007.825,00	59,31
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.494.739.600,00	4.278.204.546,00	216.535.054,00	95,18
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	25.800.000,00	0,00	25.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.218.500.000,00	1.205.989.565,00	12.510.435,00	98,97
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	813.847.500,00	524.580.450,00	289.267.050,00	64,46
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	676.000.000,00	667.110.000,00	8.890.000,00	98,68
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	405.350.000,00	400.951.000,00	4.399.000,00	98,91
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	132.000.000,00	130.875.000,00	1.125.000,00	99,15
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	281.182.000,00	109.653.750,00	171.528.250,00	39,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.300.000,00	15.150.000,00	150.000,00	99,02
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	202.200.000,00	165.969.400,00	36.230.600,00	82,08
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	150.860.000,00	109.925.000,00	40.935.000,00	72,87
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	150.260.000,00	109.325.000,00	40.935.000,00	72,76
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0061	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0096	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	143.507.819.239,00	129.509.277.875,13	13.998.541.363,87	90,25
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	123.910.577.173,00	111.585.463.155,13	12.325.114.017,87	90,05
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.052.872.000,00	4.719.580.000,00	1.333.292.000,00	77,97
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.358.710.000,00	2.028.390.000,00	330.320.000,00	86,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	552.400.000,00	547.000.000,00	5.400.000,00	99,02
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	8.000.000,00	4.450.000,00	3.550.000,00	55,63
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	8.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	50,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.250.000,00	9.750.000,00	500.000,00	95,12
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	40.800.000,00	39.000.000,00	1.800.000,00	95,59
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	741.700.000,00	667.200.000,00	74.500.000,00	89,96
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.620.960.000,00	10.522.660.000,00	98.300.000,00	99,07
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.348.035.000,00	4.109.408.092,00	1.238.626.908,00	76,84
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	368.810.000,00	245.664.500,00	123.145.500,00	66,61
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.336.200.000,00	4.147.069.233,00	189.130.767,00	95,64
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	8.532.320.000,00	8.509.132.647,00	23.187.353,00	99,73
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	703.000.000,00	699.863.637,00	3.136.363,00	99,55
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.263.000.000,00	1.261.630.000,00	1.370.000,00	99,89
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	183.020.000,00	175.010.000,00	8.010.000,00	95,62

5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.260.803.808,00	3.196.976.308,00	63.827.500,00	98,04
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	482.000.000,00	461.659.050,00	20.340.950,00	95,78
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	816.000.000,00	638.550.000,00	177.450.000,00	78,25
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.067.500.000,00	9.565.855.600,00	501.644.400,00	95,02
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	760.000.000,00	697.886.364,00	62.113.636,00	91,83
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.897.840.000,00	3.782.378.188,00	115.461.812,00	97,04
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.597.800.000,00	1.366.304.000,00	231.496.000,00	85,51
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17.309.713.677,00	16.560.356.641,28	749.357.035,72	95,67
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.974.417.085,00	7.671.971.141,85	302.445.943,15	96,21
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	212.000.000,00	187.848.332,00	24.151.668,00	88,61
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	325.000.000,00	302.159.092,00	22.840.908,00	92,97
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	278.360.000,00	226.087.272,00	52.272.728,00	81,22
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	255.400.000,00	187.550.000,00	67.850.000,00	73,43
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	231.000.000,00	212.555.000,00	18.445.000,00	92,02
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.015.800.000,00	1.315.542.000,00	1.700.258.000,00	43,62
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	171.500.000,00	123.301.000,00	48.199.000,00	71,90
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	205.900.000,00	171.583.000,00	34.317.000,00	83,33
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	86.892.000,00	60.502.800,00	26.389.200,00	69,63
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.252.884.603,00	1.776.025.077,00	476.859.526,00	78,83
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	82.310.000,00	82.310.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	10.000.000,00	1.104.400,00	8.895.600,00	11,04
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.270.190.000,00	1.065.460.000,00	204.730.000,00	83,88
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	402.550.000,00	269.320.502,00	133.229.498,00	66,90
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.581.350.000,00	1.113.717.944,00	467.632.056,00	70,43
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.287.670.000,00	5.921.431.679,00	1.366.238.321,00	81,25
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	705.830.000,00	679.607.850,00	26.222.150,00	96,28
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.553.235.000,00	3.271.168.538,00	282.066.462,00	92,06
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	39.145.000,00	4.613.827,00	34.531.173,00	11,79
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	50.050.000,00	32.036.200,00	18.013.800,00	64,01
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.300.000,00	10.107.768,00	14.192.232,00	41,60
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	60.000.000,00	8.127.000,00	51.873.000,00	13,55
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	14.185.859.000,00	12.740.168.072,00	1.445.690.928,00	89,81
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	95.000.000,00	27.390.400,00	67.609.600,00	28,83
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.201.366.466,00	10.909.072.916,00	292.293.550,00	97,39
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	6.973.940.766,00	6.973.939.300,00	1.466,00	100,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.248.177.000,00	1.107.022.000,00	141.155.000,00	88,69
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.023.620.000,00	1.899.296.481,00	124.323.519,00	93,86
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	509.431.200,00	497.529.107,24	11.902.092,76	97,66
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	446.197.500,00	431.286.027,76	14.911.472,24	96,66
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	2.175.848.480,00	2.175.848.283,00	197,00	100,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	2.175.848.480,00	2.175.848.283,00	197,00	100,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.430.250.000,00	1.938.223.485,00	492.026.515,00	79,75

5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	503.250.000,00	295.166.820,00	208.083.180,00	58,65
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	386.400.000,00	267.100.000,00	119.300.000,00	69,13
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	144.730.000,00	139.000.000,00	5.730.000,00	96,04
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.165.670.000,00	1.080.556.665,00	85.113.335,00	92,70
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	67.300.000,00	47.040.000,00	20.260.000,00	69,90
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	56.250.000,00	14.650.000,00	41.600.000,00	26,04
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	94.150.000,00	91.710.000,00	2.440.000,00	97,41
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	664.600.000,00	473.125.633,00	191.474.367,00	71,19
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	123.000.000,00	49.500.000,00	73.500.000,00	40,24
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	14.000.000,00	2.850.000,00	11.150.000,00	20,36
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	23.000.000,00	11.600.000,00	11.400.000,00	50,43
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	485.600.000,00	400.175.633,00	85.424.367,00	82,41
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.06.0131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	363.500.000,00	345.250.000,00	18.250.000,00	94,98
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	91.500.000,00	73.300.000,00	18.200.000,00	80,11
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	272.000.000,00	271.950.000,00	50.000,00	99,98
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	342.000.000,00	68.952.500,00	273.047.500,00	20,16
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	270.000.000,00	68.952.500,00	201.047.500,00	25,54
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	643.000.000,00	533.943.678,00	109.056.322,00	83,04
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	173.000.000,00	73.000.000,00	100.000.000,00	42,20
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.000.000,00	49.938.900,00	61.100,00	99,88
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	144.000.000,00	142.601.783,00	1.398.217,00	99,03
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	276.000.000,00	268.402.995,00	7.597.005,00	97,25
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	211.500.000,00	209.500.000,00	2.000.000,00	99,05
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	72.000.000,00	70.000.000,00	2.000.000,00	97,22
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	767.467.000,00	718.157.850,00	49.309.150,00	93,58
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	694.252.000,00	644.942.850,00	49.309.150,00	92,90
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	73.215.000,00	73.215.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	425.200.000,00	294.528.409,00	130.671.591,00	69,27
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.500.000,00	5.965.554,00	1.534.446,00	79,54
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.700.000,00	416.907,00	2.283.093,00	15,44
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	17.500.000,00	2.324.070,00	15.175.930,00	13,28
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	127.500.000,00	92.821.934,00	34.678.066,00	72,80
5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],	270.000.000,00	192.999.944,00	77.000.056,00	71,48
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	352.510.120,00	257.211.966,00	95.298.154,00	72,97

5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	31.000.000,00	30.959.169,00	40.831,00	99,87
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	11.940.098,00	8.738.000,00	3.202.098,00	73,18
5.1.02.02.14.0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	26.112.000,00	16.240.000,00	9.872.000,00	62,19
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.665.600,00	710.000,00	1.955.600,00	26,64
5.1.02.02.14.0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	190.000.000,00	172.832.797,00	17.167.203,00	90,96
5.1.02.02.14.0034	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	4.896.000,00	2.753.000,00	2.143.000,00	56,23
5.1.02.02.14.0036	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	78.088.382,00	22.189.000,00	55.899.382,00	28,42
5.1.02.02.14.0038	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	7.808.040,00	2.790.000,00	5.018.040,00	35,73
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	27.594.558.895,00	22.044.698.814,85	5.549.860.080,15	79,89
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.541.248.895,00	17.594.768.024,00	3.946.480.871,00	81,68
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	1.015.521.500,00	856.175.994,00	159.345.506,00	84,31
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	305.475.020,00	128.937.221,00	176.537.799,00	42,21
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	7.700.000,00	7.698.750,00	1.250,00	99,98
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	7.500.000,00	860.000,00	6.640.000,00	11,47
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	112.610.000,00	49.730.290,00	62.879.710,00	44,16
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	16.500.000,00	3.560.000,00	12.940.000,00	21,58
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	213.780.000,00	107.673.000,00	106.107.000,00	50,37
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.534.340.000,00	2.845.183.872,00	689.156.128,00	80,50
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.828.880.000,00	2.459.204.443,00	369.675.557,00	86,93
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	37.110.000,00	36.927.100,00	182.900,00	99,51
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.213.530.000,00	1.893.772.663,00	319.757.337,00	85,55
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.563.633.750,00	1.553.412.300,00	1.010.221.450,00	60,59
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	533.197.975,00	438.724.323,00	94.473.652,00	82,28
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	6.373.413.250,00	6.098.533.863,00	274.879.387,00	95,69
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	560.000,00	391.000,00	169.000,00	69,82
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	9.000.000,00	1.599.000,00	7.401.000,00	17,77
5.1.02.03.02.0060	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	20.000.000,00	2.587.800,00	17.412.200,00	12,94

5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	10.930.000,00	3.625.000,00	7.305.000,00	33,17
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	112.120.000,00	91.639.620,00	20.480.380,00	81,73
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	5.000.000,00	4.550.000,00	450.000,00	91,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	5.296.000,00	4.704.000,00	52,96
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	414.480.000,00	245.606.674,00	168.873.326,00	59,26
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.320.000,00	11.869.000,00	4.451.000,00	72,73
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.490.000,00	1.220.000,00	4.270.000,00	22,22
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	381.335.000,00	202.925.435,00	178.409.565,00	53,21
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	10.800.000,00	10.179.750,00	620.250,00	94,26
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	60.000.000,00	33.466.500,00	26.533.500,00	55,78
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	2.100.000,00	2.076.300,00	23.700,00	98,87
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	9.200.000,00	5.092.000,00	4.108.000,00	55,35
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	25.992.400,00	14.152.300,00	11.840.100,00	54,45
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	251.370.000,00	186.137.450,00	65.232.550,00	74,05
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	157.180.000,00	100.369.070,00	56.810.930,00	63,86
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	55.000.000,00	54.703.335,00	296.665,00	99,46
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	60.000.000,00	59.718.000,00	282.000,00	99,53
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	152.100.000,00	77.169.971,00	74.930.029,00	50,74
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.047.502.900,00	1.920.361.180,85	1.127.141.719,15	63,01
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.610.324.300,00	1.035.332.931,00	574.991.369,00	64,29
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	108.895.400,00	33.144.723,00	75.750.677,00	30,44
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.842.000,00	20.342.000,00	-2.500.000,00	114,01
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	137.640.000,00	136.111.766,13	1.528.233,87	98,89
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	374.155.600,00	68.842.420,00	305.313.180,00	18,40
5.1.02.03.03.0015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	10.490.000,00	9.304.450,00	1.185.550,00	88,70
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	77.240.000,00	75.901.800,00	1.338.200,00	98,27
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	57.180.000,00	28.271.060,00	28.908.940,00	49,44
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	30.600.000,00	30.573.924,00	26.076,00	99,91
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	111.810.000,00	73.260.114,00	38.549.886,00	65,52

5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	262.000.000,00	203.964.882,00	58.035.118,00	77,85
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	249.325.600,00	205.311.110,72	44.014.489,28	82,35
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.005.807.100,00	2.529.569.610,00	476.237.490,00	84,16
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	990.472.100,00	952.204.379,00	38.267.721,00	96,14
5.1.02.03.04.0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	55.950.000,00	55.950.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	576.000.000,00	570.496.902,00	5.503.098,00	99,04
5.1.02.03.04.0063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	7.500.000,00	5.383.500,00	2.116.500,00	71,78
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	620.885.000,00	510.815.106,00	110.069.894,00	82,27
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	20.000.000,00	4.095.000,00	15.905.000,00	20,48
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	66.500.000,00	52.215.305,00	14.284.695,00	78,52
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	50.000.000,00	21.250.000,00	28.750.000,00	42,50
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	30.000.000,00	682.000,00	29.318.000,00	2,27
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	550.000.000,00	332.259.138,00	217.740.862,00	60,41
5.1.02.03.04.0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	30.000.000,00	19.226.000,00	10.774.000,00	64,09
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	8.500.000,00	4.992.280,00	3.507.720,00	58,73
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	53.012.447.833,00	42.860.599.777,00	10.151.848.056,00	80,85
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.754.447.833,00	42.798.803.871,00	9.955.643.962,00	81,13
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.599.221.833,00	38.319.763.071,00	8.279.458.762,00	82,23
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.329.943.495,00	1.659.497.800,00	670.445.695,00	71,22
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.936.435.505,00	2.371.363.000,00	565.072.505,00	80,76
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	888.847.000,00	448.180.000,00	440.667.000,00	50,42
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	258.000.000,00	61.795.906,00	196.204.094,00	23,95
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	258.000.000,00	61.795.906,00	196.204.094,00	23,95
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.125.848.000,00	16.404.660.750,00	721.187.250,00	95,79
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.409.500.000,00	1.008.014.000,00	401.486.000,00	71,52
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.270.500.000,00	942.464.000,00	328.036.000,00	74,18
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	131.800.000,00	65.100.000,00	66.700.000,00	49,39
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	7.200.000,00	450.000,00	6.750.000,00	6,25
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.716.348.000,00	15.396.646.750,00	319.701.250,00	97,97
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	37.100.000,00	36.300.000,00	800.000,00	97,84
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	15.679.248.000,00	15.360.346.750,00	318.901.250,00	97,97
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.560.963.589,00	12.441.993.638,00	118.969.951,00	99,05
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.560.963.589,00	12.441.993.638,00	118.969.951,00	99,05
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.560.963.589,00	12.441.993.638,00	118.969.951,00	99,05
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.268.551.000,00	2.132.395.407,00	1.136.155.593,00	65,24
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.268.551.000,00	2.132.395.407,00	1.136.155.593,00	65,24
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.268.551.000,00	2.132.395.407,00	1.136.155.593,00	65,24
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.883.983.921,68	11.698.396.955,90	185.586.965,78	98,44
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.883.983.921,68	11.698.396.955,90	185.586.965,78	98,44
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.883.983.921,68	11.698.396.955,90	185.586.965,78	98,44
5.1.04	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	13.522,00	100,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	13.522,00	100,00

5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	13.522,00	100,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	13.522,00	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	57.105.915.374,00	51.339.007.283,12	5.766.908.090,88	89,90
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	16.136.761.850,00	16.023.578.753,12	113.183.096,88	99,30
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	15.471.761.850,00	15.431.761.850,00	40.000.000,00	99,74
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	15.471.761.850,00	15.431.761.850,00	40.000.000,00	99,74
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	665.000.000,00	591.816.903,12	73.183.096,88	89,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	665.000.000,00	591.816.903,12	73.183.096,88	89,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	32.876.090.000,00	27.294.156.719,00	5.581.933.281,00	83,02
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.135.090.000,00	12.227.282.970,00	2.907.807.030,00	80,79
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.135.090.000,00	12.227.282.970,00	2.907.807.030,00	80,79
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.083.000.000,00	15.041.873.749,00	2.041.126.251,00	88,05
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.083.000.000,00	15.041.873.749,00	2.041.126.251,00	88,05
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	633.000.000,00	0,00	633.000.000,00	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	633.000.000,00	0,00	633.000.000,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	7.317.750.000,00	7.284.106.494,00	33.643.506,00	99,54
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	7.317.750.000,00	7.284.106.494,00	33.643.506,00	99,54
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	7.317.750.000,00	7.284.106.494,00	33.643.506,00	99,54
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.313.524,00	737.165.317,00	38.148.207,00	95,08
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.313.524,00	737.165.317,00	38.148.207,00	95,08
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.313.524,00	737.165.317,00	38.148.207,00	95,08
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.199.100.000,00	2.897.600.000,00	301.500.000,00	90,58
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	391.000.000,00	89.500.000,00	301.500.000,00	22,89
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	391.000.000,00	89.500.000,00	301.500.000,00	22,89
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	391.000.000,00	89.500.000,00	301.500.000,00	22,89
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.808.100.000,00	2.808.100.000,00	0,00	100,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.808.100.000,00	2.808.100.000,00	0,00	100,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.808.100.000,00	2.808.100.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**727.886.843.406,00**	**665.946.895.972,54**	61.939.947.433,46	91,49
5.2	**BELANJA MODAL**	**69.943.686.777,00**	**63.532.002.219,77**	6.411.684.557,23	90,83
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.576.288.033,00	12.261.224.480,70	2.315.063.552,30	84,12
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	539.507.072,00	439.566.000,00	99.941.072,00	81,48
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	539.507.072,00	439.566.000,00	99.941.072,00	81,48
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	390.161.442,00	389.490.000,00	671.442,00	99,83
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	148.695.630,00	50.076.000,00	98.619.630,00	33,68
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.578.835.994,00	2.504.595.250,00	74.240.744,00	97,12

5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.432.210.994,00	2.363.870.250,00	68.340.744,00	97,19
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	432.572.794,00	419.370.250,00	13.202.544,00	96,95
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	94.538.200,00	44.500.000,00	50.038.200,00	47,07
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.905.100.000,00	1.900.000.000,00	5.100.000,00	99,73
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	146.625.000,00	140.725.000,00	5.900.000,00	95,98
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	146.625.000,00	140.725.000,00	5.900.000,00	95,98
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	46.909.000,00	37.867.400,00	9.041.600,00	80,73
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.028.000,00	3.252.400,00	775.600,00	80,74
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	4.028.000,00	3.252.400,00	775.600,00	80,74
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	42.881.000,00	34.615.000,00	8.266.000,00	80,72
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	5.541.000,00	5.540.000,00	1.000,00	99,98
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	2.500.000,00	1.950.000,00	550.000,00	78,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	22.880.000,00	17.045.000,00	5.835.000,00	74,50
5.2.02.03.03.0016	Belanja Modal Specific Set	11.960.000,00	10.080.000,00	1.880.000,00	84,28
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	7.317.200,00	4.614.160,00	2.703.040,00	63,06
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	7.317.200,00	4.614.160,00	2.703.040,00	63,06
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	7.317.200,00	4.614.160,00	2.703.040,00	63,06
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.841.876.328,00	2.144.446.670,70	697.429.657,30	75,46
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	867.347.406,00	490.934.875,00	376.412.531,00	56,60
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	10.159.900,00	250.000,00	9.909.900,00	2,46
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	255.478.706,00	123.074.800,00	132.403.906,00	48,17
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	601.708.800,00	367.610.075,00	234.098.725,00	61,09
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.776.353.992,00	1.516.074.645,70	260.279.346,30	85,35
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	503.548.800,00	464.423.985,00	39.124.815,00	92,23
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	21.800.000,00	21.750.000,00	50.000,00	99,77
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	18.265.000,00	16.938.000,00	1.327.000,00	92,73
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	111.506.300,00	68.046.986,00	43.459.314,00	61,03
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	86.912.400,00	85.780.965,70	1.131.434,30	98,70
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.034.321.492,00	859.134.709,00	175.186.783,00	83,06
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	198.174.930,00	137.437.150,00	60.737.780,00	69,35
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	32.640.000,00	32.602.500,00	37.500,00	99,89
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	17.563.530,00	13.537.100,00	4.026.430,00	77,08
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	147.971.400,00	91.297.550,00	56.673.850,00	61,70
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	695.321.300,00	452.191.710,00	243.129.590,00	65,03
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	495.544.300,00	273.335.000,00	222.209.300,00	55,16
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	425.662.000,00	253.135.000,00	172.527.000,00	59,47
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	69.882.300,00	20.200.000,00	49.682.300,00	28,91
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	199.777.000,00	178.856.710,00	20.920.290,00	89,53
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	161.137.000,00	140.533.960,00	20.603.040,00	87,21
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	38.640.000,00	38.322.750,00	317.250,00	99,18
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	992.457.603,00	742.034.126,00	250.423.477,00	74,77
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	734.297.728,00	530.321.926,00	203.975.802,00	72,22
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	135.579.954,00	110.941.576,00	24.638.378,00	81,83
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	53.760.720,00	45.442.000,00	8.318.720,00	84,53
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	325.573.054,00	286.552.350,00	39.020.704,00	88,01
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.202.000,00	1.200.000,00	2.000,00	99,83

5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	187.512.000,00	55.536.000,00	131.976.000,00	29,62
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	30.670.000,00	30.650.000,00	20.000,00	99,93
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	258.159.875,00	211.712.200,00	46.447.675,00	82,01
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	258.159.875,00	211.712.200,00	46.447.675,00	82,01
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.307.363.733,00	1.164.128.405,00	143.235.328,00	89,04
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.047.586.733,00	950.064.405,00	97.522.328,00	90,69
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	787.818.733,00	701.173.405,00	86.645.328,00	89,00
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	250.000.000,00	248.891.000,00	1.109.000,00	99,56
5.2.02.08.01.0015	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	9.768.000,00	0,00	9.768.000,00	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	257.113.000,00	214.064.000,00	43.049.000,00	83,26
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	116.814.000,00	116.300.000,00	514.000,00	99,56
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	20.122.000,00	0,00	20.122.000,00	0,00
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	20.177.000,00	0,00	20.177.000,00	0,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	100.000.000,00	97.764.000,00	2.236.000,00	97,76
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.664.000,00	0,00	2.664.000,00	0,00
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	2.664.000,00	0,00	2.664.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.996.823.846,00	1.479.240.700,00	517.583.146,00	74,08
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.673.232.246,00	1.286.232.250,00	386.999.996,00	76,87
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.574.216.246,00	1.213.292.250,00	360.923.996,00	77,07
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	99.016.000,00	72.940.000,00	26.076.000,00	73,66
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	323.591.600,00	193.008.450,00	130.583.150,00	59,65
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	290.320.600,00	171.049.950,00	119.270.650,00	58,92
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	24.826.000,00	13.558.500,00	11.267.500,00	54,61
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.445.000,00	8.400.000,00	45.000,00	99,47
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	198.135.000,00	197.285.000,00	850.000,00	99,57
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	198.135.000,00	197.285.000,00	850.000,00	99,57
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	198.135.000,00	197.285.000,00	850.000,00	99,57
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.340.644.007,00	2.290.378.244,00	50.265.763,00	97,85
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.340.644.007,00	2.290.378.244,00	50.265.763,00	97,85
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.340.644.007,00	2.290.378.244,00	50.265.763,00	97,85
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.031.096.950,00	804.876.815,00	226.220.135,00	78,06
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.031.096.950,00	804.876.815,00	226.220.135,00	78,06
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.031.096.950,00	804.876.815,00	226.220.135,00	78,06
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.771.313.480,00	31.435.241.904,22	2.336.071.575,78	93,08
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	33.478.313.480,00	31.143.610.135,14	2.334.703.344,86	93,03
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.478.313.480,00	31.143.610.135,14	2.334.703.344,86	93,03
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	490.840.000,00	388.897.947,83	101.942.052,17	79,23
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	21.900.797.480,00	20.630.683.674,58	1.270.113.805,42	94,20
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.501.676.000,00	9.689.048.160,61	812.627.839,39	92,26
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	470.000.000,00	434.980.352,12	35.019.647,88	92,55
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	293.000.000,00	291.631.769,08	1.368.230,92	99,53
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	293.000.000,00	291.631.769,08	1.368.230,92	99,53
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	123.000.000,00	122.068.405,08	931.594,92	99,24
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	170.000.000,00	169.563.364,00	436.636,00	99,74

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.966.602.364,00	18.357.697.907,85	1.608.904.456,15	91,94
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	6.274.562.012,00	5.824.867.718,52	449.694.293,48	92,83
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	6.274.562.012,00	5.824.867.718,52	449.694.293,48	92,83
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	4.181.635.600,00	4.085.369.921,24	96.265.678,76	97,70
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.092.926.412,00	1.739.497.797,28	353.428.614,72	83,11
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	611.600.000,00	421.644.164,87	189.955.835,13	68,94
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	611.600.000,00	421.644.164,87	189.955.835,13	68,94
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	611.600.000,00	421.644.164,87	189.955.835,13	68,94
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	12.428.748.000,00	11.660.361.987,46	768.386.012,54	93,82
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.428.748.000,00	1.236.011.481,00	192.736.519,00	86,51
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.428.748.000,00	1.236.011.481,00	192.736.519,00	86,51
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	11.000.000.000,00	10.424.350.506,46	575.649.493,54	94,77
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	11.000.000.000,00	10.424.350.506,46	575.649.493,54	94,77
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	651.692.352,00	450.824.037,00	200.868.315,00	69,18
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	651.692.352,00	450.824.037,00	200.868.315,00	69,18
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	651.692.352,00	450.824.037,00	200.868.315,00	69,18
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.429.482.900,00	1.278.037.927,00	151.444.973,00	89,41
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00
5.2.05.03.01	Belanja Modal Hewan Piaraan	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00
5.2.05.03.01.0003	Belanja Modal Hewan Kebun Binatang	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	3.384.000,00	3.384.000,00	0,00	100,00
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	3.384.000,00	3.384.000,00	0,00	100,00
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	3.384.000,00	3.384.000,00	0,00	100,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.306.098.900,00	1.274.653.927,00	31.444.973,00	97,59
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.306.098.900,00	1.274.653.927,00	31.444.973,00	97,59
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.306.098.900,00	1.274.653.927,00	31.444.973,00	97,59
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	199.800.000,00	200.000,00	99,90
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	199.800.000,00	200.000,00	99,90
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	199.800.000,00	200.000,00	99,90
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	200.000.000,00	199.800.000,00	200.000,00	99,90
	JUMLAH BELANJA MODAL	**69.943.686.777,00**	**63.532.002.219,77**	**6.411.684.557,23**	**90,83**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.000.000.000,00**	**380.911,00**	**999.619.089,00**	**0,04**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	380.911,00	999.619.089,00	0,04
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	380.911,00	999.619.089,00	0,04
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	380.911,00	999.619.089,00	0,04
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	380.911,00	999.619.089,00	0,04
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.000.000.000,00**	**380.911,00**	**999.619.089,00**	**0,04**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**9.600.620.000,00**	**9.597.200.000,00**	**3.420.000,00**	**99,96**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	3.420.000,00	99,96
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	3.420.000,00	99,96
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	3.420.000,00	99,96
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	3.420.000,00	99,96
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**9.600.620.000,00**	**9.597.200.000,00**	**3.420.000,00**	**99,96**

	JUMLAH BELANJA	**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**69.354.671.079,69**	**91,42**
	SURPLUS/DEFISIT	**(33.057.673.165,00)**	**2.305.600.225,09**	**-35.363.273.390,09**	**- 6,97**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**0,20**	**100,00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	**0,20**	**100,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	0,20	100,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	2.657.506.140,00	2.657.506.140,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	1.715.016.528,00	1.715.016.528,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	23.039.176,00	23.039.176,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	399.398.873,00	399.398.873,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	226.971.019,00	226.971.019,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.065.607.460,00	1.065.607.460,00	0,00	100,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	14.564.154,00	14.564.154,00	0,00	100,00
6.1.01.01.02.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	14.564.154,00	14.564.154,00	0,00	100,00
6.1.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56.418.566,00	56.418.566,00	0,00	100,00
6.1.01.01.03.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	56.418.566,00	56.418.566,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	871.506.892,00	871.506.892,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	18.140.899,00	18.140.899,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	600.100,00	600.100,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	30.661.074,00	30.661.074,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	82.474.140,00	82.474.140,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	181.346.774,00	181.346.774,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	133.893.988,00	133.893.988,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	386.139.917,00	386.139.917,00	0,00	100,00
6.1.01.01.04.0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	100,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	2.716.170.000,00	2.716.170.000,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	2.716.170.000,00	2.716.170.000,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	119.096.000,00	119.096.000,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	1.572.421.000,00	1.572.421.000,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	77.697.000,00	77.697.000,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0007	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	109.657.000,00	109.657.000,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	837.299.000,00	837.299.000,00	0,00	100,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	134.012.443,00	134.012.443,00	0,00	100,00
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	134.012.443,00	134.012.443,00	0,00	100,00
6.1.01.03.03.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	134.012.443,00	134.012.443,00	0,00	100,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	22.231.816.028,00	22.231.816.028,00	0,00	100,00

6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	17.930.000.000,00	17.930.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	2.910.000.000,00	2.910.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	1.630.000.000,00	1.630.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	3.302.665.028,00	3.302.665.028,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	863.000.000,00	863.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	239.665.028,00	239.665.028,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	999.151.000,00	999.151.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	999.151.000,00	999.151.000,00	0,00	100,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	5.318.168.554,00	5.318.168.553,80	0,20	100,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	2.501.217.532,00	2.501.217.532,00	0,00	100,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	2.501.217.532,00	2.501.217.532,00	0,00	100,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	986.838.017,00	986.838.017,00	0,00	100,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	986.838.017,00	986.838.017,00	0,00	100,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	1.830.113.005,00	1.830.113.004,80	0,20	100,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	1.830.113.005,00	1.830.113.004,80	0,20	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	0,20	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	0,20	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**35.363.273.389,89**	**-35.363.273.389,89**	

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN (%)	Permasalahan dan Strategi Penyelesaian
						PERMASALAHAN:
I	**BELANJA OPERASI**	**316.715.324.593**	**125.981.162.957**	**29.306.368.558**	**23,26**	1 Nilai realisasi belanja PDN berdasarkan data yang tercatat pada SPSE.
I.1	Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)	316.715.324.593	125.981.162.957	29.306.368.558	23,26	2 Pengadaan Barang/Jasa belum sepenuhnya dilakukan secara elektronik (SPSE), sehingga nilainya tidak tercatat pada SPSE.
I.2	Belanja Hibah Barang/Jasa	-	-	-	-	Belanja BOS dicatatkan pada SIRUP, sementara
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	-	-	-	-	3 pengadaannya dilakukan melalui SIPLAH, sehingga realisasinya tidak tercatat pada SPSE.
						Keterbatasan PDN dalam memenuhi kebutuhan barang SKPD.
II	**BELANJA MODAL**	**69.743.686.777**	**70.308.729.164**	**55.062.211.667**	78,31	4
II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.576.288.033	17.247.094.572	8.773.979.303	50,87	
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.771.313.480	36.103.062.480	27.795.542.461	76,99	
II.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.966.602.364	15.619.908.012	18.292.889.903	117,11	**STRATEGI PENYELESAIAN:**
II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.429.482.900	1.338.664.100	199.800.000	14,93	1 Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan secara elektronik (SPSE). Jika dilaksanakan di luar SPSE (Belanja Langsung) harus dicatatkan pada SPSE.
Total (I+II)		**386.459.011.370**	**196.289.892.121**	**84.368.580.225**	**42,98**	2 Memprioritaskan PDN dalam Pengadaan Barang/Jasa. 3 Belanja BOS tidak perlu dicatatkan pada SIRUP.

Bukittinggi, Agustus 2025

Wali Kota Bukittinggi



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SKPD PELAKSANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	839.844.690,00	339.584.157,84	40,43%
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	707.123.300,00	485.666.200,00	68,68%
		Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	Dinas Sosial	110.221.500,00	102.713.600,00	93,19%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	18.857.680,00	15.770.620,00	83,63%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Balai Benih Ikan Hias	9.988.600,00	9.058.400,00	90,69%
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	21.132.000,00	17.929.200,00	84,84%
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	UPTD Balai Benih Ikan Hias	314.527.600,00	305.071.020,00	96,99%
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	3.043.808.500,00	1.324.067.570,00	43,50%
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	UPTD Rumah Potong Hewan	253.028.195,00	231.678.999,00	91,56%
		Program Pengawasan Kemanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	49.268.300,00	39.145.300,00	79,45%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Rumah Potong Hewan	39.290.000,00	35.839.626,00	91,22%
		Program Penanganan Bencana	Dinasi Sosial	392.394.800,00	283.548.450,00	72,26%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	8.365.509.331,00	8.025.042.422,00	95,93%
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian dan Pangan	71.308.700,00	55.717.450,00	78,14%
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	2.246.426.100,00	2.053.874.720,00	91,43%
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	393.586.800,00	192.050.707,00	48,80%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	8.363.509.331,00	8.025.042.422,00	95,95%
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian dan Pangan	314.527.600,00	305.071.020,00	96,99%
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	413.049.800,00	317.738.903,00	76,93%
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan	154.787.600,00	147.708.400,00	95,43%
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan					
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	3.596.402.819,00	3.483.327.578,00	96,86%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Keuangan	15.080.166.473,00	10.192.238.775,00	67,59%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	1.724.827.900,00	1.495.396.377,00	86,70%
		Program Perlindungan Perempuan	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	67.738.500,00	66.636.100,00	98,37%
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	8.803.800,00	8.458.900,00	96,08%
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	233.335.900,00	194.560.305,00	83,38%

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SKPD PELAKSANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	184.186.300,00	154.170.609,00	83,70%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	114.273.980.144,00	113.526.397.208,00	99,35%
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan	1.647.482.400,00	1.290.570.320,00	78,34%
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.339.807.550,00	1.297.840.390,00	96,87%
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	3.043.808.500,00	1.324.067.570,00	43,50%
		Program Perlindungan Khusus Anak	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	233.335.900,00	194.560.305,00	83,38%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	5.149.676.800,00	4.955.192.891,00	96,22%
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	67.738.500,00	66.636.100,00	98,37%
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	2.665.666.300,00	2.467.118.164,00	92,55%
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	882.619.470,00	632.900.960,00	71,71%
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan	13.111.522.022,00	11.359.483.992,00	86,64%
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	450.715.100,00	364.811.476,00	80,94%
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44.156.322.500,00	29.707.806.080,34	67,28%
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.616.145.300,00	1.338.686.788,87	82,83%
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.822.359.230,00	1.728.120.151,00	94,83%
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.768.751.400,00	5.505.871.676,24	95,44%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.503.499.074,00	3.338.422.751,00	95,29%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.845.900,00	35.861.106,00	71,94%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.504.838.344,00	8.738.127.198,67	91,93%
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.030.419.300,00	783.415.121,12	76,03%

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SKPD PELAKSANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.141.735.162,00	5.749.423.328,00	93,61%
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.085.090.450,00	1.856.664.398,00	89,04%
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	48.130.700,00	38.525.548,00	80,04%
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan	878.939.200,00	750.700.811,00	85,41%
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.941.446.800,00	2.604.830.095,00	88,56%
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	75.452.200,00	60.749.880,00	80,51%
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	268.410.000,00	67.153.841,00	25,02%
		Program Peguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.188.656.100,00	1.057.319.796,00	88,95%
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	341.567.400,00	254.549.222,00	74,52%
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.309.795.800,00	2.060.424.527,00	89,20%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	6.367.794.345,00	6.251.936.347,00	98,18%
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	14.008.401.500,00	13.802.381.984,00	98,53%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.191.104.250,00	4.078.279.624,00	97,31%
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.721.007.174,00	14.290.957.646,00	97,08%
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penangaanan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.756.116.400,00	1.447.932.196,00	82,45%
	Jumlah			**314.659.833.334,00**	**280.934.827.323,08**	**89,28%**

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRTAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	2	3	4			5
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Program Perlindungan Perempuan	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	67.738.500,00	66.636.100,00	98,37%
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	8.803.800,00	8.458.900,00	96,08%
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	233.335.900,00	194.560.305,00	83,38%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	184.186.300,00	154.170.609,00	83,70%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	114.273.980.144,00	113.526.397.208,00	99,35%
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.339.807.550,00	1.297.840.390,00	96,87%
		Program Perlidungan Khusus Anak	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	233.335.900,00	194.560.305,00	83,38%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	5.149.676.800,00	4.955.192.891,00	96,22%
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	67.738.500,00	66.636.100,00	98,37%
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	2.665.666.300,00	2.467.118.164,00	92,55%
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	882.619.470,00	632.900.960,00	71,71%
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	450.715.100,00	364.811.476,00	80,94%
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44.156.322.500,00	29.707.806.080,34	67,28%
2	Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaik Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial	110.221.500,00	102.713.600,00	93,19%
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	268.410.000,00	67.153.841,00	25,02%
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	707.123.300,00	485.666.200,00	68,68%
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.188.656.100,00	1.057.319.796,00	88,95%
		Program Perlindungan dan Jamian Sosial	Dinas Sosial	3.043.808.500,00	1.324.067.570,00	43,50%
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	14.008.401.500,00	13.802.381.984,00	98,53%
		Program Penanganan Bencama	Dinas Sosial	392.394.800,00	283.548.450,00	72,26%
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	2.246.426.100,00	2.053.874.720,00	91,43%
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.721.007.174,00	14.290.957.646,00	97,08%
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.756.116.400,00	1.447.932.196,00	82,45%
3	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	839.844.690,00	339.584.157,84	40,43%
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	21.132.000,00	17.929.200,00	84,84%
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	UPTD Balai Benih Ikan Hias	314.527.600,00	305.071.020,00	96,99%
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	UPTD Rumah Potong Hewan	253.028.195,00	231.678.999,00	91,56%
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	49.268.300,00	39.145.300,00	79,45%
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian dan Pangan	71.308.700,00	55.717.450,00	78,14%
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	393.586.800,00	192.050.707,00	48,80%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	8.363.509.331,00	8.025.042.422,00	95,95%
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian dan Pangan	314.527.600,00	305.071.020,00	96,99%
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	413.049.800,00	317.738.903,00	76,93%
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan	154.787.600,00	147.708.400,00	95,43%
4	Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital					
5	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisataan	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	75.452.200,00	60.749.880,00	80,51%
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.616.145.300,00	1.338.686.788,87	82,83%

NO	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	2	3	4			5
	Berkeadilan dan Berkelanjutan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.822.359.230,00	1.728.120.151,00	94,83%
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.768.751.400,00	5.505.871.676,24	95,44%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.503.499.074,00	3.338.422.751,00	95,29%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.845.900,00	35.861.106,00	71,94%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.504.838.344,00	8.738.127.198,67	91,93%
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.030.419.300,00	783.415.121,12	76,03%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.141.735.162,00	5.749.423.328,00	93,61%
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	878.939.200,00	750.700.811,00	85,41%
7	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	18.857.680,00	15.770.620,00	83,63%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Balai Benih Ikan Hias	9.988.600,00	9.058.400,00	90,69%
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembanngunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	341.567.400,00	254.549.222,00	74,52%
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaiand an Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.309.795.800,00	2.060.424.527,00	89,20%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Keuangan	15.080.166.473,00	10.192.238.775,00	67,59%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	1.724.827.900,00	1.495.396.377,00	86,70%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	6.367.794.345,00	6.251.936.347,00	98,18%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Rumah Potong Hewan	39.290.000,00	35.839.626,00	91,22%
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan	1.647.482.400,00	1.290.570.320,00	78,34%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	3.596.402.819,00	3.483.327.578,00	96,86%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian dan Pangan	8.365.509.331,00	8.025.042.422,00	95,93%
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.085.090.450,00	1.856.664.398,00	89,04%
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	48.130.700,00	38.525.548,00	80,04%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.191.104.250,00	4.078.279.624,00	97,31%
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.941.446.800,00	2.604.830.095,00	88,56%
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan	13.111.522.022,00	11.359.483.992,00	86,64%
Jumlah				**311.616.024.834,00**	**279.610.759.753,08**	**89,73%**

Bukittinggi, Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

KOTA BUKITTINGGI

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING TA 2024

No		Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota			
	1	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan)			
		Belanja Operasi	247.299.502,00	218.169.690,00	88,22%
		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal	15.200.000,00	14.900.000,00	98,03%
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	2	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Rasimah Ahmad)			
		Belanja Operasi	178.888.000,00	112.006.700,00	62,61%
		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	3	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Guguk Panjang)			
		Belanja Operasi	237.648.000,00	209.885.100,00	88,32%
		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	4	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Mandiangin)			
		Belanja Operasi	175.440.000,00	129.001.200,00	73,53%
		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	5	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tigobaleh)			
		Belanja Operasi	243.050.000,00	92.703.650,00	38,14%
		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	6	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Nilamsari)			

		Belanja Operasi	137.938.000,00	97.225.100,00	70,48%
		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	7	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Plus Mandiangin)			
		Belanja Operasi	136.182.000,00	79.626.150,00	58,47%
		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	8	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Gulai Bancah)			
		Belanja Operasi	104.734.000,00	59.964.575,00	57,25%
		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
2	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
	1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)			
		Belanja Operasi	288.000.000,00	263.088.000,00	91,35%
		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)			
		Belanja Operasi	436.291.800,00	260.826.060,00	59,78%
		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal	2.899.900,00	2.899.900,00	100,00%
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	3	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			
		Belanja Operasi	91.663.900,00	83.389.000,00	90,97%
		Belanja Barang dan Jasa			
		Belanja Hibah			
		Belanja Bantuan Sosial			
		Belanja Modal			
		Belanja Gedung dan Bangunan			

		Belanja Peralatan dan Mesin			
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial	49.845.900,00	35.861.106,00	71,94%
		Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			
	2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial	81.845.400,00	39.880.639,00	48,73%
		Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin	314.594.000,00	188.742.400,00	60,00%
4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial	1.456.163.800,00	783.875.223,00	53,83%
		Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin	26.913.400,00	26.862.000,00	99,81%
5	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			
		Belanja Operasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial	1.488.020.000,00	372.924.626,00	25,06%
		Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Peralatan dan Mesin			

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	**Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota**	**16.459.725.300,00**	**13.350.448.321,63**	**81,11**
1	**Rehabilitasi Sosial**	**1.625.364.900,00**	**620.742.950,00**	**38,19**
1.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	241.747.300,00	100.432.050,00	41,54
Belanja Operasi		-	-	-
Belanja Modal		-	-	-
2.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.297.541.800,00	455.064.500,00	35,07
Belanja Operasi		1.282.541.800,00	440.079.500,00	34,31
Belanja Modal		15.000.000,00	14.985.000,00	99,90
3.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.780.400,00	48.191.900,00	94,90
Belanja Operasi		50.780.400,00	48.191.900,00	94,90
Belanja Modal		-	-	-
4.	Pelayanan Dukungan Psikososial	35.295.400,00	17.054.500,00	48,32
Belanja Operasi		-	-	-
Belanja Modal		-	-	-
2	**Pemeliharaan anak-anak terlantar**	**1.504.365.000,00**	**814.135.963,00**	**54,12**
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	19.099.100,00	7.177.200,00	37,58
Belanja Operasi		19.099.100,00	7.177.200,00	37,58
Belanja Modal		-	-	-
2.	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	29.102.100,00	23.083.540,00	79,32
Belanja Operasi		29.102.100,00	23.083.540,00	79,32
Belanja Modal		-	-	-
3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.456.163.800,00	783.875.223,00	53,83
Belanja Operasi		1.456.163.800,00	783.875.223,00	53,83
Belanja Modal		-	-	-
3	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**12.313.915.700,00**	**11.192.281.723,63**	**90,89**
1	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	-	-	-
Belanja Operasi		-	-	-
Belanja Modal		-	-	-
2	Pengadaan Perlengkapan Siswa (SD)	175.001.900,00	52.939.889,00	30,25
Belanja Operasi		175.001.900,00	52.939.889,00	30,25
Belanja Modal		-	-	-
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	272.000.000,00	45.000.000,00	16,54
Belanja Operasi		272.000.000,00	45.000.000,00	16,54
Belanja Modal				-
4	Pengadaan Perlengkapan Siswa (SMP)	650.078.000,00	47.085.694,00	7,24
Belanja Operasi		650.078.000,00	47.085.694,00	7,24
Belanja Modal		-	-	-
5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	129.000.000,00	44.500.000,00	34,50
Belanja Operasi		129.000.000,00	44.500.000,00	34,50
Belanja Modal				-
6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	5.968.960.000,00	5.950.323.262,00	99,69
Belanja Operasi		5.968.960.000,00	5.950.323.262,00	99,69
Belanja Modal		-	-	-

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	7 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.348.790.000,00	1.333.783.232,00	98,89
	Belanja Operasi	1.348.790.000,00	1.333.783.232,00	98,89
	Belanja Modal	-	-	-
	8 Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.195.610.000,00	2.501.582.747,00	113,94
	Belanja Operasi	2.195.610.000,00	2.501.582.747,00	113,94
	Belanja Modal	-	-	-
	9 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	133.497.700,00	106.443.304,00	79,73
	Belanja Operasi	133.497.700,00	106.443.304,00	79,73
	Belanja Modal			-
	10 Pembangunan Sarana dan Prasarana dan utilitas Sekolah (SD)	774.172.700,00	488.334.949,40	63,08
	Belanja Operasi	13.172.700,00	12.947.700,00	98,29
	Belanja Modal	761.000.000,00	475.387.249,40	62,47
	11 Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	762.755.900,00	499.571.193,36	65,50
	Belanja Operasi	17.021.900,00	16.902.900,00	99,30
	Belanja Modal	745.734.000,00	482.668.293,36	64,72
	12 Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah (SMP)	305.049.500,00	212.217.452,87	69,57
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Modal	305.049.500,00	212.217.452,87	69,57
	13 Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	**1.016.079.700,00**	**723.287.685,00**	**71,18**
	1 Penyediaan Permakanan	207.625.700,00	174.617.950,00	84,10
	Belanja Operasi	207.625.700,00	174.617.950,00	84,10
	Belanja Modal	-	-	-
	2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	296.088.200,00	108.291.578,00	36,57
	Belanja Operasi	296.088.200,00	108.291.578,00	36,57
	Belanja Modal	-	-	-
	3 Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atas standart pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	154.787.600,00	147.708.400,00	95,43
	Belanja Operasi	154.787.600,00	147.708.400,00	95,43
	Belanja Modal	-	-	-
	4 Penyediaan Makanan	115.880.000,00	71.786.000,00	61,95
	Belanja Operasi	115.880.000,00	71.786.000,00	61,95
	Belanja Modal	-	-	-
	4 Penyediaan Sandang	148.198.800,00	137.617.458,00	92,86
	Belanja Operasi	3.200.000,00	-	-
	Belanja Modal	144.998.800,00	137.617.458,00	94,91
	5 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	72.499.400,00	68.808.729,00	94,91
	Belanja Operasi	72.499.400,00	68.808.729,00	94,91
	Belanja Modal	-	-	-
	6 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	21.000.000,00	14.457.570,00	68,85
	Belanja Operasi	21.000.000,00	14.457.570,00	68,85
	Belanja Modal	-	-	-
	5 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
2	**Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan**	**774.561.300,00**	**448.786.800,00**	57,94
	1 Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	**601.139.100,00**	**305.910.447,00**	50,89
	1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.803.800,00	8.458.900,00	96,08
	Belanja Operasi	8.803.800,00	8.458.900,00	96,08

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Belanja Modal	-	-	-
	2 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50.152.400,00	42.142.100,00	84,03
	Belanja Operasi	50.152.400,00	42.142.100,00	84,03
	Belanja Modal	-	-	-
	3 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	234.087.400,00	35.182.307,00	15,03
	Belanja Operasi	234.087.400,00	35.182.307,00	15,03
	Belanja Modal	-	-	-
	4 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	206.146.000,00	200.706.436,00	97,36
	Belanja Operasi	206.146.000,00	200.706.436,00	97,36
	Belanja Modal	-	-	-
	5 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	21.017.600,00	9.938.400,00	47,29
	Belanja Operasi	21.017.600,00	9.938.400,00	47,29
	Belanja Modal	-	-	-
	6 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	80.931.900,00	9.482.304,00	11,72
	Belanja Operasi	15.137.900,00	9.482.304,00	62,64
	Belanja Modal	65.794.000,00	-	-
	7 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
2	**Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**173.422.200,00**	**142.876.353,00**	**82,39**
	1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	160.046.200,00	142.876.353,00	89,27
	Belanja Operasi	152.874.200,00	136.646.353,00	89,38
	Belanja Modal	7.172.000,00	6.230.000,00	86,87
	2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	4. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4.187.600,00	-	-
	Belanja Operasi	4.187.600,00	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.188.400,00	-	-
	Belanja Operasi	9.188.400,00	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	6. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
3	**Menyusun Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)**	**14.886.073.458,00**	**17.211.063.312,00**	**115,62**
1	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**11.647.338.458,00**	**11.144.925.910,00**	**95,69**
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.908.400,00	19.269.801,00	66,66
	Belanja Operasi	28.908.400,00	19.269.801,00	66,66
	Belanja Modal	-	-	-
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	21.760.000,00	21.400.000,00	98,35
	Belanja Operasi	21.760.000,00	21.400.000,00	98,35
	Belanja Modal	-	-	-
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35.005.890,00	26.305.400,00	75,15
	Belanja Operasi	35.005.890,00	26.305.400,00	75,15
	Belanja Modal	-	-	-
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	56.875.000,00	39.133.000,00	68,81
	Belanja Operasi	56.875.000,00	39.133.000,00	68,81
	Belanja Modal	-	-	-

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.647.500,00	13.112.000,00	89,52
	Belanja Operasi	14.647.500,00	13.112.000,00	89,52
	Belanja Modal	-	-	-
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	20.000.000,00	19.573.950,00	97,87
	Belanja Operasi	20.000.000,00	19.573.950,00	97,87
	Belanja Modal	-	-	-
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.000.000,00	14.069.868,00	46,90
	Belanja Operasi	30.000.000,00	14.069.868,00	46,90
	Belanja Modal	-	-	-
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	59.999.917,00	45.816.050,00	76,36
	Belanja Operasi	41.999.917,00	28.271.800,00	67,31
	Belanja Modal	18.000.000,00	17.544.250,00	97,47
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	252.669.600,00	249.001.750,00	98,55
	Belanja Operasi	252.669.600,00	249.001.750,00	98,55
	Belanja Modal	-	-	-
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.340.700,00	14.643.255,00	75,71
	Belanja Operasi	19.340.700,00	14.643.255,00	75,71
	Belanja Modal	-	-	-
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	461.816.100,00	453.507.250,00	98,20
	Belanja Operasi	461.816.100,00	453.507.250,00	98,20
	Belanja Modal	-	-	-
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	325.336.900,00	244.643.032,00	75,20
	Belanja Operasi	302.664.900,00	244.643.032,00	80,83
	Belanja Modal	22.672.000,00	-	-
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.121.541.600,00	1.117.213.900,00	99,61
	Belanja Operasi	221.591.600,00	217.263.900,00	98,05
	Belanja Modal	899.950.000,00	899.950.000,00	100,00
	14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	43.212.600,00	40.433.548,00	93,57
	Belanja Operasi	43.212.600,00	40.433.548,00	93,57
	Belanja Modal	-	-	-
	15. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	764.439.685,00	627.826.806,00	82,13
	Belanja Operasi	764.439.685,00	627.826.806,00	82,13
	Belanja Modal	-	-	-
	16. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8.259.207.866,00	8.086.963.800,00	97,91
	Belanja Operasi	8.259.207.866,00	8.086.963.800,00	97,91
	Belanja Modal	-	-	-
	17 Pemberian Layanan Kedaruratan	82.710.000,00	67.145.500,00	81,18
	Belanja Operasi	82.710.000,00	67.145.500,00	81,18
	Belanja Modal	-	-	-
	18 Pemberian Layanan Rujukan	49.866.700,00	44.867.000,00	89,97
	Belanja Operasi	49.866.700,00	44.867.000,00	89,97
	Belanja Modal	-	-	-
2	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**33.800.000,00**	**33.361.650,00**	**98,70**
	1 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	33.800.000,00	33.361.650,00	98,70
	Belanja Operasi	33.800.000,00	33.361.650,00	98,70
	Belanja Modal	-	-	-
	2 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
3	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**3.204.935.000,00**	**2.962.483.282,00**	**92,44**
	1 Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta design dan tekhnologi	3.204.935.000,00	2.962.483.282,00	92,44

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Belanja Operasi	3.105.451.600,00	2.962.483.282,00	95,40
	Belanja Modal	99.483.400,00	-	-
4	**Memfasilitasi Penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat**	**3.140.649.700,00**	**3.070.292.470,00**	**97,76**
	1 Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.140.649.700,00	3.070.292.470,00	97,76
	Belanja Operasi	3.140.649.700,00	3.070.292.470,00	97,76
	Belanja Modal	-	-	-
5	**Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali**			-
	Belanja Operasi			-
	Belanja Modal	-	-	-
	Total Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	**35.261.009.758,00**	**34.080.590.903,63**	**96,65**

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI E-PURCHASING

TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Total nilai pengadaan barang/jasa (Rp)	Realisasi pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	1.249.792.564	998.011.250	79,85%	
2	Inspektorat Daerah	383.245.300	215.639.263	56,27%	
3	Sekretariat DPRD	3.005.411.650	2.040.559.350	67,90%	
4	Badan Keuangan	2.112.614.422	506.272.850	23,96%	
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	171.966.400	58.098.420	33,78%	
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	810.486.580	276.811.874	34,15%	
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	564.807.612	455.838.400	80,71%	
8	Dinas Lingkungan Hidup	2.243.607.902	1.700.206.250	75,78%	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	749.281.433	422.750.561	56,42%	
10	Dinas Perhubungan	906.858.212	774.810.000	85,44%	
68	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	47.188.551	45.650.000	96,74%	
69	UPTD Terminal dan Parkir	469.074.061	464.310.000	98,98%	
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.811.545.950	2.125.713.222	75,61%	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	682.335.100	567.060.350	83,11%	
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	872.896.000	389.836.120	44,66%	
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	505.774.000	311.134.064	61,52%	
15	Dinas Pariwisata	8.884.157.190	5.605.072.025	63,09%	
16	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	159.309.100	126.215.034	79,23%	
17	Dinas Pertanian dan Pangan	297.438.750	210.021.925	70,61%	
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	205.053.900	83.468.000	40,71%	
19	Satuan Polisi Pamong Praja	216.134.900	196.418.400	90,88%	
20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	480.361.700	401.658.400	83,62%	
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.938.091.912	13.066.698.753	93,75%	
65	UPTD Penerangan Fasilitas Umum	645.735.200	624.211.000	96,67%	
66	UPTD Perlengkapan dan Peralatan	492.000	0	0,00%	
22	Dinas Sosial	5.372.866.250	697.875.187	12,99%	
23	Dinas Kesehatan	25.886.569.727	12.822.115.721	49,53%	
55	UPTD Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad	467.869.504	408.793.947	87,37%	
56	UPTD Puskesmas Guguk Panjang	247.448.203	395.497.026	159,83%	
57	UPTD Puskesmas Nilam Sari	282.882.460	241.992.166	85,55%	
58	UPTD Puskesmas Mandiangin	434.157.665	281.778.643	64,90%	
59	UPTD Puskesmas Gulai Bancah	285.990.654	229.523.017	80,26%	
60	UPTD Puskesmas Tigo Baleh	580.388.549	384.435.360	66,24%	
61	UPTD Puskesmas Plus Mandiangin	284.538.485	197.723.311	69,49%	
62	UPTD Instalasi Farmasi	446.088.325	292.839.584	65,65%	
63	UPTD Laboratorium Kesehatan	552.642.600	339.719.005	61,47%	
64	Rumah Sakit Umum Daerah	16.166.537.120	4.701.316.115	29,08%	
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.643.613.600	7.810.621.953	61,78%	
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	990.020.250	684.430.704	69,13%	
67	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	106.900.000	51.623.800	48,29%	
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	820.524.750	507.602.400	61,86%	
70	UPTD Kemetrologian	83.421.800	40.372.600	48,40%	
71	UPTD Kerajinan Industri	15.385.250	3.948.050	25,66%	
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	111.568.788	107.929.300	96,74%	
28	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	1.694.898.796	654.828.764	38,64%	
31	Kelurahan Koto Salayan	43.251.300	22.200.000	51,33%	
32	Kelurahan Campago Ipuh	57.600.000	57.600.000	100,00%	
33	Kelurahan Manggis Ganting	66.881.000	38.591.400	57,70%	
34	Kelurahan Pulai Anak Air	434.606.100	179.415.000	41,28%	
35	Kelurahan Puhun Pintu Kabun	138.693.800	68.130.000	49,12%	
36	Kelurahan Puhun Tembok	157.073.300	54.775.500	34,87%	
37	Kelurahan Kubu Gulai Bancah	122.982.600	45.600.000	37,08%	
38	Kelurahan Campago Guguk Bulek	114.261.600	50.400.000	44,11%	
39	Kelurahan Garegeh	127.496.350	19.800.000	15,53%	
29	Kecamatan Guguk Panjang	2.558.277.734	880.913.028	34,43%	
40	Kelurahan Kayu Kubu	115.245.900	36.135.400	31,36%	
41	Kelurahan Pakan Kurai	182.942.300	59.707.490	32,64%	
42	Kelurahan Benteng Pasar Atas	175.726.600	56.720.000	32,28%	
43	Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	125.828.800	30.300.000	24,08%	
44	Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	501.040.300	184.814.000	36,89%	
45	Kelurahan Tarok Dipo	350.788.822	113.300.000	32,30%	
46	Kelurahan Bukit Apit Puhun	230.948.799	56.836.200	24,61%	
30	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	983.017.800	803.620.633	81,75%	
47	Kelurahan Belakang Balok	40.083.000	32.939.030	82,18%	

48	Kelurahan Birugo	61.568.400	46.200.000	75,04%	
49	Kelurahan Aur Kuning	47.671.300	33.600.000	70,48%	
50	Kelurahan Sapiran	58.811.700	37.072.900	63,04%	
51	Kelurahan Kubu Tanjung	32.554.000	21.600.000	66,35%	
52	Kelurahan Pakan Labuah	50.811.900	33.000.000	64,95%	
53	Kelurahan Ladang Cakiah	56.506.300	39.413.400	69,75%	
54	Kelurahan Parit Antang	11.895.600	29.948.257	251,76%	
TOTAL		**92.312.528.272**	**55.502.232.200**	**60,12%**	

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

KOTA BUKITTINGGI

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			Keterangan
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								

Bukittinggi, Agustus 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
REKAPITULASI REALISASI BELANJA HIBAH UNTUK PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	INSATANSI	ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH TPS	KETERANGAN
1	2	2	3	4	5
1	KOMISI PEMILIHAN UMUM	9.823.152.850,00	9.823.152.850,00	206	-
2	BADAN PENGAWAS PEMILU	3.167.409.000,00	3.167.409.000,00	206	-
	Jumlah	**12.990.561.850,00**	**12.990.561.850,00**		-

Bukittinggi, Agustus 2025
WALI KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS